GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan yang adil dan merata di wilayah Provinsi Banten, diperlukan sinergitas, kolaborasi, dan kebersamaan dalam perencanaan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat;

b. bahwa untuk mendukung Asta Cita Pemerintah, rencana pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun dalam meraih keberhasilan Pembangunan menuju Indonesia Emas;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun, diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Provinsi yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Provinsi Banten.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi Daerah yang diinginkan atau terwujud pada akhir periode perencanaan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
18. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
20. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
22. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.

23. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

BAB II
RPJMD TAHUN 2025-2029
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RTRWP.

(3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
   a. Renstra Perangkat Daerah;
   b. RKPD; dan
   c. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota.

Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
   c. bab III memuat Visi, Misi, dan Program Prioritas pembangunan Daerah;
   d. bab IV memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. bab V memuat penutup.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Agustus 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: (1-88/2025)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RTRWP.

Visi pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 "Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi". Merupakan kondisi yang dicita-citakan di masa 5 (lima) tahun mendatang dengan mengandung arti yaitu:

1. Perekonomian Provinsi Banten yang semakin kompetitif melalui basis sektor kreatif, unggulan, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan peningkatan nilai tambah tinggi yang didorong dengan daya saing berbasis riset, inovasi, dan hilirisasi di berbagai sektor unggulan dan potensial.
2. Sumber daya manusia yang unggul didukung oleh aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan hal lainnya untuk menciptakan masyarakat di Provinsi Banten yang unggul, berdaya saing, dan berkeahlian tinggi sebagai modal dasar bersaing secara global dengan berprinsip mengedepankan keadilan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat (*no one left behind*).
3. Penciptaan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan.
4. Pemerintahan yang jujur, transparan, dan akuntabel tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Untuk mewujudkan visi Provinsi Banten, dirumuskan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh.
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 112

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan 2025-2030 untuk mewujudkan Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari rencana pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045. Penjabaran RPJMD dilakukan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial diselaraskan dengan arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat modal dasar pembangunan yang berkelanjutan, menuju Banten sebagai pusat perekonomian nasional dan internasional serta pusat pertumbuhan wilayah. Penyelarasan juga dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politis, *bottom-up*, dan *top-down*. Selain itu, penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, yang merupakan suatu kewajiban untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah Provinsi Banten juga tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah, termasuk Provinsi Banten untuk mendukungan pencapaian Asta Cita Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2045. Prioritas RPJMN diwujudkan melalui Trisula Pembangunan Nasional pada Tahun 2029 yang ditekankan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional dan daerah, Provinsi Banten memiliki modalitas sejarah sebagai Kerajaan Islam Terkemuka di Nusantara pada abad Ke-17 dan Ke-18; modalitas geostrategis pada posisi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I) untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia, gerbang konektivitas Jawa-Sumatera, dan penyangga Daerah Khusus Jakarta sebagai episentrum ekonomi Indonesia; modalitas demografis dimana usia penduduk produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif; modalitas energi sebagai pemasok 30 persen kebutuhan listrik transmisi Jawa-Bali; modalitas industri yang menjadi lokasi aglomerasi industri strategis nasional; dan modalitas sumber daya alam dan pariwisata.

Di samping modalitas pembangunan, saat ini Banten masih menghadapi permasalahan dan tantangan diantara ketidakmerataan pembangunan antara utara dan selatan, aksesibilitas hidup layak, aksesibilitas sarana sumber daya manusia, dan aksesibilitas sumber daya ekonomi. Berdasarkan data, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten dari 74,41 pada Tahun 2020 menjadi 76,35 pada Tahun 2024 (meningkat 1,04 poin); Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang tumbuh menjadi 4,79 persen pada Tahun 2024 yang mana sebelumnya pada Tahun 2020 saat kondisi pandemi *Covid-19* berada di -3,39 persen; Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) yang meningkat dari Rp625,89 triliun pada Tahun 2020 menjadi Rp873,63 triliun pada Tahun 2024 (meningkat sebesar Rp247,74 triliun); dan PDRB per kapita yang juga meningkat dari Rp52,73 juta pada Tahun 2020 menjadi Rp70,28 juta pada Tahun 2024 (meningkat sebesar Rp17,55 juta). Sementara itu untuk kondisi kemiskinan di Banten tetap bergerak menuju arah positif dari 5,92 persen pada Tahun 2020 menjadi 5,84 persen pada Tahun 2024 (turun sebesar 0,08 persen); pengangguran dapat diturunkan dari posisi 10,64 persen pada Tahun 2020 menjadi 6,68 persen pada Tahun 2024 (turun sebesar 3,96 persen); dan kesenjangan pendapatan atau ketimpangan distribusi pendapatan yang diproksikan melalui rasio gini yang sebelumnya pada Tahun 2020 sebesar 0,363 menjadi 0,353 pada Tahun 2024 (menurun sebesar 0,010).

Dokumen RPJMD akan menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah. Cita-cita mewujudkan Visi Kepala Daerah sebagai Banten Maju, Adil, Merata Tidak Korupsi diproyeksikan di Tahun 2029 dengan terciptanya pemerintah yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 94,52 persen. Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi yang akan terus tumbuh menjadi 7,90 persen; pendapatan per kapita sekitar Rp106,40 juta dengan kontribusi PDRB provinsi sebesar 3,80 persen, dengan kondisi tersebut diharapkan dapat menurunkan kemiskinan sekitar 2,42-3,42 persen dan ketimpangan pendapatan antarpenduduk dengan proksi rasio gini sebesar 0,326-0,330. Selanjutnya yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Provinsi Banten bertekad untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yang diukur berdasarkan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,59 dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 6,39-6,82 persen. Penurunan pengangguran ini didukung dengan kondisi pembangunan daerah yang semakin merata dan infrastruktur yang semakin berkualitas dengan indeks williamsons senilai 0,693 serta Provinsi Banten tetap berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berketahanan yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,93 dan menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 56,65 persen.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan beberapa peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109).

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Perencanaan daerah merupakan sebuah konsep perubahan dalam kerangka proses pembangunan menuju arah yang lebih baik dalam mengatasi berbagai tantangan, permasalahan, dan isu strategis daerah. RPJMD telah melalui proses sinergi dan harmonisasi terhadap analisis keterkaitan dengan perencanaan dari sektor lainnya seperti rencana pengelolaan sumber daya alam, rencana pengelolaan lingkungan strategis, rencana peningkatan daya saing daerah dan lainnya yaitu telah mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029, dokumen pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's/TPB) serta dokumen lainnya yang saling terkait dan berkesinambungan.

Telaah pembangunan nasional yang diatur dalam RPJPN dan RPJMN, RPJMD daerah lain serta dokumen perencanaan sektor lainnya diperlukan untuk mencapai koordinasi yang selaras dan sinergis antar berbagai pelaku pembangunan, waktu, ruang, dan fungsi pemerintah. Tujuan utama telaah ini adalah mendukung koordinasi yang harmonis antar berbagai tahapan perencanaan dan implementasi pembangunan, serta memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

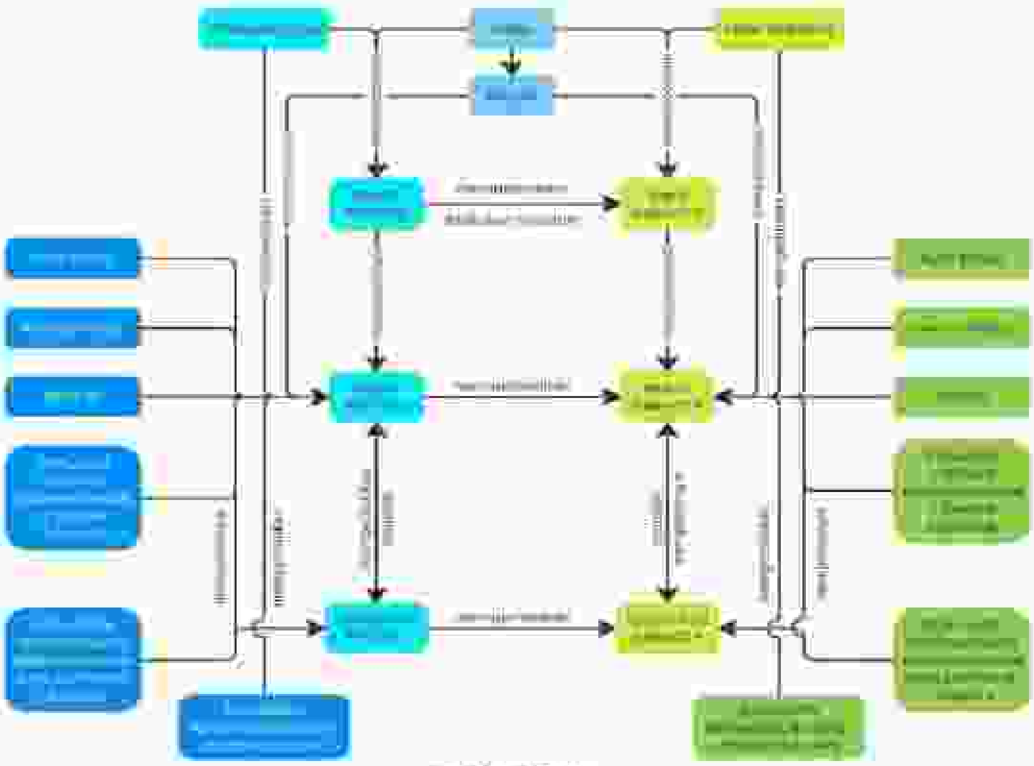

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA
(Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025)

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat landasan pembangunan dalam mencapai cita-cita besar Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagai upaya dalam mendukung pencapaian cita-cita Presiden selama Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah kerangka perencanaan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dalam rangka mencapai arah kebijakan dan strategi nasional mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan 2025-2030, merupakan bagian dari perencanaan antarwaktu, antarruang, dan antarkewenangan disusun mengacu dan berpedoman terhadap visi, misi, arah kebijakan dan straegi daerah dalam mencapai pelaksanaan tahap pertama pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Lebih jauh dari itu RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan terhadap arah kebijakan kewilayahan sebagai landasan pembangunan jangka menengah sebagaimana yang termuat dalam RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 serta menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi fondasi dasar pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Selanjutnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 ini juga akan menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalm menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya sebagai dokumen perencanaan operasional dalam mencapai tahap-tahap pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMD serta sebagai landasan Rencana Strategis (Renstra) bagi seluruh perangkat daerah di Provinsi Banten dalam menjalankan pembangunan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sesuai dengan urusan kewenangan pemerintahan masing-masing.

Selain itu, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 juga sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk dapat menyelaraskan dan mengintegrasikan muatan substansial seperti arah kebijakan, strategi, arah kebijakan kewilayahan, serta target-target sasaran pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian target nasional.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam suatu kerangka kerja pembangunan berharap memiliki kekuatan yang dapat memberikan arah pengembangan Banten 5 (lima) tahun ke depan melalui implementasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, perekonomian, pengelolaan lingkungan dan manajemen pengelolaan pemerintahan. Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1.4.1 MAKSUD

RPJMD Tahun 2025-2029 ini ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

- Menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan 2025-2030 dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RTRW Provinsi serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya;
- Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan harmonis dalam kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional untuk masa periode 2025-2029 melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial;
- Sebagai arah pembangunan dan pedoman perangkat daerah serta stakeholder lainnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025-2029; dan
- Tolok ukur keberhasilan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4.2 TUJUAN

RPJMD Tahun 2025-2029 ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- Menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Banten;

- Menjadi acuan bagi pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Banten agar terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan; dan
- Menjadi acuan bagi stakeholder lainnya dengan segenap kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitasnya untuk mendukung cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri dari beberapa bab meliputi:

- **BAB I PENDAHULUAN**
  Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**
  Memuat penjelasan terkait beberapa aspek pembahasan mencakup gambaran umum kondisi daerah yang memuat penjelasan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Selain itu juga berisikan gambaran keuangan daerah, yang memuat penjelasan realisasi APBD Tahun 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah Tahun 2026-2030. Selain itu penjabaran permasalahan dan isu strategis, yang memuat analisis kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi serta evaluasi terhadap yang harus diperhatikan dalam perencanaan mendatang yang dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- **BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
  Memuat cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah periode awal RPJMD. Lebih daripada itu, juga berisikan uraian strategi, arah kebijakan rumusan perencanaan serta program prioritas daerah dalam jangka mencapai cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur dengan efektif dan efisien.
- **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
  Memuat rumusan terhadap program perangkat daerah sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Selain itu menjelaskan uraian gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui indikator yang terukur.
- **BAB V PENUTUP**
  Memuat ringkasan atas pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029 ini memuat hasil analisis gambaran kondisi Provinsi Banten, analisis permasalahan pembangunan daerah, serta analisis terhadap isu strategis yang termuat dalam dokumen perencanaan yang ada saat ini, untuk kemudian dianalisis apakah isu tersebut akan menjadi isu krusial dan berdampak terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Aspek yang menjadi bahan pertimbangan analisis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi aspek kondisi geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Subbab ini akan menjelaskan berbagai informasi dasar di Provinsi Banten meliputi: a) posisi dan peran strategis; b) potensi sumber daya alam; c) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; d) ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; e) lingkungan hidup berkualitas; f) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; dan g) demografi.

2.1.1.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, Provinsi Banten berada pada posisi geostrategis sebagai bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang berperan sebagai jalur lalu lintas perdagangan nasional dan internasional.

Pada abad ke-15 Pelabuhan Banten merupakan pelabuhan yang berjaya sebagai pintu masuk utama bagi berbagai komoditas pangan strategis yang berasal dari mancanegara, terletak sekitar 10 km dari pusat Kota Serang, pelabuhan ini merupakan pelabuhan penting bagi perdagangan internasional. Saat itu, kapal-kapal asing yang berasal dari Persia, Arab, India, Tiongkok, Inggris, dan Portugis, hilir mudik dari dan menuju Pelabuhan Banten. Perkembangan pesat Pelabuhan Banten didukung oleh pertumbuhan industri di sekitarnya, mulai dari industri pengolahan logam, mesin, kimia, hingga minyak kelapa sawit.

Peran strategis lainnya dalam mengembalikan kejayaan Banten terlihat dari potensi besar yang dimiliki, seperti keberadaan dua puluh pelabuhan ikan di Provinsi Banten yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya guna mendorong kemajuan masyarakat. Sementara itu, sektor usaha lain seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten. Untuk mendukung dan mengembalikan masa kejayaan Banten, diperlukan pembangunan sarana pusat distribusi perdagangan, pelabuhan laut, sistem distribusi rantai pasok, serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat berkontribusi penuh terhadap pencapaian kemajuan Banten dan Indonesia.

2.1.1.2 POSISI, LUAS, DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Letak Provinsi Banten berada pada batas 105°01'11"- 106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"-07°01'01" Lintang Selatan. Secara geografis, Provinsi Banten terletak di bagian barat Pulau Jawa, di dekat Selat Sunda, dan berbatasan langsung dengan: a) batas utara yaitu Laut Jawa; b) batas selatan yaitu Samudera Hindia; c) batas barat yaitu Selat Sunda; dan d) batas timur yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Secara administrasi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada 9 November 2022, Provinsi Banten memiliki luas wilayah 9.352,767 km^2 yang terdiri dari 4 (empat) kota yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang, dengan rincian luas administrasi per kota/kabupaten terlihat pada tabel berikut.

TABEL II.1
LUAS WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN

NO	WILAYAH	IBUKOTA	LUAS WILAYAH		JUMLAH		
			(KM^2)	(PERSEN)	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
1	KAB. PANDEGLANG	PANDEGLANG	2.771,414	29,63	35	13	326
2	KAB. LEBAK	RANGKASBITUNG	3.312,180	35,41	28	5	340
3	KAB. TANGERANG	TIGARAKSA	1.027,757	10,99	29	28	246
4	KAB. SERANG	CIRUAS	1.469,908	15,72	29	0	326
5	KOTA TANGERANG	TANGERANG	178,347	1,91	13	104	-
6	KOTA CILEGON	PURWAKARTA	162,519	1,74	8	43	-
7	KOTA SERANG	SERANG	265,187	2,84	6	67	-
8	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	164,860	1,76	7	54	-
PROVINSI BANTEN		KOTA SERANG	9.352,767	100,00	155	314	1.238

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, Diolah Oleh Bappeda

2.1.1.3 KONDISI TOPOGRAFI

Secara umum morfologi permukaan Provinsi Banten dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan topografinya. Kelompok pertama yaitu morfologi dataran rendah berkisar 0-50 Meter di atas Permukaan Laut (MDPL) yang terdapat di bagian utara dan sebagian selatan. Kelompok kedua yaitu morfologi perbukitan bergelombang rendah hingga sedang dengan ketinggian berkisar 50-200 mdpl meliputi Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Kelompok ketiga yaitu dataran tinggi dan pegunungan pada bagian wilayah selatan, meliputi sebagian kecil Kabupaten Pandeglang dan daerah Lebak Tengah memiliki ketinggian berkisar 201-2.000 mdpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501-2.000 mdpl yang ditunjang oleh Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

TABEL II.2
KONDISI TOPOGRAFI DI PROVINSI BANTEN

NO	WILAYAH	IBUKOTA	KETINGGIAN (MDPL)	LEMBAH	LERENG/ PUNCAK	DATARAN
1	KAB. PANDEGLANG	PANDEGLANG	257,93	0	208	131
2	KAB. LEBAK	RANGKASBITUNG	25,21	4	166	155
3	KAB. TANGERANG	TIGARAKSA	38,01	-	-	274
4	KAB. SERANG	CIRUAS	28,17	8	88	230
5	KOTA TANGERANG	TANGERANG	19,42	0	0	104
6	KOTA CILEGON	PURWAKARTA	19,93	0	22	21
7	KOTA SERANG	SERANG	25,56	0	30	57
8	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	47,01	0	0	54
	PROVINSI BANTEN	KOTA SERANG		12	514	1.026

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024; Diolah Oleh Bappeda

Secara umum morfologi permukaan Provinsi Banten dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan topografinya. Kondisi topografi dengan dataran tinggi di Provinsi Banten terdapat di Kabupaten Pandeglang yakni dengan ketinggian lebih dari 250 mdpl. Sementara itu, dataran yang paling rendah terdapat di Kota Tangerang dengan ketinggian 19,42 mdpl. Topografi ini menunjukkan adanya perbedaan aktivitas dan kepadatan penduduk yang ada di masing-masing ketinggian. Semakin rendah dataran di kabupaten atau kota, semakin tinggi aktivitas heterogen dan kepadatan penduduk di dalamnya karena daerah mendekati daerah Jakarta. Sedangkan daerah dengan dataran tinggi memiliki kepadatan aktivitas yang lebih rendah dikarenakan daerah mendekati area pegunungan dan kehutanan.

2.1.1.4 KONDISI GEOLOGI

Berdasarkan stratigrafi, Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter di mana tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200–800 meter. Formasi batuan yang berada di Provinsi Banten antara lain Formasi Bojongmanik, Formasi Cipacar, Formasi Bojong dan Formasi Bayah. Selain empat formasi batuan di atas, terdapat formasi batuan lainnya, seperti Formasi Cicaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimapang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri, serta Formasi Cikotok. Batuan gunung api di Provinsi Banten dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Tersier (*Paleogen* dan *Neogen*) hingga Kuarter.

Struktur geologi di Provinsi Banten didominasi oleh struktur lipatan antiklin dan sinklin yang berarah barat-timur dan barat laut tenggara, sedangkan sesar didominasi oleh arah utara-selatan dan sebagian berarah barat laut-tenggara hingga barat daya-timur laut. Pola sesar yang berarah utara-selatan masih berpola sama dengan struktur sesar di zona sesar Sumatera (*pull apart basin*) yang terbentuk sejak Paleosen (*Eosen-Oligosen*) yang kemudian mengalami reaktivasi kembali pada zaman Neogen (*Mio-Pliosen*). Salah satu kegiatan gunung api yang masih aktif sampai sekarang di dekat Provinsi ini adalah Gunung Anak Krakatau di selat Sunda yang merupakan ancaman bencana letusan gunung api dan pernah menjadi penyebab terjadinya tsunami di daerah pantai bagian barat Provinsi Banten pada Tahun 1883.

Kondisi geologi di Provinsi Banten yang didominasi oleh kegiatan vulkanisme atau magmatik dapat berpotensi terhadap perekonomian daerah, di mana Provinsi Banten memiliki potensi sumber daya mineral seperti bijih sulfida yang mengandung Au dan Ag, batuan beku, mineral hasil alterasi seperti Zeolit, Kaolinit, Bentonit. Selain itu di Provinsi Banten terdapat batuan silisiklastik yang terdapat potensi batu bara dan batuan karbonat yang memiliki potensi batu gamping.

2.1.1.5 KONDISI KLIMATOLOGI

Iklim Provinsi Banten dipengaruhi oleh *La Nina* atau *El Nino* serta Angin Monsun. Saat musim hujan (Bulan November hingga Bulan Maret), cuaca di Provinsi Banten umumnya didominasi oleh angin barat (berhembus dari Sumatera, Samudera Hindia sebelah selatan India) yang juga bergabung dengan angin dari Asia yakni melewati Laut Cina Selatan. Sementara itu, cuaca pada Bulan Agustus didominasi oleh angin timur yang menyebabkan kekeringan (terlebih lagi apabila sedang berlangsung *El Nino*) di Provinsi Banten, terutama di wilayah bagian pantai utara. Adapun suhu mengalami peningkatan maksimal pada Tahun 2024 hingga 37,30°C.

TABEL II.3

KONDISI KLIMATOLOGI DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

UNSUR IKLIM	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
SUHU (°C)					
MINIMUM	21,20	21,20	22,50	19,40	19,70
RATA-RATA	26,30	26,30	26,80	27,20	27,36
MAKSIMUM	36,10	35,40	34,80	38,40	37,30
KELEMBAPAN (%)					
MINIMUM	37,00	40,00	51,00	22,50	40,00
RATA-RATA	74,00	75,00	84,40	80,42	82,00
MAKSIMUM	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00
KECEPATAN ANGIN (KNOT)					
MINIMUM	CALM	CALM	-	-	-
RATA-RATA	1,70	2,70	4,40	3,46	1,80
MAKSIMUM	7,25	14,00	13,00	20,00	12,80
TEKANAN UDARA (MBAR)					
MINIMUM	1.001,60	999,90	995,50	999,00	998,70
RATA-RATA	1.006,60	1.006,00	1.003,40	1.005,29	1.005,02
MAKSIMUM	1.012,80	1.013,70	1.008,00	1.011,60	1.013,00
JUMLAH CURAH HUJAN (MM)	1.627,80	2.077,80	261,90	1.766,60	2.664,70
JUMLAH HARI HUJAN	205,00	211,00	17,00	170	300,00
PENYINARAN MATAHARI (JAM)	51,25	4,95	1,60	4,74	3,80

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025; Diolah Oleh Bappeda

2.1.1.6 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Selain memiliki peran yang strategis, Provinsi Banten juga dikaruniai berbagai potensi sumber daya alam seperti sektor sumber daya air, sektor pertanian dan perikanan. Potensi ini dapat dioptimalkan secara berkelanjutan guna memajukan daerah dan bersaing dengan daerah lainnya.

Untuk potensi sumber daya alam pada sektor sumber daya air, berdasarkan pembagian daerah aliran sungai di Provinsi Banten terbagi menjadi 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Ujung Kulon, DAS Cibaliung-Cibareno, DAS Ciujung-Cidurian, DAS Rawadano, DAS Teluklada dan DAS Cisadane-Ciliwung. Pengelolaan sungai sebagai sumber daya air di Provinsi Banten telah ditetapkan 4 Wilayah Sungai (WS).

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, terdapat dua klasifikasi wilayah sungai yang ada di Provinsi Banten, yaitu WS Lintas Provinsi (Cidanau-Ciujung-Cidurian dan WS Ciliwung-Cisadane) yang dikelola Pemerintah Pusat dan WS Lintas Kabupaten/Kota (WS Ciliman-Cibungur dan WS Cibaliung-Cisawarna) yang dikelola oleh Provinsi Banten.

Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas total 1.750,93 km^2 memiliki potensi air sebesar 120 m^3/detik. Sedangkan WS Cibaliung-Cisawarna terdiri dari 75 DAS dengan luas total 2.613,37 km^2 mempunyai potensi air sekitar 122,34 m^3/detik. Wilayah Sungai Cibungur-Ciliman berada di lokasi Kabupaten Pandeglang terdiri dari 65 sungai dan yang berada di Kabupaten Lebak terdapat 5 sungai. Sementara itu untuk WS Cibaliung-Cisawarna di Kabupaten Lebak terdapat 34 sungai dan Kabupaten Pandeglang terdapat 31 sungai, di antaranya Sungai Ciujung, Sungai Ciliman, Sungai Cidanau dan Sungai Cibanten.

TABEL II.4
CAKUPAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI DI PROVINSI BANTEN

NAMA DAS	CAKUPAN WILAYAH
DAS UJUNG KULON	BAGIAN BARAT KABUPATEN PANDEGLANG (TAMAN NASIONAL UJUNG KULON DAN SEKITARNYA)
DAS CIBALIUNG–CISAWARNA	BAGIAN SELATAN KABUPATEN PANDEGLANG DAN BAGIAN SELATAN WILAYAH KABUPATEN LEBAK
DAS CIUJUNG–CIDURIAN	BAGIAN BARAT WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG
DAS RAWADANU	SEBAGIAN BESAR WILAYAH KABUPATEN SERANG DAN KABUPATEN PANDEGLANG
DAS TELUKLADA	BAGIAN SELATAN WILAYAH KABUPATEN LEBAK DAN KABUPATEN PANDEGLANG
DAS CISADANE–CILIWUNG	BAGIAN TIMUR WILAYAH KABUPATEN TANGERANG DAN KOTA TANGERANG

Sumber: Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043

Untuk sumber daya air yang berasal dari air tanah terdapat 5 (lima) Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas kabupaten/kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano, dan CABT Malingping dan lintas provinsi meliputi CABT Serang-Tangerang dan CABT Jakarta.

TABEL II.5
CAKUPAN AIR TANAH DI PROVINSI BANTEN

NAMA CAT	CAKUPAN WILAYAH
CAT LABUAN	LINTAS KABUPATEN/KOTA
CABT RAWADANU	LINTAS KABUPATEN/KOTA
CAT MALINGPING	LINTAS KABUPATEN/KOTA
CAT SERANG-TANGERANG	LINTAS PROVINSI
CAT JAKARTA	LINTAS PROVINSI

Sumber: Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043

Sementara itu, untuk potensi sumber daya alam pada sektor pertanian dan perikanan, luas wilayah produktif ditunjukkan melalui penggunaan lahan pertanian sawah dan bukan sawah. Lahan pertanian merupakan lahan yang aktif dalam menghasilkan panen sebagai bahan produksi. Lahan sawah dikhususkan untuk pertanian tanaman pangan padi, sementara pertanian bukan sawah menghasilkan panen selain tanaman padi. Berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043, luasan lahan pertanian kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

TABEL II.6

PERBANDINGAN LAHAN BAKU SAWAH (LBS), LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD), POLA RUANG DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)

WILAYAH	LBS (HA) SESUAI KEPMEN ATR/BPN NO. 446.1/SK-PG/03.03/V/2024	LSD (HA)	POLA RUANG RTRW (HA)	KP2B (HA)
KAB. PANDEGLANG	52.373	39.047,59	121.409,40	40.704,50
KAB. LEBAK	52.025	46.433,07	171.052,52	27.587,50
KAB. TANGERANG	36.712	13.218,09	14.766,55	13.930,28
KAB. SERANG	48.030	37.336,79	61.234,17	32.238,76
KOTA TANGERANG	183	-	-	-
KOTA CILEGON	1.151	947,57	1.951,35	308,79
KOTA SERANG	7.353	6.738,74	4.080,12	3.054,87
KOTA TANGERANG SELATAN	-	-	-	-
TOTAL	197.845	155.920,85	380.598,61	128.316,46

Sumber: Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043

Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang berkontribusi paling tinggi dalam pengadaan lahan untuk kawasan pertanian di Provinsi Banten. Sementara itu, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan memiliki potensi pertanian terendah dibandingkan dengan daerah lainnya, diakibatkan oleh perkembangan aktivitas didominasi oleh aktivitas perkotaan (*urban*). Potensi pertanian di Provinsi Banten menduduki peringkat 8 dalam kontribusi pangan tingkat nasional dengan persentase kontribusi sebesar 34 persen. Namun produksi panen gabah sekitar 90 persen dipasok keluar daerah, seperti ke Kerawang dan Cirebon. Karena itu, pemerintah daerah kini mencari solusi agar produksi panen gabah itu memiliki nilai tambah untuk pendapatan ekonomi daerah dan petani. Pemerintah daerah kemungkinan akan melakukan pengolahan beras secara profesional dan tidak lagi memasok gabah keluar kecuali hasil panen sudah berbentuk menjadi produk "Beras Banten".

Sebagaimana yang termuat dalam kajian hilirisasi penanaman modal (2024) di Provinsi Banten, sektor pertanian yang menjadi bagian dari komoditas unggulan di Provinsi Banten mencakup:

- Kelapa (*Cocos Nucifera*) merupakan komoditas unggulan Provinsi Banten yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang dengan total luas perkebunan kelapa mencapai 74.503,75 Ha, produksi kelapa di Provinsi Banten cukup berfluktuasi pada Tahun 2017-2022 produksi kelapa dalam rentang 42.712-43.148 ton dan meningkat menjadi 45.223 ton pada Tahun 2023;

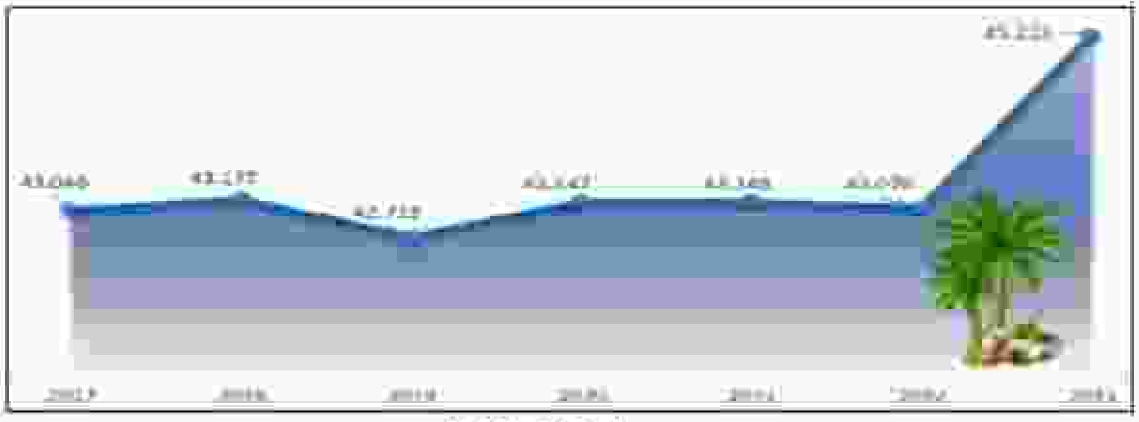

GAMBAR II.1
TREN PRODUKSI KELAPA DI PROVINSI BANTEN
(Sumber: Hilirisasi Penanaman Modal Provinsi Banten, 2024)

- Kelapa sawit (*Elaeis Guineensis*) merupakan tanaman perkebunan yang juga menjadi komoditas unggulan selanjutnya yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan total luas perkebunan sawit mencapai 6.677,83 Ha, produksi kelapa sawit dalam tahun ke tahun mengalami pengurangan dari Tahun 2017 sebesar 3.785 ton terus menurun hingga Tahun 2022 menjadi 1.998 ton dan meningkat di Tahun 2023 menjadi 3.221 ton;

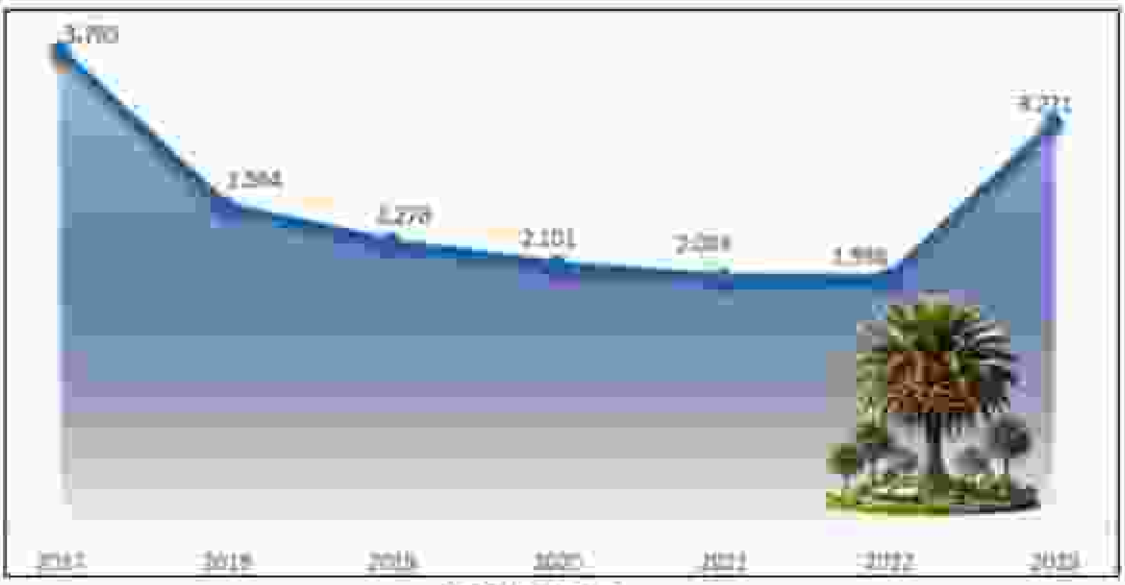

GAMBAR II.2

TREN PRODUKSI KELAPA SAWIT DI PROVINSI BANTEN

(Sumber: Hilirisasi Penanaman Modal Provinsi Banten, 2024)

- Letak geografis Provinsi Banten yang berbatasan dengan Selat Sunda dan Samudera Hindia memberikan keunggulan terhadap potensi perikanan tangkap seperti Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT), potensi ini tersebar di perairan Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Produksi perikanan tangkap TCT juga memberikan data yang fluktuasi, di Tahun 2023 produksi ikan tuna mencapai 355.965,74 ton, di tahun yang sama produksi ikan cakalang mencapai 438.899,25 ton, dan ikan tongkol mencapai 761.340,06 ton;

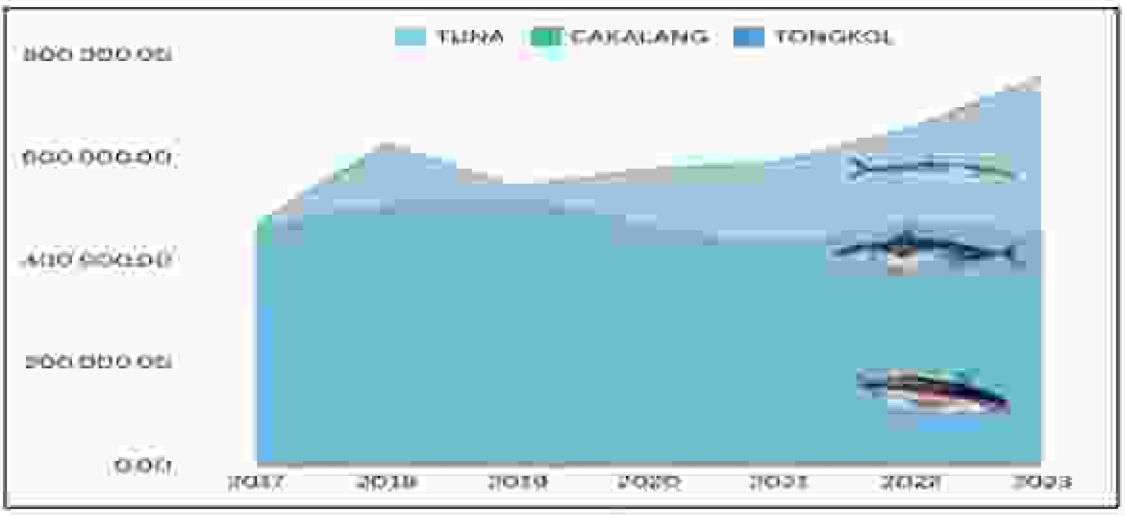

GAMBAR II.3

TREN PRODUKSI IKAN TUNA, CAKALANG, DAN TONGKOL DI PROVINSI BANTEN

(Sumber: Hilirisasi Penanaman Modal Provinsi Banten, 2024)

- Udang tangkap dan udang budidaya merupakan jenis yang juga dapat menjadi komoditas unggulan target hilirisasi di Provinsi Banten. Komoditas ini tersebar di wilayah pesisir seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, berdasarkan data yang ada tren komoditas udang tangkap sempat mengalami penurunan dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 yang berangsur mengalami peningkatan produksi hingga Tahun 2023 sebesar 274.383,98 Ton, sementara itu untuk produksi udang budidaya mengalami peningkatan disetiap tahunnya hingga di Tahun 2023 sebesar 16.515,35 ton walaupun masih dibawah produksi udang tangkap;

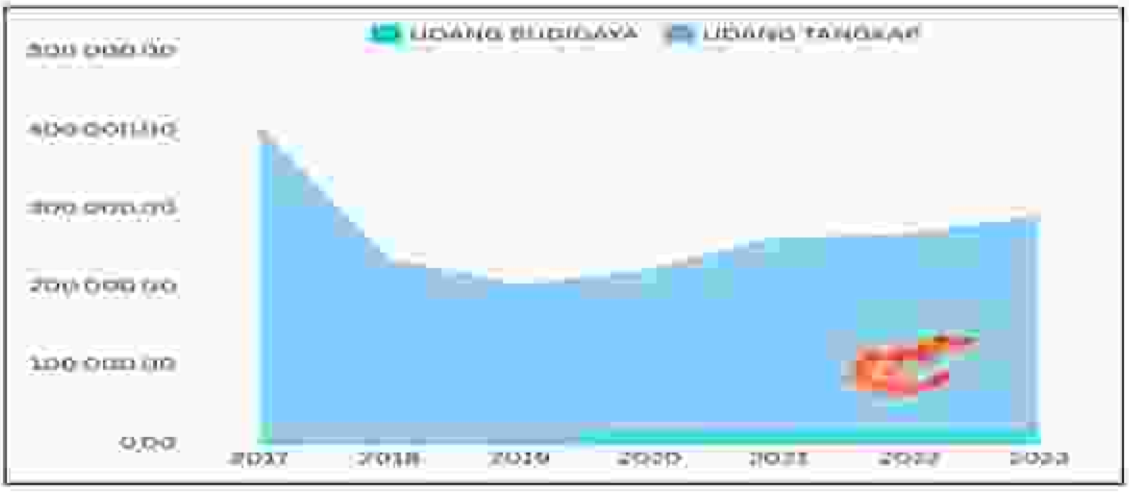

GAMBAR II.4
TREN PRODUKSI UDANG BUDIDAYA DAN UDANG TANGKAP DI PROVINSI BANTEN
(Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Banten, 2024)

- Rumput laut merupakan bagian dari komoditas unggulan di Provinsi Banten yang tersebar di di wilayah pesisir seperti Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, dengan produksi yang berfluktuasi sebagaimana pada gambar berikut, dimana pada Tahun 2023 menyentuh angka produksi sebesar 52.775,20 ton;

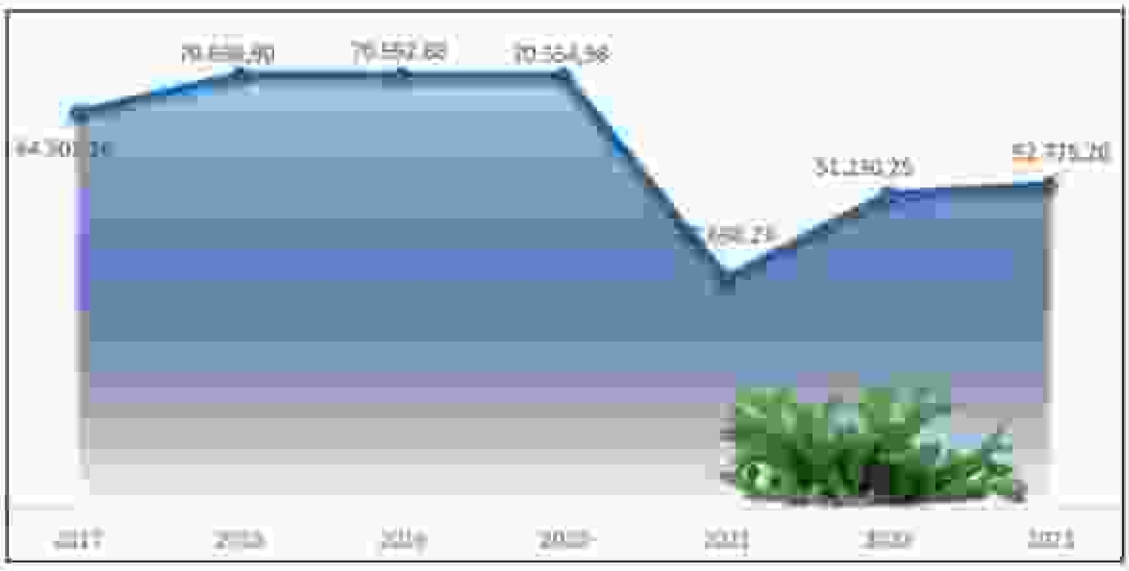

GAMBAR II.5
TREN PRODUKSI RUMPUT LAUT DI PROVINSI BANTEN
(Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Banten, 2024)

- Komoditas karet di Provinsi Banten di Tahun 2023 mencapai 5.652 ton pada sektor perkebunan yang tersebar di wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan total luas perkebunan mencapai 18.731,48 Ha;

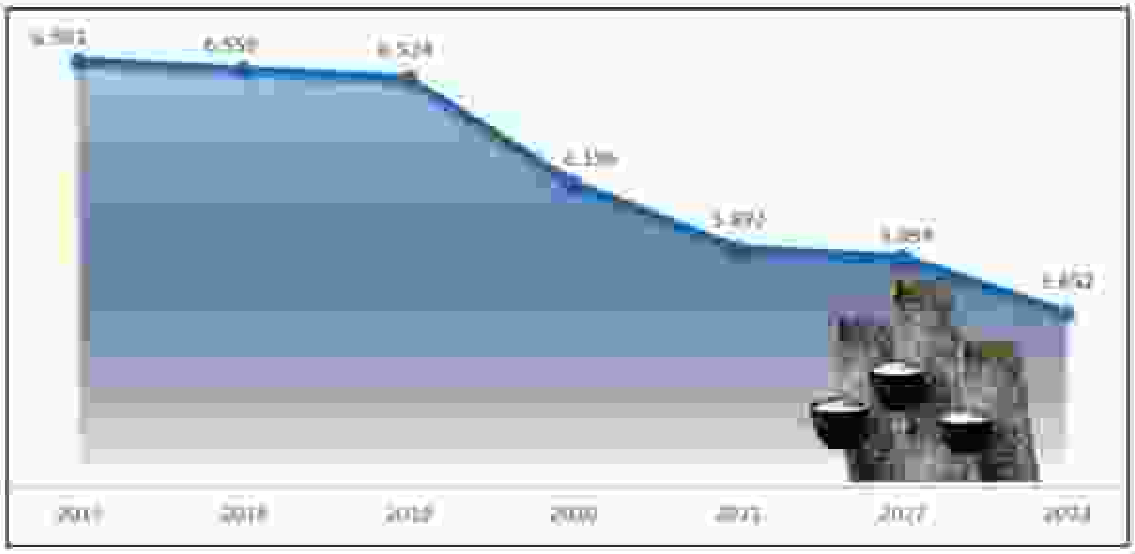

GAMBAR II.6
TREN PRODUKSI KARET DI PROVINSI BANTEN
(Sumber: Hilirisasi Penanaman Modal Provinsi Banten, 2024)

- Komoditas lainnya yaitu pada sektor tanaman pangan berupa Jagung yang tersebar di Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang dengan produksi di Tahun 2023 mencapai 35.885,19 ton.

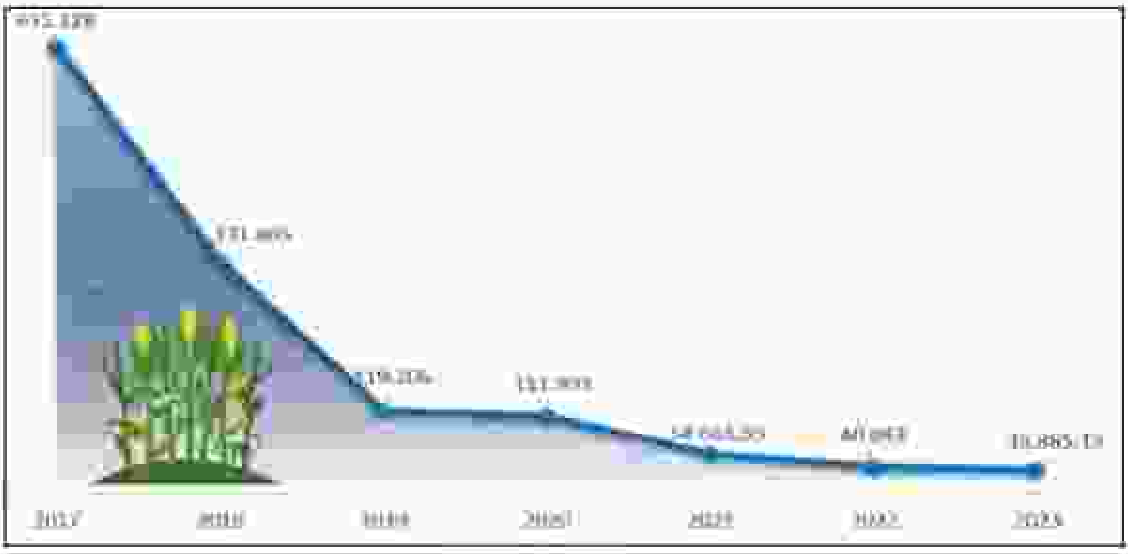

GAMBAR II.7
TREN PRODUKSI JAGUNG DI PROVINSI BANTEN
(Sumber: Hilirisasi Penanaman Modal Provinsi Banten, 2024)

2.1.1.7 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) merupakan suatu konsep dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Daya dukung adalah kemampuan suatu ekosistem atau lingkungan untuk mendukung kehidupan organisme tanpa menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas secara signifikan, sementara daya tampung merupakan jumlah maksimum populasi atau aktivitas manusia yang dapat ditoleransi oleh suatu lingkungan tanpa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang akan dijelaskan pada subbab ini mengacu terhadap hasil integrasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dalam RPJMD, yaitu pada dilihat dari aspek daya dukung pangan (beras) dan daya dukung tampung air.

Terkait dengan daya dukung pangan, dilakukan analisis terhadap status daya dukung pangan (beras) melalui pendekatan: i) angka konsumsi sebesar 113 kg/kapita/tahun; ii) perkiraan jumlah penduduk Provinsi Banten Tahun 2041 adalah sebanyak 13.509.100 jiwa; dan iii) total ketersediaan beras (ton) konversi GKP (kualitas produksi gabah kering giling) ke beras sebesar 63,90 persen, maka berdasarkan hasil perhitungan DDPb dapat diketahui bahwa di Tahun 2028 hanya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang berstatus belum terlampaui, yang mengartikan bahwa luas lahan sawah yang ada masih dapat mencukupi kebutuhan penduduk akan beras. Sementara itu untuk wilayah lainnya berstatus terlampaui, yang mengartikan bahwa sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan beras di wilayah tersebut, lebih lengkapnya sebagaimana pada tabel di bawah.

TABEL II.7
STATUS DAYA DUKUNG PANGAN (BERAS) TAHUN 2028 DI PROVINSI BANTEN

NO	WILAYAH	TOTAL KETERSEDIAAN BERAS (TON)	KEBUTUHAN BERAS (TON)	DEFISIT/SURPLUS (TON)	STATUS
1	KAB. PANDEGLANG	254.519,[illegible]	164.362	90.157	BELUM TERLAMPAUI
2	KAB. LEBAK	225.136,[illegible]	186.152	38.985	BELUM TERLAMPAUI
3	KAB. TANGERANG	185.395,[illegible]	808.990	(623.594)	TERLAMPAUI
4	KAB. SERANG	218.301,20	221.049	(2.748)	TERLAMPAUI
5	KOTA TANGERANG	2.761,34	307.300	(304.539)	TERLAMPAUI
6	KOTA CILEGON	5.335,79	58.068	[illegible]	TERLAMPAUI
7	KOTA SERANG	39.553,[illegible]	88.214	(48.661)	TERLAMPAUI
8	KOTA TANGERANG SELATAN	1,18	222.422	(222.421)	TERLAMPAUI

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Merujuk kepada KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 terkait daya dukung dan daya tampung terhadap aspek situasi ketahanan pangan dan gizi di Provinsi Banten, menunjukkan bahwa hasil analisis *Farming System Vulnerability Analysis* (FSVA) terdapat 13 (tiga belas) kecamatan dari 155 (seratus lima puluh lima) kecamatan yang masuk kedalam prioritas 3 (agak rentan pangan), salah satu penyebab yaitu akibat tingginya rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar). Lebih jauh daripada itu daya dukung dan daya tampung pangan (non beras dan beras) pun dilakukan pengukuran untuk mengetahui perbandingan *supply* (ketersediaan) dan *demand* (kebutuhan) akan pangan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa adanya kondisi defisit untuk memenuhi hasil kebutuhan akan pangan (non beras dan beras).

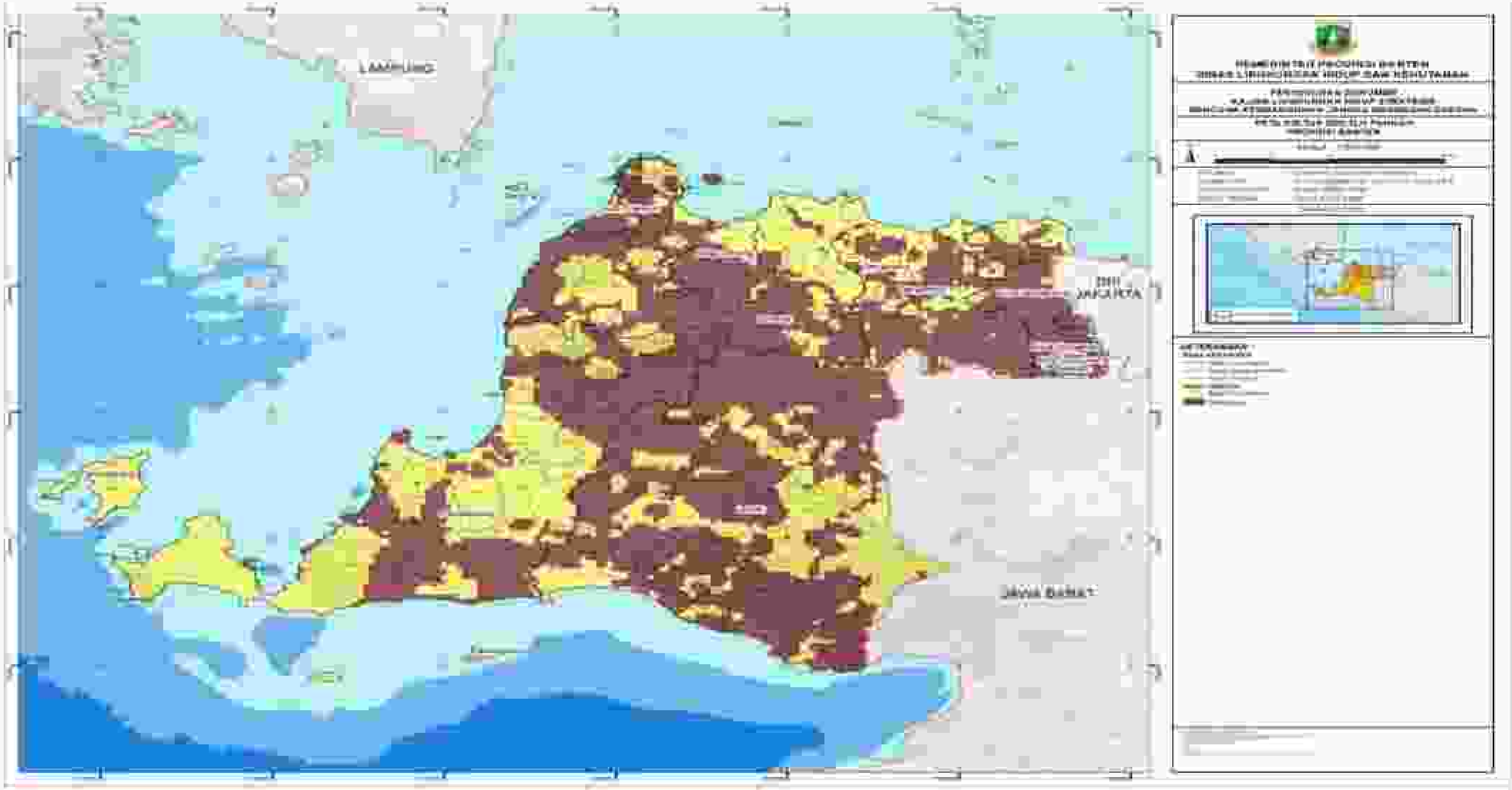
LAMPUNG
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PENYUSUNAN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PETA STATUS DDDTLH PANGAN
PROVINSI BANTEN
KETERANGAN :

GAMBAR II.8

PETA STATUS DDDTLH PANGAN DI PROVINSI BANTEN

(Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029)

Sementara itu, pengukuran daya dukung dan daya tampung air dilakukan dengan memanfaatkan informasi kinerja jasa lingkungan hidup penyedia air dan pengatur air. Ketersediaan air di Provinsi Banten baik yang berasal dari air permukaan (sungai, danau, situ, waduk, rawa, dan mata air) dan air tanah (CABT). Selanjutnya, dilakukan penghitungan terhadap ketersediaan air, kebutuhan air, dan mengidentifikasi status penetapan daya dukung daya tampung air.

Untuk mengetahui daya dukung sumber daya air di Provinsi Banten, dilakukan penjumlahan dari semua potensi sumber air yang ada, kecuali untuk yang belum diketahui data debit atau volumenya. Selain mengukur ketersediaan air, juga perlu dilakukan pengukuran kebutuhan air, perhitungan kebutuhan air untuk penetapan daya dukung daya tampung air masih memanfaatkan analisis spasial berbasis *system grid* dengan mempertimbangkan kebutuhan air dari sektor rumah tangga dan sektor kegiatan lainnya.

Lebih jauh daripada itu, juga perlu dilakukan identifikasi status Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) dengan mencari selisih antara ketersediaan dan kebutuhan diketahui terhadap penyediaan air di Provinsi Banten. Sesuai hasil perhitungan terhadap status DDDT, diketahui bahwa kondisi status DDDT air terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan air lebih tinggi dibandingkan ketersediaan airnya, kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai nol, lebih jelasnya dapat melihat pada tabel di bawah.

TABEL II.8

KONDISI KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AIR DI PROVINSI BANTEN

WILAYAH	KETERSEDIAAN (M³/TAHUN)	KEBUTUHAN TOTAL (M³/TAHUN)	SELISIH (M³/TAHUN)
KOTA CILEGON	2.907.431,29	165.118.590,15	-162.211.158,86
KOTA SERANG	898.273.019,15	272.551.787,85	625.721.231,30
KOTA TANGERANG	76.855.517,82	36.576.228,38	40.279.681,36
KOTA TANGERANG SELATAN	7.553.104,16	38.411.315,82	-30.858.141,66
KABUPATEN LEBAK	1.339.142.697,42	3.233.000.066,87	-1.893.857.369,45
KABUPATEN PANDEGLANG	806.320.276,02	2.296.934.995,85	-1.490.614.719,83
KABUPATEN SERANG	5.666.707.267,71	1.443.621.682,51	4.223.085.585,20
KABUPATEN TANGERANG	1.547.518.198,83	702.021.300,64	845.496.898,19
GRAND TOTAL	10.345.265.844,14	8.142.240.837,02	2.203.030.006,51

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

TABEL II.9

STATUS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG AIR DI PROVINSI BANTEN

WILAYAH	AMBANG BATAS (JIWA)	STATUS DDDTLH (HA)		TOTAL LUAS (HA)
		BELUM TERLAMPAUI	TERLAMPAUI	
KOTA CILEGON	33.650,89	2.321,27	16.394,95	18.716,22
KOTA SERANG	10.396.678,40	2.249,98	28.979,94	31.229,92
KOTA TANGERANG	889.986,66	3.378,37	17.117,47	20.495,84
KOTA TANGERANG SELATAN	87.421,28	1.630,64	15.040,73	16.671,36
KABUPATEN LEBAK	12.499.335,62	81.162,28	255.940,90	337.103,18
KABUPATEN PANDEGLANG	9.352.444,65	112.063,25	163.473,04	275.536,29
KABUPATEN SERANG	65.586.901,25	27.437,56	109.238,72	136.676,28
KABUPATEN TANGERANG	17.011.200,00	3.902,37	86.987,76	90.890,13
GRAND TOTAL	119.737.104,68	240.286,21	693.173,51	933.459,72

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis bahwa diketahui ketersediaan air (air permukaan dan air tanah) di Provinsi Banten sebesar ± 10 milyar m³/tahun dengan kebutuhan air total (sektor rumah tangga dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan) ± 8 milyar m^3/tahun, hal ini menunjukkan bahwa untuk wilayah Provinsi Banten masih memiliki surplus ketersediaan air sebesar ± 8 milyar m^3/tahun. Akan tetapi untuk wilayah Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang memiliki kondisi defisit ± -2 milyar m^3/tahun.

Untuk daya dukung dan daya tampung lahan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap Daya Dukung Lahan Bangunan (DDLB) dan Daya Dukung Lindung (DDL). Penilaian di Tahun 2022 memiliki status yang berfluktuasi dari kategori buruk hingga baik (kategori buruk pada seluruh kota di Provinsi Banten, kategori sedang pada Kabupaten Serang dan Tangerang, dan kategori baik pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang). Perwujudan Rencana Pola Ruang yang berpotensi dampak lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap daya dukung lindung di Provinsi Banten. Daya dukung lindung dapat dihitung dengan menggunakan data perwujudan rencana pola ruang pada Materi Teknis RTRW Provinsi Banten Tahun 2022-2042, berdasarkan hasil perhitungan DDL Provinsi Banten sampai Tahun 2042 adalah 0,66 yang menunjukkan masih pada tingkat kualitas DDL fungsi lindung baik. Dengan demikian masih terdapat keseimbangan antara perwujudan peruntukan lindung dan budidaya dalam rencana pola ruang pada Materi Teknis RTRW Provinsi Banten Tahun 2022-2042.

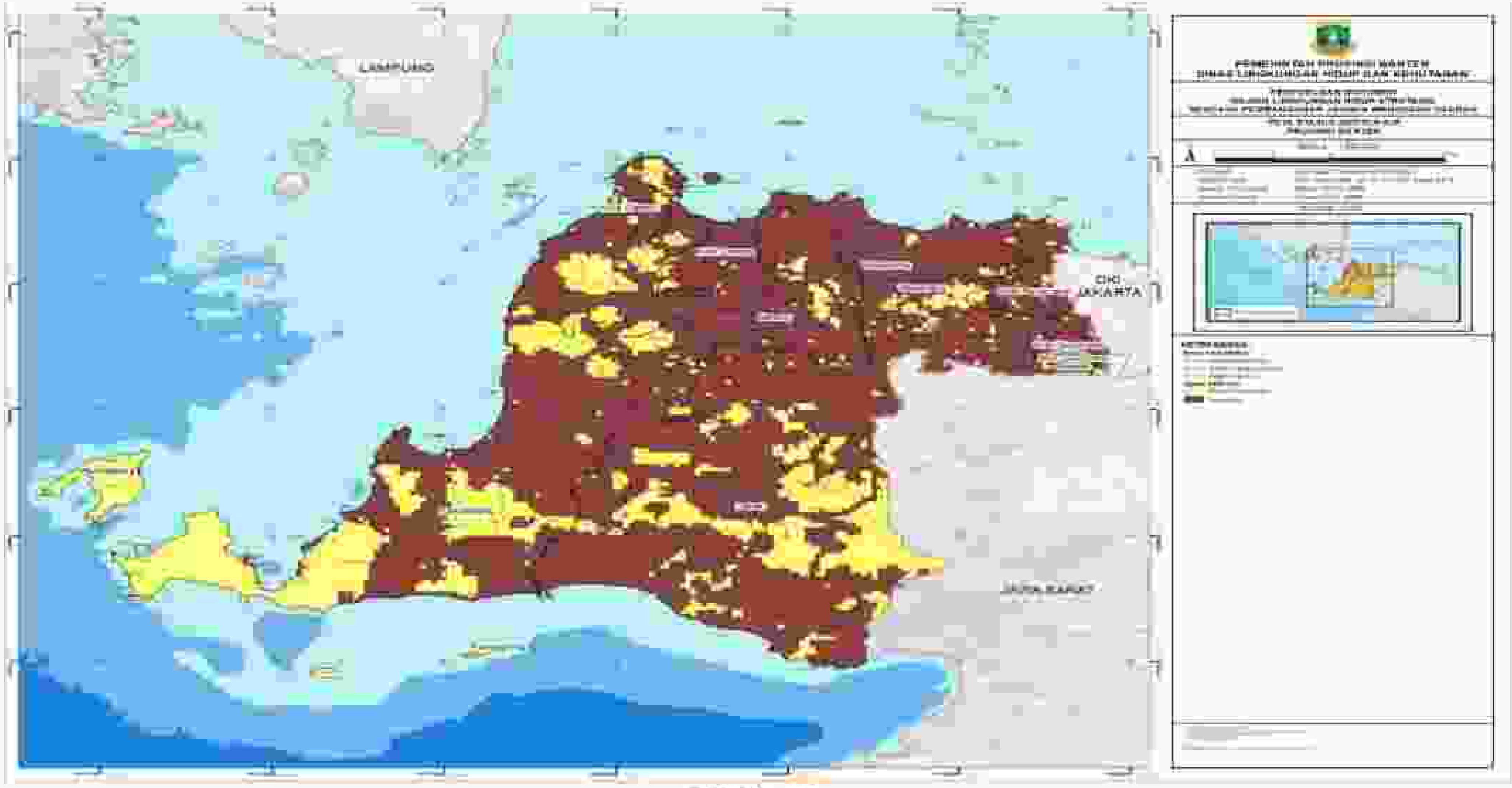
LAMPUNG
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

GAMBAR II.9
PETA STATUS DDDTLH AIR DI PROVINSI BANTEN
(Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun, 2025-2029)

2.1.1.8 BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Subbab ini akan menjabarkan kondisi energi, air, dan pangan sebagai potensi daerah dalam pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya diharapkan memberikan manfaatan bagi keterjaminan keberlangsungan hidup masyarakat.

A. KETAHANAN ENERGI

Ketahanan energi adalah tentang memastikan suatu perusahaan memiliki pasokan energi yang dapat diandalkan dan teratur serta langkah-langkah darurat jika terjadi pemadaman listrik. Salah satu jenis energi yang cukup penting bagi suatu perekonomian adalah penggunaan energi listrik.

Secara umum, kondisi kelistrikan di Provinsi Banten sudah cukup baik. Dari sisi pasokan (*supply*), di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT. Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi *demand*, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Untuk selengkapnya terhadap perbandingan listrik yang didistribusikan menurut provinsi tersaji pada gambar di bawah.

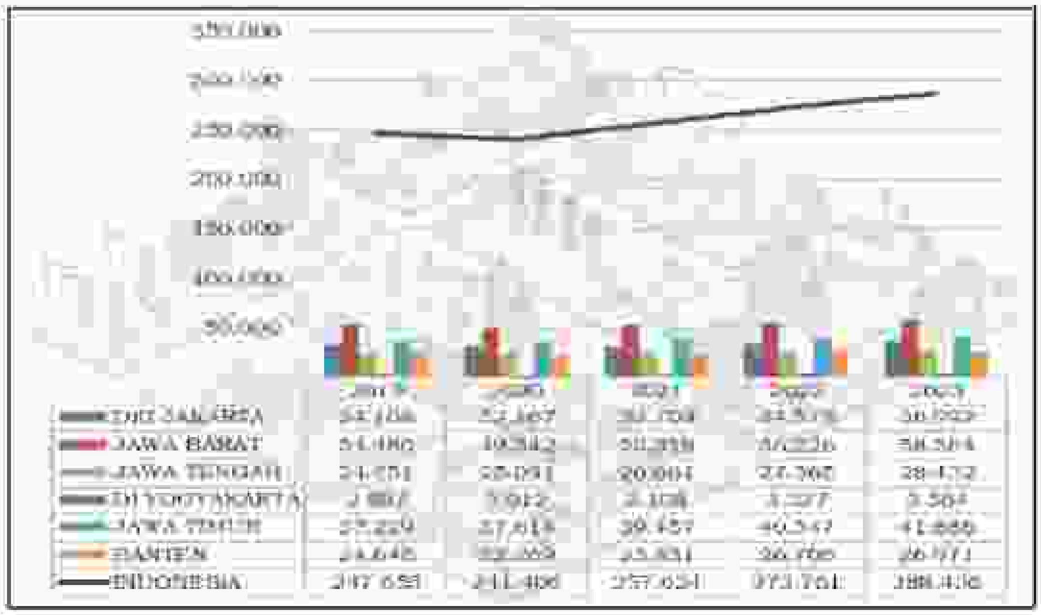

GAMBAR II.10
PERBANDINGAN LISTRIK YANG DIDISTRIBUSIKAN MENURUT PROVINSI DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2019-2023
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Daya listrik yang terpasang menunjukkan jumlah kWh yang mampu digunakan di kabupaten/kota masing-masing, daya ini dialirkan untuk memberikan layanan listrik kepada rumah tangga. Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten yang memiliki daya listrik terbesar di Provinsi Banten diikuti oleh Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

TABEL II.10
DAYA LISTRIK TERPASANG DI PROVINSI BANTEN

WILAYAH	DAYA LISTRIK TERPASANG (KWH)				
	2019	2020	2021	2022	2023
KAB. PANDEGLANG	221.515.660	234.876.516	249.625.280	254.556.810	267.587.260
KAB. LEBAK	410.835.670	475.811.720	502.868.070	4706.995.600	501.853.800
KAB. TANGERANG	5.287.742.351	3.400.422.454	3.588.862.153	4.697.279.833	4.916.741.702
KAB. SERANG	1.200.799.400	1.686.258.000	1.876.559.458	2.112.916.300	2.282.153.880
KOTA TANGERANG	1.555.085.662	1.508.606.786	1.608.512.580	2.217.457.456	2.306.626.560
KOTA CILEGON	1.488.304.220	1.485.461.920	1.702.771.070	1.326.230.950	1.864.562.800
KOTA SERANG	347.294.210	356.344.210	369.548.650	355.575.550	380.068.800
KOTA TANGERANG SELATAN	2.145.136.650	2.156.914.800	2.292.062.300	1.110.695.450	1.050.584.350
PROVINSI BANTEN	11.012.110.943	11.367.579.900	12.039.530.549	12.698.306.196	13.658.127.178

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024. Diolah Oleh Bappeda

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk wilayah Provinsi Banten tapi juga untuk wilayah Jawa-Bali. Dari sisi pasokan (*supply*), di Provinsi Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT. Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Provinsi Banten dilakukan oleh PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

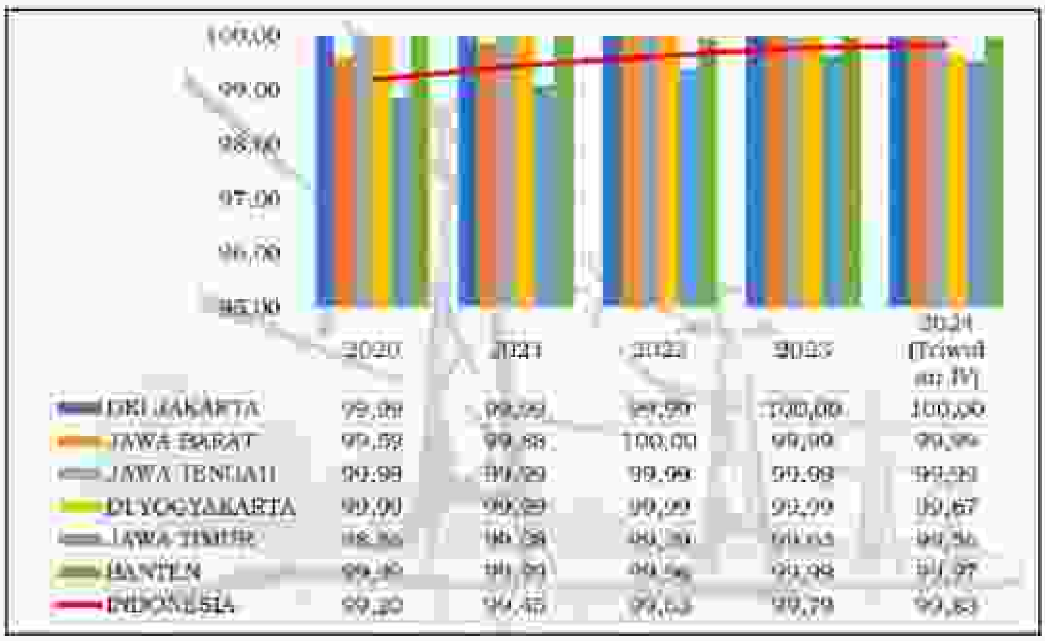

GAMBAR II.11
PERKEMBANGAN PERBANDINGAN REALISASI RASIO ELEKTRIFIKASI DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024. Diolah Oleh Bappeda)

Gambar di atas menunjukkan realisasi rasio elektifikasi antara Provinsi Banten dengan Nasional, diketahui bahwa di Tahun 2024 Provinsi Banten telah mencatatkan realisasi rasio elektrifikasi lebih kurang sebesar 99,99 persen. Sementara itu berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menginformasikan bahwa realisasi rasio elektrifikasi nasional di Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV sebesar 99,83 persen. Meskipun capaian rasio eletrifikasi Provinsi Banten Realisasi capaian Rasio Elektrifikasi Tahun 2023 adalah 99,99 persen berdasarkan data basis PLN dari Dirjen Ketenagalistrikan Tahun 2023. Berdasarkan data rumah tangga berlistrik untuk pengukuran RE tersebut, terdapat 498 rumah tangga yang berstatus belum berlistrik dan berlokasi hanya di wilayah Kabupaten Lebak, Keberadaan data mutakhir *baseline* Rasio Elektrifikasi Tahun 2022 tersebut membuat data-data hasil pengukuran di Tahun 2019-2022 tidak digunakan lagi sebagai acuan.

Hasil pembangunan listrik perdesaan melalui APBD Provinsi Banten TA. 2023 maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi pada Tahun 2023, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa pada Tahun 2022 sebesar 63.907 RTS menjadi berkurang 52.568 RTS (8.500 RTS APBD, 2.839 APBN).

TABEL II.11
SUMBER UTAMA PENERANGAN RUMAH TANGGA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022-2024

NO	WILAYAH	LISTRIK PLN (PERSEN)			LISTRIK NON-PLN (PERSEN)			BUKAN LISTRIK (PERSEN)			JUMLAH (PERSEN)
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	KAB. PANDEGLANG	[illegible]	99,82	99,99	0,28	0,18		0,17	-	[illegible]	100,00
2	KAB. LEBAK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,12	0,10	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00
3	KAB. TANGERANG	99,94	99,76	100,00	0,06	0,02	-	0,00	0,22	-	100,00
4	KAB. SERANG	99,60	99,95	100,00	0,28	0,05	-	0,12	-	-	100,00
5	KOTA TANGERANG	99,47	[illegible]	100,00	0,53	0,10		0,00	-		100,00
6	KOTA CILEGON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	100,00
7	KOTA SERANG	[illegible]	[illegible]	100,00	[illegible]	-		[illegible]	-		100,00
8	KOTA TANGERANG SELATAN	100,00	99,87	100,00	0,00	0,13		0,00	-		100,00
	PROVINSI BANTEN	[illegible]	[illegible]	99,79	[illegible]	[illegible]	0,04	[illegible]	[illegible]	0,21	100,00

Sumber: SPD Provinsi Banten 2024 Diolah Oleh Bappeda

Lebih lanjut pada Tahun 2024 sebagaimana data yang disajikan pada tabel di bawah sekitar 99,79 persen rumah tangga di Provinsi Banten memiliki sumber penerangan utama berasal dari listrik PLN, 0,04 persen rumah tangga memiliki sumber penerangan utama dari listrik non-PLN, dan 0,21 persen lainnya bukan merupakan pengguna listrik. Dari sumber yang sama, tercatat bahwa 90,09 persen rumah tangga di Provinsi Banten telah menempati tempat tinggal milik sendiri, dan sisanya masih belum memiliki tempat tinggal milik sendiri. Kedepannya Pemerintah Provinsi Banten akan terus berupaya serta berakselerasi mengembangkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar, seperti energi biomasa, energi mikro hidro, energi gelombang, energi angin, dan energi surya, yang kesemuanya apabila dikembangkan sebagai energi primer untuk membangkitkan tenaga listrik juga dapat mendatangkan devisa serta hilir dari cita-cita tersebut membantu Pemerintah Pusat dalam Program Diversifikasi Energi.

Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan energi dan sumber daya mineral Tahun 2020-2023 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Pada Tahun 2022 indikator Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB mengalami penurunan realisasi sebesar 0,07 persen dari 0,68 persen (Tahun 2020) menjadi 0,55 persen, hal ini dimungkinkan terjadi akibat ketidakpastian hukum terkait kewenangan Provinsi di sub sektor mineral dan batu bara pasca terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang menghapus semua kewenangan Provinsi dalam pengelolaan mineral dan batubara, hal tersebut berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya pelaksanaan program dan kegiatan terkait mineral dan batubara di Tahun 2022.

TABEL II.12
LUAS WILAYAH PERTAMBANGAN MENURUT JENIS BAHAN TAMBANG
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2023

NO	JENIS BAHAN TAMBANG	TAHUN (HA)			
		2020	2021	2022	2023
1	BATU BARA	5	-	-	-
2	EMAS	7.708,60	-	16.379,30	16.379,30
3	PERAK	-	-	-	-
4	ANDESIT	3.953,89	-	1.538,20	1.683,36
5	ZEOLIT	0,65	-	-	-
6	GALENA	318,00	-	16.379,30	16.379,30
7	PASIR DARAT	255,00	-	432,07	205,98
8	PASIR KUARSA	1.126,00	-	575,36	893,30
9	PASIR KALI	-	-	-	-
10	BENTONIT	72,00	-	60,40	92,00
11	TANAH LIAT	208,00	-	80,70	80,70
12	TANAH URUG	46,00	-	62,1	306,72
13	BATU GAMPING	6.307,00	-	3.768,40	3.768,40
14	TRAS	389,00	-	64,00	64,00
15	PASIR BESI	10,00	-	-	-
16	PASIR LAUT	5.853,00	-	5.196,12	17.070,79
17	MAKADAM	-	-	1.538,20	1.683,36
18	FELDSPAR	-	-	-	-
19	BREKSI TUFAAN	-	-	-	-
20	SEKUEN	-	-	-	-
21	MANGAN	-	-	-	-
22	DOLOMIT	372,00	-	-	-

Sumber: [illegible] Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda

Jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Banten pada Tahun 2023 adalah sebanyak 284 perusahaan, dimana yang terbanyak adalah perusahaan pertambangan makadam (79 perusahaan), andesit (76 perusahaan), dan pasir kuarsa (35 perusahaan). Jumlah perusahaan ini meningkat 19,33 persen dari Tahun 2022. Jika dilihat berdasarkan luas wilayah penambangannya, pada Tahun 2023, jenis bahan tambang pasir laut memiliki area tambang terluas yaitu mencapai 17,07 ribu hektar.

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) serta teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Pada tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti sebagai respons terhadap kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis- jenis energi alternatif akan menjadi pilihan apabila memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

TABEL II.13

REALISASI PENJUALAN GAS KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

TAHUN	TRIWULAN (M³)				JUMLAH
	I	II	III	IV	
2020	400.751.803	374.612.086	400.653.703	373.870.827	1.550.091.430
2021	400.751.804	374.612.087	400.653.702	373.870.827	1.550.091.430
2022	410.173.884	371.627.423	414.038.544	393.371.408	1.607.201.259
2023	434.679.517	371.408.881	373.496.476	358.903.524	1.598.359.398
2024	227.583.026	241.461.041	297.151.387	303.399.081	1.169.584.735

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025, Diolah Oleh Bappeda

B. KETAHANAN AIR

Kapasitas air baku per kapita di Banten mengalami peningkatan dari 10.089 m³ pada 2018 menjadi 12.093 m³ pada 2024. Meskipun mengalami pertumbuhan, Banten tetap memiliki kapasitas air baku per kapita yang paling rendah dibandingkan provinsi lain dalam tabel, menunjukkan keterbatasan sumber daya air di wilayah ini dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Barat atau Jawa Tengah yang memiliki angka lebih tinggi.

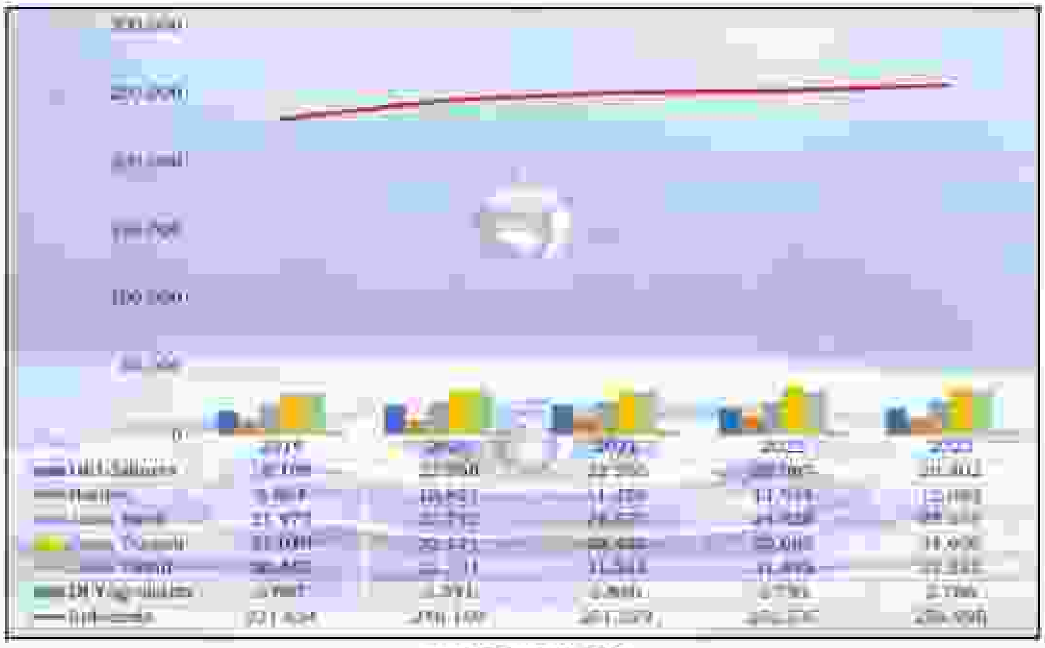

GAMBAR II.12

PERBANDINGAN KAPASITAS AIR BAKU DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2019-2023

(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Faktor penghambat yang mempengaruhi kapasitas air Banten:

- Kondisi geografis, keterbatasan sumber daya air alami seperti sungai, danau, atau air tanah yang dapat dimanfaatkan;
- Kepadatan penduduk, pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi dapat memberikan tekanan pada ketersediaan air per kapita;

- Permintaan industri dan pertanian, kebutuhan air yang tinggi dari sektor industri dan pertanian dapat mengurangi ketersediaan air bagi penduduk;
- Infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi air bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam ketersediaan air per kapita; dan
- Polusi air, pencemaran dari limbah industri atau pertanian dapat memperburuk kualitas sumber air yang tersedia.

Faktor pendorong peningkatan kapasitas air Banten:

- Pembangunan infrastruktur, pembangunan bendungan, saluran air, dan instalasi pengolahan air dapat meningkatkan kapasitas air yang tersedia;
- Pengelolaan air yang berkelanjutan, investasi dalam teknologi hemat air seperti pemanenan air hujan dan sistem irigasi yang lebih efisien dapat membantu meningkatkan ketersediaan air;
- Peningkatan distribusi air, memastikan distribusi air yang lebih merata dan efisien agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat; dan
- Adaptasi terhadap perubahan iklim, strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti pembuatan sumur resapan dan konservasi air, dapat membantu mengatasi kekurangan air.

Meskipun kapasitas air per kapita di Provinsi Banten mengalami peningkatan, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Untuk meningkatkan ketersediaan air, diperlukan perbaikan dalam infrastruktur, distribusi air, serta pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan. Jika tantangan seperti polusi, urbanisasi, dan perubahan iklim dapat diatasi, maka kapasitas air baku di Banten dapat meningkat di masa depan.

C. AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP KONSUMSI AIR MINUM

Hingga Tahun 2024, Provinsi Banten memiliki akses air minum layak paling rendah dibanding semua provinsi lain di Pulau Jawa (94,01 persen). DKI Jakarta selalu memimpin, dengan hampir 100 persen akses sejak Tahun 2019. DI Yogyakarta dan Jawa Timur memiliki tingkat akses yang lebih tinggi dibanding Banten, mencapai hampir 97 persen pada Tahun 2024.

Sebagaimana gambar di bawah, Provinsi Banten masih tertinggal jauh dalam penyediaan akses air minum layak karena kombinasi beberapa faktor, yaitu:

- Infrastruktur air minum yang belum optimal, terutama di daerah pedesaan;
- Ketimpangan antara kota dan desa, dengan akses lebih baik di Tangerang dan Serang dibanding daerah lain;
- Pertumbuhan penduduk yang cepat, menyebabkan permintaan air meningkat lebih cepat dari penyediaan infrastruktur;

- Masalah kualitas air, seperti pencemaran dan intrusi air laut di beberapa daerah;
- Investasi yang masih kurang dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa; dan
- Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam penggunaan air minum layak.

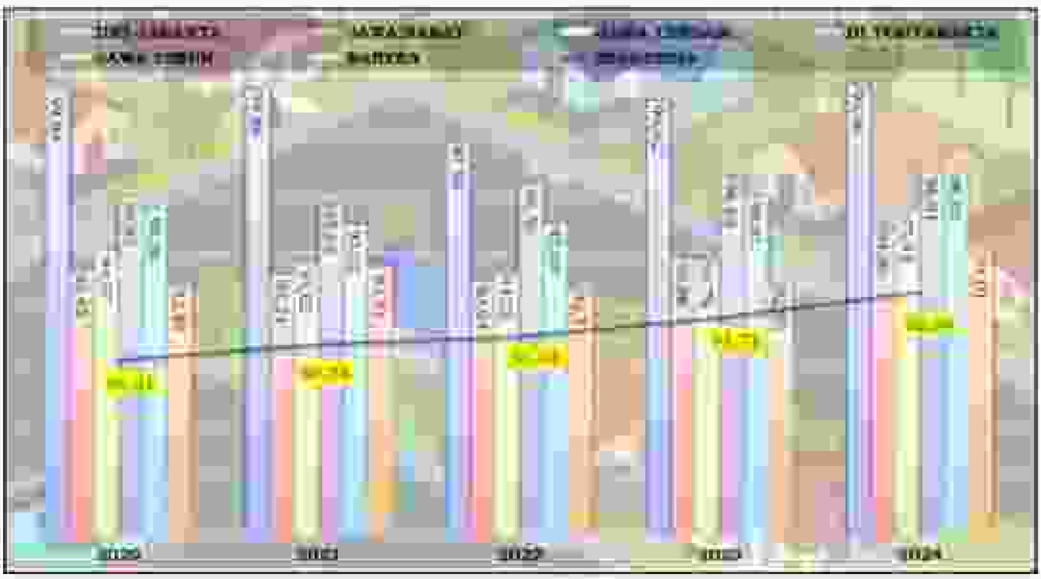

GAMBAR II.13
PERBANDINGAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM LAYAK (PERKOTAAN+PERDESAAN) DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah dan PDAM di Provinsi Banten perlu memperluas jaringan air bersih, meningkatkan pengolahan air, dan memastikan penduduk pedesaan mendapatkan akses yang lebih baik.

D. KEMANDIRIAN PANGAN

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan suatu wilayah melalui 3 (tiga) aspek seperti: 1) ketersediaan pangan; 2) keterjangkauan pangan; dan 3) pemanfaatan pangan. IKP dilakukan pengukuran oleh Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, pengukuran ini mengadopsi pengukuran Global Food Security Index (GFSI) yang mana tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA).

Lebih lanjut, kondisi ideal terhadap konsumsi pangan yang berpedoman pada standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari, yaitu sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein. Rata-rata konsumsi kalori penduduk di Provinsi Banten pada Tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 2.207,37 kkal yang sudah mencapai standar kecukupan yang ditentukan, sedangkan rata-rata konsumsi protein juga sudah di atas standar kecukupan yakni sebesar 66,93 gram protein.

Secara umum, IKP di Provinsi Banten mengalami pertumbuhan yang fluktiatif. Jika dinilai dari kelompok IKP, ketahanan pangan di

Provinsi Banten Tahun 2020 dan Tahun 2022 termasuk dalam golongan 5. Sedangkan pada Tahun 2019, 2021, dan 2023 memiliki nilai besar yakni >74,4 yang termasuk dalam kategori 6 (tahan). Nilai yang menurun pada Tahun 2020 dan 2022 terjadi diakibatkan oleh adanya penurunan akses pangan karena wabah Covid-19 di Tahun 2020 dan adanya lonjakan inflasi di Tahun 2022.2019-2020: Terjadi sedikit penurunan dari 74,47 ke 73,48 (-0,99 poin). Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasok pangan. Pada tahun 2020-2021: Lompatan signifikan terjadi, dengan indeks melonjak dari 73,48 ke 82,69 (+9,21 poin). Ini bisa mencerminkan adanya kebijakan pemulihan ekonomi, perbaikan distribusi pangan, atau peningkatan produksi lokal.

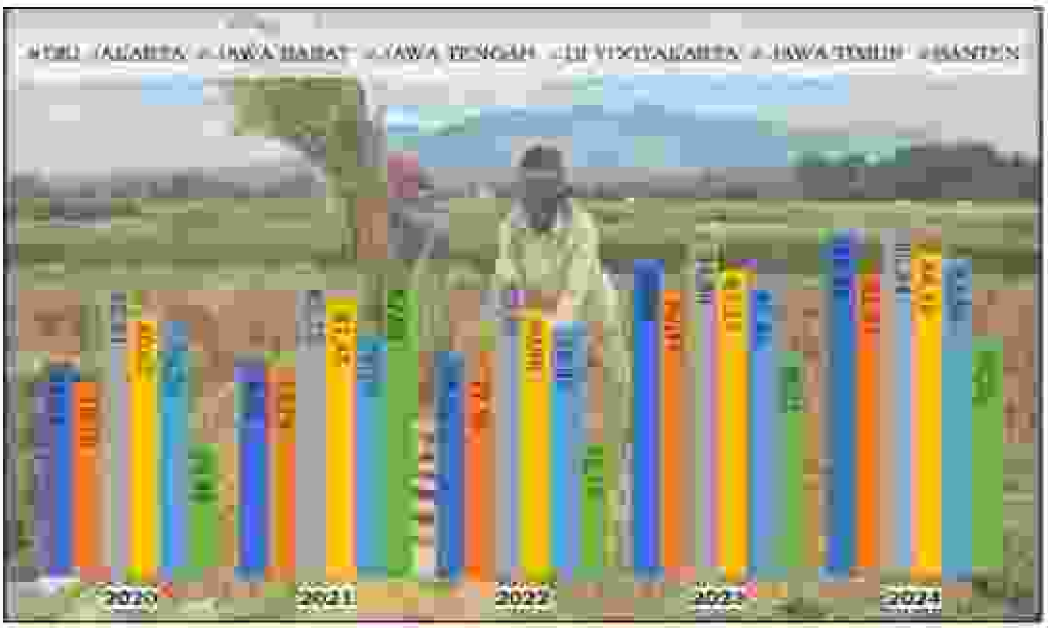

GAMBAR II.14
PERBANDINGAN NILAI INDEKS KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah oleh Bappeda)

Tahun 2021-2022, IKP kembali mengalami penurunan tajam ke 73,78 (-8,91 poin), hal ini menunjukkan adanya gangguan kembali dalam ketahanan pangan, bisa jadi karena faktor cuaca, distribusi yang terganggu, atau perubahan kebijakan. Tahun 2022-2023, ada pemulihan dengan peningkatan ke 78,71 (+4,93 poin). Ini menunjukkan bahwa setelah penurunan di 2022, ada langkah perbaikan yang mulai menunjukkan hasil.

IKP Banten pada Tahun 2023 (78,71) masih lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (84,80), DI Yogyakarta (83,17), dan DKI Jakarta (83,80). Namun, pada 2021, IKP Banten (82,69) sempat lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi, tetapi kemudian turun kembali. Provinsi yang menunjukkan ketahanan pangan lebih stabil adalah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, yang bisa menjadi referensi bagi Banten untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Banten menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dalam lima tahun terakhir, dengan lonjakan di

Tahun 2021 tetapi penurunan tajam di Tahun 2022. Meskipun mengalami pemulihan pada 2023, Banten masih perlu memperbaiki sektor pangan untuk mencapai stabilitas seperti provinsi lain di Jawa. Rekomendasi terbaik meliputi diversifikasi produksi, perbaikan distribusi, dukungan bagi petani, mitigasi risiko iklim, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat:

- Diversifikasi produksi pangan lokal
  Mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar provinsi dengan memperkuat sektor pertanian dan perikanan lokal. Mendorong petani untuk menanam komoditas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan.
- Perbaikan infrastruktur dan distribusi
  Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi untuk memastikan distribusi pangan lebih lancar, terutama ke daerah yang lebih terpencil. Mengembangkan pusat logistik pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dalam kondisi darurat.
- Penguatan kebijakan dan dukungan bagi petani
  Memberikan subsidi atau insentif kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan produksi pangan. Meningkatkan akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan sistem irigasi yang lebih efisien.
- Meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi
  Mengembangkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat, seperti urban farming dan kebun pangan keluarga. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan sehat.
- Mitigasi risiko perubahan iklim
  Meningkatkan sistem peringatan dini terhadap bencana yang dapat mengganggu produksi pangan, seperti banjir atau kekeringan. Mendorong pertanian berkelanjutan dengan teknik ramah lingkungan, seperti agroforestri dan penggunaan pupuk organik.

E. PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/*Prevalence of Undernourishment*/PoU (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Sementara itu, ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pada metadata lama dan baru Tahun 2022 dan 2024, dari lima provinsi, Banten memiliki nilai capaian indikator PoU paling rendah. Pola asuh yang salah dapat menyebabkan tingginya prevalensi dan rendahnya kemajuan dalam mengatasi masalah gizi dalam keluarga. Salah satu penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita adalah akibat pola asuh anak yang kurang memadai. Ketidakcukupan pangan merupakan kondisi seseorang yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin, dan tinggi badan.

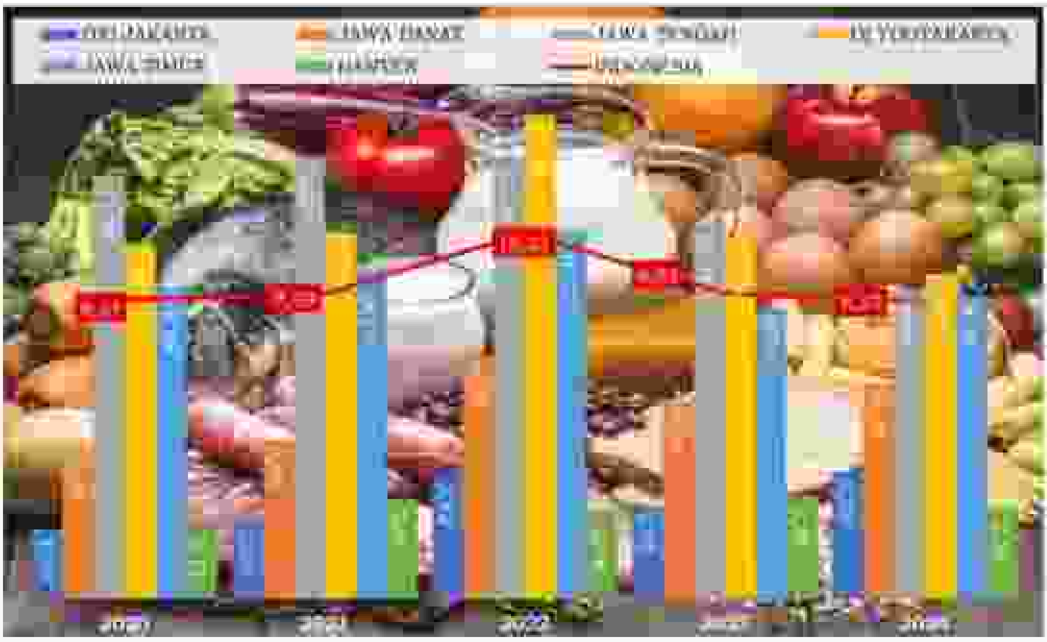

GAMBAR II.15
PERBANDINGAN *PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT* (POU) DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024 Diolah Oleh Bappeda)

2.1.1.9 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

A. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, kualitas lingkungan hidup berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia. Menjaga mutu lingkungan hidup terjaga dengan baik sama dengan menjaga kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO_3-N. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO_2 dan NO_2 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Berdasarkan gambar di bawah, IKA di Provinsi Banten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sedangkan IKU dan IKAL di Provinsi Banten mengalami nilai yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun IKLH Provinsi Banten tumbuh secara fluktuatif hingga mencapai 64,14 di Tahun

2021, sayangnya angka tersebut kembali mengalami penurunan hingga Tahun 2024, menjadi 62,52.

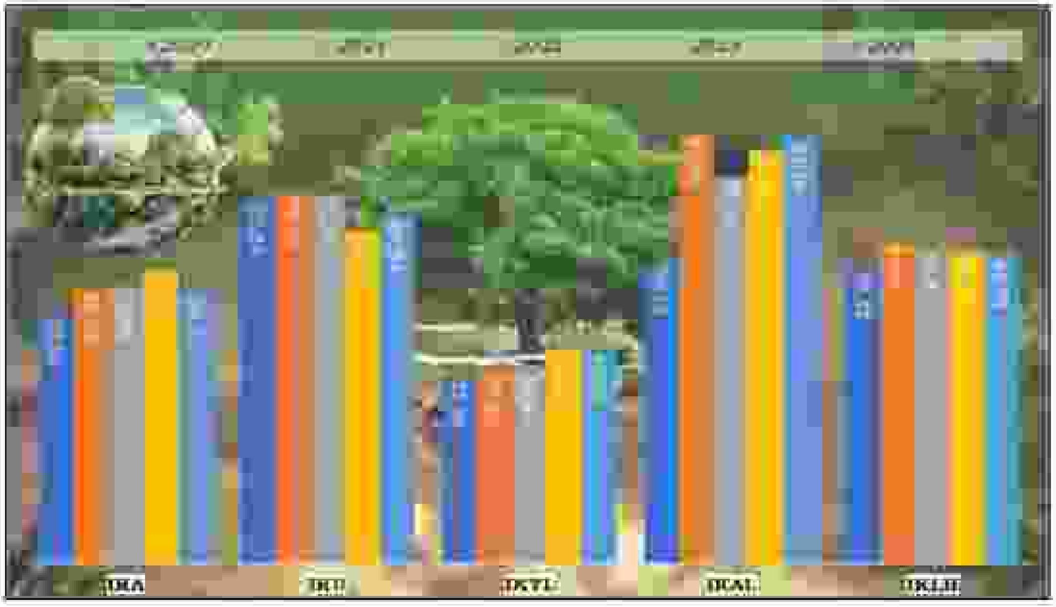

GAMBAR II.16
KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024
Sumber: KemenLH/BPLH, 2025, Diolah Oleh Bappeda

Perkembangan IKLH di Provinsi Banten cukup berfluktuatif, hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, perubahan iklim/kemarau panjang, rendahnya ketaatan pelaku industri/dunia usaha terhadap baku mutu lingkungan dan keterbatasan kapasitas dan Jumlah SDM PPLH di Provinsi Banten yang berdampak juga terhadap pengawasan industri. Selain itu juga fluktuatifnya nilai IKLH dapat disebabkan oleh rendahnya koordinasi multi stakeholder (pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota) terhadap pengendalian pencemaran (air, udara dan air laut), minimnya penyediaan sarana dan prasaran pengelolaan limbah domestik khususnya untuk masyarakat, serta minimnya pengawasan dan pemantauan pembuangan limbah domestik (limbah padat/cair) yang bermuara menjadi sampah laut.

Lebih lanjut, faktor lain yang memengaruhi kualitas lingkungan hidup dilihat dari aspek perubahan iklim. Kerentanan iklim dapat dilihat pada pengaruh KRP pola ruang dan struktur ruang terhadap data kerentanan Iklim SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan). Provinsi Banten memiliki tingkat kerentanan iklim kelas tidak rentan sampai dengan sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sebagian besar wilayah memiliki karakter yang cukup rentan terhadap perubahan iklim dengan luas sekitar 696.454,14 Ha dari total luas provinsi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut.

TABEL II.14
TINGKAT KERENTANAN IKLIM (SIDIK)

NO	WILAYAH	TINGKAT KERENTANAN IKLIM (SIDIK, KLHK)					LUAS (HA)
		TIDAK RENTAN PERUBAHAN IKLIM	AGAK RENTAN PERUBAHAN IKLIM	CUKUP RENTAN PERUBAHAN IKLIM	RENTAN PERUBAHAN IKLIM	SANGAT RENTAN PERUBAHAN IKLIM	
1	KAB. LEBAK	7.893,87	76.236,45	292.023,42	4.301,25	-	380.456,09

NO	WILAYAH	TINGKAT KERENTANAN IKLIM (SIDIK, KLHK) TIDAK RENTAN PERUBAHAN IKLIM	AGAK RENTAN PERUBAHAN IKLIM	CUKUP RENTAN PERUBAHAN IKLIM	RENTAN PERUBAHAN IKLIM	SANGAT RENTAN PERUBAHAN IKLIM	LUAS (HA)
2	KAB. PANDEGLANG	3.330,68	21.100,32	250.925,34	-	2.161,07	277.727,16
3	KAB. SERANG	18.080,47	7.580,05	[illegible]	482,48	-	145.736,07
4	KAB. TANGERANG	43.446,18	1.184,05	57.778,30	-	-	102.408,82
5	KOTA TANGERANG	14.496,70	-	3.142,26	485,82	-	18.126,28
6	KOTA CILEGON	11.398,28	-	4.904,64	-	-	16.302,92
7	KOTA SERANG	15.502,28	-	15.360,15	-	-	26.606,43
8	KOTA TANGERANG SELATAN	13.615,57	-	2.840,07	-	-	16.455,64
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.161,07	[illegible]

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Berdasarkan analisis terhadap kondisi perubahan iklim melalui penghitungan nilai SEI (*Sensitivity and Exposure Index*) atau IKS (Indeks Keterpaparan dan Sensitifitas) dan nilai ACI (*Adaptive Capacity Index*) atau IKA (Indek Kapasitas Adaptif). Berdasarkan hasil penghitungan terdapat 2 (dua) desa yang memiliki kategori kerentanan tinggi diantaranya Desa Simpangtiga dan Desa Cinoyong di Kabupaten Pandeglang, untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel di bawah.

TABEL II.15
INDEKS PERUBAHAN IKLIM, RISIKO BANJIR, DAN RISIKO KERING

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	IKA	IKS	INDEKS PERUBAHAN IKLIM	RISIKO BANJIR	RISIKO KERING
PANDEGLANG	PATIA	SIMPANGTIGA	0,45	0,71	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
PANDEGLANG	CARITA	CINOYONG	0,44	0,78	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

B. RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN

Pada Tahun 2020, capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Provinsi Banten mencapai nilai 10,43, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai nasional sebesar 7,64. Terjadi sedikit penurunan nilai pada Tahun 2021 menjadi 10,05, namun masih lebih tinggi dibandingkan Indonesia secara keseluruhan. Lonjakan signifikan terjadi pada Tahun 2022 dengan capaian 15,25, yang terus meningkat hingga Tahun 2024 (sebesar 15,41). Secara umum, Provinsi Banten menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan provinsi lain terutama setelah Tahun 2021, meskipun capaian ini masih tertinggal daripada provinsi lainnya.

DKI Jakarta mengalami kenaikan tajam pada Tahun 2022 (21,75) dan mencapai puncaknya di Tahun 2023 (23,10), lalu sedikit turun ke 22,93 di 2024. Banten juga mengalami kenaikan serupa pada Tahun 2022, namun tetap lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta, sehingga DKI Jakarta sebagai ibu kota mungkin memiliki lebih banyak faktor yang mendorong pertumbuhan, seperti urbanisasi dan investasi, sementara Banten mengikuti tren ini dengan sedikit keterlambatan.

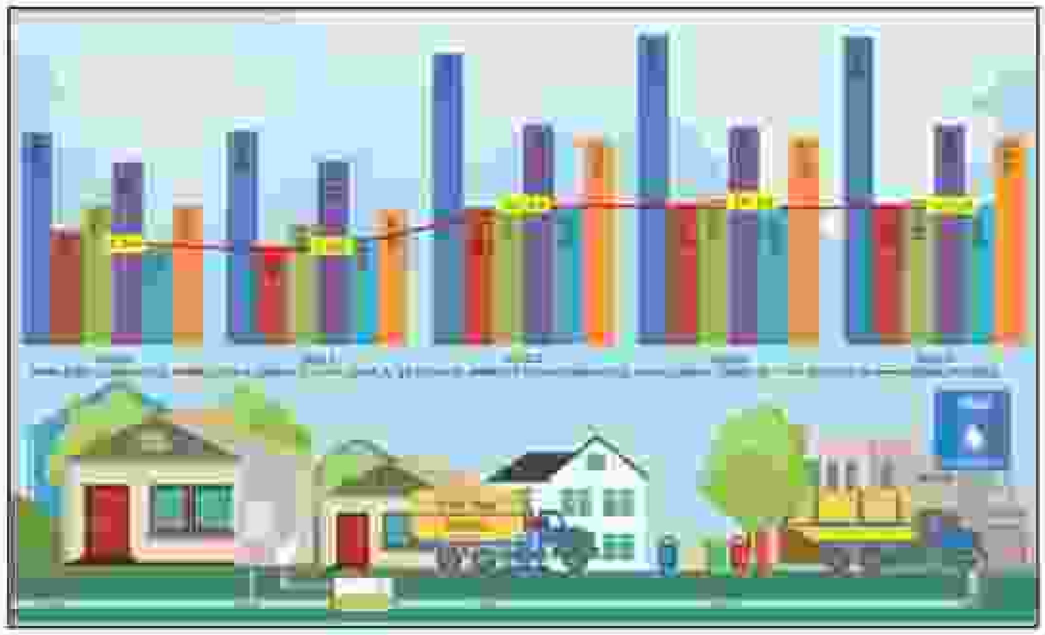

GAMBAR II.17
PERBANDINGAN PERSENTASE RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN LAYANAN SANITASI YANG DIKELOLA SECARA AMAN (PERKOTAAN+PERDESAAN) DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Kendala yang masih dihadapi di Banten dalam memenuhi indikator ini antara lain:

a. Kesenjangan perkotaan dan perdesaan
  - Tingkat akses sanitasi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan;
  - Banyak daerah perdesaan di Banten yang masih menggunakan sistem sanitasi tradisional atau bahkan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak.

b. Kualitas infrastruktur sanitasi
  - Banyak infrastruktur sanitasi yang belum dikelola dengan baik, seperti septik tank yang tidak disedot secara rutin;
  - Masih ada pembuangan limbah rumah tangga ke sungai atau selokan, terutama di daerah yang belum memiliki sistem pengolahan air limbah yang memadai.

c. Faktor ekonomi dan kemampuan masyarakat
  - Masyarakat berpenghasilan rendah masih sulit mengakses sanitasi layak karena biaya pemasangan septik tank atau sambungan ke sistem sanitasi kota cukup tinggi;
  - Kurangnya insentif atau subsidi untuk pembangunan sanitasi yang lebih baik bagi kelompok masyarakat miskin.

d. Perubahan iklim dan bencana alam
  - Banten sering mengalami banjir, terutama di daerah Tangerang dan sekitarnya;
  - Banjir memperburuk sistem sanitasi, menyebabkan air limbah mencemari lingkungan dan menyebarkan penyakit.

e. Kurangnya regulasi dan pengawasan
  - Masih lemahnya regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik;

- Kurangnya pengawasan terhadap pembangunan perumahan baru yang tidak selalu menyediakan sistem sanitasi yang sesuai standar.

C. TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH

Pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya timbulan sampah yang tidak dikendalikan penanganannya secara baik di bagian hulu (penghasil sampah), maka konsekuensi pahit yang harus diterima oleh pemerintah daerah yaitu berupa kebutuhan lahan yang semakin besar untuk melakukan pemrosesan dan pengolahan akhir sampah di bagian hilir.

TABEL II.16
JUMLAH TIMBULAN SAMPAH HARIAN DAN TAHUNAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2024

NO	WILAYAH	2022	2023	2024
		TIMBULAN SAMPAH HARIAN (TON)	TIMBULAN SAMPAH HARIAN (TON)	TIMBULAN SAMPAH HARIAN (TON)
1	KABUPATEN LEBAK	591,47	597,98	602,55
2	KABUPATEN PANDEGLANG	509,7	509,07	525,1
3	KABUPATEN TANGERANG	2.305,47	2.337	2.347
4	KABUPATEN SERANG	1.135,84	1.175,24	1.200,57
5	KOTA TANGERANG	1.381,25	1.409,52	2.187,41
6	KOTA CILEGON	227,84	278,83	286,93
7	KOTA SERANG	584,83	601,28	617,31
8	KOTA TANGERANG SELATAN	972,60	1.011,45	1.022,65
	PROVINSI BANTEN	7.709,00	7.920,39	8.789,52

NO	WILAYAH	2022	2023	2024
		TIMBULAN SAMPAH TAHUNAN (TON)	TIMBULAN SAMPAH TAHUNAN (TON)	TIMBULAN SAMPAH TAHUNAN (TON)
1	KABUPATEN LEBAK	215.886,24	218.260,50	219.931,10
2	KABUPATEN PANDEGLANG	186.040	185.812,30	191.661,50
3	KABUPATEN TANGERANG	841.497,68	853.005	856.655
4	KABUPATEN SERANG	414.581,57	428.962,78	438.208,32
5	KOTA TANGERANG	504.156,25	514.474,80	798.405,01
6	KOTA CILEGON	83.160,08	101.772,80	104.729,66
7	KOTA SERANG	213.462,95	219.467,20	225.318,46
8	KOTA TANGERANG SELATAN	355.000,40	369.177,50	373.267,45
	PROVINSI BANTEN	2.813.785,26	2.890.928,03	3.208.176,50

Sumber: SIPSN, 2024 Diolah Oleh Bappeda

Tabel di atas menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi dibandingkan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, hal ini jika disandingkan dengan jumlah penduduk di Tahun 2024 karena Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi daripada wilayah lainnya.

Sementara itu dari jumlah timbulan sampah di Tahun 2024 terbesar dihasilkan oleh sektor Rumah Tangga sebesar 65,63 persen, pada sektor ini komposisi terbesar yaitu 49,13 persen berupa sisa makanan. Berdasarkan data tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya permasalahan penanganan sampah di hulu bagi setiap penghasil sampah (khususnya sektor rumah tangga di Provinsi Banten) yang belum maksimal, ini akan berdampak kepada jumlah timbulan yang perlu dilakukan pengelolaan di hilir atau pada Tempat Pengelolaan Sampah

Terpadu (TPST). Sementara itu, komposisi sampah organik berupa sisa makanan menjadi komposisi terbesar dibandingkan komposisi non organik. Hal ini menjadi landasan sebagai bentuk rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah, karena sampah yang tidak terkelola dapat menjadi sumber pencemaran udara, air, dan tanah. Sampah pun dapat menurunkan estetika suatu wilayah akibat bau menyengat yang tidak membuat nyaman, memicu pertumbuhan organisme yang menyebabkan timbulnya penyakit bawaan sampah, yang berakhir akan menghasilkan air lindi (*leachate*) yang dapat mencemari tanah dan air tanah.

Berdasarkan informasi tersebut, partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mengelola sampah masih kurang, ditambah dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu diperlukan adanya kolaborasi antarpemerintah daerah yang melibatkan pihak swasta atau pihak profesional lainnya untuk lebih proaktif dan responsif terhadap permasalahan pengelolaan sampah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih jauh daripada itu sistem pengelolaan persampahan yang dimulai sejak sampah dihasilkan di sumber sampai dengan di tempat pengolahan akhir sampah perlu juga dikoordinasikan secara regional atau antar kabupaten/kota.

Berdasarkan proyeksi timbulan sampah, diketahui bahwa terdapat potensi timbulan sampah terbanyak berada di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang (untuk lebih jelasnya dapat melihat pada tabel di bawah). Sementara untuk beberapa wilayah lainnya relatif sedang dan rendah, oleh sebab itu adanya kebutuhan akan fasilitas pelayanan TPA Regional terutama untuk menampung timbulan sampah di kawasan perkotaan. Sebagai informasi terkait tempat pengolahan sampah tersebar pada beberapa wilayah, diantaranya: a) Kabupaten Pandeglang meliputi TPA Bangkonol, TPA Bojong Canar, TPA Lingsuh/Cigeulis, dan TPA Munjul; b) Kabupaten Tangerang yaitu TPA Jatiwaringin; c) Kabupaten Lebak meliputi TPA Dengung dan TPA Cihara; d) Kabupaten Serang yaitu TPA Cilowong; dan e) Kota Cilegon yaitu TPA Bagendung.

TABEL II.17

PROYEKSI TIMBULAN SAMPAH TAHUN 2023-2043 DI PROVINSI BANTEN

WILAYAH	TIBULAN SAMPAH (M^3/TAHUN)				
	2023	2028	2033	2038	2043
KAB PANDEGLANG	1.355.712,18	1.459.466,21	1.564.268,84	1.668.747,18	1.772.825,51
KAB LEBAK	1.503.288,77	1.653.542,83	1.801.786,97	1.954.055,31	2.104.304,16
KAB TANGERANG	4.955.090,20	7.386.049,40	9.410.902,40	11.047.919,33	10.878.829,30
KAB SERANG	1.779.032,12	1.969.320,71	2.159.993,26	2.350.905,82	2.540.938,38
KOTA TANGERANG	2.411.580,70	2.720.516,[illegible]	2.935.304,02	3.038.723,61	3.209.745,45
KOTA CILEGON	455.107,53	474.858,84	497.729,12	518.420,71	539.848,20
KOTA SERANG	735.880,24	763.231,45	801.282,16	878.980,67	926.685,58
KOTA TANGERANG SELATAN	1.761.878,14	1.975.731,61	2.110.912,09	2.316.306,68	2.297.459,07
TOTAL	14.949.872,19	18.229.784,85	21.321.307,86	24.323.585,82	27.273.415,74

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

2.1.1.10 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

A. KAWASAN RAWAN BENCANA

Provinsi Banten secara geografis merupakan daerah yang terletak di ujung bagian barat Pulau Jawa dan memiliki potensi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) bahkan potensi ancaman bencana sebagai konsekuensi letak geografis yang berdekatan dengan Patahan Sumatera dan Cincin Api Pasifik (terdekat Gunung Anak Krakatau). Provinsi Banten merupakan salah satu daerah rawan terjadi bencana alam. Sebagai upaya dalam mengidentifikasi dampak bencana dan perencanaan kebencanaan, Pemerintah Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027. Dokumen ini menetapkan risiko bencana prioritas di Provinsi Banten agar dapat dijadikan acuan dalam pembangunan daerah.

Secara umum prioritas risiko bencana didasarkan pada tingkat risiko yang bersumber dari Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Banten dan tingkat kerawanan atau kecenderungan kejadian yang dihasilkan dari catatan kejadian bencana di daerah. Adapun kejadian bencana di Provinsi Banten Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

TABEL II.18
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DI PROVINSI BANTEN

NO	ANCAMAN BENCANA	TAHUN					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	BANJIR	71	70	290	238	387	1.019
2	TANAH LONGSOR	12	8	30	32	112	270
3	ABRASI	0	0	0	0	2	2
4	CUACA EKSTREM	58	49	329	490	751	1.679
5	KEKERINGAN	0	0	0	514	63	577
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	35	27	157	757	77	1.103
7	GEMPA BUMI	0	0	16	405	489	910
8	TSUNAMI	0	0	0	0	0	0
9	LETUSAN GUNUNG API	0	0	0	0	0	0
10	KEGAGALAN TEKNOLOGI	0	0	0	0	1	1
	TOTAL	168	154	823	1.483	1.826	6.800

Sumber: BPBD Provinsi Banten, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa bencana yang paling sering terjadi di Provinsi Banten adalah banjir, diikuti dengan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan dan tertinggi adalah kejadian bencana cuaca ekstrem. Karakteristik wilayah yang menjadi area banjir di Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki topografi datar dan berada di sekitar sungai, daerah yang sering mengalami bencana banjir adalah kabupaten dan kota yang berada di bagian utara Provinsi Banten meliputi Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Adapun kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem berupa peningkatan suhu drastis di luar dari keadaan cuaca pada umumnya.

TABEL II.19
TINGKAT RISIKO BENCANA PRIORITAS DI PROVINSI BANTEN

ANCAMAN BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
BANJIR BANDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
COVID-19	TINGGI	RENDAH	TINGGI	RENDAH
CUACA EKSTREM	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
EPIDEMI WABAH PENYAKIT	RENDAH	RENDAH	TINGGI	RENDAH

ANCAMAN BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
KEGAGALAN TEKNOLOGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
KEKERINGAN	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
LETUSAN GUNUNGAPI KARANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
LETUSAN GUNUNGAPI PULOSARI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
LIKUIFAKSI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
TSUNAMI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Pergub Banten Nomor 59 Tahun 2022 tentang KRB Provinsi Banten Tahun 2022-2026

Berdasarkan perhitungan profil risiko bencana di atas, Provinsi Banten menetapkan 10 (sepuluh) jenis risiko bencana prioritas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Hasil analisis potensi bencana berada pada kelas tinggi. Dari 15 (lima belas) potensi bencana, terdapat 10 (sepuluh) bencana yang masuk dalam kelas tinggi yang meliputi banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, tsunami, letusan Gunungapi Pulosari, dan kegagalan teknologi. Bencana gempa bumi dan kekeringan memiliki potensi bencana terluas yang mencakup seluruh wilayah Provinsi Banten. Adapun potensi risiko bencana lainnya meliputi cuaca ekstrem, likuifaksi, letusan Gunungapi Karang, dan epidemi dan wabah penyakit.

TABEL II.20

POTENSI PENDUDUK TERPAPAR AKIBAT BENCANA DI PROVINSI BANTEN

ANCAMAN BENCANA	LUAS TERPAPAR (HA)	KELAS	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				KELAS
			JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN			
				KELOMPOK	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK CACAT	
BANJIR	367.980	TINGGI	3.557.808	387.084	425.426	9.814	SEDANG
BANJIR BANDANG	86.622	TINGGI	371.113	40.005	44.159	1.264	SEDANG
COVID-19	966.292	TINGGI	13.788.552	1.179.307	925.491	22.862	SEDANG
CUACA EKSTREM	854.445	TINGGI	11.600.630	1.159.552	865.904	22.216	SEDANG
EPIDEMI WABAH PENYAKIT	951.573	SEDANG	15.436.657	1.657.425	889.178	22.182	SEDANG
GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	13.178	TINGGI	79.581	8.188	9.679	234	SEDANG
GEMPABUMI	966.292	TINGGI	13.788.552	1.179.307	925.491	22.862	SEDANG
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	407.730	TINGGI	-	-	-	-	-
KEGAGALAN TEKNOLOGI	30.387	SEDANG	120.611	14.213	17.485	188	TINGGI
KEKERINGAN	966.292	TINGGI	13.788.552	1.179.307	925.491	22.862	SEDANG
LETUSAN GUNUNGAPI KARANG	9.120	SEDANG	40.327	4.362	4.831	126	SEDANG
LETUSAN GUNUNGAPI PULOSARI	8.881	TINGGI	85.201	9.651	12.098	357	SEDANG
LIKUIFAKSI	198.335	SEDANG	3.655.301	359.773	300.571	6.654	SEDANG
TANAH LONGSOR	324.095	TINGGI	595.625	62.803	69.915	2.290	SEDANG
TSUNAMI	19.356	TINGGI	168.718	17.465	21.658	466	SEDANG

Sumber: Pergub Banten Nomor 59 Tahun 2022 tentang KRB Provinsi Banten Tahun 2022-2026

Berdasarkan tabel di atas, kategori bencana yang paling berdampak pada masyarakat adalah bencana gempa bumi, kekeringan, dan banjir. Jika ditinjau dari kejadian bencana, bencana banjir yang memiliki dampak paparan yang tinggi. Adapun daerah yang terpapar oleh mayoritas bencana meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Kabupaten Pandeglang menjadi daerah dengan paparan yang merata pada semua kategori bencana diakibatkan oleh adanya karakteristik fisiografis yang beragam sehingga mudah terkena dampak baik bencana di wilayah perkotaan, dataran tinggi, dan pesisir.

TABEL II.21
POTENSI KERUGIAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT BENCANA DI PROVINSI BANTEN

ANCAMAN BENCANA	LUAS TERPAPAR (HA)	POTENSI KERUGIAN (MILIAR RUPIAH)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (LUAS HA)	KELAS
		KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS		
BANJIR	287.586	23.897.159	14.200.886	38.098.045	TINGGI	1.066	TINGGI
BANJIR BANDANG	38.022	2.233.452	928.473	3.161.925	TINGGI	98	SEDANG
COVID-19	966.292	-	-	-	-	-	-
CUACA EKSTREM	851.445	95.169.618	23.543.279	118.712.898	TINGGI	-	-
EPIDEMI WABAH PENYAKIT	951.570	-	-	-	-	-	-
GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	18.178	630.913	40.873	671.286	SEDANG	713	TINGGI
GEMPABUMI	966.292	28.761.401	16.556.345	45.317.746	TINGGI	-	-
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	407.738	-	1.145.667	1.145.667	RENDAH	10.298	TINGGI
KEGAGALAN TEKNOLOGI	30.387	3.627	487	4.114	SEDANG	-	-
KEKERINGAN	966.292	-	54.083.815	54.083.815	RENDAH	45.251	TINGGI
LETUSAN GUNUNGAPI KARANG	9.120	2.085	45.879	48.584	SEDANG	305	TINGGI
LETUSAN GUNUNGAPI PULOSARI	8.681	46.611	205.269	250.880	TINGGI	719	TINGGI
LIKUEFAKSI	198.583	7.367.543	915.716	8.283.259	TINGGI	311	TINGGI
TANAH LONGSOR	424.055	3.127.227	4.324.345	7.451.572	TINGGI	5.802	TINGGI
TSUNAMI	10.536	1.053.416	84.204	1.137.620	TINGGI	36	RENDAH

Sumber: Pergub Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang RPB Provinsi Banten Tahun 2022-2026

TABEL II.22
IDENTIFIKASI KETERPAPARAN AKIBAT BENCANA DI PROVINSI BANTEN

NO	ANCAMAN BENCANA	LUASAN TERPAPAR (HA)	PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	WILAYAH
1	BANJIR	135.476	7.051.838	KAB. PANDEGLANG KAB. LEBAK KAB. SERANG
2	BANJIR BANDANG	20.831	371.115	KAB. PANDEGLANG KAB. LEBAK KAB. SERANG
3	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	72.730	-	KAB. LEBAK KAB. PANDEGLANG KAB. SERANG
4	GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI	6.273	79.581	KAB. PANDEGLANG
5	GEMPA BUMI	179.085	11.768.442	KAB. PANDEGLANG KAB. LEBAK
6	KEKERINGAN	109.380	11.768.692	KAB. PANDEGLANG KAB. SERANG
7	TANAH LONGSOR	184.404	305.925	KAB. PANDEGLANG KAB. LEBAK KAB. SERANG

NO	ANCAMAN BENCANA	LUASAN TERPAPAR (HA)	PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	WILAYAH
8	TSUNAMI	12.856	168.718	KAB. PANDEGLANG
				KAB. LEBAK
				KAB. SERANG
				KOTA CILEGON
9	LETUSAN GUNUNG API PULOSARI	207	83.251	KAB. PANDEGLANG
10	KEGAGALAN TEKNOLOGI	1.530	127.821	KAB. PANDEGLANG
				KAB. SERANG
				KAB. TANGERANG
				KOTA CILEGON
				KOTA SERANG

Sumber: Pergub Banten Nomor 39 Tahun 2022 tentang KRB Provinsi Banten Tahun 2022-2026

Wilayah yang masuk dalam area rawan banjir di Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki karakteristik topografi datar dan berada di sekitar sungai. Potensi bencana banjir di Provinsi Banten didominasi di wilayah bagian utara yang termasuk wilayah padat penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan dengan parameter bahaya banjir, maka didapatkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Banten. Total luas wilayah rawan banjir di Provinsi Banten secara keseluruhan adalah 267.980 Ha dan berada pada kelas bahaya tinggi. Secara lebih rinci, kelas bahaya tersebut dibagi menjadi 3 kelas bahaya, yaitu bahaya dengan kelas rendah seluas 5.750 Ha, bahaya dengan kelas sedang seluas 126.345 Ha, sedangkan daerah dengan kelas bahaya tinggi memiliki luas sebesar 135.876 Ha. Kabupaten/kota dengan bahaya banjir terluas adalah Kabupaten Serang dengan luas sebesar 74.898 Ha dan masuk dalam kelas bahaya tinggi.

Dalam pengukuran kebencanaan, terdapat 2 (dua) indeks pengukuran, yaitu Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Risiko Bencana merupakan indeks yang digunakan untuk menilai dan mengukur risiko dari berbagai jenis bencana alam yang kemungkinan diperkirakan terjadi di suatu wilayah. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu tingkat risiko bencana di suatu wilayah rentan terhadap bencana dan seberapa besar potensi kerugian yang dimungkinkan terjadi, sehingga memberikan informasi bagi pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam memulai upaya kesiapsiagaan dan mitigasi.

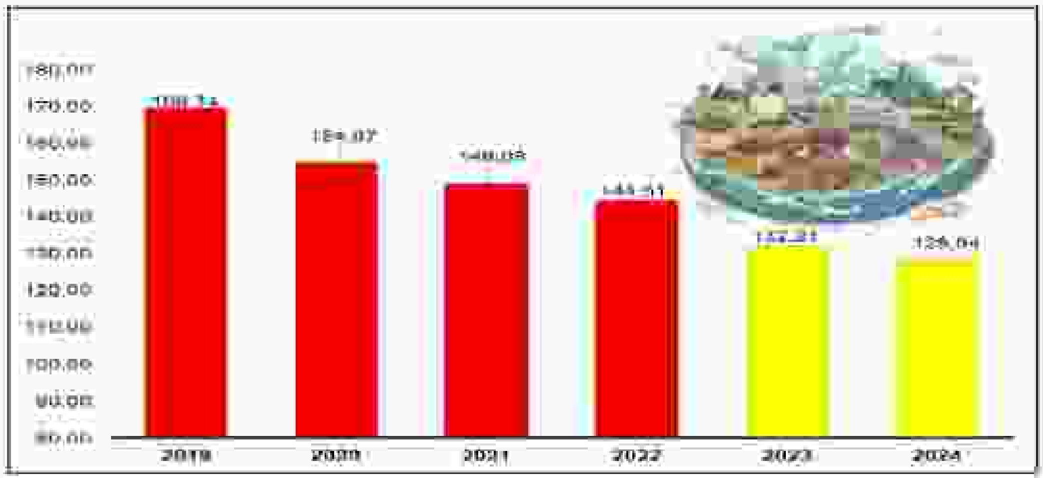

GAMBAR II.18

INDEKS RISIKO BENCANA (IRB) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2019-2024

(Sumber: BNPB 2024, Diolah Oleh Bappeda)

TABEL II.23
NILAI INDEKS RISIKO BENCANA (IRB) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

NO	WILAYAH	TAHUN					KELAS RESIKO BENCANA TAHUN 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	KABUPATEN PANDEGLANG	177,46	177,46	200,65	169,21	195,52	TINGGI
2	KABUPATEN LEBAK	182,04	182,04	190,37	172,98	185,64	TINGGI
3	KABUPATEN SERANG	203,2	176,14	154,58	136,82	123,35	SEDANG
4	KABUPATEN TANGERANG	146,59	146,59	130,43	141,45	125,82	SEDANG
5	KOTA SERANG	168,56	168,56	136,2	140,12	127,55	SEDANG
6	KOTA CILEGON	138,15	121,23	115,97	119,49	111,01	SEDANG
7	KOTA TANGERANG	136	122,8	116,8	104,55	95,74	SEDANG
8	KOTA TANGERANG SELATAN	96,61	87,44	79,86	73,06	68,15	SEDANG
PROVINSI BANTEN		159,87	150,08	130,13	132,11	128,64	SEDANG

Sumber: BNPB 2025

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel dan gambar di atas, nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Banten berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan adanya kelas risiko bencana yang masih tinggi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Oleh sebab itu diperlukan upaya mitigasi bencana dan pemenuhan literasi kebencanaan bagi masyarakat serta didukung dengan penguatan infrastruktur tanggap bencana dan sistem informasi bencana yang mutakhir. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki kelas risiko bencana yang tinggi diakibatkan oleh tingginya potensi bahaya dan kejadian bencana, kerentanan infrastruktur, sosial, dan ekonomi, serta kurangnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana.

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) di Provinsi Banten juga terlihat mengalami penurunan dari Tahun 2019 dengan nilai 169,74 menjadi 128,64 di Tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap risiko bencana di Provinsi Banten semakin berkurang, namun literasi sosial kebencanaan dan perilaku mitigasi bencana masyarakat sebagai upaya preventif bencana sangat perlu terus ditingkatkan dan perlu diperhatikan karena masih berada pada nilai berisiko sedang dengan nilai yang cukup tinggi.

Sementara itu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan dalam menilai sejauh mana suatu wilayah mampu menghadapi, menanggulangi, dan pulih dari suatu ancaman bencana jika terjadi. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di kabupaten/kota berada dalam rentang Rendah-Sedang, dengan Kabupaten Lebak menempatkan pada posisi rendah. Pengukuran ketahan daerah menjadi salah satu variabel yang akan berdampak pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) selain variabel kerentanan dan bahaya.

TABEL II.24
NILAI INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2021-2024

NO	WILAYAH	TAHUN				KELAS KETAHANAN DAERAH TAHUN 2024
		2021	2022	2023	2024	
1	KABUPATEN PANDEGLANG	0,78	0,73	0,77	0,76	SEDANG
2	KABUPATEN LEBAK	0,66	0,58	0,62	0,29	RENDAH
3	KABUPATEN SERANG	0,78	0,64	0,68	0,71	SEDANG
4	KABUPATEN TANGERANG	0,70	0,70	0,69	0,74	SEDANG
5	KOTA SERANG	0,46	0,47	0,38	0,61	SEDANG

NO	WILAYAH	TAHUN				KELAS KETAHANAN DAERAH TAHUN 2024
		2021	2022	2023	2024	
6	KOTA CILEGON	0,36	0,57	0,56	0,64	SEDANG
7	KOTA TANGERANG	0,35	0,59	0,59	0,58	SEDANG
8	KOTA TANGERANG SELATAN	0,50	0,55	0,58	0,58	SEDANG
	PROVINSI BANTEN	0,48	0,60	0,63	0,61	SEDANG

Sumber: BNPB 2025

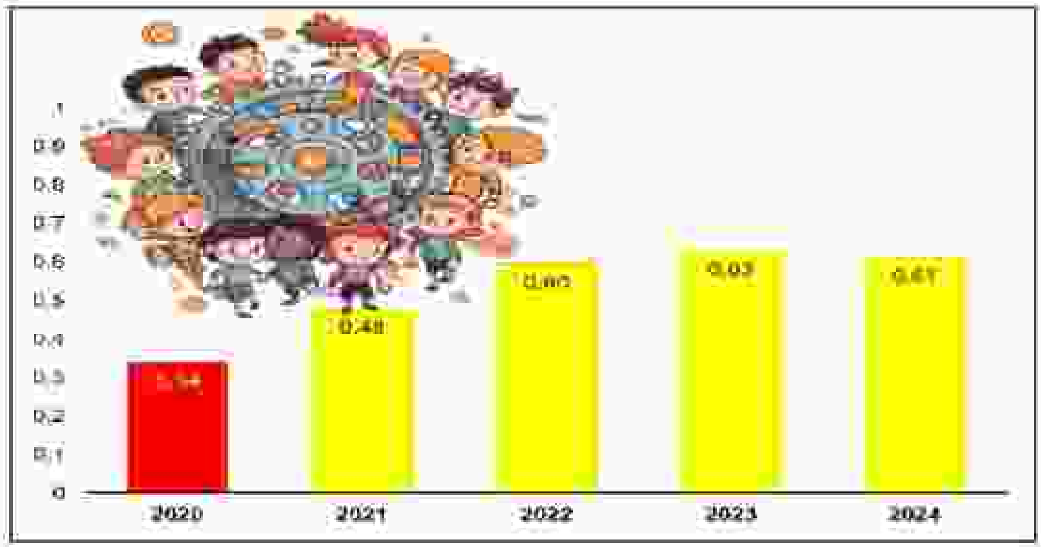

GAMBAR II.19

INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

(Sumber: BNPB 2025, Diolah Oleh Bappeda)

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel dan gambar di atas, nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Provinsi Banten juga terlihat mengalami peningkatan, hanya saja penurunan terjadi di Tahun 2024 dari 0,63 menjadi 0,61. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat diperlukannya penguatan kapasitas daerah untuk menangani bencana (pra bencana–tanggap darurat–pasca bencana) dan komponen lainnya sebagai penunjang pengukuran ketahanan daerah baik yang dilakukan melalui kewenangan provinsi maupun dari kewenangan kabupaten/kota itu sendiri. Lebih jauh daripada itu, penurunan nilai IKD dapat disebabkan oleh kelembagaan yang lemah, kurangnya sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, kesadaran masyarakat yang rendah, dan kurangnya perencanaan dan evaluasi. Sementara itu keberhasilan atas pencapaian target kinerja IKD dapat diwujudkan oleh peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat di Provinsi Banten untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Selain itu juga didukung oleh adanya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.

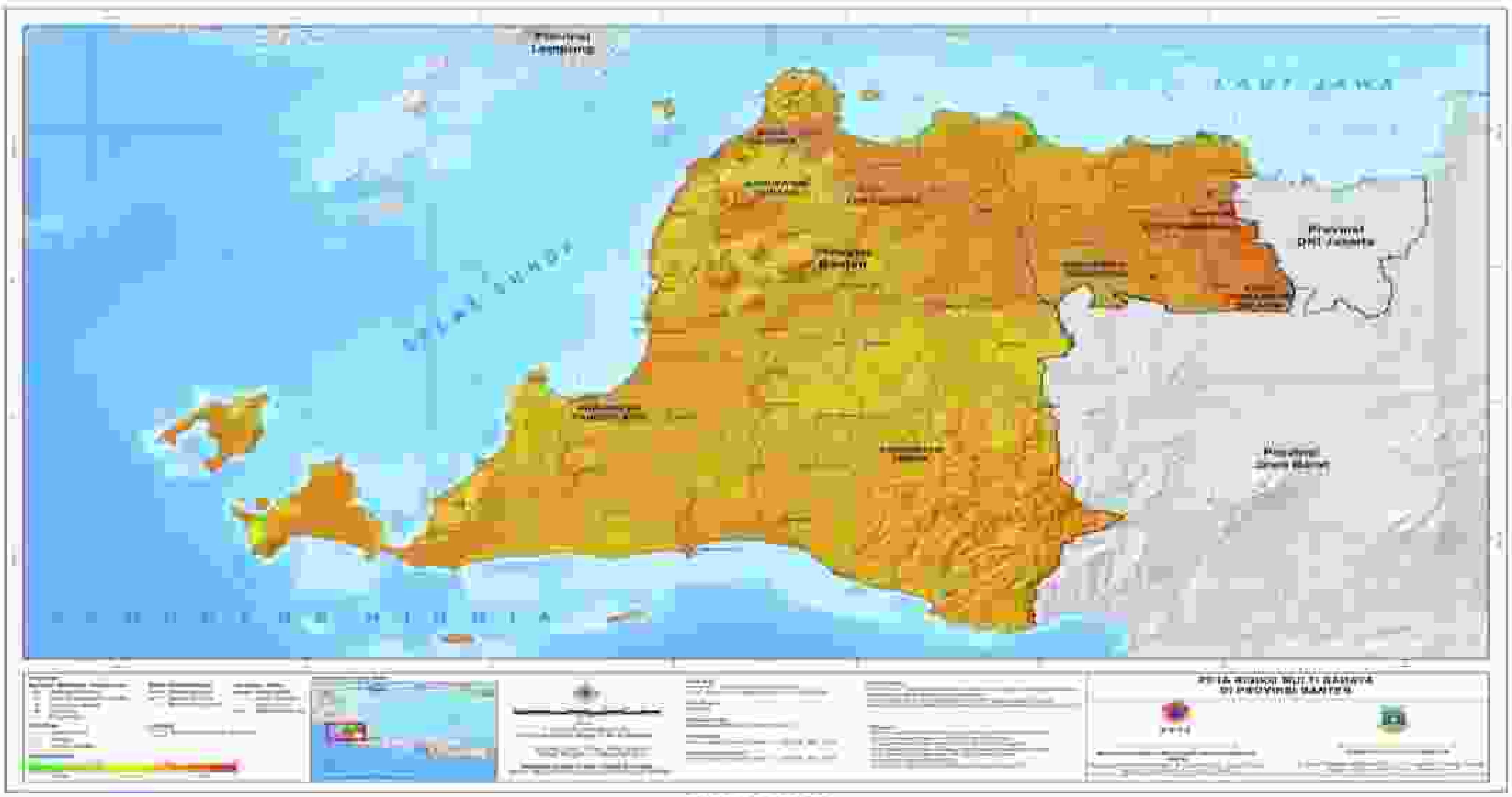

GAMBAR II.20

PETA RISIKO MULTI BAHAYA DI PROVINSI BANTEN

(Sumber: Pergub Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2022-2026)

B. PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim merupakan kondisi yang terjadi akibat adanya perubahan terhadap cuaca maupun suhu dunia, fenomena ini terjadi didominasi oleh aktivitas manusia terhadap pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan faktor lainnya yang berdampak pada kondisi lingkungan (seperti meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer) yang secara makro akan berdampak pada kondisi perekonomian suatu daerah. Saat ini perubahan iklim menjadi isu global dan menjadi tantangan terbesar dunia akibat dampak yang ditimbulkan sangat luas terhadap ketahanan pangan, peningkatan suhu global, naiknya permukaan laut, dan berdampak terhadap kesehatan manusia.

Tingginya kerentanan iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi pada sektor pesisir dan laut, pertanian, kesehatan, dan sektor perairan. Besarnya kerugian yang ditimbulkan tentunya memerlukan langkah antisipasi serta komitmen dan kolaborasi pembangunan *Net Zero Emission* (NZE) dalam mengurangi dampak negatif dan krisis perubahan iklim.

Pengaruh terhadap perubahan iklim dapat dilihat pada pengaruh pola ruang dan struktur ruang terhadap data kerentanan iklim SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan), Provinsi Banten memiliki wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dengan luas lebih dari 700.000 Ha yang terbagi menjadi beberapa tingkatan kerentanan iklim sebagaimana SIDIK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

TABEL II.25

TINGKAT KERENTANAN PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI BANTEN

NO	WILAYAH	TINGKAT KERENTANAN PERUBAHAN IKLIM (SIDIK, KLHK)					LUAS (HA)
		TIDAK RENTAN	AGAK RENTAN	CUKUP RENTAN	RENTAN	SANGAT RENTAN	
1	KABUPATEN LEBAK	7.335,37	76.396,46	2[illegible].023,48	4.841,25	-	3[illegible]
2	KABUPATEN PANDEGLANG	3.500,48	21.100,22	250.925,04	-	2.161,79	277.787,13
3	KABUPATEN SERANG	18.480,47	7.980,05	118.684,07	962,48	-	145.736,07
4	KABUPATEN TANGERANG	43.646,13	1.184,05	57.778,29	-	-	102.608,47
5	KOTA TANGERANG	14.498,70	-	3.142,80	485,33	-	18.126,28
6	KOTA TANGERANG SELATAN	11.348,18	-	4.054,14	-	-	15.352,93
7	KOTA SERANG	10.903,28	-	15.565,18	-	-	26.468,45
8	KOTA CILEGON	13.613,37	-	2.890,07	-	-	16.485,64
	TOTAL	123.083,82	106.500,77	695.214,24	6.289,07	2.161,79	933.[illegible]

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di Provinsi Banten terhadap kerentanan perubahan iklim, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi terjadi di wilayah Pandeglang, lebih lengkapnya sebagaimana pada tabel di bawah.

TABEL II.25

TINGKAT KERENTANAN SANGAT TINGGI PADA INDEKS PERUBAHAN IKLIM, RISIKO BANJIR, DAN RISIKO KERING DI PROVINSI BANTEN

KECAMATAN	DESA	IKA	IKS	INDEKS PERUBAHAN IKLIM	RISIKO BANJIR	RISIKO KERING
PATIA	SIMPANGTIGA	0,43	0,71	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
CARITA	CINOYONG	0,44	0,7	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029
Ket: Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) dan Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS)

C. INTENSITAS EMISI GRK

Penguatan aspek perencanaan dalam upaya menurunkan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menjadikan Pembangunan Rendah Karbon menjadi salah satu program prioritas di dalam salah satu agenda Prioritas Nasional 6 (PN 6) "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim" di dalam RPJMN 2020-2024. Lebih jauh daripada itu, intensitas emisi GRK menjadi salah satu proksi pengukuran indikator lingkungan yang menjadi fokus utama dalam RPJPN-RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 maupun pada RPJMN-RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi pembangunan rendah karbon, ditetapkan 5 (lima) strategi utama, yaitu:

1. Pembangunan energi berkelanjutan;
2. Pemulihan lahan berkelanjutan;
3. Penanganan limbah;
4. Pengembangan industri hijau; dan
5. Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca di Provinsi Banten yang terus meningkat sebagaimana gambar di bawah. Sektor yang berkontribusi terhadap penurunan intensitas emisi GRK di Provinsi Banten mencakup terhadap: a) bidang kehutanan dan lahan gambar; b) bidang pertanian; c) bidang transportasi; dan d) bidang pengelolaan limbah.

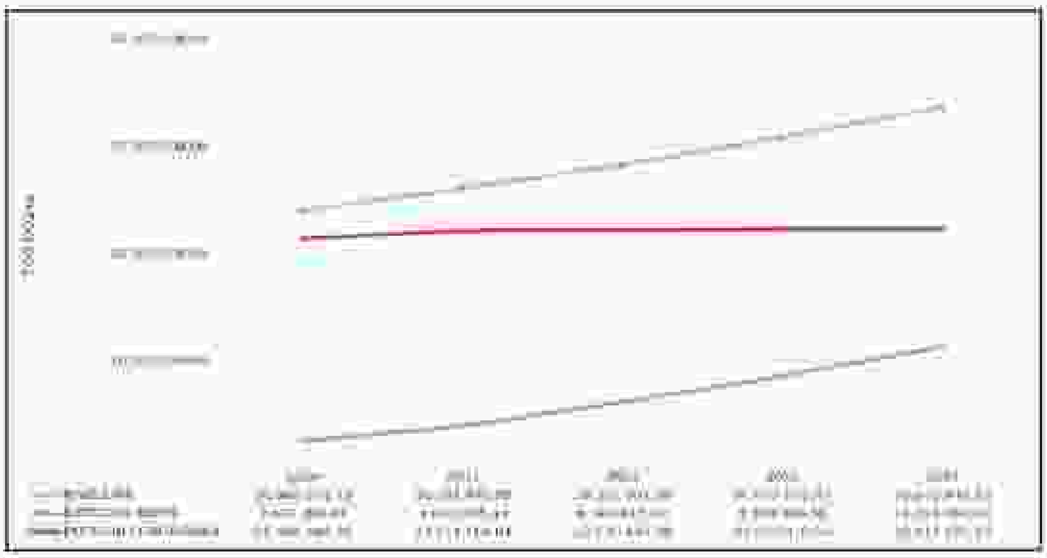

GAMBAR II.21

NILAI BASELINE, ESTIMASI EMISI, DAN POTENSI PENURUNAN TAHUNAN KUMULATIF TAHUN 2020-2024

(Sumber: Aksara Bappenas, Diolah Oleh Bappeda, 2024)

TABEL II.27
CAPAIAN PENURUNAN DAN INTENSITAS EMISI GRK TAHUN 2020-2024 DI PROVINSI BANTEN

TAHUN	JUMLAH AKSI PRK	KEGIATAN AKSI PRK	POTENSI PENURUNAN EMISI GRK (JUTA TON CO_2E)	PERSENTASE DIBANDINGKAN DENGAN BASELINE TAHUN N (PERSEN)
2020	31	1.035	2.625.200,70	89,10
2021	21	1.336	4.013.815,40	84,70
2022	25	1.378	6.160.813,40	78,30
2023	9	1.388	8.070.363,50	72,20
2024	5	1.391	11.351.758,20	66,30

Sumber: Laporan Implementasi PRK Kementerian PPN/Bappenas, 2024

1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

   Kegiatan yang paling banyak dilaksanakan adalah penanaman (rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, pembagian bibit, dan sebagainya), pembangunan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm, Hutan Desa, Hutan Kota, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat), serta kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (baik dari kebakaran hutan, perambahan, maupun *illegal logging*).

2) Bidang Pertanian

   Kegiatan yang paling banyak dilaporkan pada bidang pertanian adalah kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu.

3) Bidang Transportasi

   Aksi mitigasi yang mendominasi pelaporan antara lain aksi mitigasi hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), reformasi sistem transit (BRT), dan *Smart Driving* (*Eco Driving*).

4) Bidang Pengelolaan Limbah

   Kegiatan yang banyak dilakukan oleh provinsi meliputi:

   - Sub-bidang persampahan domestik: pemanfaatan gas metan di TPA, proses komposting di TPST/TPS 3R, dan proses *reuse* dan *recycle* sampah kertas/kardus/karton di Bank Sampah.
   - Sub-bidang air limbah: operasionalisasi IPAL atau *septic tank* komunal, baik itu secara *aerobic* dan *anaerobic*.

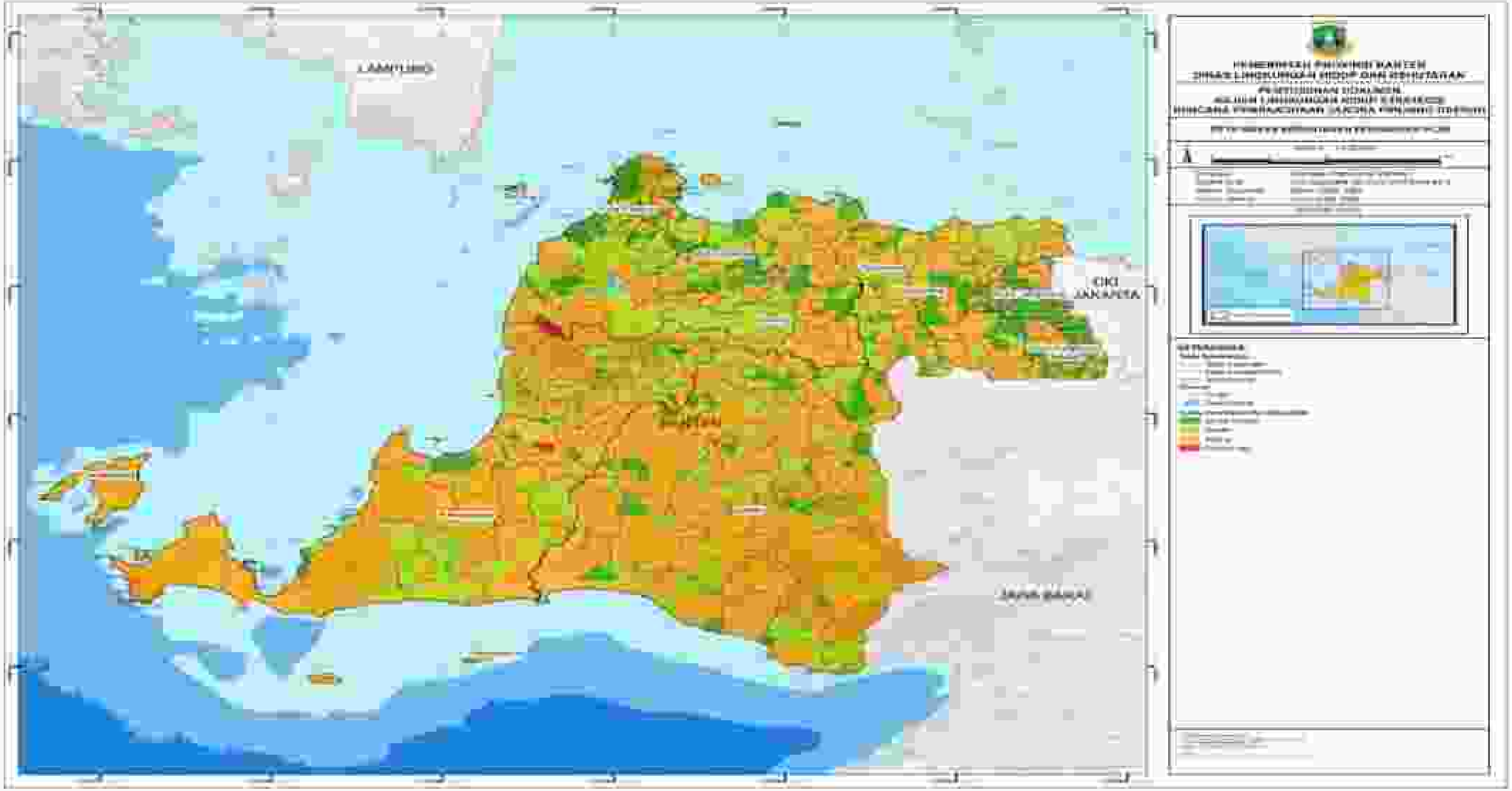
LAMPUNG
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

GAMBAR II.22
PETA INDEKS KERENTANAN PERUBAHAN IKLIM DI PROVINSI BANTEN
(Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029)

2.1.1.11 ASPEK DEMOGRAFI

A. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk adalah total semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

TABEL II.28
JUMLAH PENDUDUK DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
KAB. PANDEGLANG	1.272.687	1.288.318	1.307.000	1.311.266	1.325.552
KAB. LEBAK	1.380.793	1.407.857	1.431.853	1.433.098	1.448.205
KAB. TANGERANG	3.245.619	3.293.353	3.352.372	3.362.605	3.409.486
KAB. SERANG	1.622.630	1.647.790	1.674.315	1.682.133	1.701.803
KOTA TANGERANG	1.895.486	1.911.914	1.930.556	1.950.580	1.962.966
KOTA CILEGON	434.896	441.761	450.271	456.307	465.517
KOTA SERANG	692.101	705.638	720.362	725.794	737.306
KOTA TANGERANG SELATAN	1.354.350	1.365.688	1.378.466	1.391.649	1.399.496
PROVINSI BANTEN	[illegible]	12.061.475	12.251.985	12.307.732	12.431.391

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024. Diolah Oleh Bappeda

Menurut data Tahun 2024, Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang tersebar pada 8 (delapan) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Serang adapun rincian jumlah penduduk kabupaten/kota sebagai pada tabel di atas.

B. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Secara umum faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor alami yaitu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) serta faktor non-alami yaitu migrasi (imigrasi dan emigrasi). Secara garis besar, laju pertumbuhan penduduk cukup berfluktuatif dengan ditunjukkan Kota Serang memiliki nilai yang cukup sedikit lebih besar daripada daerah lainnya di Provinsi Banten, untuk lebih jelas sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini.

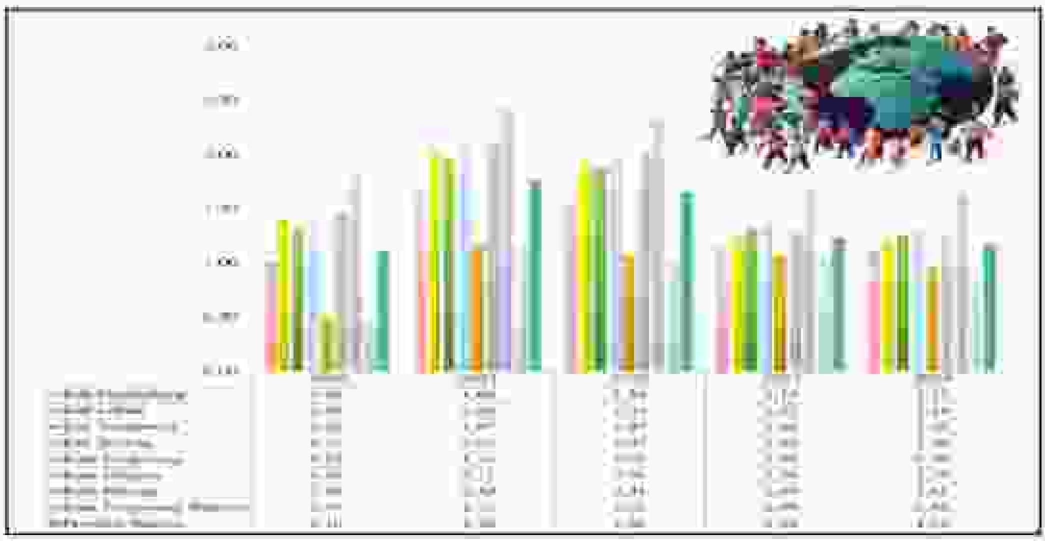

GAMBAR II.23
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024. Diolah Oleh Bappeda)

C. KOMPOSISI PENDUDUK

Komposisi penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Komposisi penduduk Provinsi Banten yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin. Dari kelompok umur, susunan penduduk berdasarkan umurnya dapat mudah dipahami dari gambar piramida penduduk. Piramida penduduk tersebut merupakan piramida penduduk muda yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk berusia muda lebih banyak dari jumlah penduduk usia tua. Dari data usia penduduk tersebut juga dapat diketahui rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Dependency ratio* adalah rasio yang menggambarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun) yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Pada Tahun 2021, *dependency ratio* penduduk Provinsi Banten adalah 42,8 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 43 penduduk yang berusia tidak produktif.

TABEL II.29
KOMPOSISI PENDUDUK DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN TAHUN 2024		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
0-4	503.330	[illegible]	[illegible]
5-9	532.330	508.104	1.040.434
10-14	524.238	513.077	1.037.315
15-19	512.039	480.974	993.013
20-24	517.347	489.236	1.006.583
25-29	532.872	508.259	1.041.131
30-34	526.061	505.825	1.031.886
35-39	515.120	499.725	1.014.845
40-44	479.983	469.358	949.341
45-49	437.687	431.950	869.637
50-54	372.512	373.205	745.717
55-59	304.893	298.808	603.701
60-64	232.864	229.278	462.142
65-69	161.130	158.776	319.906
70-74	97.447	98.340	195.787
75+	61.781	77.074	138.855
PROVINSI BANTEN	6.326.854	6.116.537	12.443.391

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda

Usia 5-9 tahun merupakan usia penduduk terbanyak di Provinsi Banten sedangkan usia 75 tahun keatas merupakan usia penduduk yang paling sedikit. Dari data di atas dapat diketahui komposisi penduduk Provinsi Banten mengalami bonus demografi yang ditandai dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan untuk pemerintah Provinsi Banten dalam hal peningkatan mutu dan daya saing SDM. Dengan semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja, maka produktivitas daerah pun akan semakin meningkat, baik dari produksi jasa ataupun barang, hal ini pada akhirnya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, yang memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak buruk dari bonus demografi yaitu bisa menyebabkan bertambahnya angka pengangguran dan penurunan tingkat produktivitas masyarakat dan daerah.

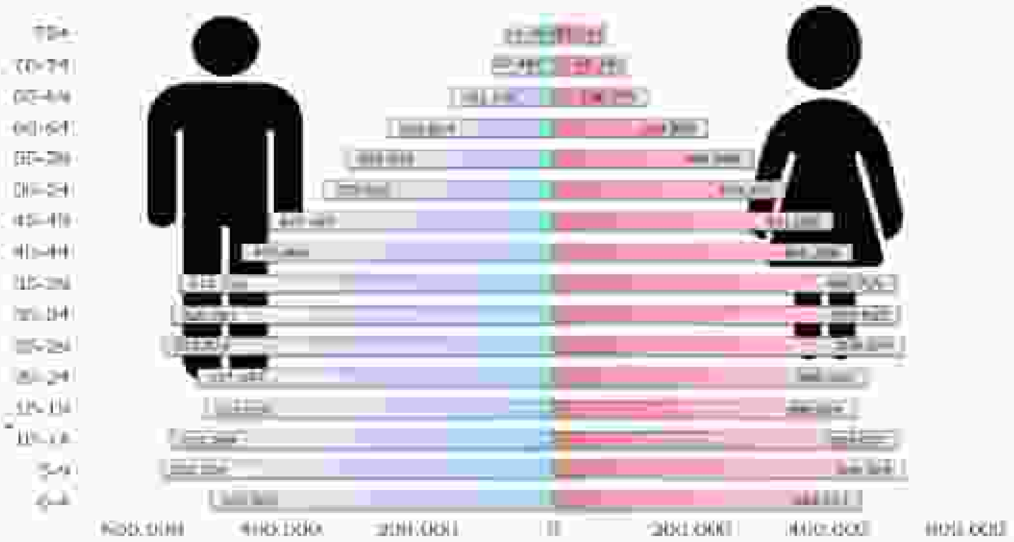

GAMBAR II.24
KOMPOSISI PENDUDUK DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda

D. RASIO PENDUDUK

Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Penghitungan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah cara penggambaran susunan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu dengan menghitung perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan.

TABEL II.30
JUMLAH PENDUDUK DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

WILAYAH	SEX RATIO				
	2020	2021	2022	2023	2024
KAB. PANDEGLANG	105,51	105,40	105,27	105,14	105,00
KAB. LEBAK	106,14	106,04	105,94	105,83	105,71
KAB. TANGERANG	104,78	104,60	104,37	104,21	104,14
KAB. SERANG	104,73	104,61	104,48	104,35	104,21
KOTA TANGERANG	102,41	102,22	102,03	101,85	101,62
KOTA CILEGON	103,22	103,08	102,95	102,80	102,65
KOTA SERANG	104,07	104,27	104,43	104,33	104,20
KOTA TANGERANG SELATAN	100,29	100,12	99,94	99,75	99,54
PROVINSI BANTEN	104,04	103,90	103,75	103,60	103,44

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda

Pada Tahun 2024, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Banten adalah 103 yang artinya setiap terdapat 100 penduduk perempuan maka terdapat 103 penduduk laki-laki. Banyaknya arus pekerja pendatang laki-laki adalah salah satu penyebab tingginya *sex ratio* penduduk di Provinsi Banten. Perhitungan *sex ratio* dapat dijadikan dasar pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan secara adil.

E. KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah, angka tersebut memperlihatkan kesesuaian jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dimiliki. Kondisi kepadatan penduduk Provinsi Banten paling tinggi berada di Kota Tangerang yakni 11.011,86 jiwa/km². Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kota Tangerang disebabkan oleh jumlah penduduk yang banyak akibat angka kelahiran yang tinggi dan migrasi penduduk dari daerah lain ke Kota Tangerang karena masifnya kegiatan perkotaan, ditambah lagi luas Kota Tangerang yang kecil, sehingga menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Tangerang menjadi tinggi. Di sisi lain Kabupaten Lebak menjadi daerah dengan kepadatan penduduk terendah, yakni berada di angka 437,54 jiwa/km². Kecilnya angka kepadatan penduduk di Kabupaten Lebak diakibatkan oleh aktivitas daerah yang didominasi oleh kegiatan pedesaan dan pertanian. Tingginya kepadatan penduduk yang tidak mendapatkan antisipasi bisa mengakibatkan munculnya permukiman kumuh di daerah padat penduduk dan ketidakmerataan ekonomi dan pembangunan di daerah dengan kepadatan penduduk rendah.

TABEL II.31

KEPADATAN PENDUDUK DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (KM²)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM²)
KAB. PANDEGLANG	1.325.952	2.771,41	478,44
KAB. LEBAK	1.449.255	3.312,18	437,54
KAB. TANGERANG	3.400.486	1.027,76	3.308,64
KAB. SERANG	1.701.903	1.469,91	1.157,70
KOTA TANGERANG	1.965.560	178,55	11.011,80
KOTA CILEGON	455.617	162,51	2.803,62
KOTA SERANG	734.866	265,79	2.764,84
KOTA TANGERANG SELATAN	1.389.698	163,86	8.489

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024. Diolah Oleh Bappeda.

F. KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Peran masyarakat adat dalam pembangunan di Provinsi Banten tidak hanya terbatas pada tanggung jawab mereka sebagai penjaga tradisi dan adat istiadat. Masyarakat adat juga memiliki pengetahuan lokal yang berharga dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu penting dalam mengkalkulasi jumlah dan kawasan masyarakat adat dan diintegrasikan dengan perlindungan masyarakat adat melalui hukum adat.

Provinsi Banten memiliki masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul yang seluruhnya berada di Kabupaten Lebak. Masyarakat adat Baduy berada di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar. Permukiman di Desa Kanekes dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Baduy Tangtu/Kajeroan yang menempati daerah sebelah selatan; dan wilayah Baduy Panamping yang berada di wilayah sebelah timur, barat, dan utara. Di wilayah Baduy Tangtu terdapat Kampung Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik, sedangkan di wilayah Baduy Panamping terdapat 56 kampung. Sementara Kasepuhan Banten Kidul berada di Kecamatan Cibeber dan di wilayah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Kasepuhan Banten

Kidul adalah kumpulan kelompok masyarakat adat sub-etnis Sunda yang tinggal di sekitar Gunung Halimun, terutama di wilayah Kabupaten Sukabumi sebelah barat hingga ke Kabupaten Lebak, dan ke utara hingga ke daerah selatan Kabupaten Bogor.

Keberadaan masyarakat adat di Provinsi Banten diatur sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Di Tahun 2024 terdapat penduduk masyarakat hukum adat sebanyak 214.438 orang yang terbagi menjadi 108.410 laki-laki dan 106.028 perempuan, lebih jelasnya disajikan pada tabel di bawah ini.

TABEL II.32
JUMLAH PENDUDUK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
	LAKI-LAKI	PEREMUAN	JUMLAH
CITOREK TIMUR	1.292	1.170	2.462
CITOREK TENGAH	1.996	1.916	3.912
CITOREK BARAT	1.643	1.436	3.079
CITOREK SABRANG	1.157	1.049	2.206
CITOREK KIDUL	1.074	958	2.032
LEBAK SITU	2.312	1.956	4.268
CIROMPANG	811	809	1.620
GURADOG	2.171	2.035	4.206
CIBARANI	997	983	1.980
CIKADU	1.338	1.234	2.396
CISUNGSANG	1.094	1.142	2.236
KUJANGJAYA	1.520	1.451	2.971
WANASARI	1.158	1.127	2.285
MEKARSARI	1.340	1.290	2.630
SINDANG LAYA	1.575	1.526	3.101
HARIANG	2.536	2.426	4.962
SOBANG	2.228	2.105	4.333
WANGUN JAYA	1.208	1.061	2.269
BAYAH TIMUR	3.532	3.219	6.751
JAGARAKSA	1.210	2.449	3.659
MARAYA	2.436	2.215	4.651
CIKUGHIRUNG	1.907	1.802	3.709
SEKARWANGI	2.032	1.947	3.979
NEGLASARI	2.016	1.917	3.933
HEGARMANAH	1.066	1.004	2.070
CIHAMBALI	1.358	1.272	2.630
SUKAMULYA	1.494	1.244	2.738
WARUNG BANTEN	1.615	1.559	3.174
CISUREN	1.793	1.756	3.549
CIJENGKOL	2.297	2.107	4.404
GIRIMUKTI	1.505	1.381	2.886
CIBEBER	2.263	2.211	4.474
CIKOTOK	1.232	1.181	2.413
PASIR GEMBONG	1.174	1.119	2.293
CIDIKIT	2.095	1.975	4.070
DARMASARI	1.653	1.576	3.229
SAWARNA	2.402	2.359	4.761
BAYAH BARAT	4.318	4.282	8.600
CILOGRANG	1.681	1.641	3.322
LEBAK TIPAR	1.597	1.580	3.177
CIKAMUNDING	2.260	2.036	4.296
CIKATOMAS	2.415	2.210	4.625
SUWAKAN	1.821	1.691	3.512
MAREAK	2.002	1.940	3.942
PANYAUNGAN	2.199	2.132	4.331
PANGGARANGAN	2.081	2.094	4.175
GUNUNG GEDE	1.745	1.652	3.397
JATAKE	1.752	1.691	3.443
MEKAR JAYA	2.436	2.215	4.651
SOGONG	1.630	1.318	2.948
CIKATE	1.157	1.074	2.231
SINDANG RATU	2.329	2.209	4.538
SITUREGEN	2.037	2.530	4.567
KARANG KAMULYA	1.896	1.776	3.672

DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
	LAKI-LAKI	PEREMUAN	JUMLAH
PAMUBULAN	2.127	2.061	4.188
CIHERANG	1.686	1.534	3.220
CIHARA	1.743	1.756	3.499
SITUMULYA	1.496	1.429	2.925
GUNUNG WANGUN	864	877	1.741
KUJANGSARI	1.052	1.028	2.080
SINARGALIH	1.272	1.305	2.577
JALUPANG	1.352	1.320	2.672
JUMLAH	108.410	106.028	214.438

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

G. PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK

Proyeksi penduduk pada umumnya dipergunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk untuk jangka waktu antara sensus dan sesudah sensus diselenggarakan. Proyeksi penduduk membantu dalam perencanaan penyediaan insfrastruktur, seperti pendidikan dan kesehatan. Jika proyeksi penduduk menunjukkan bahwa suatu daerah akan mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan untuk mendorong penurunan fertilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui program keluarga berencana, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan. Sebaliknya, jika proyeksi penduduk menunjukkan bahwa suatu daerah akan mengalami penurunan penduduk, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan untuk mendukung lansia, seperti meningkatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, melakukan pembatasan transmigrasi penduduk usia produktif melalui peningkatan pemenuhan aspek layanan dasar dan lapangan kerja, serta memberikan program yang mendukung peningkatan fertilitas yang teratur.

TABEL II.33

PROYEKSI PENDUDUK DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2030

WILAYAH	PROYEKSI PENDUDUK (JIWA)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KAB PANDEGLANG	1.338.400	1.350.330	1.362.370	1.373.950	1.385.280	1.396.200
KAB. LEBAK	1.463.890	1.478.120	1.492.030	1.505.610	1.518.850	1.531.770
KAB TANGERANG	3.405.160	3.468.060	3.501.860	3.533.800	3.564.020	3.593.150
KAB. SERANG	1.720.320	1.738.240	1.755.710	1.772.570	1.788.840	1.804.470
KOTA TANGERANG	1.971.680	1.979.310	1.986.800	1.994.480	2.002.130	2.009.800
KOTA CILEGON	462.480	464.960	469.440	473.590	477.420	481.680
KOTA SERANG	743.540	755.180	766.620	776.930	787.080	797.096
KOTA TANGERANG SELATAN	1.902.180	1.905.060	1.908.170	1.911.540	1.915.180	1.919.140
PROVINSI BANTEN	12.537.540	12.641.490	12.743.130	12.842.630	12.940.100	13.035.390

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2024

Perkiraan jumlah penduduk 2025-2030 setelah dihitung melalui metode aritmatika, proyeksi penduduk Provinsi Banten memiliki kecenderungan mengalami kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Ini terjadi akibat laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2024 skala provinsi memiliki nilai 0,009 yang artinya selama 5 tahun terakhir pertumbuhan penduduk Provinsi Banten naik. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah dengan penyumbang penduduk terbanyak di Provinsi Banten.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

A. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan indikator utama dalam mengevaluasi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten diukur melalui berbagai komponen yang mencerminkan dinamika kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan menggunakan PDRB harga konstan (Riil) menurut lapangan usaha dan pengeluaran dari tahun ke tahun. Indikator laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten mencerminkan seberapa efektif sektor-sektor ekonomi lokal dapat berkembang dalam periode waktu yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dinamika pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi cerminan dari potensi dan tantangan yang dihadapi Provinsi Banten dalam mengoptimalkan sumber daya dan peluang ekonomi di tingkat daerah.

TABEL II.34
LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK DI PROVINSI BANTEN KATEGORI LAPANGAN USAHA TAHUN 2019-2024

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN PDRB ADHK DI PROVINSI BANTEN KATEGORI LAPANGAN USAHA 2019-2023 (PERSEN)					
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024**
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,21	3,33	0,56	4,23	0,16	0,64
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,58	-8,06	9,51	-16,87	-15,47	-7,10
INDUSTRI PENGOLAHAN	2,03	-4,67	3,08	3,02	5,79	4,98
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	-5,42	-11,25	12,71	7,48	-1,49	-8,07
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG	5,21	7,45	3,01	3,78	5,37	3,88
KONSTRUKSI	8.7	-2.87	10.79	4.81	1.98	2.80
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL, DAN SEPEDA MOTOR	6,21	-4,31	4,89	3,86	4,64	4,86
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	6,07	-28,06	3,72	25,67	12,47	6,35
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	7,38	-3,09	4,51	9,09	6,45	7,06
INFORMASI DAN KOMUNIKASI	4,08	9,14	5,5	5,21	7,76	5,85
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	2,02	2,73	3,07	4,06	-5,68	0,27
REAL ESTATE	6,75	3,15	3	4,09	0,52	5,57
JASA PERUSAHAAN	8,27	-4,42	-1,20	-3,72	7,29	6,53
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	7,87	-0,63	-0,61	1,74	1,91	16,73
JASA PENDIDIKAN	7,69	1,33	-1,11	-1,05	5,78	4,97
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	6,53	7,5	-9,59	1,82	7,26	8,97
JASA LAINNYA	6,67	-3,43	1,42	3,76	9,18	5,04

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda

Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut kategori lapangan usaha di Provinsi Banten menunjukkan adanya fluktuasi dari 5 (lima tahun terakhir). Tahun 2020 sempat mengalami penurunan Rp15.471,45 miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan pada sektor

Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Namun, pada 3 (tiga) tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan didorong oleh peningkatan pada sektor-sektor pendapatan terkait utamanya pada sektor industri pengolahan. Selain kategori PDRB ADHK laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten juga dilihat menurut PDRB kategori Pengeluaran.

Berdasarkan distribusinya, PDRB Provinsi Banten 2024 dari sisi Pengeluaran masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dengan pangsa 52 persen, selanjutnya investasi dengan pangsa 35 persen. Pada sisi Lapangan Usaha, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih mendominasi perekonomian provinsi Banten dengan pangsa 31 persen, disusul oleh perdagangan dan konstruksi yang masing-masing tercatat 12 persen.

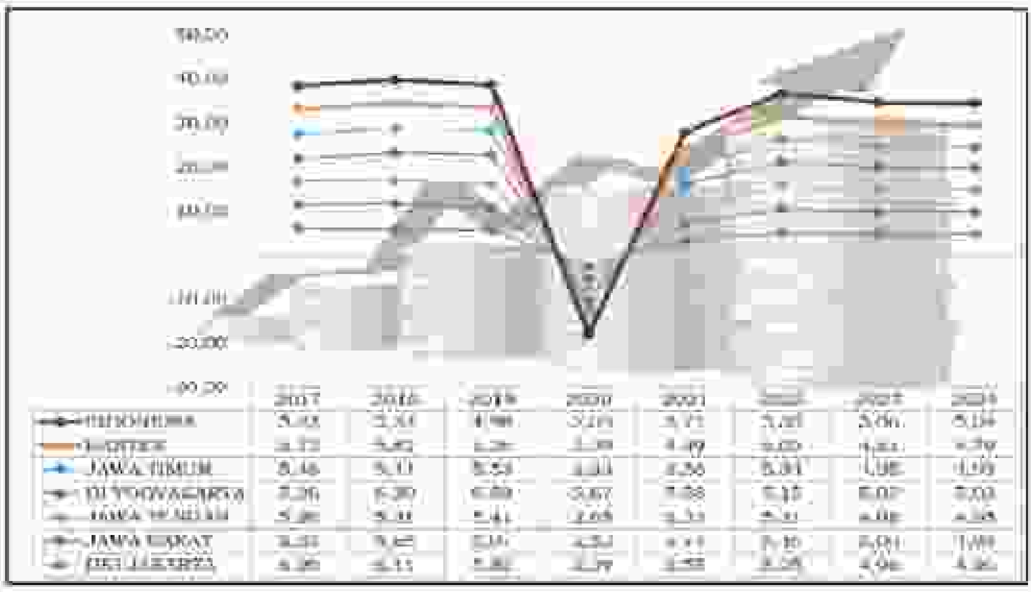

GAMBAR II.25
PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2017-2024
(Sumber: BPS, 2024. Diolah Oleh Bappeda)

Pada Tahun 2024, pada sisi pengeluaran pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan net ekspor tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan Investasi tumbuh melambat. Sementara pada sisi Lapangan Usaha (LU), LU Industri Pengolahan dan Perdagangan masih menjadi penopang laju perekonomian Provinsi Banten sementara LU Konstruksi, Transportasi dan *Real Estate* menahan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.

Di tengah tantangan ekonomi global yang masih bergejolak, dan meningkatnya ketidakpastian global, perekonomian Provinsi Banten masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berdaya tahan. Banten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 6,96 persen dengan pertumbuhan 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi

Banten pada Tahun 2024 mencapai 4,79 persen, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 (4,81 persen). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,73 persen. Diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,97 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,06 persen.

Berdasarkan data LPE dari Tahun 2017 hingga Tahun 2024, Banten menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi paling dalam pada Tahun 2020 dan pemulihan yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa serta nasional. Berikut adalah perbandingan dan analisis lebih rinci.

Banten mengalami kontraksi ekonomi terbesar di Pulau Jawa (-3,39 persen), lebih dalam dibandingkan DKI Jakarta (-2,39 persen) dan rata-rata nasional (-2,03 persen). Ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi di Banten lebih terdampak pandemi dibandingkan provinsi lainnya. LPE Banten pada 2021 (4,49 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, kecuali DI Yogyakarta (5,58 persen). Ini menunjukkan adanya pemulihan cepat setelah kontraksi terdalam pada Tahun 2020. Meskipun mengalami pemulihan pada 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi Banten mulai melambat pada Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Banten tumbuh lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir. Faktor penyebab penurunan LPE Banten antara lain:

- Kontraksi ekonomi Tahun 2020 yang dalam ketergantungan pada industri manufaktur dan perdagangan. Banten memiliki banyak kawasan industri, terutama di Cilegon dan Tangerang. Saat pandemi, sektor manufaktur dan perdagangan sangat terdampak karena rantai pasok global terganggu. PHK massal di sektor industri menyebabkan daya beli masyarakat turun drastis;
- Sektor pariwisata dan transportasi terhantam keras, pariwisata di Anyer dan Tanjung Lesung anjlok akibat pembatasan perjalanan. Bandara Soekarno-Hatta yang berlokasi di Banten mengalami penurunan drastis dalam jumlah penerbangan;
- Ketergantungan pada Jakarta, sebagai daerah penyangga DKI Jakarta, Banten sangat terpengaruh oleh kebijakan PSBB dan PPKM di ibu kota. Banyak penduduk Banten yang bekerja di Jakarta kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Ketika industri mulai pulih, Banten mengalami rebound yang lebih cepat dibandingkan provinsi lain. Aktivitas ekspor-impor meningkat, terutama dari Pelabuhan Merak dan Tanjung Priok. Wisata domestik mulai bangkit, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi;
- Perlambatan pertumbuhan di Tahun 2023-2024 disebabkan oleh kurangnya diversifikasi ekonomi. Banten masih sangat bergantung pada sektor industri dan perdagangan. Sektor ekonomi kreatif dan digital masih kurang berkembang dibandingkan DKI Jakarta dan Jawa Barat;

- Inflasi dan daya beli masyarakat, inflasi yang meningkat menghambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Upah minimum di Banten masih relatif rendah dibandingkan dengan Jakarta, sehingga daya beli terbatas.

Hal-hal strategis untuk dapat meningkatkan LPE di Provinsi Banten mencakup terhadap beberapa komponen:

- Diversifikasi ekonomi, mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan digital, mendorong startup teknologi dan industri kreatif di wilayah Tangerang, menjadikan Tangerang sebagai pusat ekonomi digital yang menyaingi Jakarta dan Bandung;
- Memperkuat sektor pariwisata, meningkatkan infrastruktur wisata di Anyer, Tanjung Lesung, dan Ujung Kulon, mengembangkan konsep eco-tourism untuk menarik wisatawan mancanegara;
- Penguatan industri dan infrastruktur, modernisasi industri manufaktur, mendorong investasi pada industri berbasis teknologi tinggi dan energi terbarukan, mengembangkan kawasan industri pintar (*smart industrial park*) dengan konsep ramah lingkungan;
- Peningkatan konektivitas transportasi, optimalisasi Pelabuhan Merak dan integrasi dengan jalur logistik nasional, meningkatkan kapasitas jalan tol dan angkutan umum di Tangerang dan Serang;
- Peningkatan daya saing SDM, pelatihan tenaga kerja berbasis industri 4.0, menyediakan program pelatihan berbasis digital untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal;
- Meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan insentif bagi UMKM dan startup lokal untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

B. TINGKAT KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan yang dirilis oleh BPS berisi gambaran persentase penduduk miskin di suatu wilayah yang terjadi karena kondisi struktural dan sosial. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap turunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Banten selama Maret 2023-Maret 2024 antara lain:

a. Terjadinya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Februari 2023-Februari 2024 sebesar 0,95 persen;
b. Inflasi umum periode Maret 2023-Maret 2024 sebesar 3,42, lebih rendah dibandingkan inflasi umum periode Maret 2022-Maret 2023 sebesar 4,17 persen;
c. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (y-o-y) naik sebesar 5,46 persen;
d. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2024 sebesar 112,70 meningkat dibanding Maret 2023 sebesar 102,47.

TABEL II.35
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2022-2024

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERIODE MARET (RIBU JIWA)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PERIODE MARET (PERSEN)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
DKI JAKARTA	502,04	477,83	464,93	4,69	4,44	4,30
JAWA BARAT	4.070,98	3.888,6	3.855,47	8,06	7,62	7,46

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERIODE MARET (RIBU JIWA)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PERIODE MARET (PERSEN)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
JAWA TENGAH	3.831,44	3.791,5	3.704,33	10,93	10,77	10,47
DI YOGYAKARTA	454,76	448,47	445,55	11,34	11,04	10,83
JAWA TIMUR	4.181,29	4.188,81	3.982,69	10,38	10,35	9,79
BANTEN	814,02	826,13	791,61	6,16	6,17	5,84
INDONESIA	26.161,16	25.898,55	25.219,2	9,54	9,36	9,03

Sumber: BPS 2024; Diolah Oleh Bappeda

Sebagaimana data di atas maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan mencakup beberapa hal seperti:

- Perkuat program yang dapat meningkatkan pendapatan pekerja baik di sektor formal maupun informal, dengan beberapa aksi yang dapat dilakukan diantaranya program padat karya desa, pemberian pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan maupun pelatihan kewirausahaan dan kemudahan akses permodalan;
- Memberdayakan koperasi maupun *stakeholder* lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan kredit usaha untuk penduduk miskin;
- Perlunya memperkuat stabilitas harga pangan daerah maupun harga pokok lainnya, hal ini karena garis kemiskinan dapat dipengaruhi oleh perubahan tersebut;
- Penggunaan data sektoral maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

C. PDRB PER KAPITA

Perekonomian Provinsi Banten di Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp873,63 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp70.276.000 atau US$4.434,02.

Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar yaitu rp265,14 triliun rupiah (30,35 persen), diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar rp108,16 triliun rupiah (12,38 persen), dan sektor konstruksi sebesar rp102,17 triliun rupiah (11,69 persen). Sementara itu, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang merupakan sektor penyumbang pdrb terendah sekitar 0,08 persen atau rp718,35 miliar rupiah.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang tertinggi PDRB Provinsi Banten sebesar Rp464,81 triliun rupiah atau sekitar 53,21 persen. Selama periode 2020-2024, Provinsi DKI Jakarta secara konsisten mencatat PDRB per kapita tertinggi dan selalu meningkat dibandingkan provinsi lainnya di pulau Jawa, pun demikian Provinsi Banten menunjukkan pertumbuhan PDRB yang cukup baik meskipun tidak setinggi Jakarta.

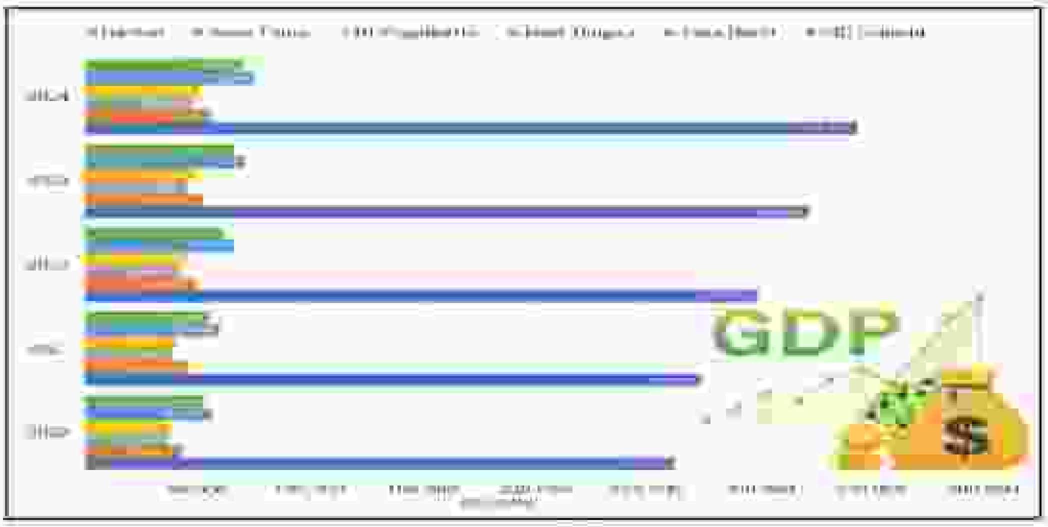

GAMBAR II.26
PERBANDINGAN PDRB PER KAPITA ADHB DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024; Diolah Oleh Bappeda)

Pergerakan grafik Provinsi Banten menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan berada pada posisi ketiga tertinggi, pada Tahun 2024 mencapai Rp70.276.000. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun sempat terdampak pandemi COVID-19 pada Tahun 2020; kinerja ekonomi Banten dalam delapan tahun terakhir menunjukkan daya saing regional yang positif meskipun masih perlu peningkatan untuk menyamai provinsi-provinsi yang lebih maju secara ekonomi seperti DKI Jakarta.

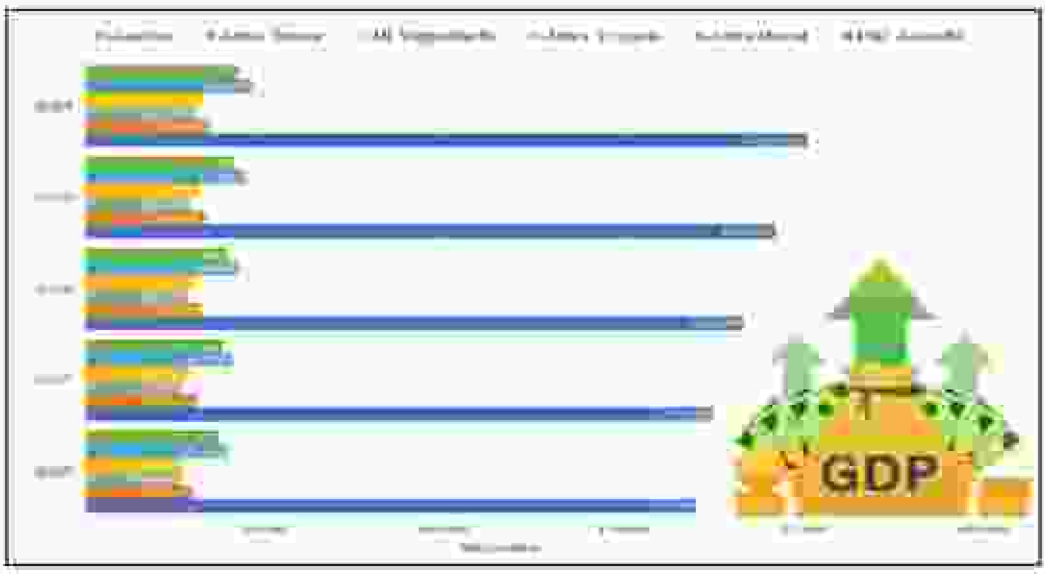

GAMBAR II.27
PERBANDINGAN PDRB PER KAPITA ADHK DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024; Diolah Oleh Bappeda)

D. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator kunci dalam analisis ekonomi yang mengukur proporsi angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya. Konsep ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja dan memberikan gambaran tentang sejauh mana peluang pekerjaan tersedia dalam suatu perekonomian.

TPT di Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 0,84 persen menjadi 6,68 persen pada periode Agustus 2024. Secara nasional, peringkat TPT Banten yang sebelumnya menduduki posisi pertama, saat ini berada di urutan kedua di bawah Jawa Barat. Tingginya pengangguran di Provinsi Banten menjadi ironi karena wilayah tersebut memiliki banyak kawasan industri. Namun sayangnya, banyak relokasi pabrik yang terjadi di Banten. Sejak 2021, setidaknya ada tiga pabrik besar di Banten yang memilih pindah ke Jawa Tengah. Relokasi tersebut menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Perusahaan memilih merelokasi pabrik untuk mencari tenaga yang lebih murah. Hal tersebut dapat dilihat dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten yang lebih tinggi daripada Jawa Tengah. Di samping tingginya tingkat pengangguran, Banten juga menghadapi tantangan terkait jumlah lulusan SMK yang belum terserap pasar kerja. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada Februari 2024, pengangguran dari tamatan SMK merupakan yang paling tinggi yaitu sebesar 12,85 persen. Berikut merupakan perbandingan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten dengan daerah lainnya di wilayah Jawa dan Nasional.

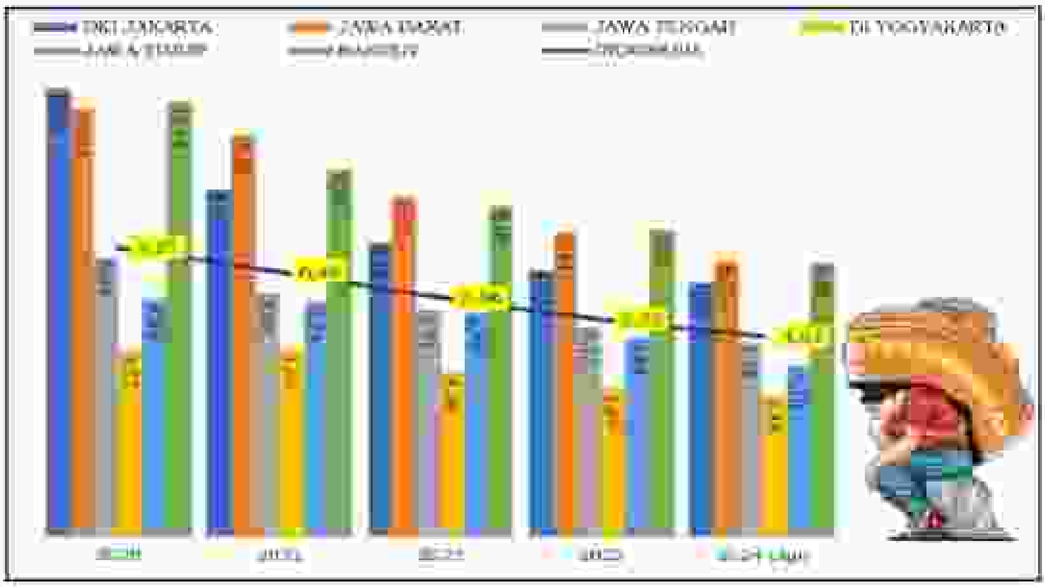

GAMBAR II.28

PERBANDINGAN PERSENTASE TPT DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Sementara itu, pengangguran dari tamatan SD ke bawah merupakan yang paling rendah yaitu sebesar 2,83 persen. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pekerja di Banten pada Februari 2024 sebanyak 35,83 persen merupakan lulusan SD. Komponen yang menyebabkan lulusan SD paling banyak terserap adalah karena bekerja di sektor pertanian. Meskipun SMK ditujukan untuk memberikan keterampilan praktis kepada siswa agar dapat langsung terserap di dunia kerja, fakta menunjukkan masih banyak lulusan SMK yang menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa selain menghadapi tantangan tingkat pengangguran yang tinggi, Banten juga menghadapi tantangan terkait jumlah lulusan SMK yang belum banyak terserap pasar kerja.

E. INDEKS GINI

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan. Hasil perhitungan berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati satu maka semakin parah ketimpangan di wilayah tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan indeks gini kabupaten di Provinsi Banten jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Pada Tahun 2022, berdasarkan capaian indeks gini, Provinsi Banten berada di urutan ke-21 dari 34 provinsi. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, indeks gini Provinsi Banten termasuk rendah.

Gambar di bawah ini menunjukkan Indeks Gini di Provinsi Banten, provinsi di Pulau Jawa, dan nasional dari Tahun 2020–2024. Grafik tersebut menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk di daerah perkotaan semakin lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Dalam lima tahun terakhir, indeks gini Provinsi Banten berkisar 0,38-0,35 yang berada di kategori 'sedang'. Grafik tersebut menunjukkan tren penurunan indeks gini sekitar 0,05 per tahunnya. Penurunan indeks gini mencerminkan peningkatan keterlibatan masyarakat (lapisan menengah ke bawah) dalam pembangunan ekonomi Banten.

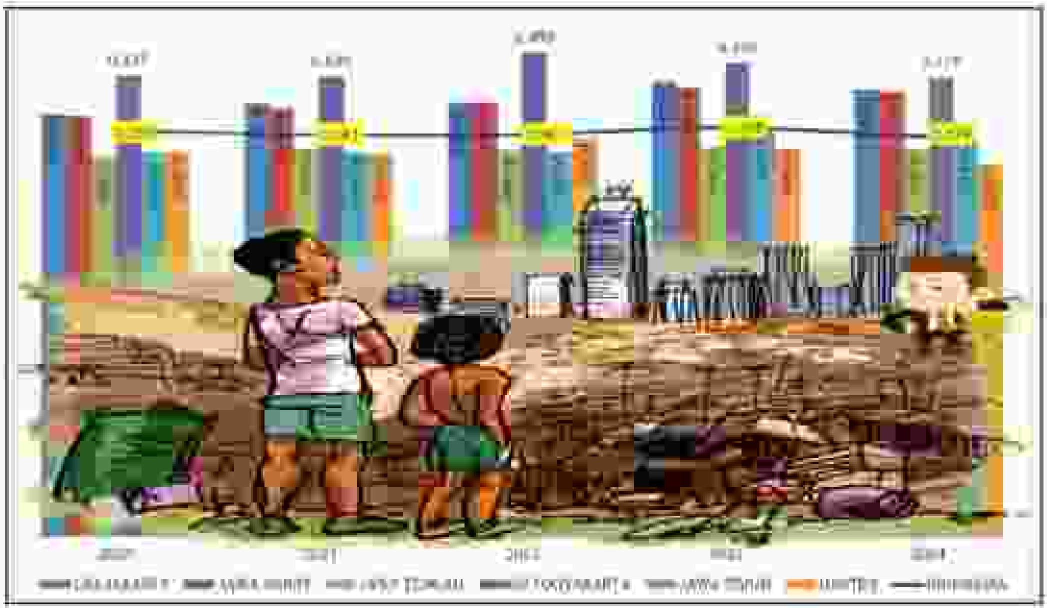

GAMBAR II.29
PERBANDINGAN INDEKS GINI DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

F. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM di Provinsi Banten dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan secara kumulatif dan menempati kategori baik. Hal ini menunjukkan kondisi harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup masyarakat di Banten yang semakin membaik. Kondisi ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

IPM di Provinsi Banten menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2017 hingga 2024. Pada Tahun 2020, IPM di Provinsi Banten mencapai 74,41 lambat laun terus meningkat hingga mencapai 76,35 pada Tahun 2024, walaupun demikian masih jauh di bawah nilai DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah. Walaupun IPM di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan namun terdapat disparitas IPM antar kabupaten/kota di Banten. Pada Tahun 2024, Kota Tangerang Selatan memiliki IPM tertinggi sebesar 84,16 diikuti oleh Kota Tangerang dengan 81,53 yang mana kedua wilayah ini masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu masih adanya wilayah yang masuk kedalam kategori sedang yaitu Kabupaten Lebak.

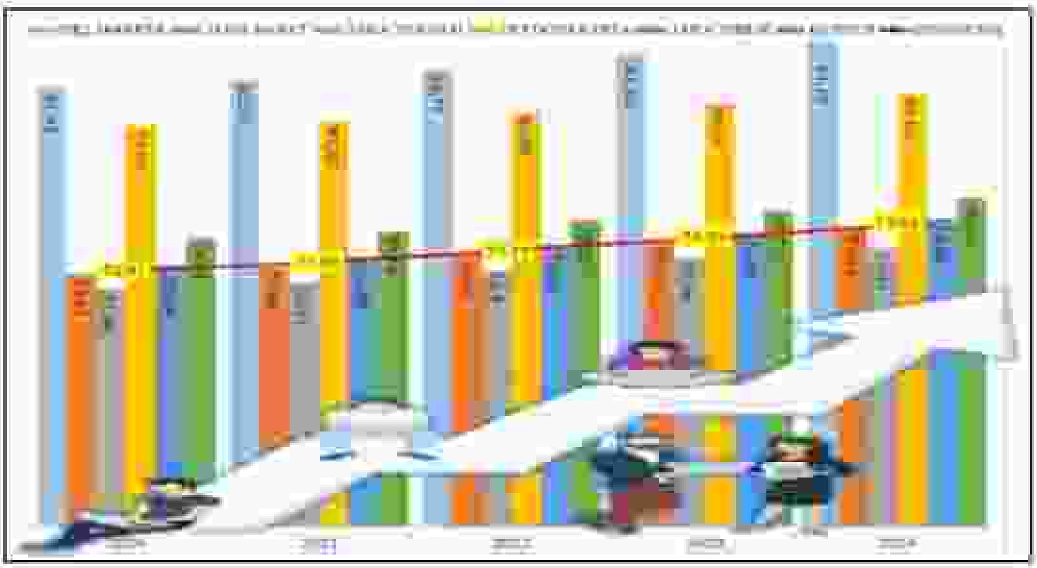

GAMBAR II.30

PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa, IPM di Provinsi Banten berada di posisi yang kompetitif masuk tujuh besar nasional. Namun, disparitas antar kabupaten/kota di Provinsi Banten lebih menonjol dibandingkan beberapa provinsi lain di Jawa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan IPM antar kabupaten/kota antara lain:

- Konsentrasi ekonomi dan industri: wilayah utara Banten, seperti Tangerang dan Cilegon, memiliki konsentrasi industri dan investasi yang tinggi, menarik tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita. Sebaliknya, wilayah selatan seperti Pandeglang dan Lebak lebih bergantung pada sektor pertanian tradisional, yang berkontribusi pada kesenjangan ekonomi.
- Infrastruktur dan aksesibilitas: wilayah utara memiliki infrastruktur yang lebih baik, termasuk akses transportasi ke pusat ekonomi seperti Jakarta. Wilayah selatan menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan dan listrik, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.

- Investasi dan penanaman modal: investor cenderung memilih wilayah dengan infrastruktur dan potensi ekonomi yang sudah berkembang, seperti wilayah utara Banten, sehingga investasi di wilayah selatan lebih rendah.
- Kualitas sumber daya manusia: perbedaan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan antara wilayah utara dan selatan mempengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi. Wilayah dengan IPM lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan.

Untuk mengurangi disparitas IPM, diperlukan upaya terpadu dalam meningkatkan infrastruktur, investasi, dan kualitas sumber daya manusia di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.

TABEL II.36
PERBANDINGAN NILAI KOMPONEN PEMBENTUK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2023-2024

WILAYAH	UHH (TAHUN)		HLS (TAHUN)		RLS (TAHUN)		PENGELUARAN PER KAPITA RIBU RP/ORG/TAHUN	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
DKI JAKARTA	75,81	75,90	13,33	13,31	11,45	11,49	19.373	19.953
JAWA BARAT	74,91	75,16	12,68	12,8	8,85	8,87	[illegible]	12.157
JAWA TENGAH	74,69	74,91	12,85	12,86	8,01	8,02	[illegible]	12.270
DI YOGYAKARTA	75,18	75,26	15,66	15,7	9,80	9,92	14.924	15.361
JAWA TIMUR	74,87	75,07	13,38	13,43	8,11	8,28	12.421	12.832
BANTEN	74,77	74,97	13,00	13,1	9,15	9,21	12.681	12.997
INDONESIA	73,93	74,15	13,15	13,21	8,77	8,85	11.899	12.341

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda

DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi karena semua komponen (UHH, HLS, RLS, dan pengeluaran per kapita) berada pada level maksimal. DI Yogyakarta unggul dalam komponen pendidikan, namun daya beli masih tergolong moderat. Sementara itu Banten dan Jawa Barat memiliki IPM yang tinggi tetapi masih dipengaruhi disparitas wilayah, lebih jauh daripada itu Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan tantangan pada pengeluaran per kapita dan rata-rata lama sekolah, meskipun kondisi capaian UHH cukup tinggi. Lebih jauh daripada itu data di bawah menunjukkan perbandingan nilai IPM berdasarkan jenis kelamin sejak Tahun 2022-2024 diseluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

TABEL II.37
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH PROVINSI BANTEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022-2024

WILAYAH	2022 (PERSEN)			2023 (PERSEN)			2024 (PERSEN)		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KAB. PANDEGLANG	70,93	61,06	65,84	71,53	62,31	66,62	72,07	62,87	66,99
KAB. LEBAK	69,45	55,78	64,71	69,99	56,22	65,21	70,55	57,33	65,86
KAB. TANGERANG	77,16	70,40	72,57	77,65	71,18	73,45	78,21	71,80	74,06
KAB. SERANG	71,65	62,13	67,25	72,40	66,56	68,39	73,02	67,55	69,03
KOTA TANGERANG	80,19	77,98	78,90	82,80	78,57	79,40	83,38	79,17	80,02
KOTA CILEGON	78,81	69,01	73,65	79,42	69,53	74,54	79,98	70,58	75,14
KOTA SERANG	77,24	71,28	72,58	77,94	72,09	73,38	78,40	73,51	73,89
KOTA TANGERANG SELATAN	85,62	80,45	81,35	85,92	80,96	82,28	86,38	81,70	82,89
PROVINSI BANTEN	77,28	71,24	73,32	77,77	71,32	73,87	78,25	72,49	74,48

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025, Diolah Oleh Bappeda

2.1.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

A. USIA HARAPAN HIDUP (UHH)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Provinsi Banten selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, UHH Banten tercatat sebesar 74,12 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 74,97 tahun pada 2024. Dengan demikian, dalam lima tahun terakhir terdapat kenaikan sebesar 0,85 tahun, atau rata-rata 0,21 tahun per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada periode 2021–2023, masing-masing sekitar 0,3 tahun, yang mengindikasikan adanya perbaikan signifikan pada aspek kesehatan masyarakat di Banten.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, posisi Banten pada 2024 berada di urutan kelima, yaitu sedikit lebih tinggi dari Jawa Tengah (74,91 tahun), namun masih di bawah Jawa Timur (75,07 tahun), Jawa Barat (75,16 tahun), DI Yogyakarta (75,36 tahun), dan DKI Jakarta yang memiliki UHH tertinggi (75,99 tahun). Walaupun demikian, UHH Banten tetap berada di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 74,15 tahun, dengan selisih positif sebesar 0,82 tahun. Untuk lebih lengkapnya sebagaimana yang disajikan pada gambar di bawah ini.

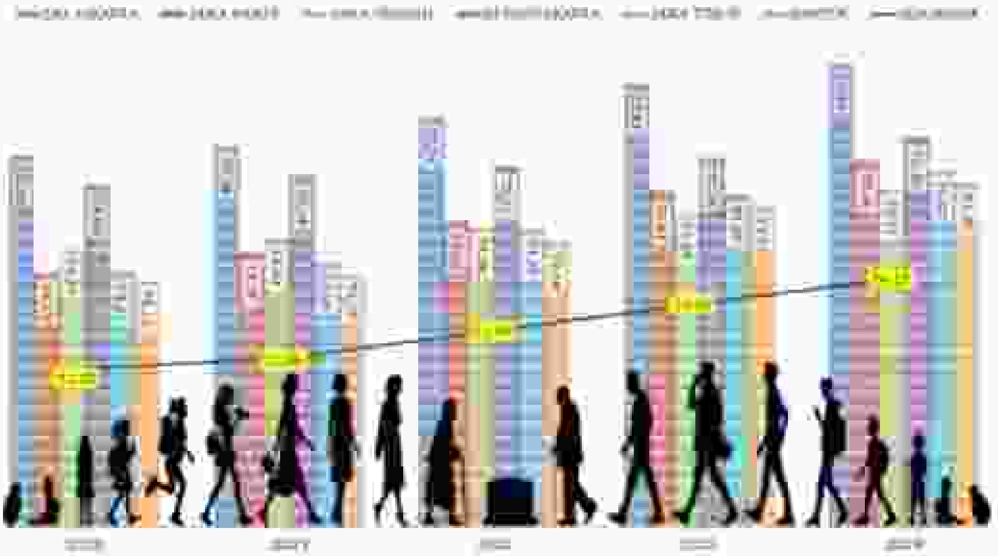

GAMBAR II.31
PERBANDINGAN USIA HARAPAN HIDUP DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Secara khusus, jarak UHH Banten dengan provinsi tetangga cukup kecil. Selisih dengan Jawa Barat hanya 0,19 tahun, sementara dengan DKI Jakarta yang memiliki angka tertinggi, selisihnya lebih lebar, yaitu sekitar 1,02 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian Banten relatif baik, namun masih perlu peningkatan untuk dapat mengejar provinsi-provinsi dengan UHH lebih tinggi. Secara keseluruhan, pencapaian UHH di Banten memperlihatkan arah yang positif dan stabil. Ke depan, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, penguatan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit tidak menular menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan UHH. Dengan upaya tersebut, Banten berpotensi tidak hanya memperkecil kesenjangan dengan provinsi lain di Jawa, tetapi juga memperkuat posisinya di atas rata-rata nasional.

Faktor pendorong kenaikan UHH di Banten mencakup: (1) perbaikan layanan kesehatan: peningkatan akses ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan; (2) kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat: meningkatnya kesadaran konsumsi gizi seimbang dan olahraga; (3) program pemerintah: adanya program BPJS dan bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu; dan (4) penurunan angka kematian bayi dan ibu: indikator kesehatan ibu dan anak semakin membaik. Faktor penghambat kenaikan UHH di Banten mencangkup: (1) ketimpangan akses layanan kesehatan: wilayah pedesaan dan daerah terpencil masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan berkualitas; (2) kemiskinan dan gizi buruk: masih ada masyarakat dengan akses pangan terbatas, berpengaruh pada kesehatan jangka panjang; (3) polusi dan lingkungan: wilayah industri di Banten menghasilkan polusi udara dan air, berdampak pada kesehatan masyarakat; dan (4) pendidikan kesehatan rendah: kesadaran tentang kesehatan, pola makan, dan penyakit masih perlu ditingkatkan.

B. INDEKS KESEHATAN

Indeks Kesehatan adalah ukuran komposit yang menunjukkan kondisi derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini umumnya digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat kesehatan di berbagai provinsi atau daerah. indeks kesehatan biasanya dihitung berdasarkan beberapa indikator utama, seperti: (1) Angka Harapan Hidup (AHH), rata-rata usia harapan hidup penduduk; (2) angka kematian bayi dan ibu, semakin rendah angka kematian maka semakin tinggi indeks kesehatan; (3) akses dan kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan puskesmas, rumah sakit, tenaga medis, dll; (4) prevalensi penyakit menular dan tidak menular, beban penyakit berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat; (5) gizi dan sanitasi, akses air bersih, makanan bergizi, serta sanitasi yang memadai; dan (6) perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS), edukasi dan kebiasaan sehat dalam masyarakat.

Gambar di bawah menunjukkan bahwa Indeks Kesehatan di Provinsi Banten lebih rendah daripada wilayah provinsi lainnya, dengan kondisi tertinggi ada pada Provinsi DI Yogyakarta di 0,85, tingginya Indeks kesehatan sejalan dengan nilai UHH yang disajikan pada subbab sebelumnya. Capaian Banten masih menunjukkan perkembangan yang lambat terhadap indeks kesehatan, rendahnya nilai tersebut disebabkan sejalan dengan nilai UHH Provinsi Banten yang juga masih rendah daripada provinsi lainnya di wilayah Jawa. Lebih jauh daripada itu, rendahnya capaian ini dapat dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur kesehatan pada wilayah-wilayah terluar, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah termasuk didalamnya faktor persoalan gizi dan sanitasi yang dapat berdampak bagi kesehatan masyarakat, tidak meratanya urbanisasi di perkotaan dan perdesaan, serta belum didukungnya kualitas lingkungan yang baik.

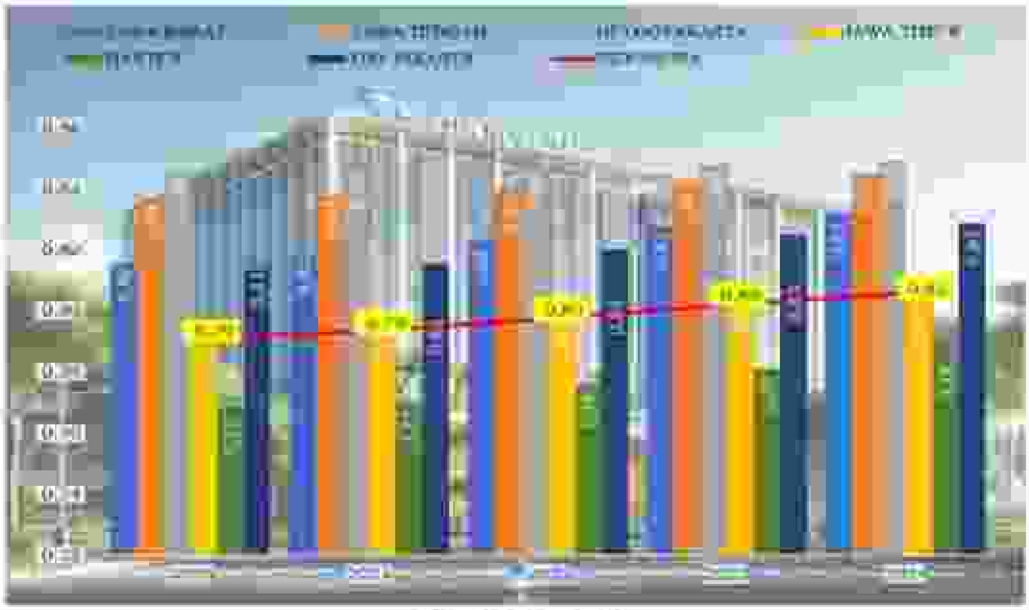

GAMBAR II.32
PERBANDINGAN INDEKS KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2024)

C. PREVALENSI STUNTING

Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting ditunjukkan dengan Prevalensi Stunting yang dijadikan indikator daerah dan merupakan tematik pembangunan, sehingga penurunan stunting menjadi fokus dan prioritas pembangunan di Provinsi Banten. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2024 yaitu 21,10 persen turun 2,90 persen dari Tahun 2021 (SSGI, 2025).

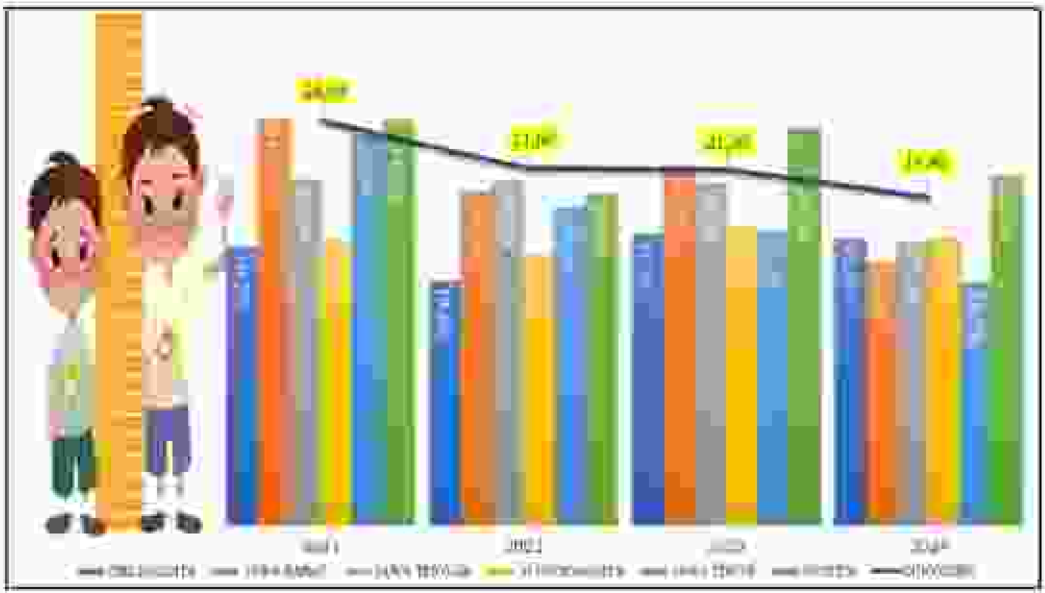

GAMBAR II.33
PERBANDINGAN PREVALENSI STUNTING DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2021-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Secara umum, prevalensi stunting di Provinsi Banten menurun dari 24,50 persen pada Tahun 2021 menjadi 20,00 persen pada Tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 24,00 persen pada Tahun 2023 dan kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 21,10. Ini menunjukkan bahwa upaya penurunan Stunting di provinsi ini masih membutuhkan perhatian yang lebih intensif.

Prevalensi stunting di Provinsi Banten mengalami kenaikan dari 20,00 persen pada Tahun 2022 menjadi 24,00 persen pada Tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 21,10 persen di Tahun 2024. Kenaikan pada Tahun 2023 ini ini disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Sanitasi yang buruk: praktik sanitasi yang tidak memadai seperti penggunaan jamban yang tidak layak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan angka stunting. Sanitasi yang buruk dapat menyebabkan balita rentan terhadap berbagai penyakit yang memengaruhi status gizi mereka;
2. Anemia pada remaja putri: tingginya prevalensi anemia pada remaja putri dapat berdampak pada kesehatan mereka saat hamil dimasa depan, yang kemudian meningkatkan risiko stunting pada anak yang dilahirkan;
3. Faktor lingkungan: akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi layak juga menjadi penyebab meningkatnya kasus stunting. Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan anak;
4. Asupan nutrisi yang tidak memadai: kurangnya keragaman dan kualitas asupan makanan pada anak dapat menyebabkan kekurangan gizi, yang merupakan penyebab langsung stunting.

Penurunan angka stunting yang berkelanjutan, diperlukan upaya kolaboratif dan strategi yang komprehensif dan terintegrasi serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten antara lain: pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor-faktor kunci dalam upaya ini, yang mencakup perbaikan sanitasi, peningkatan akses air bersih, edukasi gizi, penanganan anemia pada remaja putri, digitalisasi administrasi pemerintahan penanganan stunting, dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal secara maksimal.

2.1.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

A. RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Nilai RLS yang semakin tinggi mengindikasikan sistem pendidikan dengan kinerja lebih baik.

RLS di Banten sebagaimana yang ditampilkan pada gambar di bawah selalu mengalami kenaikan berkat berbagai program pemerintah melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pendidikan. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, tetapi masih belum setinggi Provinsi DKI Jakarta atau DI Yogyakarta. Saat ini tantangan seperti akses pendidikan di pelosok dan putus sekolah masih menjadi kendala, dengan strategi yang tepat seperti pemerataan infrastruktur, beasiswa, pendidikan vokasi, dan pencegahan putus sekolah diharapkan dapat mengungkit terhadap peningkatan RLS dimasa depan.

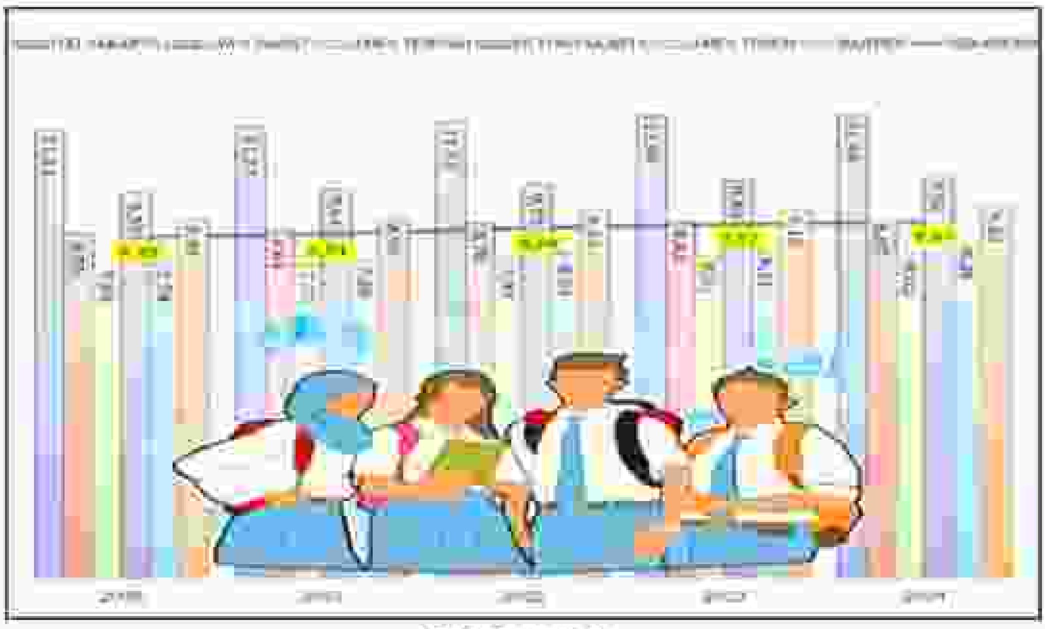

GAMBAR II.34

PERBANDINGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS, 2024. Diolah Oleh Bappeda)

Lebih jauh daripada itu data di bawah menunjukkan perbandingan rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin sejak Tahun 2022-2024 diseluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

TABEL II.38

RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH PROVINSI BANTEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022-2024

WILAYAH	2022 (PERSEN)			2023 (PERSEN)			2024 (PERSEN)		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KAB. PANDEGLANG	7,62	6,64	7,13	7,64	6,68	7,15	7,65	6,74	7,19
KAB. LEBAK	7,06	6,09	6,59	7,07	6,26	6,60	7,08	6,27	6,61
KAB. TANGERANG	9,51	8,28	8,92	9,22	8,36	8,89	9,45	8,57	9,05
KAB. SERANG	8,24	7,29	7,78	8,25	7,41	7,83	8,32	7,31	7,88
KOTA TANGERANG	11,20	10,43	10,84	11,30	10,53	10,91	11,32	10,81	11,14
KOTA CILEGON	10,67	9,77	10,24	10,68	10,05	10,26	10,59	10,10	10,29
KOTA SERANG	9,27	8,49	8,89	9,28	8,39	8,81	9,30	8,52	8,93
KOTA TANGERANG SELATAN	12,11	11,03	11,84	12,12	11,28	11,85	12,13	11,29	11,86
PROVINSI BANTEN	9,58	8,72	9,13	9,59	8,85	9,15	9,60	8,86	9,23

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025. Diolah Oleh Bappeda

B. HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, atau menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat dijalani oleh anak usia sekolah sepanjang hidupnya. HLS dilakukan pengukuran untuk menunjukkan potensi capaian pendidikan suatu wilayah dan memetakan peluang perbaikan sistem pendidikan nasional dan daerah.

Gambar di bawah menunjukkan capaian nilai HLS di Provinsi Banten yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tetapi lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. DI Yogyakarta memiliki HLS tertinggi, yaitu 15,70 tahun pada Tahun 2024, jauh di atas Banten. Walaupun demikian HLS di Provinsi Banten selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun relatif lambat dari 12,88 tahun pada Tahun 2019 menjadi 13,10 tahun di Tahun 2024, lebih jauh dari itu hal inipun saling berkaitan dan berkorelasi dengan nilai RLS yang juga selalu meningkat disetiap tahunnya. Akan tetapi, HLS di Provinsi Banten selalu berada sedikit di bawah rata-rata nasional disetiap tahunnya, masih adanya gap dengan rata-rata nasional dan provinsi lain seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

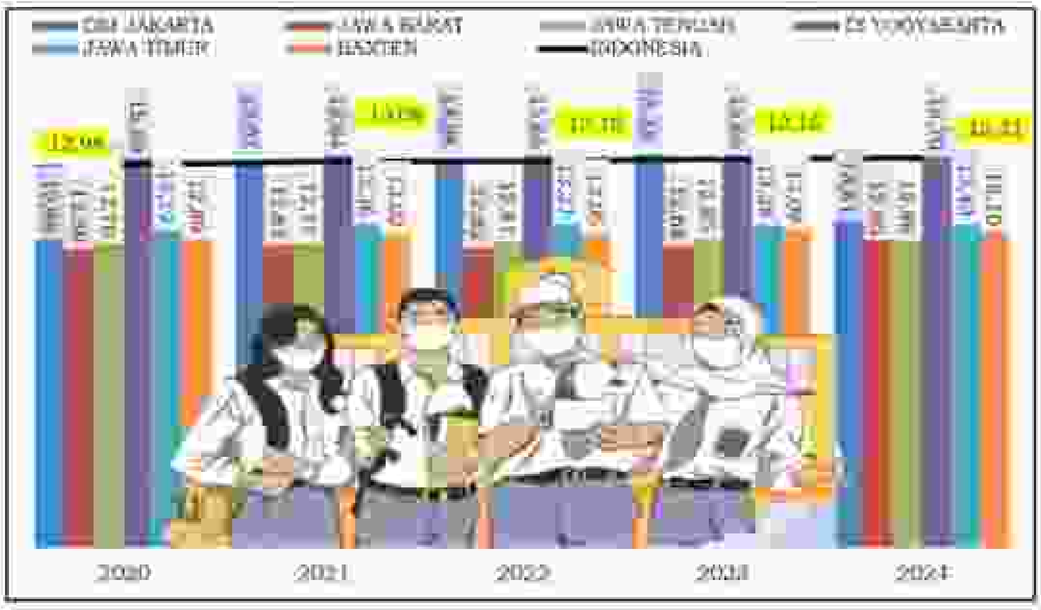

GAMBAR II.35
PERBANDINGAN HARAPAN LAMA SEKOLAH DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

Upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Banten perlu terus didorong untuk mencapai pertumbuhan lebih signifikan, fokus utama dengan meningkatkan akses, kualitas, dan mencegah putus sekolah, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia usaha. Lebih jauh daripada itu, data di bawah menunjukkan perbandingan harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin sejak Tahun 2022-2024 di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

TABEL II.39
HARAPAN LAMA SEKOLAH DI WILAYAH PROVINSI BANTEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022-2024

WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
		2022			2023			2024	
KAB. PANDEGLANG	13,39	14,10	13,72	13,30	14,14	13,72	13,51	14,10	13,74
KAB. LEBAK	12,17	12,07	12,09	12,17	12,06	12,10	12,18	12,09	12,11
KAB. TANGERANG	12,80	12,82	12,85	12,87	12,86	12,87	12,88	12,94	12,88
KAB. SERANG	12,60	13,14	12,78	12,81	13,19	12,86	12,82	13,20	12,87
KOTA TANGERANG	13,87	13,89	13,88	13,88	13,87	13,89	13,90	13,96	13,90
KOTA CILEGON	13,19	14,69	13,20	13,20	14,70	13,21	13,22	14,72	13,23
KOTA SERANG	12,94	13,81	12,81	12,95	13,82	12,82	12,96	13,83	12,80
KOTA TANGERANG SELATAN	14,49	14,81	14,67	14,50	14,82	14,68	14,52	14,84	14,70
PROVINSI BANTEN	12,92	13,23	13,05	12,93	13,27	13,08	12,94	13,29	13,10

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025. Diolah Oleh Bappeda

C. INDEKS PENDIDIKAN

Indeks Pendidikan adalah pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Indeks Pendidikan

(IP) adalah salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata dalam bidang pendidikan di suatu wilayah (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota). IP mencerminkan kemajuan kualitas pendidikan, bukan hanya seberapa banyak orang sekolah, tetapi juga seberapa lama mereka bersekolah dan seberapa besar harapan pendidikan anak-anak ke depan.

Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan dua indikator utama meliputi:

- Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak usia 7 tahun. Ini mencerminkan akses ke pendidikan masa depan;
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Ini menunjukkan hasil nyata pendidikan yang sudah tercapai.

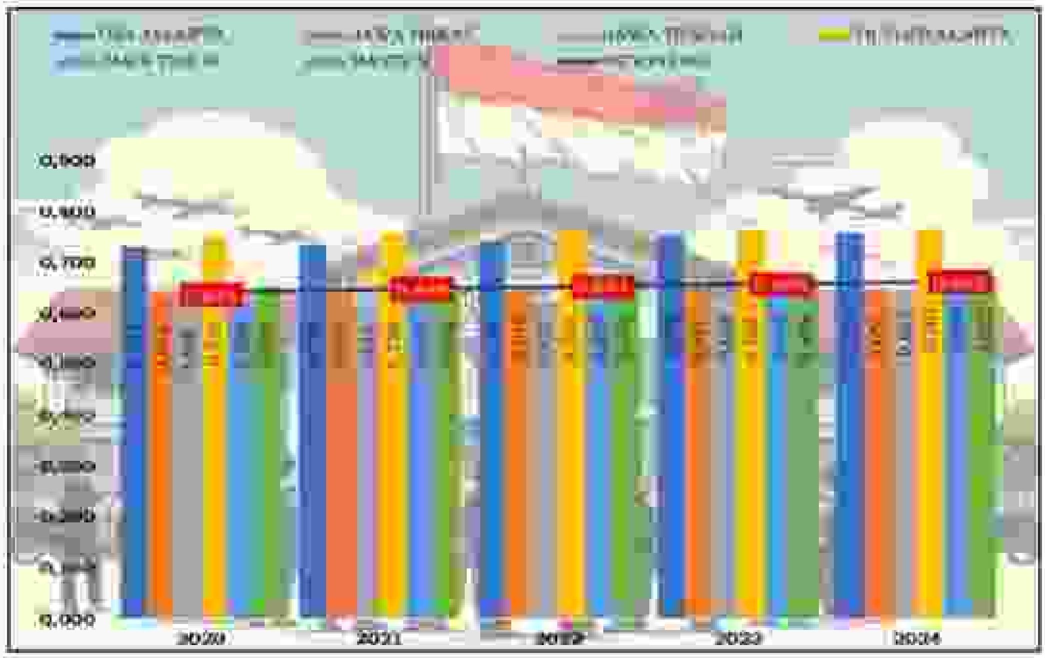

GAMBAR II.36
INDEKS PENDIDIKAN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 Diolah Oleh Bappeda)

Peningkatan Indeks Pendidikan Banten dari 2020–2024 relatif moderat dan masih di bawah nasional. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh HLS yang belum maksimal dan RLS yang rendah, terutama karena kesenjangan wilayah, urbanisasi tanpa kontrol pendidikan, dan rendahnya realisasi pendidikan di kelompok usia dewasa. Lebih jauh daripada itu peningkatan ini seiringan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pemenuhan fasilitas pendidikan yang memadai oleh pemerintah daerah. Masyarakat Banten memandang pendidikan menjadi kebutuhan primer karena opini akan pentingnya aspek pendidikan dalam pemenuhan segala kebutuhan hidup salah satunya pendidikan sebagai faktor penentu mendapatkan pekerjaan. Sayangnya upaya penurunan pengangguran di Provinsi Banten masih stagnan dengan kontribusi tertinggi pengangguran menurut tingkat pendidikan SMA dan

SMK. Lulusan Sekolah menengah dinilai kurang memiliki skill yang dibutuhkan di dalam lingkungan industri di sekitar Provinsi Banten.

Untuk mengatasi hal tersebut, SMK perlu melakukan upaya dengan memperbaiki sarana teknologi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan industri dewasa ini. Dalam memperbaiki teknologi pembelajaran, setidaknya sekolah-sekolah vokasi dapat berkerjasama dengan sektor industri secara berkelanjutan. Adapun SMA dinilai perlu untuk meningkatkan motivasi siswa untuk bersekolah di perguruan tinggi agar keilmuan dan skill yang dimiliki lebih relevan dengan kebutuhan industri.

D. ANGKA LITERASI/NUMERASI

Literasi/numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah, berdasarkan rapor pendidikan kondisi literasi dan numerasi Provinsi Banten sesuai tingkatan pendidikan sebagai berikut.

TABEL II.40
PESENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM ASESMEN LITERASI/NUMERASI DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2021-2024

INDIKATOR	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
PESENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM ASESMEN TINGKAT NUMERASI (PERSEN)	10,11	25,21	30,43	67,92
PESENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM ASESMEN TINGKAT LITERASI (PERSEN)	3,90	11,40	30,81	60,51

Sumber: Kemendikbudristek, 2025

Kondisi angka literasi dan numerasi dari Tahun 2021 ke Tahun 2023 mengalami peningkatan masing-masing menjadi 67,92 persen dan 60,51 persen. Meskipun mengalami peningkatan, persentase ini tergolong belum tinggi dan akan mempengaruhi kualitas SDM dalam persaingan skala nasional maupun internasional. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis, antara lain:

- Implementasi kurikulum merdeka yang lebih adaptif terhadap kebutuhan belajar siswa;
- Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan penggunaan *platform* merdeka mengajar;
- Intervensi aktif pemerintah pusat dan daerah, termasuk pendampingan dan penguatan literasi-numerasi;
- Pemulihan pembelajaran pasca pandemi, dengan kembalinya pembelajaran tatap muka secara penuh;
- Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar;
- Fokus kebijakan nasional pada literasi dan numerasi sebagai indikator kualitas pendidikan;
- Peningkatan pada intervensi alokasi pagu anggaran pada program teknis yang menunjang capaian indikator literasi numerasi sesuai lampiran rapor pendidikan.

E. INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Unsur pembangun literasi masyarakat antara lain: pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, perpustakaan Ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan.

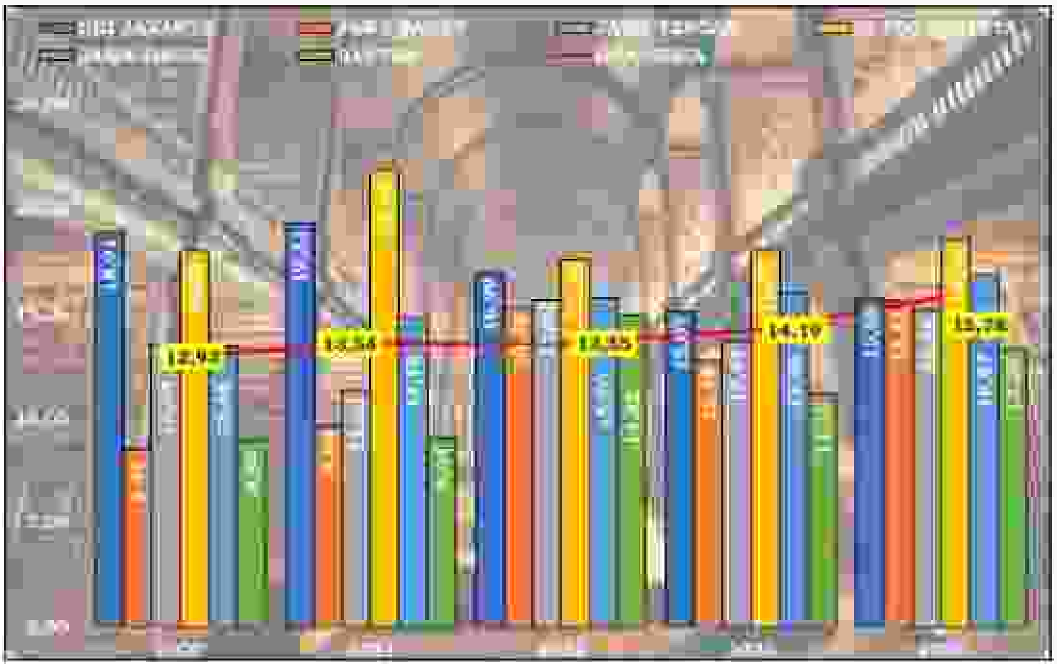

GAMBAR II.37

PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASAYARAKAT DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

IPLM Banten Tahun 2024 dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa tertinggi di DI Yogyakarta sebesar 18,54, dan terendah di Provinsi Banten sebesar 13,28, nilai capaian Banten pun masih di bawah capaian nasional sebesar 15,78. Indeks pembangunan literasi masyarakat di Provinsi Banten mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan berada di angka yang tergolong rendah. Hal ini terjadi akibat minimnya minat masyarakat dalam mengunjungi dan melakukan aktivitas literasi di perpustakaan daerah. Upaya yang bisa dilakukan dalam penanganan minat literasi masyarakat adalah membentuk sistem literasi di tingkat sekolah, menyediakan perpustakaan daerah dengan konsep yang lebih menarik, dan menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk lebih jelasnya terkait perkembangan IPLM di Provinsi Banten dengan provinsi lainnya sebagaimana gambar di atas.

F. INDEKS LITERASI DIGITAL

Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Dari sejumlah isu yang dihadirkan perkembangan digital, penerapan etika digital (*digital ethics*) menjadi salah satu persoalan yang kerap menjadi perhatian. Ini karena, implementasinya menjadi tanda bahwa seseorang mampu menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, hingga mengembangkan tata kelola etika dalam pemanfaatan ruang digital. Adapun untuk mengatasi berbagai persoalan di ruang digital, literasi digital dinilai menjadi salah satu solusi. Terdapat 4 pilar penentu indeks literasi digital yakni Keahlian Digital (*Digital Skills*), Budaya Digital (*Digital Culture*), Etika Digital (*Digital Ethics*) dan Keamanan Digital (*Digital Safety*).

Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2022 adalah sebesar 3,54. Pilar *Digital Culture* merupakan pilar dengan skor indeks tertinggi (3,84), sedangkan *Digital Safety* merupakan pilar dengan skor indeks terendah (3,12), sedangkan, skor Indeks Literasi Digital Banten mendapatkan skor indeks 3,48. Pilar *Digital Ethics* Tahun 2022 adalah sebesar 3,73, sedangkan *Digital Safety* merupakan pilar dengan skor indeks yang paling rendah (3,02).

Terkait literasi digital perlu adanya penguatan dan kesiapan dalam menghadapi peluang *cyber crime* dan kebocoran data yang terjadi di skala nasional. Dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 Indonesia termasuk dalam 8 (delapan) negara dengan penjagaan data digital yang rawan diretas. Hal ini akan berdampak pada sistem manajemen informasi baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh sebab itu perlunya pengetatan pada urusan persandian di dalam aplikasi maupun penyimpanan dan penyaluran data, di sisi lain pemahaman masyarakat terkait dengan masalah penyimpangan dan pembobolan masih sangat rendah sehingga sangat rentan terhadap upaya peretasan data.

2.1.2.4 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A. INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK)

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Banten ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Untuk mengukur pembangunan sektor kebudayaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penilaian berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai instrumen penilaian capaian kinerja pembangunan kebudayaan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pengukuran Indeks Kebudayaan mulai dilakukan tahun 2018 berdasarkan pada 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi yaitu:

1. Dimensi Ekonomi Budaya;
2. Dimensi Pendidikan;
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya;
4. Dimensi Warisan Budaya;
5. Dimensi Ekspresi Budaya;
6. Dimensi Budaya Literasi; dan
7. Dimensi Kesetaraan Gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan data pada tabel di bawah terlihat bawa capaian IPK Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 51,41 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 47,47. Meskipun demikian upaya percepatan peningkatan nilai IPK sangat diperlukan mengingat jika dibandingkan dengan rata-rata nasional capaian IPK Provinsi Banten berada di bawah Nasional (55,13). Hasil pengukuran IPK Tahun 2019 sampai 2023 disajikan pada tabel berikut.

TABEL II.41
HASIL PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2019-2023

NO	DIMENSI	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	EKONOMI BUDAYA	11,71	1,01	12,24	18,83	23,87
2	PENDIDIKAN	71,65	65,79	65,78	70,20	70,72
3	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA	[illegible]	65,26	53,72	35,92	58,03
4	WARISAN BUDAYA	45,02	40,3	47,34	51,77	50,96
5	EKSPRESI BUDAYA	29,37	29,19	22,05	23,25	27,84
6	BUDAYA LITERASI	60,27	61,5	56,28	59,21	60,56
7	KESETARAAN GENDER	54,15	32,84	50,97	54,71	54,76
	IPK	51,43	48,93	47,47	51,41	52,49

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Provinsi Banten memiliki jumlah sanggar mencapai 1.382 sanggar yang tersebar kabupaten/kota di Provinsi Banten. Banten memiliki beberapa gedung kesenian seperti Gedung Kesenian Ranggajati, Gedung Kesenian Kabupaten Tangerang, Gedung Kesenian Kota Cilegon, Balai Pertunjukan Seni Rakyat (BPSR) Banten, dan Gedung Kesenian Kabupaten Lebak. Banten memiliki sejumlah klub olahraga yang aktif di berbagai cabang olahraga, seperti Banten United FC (sepak bola), BC Banten (bulu tangkis), Banten Sharks (basket), Banten runners, Banten Chess Club (catur), serta klub lainnya. Lebih jauh dari itu, capaian pembangunan kebudayaan antara di Provinsi Banten dan wilayah provinsi lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

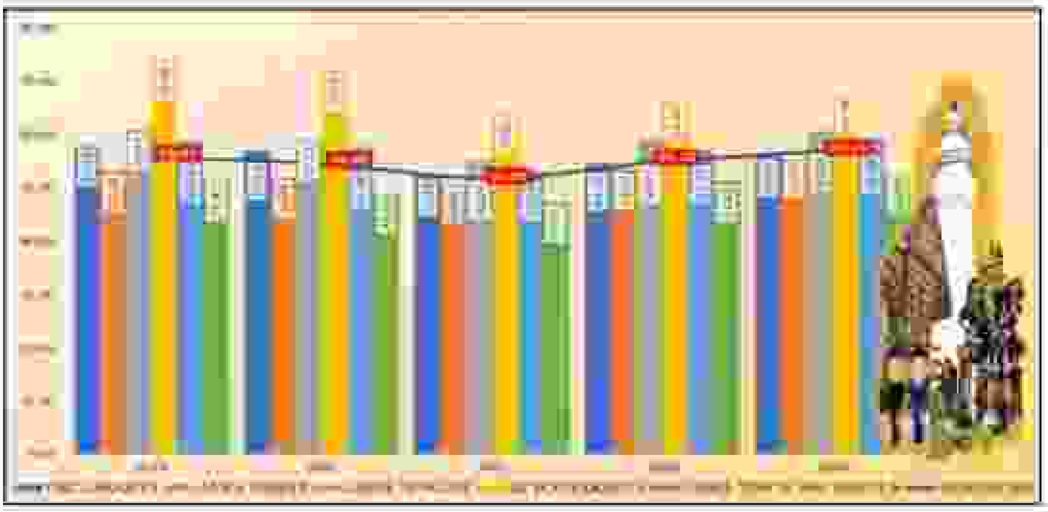

GAMBAR II.38
PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2019-2023
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

B. INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Agama RI untuk menilai tingkat kerukuan antarumat beragama, dimana pengukuran ini memiliki tiga aspek yakni toleransi (mengukur tingkat sejauh mana masyarakat dapat menerima dan menghormati perbedaan agama), kesetaraan (mengukur tingkat sejauh mana kerja sama antarumat beragama dapat tercipta dalam berbagai kegiatan sosial), dan kerja sama (mengukur tingkat sejauh mana hak dan kesempatan yang sama terhadap semua umat beragama). Gambar di bawah menyajikan data capaian IKUB di Provinsi Banten beserta pembanding dari daerah lainnya.

GAMBAR II.39

PERBANDINGAN INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2021-2024

(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Skor IKUB di Provinsi Banten menunjukkan fluktuatif dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan masih perlunya perbaikan dalam hal toleransi seperti masih terjadinya penolakan pendirian rumah ibadah yang berbeda agama, penolakan kepala daerah atau penjabat daerah yang tidak satu keyakinan, dan masih ada penolakan terkait perayaan hari besar keagamaan. Diperlukan peran pemerintah daerah, masyarakat, dan FKUB di Provinsi Banten serta kabupaten/kota untuk bersinergi dalam menjaga kerukunan.

2.1.2.5 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A. INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA)

Indeks Perlindungan Anak atau disebut juga dengan IPA merupakan indikator pengukur dalam menggambarkan pencapaian atas pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Capaian nilai IPA di Provinsi Banten pada Tahun 2021 yaitu 62,92 dan di Tahun 2022 yaitu 64,33. Dari dua tahun terakhir data menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sudah terlaksana dengan cukup baik.

Peningkatan atas capaian dari Tahun 2021 ke 2022 menggambarkan adanya inovasi kebijakan yang mendukung, sehingga lebih efektif dan adaptif.

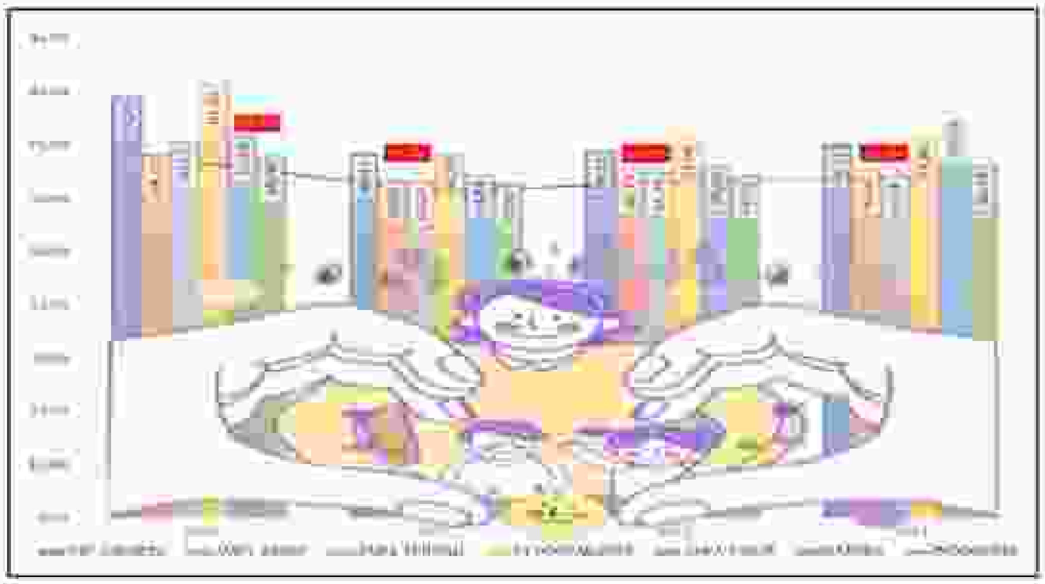

GAMBAR II.40

PERBANDINGAN INDEKS PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2023

(Sumber: Kementerian PPPA, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Banten mengalami penurunan di Tahun 2021 menjadi 62,92 yang semula bernilai 68,71 pada Tahun 2019. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya banyaknya bentuk kekerasan yang terjadi pada anak dengan orientasi lokasi terjadinya kasus berada di lingkungan rumah tangga menurut data kementerian PPPA dalam situs SIMFONI-PPA. Penurunan indeks perlindungan anak di masa Pandemi Covid-19 diakibatkan oleh aktivitas digital orang tua dan anak yang tidak didasarkan pada literasi digital yang baik, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa aktivitas digital anak dapat menempatkan mereka dalam risiko dan potensi eksploitasi, yang dapat menyebabkan anak mengalami berbagai bentuk kekerasan diranah daring.

B. INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

IPKA merupakan bagian dari Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang juga mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). IPA secara keseluruhan mengukur upaya dan pencapaian dalam menjamin serta melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peningkatan IPKA dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan yang lebih baik, peningkatan layanan, partisipasi masyarakat, dan perkembangan teknologi berperan besar dalam melindungi anak-anak. Jika faktor-faktor ini terus diperkuat, IPKA dapat terus meningkat dimasa depan.

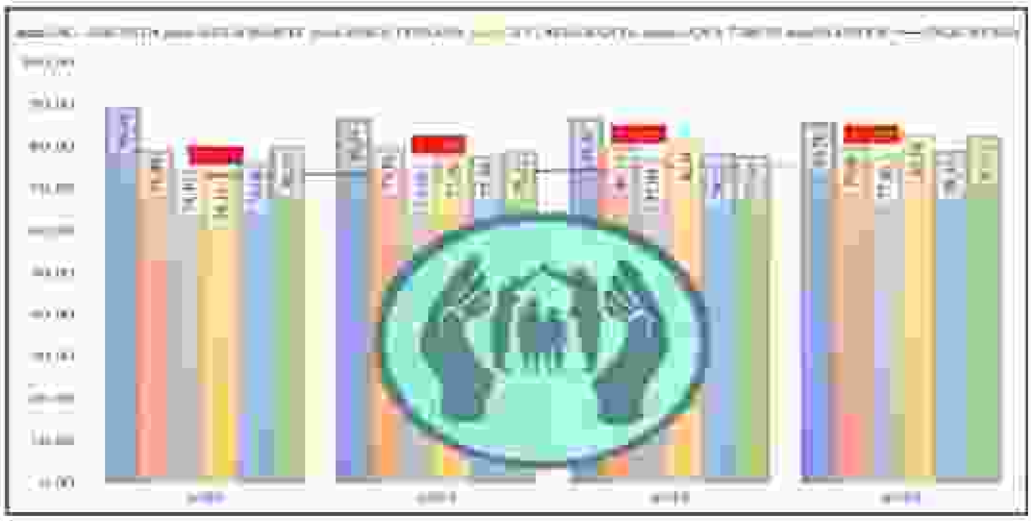

GAMBAR II.41
PERBANDINGAN INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2023
(Sumber: Kementerian PPPA, 2024; Diolah Oleh Bappeda)

Pada gambar di atas ini merupakan capaian IPKA di Provinsi Banten yang cukup baik sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2023, dengan dominasi capaian Provinsi Banten lebih tinggi daripada wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur bahkan capaian Nasional, sementara itu di Tahun 2023 berhasil mendekati capaian Jawa Barat, namun demikian capaian ini selama kurun waktu 4 (empat) tahun ini masih selalu di bawah capaian DKI Jakarta.

C. INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)

Indikator lainnya tentang anak yaitu ada terkait indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), merupakan indikator guna menilai hak-hak anak disuatu wilayah dapat terpenuhi secara baik, menyeluruh dan layak. Indeks ini diukur terhadap kelayakan pemenuhan anak terhadap akses kesehatan, pendidikan, partisipasi maupun yang tidak kalah penting terhadap akses perlindungan.

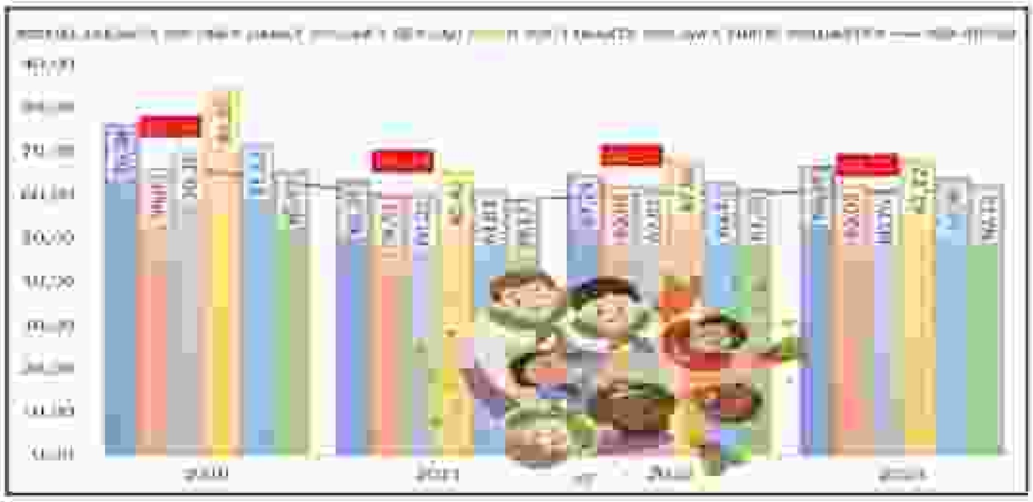

GAMBAR II.42
PERBANDINGAN INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2023
(Sumber: Kementerian PPPA, 2024; Diolah Oleh Bappeda)

Pengukuran IPHA mencakup indikator kesehatan dan gizi anak, pendidikan anak, lingkungan yang aman guna mendukung tumbuh kembang anak, paritisipasi anak, dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, ekploitasi, maupun diskriminasi. Pada gambar di bawah ini merupakan capaian nilai IPHA bagi Provinsi Banten dan wilayah sekitarnya, dari gambar ini terlihat bahwa capaian Provinsi Banten masih jauh daripada capaian provinsi lainnya, bahkan mendekati capaian rerata nasional.

D. INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA (IPKK)

IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Capaian output dimensi kesejahteraan diukur melalui kesehatan, kecukup pangan, tinggal dalam rumah layak huni. Capaian output dimensi ketahanan diukur melalui aspek keharmonisan keluarga, ketahanan finansial dan risiko kesehatan, dan akses informasi. Capaian output partisipasi pembangunan kualitas keluarga yang diukur melalui aspek kebermanfaatan: partisipatif dan peduli.

Nilai Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Banten Tahun 2022 69,01 lebih tinggi dari IPKK DKI Jakarta (49,59), Jawa Barat (63,38), Jawa Timur (66,47), Jawa Tengah (67,22), DI Yogyakarta (74,13), dan capaian IPKK Nasional (64,16). Hal ini menunjukkan belum optimalnya pembangunan kualitas keluarga di Provinsi Banten. Nilai IPKK berkisar antara 0-100 dan bermakna positif, nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. Angka IPKK dapat menunjukan area yang membutuhkan intervensi kebijakan dengan melakukan perbandingan capaian/perkembangan baik antar waktu maupun antarwilayah.

E. INDEKS KUALITAS KELUARGA (IKK)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama BPS mengembangkan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di Indonesia, dikenal dengan Indeks Kualitas Keluarga (IKK), dengan tujuan memberikan gambaran tentang kondisi keluarga dan membantu Pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga yang pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga secara inklusif.

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) ini dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi Ketahanan Legalitas-Struktur (KLS), Ketahanan Fisik (KKF), Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB).

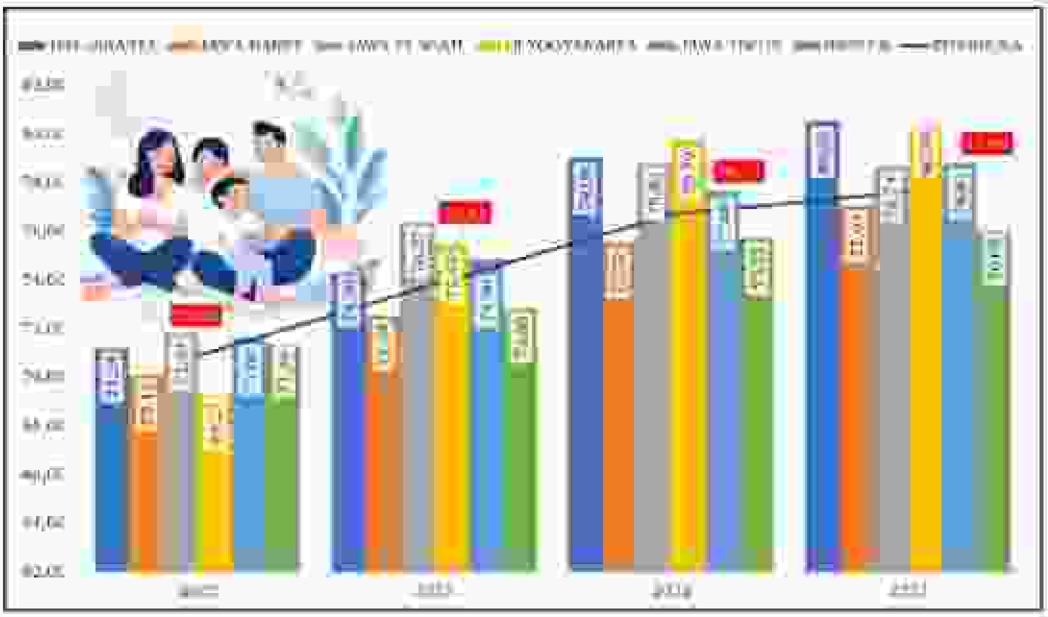

GAMBAR II.43
PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS KELUARGA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2023
(Sumber: Kementerian PPPA, 2024. Diolah Oleh Bappeda)

IKK di Provinsi Banten mengalami peningkatan disetiap tahunnya yang menunjukkan adanya kesadaran keluarga dalam peningkatan 5 (lima) dimensi kualitas keluarga. Kualitas keluarga di Provinsi Banten menempati kategori cukup responsif terhadap gender dan hak anak. Jika ditinjau dari 5 (lima) dimensi kualitas keluarga masih adanya capaian dimensi di Provinsi Banten yang lebih rendah daripada capaian Nasional dan provinsi lainnya di Pulau Jawa, hanya pada 3 (tiga) dimensi seperti: 1) KKF yang lebih tinggi daripada Jawa Tengah; 2) KKE yang lebih tinggi daripada Jawa Barat; dan 3) KKSB yang lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Capaian IKK di Provinsi Banten Tahun 2020-2023 dan wilayah lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah.

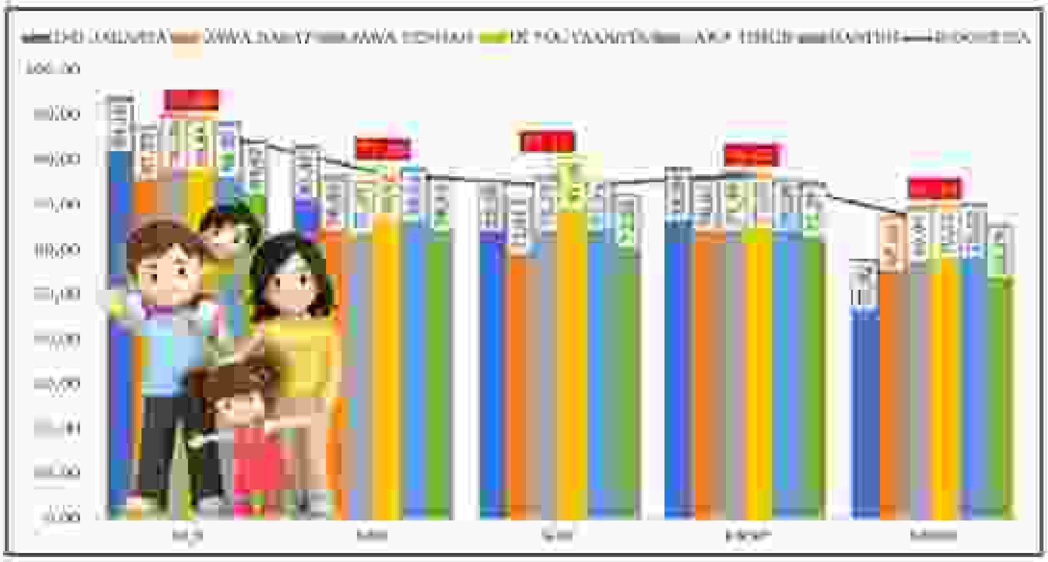

GAMBAR II.44
PERBANDINGAN NILAI VARIBEL PEMBENTUK IKK DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2023
(Sumber: Kementerian PPPA, 2024. Diolah Oleh Bappeda)

F. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indikator yang mengukur suatu keberhasilan atas pembangunan manusia berbasis gender, yang dilihat melalui tiga dimensi capaian dasar manusia, yaitu: 1) dimensi umur panjang dan hidup sehat; 2) pengetahuan; dan 3) standar hidup layak. Perhitungan indikator ini melalui perbandingan tingkat capaian mengenai pembangunan manusia perempuan terhadap capaian pembangunan manusia laki-laki, selengkapnya capaian IPG pada Provinsi Banten dan provinsi lainnya seperti pada gambar di bawah.

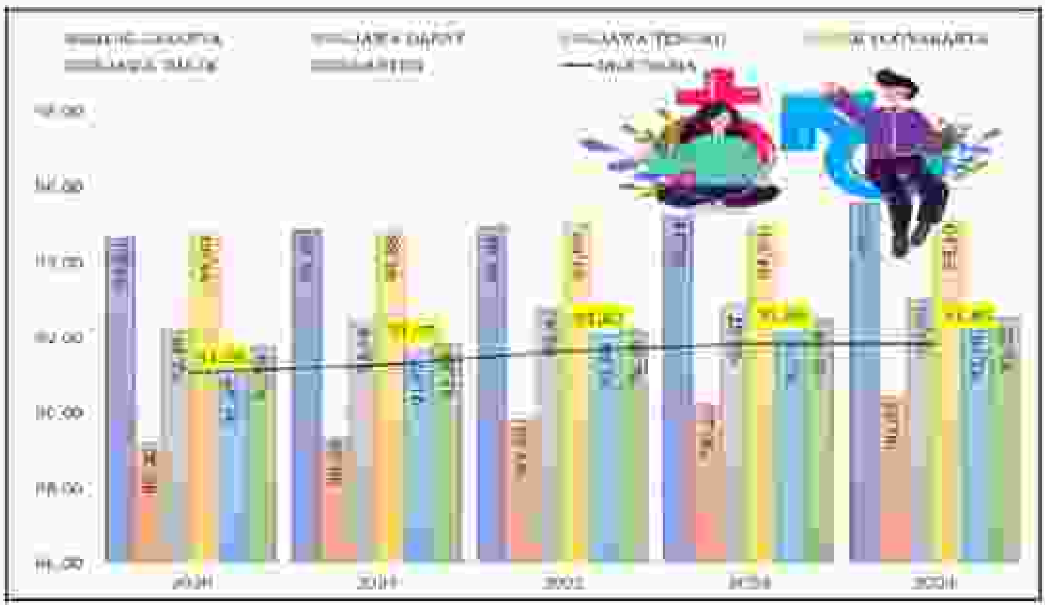

GAMBAR II.45

PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Capaian IPG di Provinsi Banten Tahun 2020-2024 jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian Provinsi Banten lebih baik dengan nilai yang semakin meningkat dan melebihi capaian nasional, artinya pembangunan telah lebih setara dan adil yang ditandai dengan rendahnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

G. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Sementara itu lain hal dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keadilan dan kesetaraan gender terhadap sejauh mana perempuan dapat berperan aktif berpartisipasi dalam hal politik dan kehidupan ekonomi. Indikator ini diukur melalui tiga komponen utama mencakup: 1) keterlibatan perempuan di parlemen; 2) perempuan sebagai tenaga profesional; dan 3) sumbangan pendapatan perempuan.

Lebih lanjut pada gambar di atas merupakan capaian IDG di Provinsi Banten dibandingkan dengan capaian nasional. Nilai IDG Provinsi Banten lebih rendah daripada capaian nasional, rendahnya IDG ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya perempuan terhadap akses sumber daya dan kesempatan dalam keterlibatan di parlemen/politik, tenaga profesional serta sumbangan pendapatan ekonomi.

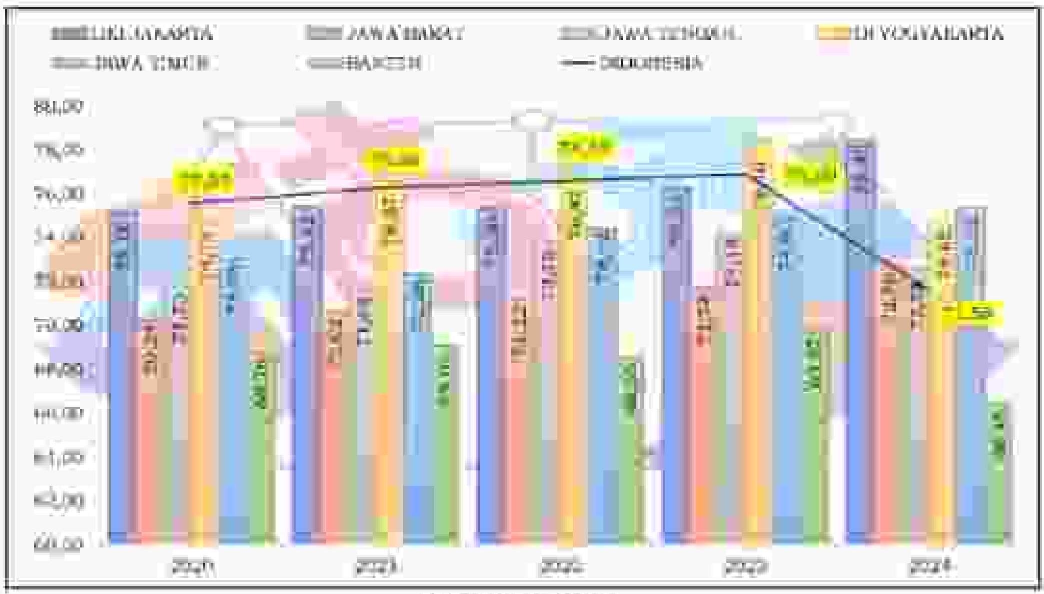

GAMBAR II.46
PERBANDINGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

H. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Indikator lainnya terkait gender yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembangunan manusia. Indikator ini dilakukan pengukuran melalui tiga dimensi utama, seperti: 1) kesehatan reproduksi; 2) pemberdayaan; dan 3) partisipasi ekonomi.

Capaian IKG di Provinsi Banten mengalami fluktuatif yang kecenderungannya mengalami penurunan sehingga memberikan kondisi yang baik, namun capaian ini masih di bawah nilai nasional, terjadinya peningkatan di Tahun 2021 ke 2022 dipengaruhi oleh peningkatan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja, nilai IKG di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di bawah.

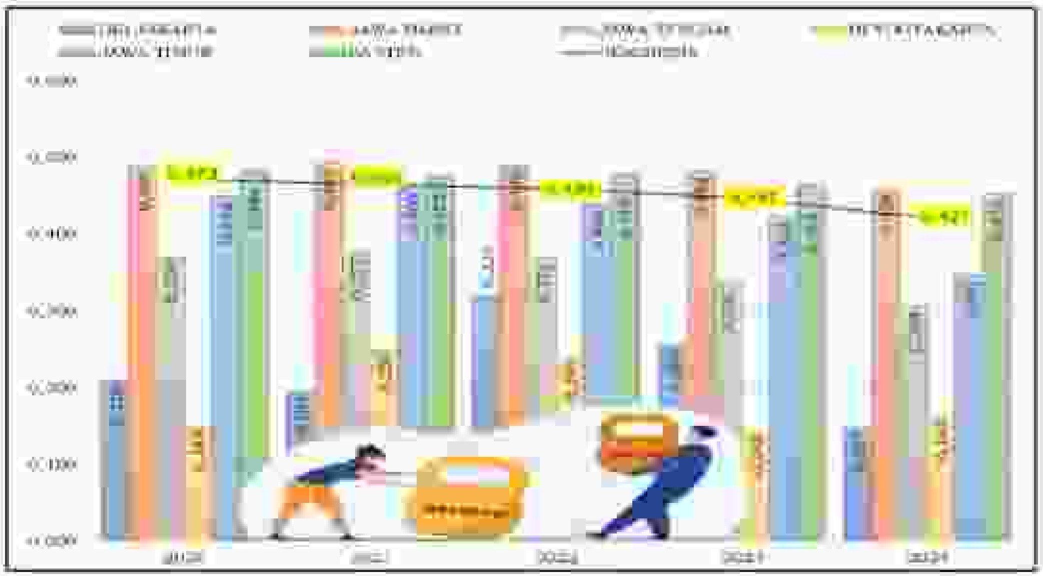

GAMBAR II.47
PERBANDINGAN INDEKS KETIMPANGAN GENDER DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

I. INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) disusun berdasarkan tiga lapisan domain pembangunan pemuda yang menjadi ruang lingkup IPP, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. IPP disusun oleh 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda, yaitu: 1) domain pendidikan (3 indikator); 2) domain kesehatan dan kesejahteraan (4 indikator); 3) domain lapangan dan kesempatan kerja (2 indikator); 4) domain partisipasi dan kepemimpinan (3 indikator); 5) domain gender dan diskriminasi (3 indikator).

Pada Tahun 2023, persentase jumlah pemuda di Provinsi Banten sebanyak 23,67 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Banten (Statistik Pemuda, 2023). Hasil perhitungan Tahun 2023, terdapat peningkatan nilai IPP di Tahun 2023 sebesar 1,16 poin dari 52,17 menjadi 53,33. Kenaikan nilai IPP dikarenakan ada pertambahan nilai pada domain kesehatan dan kesejahteraan yaitu 72,50 menjadi 75,00 di Tahun 2023. Domain gender dan diskriminasi juga mengalami peningkatan dengan selisih 3,33 poin dari 50 pada 2022 menjadi 53,33 di Tahun 2023. Sedangkan domain lainnya yaitu domain pendidikan, domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami stagnasi.

Jika dibandingkan dengan dengan capaian rata-rata nasional hanya domain kesehatan dan kesejahteraan yang memiliki nilai di atas rata-rata nasional yaitu 75 dengan selisih 5 poin, sementara itu untuk domain pendidikan serta domain gender dan diskriminasi memperoleh nilai yang sama dengan rata-rata nasional yaitu 70,00 dan 53,33. Lebih lanjut domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain partisipasi dan kepemimpinan memiliki nilai capaian di bawah rata-rata nasional, hal ini dikarenakan angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi. Perbandingan dengan nilai transformasi indikator tingkat nasional, Provinsi Banten memiliki lima indikator dengan capaian nilai sama dengan rata-rata nasional, enam indikator dengan nilai capaian di bawah rata-rata nasional, dan empat indikator yang lebih baik dari nilai rata-rata nasional.

Pada pelaksanaan IPP di Provinsi Banten, masih perlu adanya peningkatan terhadap penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda serta penjalinan kerja sama. Tantangan lain pada isu domain gender dan diskriminasi seperti pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A. ANGKA KETERGANTUNGAN

Angka ketergantungan (*dependency ratio*), adalah rasio yang menggambarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun) yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja.

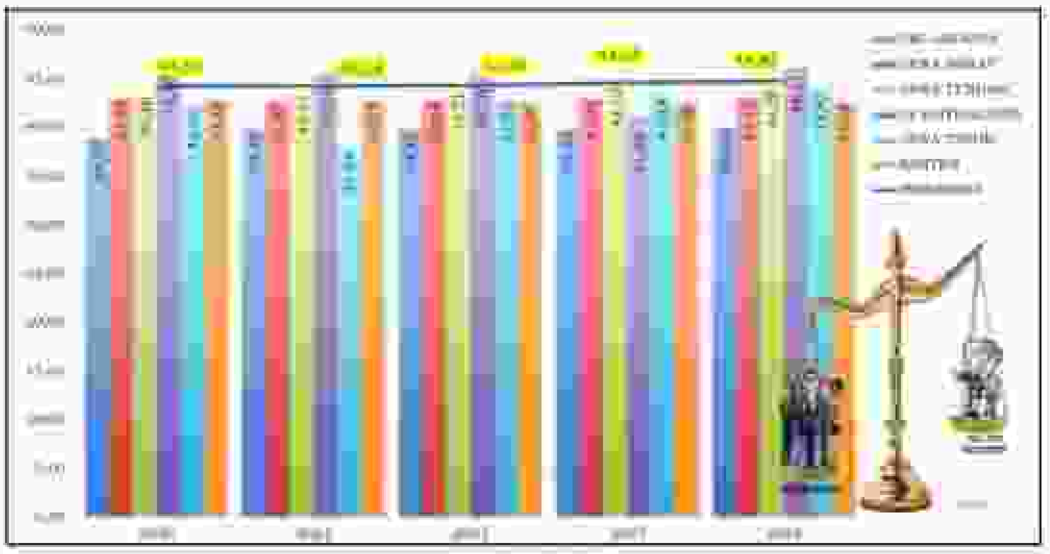

GAMBAR II.48
PERBANDINGAN ANGKA KETERGANTUNGAN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Pada Tahun 2024 ***dependency ratio*** penduduk Provinsi Banten adalah 42,58 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 43 penduduk yang berusia tidak produktif. Rasio ketergantungan Banten turun dari 42.89 persen (2020) menjadi 42,58 persen (2024) atau turun 0,31 persen dalam periode tahun tersebut. Rasio ketergantungan terus menurun, hal ini menunjukkan bahwa komposisi usia penduduk mulai stabil. Penyebab penurunan angka ketergantungan di Banten, antara lain:

a. Faktor demografi
   - Bonus demografi, banten mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), yang menyebabkan rasio ketergantungan menurun.
   - Menurunnya angka kelahiran, program Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan kesadaran akan jumlah anak ideal dapat mengurangi jumlah penduduk usia 0–14 tahun.

b. Dampak pandemi covid-19 (2020-2021)
   - Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 terutama di kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas), hal ini dapat menyebabkan penurunan rasio ketergantungan secara tajam pada Tahun 2020.

- Disrupsi ekonomi dan migrasi, banyak pekerja dari luar Banten kembali ke daerah asalnya akibat kehilangan pekerjaan yang mengubah komposisi penduduk di wilayah ini.

c. Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi
- Banten memiliki kawasan industri besar (seperti di Cilegon, Serang, dan Tangerang), yang menarik banyak penduduk usia produktif untuk bekerja.
- Urbanisasi dan pertumbuhan lapangan kerja, banyak penduduk usia muda yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang berdampak terhadap berkurangnya rasio ketergantungan.

d. Implikasi dan tantangan:

I. Peluang positif dari bonus demografi
  - Jika dikelola dengan baik proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja.
  - Daya beli dan konsumsi meningkat yang dapat mendukung sektor perdagangan dan industri di Bnten.

II. Tantangan yang harus dihadapi
  - Pengangguran dan keterampilan tenaga kerja
    - Jika pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding, angka pengangguran dapat meningkat terutama di kalangan generasi muda.
    - Tingginya persaingan tenaga kerja membutuhkan peningkatan keterampilan (*skill upskilling*) agar tenaga kerja bisa bersaing dalam industri 4.0.
  - Pendidikan dan kualitas SDM
    - Rasio ketergantungan yang menurun tidak cukup jika kualitas tenaga kerja masih rendah.
    - Masih terdapat ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan di beberapa wilayah di banten.

e. Rekomendasi strategi untuk memanfaatkan bonus demografi

I. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, melalui:
  - Memperluas akses pendidikan vokasi di bidang industri, teknologi, dan digital;
  - Mendorong program pelatihan kerja berbasis industri agar tenaga kerja Banten sesuai dengan kebutuhan pasar;
  - Meningkatkan akses ke perguruan tinggi, terutama di bidang STEM (*science, technology, engineering, mathematics*).

II. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan
  - Pemerintah daerah dapat menarik lebih banyak investasi di sektor manufaktur, teknologi, dan industri kreatif untuk menyerap tenaga kerja usia produktif;
  - Meningkatkan dukungan bagi UMKM dan ekonomi kreatif untuk mengurangi pengangguran;
  - Memperkuat insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan lulusan baru.

III. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk
  - Program kesehatan untuk lansia guna menjaga keseimbangan penduduk usia lanjut agar tetap produktif;
  - Meningkatkan akses layanan kesehatan dan gizi bagi anak-anak untuk memastikan generasi muda lebih sehat dan cerdas.

IV. Mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja
  - Memberikan fasilitas daya dukung kerja bagi perempuan, seperti fleksibilitas kerja, program pelatihan, dan dukungan usaha berbasis rumah tangga;
  - Memperluas akses perempuan ke sektor pekerjaan formal dan menekan kesenjangan gender di dunia kerja.

Jika strategi ini diterapkan dengan baik, Banten dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan memanfaatkan potensi tenaga kerja produktif secara maksimal.

B. PEMBANGUNAN OLAHRAGA

Sport Development Index (SDI) atau Indeks Pembangunan Olahraga adalah metode untuk megukur kemajuan pembangunan olahraga. Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik. Ia harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, maupun sosial, secara paripurna. Menurut Cholik dan Maksum (2007), *Sport Development Index* adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar: (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga; (2) sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga; (3) pertisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur, dan; (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.

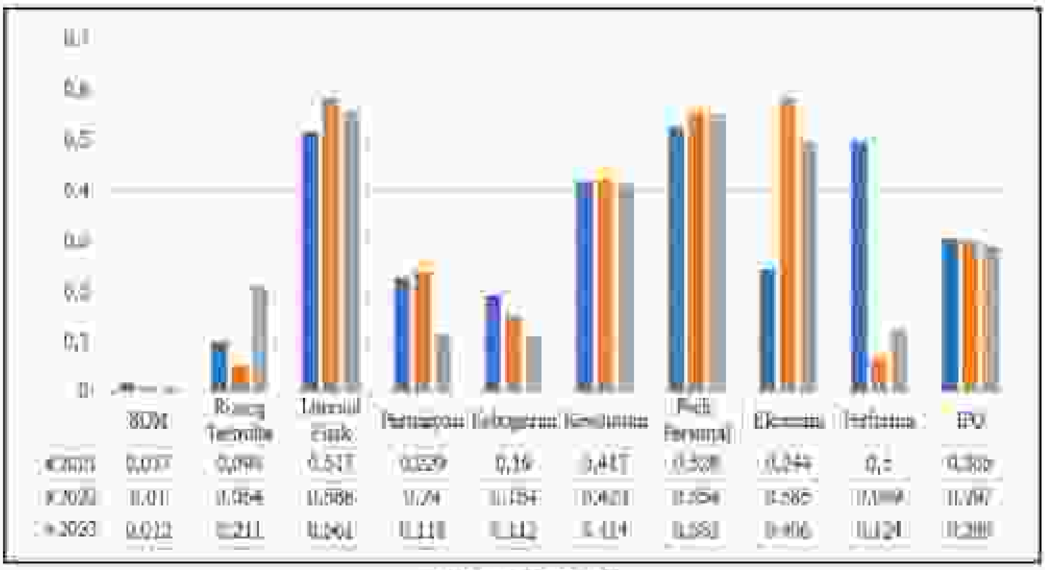

GAMBAR II.49

INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2021-2023

(Sumber: SDI Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2023 sebesar 0,289 dari skala 0-1. Capaian tersebut menurun 0,008 poin dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 0,297. Dimensi yang masuk dalam kategori rendah adalah SDM, performa, kebugaran jasmani, ruang terbuka, partisipasi, dan kesehatan. Sedangkan dimensi yang masuk dalam kategori menengah adalah ekonomi, perkembangan personal, dan literasi fisik. Capaian bidang pembudayaan olahraga yang indikator utamanya berupa tingkat partisipasi dan tingkat kebugaran masyarakat mengalami penurunan. Indeks partisipasi pada Tahun 2023 sebesar 0,118, menurun 0,122 poin dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 0,240. Sementara itu, indeks kebugaran jasmani pada Tahun 2023 sebesar 0,112, menurun 0,042 poin dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 0,154.

Penurunan tingkat partisipasi tidak hanya berdampak pada kebugaran jasmani, tetapi juga perputaran uang akibat aktivitas olahraga. Laporan ini menyatakan bahwa capaian ekonomi olahraga yang diukur dengan indeks ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,089 poin, dari 0,585 pada Tahun 2022 menjadi 0,496 pada Tahun 2023. Penurunan indeks ekonomi merupakan konsekuensi logis dari tingkat partisipasi berolahraga yang juga menurun.

2.1.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A. INDEKS INOVASI DAERAH

Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Indeks Inovasi Daerah (IID) yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia, indeks ini mencakup dalam hal pengukuran inovasi dalam bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah. Pengukuran ini dilakukan setiap tahun melalui program *Innovattive Government Award* (IGA), bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang secara aktif menjadikan inovasi sebagai kunci pemajuan daerahnya.

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatkan inovasi daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak Tahun 2019. Tercatat pada Tahun 2019-2024 nilai indeks inovasi daerah di Provinsi Banten cukup berfluktuatif.

TABEL II.42
PERINGKAT DAN NILAI INDEKS INOVASI DAERAH DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019-2024

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PERINGKAT INOVASI DAERAH	6	8	7	18	11	29
2	NILAI INDEKS INOVASI DAERAH	18,230	8,191	60,32	50,41	56,92	45,57
3	JUMLAH INOVASI YANG DIAJUKAN	70	178	182	141	103	130

Sumber: SPD Provinsi Banten, 2023 (Diolah Oleh Bappeda)
Keterangan: Tahun 2020 ke atas [illegible] perubahan metode perhitungan [illegible] tahun sebelumnya

Sementara itu hasil pengukuran indeks inovasi daerah pada Tahun 2024 untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur memperoleh peringkat inovasi daerah yang sangat inovatif, sedangkan DI Yogyakarta dan Banten berada pada peringkat inovasi daerah Inovatif.

TABEL II.43

PERBANDINGAN INDEKS INOVASI DAERAH DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2019-2024

WILAYAH	TAHUN						KETERANGAN
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
DKI JAKARTA	31870	10.552	59,64	69,51	80,98	80,18	SANGAT INOVATIF
JAWA BARAT	59330	6,879	62,80	64,15	74,77	81,27	SANGAT INOVATIF
JAWA TENGAH	22810	36,357	62,57	71,24	62,4	72,85	SANGAT INOVATIF
DI YOGYAKARTA	11460	926	29,41	50,24	49,84	51,16	INOVATIF
JAWA TIMUR	12780	5,043	63,15	72,82	71,28	67,23	SANGAT INOVATIF
BANTEN	14230	8,191	60,52	50,81	36,93	45,52	INOVATIF

Sumber: Kepmendagri Nomor 400.10.11-4858 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatkan inovasi daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak Tahun 2019. Tercatat pada Tahun 2019-2024 nilai indeks inovasi daerah di Provinsi Banten cukup berfluktuatif.

B. PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

TABEL II.44

PDRB ATAS HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT KATEGORI LAPANGAN USAHA DI PROVINSI BANTEN (MILYAR RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
A. PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	25.273	25.417	26.400,52	26.552,02	26.703,60
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	2.641	2.657	2.208,48	1.844,03	1.713,75
C. INDUSTRI PENGOLAHAN	147.524	157.029	162.653,45	169.024,05	178.207,30
D. PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	3.892	4.219	4.640,22	4.371,07	4.130,25
E. PENGADAAN AIR	471	494	512,05	540,07	561,21
F. KONSTRUKSI	49.727	49.552	51.920,18	52.700,70	55.803,08
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	60.862	61.285	64.015,35	66.574,76	69.458,27
H. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	20.871	22.054	27.987,76	31.432,20	33.628,91
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	10.885	11.323	12.201,38	13.284,07	14.221,26
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	29.736	31.872	33.161,40	35.734,64	37.828,60
K. JASA KEUANGAN	13.492	14.244	14.912,11	14.870,00	14.820,27
L. REAL ESTATE	41.592	42.635	44.305,04	46.077,63	47.716,52
M, N. JASA PERUSAHAAN	4.607	4.365	4.734,59	5.077,93	5.411,81
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	8.057	7.986	8.120,26	8.284,32	8.610,73
P. JASA PENDIDIKAN	14.299	14.141	13.992,86	14.801,04	15.536,43
Q. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	4.136	4.732	4.857,82	7.352,42	8.014,95
R,S,T,U. JASA LAINNYA	6.717	6.815	7.156,05	7.675,42	8.270,15

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT KATEGORI LAPANGAN USAHA DI PROVINSI BANTEN (MILYAR RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB	441.148,58	460.702,75	484.125,42	507.425,74	531.715,25

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Provinsi Banten adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, dan kontruksi. Nilai PDRB pada sektor tersebut juga memiliki peningkatan dari tahun ke tahun misalnya industri pengolahan mengalami peningkatan dari Rp154.761 milyar pada Tahun 2019 menjadi Rp169.956 milyar di Tahun 2023, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan dari 62.297 milyar pada Tahun 2019 menjadi Rp66.577 milyar di Tahun 2023, dan kontruksi mengalami peningkatan dari Rp46.048 milyar pada Tahun 2019 menjadi Rp52.697 milyar di Tahun 2023. Peningkatan PDRB di Provinsi Banten terjadi karena banyaknya kegiatan industri serta banyaknya kebutuhan pergerakan, sehingga transaksi pembelian transportasi meningkat, serta munculnya usaha baru berupa perdagangan besar sebagai bentuk hilirisasi hasil produksi industri pengolahan.

C. RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, *ceteris paribus*.

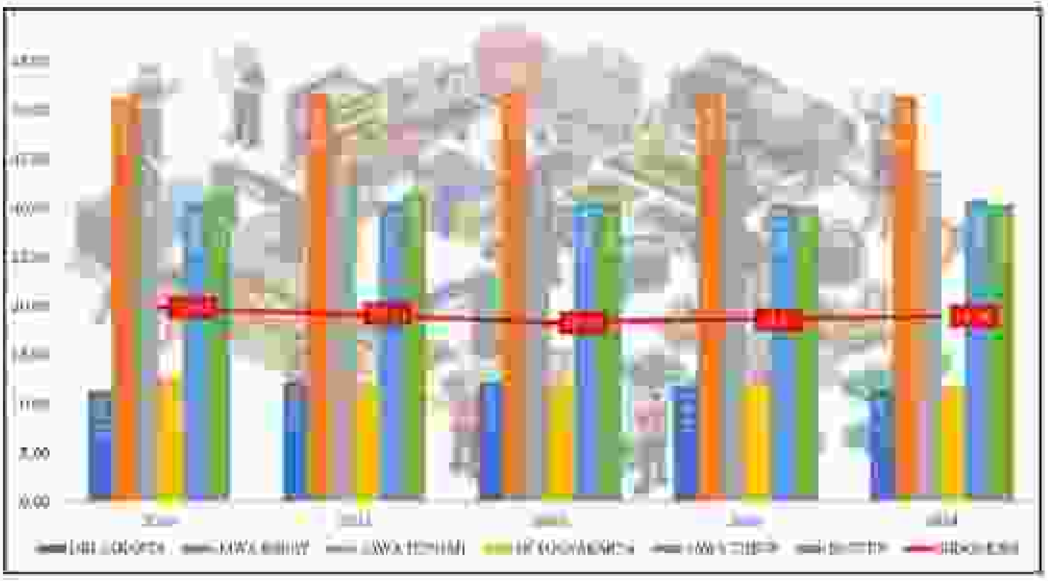

GAMBAR II.50

PERBANDINGAN PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Menurunnya proporsi industri pengolahan di Banten perlu diwaspadai mengingat beberapa perusahaan besar yang telah pindah baik secara penuh maupun bertahap dari Banten ke Jawa Tengah. Misalnya, tiga perusahaan besar yang pindah adalah PT. KMK Global Sport, PT. Nikomas Gemilang, dan PT. Parkland World Indonesia. Industri pindah dari

Banten, karena: 1) upah minimum tinggi, 2) korupsi dan birokrasi rumit, 3) efisiensi biaya produksi, 4) pertumbuhan ekonomi rendah, 5) insentif pemerintah lebih menarik di daerah lain. Sedangkan alasan industri tertarik ke Jawa Tengah karena Pemerintah Jawa Tengah mempercepat pengembangan kawasan industri di beberapa daerah, termasuk Batang dan Brebes. Kawasan industri ini dirancang untuk menarik investasi baik lokal maupun internasional dengan menawarkan berbagai fasilitas dan insentif. Pemerintah Jawa Tengah juga aktif mencari dukungan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan industri tertentu seperti makanan dan minuman, tekstil, dan industri furnitur. Dukungan ini termasuk bantuan teknis dan keuangan untuk meningkatkan daya saing industri di provinsi tersebut.

D. RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM

Proporsi PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum adalah persentase bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: (1) penyediaan akomodasi bagi wisatawan, dan (2) penyediaan jasa makan dan minum. Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, *ceteris paribus*.

Data di bawah menunjukkan perkembangan dan perbandingan perolehan PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum di Provinsi Banten dengan wilayah lainnya, terlihat bahwa nilai perolehan Banten masih jauh dan hampir mendekati rerata nasional yang menandakan masih kurangnya daya ungkit perolehan pendapatan daerah dari aktivitas pariwisata maupun penunjangnya. Berbeda dengan daerah DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan perolehan yang sangat tinggi akibat banyaknya daya tarik wisata untuk dapat dikunjungi seperti wisata alam dan tentunya wisata budaya.

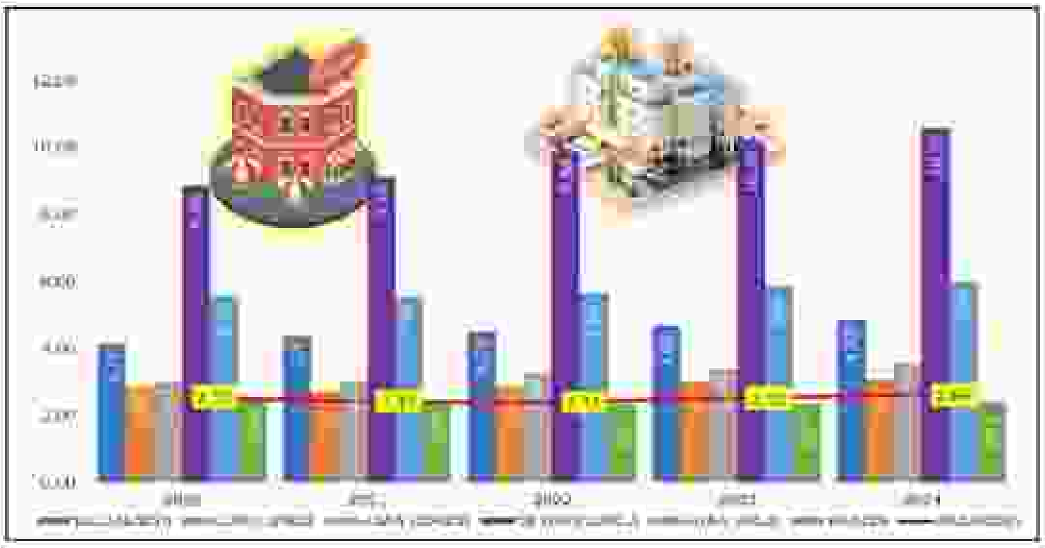

GAMBAR II.51
PERBANDINGAN PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

E. PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA

Perjalanan Wisatawan Nusantara adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia (wisatawan domestik) di dalam wilayah Indonesia, dengan tujuan utama untuk berwisata, berlibur, keperluan bisnis, kunjungan keluarga, pendidikan, kesehatan, atau keperluan lainnya, tanpa bermaksud untuk menetap secara permanen di tempat yang dikunjungi, dengan ciri-ciri mencakup:

- Pelaku perjalanan: warga negara Indonesia;
- Wilayah perjalanan: antar daerah/provinsi atau dalam satu provinsi di Indonesia;
- Durasi: biasanya perjalanan sementara, bisa harian (tanpa menginap) atau dengan menginap;
- Motif: bisa untuk rekreasi, budaya, religi, kesehatan, pendidikan, olahraga, bisnis, atau keperluan pribadi lainnya.

Pertumbuhan perjalanan wisatawan ke Provinsi Banten didorong oleh faktor kedekatan geografis dengan Jakarta, pembangunan infrastruktur, beragamnya destinasi wisata alam dan budaya, serta promosi yang makin aktif. Namun, Provinsi Banten masih terdapat tantangan terhadap ketatnya persaingan dengan provinsi besar lainnya, keterbatasan fasilitas wisata, kurangnya diversifikasi aktivitas wisata, dan infrastruktur yang belum merata. Oleh sebab hal tersebut, guna meningkatkan daya saing, perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur, memperkaya jenis wisata, penguatan 6A (atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas, *ancillary*, dan *available package*), penciptaan pusat niaga lokal dan integrasi infrastruktur konektivitas pariwisata menuju destinasi wisata, dan tentunya dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai bagian aktif dalam ekosistem pariwisata. Untuk perbandingan jumlah perjalanan di Provinsi Banten dengan wilayah lainnya sebagaimana yang disajikan pada gambar di bawah.

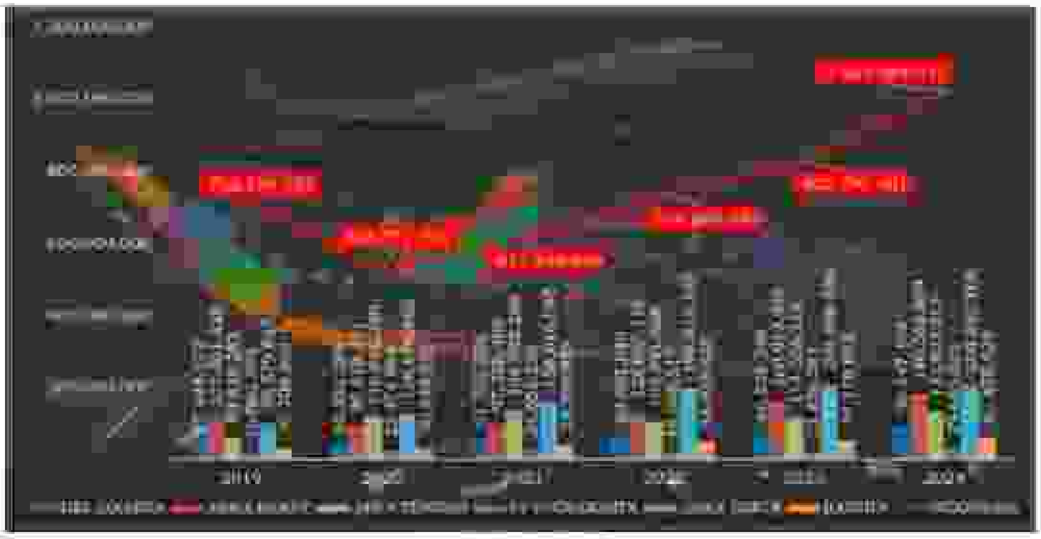

GAMBAR II.52

PERBANDINGAN PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2019-2024

(Sumber: BPS, 2025; Diolah Oleh Bappeda)

F. JUMLAH TAMU WISATAWAN MANCANEGARA

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke wilayah Banten, menunjukkan bahwa Banten terus menjadi destinasi wisata yang diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Menurut data yang dirilis, peningkatan ini turut dipengaruhi oleh keunggulan berbagai destinasi wisata di Banten, seperti pantai-pantai di kawasan Anyer dan Tanjung Lesung, serta daya tarik wisata budaya dan religi. Selain itu, infrastruktur yang semakin baik juga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Tren positif ini terus berlanjut dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku pariwisata dianggap penting untuk menjaga kualitas layanan dan memperkuat promosi destinasi unggulan. Untuk perbandingan jumlah tamu wisatawan mancanegara di Provinsi Banten dengan wilayah lainnya sebagaimana yang disajikan pada gambar di bawah.

GAMBAR II.53
PERBANDINGAN JUMLAH TAMU WISATAWAN MANCANEGARA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024; Diolah Oleh Bappeda)

G. TENAGA KERJA PARIWISATA

Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah orang yang bekerja pada 12 aktivitas usaha pariwisata dan 16 subsektor ekonomi kreatif berdasarkan cakupan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pada KBLI 2015. Sektor pariwisata mengalami penurunan besar saat COVID-19 (seperti yang terjadi di banyak daerah di Indonesia). Namun di Banten jumlah tenaga kerja tetap naik kemungkinan karena faktor, adanya diversifikasi ke wisata lokal/domestik, penguatan sektor ekonomi kreatif yang terkait pariwisata.

Dengan memperhatikan terhadap kondisi kepariwisataan di Provinsi Banten khususnya pada aspek tenaga kerja yang terlibat dalam lingkup pariwisata masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan guna mencapai pertumbuhan ekonomi daerah mencakup:

- Pelatihan dan sertifikasi: mendorong pelatihan tenaga kerja (bahasa asing, hospitality, tour guide profesional) untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata;

- Diversifikasi produk wisata: mengembangkan wisata berbasis alam, budaya lokal, dan wisata digital supaya lapangan kerja baru terus tumbuh;
- Peningkatan infrastruktur pariwisata: akses jalan, fasilitas umum, dan transportasi ke destinasi wisata harus terus diperbaiki agar pariwisata makin menggeliat;
- Strategi mitigasi krisis: menyusun strategi tanggap darurat sektor pariwisata agar jika ada krisis seperti pandemi lagi, dampaknya ke tenaga kerja bisa diminimalkan;
- Fokus pada pariwisata berkelanjutan: pelatihan tenaga kerja agar mengutamakan konservasi alam dan budaya lokal supaya pariwisata tetap berkelanjutan jangka panjang.

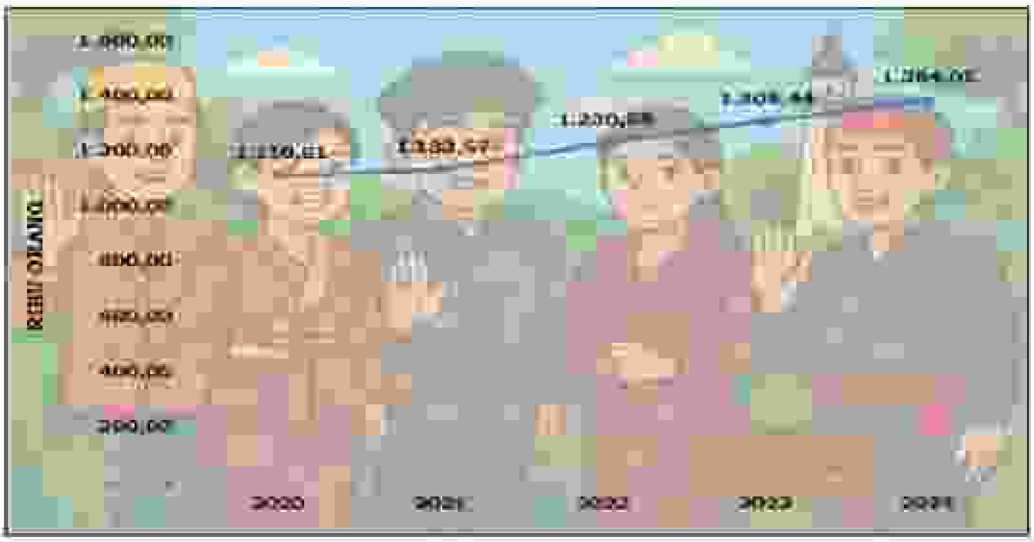

GAMBAR II.54

JUMLAH TENAGA KERJA PARIWISATA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

H. PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF

Pengembangan Industri Kreatif menjadi salah satu dalam Asta Cita poin ke 3: melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persentase bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: fesyen, kuliner, kriya, film, animasi dan video, pengembang permainan, aplikasi, musik, seni pertunjukan, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, seni rupa, desain produk, periklanan, penerbitan, arsitektur, dan desain interior.

Hampir 95 persen produk ekspor ekonomi kreatif Indonesia berasal dari Jawa. Selain DI Yogyakarta, semua provinsi di Jawa mengekspor produk ekonomi kreatif lebih dari US$ 1 miliar per tahun. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Banten mencapai 14,16 persen atau sekitar 2,8 miliar. Hal ini sejalan dengan data BPS selama kurun waktu 2017 yang menunjukan nilai ekspor ekonomi kreatif di Provinsi Banten mencapai nilai US$ 3,42 miliar. Banten sendiri menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar pada sektor ekonomi kreatif setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang menembus angka US$ 6,83 dan US$3,47 miliar (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, 2017). Ini merupakan tren positif yang bisa terus dikembangkan oleh Provinsi Banten.

Ekonomi kreatif di Banten memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), produksi sektor ekonomi kreatif Provinsi Banten termasuk dalam sepuluh provinsi dengan ekspor sektor ekonomi kreatif paling tinggi di Indonesia. Banten sendiri memiliki 3 sektor unggulan ekonomi kreatif berdasarkan data statistika Kemenparekraf yaitu; musik sebesar 26,75 persen, film animasi dan video sebesar 13,18 persen dan Kuliner sebesar 12,04 persen. Sedangkan kota/kabupaten didominasi oleh Kota Tangerang selatan sebesar 40,56 persen, Kota Tangerang sebesar 21,75 persen dan Kabupaten Tangerang sebesar 19,07 persen. Adapun subsektor lainnya mencapai 48,03 persen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan rata-rata mencapai angka 18,62 persen (Kemenparekraf, Economic, 2020). Berikut data proyeksi Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi terhadap PDB Ekraf Nasional.

Namun, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Banten, seperti belum terbangunnya struktur industri yang menopang pengembangan ekonomi kreatif, belum tersedianya skema pembiayaan bagi pelaku industri ekonomi kreatif, dan terbatasnya akses pasar. Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, seperti meningkatkan partisipasi generasi milenial dalam sektor ekonomi kreatif dan mengembangkan sinergi antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, dan media massa. Beberapa contoh potensi ekonomi kreatif di Banten antara lain:

- Pariwisata: Banten memiliki banyak destinasi wisata yang menarik, seperti Pantai Carita, Pantai Anyer, dan Taman Nasional Ujung Kulon.
- Kerajinan: Banten terkenal dengan kerajinan tangan seperti batik, kerajinan kulit, dan kerajinan kayu.
- Makanan: Banten memiliki banyak makanan khas yang lezat, seperti sate bandeng, nasi timbel, dan es teler.

I. RASIO KEWIRAUSAHAAN

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

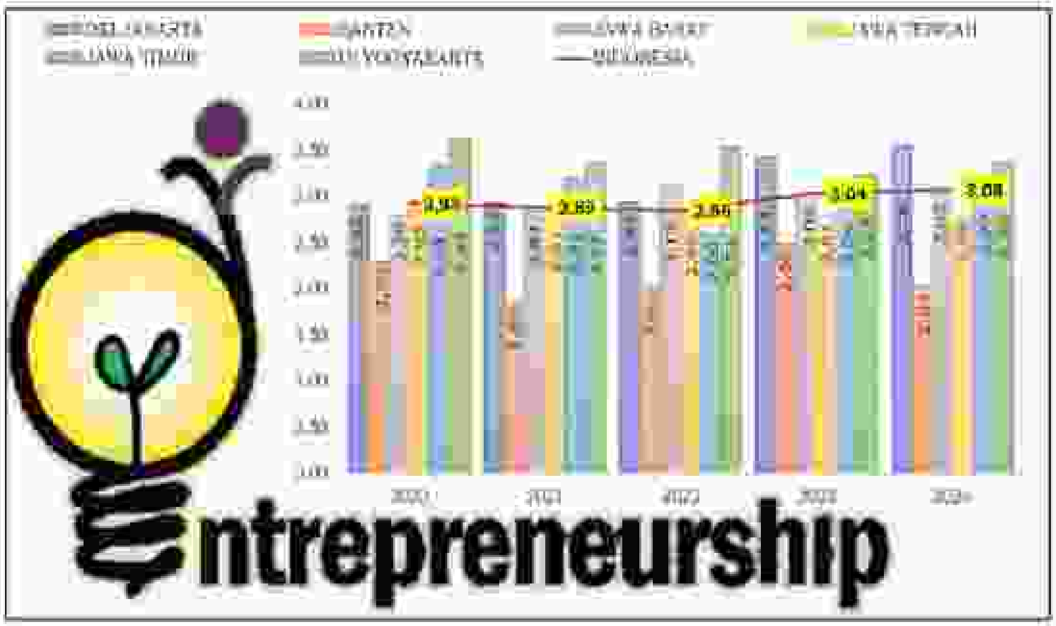

GAMBAR II.55
PERBANDINGAN RASIO KEWIRAUSAHAAN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

J. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

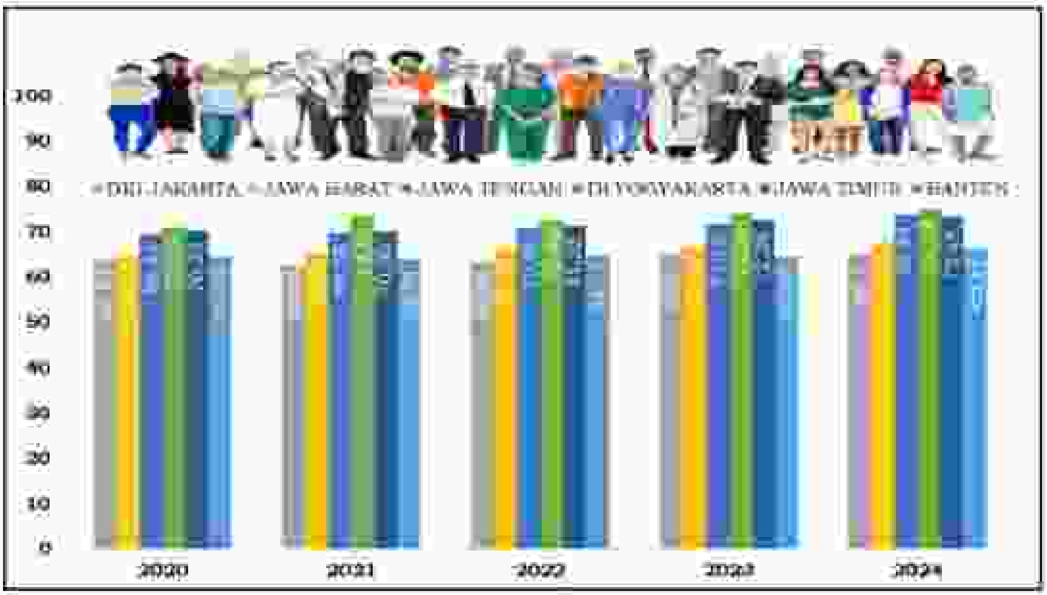

GAMBAR II.56
PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

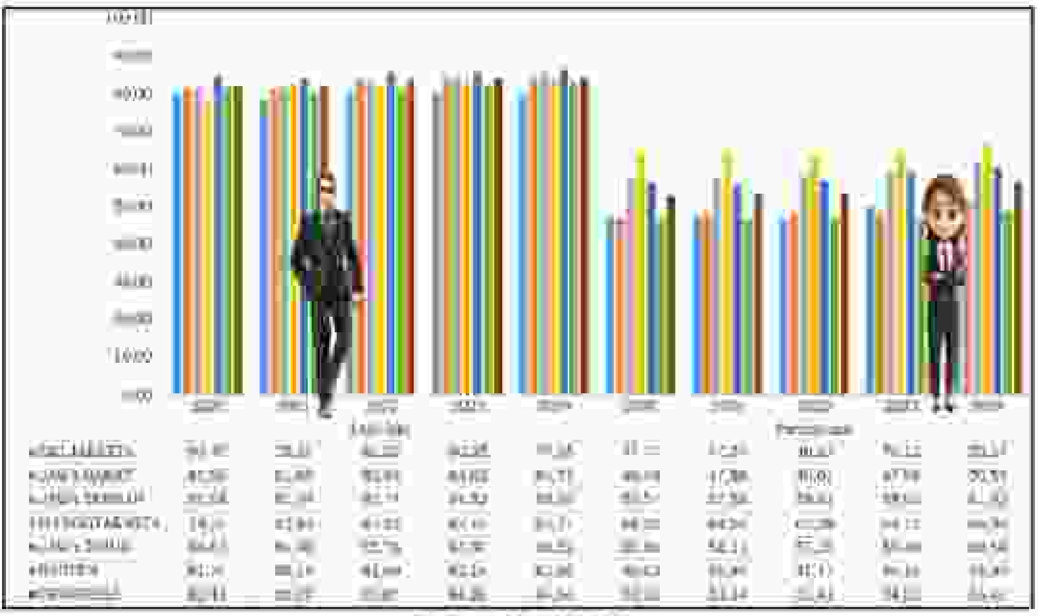

GAMBAR II.57

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA MENURUT JENIS KELAMIN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS, 2024; Diolah Oleh Bappeda)

Dari gambar di atas terlihat bahwa TPAK di Provinsi Banten mengalami pertumbuhan fluktuatif yakni penurunan pada Tahun 2021 menjadi 63,79 persen kemudian kenaikan Tahun 2022 menjadi 64,72 persen dan kembali turun menjadi 64,44 persen di Tahun 2023. Demikian pula pada Tahun 2024 tercatat meningkat sebesar 1,73 persen poin dari sebelumnya 64,44 persen pada Tahun 2023 menjadi 66,17 persen pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk lebih banyak dari pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dilakukan melalui peningkatan daya ungkit indeks pendidikan yang relevan khususnya pendidikan menengah kejuruan. Pentingnya mengembangkan pendidikan menengah kejuruan yang mampu mengakomodasi kebutuhan industri di Provinsi Banten. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi Pria ada di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2024 sebesar 86,52, sedangkan untuk perempuan tertinggi di DI Yogyakarta sebesar 66,59.

K. INDEKS INKLUSI KEUANGAN

Merujuk pada *Global Financial Inclusion Index*, indikator inklusi keuangan adalah jumlah kepemilikan rekening per populasi, jumlah penggunaan rekening untuk menabung, melakukan transaksi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Perkembangan Indeks Inklusi Keuangan di Banten Tahun 2019 sebesar 78,27 meningkat di Tahun 2022 sebesar 85,71 atau sebanding dengan kenaikan sebesar 7,44 poin. Berdasarkan hasil pengukuran, indeks inklusi keuangan di Banten mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan konvensional.

Banten mengalami kenaikan sebesar 7,44 poin, lebih tinggi dibanding DKI Jakarta (3,95), Jawa Timur (5,29), dan Jawa Barat (2,97). Namun, kenaikan Banten masih lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah

(20,52) dan kenaikan rata-rata nasional (9,33). Faktor yang mempengaruhi peningkatan di Banten:

- Urbanisasi dan kedekatan dengan Jakarta, Banten memiliki wilayah perkotaan seperti Tangerang yang berkembang pesat dengan layanan keuangan lebih mudah diakses;
- Meningkatnya digitalisasi keuangan, peningkatan ini didukung oleh semakin banyaknya layanan digital banking dan *fintech* di wilayah perkotaan Banten;
- Program pemerintah dalam inklusi keuangan, inisiatif dari pemerintah daerah dan OJK untuk meningkatkan literasi dan akses ke layanan keuangan.

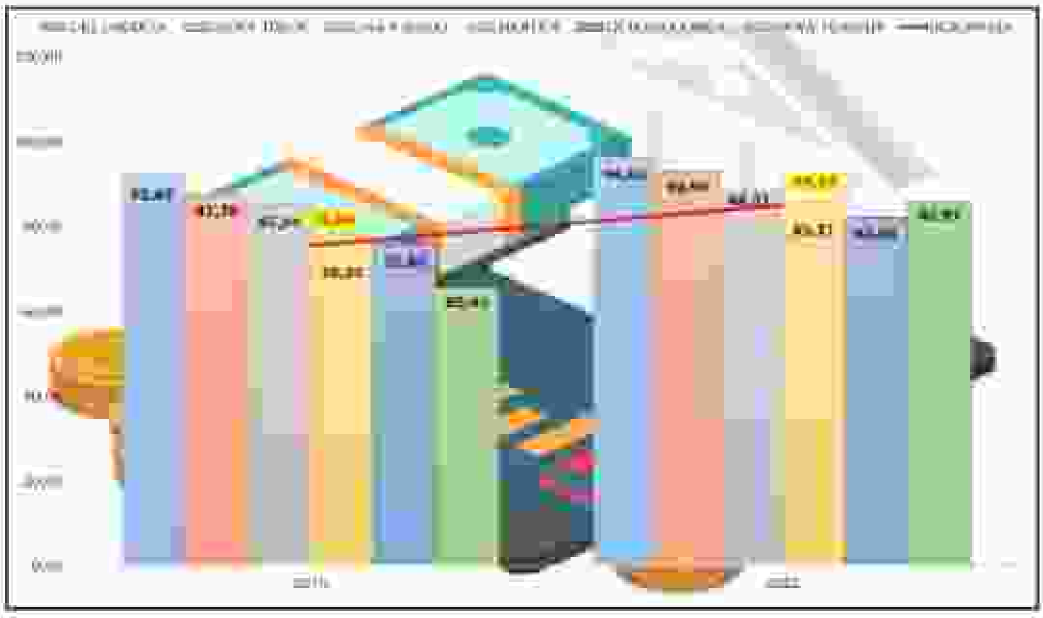

GAMBAR II.58

PERBANDINGAN INDEKS INKLUSI KEUANGAN KONVENSIONAL DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2019 DAN 2022

(Sumber: BPS, 2023, Diolah Oleh Penyusun)

Sebagaimana data yang ada masih diperlukannya peningkatan indeks inklusi keuangan di Banten melalui kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki akses layanan keuangan formal (perbankan), asuransi, dan investasi serta perlunya meningkatkan program edukasi tentang layanan keuangan digital untuk mendorong adopsi perbankan dan *fintech*, kampanye literasi keuangan bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak kalah penting melalui penguatan kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Industri Keuangan.

Banten telah menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam inklusi keuangan, dengan kenaikan sebesar 7,44 poin dalam tiga tahun terakhir. Namun, pertumbuhan ini masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi seperti Jawa Tengah. Untuk terus meningkatkan indeks inklusi keuangan, perlu ada fokus pada perluasan akses ke daerah terpencil, penguatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital dan *fintech*.

2.1.3.3 PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

A. INDEKS EKONOMI HIJAU

Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Indeks ekonomi hijau atau *Green Economy Index* (GEI) adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan Bappenas.

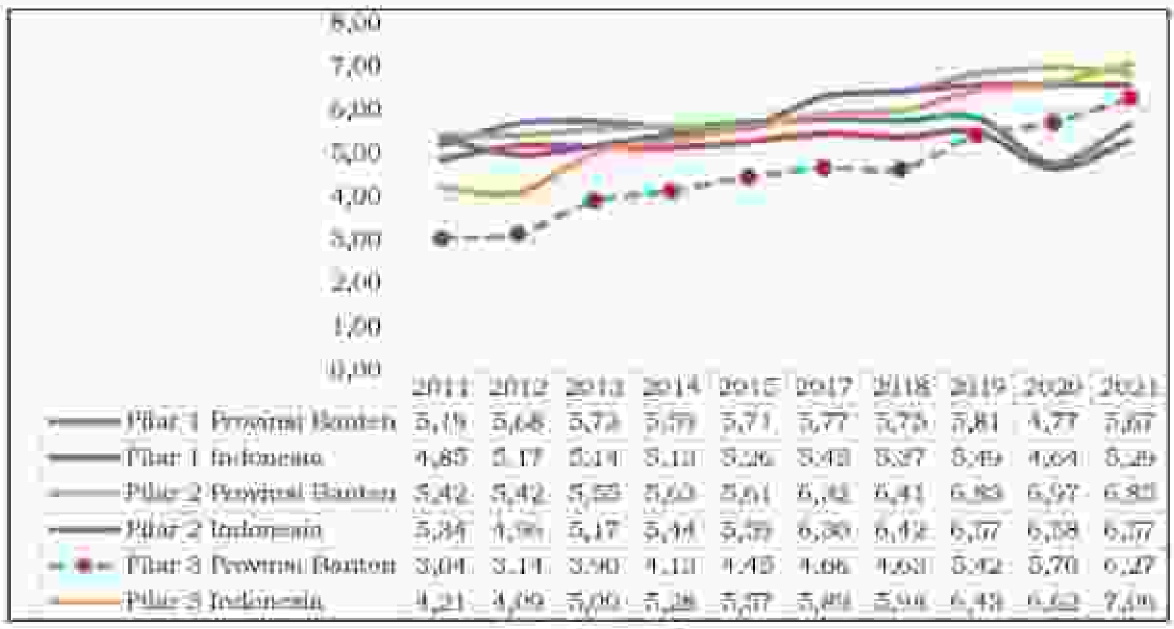

	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Pilar 1 Provinsi Banten	5,15	5,68	5,73	5,59	5,71	5,77	5,75	5,81	4,77	5,67
Pilar 1 Indonesia	4,85	5,17	5,14	5,11	5,26	5,43	5,37	5,49	4,64	5,29
Pilar 2 Provinsi Banten	5,42	5,42	5,53	5,63	5,61	6,32	6,41	6,83	6,97	6,85
Pilar 2 Indonesia	5,34	4,98	5,17	5,44	5,59	6,30	6,42	6,77	6,58	6,57
Pilar 3 Provinsi Banten	3,04	3,14	3,90	4,13	4,45	4,66	4,63	5,32	5,70	6,27
Pilar 3 Indonesia	4,21	4,09	5,00	5,28	5,57	5,84	5,94	6,43	6,62	7,06

GAMBAR II.59

INDEKS EKONOMI HIJAU DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2021

(Sumber: Bappenas, 2021, Diolah Oleh Bappeda)

Hasil pengukuran tiga Indeks menunjukkan Provinsi Banten memperoleh nilai di bawah rata-rata nasional untuk nilai GGI (41,83). Posisi tersebut mencerminkan kapasitas dan kesiapan Banten yang masih cenderung rendah dalam penerapan Ekonomi Hijau, terutama pada aspek yang berkaitan langsung dengan ekologi. Hal ini terjadi akibat kegiatan penunjang ekonomi yakni industri tidak diawasi secara ketat dan menimbulkan isu strategis berupa pencemaran udara yang berdampak tidak hanya dalam ranah regional tapi juga hingga Jakarta.

B. INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA

Ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan lapangan kerja, serta kesehatan ekosistem laut. Pendekatan ekonomi biru bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan yang tepat dan mengelola kepentingan yang saling bersaing dalam ruang laut tanpa menempatkan prioritas ekonomi dalam persaingan dengan kebutuhan ekologis atau sosial. Ekonomi biru menjadi salah satu strategi untuk mencapai Visi Indonesia 2045 dan Target SDGs.

Indonesia Blue Economy Index (IBEI) adalah sebuah indikator komposit yang menunjukkan penguasaan dan perkembangan sektor ekonomi biru di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 pilar, 11 sub pilar, dan 44 indikator.

Pilar tersebut antara lain: lingkungan, ekonomi dan sosial dengan 2 (dua) *enabler* yaitu: teknologi dan tata kelola. Pada Tahun 2023 dan 2024 nilai IBEI Provinsi Banten berturut-turut adalah sebesar 30,90 dan 29,05, namun diperkirakan potensi pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Banten kedepannya sangat besar antara lain:

a. Pilar lingkungan

Kualitas sumber daya dan konservasi laut di Provinsi Banten didukung kawasan yang berkualitas baik, yaitu: kawasan terumbu karang berkualitas baik sebesar 50 persen, kawasan lamun berkualitas baik sebesar 90 persen, dan kawasan hutan mangrove berkualitas baik sebesar 49,80 persen. Penanaman/rehabilitasi hutan mangrove, rawa, dan lahan gambut sebesar 24 Ha dan luas kawasan konservasi perairan sebesar 99,94 Ha.

b. Pilar ekonomi

Sub pilar perikanan didukung data perikanan tangkap laut 66.720,40 ton dengan nilai produksi 2.279,374.745 (dalam Ribu Rupiah), perikanan tangkap Perairan Darat dengan volume produksi 1.157.15 dengan nilai produksi 26.489.044 (dalam ribu rupiah), volume produksi budidaya laut senilai 821,22 ton, budidaya tambak 69.324,41 ton, budidaya tawar 27.545,88 ton dan budidaya rumput laut 13.742,62 ton. Peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2023 sebesar 0,28 persen, dengan rincian berpotensi meningkat dengan adanya peningkatan produksi akuakultur, budidaya tambak, perikanan, budidaya rumput laut, ekspor ikan olahan, dan garam.

Sub pilar industri berbasis kelautan, semakin besar dengan ketersediaan jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebesar 13.219 unit.

Sub pilar perdagangan, transport dan logistik, volume ekspor perikanan dan akuakultur Tahun 2023 mencapai 36.366,19 ton, dengan peran ekspor produk perikanan terhadap total ekspor sebesar 0,30 persen.

Sub pilar pariwisata berbasis kelautan didukung jumlah wisata bahari sebanyak 125 titik destinasi.

c. Pilar sosial

Pada pilar sosial yang ada di Provinsi Banten yaitu lebih kurang terdapat sejumlah 1.111 orang perempuan yang berkaitan erat pada sektor perikanan dan jumlah nelayan dan pembudidaya di Provinsi Banten mencapai 67.988 orang.

d. Enabler: teknologi dan tata kelola

Kondisi IBEI pada komponen penggerak (*enabler*) di Provinsi Banten memiliki kondisi berupa terdapat kapal perikanan tangkap laut-kapal motor dengan kapasitas lebih dari 30 GT sebanyak 481 unit dengan jumlah pelabuhan perikanan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebanyak 20 pelabuhan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel II.45
LOKASI PELABUHAN PERIKANAN DI PROVINSI BANTEN

NO	KODE PELABUHAN PERIKANAN	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	LOKASI PELABUHAN PERIKANAN		POSISI PELABUHAN PERIKANAN (PESISIR/SUNGAI)
			KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	
1	712.36.01	TANJUNG PASIR	KAB. TANGERANG	TELUK NAGA	PESISIR
2	712.36.02	CITUIS	KAB. TANGERANG	PAKUHAJI	PESISIR
3	712.36.03	KRONJO	KAB. TANGERANG	KRONJO	PESISIR
4	712.36.04	LONTAR	KAB. SERANG	TIRTAYASA	PESISIR
5	712.36.05	KARANGANTU	KAB. SERANG	KASEMEN	SUNGAI
6	712.36.06	TERATE	KAB. SERANG	KRAMATWATU	SUNGAI
7	712.36.07	WELAS	KAB. SERANG	BOJONEGARA	PESISIR
8	712.36.08	PULOKALI	KAB. SERANG	PULO AMPEL	PESISIR
9	572.36.09	ANYER	KAB. SERANG	ANYER	PESISIR
10	572.36.10	PASAURAN	KAB. SERANG	CINANGKA	SUNGAI
11	572.36.11	SUKANEGARA	KAB. PANDEGLANG	CARITA	SUNGAI
12	572.36.12	LABUAN	KAB. PANDEGLANG	LABUAN	PESISIR
13	572.36.13	SIDAMUKTI	KAB. PANDEGLANG	SUKARESMI	SUNGAI
14	572.36.14	PANIMBANG	KAB. PANDEGLANG	PANIMBANG	SUNGAI
15	572.36.15	SUMUR	KAB. PANDEGLANG	SUMUR	PESISIR
16	572.36.16	TAMANJAYA	KAB. PANDEGLANG	SUMUR	SUNGAI
17	573.36.17	CIKEUSIK	KAB. PANDEGLANG	CIKEUSIK	SUNGAI
18	573.36.18	BINUANGEUN	KAB. LEBAK	WANASALAM	SUNGAI
19	573.36.19	BANTEN SELATAN	KAB. PANDEGLANG DAN LEBAK	CIKEUSIK DAN WANASALAM	PESISIR
20	573.36.20	CIREUNDEU	KAB. LEBAK	CILOGRANG	PESISIR

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024 (Diolah Oleh Bappeda)

C. INTENSITAS ENERGI PRIMER

Intensitas energi primer nasional dan Provinsi Banten menunjukkan dinamika yang berbeda dari Tahun 2021 hingga 2023. Pada tingkat nasional, intensitas energi primer mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan kenaikan pada Tahun 2022 mencapai 160,50 BOE/Milyar Rp, sebelum kembali menurun pada Tahun 2023 menjadi 132,60 BOE/Miliar Rp. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam mengelola efisiensi energi di tengah pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur industri. Di sisi lain, Provinsi Banten menunjukkan stabilitas dengan intensitas energi primer yang relatif konsisten di sekitar 34 TOE/Miliar Rp, meskipun ada sedikit peningkatan pada Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Banten mungkin telah mencapai tingkat efisiensi energi yang lebih stabil, namun tetap harus waspada terhadap kenaikan yang terjadi.

Ke depan, tantangan utama yang dihadapi baik pada tingkat nasional maupun regional adalah bagaimana mempertahankan dan bahkan meningkatkan efisiensi energi seiring dengan kebutuhan energi yang terus meningkat. Bagi Indonesia secara keseluruhan, penurunan intensitas energi primer pada Tahun 2023 merupakan sinyal positif, tetapi perlu diwaspadai bahwa ketergantungan pada energi fosil dan fluktuasi ekonomi dapat kembali meningkatkan intensitas energi di masa depan. Di Provinsi Banten, meskipun stabilitas ini menunjukkan kemajuan, pemerintah daerah perlu terus mendorong penerapan teknologi energi yang lebih efisien dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta industri tentang pentingnya pengelolaan energi yang berkelanjutan.

D. PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI PRIMER

Hasil perhitungan BED 2022 untuk realisasi EBT mencapai 2,39 persen (676,6 ribu TOE) dari target 6,04 persen (999,87 ribu TOE), sedangkan Tahun 2023 sebesar 3,03 persen (0,83 MTOE) dari target 6,71 persen, minyak bumi 13,33 persen (3,65 MTOE), gas bumi 9,33 persen (2,56 MTOE) dan batubara 74,31 persen (20,37 dengan total realisasi pemanfaatan energi sebesar 24,71 MTOE pada Tahun 2023. Kontribusi terbesar dari kenaikan porsi EBT tersebut berasal dari pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) dan kayu bakar. Tingginya pemanfaatan batubara di Provinsi Banten menjadi tantangan tersendiri untuk dapat disubstitusi dengan pemanfaatan EBT.

Pekerjaan Rumah ke depan potensi-potensi EBT dari panas bumi, angin, biomassa, PLTS akan dikembangkan di Tahun 2024 sampai 2025. Tahun 2023 tidak ada pembangunan pembangkit EBT namun saat ini sedang melakukan kajian pemanfaatan langsung panas bumi yang ada di 4 lokasi yaitu di Gunung Karang, Gunung Pulosari, Rawadanau dan Gunung Endut. Selain itu juga dilakukan kegiatan FGD Panas Bumi. Pengembangan potensi panas bumi di Provinsi Banten mengalami penolakan sehingga perlu dilakukan sosialisasi pemanfaatan panas bumi. Kegiatan lainnya di Tahun 2023 adalah menyusun FS PLT Minihidro di Waduk Karyan yang sudah dibangun dan target 2024 EBT di Provinsi Banten akan meningkat. Permasalahan dan tantangan daerah dalam pelaksanaan RUED:

- Keuangan: internalisasi RUED ke RPJM/RPJP sehingga dapat masuk ke skema pembiayaan APBD;
- Teknis: kendala integrasi ke grid listrik (PLTS *on grid*) dan kendala minimnya keteramilan teknis (PLTS *off grid*) serta perlunya peningkatan sosialisasi Perda RUED-P kepada semua pemangku kepentingan;
- Infrastruktur: Target RUED ketenagalistrikan mengikuti target RUPTL PT.PLN (Persero) sehingga realisasinya sangat tergantung pada perencanaan PLN;
- Teknis: kendala integrasi ke grid listrik (PLTS *on grid*) dan kendala minimnya keterampilan teknis (PLTS *off grid*);
- Isu Lingkungan dan Sosial: penolakan sebagian masyarakat dalam pembangunan PLT Panas Bumi.

2.1.3.4 TRANSFORMASI DIGITAL

A. INDEKS TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL (ITDN)

Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) merupakan indikator untuk menilai kemampuan daerah telah sejauh mana dapat bertransformasi dengan perkembangan digital yang ada, pengukuran ITDN sangat bergantung kepada infrastruktur digital, masyarakat dan pemerintah digital serta ekonomi dan ekosistem digital.

Provinsi Banten memiliki Indeks Transformasi Digital sebesar 55,83 pada 2022 atau di atas rata-rata nasional yaitu 49,20. Meskipun seperti pada gambar di bawah ini, Provinsi Banten masih jauh tertinggal dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Berdasarkan data, pilar dengan nilai tertinggi berada pada pilar pemerintahan (64,72), sedangkan pilar dengan skor terendah berada pada pilar ekosistem (42,67). Rekomendasi peningkatan Indeks berupa peningkatan talenta digital berupa pelatihan digital bagi masyarakat tingkat dasar, menengah dan lanjut, peningkatan adopsi digital di sektor manufaktur hingga UMKM, peningkatan jaringan Wi-Fi di titik pusat ruang publik masyarakat serta pemberian bantuan perangkat tablet atau komputer bagi sekolah hingga pelatihan dan peningkatan bagi para ASN SPBE dan pemantapan layanan partisipasi dan aduan masyarakat.

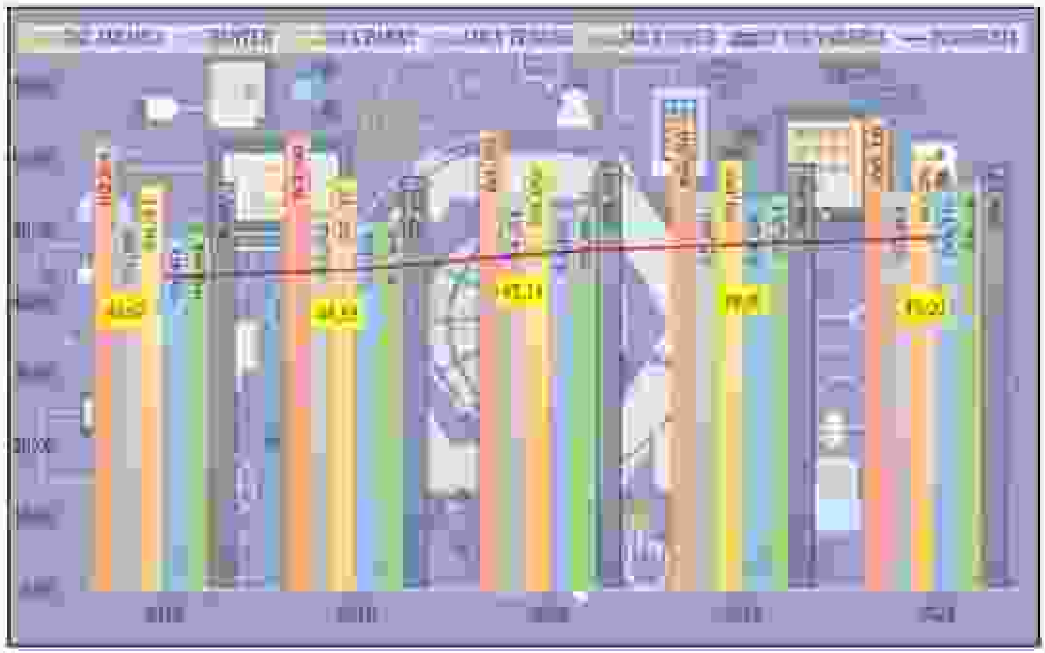

GAMBAR II.60

PERBANDINGAN INDEKS TRANSFORMASI DIGITAL DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2018-2022

(Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2024)

B. INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA (IMDI)

Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Perusahaan modal ventura East Ventures dengan lembaga riset Katadata Insight Center (KIC) dan PricewaterhouseCoopers (PwC) mengeluarkan laporan *East Ventures-Digital Competitiveness Index* (EV-DCI) 2024 untuk mengukur dan memetakan daya saing digital di seluruh wilayah Indonesia.

EV-DCI mengukur daya saing digital wilayah berdasarkan sembilan pilar indikator, yaitu kondisi Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengeluaran TIK, kondisi perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas, ketenagakerjaan, infrastruktur, keuangan, serta regulasi dan kapasitas pemerintah daerah. Hasilnya kemudian dirumuskan dengan sistem skor 0-100, dengan semakin tinggi skor maka mengindikasikan daya saing digital suatu wilayah semakin baik.

Merujuk laporan hasil pengukuran daya saing digital di Tahun 2024, Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi yang berhasil mempertahankan hasil penilaian EV-DCI Tahun 2024 pada posisi 5 (lima) besar dan menjadi daerah yang paling signifikan dalam peningkatan pada segi skor sub-indeks output, dari 42,70 naik menjadi 49,00 yang mana naik sebesar 6,30 poin.

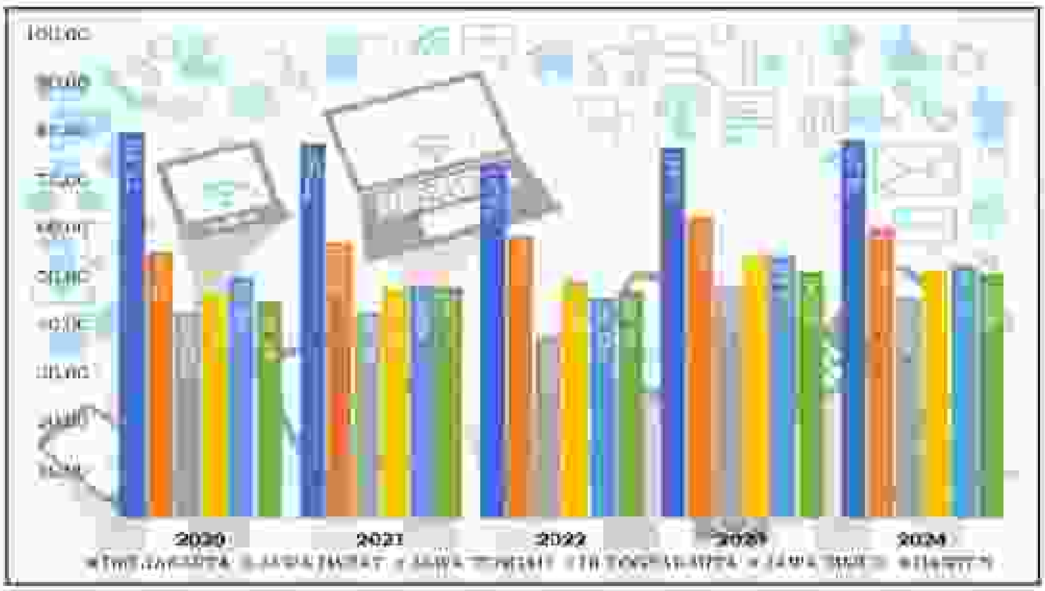

GAMBAR II.61
PERBANDINGAN DAYA SAING DIGITAL DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: Laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

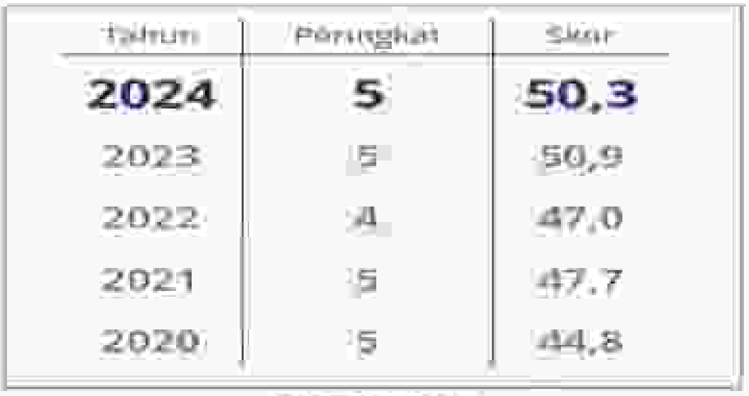

Tahun	Peringkat	Skor
2024	**5**	**50,3**
2023	5	50,9
2022	4	47,0
2021	5	47,7
2020	5	44,8

GAMBAR II.62
PERINGKAT DAYA SAING DIGITAL DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024
(Sumber: Laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Hal ini terjadi akibat meningkatnya pilar perekonomian pada skor indikator pertumbuhan PDRB subsektor pergudangan, penunjang angkutan, pos dan kurir yang meningkat sebesar 29,5 poin menjadi 82,20. Jika dibandingkan Tahun 2023 hal ini terjadi akibat peningkatan 12,5 persen pada PDRB sektor transportasi dan pergudangan dibandingkan sektor lainnya, lebih jauh daripada itu pilar infrastruktur menjadi pilar yang berkontribusi terbesar dalam peningkatan nilai di Provinsi Banten, poinnya pada peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan telepon tetap.

Hal lainnya terkait digital, terdapat pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi RI, yang mana indikator ini untuk mengetahui tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital pada kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI menggunakan perhitungan *Multistage Principal Component Analysis* (PCA) untuk menentukan bobot sub pilar dan pilar pembentuk IMDI.

IMDI terdiri dari beberapa pilar yaitu: 1) pilar infrastruktur dan ekosistem, infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital dengan tujuan bahwa pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital (terbentuk dari 3 (tiga) sub pilar mencakup akses dan adopsi teknologi digital, ekosistem pembelajaran, dan digitalisasi pemerintah); 2) pilar keterampilan digital, suatu rangkaian kemampuan perangkat digital, aplikasi komunikasi dan internet untuk mengakses dan mengelola informasi (terbentuk dari 3 (tiga) sub pilar mencakup komplementaritas, pengenalan TIK, dan keamanan); 3) pilar pemberdayaan, kegiatan yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang menghasilkan pendapatan yang merepresentasikan dengan keterlibatan individu dalam aktivitas digital (tebentuk dari 2 (dua) sub pilar mencakup pengguna/konsumen dan penyedia/penjual); dan 4) pilar pekerjaan, yang berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan guna menciptakan pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru (terdiri dari 2 (dua) sub pilar mencakup permintaan dan penawaran). Hasil pengukuran IMDI sebagaimana pada gambar di bawah.

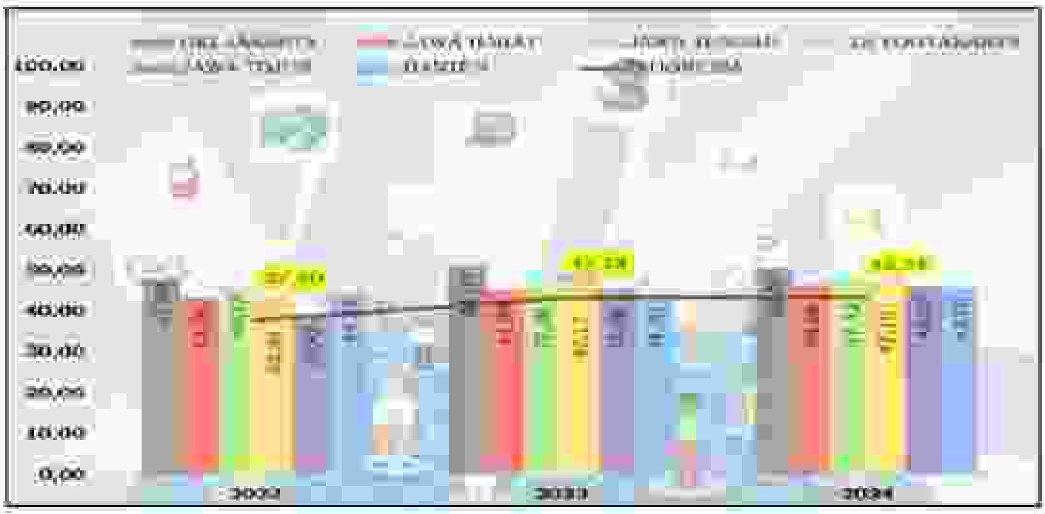

GAMBAR II.63
PERBANDINGAN INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2022-2024

(Sumber: https://imdi.sdmdigital.id/home, 2024. Diakses 13 September 2024. Diolah Oleh Bappeda)

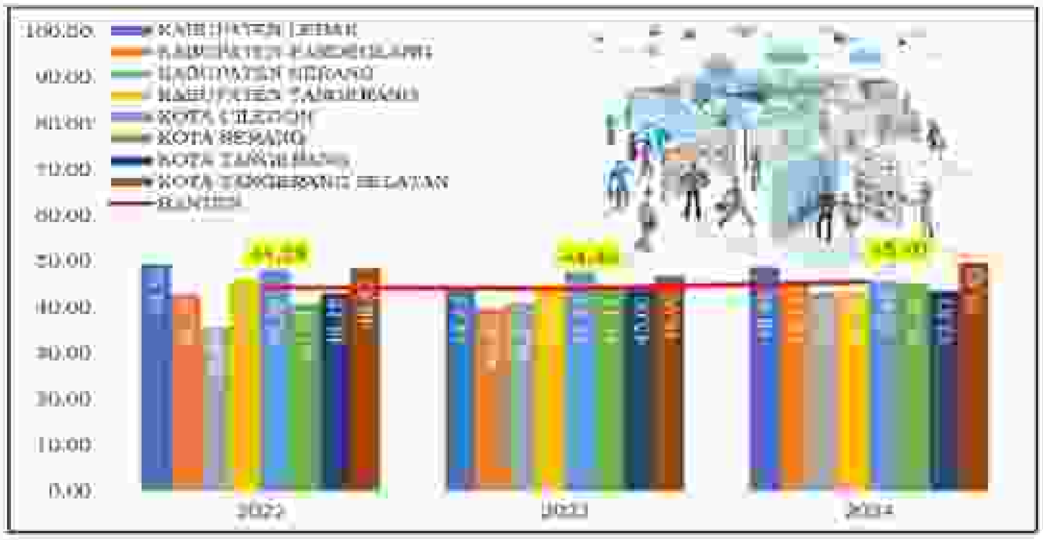

GAMBAR II.64
PERBANDINGAN INDEKS MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2024

(Sumber: https://imdi.sdmdigital.id/home, 2024. Diakses 13 September 2024. Diolah Oleh Bappeda)

Pada gambar di atas diketahui bahwa capaian nilai IMDI di Provinsi Banten masih di bawah capaian dari Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon, sisanya beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dominan di bawah capaian provinsi.

C. INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IPTIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di suatu negara atau wilayah. IP-TIK sering kali mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, penggunaan, dan dampak TIK dalam kehidupan masyarakat serta sektor ekonomi. Indikator ini membantu dalam memahami sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi telah diadopsi dan dimanfaatkan, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk melihat posisi pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) antarprovinsi, nilai IP-TIK dibagi menjadi empat kategori, yaitu tinggi (7,26–10,00), sedang (5,01–7,25), rendah (2,51–5,00) dan sangat rendah (0,00–2,50). Pembangunan TIK Banten menunjukkan perkembangan positif dalam enam tahun terakhir, termasuk Provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK sedang selama kurun waktu enam tahun berturut-turut dan berada diatas nilai nasional. Pada tahun 2018, nilai Indeks Pembangunan TIK tercatat sebesar 5,8 (skala 1-10) dan terus meningkat hingga Tahun 2023 dengan nilai mencapai 6,38. Dari ketiga subindeks, pertumbuhan paling pesat terjadi pada subindeks penggunaan TIK yaitu tumbuh sebesar 1,56 persen. Adapun subindeks keahlian TIK tumbuh sebesar 0,67 persen serta subindeks akses dan infrastruktur TIK tumbuh sebesar 0,17 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan pembangunan TIK Banten dari Tahun 2019 ke Tahun 2023 didorong oleh penggunaan TIK yang semakin tinggi oleh masyarakat.

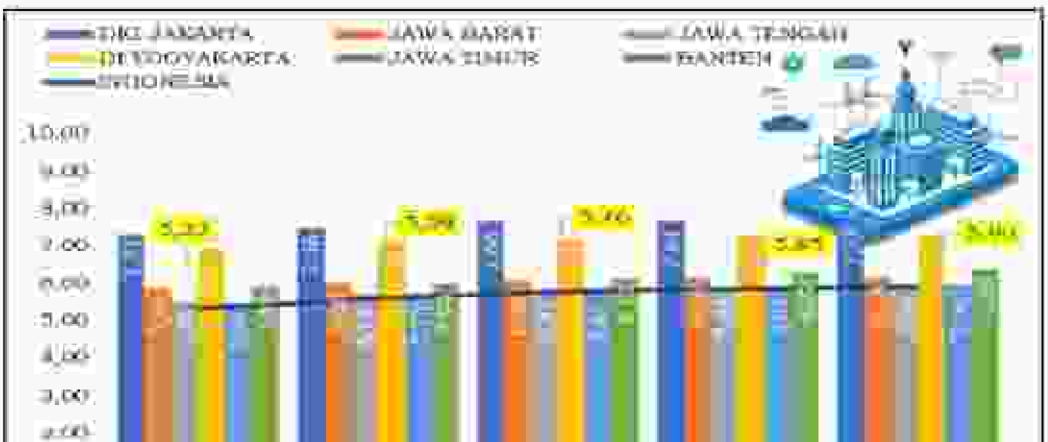

GAMBAR II.65

PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2019-2023

(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Persentase individu yang menggunakan internet (penetrasi internet) semakin meningkat dari waktu ke waktu, yaitu dari 66,48 persen pada Tahun 2022, menjadi 69,21 persen pada Tahun 2023. Peningkatan penetrasi internet didorong oleh kebutuhan mengakses informasi dengan cepat dan mudah serta ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan jangkauan internet semakin luas. Indeks Pembangunan TIK provinsi mengalami peningkatan dari Tahun 2022 ke 2023 yang menggambarkan adanya perbaikan pembangunan TIK pada provinsi-provinsi di Indonesia. Dari 6 provinsi di Pulau Jawa, hanya Jawa Barat yang mengalami penurunan Indeks Pembangunan TIK pada Tahun 2023, sebesar 0,01.

2.1.3.5 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A. INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR

Pada Tahun 2024 Indeks Daya Saing Infrastruktur Banten mencapai kategori tinggi, berarti bahwa infrastruktur di Provinsi Banten dianggap kompetitif dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa makna dari indeks yang tinggi:

1. Kualitas transportasi yang baik
   Jaringan jalan raya, tol, pelabuhan, dan bandara di Banten cukup baik dan mampu mendukung mobilitas penduduk serta distribusi barang dengan efisien. Akses ke kawasan industri dan pelabuhan (seperti Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Cilegon) berjalan lancar, mempercepat arus logistik.
2. Akses energi yang memadai
   Pasokan listrik yang stabil untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Penggunaan energi terbarukan atau efisiensi energi semakin meningkat.
3. Infrastruktur digital yang maju
   Akses internet cepat dan merata, mendukung ekonomi digital dan industri 4.0. Penetrasi telekomunikasi yang luas, termasuk jaringan fiber optik dan seluler.
4. Air bersih dan sanitasi yang baik
   Akses masyarakat terhadap air bersih dan sistem sanitasi meningkat. Pengelolaan sumber daya air yang lebih baik untuk kebutuhan industri dan pertanian.
5. Daya tarik investasi yang tinggi
   Infrastruktur yang baik membuat Banten lebih menarik bagi investor, terutama di sektor manufaktur, logistik, dan properti. Kemudahan dalam berbisnis karena fasilitas infrastruktur mendukung operasional perusahaan.

Secara keseluruhan, indeks daya saing infrastruktur yang tinggi di Banten mencerminkan kesiapan wilayah tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. INDEKS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR

Indeks penyediaan infrastruktur layanan dasar adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam suatu wilayah, seperti air bersih, sanitasi, listrik, jalan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pengukuran dilakukan untuk menilai sejauh mana infrastruktur yang disediakan tersebut tersedia dan berfungsi dengan baik dalam mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat, dimana semakin tinggi capaian pengukuran menandakan telah baiknya kondisi infrastruktur dasar di suatu wilayah.

Kebijakan penyediaan infrastruktur layanan dasar untuk perumahan dan permukiman meliputi layanan air minum layak, sanitasi layak, serta penyediaan perumahan layak huni. Indikator pencapaian air minum layak adalah persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak, indikator pencapaian sanitasi layak adalah persentase penduduk berakses sanitasi dan indikator pencapaian penyediaan rumah layak huni adalah persentase penduduk dengan hunian layak. Capaian penyediaan infrastruktur layanan dasar diperoleh melalui perhitungan rerata persentase penduduk yang memiliki akses rumah layak huni, sanitasi layak, dan air minum layak.

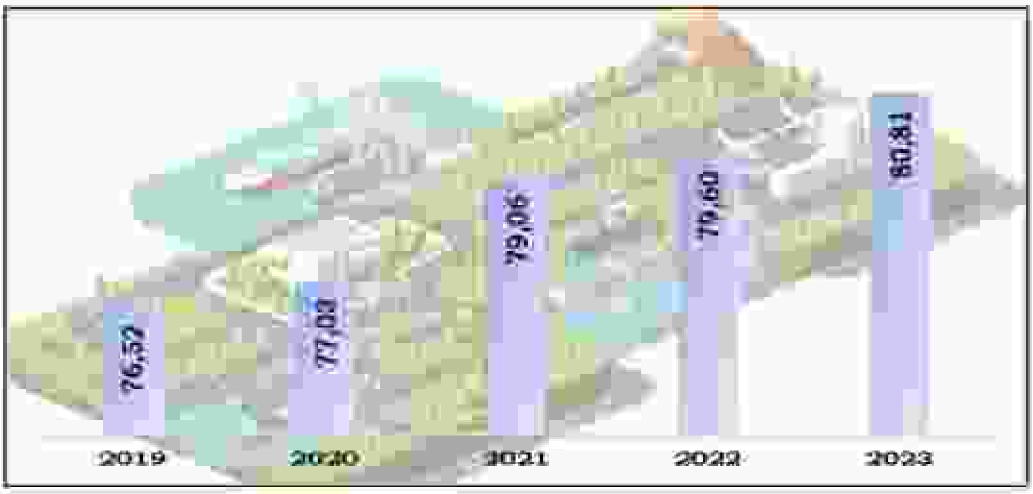

GAMBAR II.66
INDEKS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 (Diolah Oleh Bappeda)

Secara umum penyediaan infrastruktur layanan dasar di Provinsi Banten mengalami peningkatan di setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam gambar berikut, hingga pada Tahun 2023 capaian penyediaan infrastruktur layanan dasar mencapai 80,81 persen. Sementara itu capaian proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar di Provinsi Banten dengan wilayah lainnya sejak Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.

TABEL II.46
PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR MENURUT WILAYAH TAHUN 2019-2023

ASPEK		WILAYAH						
		DKI JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	DI YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BANTEN	INDONESIA
AKSES PADA LAYANAN AIR MINUM	2019	27,48	39,30	56,78	58,91	52,38	34,42	42,84
	2020	24,94	38,54	50,89	61,92	52,41	33,75	42,31
	2021	24,11	40,64	55,41	65,03	52,50	35,00	43,61
	2022	30,28	39,04	54,31	71,88	54,27	37,04	44,04
	2023	25,65	40,74	53,88	68,16	53,04	37,60	44,95
AKSES PADA LAYANAN SANITASI DASAR	2019	92,89	69,64	80,29	94,57	78,78	81,01	77,39
	2020	93,18	71,48	83,18	96,06	80,58	82,05	79,53
	2021	95,17	71,60	83,38	97,13	80,97	82,89	80,26
	2022	92,78	74,82	84,37	96,21	81,15	85,12	80,92
	2023	93,50	74,86	85,21	96,45	81,79	86,47	82,36
AKSES PADA FASILITAS KESEHATAN DASAR	2019	73,18	76,82	81,22	80,88	77,08	74,19	76,07
	2020	76,80	77,10	84,42	88,64	79,26	78,26	78,01
	2021	79,52	79,49	85,81	87,24	81,88	80,27	79,59
	2022	78,15	78,86	86,65	90,06	81,15	80,54	79,30
	2023	76,80	83,00	86,15	89,25	83,37	82,79	80,13

Sumber: BPS, 2024 (Diolah Tim Bappeda)

C. RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita (*sufficient living space*);
- Memiliki akses terhadap air minum layak;
- Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
- Ketahanan bangunan (*durable housing*).

Pada gambar di bawah merupakan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, dimana pada Provinsi Banten mengalami kenaikan dari nilai sebesar 56,92 persen pada Tahun 2019 menjadi sebesar 64,94 persen pada Tahun 2024. Namun, pertumbuhan ini tergolong lambat dan tidak konsisten, misalnya penurunan di Tahun 2020 (sebesar 56,21 persen) sebelum meningkat lagi di 2021 (sebesar 60,78 persen). Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, Provinsi Banten selalu berada sedikit di atas angka nasional tetapi masih tertinggal dari beberapa provinsi lainnya.

Lebih jauh daripada itu di Provinsi Banten mengalami kenaikan 8,02 persen dari 2019-2024, tertinggi di antara provinsi lain kecuali Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun, Banten masih di bawah Jawa Tengah (71,76 persen) dan Jawa Timur (73,4 persen) pada 2024. DI Yogyakarta tetap menjadi provinsi dengan persentase tertinggi (86,68 persen), meskipun peningkatannya hanya 5,07 persen dalam lima tahun. Faktor yang mempengaruhi:

- Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, Banten mengalami urbanisasi cepat, menyebabkan tekanan terhadap akses hunian layak;
- Ketersediaan lahan dan infrastruktur, infrastruktur perumahan di Banten masih berkembang dibandingkan Jawa Tengah atau DI Yogyakarta yang sudah lebih mapan;

- Program pemerintah. Banten memerlukan kebijakan lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain.

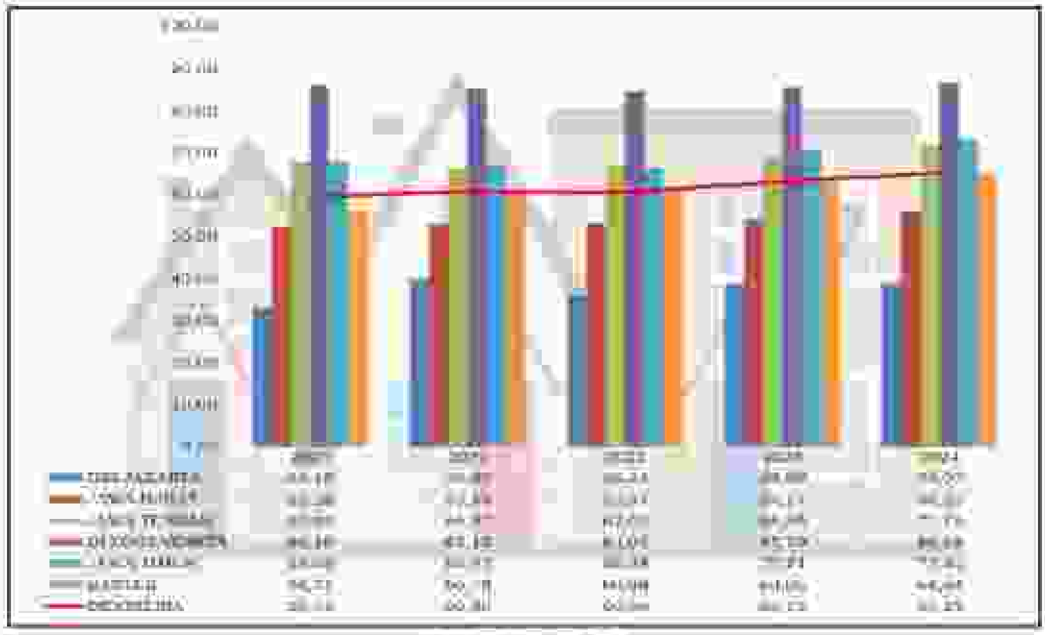

GAMBAR II.67

PERSENTASE RT YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP HUNIAN YANG LAYAK DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS, 2025, Diolah Oleh Bappeda)

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan hunian layak mencakup:

a. Peningkatan infrastruktur permukiman
  - Mempercepat pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
  - Meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di kawasan permukiman.

b. Program bantuan dan subsidi hunian
  - Memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah;
  - Memberikan insentif bagi pengembang yang membangun perumahan terjangkau.

c. Reformasi tata ruang dan regulasi
  - Mencegah alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan industri tanpa mempertimbangkan perumahan;
  - Meningkatkan regulasi untuk memastikan hunian layak sesuai standar lingkungan.

d. Penguatan peran Swasta dan PPP (*Public-Private Partnership*)
  - Mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan rumah terjangkau dengan kemudahan izin;
  - Mengembangkan proyek kerja sama antara pemerintah, swasta, dan komunitas untuk penyediaan hunian layak.

e. Sosialisasi dan edukasi masyarakat
  - Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan untuk memiliki rumah layak;

- Memberikan edukasi tentang pemanfaatan program subsidi perumahan.

Banten mengalami peningkatan signifikan dalam akses hunian layak, tetapi masih tertinggal dari beberapa provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mencapai target yang lebih baik, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam infrastruktur, subsidi, regulasi, dan kerja sama dengan pihak swasta.

D. PROPORSI KONTRIBUSI PDRB WILAYAH METROPOLITAN (WM) TERHADAP NASIONAL

Proporsi kontribusi PDRB wilayah Metropolitan (MW) merupakan suatu pendekatan untuk dapat menilai sejauhmana peran strategis kawasan metropolitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui investasi infrastruktur dan pengembangan kawasan perkotaan yang lebih efisien.

Wilayah Metropolitan di Provinsi Banten berada di wilayah Tangerang Raya, mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang termasuk dalam delinasi Metropolitan Jakarta yang berkontribusi besar terhadap ekonomi provinsi dan nasional pada sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa, untuk jelasnya terhadap proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan dapat dilihat pada gambar di bawah.

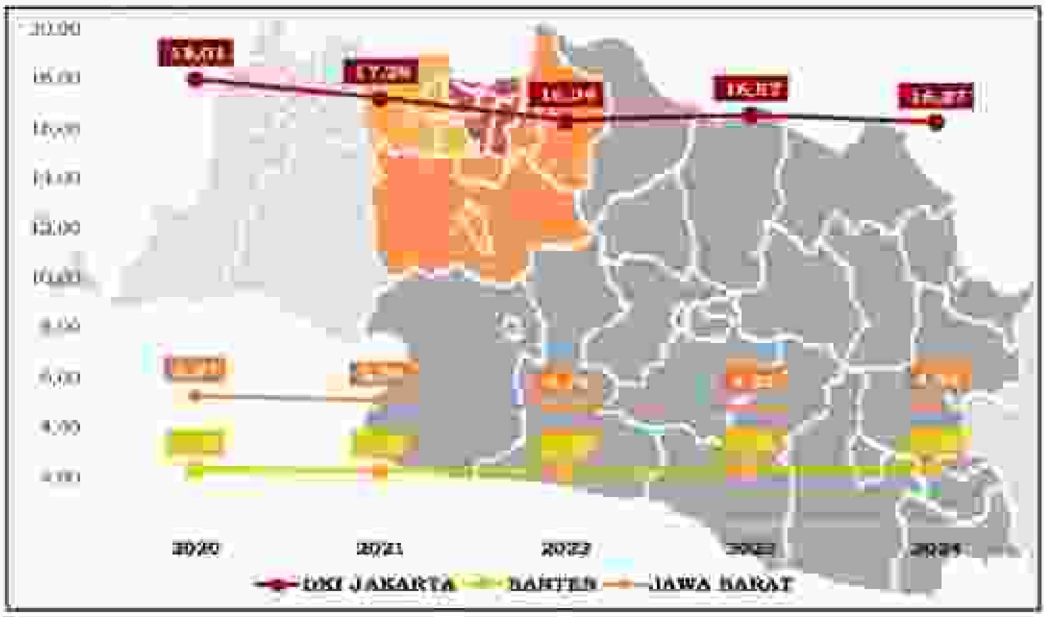

GAMBAR II.68

PROPORSI KONTRIBUSI PDRB WILAYAH METROPOLITAN (WM) DI PROVINSI BANTEN TERHADAP NASIONAL (PERSEN) TAHUN 2020-2024

(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024 Diolah Oleh Bappeda)

Adanya penurunan kontribusi PDRB wilayah metropolitan di Provinsi Banten sehingga masih adanya tantangan yang perlu dibenahi mencakup:

- Diversifikasi sektor ekonomi: perlunya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru (misal: industri digital, ekonomi hijau) untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional (seperti manufaktur dan industri berat);

- Peningkatan investasi: permudah perizinan dan insentif investasi di sektor produktif agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di banten;
- Penguatan infrastruktur: fokus pada pengembangan infrastruktur strategis: jalan, pelabuhan, transportasi massal untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di banten dan dengan wilayah nasional;
- Peningkatan sdm lokal: investasi dalam pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan teknologi agar tenaga kerja banten mampu mendukung pertumbuhan sektor-sektor baru;
- Perencanaan wilayah metropolitan: kembangkan integrasi kawasan metropolitan di banten dengan pusat-pusat ekonomi nasional seperti jakarta, untuk menangkap efek *spillover* pertumbuhan.

E. INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa dalam berbagai multi aspek pembangunan, pengukuran ini mencakup terhadap dimensi utama seperti ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi.

Untuk mengukur tingkat kemajuan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai tahun 2014 melakukan Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam penelitian ini data awal yang digunakan adalah data IDM mulai tahun 2018 yang merupakan hasil pendataan mandiri oleh Kementerian PPDT. Jumlah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal di Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami penurunan. Pertumbuhan desa mandiri di wilayah Provinsi Banten sangatlah lambat, namun meningkat cepat pada tahun 2023. Selain itu, masih banyak Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal, capaian nilai IDM Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 0,6626 menempatkan Provinsi ini pada peringkat 23 dari 33 Provinsi yang dilakukan penilaian. Hal ini menunjukkan capaian IDM Provinsi Banten berada di bawah rata-rata nasional dan terendah diantara Provinsi lainnya di Pulau Jawa, selengkapnya pada gambar di bawah.

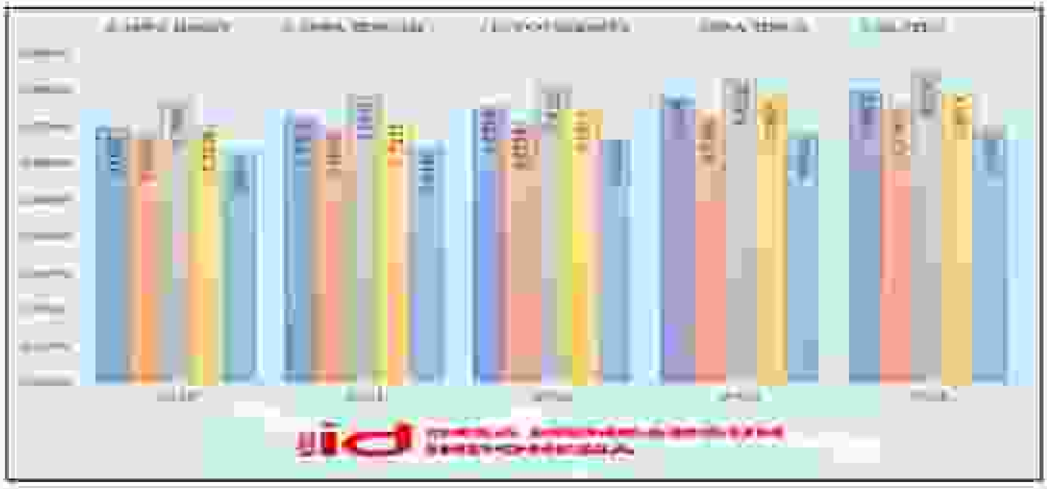

GAMBAR II.69
PERBANDINGAN INDEKS DESA MEMBANGUN DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber, Kemendes PDTT, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Lebih lanjut dapat dievaluasi terhadap capaian sebagaimana gambar di atas, bahwa untuk mempercepat perkembangan Desa Mandiri di Banten, perlu dilakukan beberapa langkah peningkatan seperti: 1) infrastruktur (mempercepat pembangunan jalan desa, listrik, dan akses internet, optimalisasi program desa digital untuk meningkatkan konektivitas dan peluang usaha); 2) penguatan SDM (pelatihan keterampilan digital dan wirausaha bagi masyarakat desa, beasiswa dan program vokasi bagi generasi muda desa); 3) diversifikasi ekonomi desa (pengembangan agrowisata, desa wisata, dan UMKM berbasis digital, pemanfaatan teknologi pertanian (*smart farming*) untuk meningkatkan hasil panen); 4) kemudahan akses modal penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai motor ekonomi desa; 5) Kemitraan dengan perbankan dan *fintech* untuk mempermudah kredit usaha); 6) serta reformasi birokrasi dan kebijakan desa (penyederhanaan regulasi agar program desa mandiri lebih cepat terealisasi, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa).

2.1.3.6 STABILITAS EKONOMI MAKRO

A. RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (persen) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

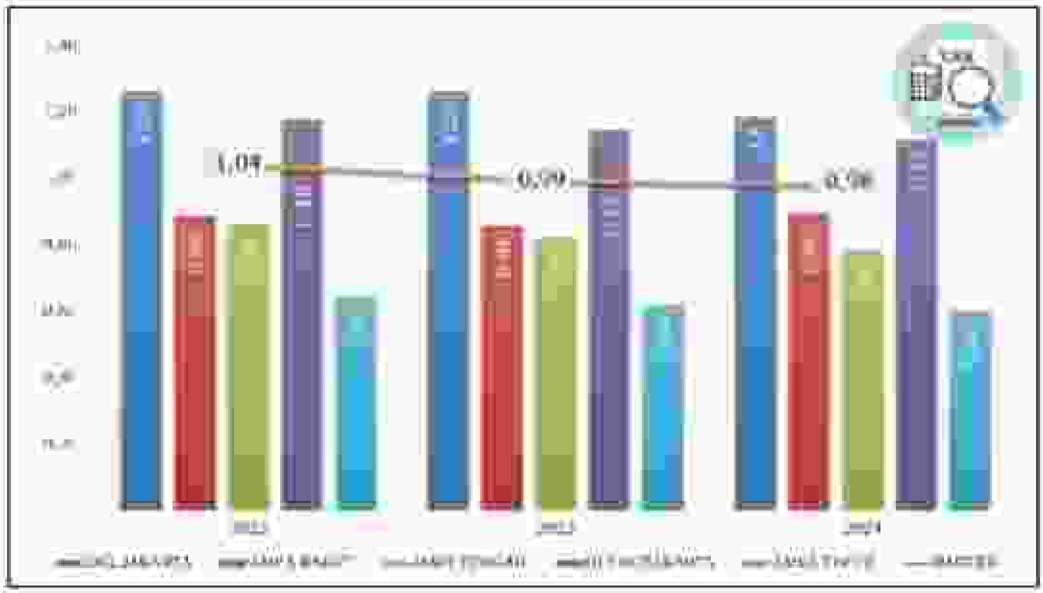

GAMBAR II.70
PERBANDINGAN RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2022-2024
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

Banten memiliki rasio pajak daerah terhadap PDRB tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan DI yogyakarta dari Tahun pada 2022-2024.

Penurunan di Banten lebih besar dibanding provinsi lain kecuali Jawa Tengah. DKI Jakarta satu-satunya provinsi yang stabil, menandakan kontribusi pajak terhadap PDRB yang kuat dan stabil. Banten tetap memiliki rasio pajak daerah terhadap PDRB yang relatif tinggi dibanding Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, yang mungkin mencerminkan adanya perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak atau peningkatan PDRB yang lebih cepat dibanding pertumbuhan pajak.

DKI Jakarta tetap dominan dalam rasio pajak terhadap PDRB, menunjukkan stabilitas ekonomi dan sistem perpajakannya yang lebih kuat dibanding provinsi lain di Jawa. Strategi peningkatan kepatuhan pajak dan pengelolaan insentif bisa menjadi kunci untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah. Penurunan rasio pajak terhadap PDRB di Banten kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi perlambatan industri, insentif pajak, perubahan kepatuhan pajak, dan pergeseran struktur ekonomi, dengan faktor penyebab sebagai berikut:

- Penurunan aktivitas ekonomi dan industri
  Banten memiliki banyak kawasan industri besar, seperti di Tangerang, Cilegon, dan Serang. Jika ada perlambatan ekonomi atau penurunan produksi di sektor industri manufaktur, pendapatan pajak bisa menurun. Sektor manufaktur di Banten menyumbang PDRB besar, tetapi jika pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibanding pertumbuhan pajak, rasio pajak terhadap PDRB akan turun.
- Dampak investasi dan insentif pajak
  Adanya insentif pajak untuk industri tertentu (misalnya keringanan pajak bagi perusahaan baru atau sektor tertentu) bisa mengurangi penerimaan pajak daerah. Perusahaan besar mungkin mendapatkan fasilitas *tax holiday* atau pengurangan pajak untuk mendorong investasi jangka panjang.
- Perubahan dalam kepatuhan pajak
  Kemungkinan terjadi penurunan kepatuhan pajak dari perusahaan dan individu, misalnya akibat kondisi ekonomi yang lebih sulit, sehingga pembayaran pajak tertunda atau berkurang. Jika pengawasan dan penegakan pajak kurang efektif, bisa menyebabkan kebocoran penerimaan pajak daerah.
- Pergeseran struktur ekonomi
  Jika terjadi pergeseran dari sektor formal ke sektor informal, maka pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah juga berkurang. Sektor informal sulit dikenakan pajak, sementara sektor ini bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor formal.
- perubahan kebijakan pajak Daerah dan Nasional
  Jika ada kebijakan pajak yang mengurangi beban pajak bagi pelaku usaha atau masyarakat, misalnya melalui pemangkasan tarif pajak daerah tertentu, maka rasio pajak terhadap PDRB bisa turun. Reformasi perpajakan nasional yang mempengaruhi distribusi pajak dari pusat ke daerah juga bisa berdampak pada penerimaan pajak di Banten.

2.1.3.7 TINGKAT INFLASI

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kecenderungan peningkatan harga barang dan jasa serta berpengaruh pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan tingkat inflasi umum Provinsi Banten dengan tingkat inflasi nasional. Berdasarkan grafik tersebut bahwa inflasi di Provinsi Banten secara umum lebih tinggi dari inflasi nasional dalam lima tahun terakhir kecuali pada Tahun 2021 dan 2022 sedikit lebih rendah dari inflasi nasional. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan inflasi umum nasional termasuk di Provinsi Banten.

Laju inflasi Provinsi Banten mengalami pertumbuhan fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun Banten menjadi salah satu provinsi dengan nilai inflasi terendah skala nasional, nilai inflasi Provinsi Banten selalu lebih tinggi dari nilai inflasi Nasional kecuali pada Tahun 2021 dan 2022. Adapun pada Tahun 2022 inflasi mengalami peningkatan drastis yang diakibatkan oleh tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi. Kondisi ini menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang memiliki penghasilan tetap dikarenakan harga-harga bahan pokok melonjak drastis. Penurunan laju inflasi di Tahun 2023 terjadi karena terdapat upaya pengendalian inflasi oleh Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Banten dinilai perlu memperhatikan ketersediaan bahan pokok dan harga bahan pokok di pasar, melakukan koordinasi penyediaan bahan pokok bersama wilayah penghasil komoditas, melaksanakan pembangunan daerah, dan memberikan bantuan transportasi melalui anggaran APBD.

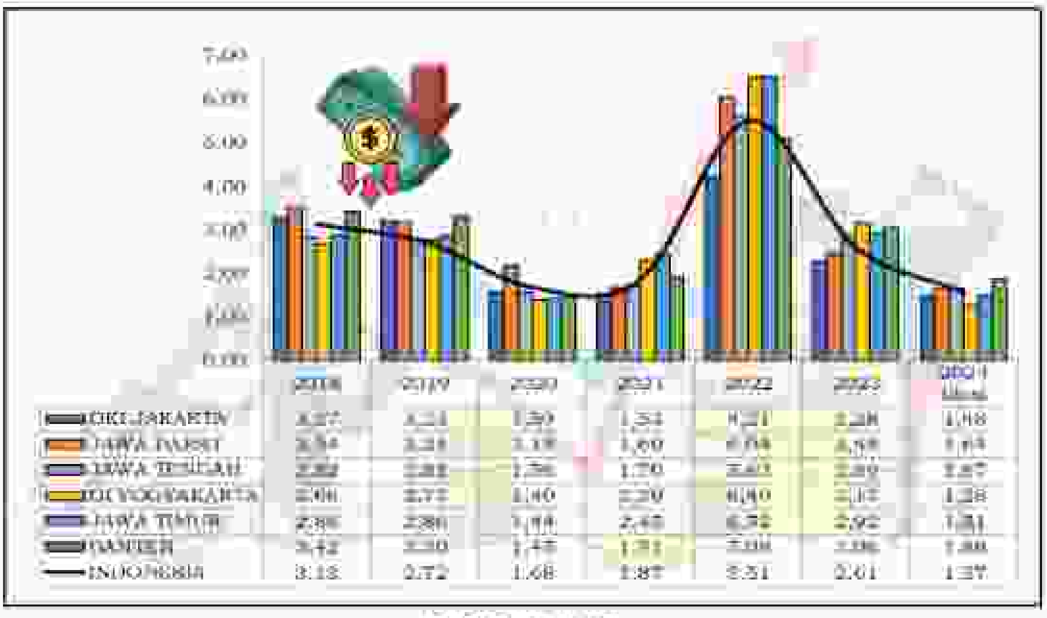

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DKI JAKARTA	3.27	3.23	1.59	1.53	6.21	2.28	1.68
JAWA BARAT	3.54	3.21	1.17	1.69	6.04	2.58	1.63
JAWA TENGAH	2.82	2.81	1.56	1.70	5.63	2.89	1.57
DI YOGYAKARTA	2.66	2.77	1.40	2.29	6.49	3.15	1.28
JAWA TIMUR	2.86	2.86	1.44	2.45	6.52	2.92	1.51
BANTEN	3.42	3.30	1.45	1.71	5.08	3.06	1.88
INDONESIA	3.13	2.72	1.68	1.87	5.51	2.61	1.37

GAMBAR II.71

PERBANDINGAN LAJU INFLASI DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2018-2024

(Sumber: BPS, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Pada April 2024, inflasi terutama didorong oleh kelompok transportasi. Kelompok ini menjadi pendorong inflasi seiring dengan adanya penyesuaian tarif angkutan darat oleh Pemerintah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Selanjutnya, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh inflasi pada emas perhiasan dampak dari terus menguatnya komoditas global emas. Adapun dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, inflasi utamanya didorong oleh bawang merah yang juga menjadi komoditas tertinggi penyumbang inflasi di Nasional karena gagalnya panen akibat puso.

B. TRANSAKSI SAHAM

Transaksi saham adalah proses jual beli saham di pasar modal antara investor melalui perantara seperti bursa efek atau *broker*. Transaksi ini terjadi ketika seorang investor membeli saham perusahaan yang terdaftar di bursa atau menjual saham yang dimilikinya kepada investor lain. Jenis transaksi saham meliputi:

- Transaksi Reguler–Jual beli saham dengan mekanisme pasar dan penyelesaian dalam waktu tertentu (biasanya T+2 atau dua hari kerja setelah transaksi);
- Transaksi Tunai-Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari yang sama;
- Transaksi Negosiasi-Transaksi yang dilakukan secara langsung antara pihak yang bertransaksi, biasanya dalam jumlah besar;
- Transaksi saham dapat dilakukan melalui pasar perdana (saat IPO) atau pasar sekunder (jual beli setelah saham tercatat di bursa).

Tahun 2020-2022 terjadi pertumbuhan besar, menunjukkan meningkatnya jumlah investor dan transaksi saham di Banten. Tahun 2023 terjadi penurunan, bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi pasar saham nasional/global, perubahan regulasi, atau perubahan perilaku investor di Banten.

TABEL II.47
DATA KEPEMILIKAN SAHAM DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2023

WILAYAH	TAHUN (NILAI, JUTA/PER KAPITA)			
	2020	2021	2022	2023
DKI JAKARTA	132,43	198,05	210,78	252,30
JAWA BARAT	0,77	1,17	1,82	1,65
JAWA TENGAH	1,06	0,73	3,82	1,10
DI YOGYAKARTA	4,41	0,62	0,70	1,18
JAWA TIMUR	1,21	1,93	2,30	2,23
BANTEN	3,08	5,39	7,29	6,30

Sumber: OJK Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda

Faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi saham di Banten disebabkan oleh beberapa hal, seperti;

- Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur

  Provinsi Banten merupakan kawasan industri besar (Cilegon, Tangerang, Serang) yang menarik banyak investasi. Infrastruktur seperti akses ke Jakarta (Tol Jakarta-Merak, Bandara Soekarno-Hatta) membuat investor lokal lebih mudah berpartisipasi di pasar modal.
- Literasi keuangan dan digitalisasi

  Dengan meningkatnya edukasi keuangan dan platform digital seperti Ajaib, Bibit, Stockbit, lebih banyak orang Banten mulai berinvestasi di saham. Ini terlihat dari kenaikan kepemilikan saham yang cukup signifikan antara 2020-2022.

- Dampak pasar saham Global dan Nasional
  Pada 2023, banyak saham mengalami fluktuasi karena faktor global seperti suku bunga The Fed dan ketidakpastian ekonomi global. Ini bisa membuat investor di Banten menahan transaksi atau menarik modalnya.
- Sektor industri di Banten
  Banyak perusahaan besar di Banten bergerak di sektor manufaktur, baja, dan petrokimia. Jika saham-saham di sektor ini naik, maka nilai kepemilikan saham masyarakat juga meningkat. Sebaliknya, jika sektor ini melemah, investor bisa menarik investasinya, yang mungkin menjadi alasan turunnya angka di Tahun 2023.

Sebagaimana pada tabel di atas bahwa kepemilikan saham di Provinsi Banten tercatat masih jauh dibandingkan kepemilikan saham kota besar seperti DKI Jakarta, namun lebih baik daripada provinsi lainnya di Pulau Jawa, jika hal positif bisa dipertahankan, Provinsi Banten berpotensi menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan investor saham yang kuat di luar Jakarta. Lebih jauh daripada itu untuk menjaga tren baik ini masih perlu adanya peningkatkan edukasi keuangan agar lebih banyak masyarakat Banten paham tentang investasi jangka panjang serta literasi terhadap diversifikasi investasi agar investor tidak hanya fokus pada satu instrumen saja.

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A. INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH)

Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas dan akuntabel pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, berdasarkan LKE KemenPAN-RB Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengukuran terhadap Indeks Reformasi Hukum di Provinsi Banten yang mendapatkan skor 97,64 dengan predikat sangat baik oleh sebab itu hal ini perlu dipertahankan, kemudian pada Tahun 2024 Banten mendapatkan skor 99,40 (kategori AA istimewa), hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

B. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Capaian SPBE di Provinsi Banten dari Tahun 2018-2024 selalu meningkat, pada Tahun 2024 Banten menduduki predikat baik (nilai 3,47).

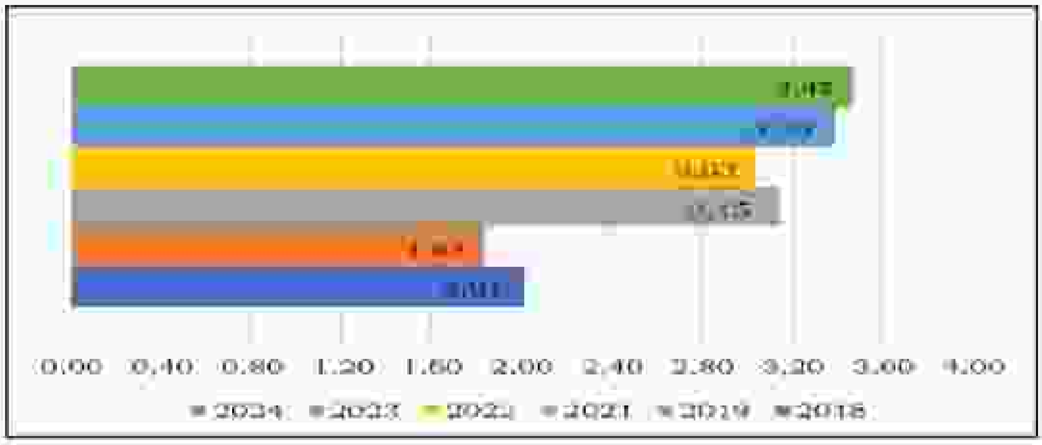

GAMBAR II.72
NILAI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2024

(Sumber: SPBE Provinsi Banten, 2024; Diolah Oleh Bappeda)
Keterangan: Tahun 2020 Kemenpan RB tidak melakukan pengukuran di Provinsi Banten

C. INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah. Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator. Lima domain tersebut antara lain: prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan dan Statistik Nasional.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024 adalah 2,61 dengan predikat "Baik", mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan poin 2,76 (peringkat ke-6 tingkat nasional untuk kategori pemerintah provinsi).

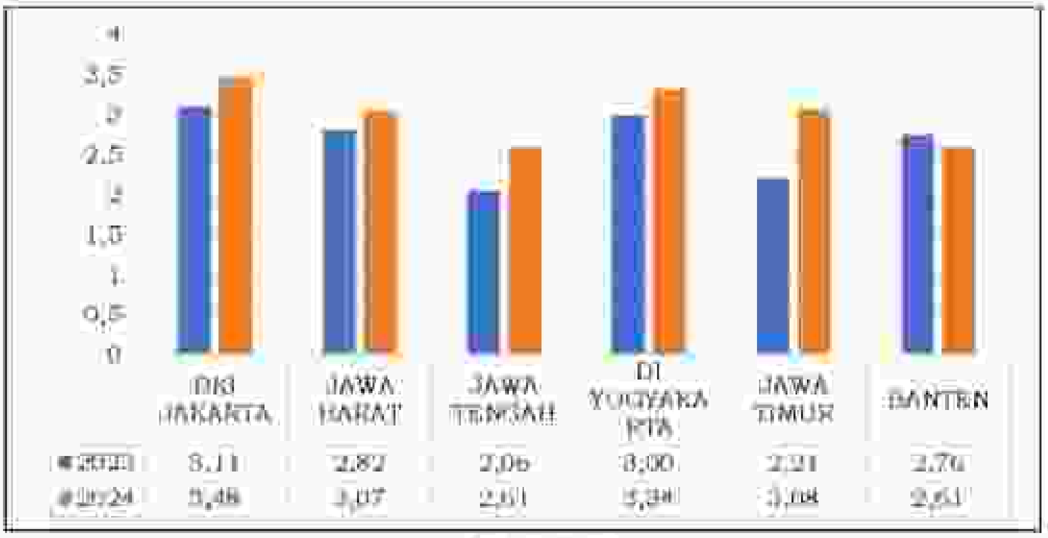

GAMBAR II.73
PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2023-2024
(Sumber: BPS, 2024; Diolah Oleh Bappeda)

D. SATU DATA INDONESIA (SDI)

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan suatu kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, berbagipakai antar pemerintahan baik pusat-daerah, dan tentunya data dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh daripada itu kebijakan terhadap prinsip utama standar data, meta data, interoperabilitas data, dan lain sebagainya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian SDI untuk Tahun 2024, Provinsi Banten memperoleh capaian sebesar 66,95 yang berpredikat cukup, hal ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam meningkatkan kematangan aspek kelembagaan, perencanaan, pemeriksaan, dan pemanfaatan data.

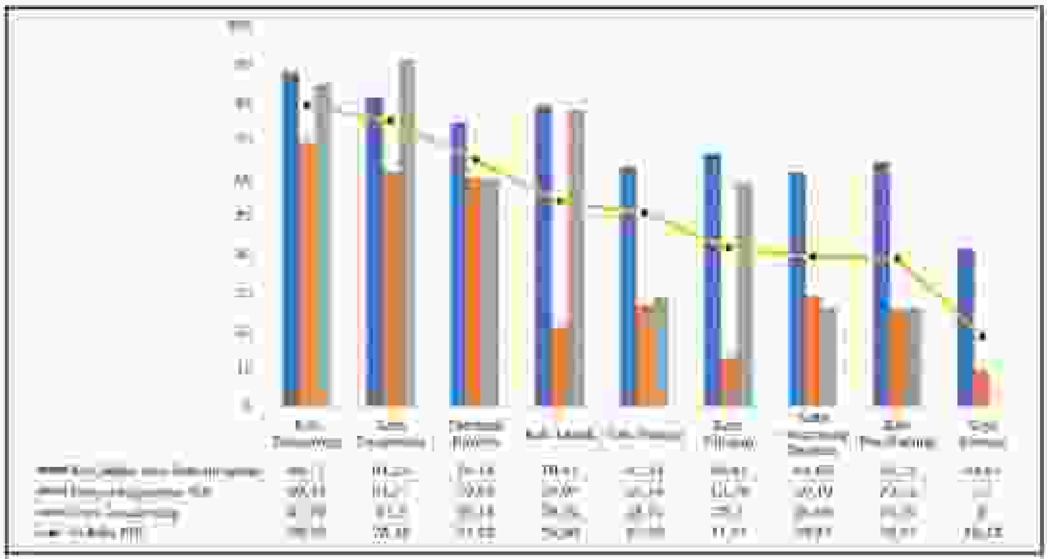

GAMBAR II.74
PERBANDINGAN INDEKS SATU DATA INDONESIA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2023
(Sumber: Bappenas, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

E. INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan suatu alat ukur yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, penghitungan indeks ini menjadi penting guna memastikan masyarakat sebagai penerima layanan telah menerima pelayanan dari pemerintah sesuai dengan standar, sehingga pemerintah selaku pemberi layanan dapat mengidentifikasi terhadap area yang perlu diperbaiki atau area yang perlu ditingkatkan kualitas layanannya. Pengukuran IPP mencakup terhadap beberapa variabel penentu seperti akuntabilitas, partisipasi, responsivitas terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat, dan transparansi.

TABEL II.48
NILAI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021-2024

PROVINSI	2021		2022		2023		2024	
	INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI
BANTEN	3,99	B	3,66	B	3,74	B	3,73	B
JAWA BARAT	4,02	A	4,57	A	4,53	A	4,70	A
JAWA TIMUR	4,26	A-	4,24	A-	4,26	A-	4,52	A
JAWA TENGAH	4,54	A	4,49	A-	4,11	A-	4,23	A
DI YOGYAKARTA	4,61	A	4,58	A	4,27	A	4,62	A
DKI JAKARTA	4,4	A-	4,38	A-	4,09	A-	4,53	A

Sumber: Kemenpan RB, 2024, Diolah Oleh Bappeda.

Lebih jauh daripada itu sebagaimana data pada tabel di atas ini terlihat bahwa IPP di Provinsi Banten mengalami tren menurun dari 2021 ke 2022, kemudian stabil di kategori B tanpa peningkatan signifikan hingga 2024. Dari hasil ini menggambarkan bahwa masih perlunya peningkatkan standar pelayanan publik dengan berfokus pada digitalisasi, transparansi, SDM, dan infrastruktur. Kondisi di Provinsi Banten tetap di kategori B, sedangkan semua provinsi lain di Jawa sudah mencapai kategori A sejak 2023 atau sebelumnya, sehingga indeks di Provinsi Banten terendah dibandingkan provinsi lain di Jawa, yang semuanya menunjukkan peningkatan atau stabil di kategori A. Indeks pelayanan publik di Banten jauh di bawah rata-rata Jawa (4,614 vs 3,73), sehingga diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar setara dengan daerah lain, perlunya peningkatan pengawasan yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat, dan diperlukan evaluasi kebijakan secara berkala.

F. INDEKS INTEGRITAS NASIONAL (IIN)

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat integritas di suatu negara, khususnya dalam aspek pemerintahan, layanan publik, dan pencegahan korupsi. Indeks ini mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip integritas, seperti transparansi, akuntabilitas, dan anti-korupsi, diterapkan dalam sektor-sektor pemerintahan dan masyarakat.

Di Indonesia, Indeks Integritas dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan berbagai pihak. Indeks ini diukur melalui survei terhadap pegawai pemerintah dan pemangku kepentingan eksternal, menilai aspek-aspek seperti:

- Pencegahan korupsi (misalnya regulasi, sistem pengawasan);
- Kepatuhan terhadap aturan;
- Transparansi dan akuntabilitas;
- Etika dan budaya organisasi;
- Semakin tinggi nilai Indeks Integritas, semakin rendah tingkat korupsi dan semakin baik tata kelola pemerintahan di suatu wilayah atau institusi.

Sebagaimana gambar di bawah ini, Provinsi Banten memiliki capaian yang lebih rendah daripada wilayah provinsi lainnya dan masih di bawah capaian Nasional, namun lambat laun setiap tahunnya selalu memberikan nilai yang positif dengan terus meningkat, yang mengindikasikan semakin meningkatnya perbaikan kinerja terhadap kepatuhan dan kepatutan dalam setiap aspek komponen pengukuran indeks.

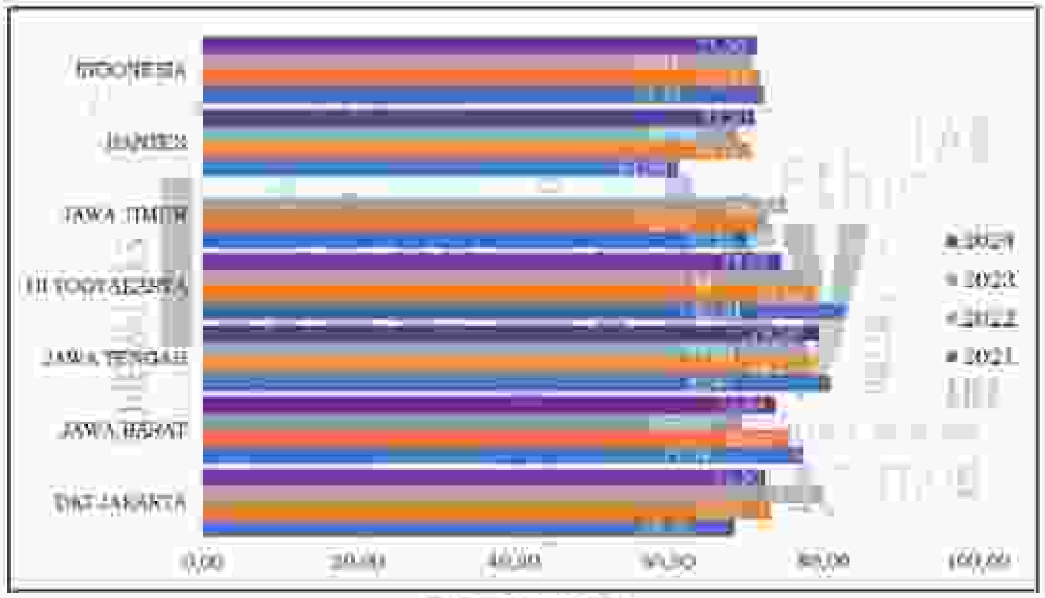

GAMBAR II.75
PERBANDINGAN INDEKS INTEGRITAS NASIONAL DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2021-2024
(Sumber: BPS, 2024; Diolah Oleh Bappeda)

Lebih jauh daripada itu sebagaimana gambar di atas masih perlu adanya perbaikan yang dilakukan dalam hal penguatan transparansi dan akuntabilitas, melalui peningkatan transparansi, digitalisasi, penguatan penegakan hukum, serta evaluasi berkala, peningkatan etika dan budaya anti-korupsi yang sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan Tahun 2025-2039 serta peningkatan nilai-nilai integritas bagi pegawai pemerintahan dan masyarakat dan hal lainnya.

2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

A. PERSENTASE PENEGAKAN PERDA

Persentase perda/perkada yang ditegakkan sesuai dengan standar merupakan indikator yang mengukur tingkat penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.

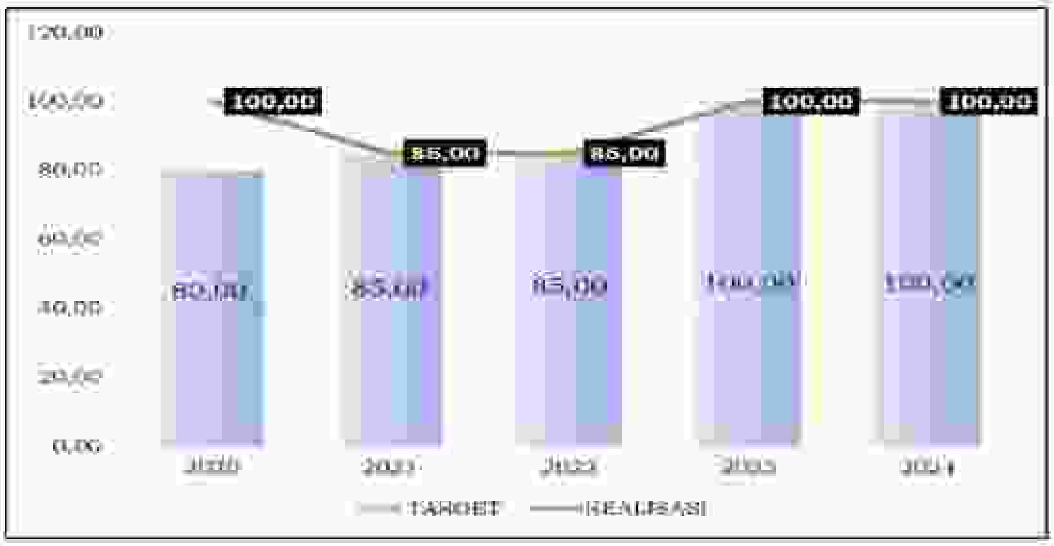

GAMBAR II.76
PERSENTASE PENEGAKAN PERATURAN DI PROVINSI BANTEN
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024, Diolah Oleh Bappeda)

Gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbaikan bertahap dalam penegakan hukum dari 2020 hingga 2024. Tahun 2023 dan 2024 adalah tahun terbaik, di mana semua indikator mencapai 100 persen, menandakan implementasi yang sudah optimal. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kebijakan atau penegakan regulasi, sehingga seluruh aspek hukum berjalan lebih efektif.

B. PERSENTASE CAPAIAN AKSI HAM

Persentase Capaian Aksi HAM adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana aksi Hak Asasi Manusia (HAM) yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Persentase ini biasanya digunakan dalam pelaporan dan evaluasi implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) oleh pemerintah atau lembaga terkait. Faktor yang mempengaruhi capaian aksi HAM:

- Komitmen pemerintah-seberapa serius pemerintah dalam menjalankan program-program HAM;
- Keterlibatan masyarakat-partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan HAM;
- Sumber daya-ketersediaan anggaran, tenaga ahli, dan infrastruktur;
- Hambatan Regulasi-Adanya peraturan yang menghambat pelaksanaan aksi HAM;
- Situasi sosial dan politik-stabilitas politik dan sosial dapat mempengaruhi efektivitas implementasi HAM;
- Persentase capaian ini sering digunakan dalam laporan pemerintah daerah atau nasional sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kebijakan HAM.

Berdasarkan data yang diberikan, terdapat peningkatan Persentase Capaian Aksi HAM di Provinsi Banten dari Tahun 2023 (39,79) ke 2024 (68,1). Capaian aksi HAM di Provinsi Banten meningkat signifikan berkat peningkatan komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan program intervensi khusus. Kelompok Penyandang Disabilitas mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Masyarakat adat masih menjadi kelompok yang tertinggal dalam capaian aksi HAM, sehingga perlu ada kebijakan khusus untuk masyarakat adat agar tidak tertinggal, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas layanan HAM di daerah terpencil.

TABEL II.49
PERSENTASE CAPAIAN AKSI HAM TAHUN 2023-2024

KELOMPOK SASARAN	AKSI	B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2023 (B04 + B08 + B12) /3
PEREMPUAN	1	50	0	85	45
	2	10	45	90	15,67
ANAK	3	30	45	30	35
	4	100	100	100	100
	5	0	0	0	0
PENYANDANG DISABILITAS	6	0	30	20	16,67
	7	90	95	0	61,67
MASYARAKAT ADAT	8	10	15	15	13,33
RATA RATA CAPAIAN AKSI HAM					39,79

KELOMPOK SASARAN	AKSI	B04	B08	B12	NILAI CAPAIAN TAHUN 2024 (B04 + B08 + B12) /3
PEREMPUAN	1	0	85	100	61,67
	2	35	85	100	73,33
ANAK	3	40	95	65	66,67
PENYANDANG DISABILITAS	4	25	50	95	56,67
	5	60	35	75	56,67
	6	100	100	75	91,67
	7	100	100	70	90
RATA RATA CAPAIAN AKSI HAM		51,4	78,6	74,3	68,10

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2024 Diolah Oleh Bappeda

C. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) atau pada level daerah serupa dengan Indeks Demokrasi Provinsi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Capaian Indeks Demokrasi Provinsi Banten dari tahun ke tahun mengalami kenaikan hingga Tahun 2022 mencapai angka 78,75 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021 yang capaiannya sebesar 75,93. Namun pada Tahun 2023 indeks demokrasi Provinsi Banten turun menjadi 75,83, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Hal ini terjadi akibat kurangnya edukasi demokrasi masyarakat oleh kelembagaan demokrasi sehingga kapasitas lembaga demokrasi memiliki nilai yang kecil. Perlunya upaya edukasi politik kepada masyarakat yang dilakukan penyelenggara Pemilu agar masyarakat mendapatkan akses informasi dan lebih bijak dalam berpartisipasi dalam pemilu.

Berdasarkan gambar di bawah merupakan nilai Indeks Demokrasi Provinsi di pulau Jawa yang dibandingkan dengan capaian Nasional sejak Tahun 2021-2023 dengan menggunakan metode baru yang mempertimbangkan terhadap 3 (tiga) bidang yaitu: 1) bidang politik; 2) bidang ekonomi; dan 3) bidang sosial.

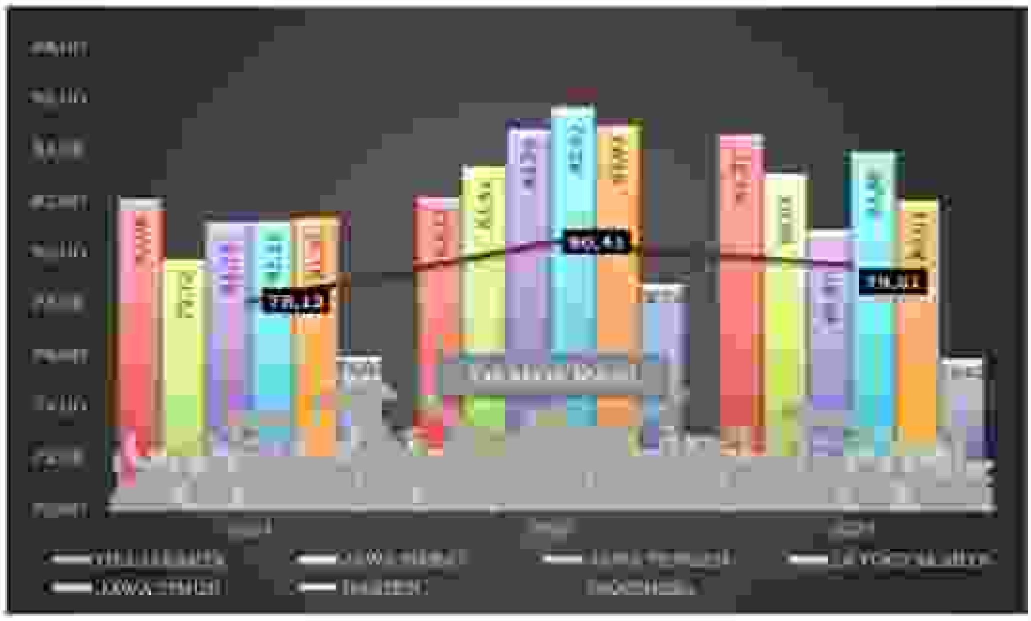

GAMBAR II.77
PERBANDINGAN INDEKS DEMOKRASI DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2021-2023
(Sumber: BPS 2024 / Diolah Oleh Bappeda)

D. INDEKS RASA AMAN

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya adalah persentase penduduk yang menyatakan bahwa mereka merasa aman ketika berjalan sendirian di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, baik pada siang maupun malam hari.

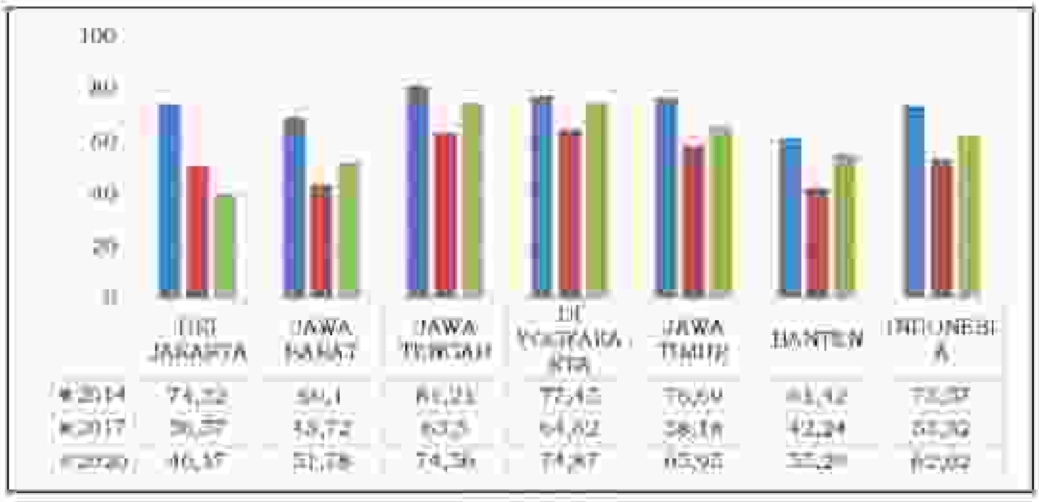

	DKI JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	DI YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	BANTEN	INDONESIA
■2014	74,22	68,1	81,21	77,45	76,69	61,42	73,37
■2017	50,57	43,72	63,5	64,82	58,16	42,24	53,39
■2020	40,37	51,78	74,36	74,87	65,95	55,29	62,02

GAMBAR II.78
PERBANDINGAN PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2014, 2017, DAN 2020
(Sumber: BPS 2024 / Diolah Oleh Bappeda)

Proporsi ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keamanan dan rasa nyaman penduduk terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Sumber data biasanya diperoleh melalui survei yang menanyakan kepada responden apakah mereka merasa aman berjalan sendirian di lingkungan mereka. Rasa aman dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kriminalitas, kehadiran aparat keamanan, kondisi pencahayaan jalan, kepadatan penduduk, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya. Interpretasi semakin tinggi proporsinya, semakin banyak penduduk yang merasa aman. Sementara penurunan angka ini dapat mengindikasikan meningkatnya rasa ketidakamanan di masyarakat, selengkapnya pada gambar di atas.

2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

A. INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan instrumen berupa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengadopsi penilaian di tingkat Global seperti *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum*. Perhitungan IDSD didasarkan pada 4 (empat) komponen utama, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen ini dielaborasi ke dalam 12 (dua belas) pilar daya saing. Pengukuran IDSD ini bertujuan untuk memperoleh ukuran yang komprehensif terhadap daya saing pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengenai produktivitas daerah sebagai refleksi kemampuan setiap daerah untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.

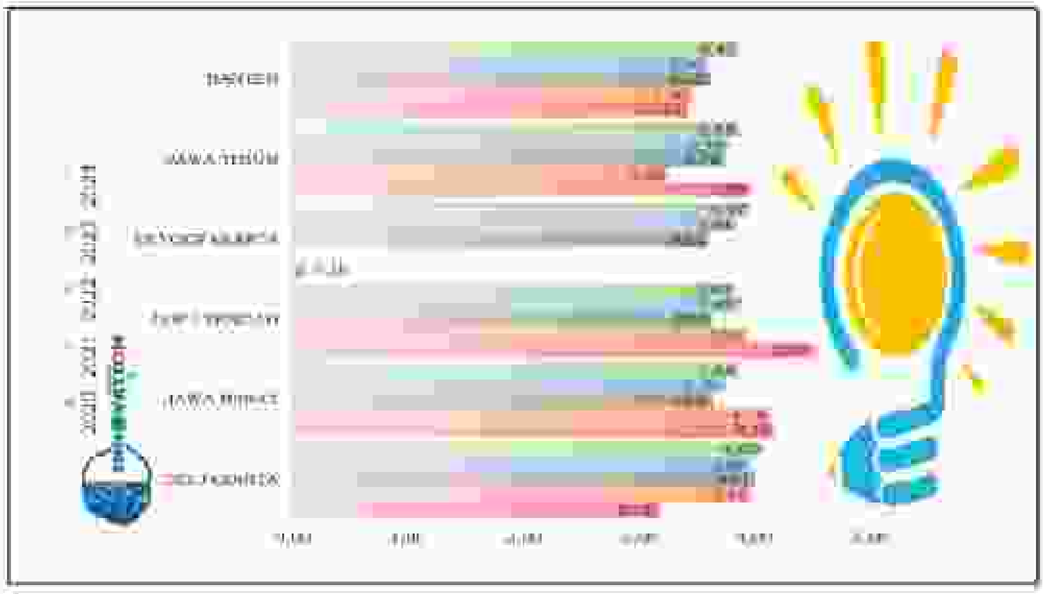

GAMBAR II.79
PERBANDINGAN INDEKS DAYA SAING DAERAH DI PROVINSI BANTEN DENGAN WILAYAH LAINNYA TAHUN 2020-2024
(Sumber: BRIN, 2024. Diolah Oleh Bappeda)

Sebagaimana gambar yang disajikan di atas bahwa IDSD di Provinsi Banten pada Tahun 2024 mencapai 3,87 yang berada di atas nasional (sebesar 3,43) dengan peringkat ke-5 tertinggi menurut provinsi. Walaupun demikian nilai ini mengalami penurunan yang cukup tajam pada Tahun 2022 ke Tahun 2023 sebesar 0,02, yang kemudian berangsur secara perlahan meningkat di setiap tahunnya hingga menjadi 3,60 pada Tahun 2023 ke Tahun 2024 mencapai 3,87. Namun demikian masih ada tugas besar dalam peningkatan tingkat inovasi di daerah, khususnya pada aspek lingkungan pendukung, pasar, dan ekosistem inovasi yang perlu ditingkatkan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, stabilitas ekonomi dan pasar, serta pembentukan ekosistem yang inovatif di sektor-sektor unggulan Provinsi Banten.

2.1.4.4 KINERJA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023-dan 2024 adalah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Banten Tahun 2023-2026 yaitu "***Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa***". Perwujudan visi Pembangunan daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah salah satunya merujuk kepada kinerja makro dan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

TABEL II.50
CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH TAHUN 2020-2024

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2021			2022			2023			2024			TARGET 2025 (RPD)	TARGET AKHIR RPD (2026)	KETERANGAN
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)			
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI																	
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	PERSEN	100	81,1	81,10	100	77,99	77,99	17	11,82	67,18	18,50	15,22	82,27	19	21	
MENINGKATNYA MITIGASI KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT BENCANA	INDEKS RISIKO BENCANA (IRB)	INDEKS	115	149,28	77,15	115	144,71	77,46	157,77	149,51	96,66	145,21	128,64	110,58	142,49	140,02	T
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	INDEKS	51,62	62,72	121,28	52,79	63,32	120,39	62,96	63,52	100,89	63,24	62,24	98,46	63,49	64,10	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																	
PERTUMBUHAN EKONOMI	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	5,05	3,51	69,31	5,20-5,40	5,03	95,81	4,70-5,2	4,80	100	4,80	4,85	102,11	5,20-5,35	5,27-5,41	
SASARAN DAERAH MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI DAN USAHA	PERTUMBUHAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	PERSEN							3,97	3,43	86,39	4,92	3,55	88,46	0,87	6,82	T
MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	LPE SEKTOR INDUSTRI	PERSEN	3,45	3,94	114,20	4,7	3,6	75,36	3,96	3,82	110,13	3,84	3,30	28,92	5,23	5,69	
	LPE SEKTOR PERDAGANGAN	PERSEN	4,1	1,21	28,75	6,7	3,79	57,26	2,01	3,08	153,34	4,20	4,72	100,17	3,64	4,29	
MENINGKATNYA KONTRIBUSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	LPE SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSEN							4,20	5,1	110,34	5,30	7,2	134	5,25	5,65	T
MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DAN KELAUTAN	LPE SEKTOR PERTANIAN DAN KELAUTAN	PERSEN							0,66	0,54	22,06	0,80	1,24	211,25	0,82	1,04	T

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2021			2022			2023			2024			TARGET 2025 (RPD)	TARGET AKHIR RPD (2026)	KETERANGAN
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)			
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	TINGKAT KEMISKINAN	PERSEN	8,06	7,3	77,84	5,40	6,24	86,22	6,3	6,17	98,01	5,67	5,70	99,47	5,45	5,07	
	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	PERSEN	8,03	8,98	89,40	9,2	8,01	116,15	7,9	7,22	108,81	7,02	7,08	104,88	8,36	8,2	
MENINGKATNYA PELAYANAN SOSIAL	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SOSIAL	PERSEN							7,71	7,12	92,69	7,25	8,80	121,37	7,77	7,53	*1
MENINGKATNYA TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	PERSEN	100	63,79	63,79	62,79	61,81	98,44	65,16	62,04	100,15	60,54	64,42	106,56	70,08	66,04	*1
MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA SEJAHTERA	INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA	INDEKS							58,13	53,56	92,14	53,40	52,20	98,01	60,70	71,00	*1
PENINGKATAN PEMBANGUNAN	INDEKS GINI	INDEKS	0,265	0,265	100,00	0,27	0,277	99,11	0,262	0,268	102,28	0,30	0,29	103,28	0,291	0,289	
MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT	PENGELUARAN PER KAPITA PERTAHUN YANG DISESUAIKAN	RUPIAH							12.168	12.216	100,40	12.309.000,00	12.677.000,00	103,04	12.468	12.257	*1
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	INDEKS	73,21	72,72	99,33	73,00-73,50	73,22	99,83	73,53	74,17	100,87	76,12	76,30	100,47			
MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT	HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)	TAHUN	14,5	13,01	90,00	13	13,02	100	13,55	13,09	96,56	13,13	13,11	99,84	13,12	14,3	
	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)	TAHUN	9,1	8,55	93,96	9,5	9,13	96,15	9,13	9,15	100,44	9,28	9,30	100,10	9,5	9,9	
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT	ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)	TAHUN	75,06	70,02	93,88	70,66	71,39	101,03	73,4	74,17	100,20	74,42	74,37	100,20	75,25	76,40	
	PREVALENSI STUNTING PADA BALITA	PERSEN							23,5	20	116,67	23,00	25,60	89,85	22,5	22	*1
MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	INDEKS	92,81	91,37	99,00	100	100	100	90,70	92,18	99,04	90,43	90,31	99,90	90,63	90,91	

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2021			2022			2023			2024			TARGET 2025 (RPD)	TARGET AKHIR RPD (2026)	KETERANGAN
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)			
BERBASIS GENDER																	
TERBENTUKNYA KARAKTER DAN JATI DIRI MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERBUDAYA	INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	INDEKS							55,03	51,01	92,42	56,23	52,40	93,22	57,43	58,63	*)
	INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	INDEKS							57,42	55,28	96	53,17	56,55	107,35	55,52	57,67	*)
ASPEK DAYA SAING DAERAH																	
PEMERATAAN PEMBANGUNAN	INDEKS WILLIAMSON	INDEKS							0,6025	0,5820	103,86	0,562	0,559	100,28	0,5417	0,5418	*)
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS	INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR	NILAI							TINGGI	TINGGI	100	3,20	3,20	100,00	TINGGI	SANGAT TINGGI	*)
ASPEK PELAYANAN UMUM																	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	POIN							66	78,07	118	76,17	76,17	100,00	77	81	*)
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK	INDEKS PERILAKU ANTI-KORUPSI (IPAK)	INDEKS							3,5	3,5	100	3,90	3,58	92	3	3	*)
	INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN	INDEKS							3,67	3,74	102,78	3,40	3,75	110	3,51	3,53	*)
	NILAI SAKIP PEMERINTAH PROVINSI	INDEKS	A	66,97 (B)	83,06	A	67,20 (B)	84	69,77	67,74	97,09	73,45	65,25	88,84	76,56	80	
	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)	INDEKS							82,2	77,12	93,82	85,2	77,12	90,55	85	87,6	*)

Sumber: Diolah (Tim Penyusun), 2025

*Keterangan: *) Indikator ini tidak terdapat di RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2023 namun terdapat di RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026*

TABEL II.51
CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
BIDANG PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)														
CAKUPAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	PERSEN	100	90,63	90,63	100	93,4	93,4	100	95,65	95,65	100	100	100	
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	71,34	85,74	120,19	85,74	92,5	107,88	*1
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDUDUK USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	PERSEN	-	-	-	-	-	-	63,04	28,76	45,6	64	61,32	95,81	*1
PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) LULUSAN SMK	PERSEN	-	-	-	-	-	-	12,7	11,91	93,77	12,2	11,38	105,58	*1
BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)														
CAKUPAN LAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF DALAM PENURUNAN STUNTING	PERSEN	-	-	-	-	-	-	40	46,6	116,5	50	75	150	*1
RASIO KEMATIAN IBU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)	RASIO	-	-	-	-	-	-	61	69,1	113,28	60	71,5	110,6	*1
RASIO KEMATIAN BAYI (PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP)	RASIO	-	-	-	-	-	-	4,7	5	93,62	4,6	4,5	102,17	*1
PERSENTASE KETERCAPAIAN INDIKATOR SPM RUMAH SAKIT	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	*1
BIDANG KEBUDAYAAN (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)														
PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	5	8,3	166	5	2,1	42	*1
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN)														
CAKUPAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PSU	PERSEN	-	-	-	-	-	-	91,73	90,44	108,41	99,34	90,12	90,88	*1
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGHUNI RUMAH LAYAK DAN TERJANGKAU	PERSEN	-	-	-	-	-	-	60,80	77,55	127,49	77	77	100	*1

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KETERANGAN
LUAS PERMUKIMAN KUMUH	HA	-	-	-	-	-	-	219	328,58	150	160	190	118,31	*1
BIDANG SOSIAL (DINAS SOSIAL)														
PERSENTASE PENANGANAN JUMLAH PMKS	PERSEN	3,3	6,41	194,2	2,68	2,68	100	5,6	6,3	112,50	6,1	7,34	120,33	*1
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)														
PERSENTASE CAKUPAN PEMBANGUNAN GEDUNG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	68,54	68,54	100	
PERSENTASE CAPAIAN PELAYANAN AKSES AIR MINUM REGIONAL, IPAL REGIONAL DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL	PERSEN	-	-	-	-	-	-	19,76	6	30,6	6,1	5,16	85,41	
PERSENTASE KAPASITAS TAMPUNG SUMBER DAYA AIR	PERSEN	-	-	-	-	-	-	9,87	9,87	100	9,97	9,15	96,05	
PERSENTASE LUAS LAYANAN IRIGASI	PERSEN	-	-	-	-	-	-	62,81	58,49	93,12	63,83	62,76	98,29	
PERSENTASE PENANGANAN PENCEGAHAN BANJIR DAN ABRASI	PERSEN	-	-	-	-	-	-	43,36	28,66	65,34	45,78	44,57	97,35	
PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG	PERSEN	87,5	96,43	110,21	90	90	100	100	96,9	96,9	90	88,96	100,88	
TINGKAT KEMANTAPAN JALAN DAN JEMBATAN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	94	94,25	100,27	96	95,18	99,15	
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)														
INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)	INDEKS	-	-	-	-	-	-	0,55	0,64	116	0,64	0,61	95,31	
RASIO KOORDINASI PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	
RASIO PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	PERSEN	80	100	133	85	85	100	100	100	100	100	100	100	*1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN)														
A. INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	INDEKS	-	-	-	-	-	-	74,18	66,57	89,58	74,23	66,24	84,1	*1
B. INDEKS KUALITAS AIR (IKA)		-	-	-	-	-	-	34,44	56,05	163,27	34,46	54,32	99,74	*1
C. INDEKS KUALITAS AIR LAUT (IKAL)		-	-	-	-	-	-	80,1	82,95	103,56	82,35	85,46	103,02	*1
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)														
ANGKA KELAHIRAN TOTAL TFR (TOTAL FERTILITY RATE) WUS USIA 15-49 TAHUN	[illegible]	2,21	2,37	107,24	2,26	2,28	99,67	2,28	1,96	121,43	2,31	1,98	85,71	

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KETERANGAN
BIDANG PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)														
CAPAIAN REALISASI PENANAMAN MODAL (PMDN + PMA)	TRILIUN RUPIAH	49	62,01	126,56	51,3	57,96	112,98	60	103,85	173,08	62	85,98	139,58	
INDEKS KEPUASAN PELAYANAN PERIJINAN	INDEKS	85,07	89,23	104,82	85,72	89,4	104,29	86,22	89,71	104,05	89,72	92,31	102,89	
BIDANG KEARSIPAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)														
INDEKS HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN	INDEKS	-	-	-	-	-	-	80	80	100	80	75,91	94,89	*1
BIDANG PERSANDIAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)														
INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI)	INDEKS	-	-	-	-	-	-	275	432	159,24	450	440	97,78	*1
BIDANG PANGAN (DINAS KETAHANAN PANGAN)														
INDEKS KETAHANAN PANGAN DAERAH	INDEKS	83,5	81,93	98,12	84,5	82,9	98,11	70,73	78,71	90,8	78,71	79,25	100,69	*1
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)														
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	INDEKS	89,22	95,70	107,25	90	91,7	101,8	97,8	84,51	92,17	91,9	95,87	103,41	
INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	INDEKS	3,7	3	98	3,9	3,15	80,76	3,25	3,39	104,3	3,39	3,47	102,36	
BIDANG TENAGA KERJA (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI)														
INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN	INDEKS	5,69	9,99	172,28	5,72	5,284	92,38	58,25	64,6	95,64	71,85	64,76	90,13	
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)														
INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA (IPO)	INDEKS	30	30	100	40	40	100	0,5	0,289	57,8	0,52	0,53	101	
INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)	INDEKS	30	30,25	100,8	40	49,17	122,93	50	49	98	52,15	53,30	102,22	
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3AKKB)														
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	INDEKS	71,14	68,26	96,05	71,06	68,76	96,76	69,16	68,35	97,57	70,76	69,82	98,74	
INDEK PERLINDUNGAN ANAK	NILAI							74,25	64,35	86,25	76,02	66,18	87,05	*1
BIDANG PERPUSTAKAAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)														
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	INDEKS	-	-	-	-	-	-	13	11,55	88,85	14	13,28	94,86	*1
NILAI KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	NILAI	40	18,94	47,35	45	58,77	130,6	67,3	66,23	98,41	69,3	70,38	101,56	
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DP3AKKB)														
PERSENTASE CAKUPAN DATABASE KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KETERANGAN
BIDANG STATISTIK (DINAS KOMINFO)														
PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA DASAR STATISTIK SEKTORAL	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	*1
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (DINAS KOPERASI DAN UKM)														
PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS	PERSEN	-	-	-	-	-	-	18	25	100	28	28	100	
PERSENTASE USAHA KECIL YANG NAIK KELAS SESUAI KLASTER	PERSEN	-	-	-	-	-	-	5	5	100	5	5	100	*1
RASIO KEJADIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI PER 100 RIBU KENDARAAN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	19,7	21	106	23	24,72	92,28	*1
RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI	PERSEN	-	-	-	-	-	-	0,72	0,7	97,2	0,73	0,7	95,89	*1
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI	NILAI	-	-	-	-	-	-	82	80	97,5	83	85,17	102,63	*1
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA)														
PERSENTASE PENURUNAN STATUS DESA TERTINGGAL DAN SANGAT TERTINGGAL	PERSEN	-	-	-	-	-	-	14,22	16,98	110,47	5,35	4,77	109,18	*1
PERSENTAS DESA KATEGORI MAJU	PERSEN	-	-	-	-	-	-	13,49	12,80	95,03	20,3	30,39	119,71	*1
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (DINAS ESDM)														
KETERSEDIAAN PELAYANAN INFORMASI ASPEK KEGEOLOGIAN DAN SUMBER DAYA MINERAL	PERSEN	-	-	-	-	-	-	35,25	37,88	107,47	70,01	75,2	108,84	*1
PERSENTASE PEMANFAATAN LANGSUNG ENERGI BARU TERBARUKAN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	5	2,39	47,8	15	10,24	68,53	*1
RASIO ELEKTRIFIKASI	PERSEN	100	99,46	100,46	100	99,8	99,5	98,2	99,99	101,82	99,99	99,99	100	
BIDANG KEHUTANAN (DLHK)														
INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN (IKTL)	INDEKS							35,1	39,06	111	39,06	43,03	110,16	*1
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)														
PENINGKATAN NILAI TUKAR NELAYAN	POIN	-	-	-	-	-	-	102	100,19	98,23	104	98,87	94,06	*1
PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN	TON	-	-	-	-	-	-	246.764	135.889,19	55,1	246.454	193.819,67	78,56	*1
BIDANG PARIWISATA (DINAS PARIWISATA)														
JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (DOMESTIK DAN ASING)	ORANG	-	-	-	-	-	-	20.060.822	25.564.015	127,35	21.063.968	19.410.605	92,15	*1

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KETERANGAN
BIDANG PERDAGANGAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)														
PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	PERSEN	-	-	-	-	-	-	13,48	12,41	92,06	13,53	12,38	91,5	TT
BIDANG PERINDUSTRIAN														
PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB SEKTOR INDUSTRI	PERSEN	-	-	-	-	-	-	6,43	30,25	470	30,74	30,33	98,66	TT
BIDANG PERTANIAN (DINAS PERTANIAN)														
PRODUKSI PETERNAKAN	TON	-	-	-	-	-	-	225.967	256.390	113,46	255.350	244.504	95,75	TT
PRODUKSI HORTIKULTURA	TON	-	-	-	-	-	-	28.714	37.661	131,1	28.021	42.354	151,16	TT
PRODUKSI TANAMAN PANGAN	TON	-	-	-	-	-	-	2.051.611	1.678.760	81,82	2.154.192	2.302.738	106,68	TT
PRODUKSI PERIKANAN	TON	-	-	-	-	-	-	30.658	49.205	160,51	32.190	57.654	170,97	TT
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DAERAH														
INDEKS KELEMBAGAAN	INDEKS	-	-	-	-	-	-	81-90	89,3	100	89,3	89,2	100	TT
INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	INDEKS	-	-	-	-	-	-	60	65	108	71	65	91,55	TT
INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA	INDEKS	-	-	-	-	-	-	80	88,30	110	86,53	87,20	100,7	TT
KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK	NILAI	-	-	-	-	-	-	81,61	91,16	111,42	91,16	91,16	100	TT
NILAI KOMPONEN PELAPORAN BAKIP PROVINSI	NILAI	-	-	-	-	-	-	10,77	10,24	95,07	10,77	10,71	99,44	TT
PERSENTASE REALISASI RUMUSAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN YANG DIIMPLEMENTASIKAN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	TT
PERSENTASE REALISASI RUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH YANG DI IMPLEMENTASIKAN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	71,43	71,43	TT
PERSENTASE REALISASI RUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DIIMPLEMENTASIKAN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	TT
PERSENTASE REALISASI PELAYANAN PIMPINAN DAERAH	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	TT
PERSENTASE REALISASI PELAYANAN SETDA	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	TT
SKORING/NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SKOR/ NILAI	-	-	-	-	-	-	4,24	3,45	81,37	4,29	3,46	80,65	TT

INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KETERANGAN
SEKRETARIAT DPRD														
TINGKAT DUKUNGAN DAN FASILITASI DPRD	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	91,96	91,96	*1
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
INSPEKTORAT DAERAH														
JUMLAH UNIT KERJA YANG BERPREDIKAT ZI	UNIT KERJA	-	-	-	-	-	-	1	0,5	50	1	1	100	*1
MATURITAS SPIP	NILAI	3	3.5	116.07	4	3	75	3,14	3,04	96,82	3,24	3,4	105,00	
NILAI SAKIP PADA KOMPONEN EVALUASI INTERNAL	NILAI	-	-	-	-	-	-	14	15,31	109,35	15,31	15,37	100,39	*1
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
KEUANGAN														
OPINI BPK	OPINI	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	
KEMANDIRIAN KEUANGAN	PERSEN	-	-	-	-	-	-	69,55	73,8	106,12	73,8	72,76	98,59	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
INDEKS INOVASI DAERAH	LEVEL	-	-	-	-	-	-	SANGAT INOVATIF (60)	INOVATIF	90	SANGAT INOVATIF	INOVATIF	90	*1
KEPEGAWAIAN														
INDEKS MERIT SISTEM	INDEKS							321,5	330,5	102,8	332,5	330,5	99,4	*1
INDEKS PROFESIONALITAS ASN	INDEKS	83	65.35	78.00	90	81.52	90.58	24.98	53.05	212.65	52.05	53.81	101.40	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
INDEKS PROFESIONAL APARATUR DIMENSI KOMPETENSI ASN	PERSEN	20	11,35	56,75	25	24,5	98	10,23	21,61	211,24	21,61	31,24	144,6	
PERENCANAAN														
NILAI KOMPONEN PERENCANAAN DAN PENGUKURAN PADA PENILAIAN SAKIP PROVINSI	KATEGORI NILAI	-	-	-	-	-	-	45	42,19	93,75	47	43,35	92,23	*1
PENGHUBUNG														
CAPAIAN PELAYANAN PENGHUBUNG	INDEKS	100	90	100	100	90	100	3	3	100	4	4	100	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA BANTEN	INDEKS	76	75,63	99	78	76,51	97	77,25	76,87	99,12	78,90	75,93	96,24	
PERSENTASE KONFLIK IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM DAN HAM YANG DITANGANI	PERSEN	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	91,67	91,67	*1

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

*Keterangan: *1 Indikator ini tidak terdapat di RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 namun terdapat di RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026*

2.2 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan wajib dasar yang mana dalam pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh daerah. Lebih lanjut yang menjadi bagian dalam Layanan Urusan Wajib Dasar pilihan ini meliputi: i) urusan pemerintahan bidang pendidikan; ii) urusan pemerintahan bidang kesehatan; iii) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; iv) urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; v) urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan vi) urusan pemerintahan bidang sosial.

2.2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat amanat agar Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Bab II Pasal 5 ayat (1) jenis pelayanan daerah pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan kesetaraan. Ayat (2) jenis pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah Provinsi terdiri atas pendidikan menengah, Pendidikan khusus.

Pemerintah Provinsi melakukan intervensi kepada kabupaten/kota melalui Bantuan keuangan guna memenuhi capaian Penerapan SPM bidang Pendidikan jenis pelayanan dasar pendidikan menengah jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).

Dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memiliki beberapa kewajiban diantaranya:

- Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

- Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2018 sudah mengimplementasikan program pendidikan gratis melalui skema biaya operasional sekolah (BOS dan BOSDA) dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran untuk SMA/SMK/SKh Negeri dan Swasta;
- Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, serta wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, berikut capaian SPM untuk bidang pendidikan.

TABEL II.52
CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH YANG TERLAYANI	JUMLAH YANG BELUM TERLAYANI	TOTAL PENCAPAIAN (PERSEN)
I	**PENDIDIKAN MENENGAH**					**98.18**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 PERSEN)	PERSEN				79,11
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	ORANG	488.334	482.917	5.417	98,89
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL DASAR (20 PERSEN)	PERSEN				19,07
	JUMLAH MUTU BARANG/JASA/SDM					95,35
	SMA					96,04
	ANGKA PARTISIPASI KASAR	PERSEN	100	98,93	1,07	98,93
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH	PERSEN	100	69,64	30,36	69,64
	KEMAMPUAN LITERASI	NILAI	71,83	70,59	1,24	98,27
	KEMAMPUAN NUMERASI	NILAI	60,74	59,78	0,96	98,42
	PERBEDAAN SKOR LITERASI	NILAI	0	0	0	100,00
	PERBEDAAN SKOR NUMERASI	NILAI	0	0	0	100,00
	INDEKS IKLIM KEAMANAN	NILAI	79,73	72,33	7,4	90,72
	INDEKS IKLIM KEBHINEKAAN	NILAI	75,72	73,61	2,11	97,21
	INDEKS IKLIM INKLUSIVITAS	NILAI	72,27	70,26	2,01	97,22
	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN	PERSEN	0	0	0	100.00
	INDEKS DISTRIBUSI GURU	PERSEN	0	0	0	100,00
	PROPORSI PTK BERSERTIFIKAT	PERSEN	0	0	0	100,00
	PROPORSI PTK PENDIDIKAN	PERSEN	0	0	0	100.00
	SMK					98,68
	ANGKA PARTISIPASI KASAR	PERSEN	100.00	98.93	1.07	98.93
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH	PERSEN	100,00	69,64	30,36	69,64

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH YANG TERLAYANI	JUMLAH YANG BELUM TERLAYANI	TOTAL PENCAPAIAN (PERSEN)
	KEMAMPUAN LITERASI	NILAI	62,67	61,91	0,76	98,79
	KEMAMPUAN NUMERASI	NILAI	54,55	53,73	0,82	98,51
	TINGKAT PENYERAPAN LULUSAN SMK	PERSEN	91,94	82,34	9,6	89,56
	KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	PERSEN	84,4	84,25	0,15	99,82
	PERBEDAAN SKOR LITERASI	NILAI	0	0	0	100,00
	PERBEDAAN SKOR NUMERASI	NILAI	0	0	0	100,00
	INDEKS IKLIM KEAMANAN	NILAI	76,25	68,47	7,78	89,80
	INDEKS IKLIM KEBHINEKAAN	NILAI	71,21	69,57	1,64	97,70
	INDEKS DISTRIBUSI GURU	PERSEN	0,34	0,28	0,06	82,35
	INDEKS IKLIM INKLUSIVITAS	NILAI	58,83	55,77	3,06	94,80
	KEBUTUHAN FORMASI GURU ASN	PERSEN	0	0	0	100,00
	PROPORSI PTK BERSERTIFIKAT	PERSEN	0	0	0	100,00
2	**PENDIDIKAN KHUSUS**					**89,21**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80PERSEN)	PERSEN				70,46
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	ORANG	12.776	11.252	1.524	88,07
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL DASAR (20 PERSEN)	PERSEN				18,75
	JUMLAH MUTU BARANG/JASA/SDM					93,75
	ANGKA PARTISIPASI KASAR	PERSEN	0	0	0	100,00
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH	PERSEN	100,00	61,33	38,67	61,33
	KEMAMPUAN LITERASI	NILAI	65,81	59,54	6,27	90,47
	KEMAMPUAN NUMERASI	NILAI	57,65	54,11	3,54	93,86
	PERBEDAAN SKOR LITERASI	NILAI	0	0	0	100,00
	PERBEDAAN SKOR NUMERASI	NILAI	0	0	0	100,00
	INDEKS IKLIM KEAMANAN	NILAI	81,75	71,78	9,97	87,80
	INDEKS IKLIM KEBHINEKAAN	NILAI	70,47	64,13	6,34	91,00
	INDEKS IKLIM INKLUSIVITAS	NILAI	66,28	62,45	3,83	94,22
	KEBUTUHAN FORMASI GURU ASN	PERSEN	0	0	0	100,00
	INDEKS DISTRIBUSI GURU	PERSEN	0	0	0	100,00
	PROPORSI PTK BERSERTIFIKAT	PERSEN	0	0	0	100,00
	PROPORSI PTK PENGGERAK	PERSEN	0	0	0	100,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024

Pemerintah daerah telah berupaya maksimal menerapkan standar mutu pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 dan berdasarkan data capaian dapat tercapai dengan relatif baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi diantaranya yaitu terkait mutu pendidikan yang harus lebih ditingkatkan agar mutu dan relevansi pendidikan di Provinsi Banten dapat bersaing dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Berdasarkan data capaian SPM, terdapat 2 (dua) standar yang perlu diperhatikan yaitu standar sarana dan prasarana serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang data capaiannya masih di bawah beberapa indikator standar yang lain.

2.2.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Urusan Kesehatan di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator pada Urusan Kesehatan. Pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan cakupan akses kesehatan bagi masyarakat Banten. Capaian pada indikator menunjukan capaian urusan kesehatan menunjukan ketercapaian target kinerja yang tinggi terutama pada penurunan jumlah kematian ibu yang tercatat dari 242 kematian ibu menurun menjadi 198, dan penurunan kematian bayi juga mengalami penurunan dari 1.670 menjadi 1.157 kematian bayi.

Jenis pelayanan dasar SPM bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

- Pelayanan dasar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana Provinsi; dan
- Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.

TABEL II.53
CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	PRESENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/POTENSI BENCANA PROVINSI (ORANG)	3.300	3.300	100 PERSEN	500	500	100 PERSEN
B	PRESENTASE PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK DAN BERESIKO PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI (ORANG)	170	170	100 PERSEN	300	300	100 PERSEN

Sumber: SPD Provinsi Banten, 2024

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan antara lain:

- Belum optimalnya kompetensi tenaga kesehatan;
- Masih adanya kesenjangan infrastruktur kesehatan antar kabupaten kota;
- Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pencapaian SPM kesehatan; dan

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan peninjauan kembali konsep layanan dasar, peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pentingnya kesehatan serta pemberlakuan reward dan punishment, pengalokasian anggaran harus menjadi skala prioritas serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki serta peningkatan partisipasi kesadaran masyarakat dalam peningkatan kesehatan.

2.2.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, seperti Tingkat Kemantapan Jalan, Kondisi Baik Jaringan Irigasi, Cakupan Pelayanan Air Minum dan lain-lain. Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar, lebih lanjut untuk capaian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup.

TABEL II.54

CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100,00 PERSEN
A	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA MELALUI PENYELENGGARAAN SPAM LINTAS KABUPATEN/KOTA				100,00 PERSEN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 PERSEN) JIKA ADA SPAM REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	YANG BELUM TERLAYANI	80,00 PERSEN
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	100,000	100,000	0	100,00 PERSEN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 PERSEN)	JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI	JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI/ TERPENUHI	MUTU YANG BELUM TERLAYANI/ TERPENUHI	20,00 PERSEN
1.	PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PEMENUHAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM KABUPATEN/KOTA	0	0	0	-
2.	PEMANTAUAN SPAM KAB/KOTA PEMENUHAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN/KOTA (PENDATAAN PENGHITUNGAN	8	8	0	-

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KEBUTUHAN DAN PERENCANAAN				
B	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA				100,00 PERSEN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 PERSEN) TIDAK ADA SPALD REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	YANG BELUM TERLAYANI	80,00 PERSEN
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	100.000	0	100.000	100,00 PERSEN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 PERSEN)				20,00 PERSEN
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH YANG TERLAYANI	JUMLAH YANG BELUM TERLAYANI	-
	KUANTITAS AKSES PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	-	-	-	-
	KUALITAS PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-

Sumber: SPD Provinsi Banten 2024

Tantangan terhadap penyelenggaraan SPM bidang pekerjaan umum mencakup beberapa hal, diantaranya:

- Untuk air minum dan air limbah, dimana dana untuk bidang air minum adalah dalam rangka proses persiapan SPAM Karian berupa pembelian lahan dan program pembinaan kabupaten/kota terkait bidang air minum dan air limbah. Sehingga pada tahun ini, pemerintah Provinsi Banten tidak melaksanakan pembangunan akses air minum dan air limbah secara langsung;
- Berdasarkan data BPS Provinsi Banten Tahun 2024, capaian akses air minum Provinsi Banten adalah 92,04 persen. Masih ada 7,96 persen yang belum mendapatkan akses air minum. Sementara itu, akses air minum yang memenuhi mutu yaitu telah terpenuhi minimal 60 liter per detik adalah 61,38 persen. Oleh karena itu masih terdapat tantangan dalam menyediakan layanan secara layak dan kontinu;
- Akses SPAM jaringan perpipaan masih rendah baru 11,9persen pada tahun 2024, jaringan perpipaan dilayani oleh PDAM pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten.
- Sebaran sumber air baku tidak merata dan masih terbatas, seperti di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang memiliki karakteristik permukiman perdesaan yang polanya tersebar. Sementara itu untuk kuantitas air baku yang dibutuhkan tidak mencukupi yang menyebabkan penurunan debit terhadap sumber air baku bagi PDAM yang pada musim kemarau;
- Pengelolaan SPAM perlu pemutakhiran sampai dengan tingkat rumah tangga, dimana kondisi yang ada pengelolaan SPAM di Provinsi Banten belum terintegrasi antar kabupaten/kota. Lebih lanjut perlunya pembentukan kelembagaan untuk menangani SPAM Regional secara inklusif;
- Penyelenggaraan SPM SPALD-T masih belum sesuai dengan target, capaian akses air limbah Provinsi Banten adalah 76,27 persen, masih

adanya gap sebesar 23,73 persen yang belum memiliki akses terhadap SPALD-T. Profil pengelolaan limbah saat ini masih dilakukan secara individu menggunakan tangki septik dan sejenisnya, hal ini dikarenakan belum tersedianya IPAL regional.

2.2.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut.

TABEL II.55

CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI					100 PERSEN
PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 PERSEN)		JUMAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	YANG BELUM TERLAYANI	80 PERSEN
A JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	ORANG	798	798	0	100 PERSEN
PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN					20 PERSEN
B JUMLAH MUTU (BARANG/JASA) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI	JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI/ TERPENUHI	MUTU YANG BELUM TERLAYANI/ TERPENUHI	100 PERSEN
1. REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	RUMAH	42	42	0	100 PERSEN
2. PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	RUMAH	176	176	0	100 PERSEN
FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH					-
YA/TIDAK ADA RELOKASI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH					
PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 PERSEN)		JUMAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	YANG BELUM TERLAYANI	-
C JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	ORANG	0	0	0	-
PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN					
D. JUMLAH MUTU BARANG/JASA/SDM		JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI/ TERPENUHI	MUTU YANG BELUM TERLAYANI/ TERPENUHI	-
1 FASILITASI PENGGANTIAN HAK ATAS PENGUASAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN	RUMAH	0	0	0	-

	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	SUBSIDI UANG SEWA	RUMAH	0	0	0	-
3	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH	0	0	0	-

Sumber: SPM Provinsi Banten, 2024

Tantangan terhadap penyelenggaraan spm bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman mencakup beberapa hal, diantaranya:

- Tahun 2023 tidak terjadi bencana lintas kabupaten/kota, namun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban atas usulan dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang melalui SK Bupati Lebak Nomor 360/Kep.672-BPBD/2022, SK Bupati Pandeglang Nomor 360/Kep.39-Huk/2022 serta SK Walikota Serang Nomor 978-3/698-DPKP/2023 perihal Surat Permohonan Usulan Bantuan Rumah Rusak/Roboh Akibat Bencana tanggal proposal 22 Mei 2023;
- Pembangunan rumah bagi korban bencana rumah rusak berat yang terdampak tsunami dan gempa bumi di Kabupaten Pandeglang dibangun sebanyak 62 unit rumah, sedangkan rumah bagi korban dibangun sebanyak 62 unit rumah, sedangkan rumah bagi korban bencana akibat pergerakan tanah di Kabupaten Lebak sebanyak 56 unit, lalu pembangunan rumah korban bencana banjir bandang dan putting beliung di Kota Serang sebanyak 2 unit rumah.

2.2.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari indikator, rasio penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan realisasi 100 persen.

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Dari tahun 2017 hingga tahun 2023, terdapat kasus tindak pidana sebanyak 7.392 kasus di Tahun 2023, namun penyelesaian tindak pidana di Provinsi Banten juga mengalami penurunan. Setiap tahunnya, jumlah tindak pidana lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana. Hal ini menjadi cerminan untuk meningkatkan penegakan hukum di Provinsi Banten.

SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) sub urusan, yaitu:

- Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Sub Urusan Kebakaran; dan
- Sub Urusan Bencana Daerah.

Pelaksanaan SPM yang dilakukan terhadap kewenangan provinsi mencakup standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada dengan target pencapaian 100 persen, meliputi: pelayanan kerugian materil yaitu berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran perda dan perkada. Kerugian materil terdiri atas:

1. Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5 persen (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan;
2. Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5 persen (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan;
3. Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang/berat.

Untuk lebih jelasnya terhadap pelaksanaan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah.

TABEL II.56
CAPAIAN SPM BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA				90,00 PERSEN
1	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI					80,00 PERSEN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80 PERSEN)		JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	YANG BELUM TERLAYANI	
	B. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI		2	2	0	100,00 PERSEN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20 PERSEN)					20,00 PERSEN
			JUMLAH MUTU BARANG/ JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/ JASA YANG TERSEDIA	JUMLAH MUTU BARANG/ JASA YANG BELUM TERSEDIA	20,00 PERSEN
	1. STANDAR SARANA PRASARANA SATPOL PP JUMLAH DAN KUALITAS BARANG DAN JASA: A. GEDUNG SERANG, B. KENDARAAN OPERASIONAL, C. PERLENGKAPAN OPERASIONAL	UNIT	98	98	0	100,00 PERSEN
	2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATPOL PP (SOP PENEGAKAN PERDA, TRANTIBUMLINMAS, PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN	DOKUMEN	19	19	0	100,00 PERSEN

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT				TOTAL PENCAPAIAN
	MASSA, PELAKSANAAN PENGAWALAN PEJABAT/ORANG- ORANG PENTING, PELAKSANAAN TEMPAT-TEMPAT PENTING, PELAKSANAAN OPERASIONAL PATROLI					
	3 STANDAR PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP DAN ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (JUMLAH DAN KUALITAS PERSONAL/SDM)	ORANG	385	385	0	100,00 PERSEN
	4 STANDAR PELAYANAN YANG TERKENA DAMPAK GANGGUAN TRANTIBUM AKIBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA (PELAYANAN KERUGIAN MATERIAL DAN PELAYANAN PENGOBATAN)	DOKUMEN	0	0	0	-
	5 WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH PELAYANAN KERUGIAN MATERIAL (KERUSAKAN AKIBAT PENEGAKAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA, RUSAK RINGAN, RUSAK SEDANG, RUSAK BERAT)	ORANG	0	0	0	-
	6 WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH PELAYANAN PENGOBATAN (PERTOLONGAN PERTAMA YANG TERKENA CIDERA FISIK RINGAN AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DAN DITINDAKLANJUTI DENGAN MEMBAWA KE RUMAH SAKIT/PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BILA TERKENA CIDERA FISIK SEDANG DAN/ATAU BERAT	ORANG	0	0	0	-

Sumber: SPM Provinsi Banten, 2024

2.2.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Jenis pelayanan dasar bidang sosial meliputi: i) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti; ii) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; iii) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; iv) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan v) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi. Terkait 5 (lima) hal tersebut berikut capaian SPM bidang sosial.

TABEL II.57
CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI DALAM PANTI	30	30	100 PERSEN
2	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI DALAM PANTI	25	25	100 PERSEN
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TELANTAR DI DALAM PANTI	60	60	100 PERSEN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	60	60	100 PERSEN
2.	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	3.840	3.840	100 PERSEN

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2024

Terhadap pelaksanaan SPM bidang sosial terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk memperkuat pelaksanaan SPM bidang sosial, meliputi:

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani sesuai dengan kewenangan daerah provinsi;
- Pemerintah Provinsi Banten baru memiliki 2 (dua) UPTD yang melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yaitu UPTD Perlindungan Sosial dan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial;
- Perlunya penguatan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan dan perawatan klien;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga SDM.

2.3 KERJASAMA DAERAH

Pembangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi pemerintah disebabkan pembangunan membutuhkan porsi anggaran yang besar, untuk itu skema pembiayaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga target pembangunan pemerintah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Secara regulasi, kerjasama daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan pihak Ketiga; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Untuk skema pembiayaan pembangunan Non-APBD, Pemerintah Provinsi Banten memformulasikan bagaimana konsep pembangunan yang direncanakan tidak serta merta mengandalkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu melalui Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL/CSR) Perusahaan ataupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kerjasama dengan Badan Usaha diprioritaskan terhadap pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya memerlukan pendanaan besar yang tidak dapat terselesaikan dengan sistem APBD *multiyears*, untuk itu tentunya Kerja sama ini harus saling menguntungkan para pihak dengan tetap mengacu kepada terlayaninya layanan terhadap masyarakat Banten. Skema Kerjasama dimaksud dapat berupa usulan yang difasilitasi oleh Pemerintah ataupun kerjasama pemanfaatan barang milik daerah (aset). Beberapa rencana kerjasama dengan badan usaha sebagai mana tabel berikut.

TABEL II.58

DAFTAR KERJASAMA DAERAH DI PROVINSI BANTEN

NO	PROYEK KERJASAMA	MODEL KERJASAMA	RENCANA PEMBIAYAAN
1	SPAM REGIONAL SINDANGHEULA	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)*	2,1 TRILYUN (RENCANA RISPAM)
2	SPAM KARIAN BARAT	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)*	2,2 TRILYUN (RENCANA RISPAM)
3	SPAM KARIAN TIMUR	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)*	2,3 TRILYUN (RENCANA RISPAM)
4	STADION INTERNASIONAL BANTEN	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)* PEMANFAATAN ASET	811.839.538.604 MILYAR (PRC KPBU BIB)
5	TAMAN HUTAN RAKYAT	PEMANFAATAN ASET	206.490.653.750 MILYAR (RKO INVESTASI TAHURA)
6	TPST REGIONAL MAJA	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)* PEMANFAATAN ASET	2,7 TRILYUN (PROYEKSI)
7	RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)* PEMANFAATAN ASET	300 MILYAR (ASUMSI)
8	PELABUHAN PERIKANAN LABUAN	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)* PEMANFAATAN ASET	1 TRILYUN (ASUMSI)
9	PELABUHAN PERIKANAN CIKERUH BINUANGEN	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)* PEMANFAATAN ASET	1 TRILYUN (ASUMSI)
10	PENERANGAN JALAN UMUM	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)*	1,7 TRILYUN (ASUMSI)
11	JEMBATAN FLYOVER KEMANG-KOTA SERANG	KPBU *(SOLICITED/UNSOLICITED)*	400 MILYAR (ASUMSI)

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

Dukungan kerja sama dengan pihak ketiga terasa efektif manfaatnya khususnya saat Banten mengalami musibah bencana alam maupun pada saat penanggulangan Covid-19 pada Tahun 2021 melalui Forum CSR yang dasar pembentukannya yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kemitraan Bina Lingkungan/ *Corporate Social Responsibility* (TJSKBL/CSR).

Kedepan, pengoptimalan kerja sama daerah akan dirasakan bertambah penting, seiring dengan makin kompleksnya dinamika pembangunan dan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber tidak hanya dari APBD dan APBN tapi juga yang bersumber dari pihak ketiga. Saat ini yang belum terlaksana diantaranya adalah kerja sama dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri yang masih bersifat sporadis.

2.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memainkan peranan yang penting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD disamping pajak dan retribusi, sehingga pengelolaan BUMD membutuhkan penanganan yang serius dan profesional berdasarkan prinsip *Good Coorporate Government* (GCG) yang meliputi: *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*.

Secara regulasi, keberadaan BUMD diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang kehadirannya didasarkan melalui analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan usaha. Lebih jauh dari itu BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten dan juga potensi ekonomi daerah yang begitu pesat, sudah seharusnya diantisipasi melalui pembentukan badan usaha milik daerah baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diselaraskan pada potensi dan karakteristik daerah seperti bidang infrastuktur, transportasi, air minum, pariwisata, keuangan, pertambangan dan bidang aneka usaha. Saat ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki 4 (empat) BUMD, yaitu: PT. Banten Global Development, PT. Jamkrida Banten, PT. Agrobisnis Banten Mandiri, dan PT. Bank Banten, Tbk.

2.4.1 PT. BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT

Perusahaan Daerah Banten Global Development didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23). Tujuan pembentukan PT. Banten Global Development adalah untuk:

- Pengembangan usaha baru yang diawali dengan pembentukan anak perusahaan dalam bentuk sub holding;
- Menjalin kerjasama dengan mitra penyandang dana yang mempunyai keahlian tertentu untuk pengembangan usaha; dan
- Mendapat penugasan khusus.

2.4.2 PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN (PT. JAMKRIDA BANTEN)

PT. Jamkrida Banten merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan. PT Jamkrida Banten hadir sebagai implementasi atas regulasi dan apresiasi Pemerintah untuk para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah, Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Merespons regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit

Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten untuk mendukung pembangunan ekonomi di bidang Koperasi dan UMKM. Pembentukan Jamkrida Banten dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usaha sehingga Koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun tujuan pembentukan Jamkrida Banten adalah:

- Memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
- Memberdayakan Koperasi dan UMKM;
- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- Menjaga stabilitas perekonomian melalui terciptanya peluang usaha yang tangguh dan berdaya saing; dan
- Meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPD, Bank Umum dan BPR.

Komposisi saham PT. Jamkrida Banten adalah 51 persen (Lima puluh satu persen) Pemerintah Provinsi Banten dan pemegang saham lainnya paling tinggi 49 persen. Yang dimaksud pemegang lainnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Sejak Oktober 2014-2015 Jamkrida Banten hanya memberikan penjaminan terhadap lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang konvensional, namun dengan memperhatikan perkembangan dan kesempatan pasar yang ada, pada Tahun 2016 memutuskan untuk membuka Unit Usaha Syariah.

2.4.3 PT. AGROBISNIS BANTEN MANDIRI

PT. Agrobisnis Banten Mandiri (perseroda), berkedudukan di Kota Serang Banten, dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Agrobisnis Banten Mandiri No. 13 tanggal 20 November 2020, dibuat dihadapan Arjamalis Roswar, S.H., SpN., MH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0063115.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 297 Tahun 2019 tentang Penetapan PT. Agrobisnis (Perseroda).

a. Kegiatan usaha utama bidang agrobisnis pangan, pertanian, perternakan, perikanan, perkebunan, pasar, hulu maupun hilir agrobisnis dengan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
    - Melakukan usaha pertanian meliputi kegiatan usaha industri penggilingan beras, kemitraan bersama petani komoditi pangan serta pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan;
    - Melakukan usaha bidang pertanian (tanaman pangan, tanaman industri, tanaman hortikultura, perikanan dan peternakan) serta kehutanan meliputi kegiatan antara lain pembukaan/penyiapan

lahan, pembibitan, pengolahan dan perdagangan hasil pertanian dan kehutanan;

- Melakukan usaha dalam bidang-bidang lainnya dan kemitraan yang terkait dengan agrobisnis, agroindustri, pusat distribusi (Pasar Induk) dan menghadirkan tataniaga baru dibidang agrobisnis;
- Melakukan usaha peternakan sapi perah, sapi potong, domba, kambing, unggas dalam sebuah kawasan usaha ternak dan peternakan rakyat, industri pengolahan susu dan rumah potong unggas; dan
- Mengembangkan *e-commerce*, *start-up* agrobisnis, komoditi pangan, pergudangan dan kebutuhan retail pangan.

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung usaha perseroan:

- Melakukan kegiatan pengiriman, distribusi dan transportasi sehubungan dengan pembelian hasil pertanian, perkebunan, pelabuhan ternak dan penjualan hasil pertanian dan perkebunan;
- Melakukan kegiatan pembelian dan penjualan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, membangun kawasan usaha tani dan ternak yang terpadu;
- Melakukan kerjasama bersama petani dan peternak plasma dalam membangun kebun dan kandang plasma (kemitraan) yang menunjang kegiatan kebun dan kandang utama;
- Menyediakan jasa kepada pihak lain dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Perseroan;
- Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir di atas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- Kegiatan usaha yang dijalankan: Moderen Rice Milling Unit, Industri Pengolahan Susu, Rumah Potong Unggas, Perdagangan telur ber-NKV, Pusat Distribusi Pangan, pergudangan dan rantai pasok dingin.

2.4.4 PT. BANK BANTEN, Tbk

Selain tiga BUMD tersebut yang langsung dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, melalui PT. BGD Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Bank Daerah yaitu PT. Bank Banten, Tbk. Keberadaan Bank Banten didasarkan pada Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang RPJMD 2012-2017 Misi ke 5 item 29 yaitu peningkatan rasio kemandirian ekonomi masyarakat melalui pembentukan Bank Banten yang ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT. Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten disingkat Bank Banten sebesar Rp950 Milyar.

Selanjutnya pada Tahun 2020, terbit Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten dengan jumlah penyertaan sebesar Rp1,551 triliun. Pada

Tahun 2023, status kepemilikan Pemerintah Provinsi Banten terhadap Bank Banten, tidak lagi melalui PT. BGD setelah disepakatinya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.

Kondisi permodalan Bank Banten saat ini tergolong sehat, dengan modal inti yang kuat dan rasio kecukupan modal (CAR) yang jauh di atas ketentuan regulator. Namun, Bank Banten masih membutuhkan suntikan modal untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun yang ditetapkan oleh POJK Nomor 12 Tahun 2020 yang mewajibkan modal inti minimum bank daerah, sementara modal inti Bank Banten pada tahun 2024 mencapai Rp1,27 triliun dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 42,99 persen.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus memperkuat permodalan Bank Banten, salah satunya melalui usulan penambahan penyertaan modal daerah (PMD) untuk Bank Banten salah satunya melalui penginbrengan aset berupa tanah dan bangunan untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum.

Selain itu Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan Langkah konsolidasi melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank Banten dan Bank Jatim. Proses KUB ini sudah mencapai 75 persen sehingga Bank Banten bisa memenuhi ketentuan modal minimal sebesar Rp3 triliun supaya bisa beroperasi secara sehat.

Selain PT. BGD, PT. Jamkrida, PT. ABM, dan PT. Bank Banten, Tbk, Pemerintah Provinsi Banten juga memiliki saham pada beberapa lembaga seperti Bank BJB, Bank BJB Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2.5 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.5.1 KINERJA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020-2024

Keuangan Daerah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya pada Pasal 2 dalam peraturan yang sama, pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kinerja keuangan masa lalu dapat dilakukan analisis terhadap komponen pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah, dimana komponen yang disebutkan tersebut merupakan bagian dari postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan melakukan analisis tersebut maka dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah, analisis ini diperlukan untuk menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan dimasa mendatang dengan memperhatikan kebijakan dan kondisi aktual yang dihadapi.

2.5.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

Perkembangan APBD Provinsi Banten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) disajikan dalam tabel di bawah, dimana tren nilai pendapatan mengalami fluktuasi, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung turun. Kontribusi terbesar PAD Provinsi Banten berasal dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel di bawah ini

TABEL II.59
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2020-2024

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN (RP)				
		2020	2021	2022	2023	2024 *(AUDITED)*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**10.333.314.953.438**	**11.623.305.653.595**	**11.205.654.716.542**	**11.576.544.862.694**	**12.404.001.670.529**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.906.535.160.352**	**7.010.370.228.687**	**8.203.139.526.542**	**8.514.348.394.263**	**9.024.826.805.362**
4.1.01	PAJAK DAERAH	5.659.646.083.009	6.670.533.202.862	7.777.071.455.103	8.078.043.383.083	8.352.400.102.856
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	8.728.828.617	10.965.757.549	18.382.024.050	16.652.438.790	218.989.986.238
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	56.590.414.077	59.806.567.111	56.731.718.538	61.808.501.616	51.909.734.789
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	181.569.702.659	271.374.701.067	350.955.178.897	357.848.069.874	181.517.886.509
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**4.415.060.881.580**	**4.607.412.424.908**	**2.996.963.150.000**	**3.056.402.268.431**	**3.372.744.305.167**
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.415.060.881.580	4.607.412.424.908	2.996.963.150.000	3.056.402.268.431	3.372.744.305.167
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11.718.911.506**	**5.523.000.000**	**5.552.040.000**	**5.794.200.000**	**6.430.560.000**
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	11.718.911.506	5.523.000.000	5.552.040.000	5.794.200.000	6.430.560.000
4.3.02	PENDAPATAN LAINNYA	-	-	-	-	-
5	**BELANJA DAERAH**	**9.879.309.897.147**	**11.660.630.540.289**	**11.278.684.481.863**	**11.814.131.569.478**	**11.912.996.918.184**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.470.866.617.687**	**6.923.405.610.132**	**6.391.393.772.998**	**6.752.118.691.378**	**7.175.230.271.995**
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	1.909.615.890.229	2.046.698.156.432	2.209.785.094.829	2.217.414.388.030	2.388.090.777.391
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.177.275.344.302	2.789.457.273.555	3.601.299.192.251	3.636.098.711.026	3.765.424.542.862
5.1.03	BELANJA BUNGA	9.883.641.161	1.597.924.714	1.580.752.066	1.283.803.134	1.029.672.929
5.1.05	BELANJA HIBAH	2.310.395.041.998	2.021.877.447.725	532.605.875.892	849.703.886.309	977.187.254.961
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	73.694.096.000	64.285.407.706	46.153.924.826	37.654.166.987	42.598.024.476
5.2	**BELANJA MODAL**	**994.235.671.496**	**1.297.233.609.176**	**1.660.220.498.204**	**1.523.807.458.985**	**1.132.361.153.680**
5.2.01	BELANJA MODAL TANAH	93.290.219.770	174.183.973.807	197.888.894.372	71.693.115.600	46.093.332.880
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	297.649.649.342	150.367.961.733	308.735.699.934	454.691.367.999	337.794.670.508
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	513.516.126.281	525.842.115.961	830.046.692.228	528.016.421.780	172.595.090.290
5.2.04	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	105.403.790.125	414.505.261.276	297.207.944.294	438.106.692.116	517.319.896.752
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	35.446.799.979	38.390.902.929	34.298.567.376	30.953.090.670	45.525.305.051
5.2.06	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	2.340.092.000	3.985.242.417	-	247.455.900	3.003.058.721
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**576.952.894.419**	**12.043.137.548**	**35.054.239.840**	**350.725.160**	**75.000.000**
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	576.952.894.419	12.043.137.548	35.054.239.840	350.725.160	75.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.837.234.713.545**	**3.427.948.183.436**	**3.192.015.770.821**	**3.537.854.692.954**	**3.605.330.492.510**
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	1.335.384.713.545	3.199.357.087.892	3.077.622.167.473	3.346.744.899.035	3.386.606.564.438
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	501.850.000.000	228.591.095.544	114.393.603.851	191.109.793.919	218.723.928.072
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	**454.005.056.291**	**(37.324.886.694)**	**(73.029.765.321)**	**(237.586.705.784)**	**491.004.752.345**

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN (RP)				
		2020	2021	2022	2023	2024 *(AUDITED)*
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**227.227.501.301**	**607.430.207.418**	**541.971.794.106**	**324.461.765.949**	**(51.622.672.871)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**1.786.227.501.301**	**681.382.914.202**	**570.054.749.612**	**462.959.498.985**	**86.875.060.165**
6.1.01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	955.241.169.611	681.382.914.202	570.054.749.612	462.959.498.985	86.875.060.165
6.1.02	PINJAMAN DALAM NEGERI	830.986.331.690	-	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.561.000.000.000**	**73.952.706.787**	**28.082.955.306**	**136.497.733.036**	**138.497.733.036**
6.2.02	PENYERTAAN MODAL DAERAH	1.561.000.000.000	65.000.000.000	5.000.000.000	-	-
6.2.03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO	-	8.952.706.787	23.082.955.306	136.497.733.036	138.497.733.036
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**681.232.557.592**	**570.105.320.721**	**468.942.026.785**	**86.875.060.165**	**439.382.079.474**

Sumber: Diolah Oleh BPKAD, 2025

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan sebesar turun sebesar -0,45 persen. Penggunaan SILPA terlihat menurun tiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menyebabkan nilai rata-rata pertumbuhan penggunaan SILPA menurun sebesar -0,36 persen.

Rasio kemandirian Provinsi Banten menunjukkan angka 1,33 hingga 2,75. Angka ini termasuk angka yang tinggi, artinya Pemerintah Daerah Provinsi Banten memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dalam membiayai belanja daerahnya sendiri menggunakan PAD. Rasio kemandirian Provinsi Banten ditunjukkan pada tabel berikut.

TABEL II.60
RASIO KEMANDIRIAN DAERAH TAHUN 2020-2024

TAHUN ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN DARI SUMBER DANA EKSTERN (RP)	REALISASI PAD (RP)	RASIO KEMANDIRIAN	KEMAMPUAN KEUANGAN	POLA HUBUNGAN
2020	4.425.892.815.002	5.905.535.125.786	133,42	TINGGI	DELEGATIF
2021	4.612.935.424.995	7.010.570.228.667	151,97	TINGGI	DELEGATIF
2022	3.003.518.190.000	8.255.139.526.542	275,21	TINGGI	DELEGATIF
2023	3.062.196.408.431	8.514.168.104.250	278,05	TINGGI	DELEGATIF
2024	3.375.174.862.167	9.024.828.283.686	267,07	TINGGI	DELEGATIF

Sumber: LKPD Provinsi Banten, 2024

2.5.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, unsur laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca daerah memberi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang diakui dan dicatat pada saat neraca tersebut dikeluarkan pada tanggal tertentu. Neraca daerah menjadi unsur penting bagi Pemerintah Daerah baik dalam hal mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dana ekuitas dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

TABEL II.61
NERACA PROVINSI BANTEN TAHUN 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	**ASET**					
	– ASET LANCAR	842.258	433.762	556.290	700.500	249.358
	– INVESTASI JANGKA PANJANG	1.997.105	2.236.713	1.857.848	1.808.490	1.787.247
	– ASET TETAP	15.280.801	16.640.833	17.333.391	17.988.315	17.831.554
	– ASET LAINNYA	259.094	371.367	354.736	380.621	612.197
	JUMLAH ASET	**18.379.258**	**19.682.675**	**20.102.265**	**20.877.926**	**20.480.356**
II	**KEWAJIBAN**					
	– KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.177.295	693.503	853.564	855.159	774.061
	– KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	830.986	787.409	659.452	383.657	521.955
	JUMLAH KEWAJIBAN	**2.008.281**	**1.480.912**	**1.513.016**	**1.238.816**	**1.296.016**
III	**EKUITAS**					
	– EKUITAS	16.370.977	18.001.763	18.589.248	19.639.113	19.184.343
	JUMLAH EKUITAS	**16.370.977**	**18.001.763**	**18.589.248**	**19.639.113**	**19.184.343**
IV	**JUMLAH KEWAJBAN DAN EKUITAS**	**18.379.258**	**19.682.675**	**20.102.264**	**20.877.929**	**20.480.359**

Sumber: Data Olah Bappeda, 2025

Berdasarkan neraca tersebut, gambaran analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas sebagai berikut:

a. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain adalah Rasio Lancar dan Rasio Cepat. Rasio lancar digunakan untuk mengetahui kesanggupan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva atau aset lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Makin besar perbandingan aktiva atau aset lancar menutupi kewajiban lancar, semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Untuk mengetahui rasio lancar dapat membandingkan aset lancar dengan liabilitas atau kewajiban lancar. Sedangkan rasio cepat diketahui dengan membandingkan aset lancar dikurangi persediaan dengan liabilitas atau kewajiban lancar. Rumus perhitungan rasio lancar dan rasio cepat adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{Aset\ Lancar}{Liabilitas\ Lancar}$$

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{Aset\ Lancar - Persediaan}{Liabilitas\ Lancar}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan pada tabel di bawah, dapat diketahui bahwa rasio lancar Provinsi Banten terbilang cenderung mengalami penurunan, kecuali di Tahun 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 0,776. Menurunnya rasio lancar tersebut disebabkan oleh menurunnya jumlah aset lancar tiap tahunnya dan meningkatnya persediaan. Rasio lancar terendah dihasilkan oleh Tahun 2023 yaitu sebesar 0,322. Hal ini disebabkan oleh jumlah liabilitas lancar atau kewajiban jangka pendek yang menurun. Apabila melihat rasio lancar dari Tahun 2020 hingga 2023, Pemerintah Provinsi Banten dianggap memiliki masalah pada kondisi keuangan yaitu mengalami penurunan kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.

Tabel II.62
RASIO LIKUIDITAS TAHUN 2020-2023

RASIO LIKUIDITAS	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
RASIO LANCAR	[illegible]	0,776	[illegible]	0,322
RASIO CEPAT	[illegible]	0,676	[illegible]	0,158

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2024

b. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas atau modal. Rasio hutang terhadap aset dapat diketahui dengan membandingkan total hutang dengan total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas atau modal dapat diketahui dengan membandingkan total hutang dengan total modal. Rumus perhitungan kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Aset} = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$$

Rasio Hutang Terhadap Ekuitas = $\frac{Total\ Hutang}{Total\ Modal}$

Rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

TABEL II.63

ANALISIS RASIO SOLVABILITAS TAHUN 2020-2023

URAIAN	TAHUN			
RASIO SOLVABILITAS	2020	2021	2022	2023
RASIO HUTANG TERHADAP ASET	0,109	0,080	0,073	0,063
RASIO HUTANG TERHADAP EKUITAS	0,122	0,094	0,081	0,067

Sumber, Diolah Oleh Bappeda, 2024

Semakin kecil nilai rasio hutang terhadap modal menujukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dimana tidak tergantung pada pembiayaan dari pihak lain. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa angka rasio hutang terhadap modal dalam kurun waktu 5 tahun tidak jauh dari nilai rasio hutang terhadap aset. Kemudian pada Tahun 2020 hingga 2023 rasio hutang terhadap modal mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini berarti Provinsi Banten telah berupaya untuk mewujudkan daerah yang mandiri yang ditandai dengan menurunnya jumlah hutang yang dimiliki.

2.5.2 KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode Tahun 2026-2030.

2.5.2.1 PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rincian pendapatan daerah diperoleh menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Mengacu pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah terbagi dalam tiga jenis yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

   Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

   Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

   1) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
   2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
8) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
9) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
10) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
11) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
12) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Provinsi Banten;
2) Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada Tahun 2023;
3) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Provinsi Banten; dan
4) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

b. Pendapatan Transfer yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (SDA). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke pemerintah pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi provinsi/kabupaten/kota;
3) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten;
4) Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian lembaga.

2.5.2.2 BELANJA DAERAH

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;

d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
b. Belanja transfer bantuan keuangan untuk pemerintah daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;
c. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

2.5.2.3 PEMBIAYAAN

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan SILPA Tahun 2020-2024 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Provinsi Banten di bawah, dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari Tahun 2025 hingga 2030 mencapai 0,96 persen. Apabila dilihat lebih rinci pada masing-masing jenis pendapatan, dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 0,59 persen dengan rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 0,90 persen dan retribusi daerah sebesar 10,55 persen. Pada pendapatan transfer Provinsi Banten diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,34 persen. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,03 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL II.64
PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026-2030

KODE	URAIAN	TAHUN					
		BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**12.404.001.670.529**	**10.878.540.139.607**	**11.425.301.739.839**	**12.008.104.024.505**	**12.629.878.502.196**	**13.293.826.558.742**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**9.024.826.805.362**	**7.237.306.716.126**	**7.649.469.036.705**	**8.092.694.071.434**	**8.569.729.181.698**	**9.083.584.794.523**
4.1.01	PAJAK DAERAH	8.552.409.105.826	6.760.711.394.286	7.161.951.325.922	7.584.858.783.078	8.044.541.849.603	8.545.486.851.456
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	206.080.388.258	324.172.775.837	341.544.656.807	358.420.260.592	372.139.647.914	381.321.285.164
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	81.909.734.730	64.011.445.900	66.129.869.446	68.106.849.333	70.288.269.359	72.468.208.564
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	181.517.886.508	78.406.100.000	79.843.986.530	81.307.111.480	82.790.015.380	84.298.127.071
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.372.744.305.167**	**3.634.776.022.000**	**3.769.262.735.000**	**3.908.725.456.000**	**4.053.348.298.000**	**4.203.322.185.000**
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.372.744.305.167	3.634.776.022.000	3.769.262.735.000	3.908.725.456.000	4.053.348.298.000	4.203.322.185.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.430.560.000**	**6.457.401.481**	**6.569.968.134**	**6.684.497.071**	**6.801.022.496**	**6.919.579.219**
4.3.03	PENDAPATAN HIBAH	6.430.560.000	6.457.401.481	6.569.968.134	6.684.497.071	6.801.022.496	6.919.579.219
5	**BELANJA**	**11.912.996.918.184**	**10.844.993.265.500**	**11.199.842.783.826**	**11.790.824.411.769**	**13.064.466.537.742**	**13.432.357.322.937**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.175.230.271.995**	**7.548.751.865.247**	**7.870.359.577.465**	**8.124.971.144.386**	**9.173.265.114.141**	**8.987.702.708.242**
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	2.388.030.777.344	3.692.500.081.100	3.714.754.024.000	3.828.122.673.000	3.929.825.948.000	4.021.921.897.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	3.765.424.592.882	3.357.382.850.282	3.503.303.239.228	3.632.058.019.535	3.849.620.067.997	4.262.894.407.129
5.1.04	BELANJA BUNGA	1.029.672.338					
5.1.05	BELANJA HIBAH	977.737.244.863	482.313.933.862	587.246.697.066	617.654.047.694	1.350.204.053.268	651.624.185.558
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	42.988.038.479	30.465.000.000	44.818.666.177	47.136.203.157	49.614.109.926	52.251.518.230
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.132.361.153.680**	**1.094.272.889.834**	**980.621.492.200**	**1.052.117.618.949**	**1.000.665.589.976**	**1.248.368.443.451**
5.2.01	BELANJA MODAL TANAH	46.092.422.886	158.625.286.680	244.559.838.657	256.897.152.458	141.268.558.929	284.614.258.292
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	237.794.670.658	146.024.270.475	219.586.816.423	230.403.461.450	220.650.881.608	302.375.217.749
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	172.290.689.296	387.376.382.972	203.397.409.826	213.653.068.313	308.066.909.707	272.389.165.613
5.2.04	BELANJA MODAL JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	537.211.896.762	372.817.061.188	245.657.338.744	289.672.111.237	238.335.606.643	343.960.147.401
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	35.923.905.668	45.646.907.370	32.481.425.859	34.165.928.465	55.961.909.251	37.851.548.284
5.2.06	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	3.033.038.321	0	5.320.012.461	5.395.480.425	5.889.602.768	8.204.019.122
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**75.000.000**	**52.022.832.817**	**66.334.800.356**	**69.769.588.086**	**66.000.000.000**	**69.523.054.867**
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	75.000.000	52.022.832.817	66.334.800.356	69.769.588.086	66.000.000.000	69.523.054.867

KODE	URAIAN	TAHUN					
		BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**3.605.330.492.510**	**2.149.945.686.602**	**2.282.226.913.605**	**2.543.666.060.348**	**2.824.535.833.625**	**3.126.763.116.377**
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	3.386.606.764.438	2.001.385.686.602	2.096.726.913.605	2.296.066.060.348	2.515.035.833.625	2.755.363.116.377
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	218.723.728.072	148.560.000.000	185.500.000.000	247.600.000.000	309.500.000.000	371.400.000.000
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	**491.004.752.245**	**33.546.874.107**	**225.758.956.013**	**217.579.612.736**	**(434.588.035.546)**	**(138.530.764.195)**
6	**PEMBIAYAAN**	**(51.622.672.871)**	**(33.546.874.107)**	**(225.758.956.013)**	**(217.579.612.736)**	**434.588.035.546**	**138.530.764.195**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**86.875.060.165**	**154.950.858.929**	**162.738.777.023**	**170.918.120.300**	**579.508.562.010**	**188.530.764.195**
6.1.01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	86.875.060.165	154.950.858.929	162.738.777.023	170.918.120.300	179.508.562.010	188.530.764.195
6.1.02	PENCAIRAN DANA CADANGAN	-				400.000.000.000	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**138.497.733.036**	**188.497.733.036**	**388.497.733.036**	**388.497.733.036**	**144.920.526.464**	**50.000.000.000**
6.2.01	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			200.000.000.000	200.000.000.000		
6.2.02	PENYERTAAN MODAL DAERAH		50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6.2.03	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO	138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	138.497.733.036	94.920.526.464	0
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN**	**439.382.079.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Proyeksi Bapenda dan BPKAD, Diolah Oleh Bappeda, 2025

2.5.3 SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana pengembangan pusat pertumbuhan wilayah sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dapat dilaksanakan melalui beberapa skema sumber pembiayaan melalui:

a. Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yag telah direncanakan, sehingga diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya;
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi;
c. Pendanaan melalui pemberian insentif atas keterlibatan pelaku pembangunan yang berpartisipasi dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
d. Pendanaan melalui pemanfaatan aset sebagai bentuk dukungan kerjasama ekonomi lainnya guna mencapai efisiensi dan efektifitas serta penugasan penuh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk dapat melakukan kerja sama secara *Business-to-Business* (B2B) dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan;
e. Pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP) sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik;
f. Pendanaan Hibah atau *Grant*, pembiayaan melalui utang yang diperoleh dari Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri melalui perjanjian pinjaman yang bersumber dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor;
g. Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), suatu dana yang disediakan oleh suatu perusahaan sebagai bentuk bagian tanggung jawab atau komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri maupun komunitas atau masyarakat.

   Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung

Jawab Sosial Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disebut TJSKBL Perusahaan adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;

h. Pendanaan terkait pemanfaatan ruang, suatu alternatif pendanaan yang dilakukan berkaitan terhadap pemanfaatan ruang di daerah melalui beberapa skema seperti:
   - Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), suatu skema pendanaan terhadap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Gubernur kepada pemohon yang ingin memanfaatkan ruang pada batasan sub-zona tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   - Peralihan hak membangun atau Transfer Development Rights (TDR), adalah suatu instrumen pendanaan pembangunan yang sekaligus dapat digunakan sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang mendorong pengalihan hak atas membangun dari suatu kawasan yang ingin dipertahankan atau dilindungi kepada kawasan yang direncanakan untuk dapat dikembangkan;
   - Kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), skema ini merupakan bentuk praktik baik yang telah dilakukan oleh Jakarta dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana publik yang dibiayai oleh para pengembang sebagai bentuk imbalan atau kompensasi terhadap pelampauan KLB yang lebih dari standar yang diizinkan.

i. Pendanaan berbasis iklim atau *Green Climate Fund* (GCF), suatu skema pembiayaan yang bertujuan untuk dapat mendukung upaya mitigasi maupun mengatasi penyebab dan dampak dari perubahan iklim, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca serta peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, selain itu pendanaan berbasis iklim ini juga mencakup berbagai skema seperti pasar kabon. Skema ini seperti yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia atau *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF);

j. Pendanaan pinjaman daerah, digunakan sebagai bentuk alternatif terhadap skema sumber pembiayaan pembangunan melalui utang daerah dalam suatu perjanjian pinjaman yang dapat berasal dari lembaga keuangan bank dan non-bank maupun lembaga lainnya;

k. Dana umat dan filantropi, aktivitas berbagai dukungan dan sumber daya dengan sukarela yang dilakukan secara terorganisir untuk menangani kepentingan masyarakat untuk mencapai keadilan sosial secara inklusif serta pembangunan yang berkelanjutan.

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan dapat dilihat dari gap antara target dalam dokumen perencanaan dengan realisasi yang terjadi. Pembangunan akan dinilai mengalami permasalahan ketika realisasi capaian tidak sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Dalam dokumen perencanaan jangka menengah, target pembangunan lebih diarahkan kepada ukuran nilai yang bersifat makro sebagai proksi mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat seperti halnya Indeks Modal Manusia (IMM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, dan Derajat Ketimpangan (Rasio Gini), serta indikator makro lainnya.

Penentuan permasalahan pembangunan juga dapat dilakukan berdasarkan komparasi capaian dengan daerah lainnya sebagai bagian dari instrumen pengukuran kinerja. Dengan instrumen ini, kinerja pemerintahan tidak sebatas dinilai dari pencapaian target indikator pembangunan namun lebih jauh dilakukan dengan membandingkannya dengan daerah lainnya atau pun rata-rata capaian di tingkat nasional.

2.6.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

2.6.1.1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BELUM OPTIMAL

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan salah satu cara untuk mewujudkan negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Tata kelola pemerintah diukur dengan capaian skor Indeks Reformasi Birokrasi, dimana era saat ini tidak hanya berfokus pada hal administratif saja namun lebih diarahkan pada kepuasan masyarakat melalui berbagai kolaborasi pelayanan publik, birokrasi dinamis, adaptif, hingga akselerasi terhadap pelaksanaan birokrasi berdampak berbasis digital sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia. Peningkatan reformasi birokrasi bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik berkualitas *good and clean governance* serta layanan *berbasis e-government.*

Selain Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), indikator yang lain adalah Indeks Reformasi Hukum (IRH). Pada Tahun 2024 IRH Pemerintah Provinsi Banten mencapai nilai sebesar 99,40 poin, meningkat sebesar 1,76 poin dibandingkan Tahun 2023 sebesar 97,64 poin, dan meningkat 22,20 lebih besar dibandingkan Tahun 2022 yang hanya sebesar 77,20. Hasil penilaian berdasarkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), dapat ditarik simpulan dari capaian ini artinya semua regulasi yang diproduksi oleh Pemerintah Provinsi Banten telah sesuai dengan Ketentuan dan memenuhi Indeks Reformasi Hukum, serta pelaksanaan reformasi hukum di Provinsi Banten telah dapat mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Namun demikian untuk dapat mencapai nilai yang sempurna masih perlu peningkatan terutama dalam aspek area pemenuhan, sebagaimana surat Kemkum HAM Nomor PPH-OT.03.03.394 tanggal 11 November 2024 perihal hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 merekomendasikan agar perlu adanya konsistensi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Pada kategori nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sejak Tahun 2021 sebesar 3,15 naik lambat pada Tahun 2022 sebesar 3,33, kemudian pada Tahun 2023 predikat SPBE di Provinsi Banten berkategori baik dengan nilai sebesar 3,39 dan pada Tahun 2024 dengan nilai 3,47.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) diukur berdasarkan 6 (enam) aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Berdasarkan data dari Kementerian PAN dan RB, IPP Provinsi Banten Tahun 2024 nilainya kategori B, sama dengan nilai rata-rata IPP nasional yaitu 4,02 atau masih dalam kategori A-.

Pada Tahun 2023 nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Banten sebesar 77,01 naik pada Tahun 2024 menjadi sebesar 77,93. Pada Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) berdasarkan Survei Penilaian Integritas eksternal oleh KPK Tahun 2023 sebesar 3,2 turun pada Tahun 2024 menjadi sebesar 2,76, kemudian dilihat dari capaian AKIP pada 5 (lima) tahun terakhir sejak Tahun 2018-2024 berkategori "B" dengan 3,90 masih di bawah rata-rata nilai AKIP provinsi lain di Pulau Jawa. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut dapat terlihat perlunya perbaikan dan peningkatan tata kelola Pemerintah Provinsi Banten.

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan disebabkan oleh masih perlunya adaptasi dalam merespon terhadap dinamika perubahan global dan terhadap harapan-harapan masyarakat yang semakin tinggi dan kompleks, sehingga diperlukan peningkatan integritas, efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.6.1.2 PEREKONOMIAN YANG MELAMBAT DAN BELUM MERATA

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Secara umum ekonomi di Provinsi Banten pada Tahun 2024 terus membaik, hanya saja angka pertumbuhan ini mengalami perlambatan pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten biasanya selalu di atas rata-rata nasional, namun pada 3 tahun terakhir terus berada di bawah rata-rata nasional. Pada Tahun 2024 ekonomi di Provinsi Banten hanya tumbuh 4,79 persen, sementara nasional tumbuh 5,04 persen. Kondisi terakhir, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten masih di bawah rata-rata pertumbuhan se-Pulau Jawa dan pertumbuhan nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh komponen permintaan ekspor luar negeri di Provinsi Banten mengalami penurunan akibat adanya pelemahan ekonomi global. Adapun impor luar negeri juga menurun meskipun dengan besaran yang lebih rendah dari penurunan ekspor.

Sementara itu meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan investasi swasta, serta naiknya permintaan nasional dari sisi *supply* direspon oleh berbagai perusahaan atau unit usaha yang ada. Respon yang diberikan adalah dengan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkannya. Aktivitas ekonomi dari masyarakat golongan menengah ke bawah, yakni dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), selama Tahun 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi seiring dengan naiknya mobilitas penduduk dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan produksi usaha berskala menengah besar.

Struktur ekonomi di Provinsi Banten pada Tahun 2024 masih tetap ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan komponen pembentukan modal tetap bruto. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, komponen pembentukan modal tetap bruto, dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi pendorong sumber utama pertumbuhan ekonomi. Sementara komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sangat kecil sekali, sehingga menjadi terabaikan. Berdasarkan data BPS (2025) bahwa struktur PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Banten pada Tahun 2024 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,35 persen, disusul oleh lapangan usaha lainnya sebesar 28,45 persen, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,38 persen, dan kemudian konstruksi sebesar 11,69 persen.

Pertumbuhan PDRB pada Tahun 2024 terjadi pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,73 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 12,5 persen yang didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan di Provinsi Banten. Laporan kunjungan wisatawan mancanegara menurut data dari Kemenparekraf RI yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2020-2024 cenderung stabil dan mengalami peningkatan. Pada Juni 2024 jumlahnya sebesar 1.078.720 jiwa atau naik 34,89 persen dibandingkan Juli 2023, secara nasional urutan kedua di Pulau Jawa-Bali, masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Bali sebesar 2.899.080 jiwa atau 23,80 persen.

Sektor ekonomi kreatif di Provinsi Banten terus mengalami perkembangan pesat. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten pada Tahun 2024, kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten mencapai 12,4 persen pada 2024 dan meningkat signifikan dari 10 persen pada Tahun 2019. Artinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi pertumbuhan hingga 24 persen. Total pendapatan di Provinsi Banten yang bersumber dari pariwisata dan ekonomi kreatif pada Tahun 2024 mencapai Rp72,6 triliun sehingga secara aktivitas per provinsi menduduki peringkat tiga setelah Jawa Barat (Rp112,7 triliun) dan DKI Jakarta (Rp104,3 triliun). Kondisi ini belum seluruhnya teroptimalkan karena Pemerintah Provinsi Banten belum memetakan dan memanfaatkan secara strategis potensi dan prioritas industri kreatif skala mikro, kecil dan menengah khususnya tiga sektor dominan ekonomi kreatif yaitu (kriya, fesyen, dan kuliner) untuk meningkatkan nilai tambah aktivitas perekonomian di Provinsi Banten.

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian di Provinsi Banten belum optimal, karena masih di dominasi oleh usaha mikro. Usaha Kecil dan Menengah diharapkan akan lebih mudah mengakses pembiayaan keuangan.

Pada sektor perkembangan proporsi industri kecil berdasarkan data BPS sejak Tahun 2017-2022 di Provinsi Banten relatif stabil namun memiliki kecenderungan menurun. Pada Tahun 2017, proporsi industri kecil terhadap seluruh industri yang ada di Provinsi Banten baik skala besar maupun sedang sebesar 2,65 persen dan mengalami kenaikan pada Tahun 2018 sebesar 3,1 persen. Di Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,04 persen yang disebabkan adanya potensi deindustrialisasi akibat kenaikan upah minimum regional. Berdasarkan analisis dari data BPS, rasio kewirausahaan di Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 2,01 persen meningkat pada Tahun 2023 sebesar 2,5 persen, namun masih paling kecil jika dibandingkan provinsi di Pulau Jawa dan di bawah rata-rata nasional sebesar 3,04 persen. Nilai rasio tertinggi di Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,43 persen, disusul DI Yogyakarta dan Jawa Timur berturut-turut sebesar 3,23 persen dan 3,06 persen.

Pada sektor usaha koperasi di Provinsi Banten berdasarkan analisis data BPS pada Tahun 2024 terdapat sebanyak 4.512 unit koperasi aktif dengan volume usaha mencapai Rp9,874 triliun, hal ini meningkat dibandingkan pada Tahun 2023 sebanyak 4.449 unit koperasi aktif dengan volume usaha sebesar Rp8,160 triliun. Perkembangannya rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Provinsi Banten sejak Tahun 2019-2024 cenderung stabil, namun pada Tahun 2024 sebesar 1,17 persen meningkat dibandingkan Tahun 2023 sebesar 1,00 persen, Tahun 2022 sebesar 0,39 persen, dan Tahun 2021 sebesar 0,01 persen.

Return on Asset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Banten belum optimal, ROA ini dijadikan dasar indikator kinerja BUMD dimasa depan. ROA atau secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. ROA yang baik berada pada kisaran 5-10 persen. Sebagai gambaran umum kondisi ROA BUMD di Provinsi Banten bisa dilihat dari ROA Bank Banten pada Tahun 2022 bahkan minus -3,31 persen, yang artinya Bank Banten belum memiliki kemampuan yang baik dalam memperoleh laba melalui aset yang dimiliki. Namun, pada tahun 2023, kondisi ROA Bank Banten membaik menjadi -1,12 persen, seiring dengan upaya restrukturisasi dan penguatan permodalan yang dilakukan manajemen. Pada Tahun 2024, kinerja ROA semakin menunjukkan perbaikan dengan nilai 0,48 persen (positif), menandakan bahwa Bank Banten mulai mampu menghasilkan laba dari asetnya meskipun masih dalam tahap pemulihan dan konsolidasi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun terakhir sejak Tahun 2017-2023 pun demikian pada Tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan. Pada Tahun 2023 tingkat pengangguran di Provinsi Banten sebesar 7,52 persen turun dibandingkan Tahun 2022 sebesar 8,53 persen, namun masih lebih besar jika dibandingkan secara nasional di Tahun 2023 sebesar 5,32 persen dan data terakhir berada pada posisi 7,02 persen di Februari 2024. Pada kondisi ketenagakerjaan perempuan dan laki-laki di Provinsi Banten sejak Tahun 2018-2024, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung terus meningkat. Tahun 2023 nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar 46,16 persen, meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2018 sebesar 44,30 persen. Pada Februari 2024, TPAK perempuan di Banten tercatat sebesar 47,02 persen. Namun demikian nilai TPAK di Provinsi Banten masih di bawah nilai rata-rata secara nasional pada Februari 2024 sebesar 55,18 persen dan paling rendah di Pulau Jawa-Bali setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 48,55 persen.

Di Provinsi Banten, kondisi pekerja masih didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah. Berdasarkan Sakernas Februari 2024, proporsi pekerja dengan pendidikan SD ke bawah sebesar 34,12 persen, SMP sebesar 16,48 persen, dan SMA sebesar 21,06 persen. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Tahun 2024 menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja sebagian besar merupakan lulusan SMA, yaitu sebanyak 2.131.584 orang (36,88 persen), sedangkan lulusan Perguruan Tinggi (Diploma dan Sarjana) hanya sebanyak 842.617 orang (14,59 persen). Jika ditelisik dari sektor lapangan pekerjaan utamanya, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tetap menjadi sektor dengan jumlah pekerja terbanyak yaitu 1.245.216 orang (21,55 persen), diikuti oleh industri pengolahan dengan jumlah pekerja sebanyak 1.183.945 orang (20,51 persen), dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 648.017 orang (11,22 persen).

Kondisi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Provinsi Banten berdasarkan pada Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Riset Nasional sebesar 3,75, yang mana lebih besar dari nilai secara nasional sebesar 3,35 dan menempatkan Provinsi Banten pada posisi 4 (empat) besar secara nasional setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Indeks ekosistem pada pilar pasar produk, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, dan sistem keuangan yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pembangunan di Provinsi Banten.

Perubahan iklim terhadap pembangunan ekonomi banyak terabaikan sehingga berakhir pada kerusakan lingkungan yang semakin besar. Berdasarkan data Bappenas, perkembangan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim Tahun 2023 sebesar 26,5 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK, dan tahun 2024 ditargetkan sebesar 27,4 persen periode Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN, prinsip perhitungan skenario net zero emission (NZE) diantaranya tetap mengejar penurunan emisi GRK hingga Tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri (target NDC).

Komitmen dan kolaborasi pembangunan NZE diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari krisis perubahan iklim. Berdasarkan data pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Banten Tahun 2022-2050, dukungan pada penurunan bahan bakar fosil dan menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca. Pemerintah Indonesia telah menargetkan peningkatan porsi EBT (energi baru terbarukan) dalam bauran energi primer menjadi 23 persen pada Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total primer di Provinsi Banten pada Tahun 2021 terhadap jenis energi dari minyak bumi sebesar 50,1 persen, gas bumi 19 persen, batubara 24,9 persen, dan energi baru terbarukan sebesar 5,9 persen.

Pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung dan membantu pesatnya pertumbuhan industri, mendorong efisiensi tata kelola pemerintahan, operasional bisnis, serta mengembangkan landasan penting menuju perekonomian berbasis teknologi. Berdasarkan data BPS, capaian nilai Indeks Pembangunan TIK pada Tahun 2023 di Provinsi Banten sebesar 6,59 (kategori sedang). Kategori sub indeks akses dan infrastruktur TIK sebesar 6,9, penggunaan TIK 6,12, dan keahlian TIK 6,15. Meskipun ada peningkatan, perlu adanya perhatian lebih pada dua sub-indeks utama, yakni penggunaan TIK dan keahlian TIK. Pada sub-indeks penggunaan TIK, ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki, seperti persentase individu yang menggunakan internet, pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk, dan pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk. Sedangkan pada sub-indeks keahlian TIK, peningkatan dibutuhkan pada indikator seperti rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekunder (SMP/sederajat dan SMA/sederajat), serta angka partisipasi kasar tersier (D1 hingga S1).

B. PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perdagangan luar negeri memiliki peran penting dalam perekonomian di Provinsi Banten yang banyak dipengaruhi oleh perekonomian global. Kondisi terakhir perekonomian global masih mengalami pelemahan. Kondisi yang demikian setidaknya terlihat dalam World Economic Outlook Update di Januari 2025, dimana ekonomi global Tahun 2025 dan 2026 oleh IMF diproyeksikan hanya tumbuh mencapai 3,3 persen. Berarti, sama dengan angka proyeksi Tahun 2024 yang mencapai 3,3 persen (IMF-World Economic Outlook-Oktober 2024, www.imf.org). Kondisi ini berdampak pada permintaan luar negeri terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan di Provinsi Banten juga mengalami stagnasi.

Menurut data BPS Provinsi Banten, ekspor barang dan jasa di Provinsi Banten sejak 4 tahun terakhir sejak Tahun 2020-2024 kontribusinya didominasi oleh sektor non migas yang cenderung stabil dengan nilai diatas 98,5-99,97 persen, sementara sisanya dari sektor migas. Proporsi nilai ekspor di Provinsi Banten terhadap PDRB berfluktuatif, pada Tahun 2023 sebesar 23,45 persen turun dari Tahun 2022 sebesar 29,59 persen, Tahun 2021 sebesar 31,86 persen, dan Tahun 2020 sebesar 26,8 persen.

Menurunnya ekspor di Provinsi Banten disebabkan oleh turunnya ekspor ke negara-negara mitra dagang utama, khususnya ASEAN dan Australia. Dengan penurunannya itu, setidaknya dapat diketahui dari ekspor non migas untuk kedua negara mitra tersebut, yang masing-masing turun sebanyak US$33,15 juta dan US$25,70 juta. Sementara ekspor nonmigas ke Uni Eropa bertambah US$32.31 juta hingga menjadi US$422,24 juta. Begitu juga ekspor ke India meningkat sebesar US$47,13 juta hingga menjadi US$185,68 juta.

Sejalan dengan penurunan ekspor, impor luar negeri juga mengalami penurunan. Adapun penurunannya mencapai 8,44 persen, yaitu dari US$8,95 miliar menjadi US$8,19 miliar, disebabkan oleh turunnya impor nonmigas, yang turun 10,86 persen dari US$7,46 miliar menjadi US$6,65 miliar. Jika dilihat menurut penggunaan barang, menurunnya impor hanya terjadi pada impor barang untuk keperluan bahan baku/penolong dan barang modal. Sementara itu selama Tahun 2023 impor terbesar pada barang konsumsi yang berasal dari golongan bahan baku/penolong. Pelemahan impor bahan baku dan barang modal yang berimbas pada penurunan ekspor mengindikasikan pelemahan kinerja industri di Provinsi Banten, khususnya industri yang berhubungan langsung dengan mata rantai industri global.

C. DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KETIMPANGAN EKONOMI

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan di suatu wilayah ialah Gini Ratio (Rasio Gini). Hasil perhitungan rasio gini berkisar antara nol dan satu. Meskipun banyak indikator yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19, pada Tahun 2024 rasio gini di Provinsi Banten mencapai 0,359 masih lebih baik dibandingkan ketimpangan nasional yang mencapai 0,381. Kinerja ketimpangan yang membaik dapat disebabkan oleh kenaikan pesat pengeluaran per kapita kelompok menengah bawah dan menengah di Provinsi Banten di tengah pandemi COVID-19. Ketimpangan di Provinsi Banten yang membaik di tengah pandemi merupakan kondisi di atas rata-rata karena secara nasional ketimpangan justru meningkat. Kontribusi PDRB di wilayah metropolitan diharapkan dapat mendukung pembangunan untuk memacu sektor perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran Indonesia.

Wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten sebagai bagian wilayah metropolitan Jabodetabekjur telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Sejak Tahun 2016-2023 proporsi PDRB wilayah Tangerang Raya di Provinsi Banten cenderung menurun, proporsi terhadap PDB nasional Tahun 2016 sebesar 2,47 persen stabil sampai Tahun 2019 sebesar 2,49 persen.

Namun pada periode Tahun 2023 menurun dengan proporsi sebesar 2,32 persen, wilayah yang memberikan proporsi paling besar yaitu Kota Tangerang sebesar 0,99 persen dan Kabupaten Tangerang sebesar 0,83 persen, sementara yang terkecil adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 0,5 persen. Rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat, untuk membangun sumber daya manusia kebutuhan akan rumah yang layak huni sangat diperlukan. Berdasarkan data BPS pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Provinsi Banten sebesar 63,06 persen naik mulai dari Tahun 2018 sebesar 53,3 persen dan Tahun 2022 sebesar 60,98 persen. Nilai tersebut masih sedikit di bawah rata-rata hunian layak huni secara nasional sebesar 63,15 persen dan rata-rata di Pulau Jawa-Bali sebesar 66,52 persen. Berdasarkan hal tersebut pada tahun mendatang kebutuhan rumah tangga terhadap penyediaan dan akses terhadap rumah layak huni masih sangat besar dalam rangka mendukung perekonomian dan sumber daya manusia yang unggul.

Sementara itu perkembangan desa mandiri yang ada di Provinsi Banten cenderung fluktuatif, menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Tahun 2019 memiliki nilai 1,16 persen dan mengalami peningkatan di Tahun 2020 sebesar 1,87 persen, namun mengalami penurunan sebesar 0,19 persen dari 1,87 persen menjadi 1,68 persen di Tahun 2021.

D. STABILITAS EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten relatif stabil, terindikasi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade berada dalam kisaran 4-6 persen, kecuali saat terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian di Provinsi Banten terkontraksi sebesar 3,39 persen. Namun demikian, fenomena penurunan kontribusi sektor industri ke PDRB menuju 30 persen, ini menjadi sinyal untuk melakukan langkah-langkah antisipatif khususnya untuk meningkatkan daya saing sektor industri di Provinsi Banten terlebih dengan semakin kompetitifnya sektor industri di China, negara asia tenggara, dan bahkan Provinsi Jawa Tengah menjadi kompetitor dalam level nasional. Kondisi perekonomian global yang tidak menentu juga menjadi ancaman untuk menyiapkan pasar baru bagi produk ekspor dari industri di Provinsi Banten.

Stabilitas ekonomi juga ditopang oleh stabilitas inflasi, dilihat dari aspek inflasi masih diperlukan upaya dalam menstabilkan komponen pengeluaran dan permintaan dalam rangka menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Tingkat inflasi relatif stabil di Provinsi Banten, yang pernah menyentuh dua digit pada era Tahun 2000-an, namun pada periode pasca COVID-19 inflasi relatif terkendali pada kisaran 3 persen.

Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Kanwil Perbendaharaan Provinsi Banten, rasio pajak di Provinsi Banten terhadap PDRB yang merupakan kinerja penerimaan pajak daerah untuk membiayai keperluan daerah melalui sumber dayanya sendiri terus mengalami peningkatan. Tahun 2017-2022 mengalami kenaikan pada Tahun 2021 sebesar 1,95 persen dan terus naik menjadi 2,11 persen pada Tahun 2022, walaupun tidak signifikan menunjukkan kinerja pajak yang cukup baik di Provinsi Banten.

Berdasarkan laporan perekonomian Bank Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Banten Bulan Februari, Agustus dan November 2023 secara nominal, penyaluran kredit pada Tahun 2022 menjadikan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Banten sampai dengan 2022 sebesar Rp253,77 triliun atau tumbuh sebesar 4,61 persen (y-on-y). Aset perbankan di Provinsi Banten pada Tahun 2022 tercatat sebesar Rp287,10 triliun atau tumbuh sebesar 4,92 persen (y-on-y). Penyaluran kredit pada Triwulan II-2023 secara nominal menjadikan DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Banten sampai dengan Triwulan II-2023 sebesar Rp252,15 triliun atau tumbuh sebesar 0,24 persen (y-on-y), sedangkan aset perbankan di Provinsi Banten pada Triwulan II-2023 tercatat sebesar Rp288,91 triliun atau tumbuh sebesar 1,82 persen (y-on-y).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten, inklusi keuangan di Provinsi Banten Tahun 2019 sebesar 78,27 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inklusi keuangan secara nasional sebesar 75,64 persen, dan lebih kecil dari DKI Jakarta sebesar 92,67. Sementara Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 85,71 lebih besar dibanding nasional sebesar 84,97 persen, namun lebih kecil jika dibandingkan dengan DKI Jakarta sebesar 96,62 persen dan posisi tersebut menempatkan Provinsi Banten berada di posisi ke-17 secara nasional.

Kemudian dari sisi pengelolaan dana pensiun, berdasarkan Buku Statistik Dana Pensiun OJK, sejak Tahun 2020-2022 rasio total aset dana pensiun terhadap PDRB di Provinsi Banten terus mengalami penurunan, di Tahun 2020 sebesar 0,89 persen turun menjadi 0,75 persen pada Tahun 2022. Penurunan disebabkan rasio total aset terhadap peserta program dana pensiun semakin berkurang dan dilain sisi kondisi PDRB di Provinsi Banten setiap tahunnya semakin meningkat.

Berdasarkan data OJK nilai transaksi saham tahunan di Provinsi Banten pada Tahun 2022 sebesar Rp22.395 miliar meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp21.377 miliar, nilai tersebut masih di bawah transaksi tahunan di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp249.768 miliar yang merupakan tertinggi di Indonesia, kemudian disusul Provinsi Jawa Barat sebesar Rp37.206 miliar dan Jawa Timur sebesar Rp30.173 miliar. Kontribusi transaksi di Provinsi Banten merupakan tertinggi keempat dari seluruh provinsi dari total nilai transaksi tahunan di Indonesia sebesar Rp404.608 miliar.

2.6.1.3 SUMBER DAYA MANUSIA YANG BELUM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

A. KUALITAS PENDIDIKAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat memberikan gambaran terhadap kualitas pendidikan di suatu daerah. Pada Tahun 2024 capaian IPM di Provinsi Banten sebesar 76,35 merupakan termasuk 7 (tujuh) besar tertinggi secara nasional dengan rata-rata sebesar 73,02, namun demikian capaian Provinsi Banten masih di bawah capaian rata-rata provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 77,71, yaitu peringkat ketiga di bawah DKI Jakarta sebesar 84,15.

Tahun 2024 umur 25 tahun ke atas nilai rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten masih rendah sebesar 9,23 tahun, pada kelompok penduduk umur 15 tahun ke atas nilai rata-rata lama sekolah sebesar 9,48, lebih tinggi daripada nilai rata-rata nasional sebesar 9,13 tahun. Namun jika dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 9,56 masih lebih rendah, berada di urutan keempat di bawah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 10,16, DKI Jakarta sebesar 11,42 dan Bali sebesar 9,74.

Capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum dapat terwujud walaupun setiap tahunnya nilai harapan lama sekolah di masing-masing kabupaten/kota sudah melebihi 12 tahun yaitu sebesar 13,09 tahun. Lebih jauh daripada itu nilai ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar 13,15 tahun dan nilai provinsi di Pulau Jawa-Bali sebesar 13,51 tahun. Capaian Provinsi Banten merupakan capaian kinerja terendah ketiga setelah Jawa Barat sebesar 12,68 tahun dan Jawa Tengah sebesar 12,85 tahun, sementara tertinggi yaitu Provinsi Bali sebesar 13,58 tahun dan Provinsi Jawa Timur sebesar 13,38 tahun.

Rendahnya tingkat pendidikan erat kaitannya dengan faktor ekonomi (Ustama, 2009). Tahun 2023 sejalan masih adanya pekerja di Provinsi Banten yang berusia 10-17 tahun sebanyak 1,85 persen serta rendahnya angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/sederajat menjadi yang terendah kesembilan di nasional. Pada Tahun 2023, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis pekerjaan utama di bidang keahlian menurut pendidikan menengah dan tinggi yang ditamatkan di Provinsi Banten masih rendah sebesar 51,08 persen dari jumlah angkatan kerja golongan tersebut sebanyak 5,51 juta penduduk.

Berdasarkan data Kemendikbud Ristek RI terkait pengukuran indikator kinerja urusan pendidikan, bahwa hasil pengukuran kualitas pendidikan di Provinsi Banten sejak Tahun 2021-2023 terhadap indikator persentase satuan pendidikan maupun peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional baik literasi dan numerasi mengalami peningkatan.

Pada indikator satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi Tahun 2023 sebesar 26,81 persen, yang mana meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 5,93 persen dan Tahun 2022 sebesar 11,40 persen. Lebih jauh daripada itu untuk indikator yang sama pada aspek numerasi Tahun 2023 sebesar 34,43 persen, yang juga meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 19,11 persen dan Tahun 2022 sebesar 25,21 persen.

Peningkatan kualitas hasil pembelajaran numerasi dan literasi membaca pada tingkatan satuan pendidikan dalam kategori belum cakap dan belum mencapai kompetensi minimum tingkat nasional.

Pada aspek literasi jika dilihat dari nilai rerata capaian pendidikan menengah umum SMA/SMK di Provinsi Banten yaitu sebesar 14,22 di Tahun 2023, sedangkan aspek numerasi sebesar 19,21. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembelajaran masih berkategori sangat rendah dan angka melek huruf yang belum mencapai 100 persen. Permasalahan pendidikan lainnya adalah angka lulusan di jenjang SMA/SMK mengalami penurunan dari Tahun 2018 hingga 2021.

Selain permasalahan terjadi pada peserta didik, juga menyasar pada tenaga pendidik. Kondisi yang terjadi yaitu persentase guru yang tersertifikasi di Provinsi Banten masih belum mencapai 50 persen pada semua jenjang pendidikan dan di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, guru di Provinsi Banten yang memenuhi kualifikasi akademik (minimal S1 maupun diploma IV) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen belum mencapai 100 persen pada semua jenjang pendidikan di seluruh kabupaten/kota.

B. DERAJAT KESEHATAN

Sektor kesehatan yang mendukung IPM yaitu pada indikator Usia Harapan Hidup (UHH), usia harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Capaian Tahun 2023 terhadap UHH di Provinsi Banten yaitu sebesar 74,77, nilai ini merupakan paling kecil di Pulau Jawa. Kemudian pada Tahun 2024, UHH di Provinsi Banten naik menjadi 74,97. Namun demikian nilai ini masih di bawah Provinsi DKI Jakarta sebesar 75,99 dan DI Yogyakarta sebesar 75,36.

Rendahnya Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Banten masih dipengaruhi oleh tingginya angka kematian ibu dan bayi, meskipun tren penurunannya mulai terlihat pada tahun 2024. Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Serang mencatat penurunan signifikan kematian ibu dari 34 kasus pada 2023 menjadi 21 kasus hingga Oktober 2024, dan kematian bayi turun dari 200 kasus menjadi 106 kasus dalam periode yang sama. Namun, di Kabupaten Lebak, angka kematian ibu justru meningkat dari 29 kasus menjadi 30 kasus, meskipun kematian bayi tercatat turun menjadi 276 kasus. Penyebab utama kematian ibu tetap didominasi oleh komplikasi seperti hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan, sementara kematian bayi banyak terjadi pada periode neonatal, terutama akibat berat badan lahir rendah (BBLR) dan asfiksia. Kondisi ini disebabkan oleh cakupan layanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan bayi yang belum merata serta kualitas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Upaya penguatan layanan kesehatan primer, pelatihan kader posyandu, dan peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang harus diperkuat untuk menurunkan angka kematian dan mendorong peningkatan UHH dan IPM di Provinsi Banten.

Pada Tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi Banten mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut hasil pengukuran serentak pada Juni 2024, sebanyak 35.000 dari 824.000 balita di Banten teridentifikasi mengalami stunting, menunjukkan penurunan dari angka 24 persen pada tahun 2023. Namun, angka ini masih berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 19,8 persen pada tahun yang sama. Beberapa kabupaten/kota di Banten menunjukkan tren positif: misalnya, Kabupaten Serang berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 26 persen menjadi 23 persen berdasarkan data e-PPGBM. Sementara itu, Kota Tangerang mencatat penurunan signifikan dari 17,6 persen pada 2023 menjadi 5,6 persen pada Oktober 2024, berkat program intervensi seperti Gerakan Serentak untuk Anak Tangerang Sehat dan Cerdas (Gertak Tangkas). Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan, yang sejak 2017 hingga 2020 cenderung berada di bawah rata-rata nasional. Faktor-faktor seperti pemenuhan gizi dan pemberian ASI eksklusif tetap menjadi fokus utama dalam upaya penurunan stunting di Provinsi Banten.

Selain itu Provinsi Banten juga masih menghadapi beberapa masalah penyakit menular, diantaranya angka notifikasi semua kasus tuberkulosis (TBC) cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2014-2021. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara, cakupan penemuan kasus TBC lebih tinggi dibandingkan angka secara nasional berdasarkan data profil kesehatan Indonesia Tahun 2021-2023. Tahun 2023, cakupan penemuan kasus TBC yang terjangkau oleh program secara nasional sebesar 77,5 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 74,7 persen. Cakupan penemuan di Provinsi Banten sebesar 107 persen lebih tinggi secara nasional dan bersama DKI Jakarta menjadi tertinggi ketiga di Pulan Jawa-Bali setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 116 persen dan Jawa Tengah sebesar 112 persen.

Pada tahun 2024, Provinsi Banten mencatatkan 45.644 kasus tuberkulosis (TBC) yang ditemukan, dengan cakupan penemuan kasus mencapai 112 persen dari estimasi 50.391 kasus. Angka ini jauh melebihi cakupan penemuan kasus TBC secara nasional yang hanya 77,5 persen pada tahun 2023. Capaian ini menjadikan Banten sebagai provinsi dengan penemuan kasus TBC tertinggi ketiga di Pulau Jawa-Bali, setelah Jawa Barat (116 persen) dan Jawa Tengah (112 persen). Meskipun ini menunjukkan keberhasilan deteksi kasus yang baik, tingginya angka penemuan juga mencerminkan tingginya beban TBC di masyarakat. Hal ini menandakan perlunya upaya yang lebih intensif dalam pengobatan dan pencegahan untuk mengurangi penularan dan mencapai target eliminasi TBC pada 2030.

Pada 2024, cakupan kepemilikan jaminan kesehatan di Provinsi Banten mencapai 96,73 persen, meningkat tajam dari 72,46 persen pada 2023. Meskipun demikian, disparitas antar wilayah masih terlihat, dengan Kabupaten Pandeglang dan Lebak mencatatkan persentase kepemilikan jaminan kesehatan yang lebih rendah dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan pemerataan akses jaminan kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Banten.

C. PERLINDUNGAN SOSIAL

Komponen lainnya terhadap peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Banten adalah standar hidup layak yang diukur dengan nilai pengeluaran per kapita yang disetarakan, tingkat kemiskinan, kepesertaan jaminan sosial, dan angkatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Banten menurun menjadi 5,70 persen pada September, dari 5,84 persen pada Maret, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 777.490 jiwa. Namun, data spesifik mengenai proporsi penduduk miskin yang tidak bekerja atau yang bekerja di sektor pertanian untuk tahun 2024 belum tersedia secara publik. Tren sebelumnya menunjukkan bahwa lebih dari 48 persen penduduk miskin tidak bekerja, dan proporsi yang bekerja di sektor pertanian menurun dari 17,10 persen pada 2017 menjadi 13,97 persen pada 2021. Hal ini mengindikasikan pergeseran pekerjaan penduduk miskin dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian.

Pada 2024, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia mencapai 45,2 juta orang (35,3 juta pekerja formal dan 9,9 juta informal). Di Provinsi Banten, terdapat 2,77 juta peserta aktif dari total 6,05 juta angkatan kerja, dengan tingkat kepesertaan sebesar 45,8 persen, naik dari 44,1 persen pada 2023. Capaian ini menempatkan Banten di peringkat kelima nasional dan menunjukkan penguatan perlindungan sosial ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Pada 2024, Provinsi Banten mencatat 22.027 penyandang disabilitas (0,18 persen dari total penduduk). Dari jumlah tersebut, hanya 1.230 orang (5,6 persen) bekerja di sektor formal terdiri dari 786 pria dan 444 wanita. Sebanyak 94,4 persen sisanya belum terserap di sektor formal, mencerminkan masih terbatasnya akses ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas.

D. INKLUSIVITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG BELUM OPTIMAL

Penanganan permasalahan sosial dan budaya merupakan faktor penting dalam pembangunan kehidupan bermasyarakat untuk menjaga pembangunan ekonomi, melalui peningkatan toleransi kerukunan, pembangunan kebudayaan, kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender menjadi landasan kuat pembangunan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Permasalahan pembangunan kualitas keluarga dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Keluarga di Provinsi Banten Tahun 2022 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Jika menggunakan metadata yang lama sebesar 76,38, meningkat sebesar 3,89 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 72,49. Namun demikian lebih kecil jika dibandingkan kondisi nasional (76,53), mencakup dimensi kualitas legalitas-struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Kemudian jika dilihat menurut provinsi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) di Provinsi Banten lebih tinggi dari Jawa Barat, namun masih lebih kecil dari provinsi lainya. Jika menggunakan metadata yang baru, Provinsi Banten memiliki capaian sebesar 76,13 (Tahun 2022) dan masih lebih kecil dari angka nasional sebesar 77,38 dan menempati posisi paling rendah dibandingkan nilai rata-rata di Pulau Jawa-Bali sebesar 79,12.

Permasalahan kesetaraan gender di Provinsi Banten berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dilihat dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 0,478 meningkat 0,003 poin dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar 0,475. Meningkatnya IKG dipengaruhi oleh peningkatan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. Peningkatan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh meningkatnya indikator perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan indikator perempuan melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). MTF meningkat dari 0,132 menjadi 0,137 di Tahun 2022, sedangkan MHPK20 meningkat dari 0,254 menjadi 0,261 pada Tahun 2022. Peningkatan dimensi tenaga kerja dipengaruhi oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki yang meningkat lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Pada Tahun 2022 TPAK laki-laki meningkat dari 80,16 persen menjadi 81,69 persen, sedangkan TPAK perempuan meningkat dari 46,84 persen menjadi 47,17 persen. Sejauh ini Kota Tangerang nilainya sebesar 0,324 dan Kota Tangerang Selatan sebesar 0,170 nilainya paling kecil di Provinsi Banten, hal ini menunjukkan semakin berhasil dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Permasalahan kerukunan umat beragama dapat terlihat berdasarkan data dari Kementerian Agama RI, pada Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Provinsi Banten pada Tahun 2023 mendapatkan skor 70,05 (berkategori tinggi), namun lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata secara nasional pada tahun yang sama sebesar 76,02 (berkategori tinggi). Provinsi Banten masih berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan nilai sebesar masing-masing 76,47 dan 74,10 dan berada pada posisi diluar 10 besar skor IKUB terbaik. Kerukunan umat beragama harus terus dijaga keutuhannya karena menjadi bagian fondasi penting bagi stabilitas sosial daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan bermaslahat.

Permasalahan kebudayaan terlihat dari Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Banten dari Kemendikbud Ristek RI sejak Tahun 2018-2024 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024 nilai IPK sebesar 52,49 lebih kecil jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar 51,41 dan lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai secara nasional pada Tahun 2024 sebesar 62,7. Aspek warisan budaya dan budaya literasi mendapatkan nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nasional, namun dari aspek ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya serta gender masih lebih kecil dari nasional.

2.6.1.4 KEAMANAN WILAYAH DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL YANG BELUM OPTIMAL

Iklim investasi yang baik akan mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Faktor keamanan, ketertiban, dan demokrasi yang baik menciptakan stabilitas daerah dan menciptakan kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya. Kesadaran pemerintah dan masyarakat menciptakan stabilitas keamanan dan kehidupan berdemokrasi yang sesuai etika dan ketentuan yang berlaku masih menjadi permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Kondisi ini juga dipicu oleh belum optimalnya kebijakan dan kapasitas fiskal pemerintah yang terlihat dari rasio pajak, kemandirian keuangan, pengendalian inflasi, dan kebijakan lainnya terkait intermediasi sektor dan inklusi keuangan.

Permasalahan demokrasi di Provinsi Banten adalah masih belum idealnya kondisi demokrasi yang terlihat dari masih berfluktuasinya nilai Indeks Demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar 75,83 namun Tahun 2022 sebesar 78,75 dengan tren meningkat dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,93, namun demikian tren IDI di Provinsi Banten sejak Tahun 2018-2022 relatif berfluktuatif. Pada Tahun 2019 sebesar 72,6 turun dibandingkan Tahun 2018 sebesar 73,78, kemudian naik pada Tahun 2020 sebesar 75,82. Tahun 2022 mencapai angka 78,75 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 sebesar 75,93, yang masih termasuk dalam kategori "sedang".

Pada aspek pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022 dari 419 kabupaten/kota sebanyak 170 kategori peduli HAM, 89 cukup peduli, 85 mulai peduli, 75 nilai tidak memenuhi kriteria, dan 95 tidak mengirim data. Angka ini berfluktuasi dibanding pada Tahun 2020 angka peduli HAM sebesar 259 dan pada Tahun 2019 sebesar 272. Terdapat rekomendasi pembangunan HAM secara umum meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan sehat dan baik. Pada Tahun 2023, 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten telah memenuhi kriteria peduli terhadap HAM dan menerima penghargaan kabupaten/kota peduli HAM (KKP HAM) di Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM naik dari Tahun 2022 sebanyak 5 kabupaten/kota.

Menurut Lemhanas, Indeks Agregat Ketahanan Nasional periode November 2023 adalah 2,89 dengan kategori cukup tangguh. Nilai tersebut merupakan agregat dari indeks ketahanan 8 (delapan) gatra yang terdiri dari geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Gatra sosial budaya memiliki nilai terendah dengan kategori kurang tangguh, disamping isu transformasi digital, infrastruktur digital, keamanan siber, dan pertahanan siber dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan siber menuju ekosistem digital Indonesia. Indeks ketahanan wilayah di Provinsi Banten diharapkan mendekati angka 2,98 dengan status tangguh.

Berbagai masalah hukum, keamanan dan ketertiban daerah khususnya keamanan wilayah perbatasan wilayah laut, demokrasi, stabilitas ekonomi daerah serta kerja sama daerah masih menjadi pekerjaan untuk diselesaikan berbagai permasalahannya ke depan untuk mencapai keamanan wilayah yang tangguh dengan kondisi demokrasi yang substansial didukung stabilitas perekonomian.

2.6.1.5 PENGENDALIAN KEWILAYAHAN YANG BELUM ADAPTIF DAN BERKELANJUTAN

Pembangunan dan pengembangan interkoneksi sistem jaringan infrastruktur simpul-simpul kawasan dengan berbagai fungsi dan daya dukungnya menjadi sudut perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pusat perkotaan Tangerang-Serang-Cilegon dan pusat pertumbuhan kawasan strategis di Pandeglang dan Lebak tumbuh dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan wilayah dan pusat perekonomian nasional dan Internasional dengan berbagai permasalahan pembangunan. Pada Tahun 2024, jumlah industri di Provinsi Banten sebanyak 3.397 perusahaan, paling banyak di Kabupaten Tangerang berjumlah 1.822 perusahaan sedangkan paling sedikit di Kabupaten Pandeglang 15 perusahaan. Pertambahan jumlah industri ini juga dapat mengindikasikan terhadap meningkatnya nilai pencemaran air di sungai yaitu Tahun 2022 sebesar 22 lokasi kemudian pada Tahun 2024 sebesar 44 lokasi.

Persoalan lainnya terhadap pembangunan di Daerah yaitu pada sektor pertanahan, permasalahan pertanahan menjadi suatu tantangan besar dalam pembangunan wilayah khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih terdapat gap terhadap kepemilikan lahan bersertifikat di Provinsi Banten dan persoalan lainnya seperti sengketa dan sebagainya, oleh sebab itu untuk menyelesaikan persoalan ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan berbagai upaya percepatan legalisasi aset melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hingga Tahun 2023 terdapat 9,97 juta bidang tanah di Provinsi Banten dengan kondisi 79 persen telah bersertifikat dan 21 persen lainnya belum memiliki legalitas formal (sebanding dengan 2 juta bidang tanah yang tersebar di wilayah perdesaan dan kawasan adat belum terdaftar secara resmi). Program PTSL yang dijalankan di Tahun 2023 telah mengeluarkan lebih kurang 27.087 sertifikat bidang tanah, sementara itu Pemerintah Provinsi Banten per akhir Tahun 2023 memiliki 1.292 bidang tanah milik daerah (BMD) dan 297 bidang belum bersertifikat (23 persen).

Lebih jauh dari itu aktivitas perekonomian lainnya di Provinsi Banten seperti kebutuhan perumahan dan permukiman yang terus meningkat, air minum dan timbulan sampah, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan sebagai akibat perkembangan wilayah dan demografi telah menimbulkan dampak ikutan lainnya pada daya dukung dan daya tampung air, pencemaran lingkungan, kerawanan pangan, persoalan sanitasi, dan bahkan pada persoalan kesehatan.

Perkembangan pesat kawasan perkotaan di Banten Utara, yang ditandai dengan meningkatnya kepadatan hunian dan aktivitas ekonomi, telah menimbulkan dampak negatif terhadap kesesuaian penataan ruang.

Hal ini menunjukkan kurangnya sinergi antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan perencanaan tata ruang Provinsi Banten. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, selaras dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan serta implementasi kebijakan berbasis keberlanjutan menjadi langkah penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Sinergitas dan pengendalian pemanfaatan ruang, pola ruang kawasan, dan struktur ruang dalam sistem penataan ruang di Provinsi Banten sebagai dampak kelangsungan pertumbuhan dan pengembangan simpul strategis pada kawasan pusat pertumbuhan harus dijaga secara berkelanjutan untuk mendukung kemajuan dan kelestarian lingkungan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

2.6.1.6 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN YANG BELUM BERKELANJUTAN

A. LINGKUNGAN HIDUP

Gambaran kondisi permasalahan dalam bidang lingkungan berupa belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan, penanganan ketahanan iklim dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Saat ini kondisi penggunaan lahan di Provinsi Banten banyak terjadi alih fungsi, perambahan, kebakaran hutan dan belum optimalnya pengelolaan hutan rakyat. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penanaman (rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, pembagian bibit, dan sebagainya), pembangunan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm, Hutan Desa, Hutan Kota, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat), serta kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (baik dari kebakaran hutan, perambahan, maupun illegal logging).

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Banten menunjukkan adanya perbaikan disetiap tahunnya, dimana pada Tahun 2024 nilai IKLH mencapai 62,54 yang masuk dalam kategori sedang. Aspek kualitas air dan aspek kualitas tutupan lahan perlu menjadi bahan perhatian, dimana kedua aspek tersebut memiliki nilai yang kecil. Pada Tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Provinsi Banten sebesar 54,32 (berkategori sedang), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 43,03 (berkategori kurang).

Menurut Bappenas, keanekaragaman hayati Indonesia sangat melimpah diantaranya yang telah diidentifikasi di Indonesia hingga Tahun 2022 yaitu 22 tipe ekosistem, 7 ekoregion, 31.902 spesies flora, 81.260 spesies fauna terestrial, dan 7.841 spesies fauna laut. Diperlukan koordinasi antar seluruh stakeholder dalam pengelolaan keanekaragaman hayati yang telah menjadi bagian penting keterkaitan dengan berbagai isu pembangunan dari segi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan.

Rendahnya kualitas air di Provinsi Banten tidak terlepas dari adanya pencemaran air yang bersumber dari berbagai aktivitas ekonomi dan rumah tangga, berkembangnya kawasan industri di wilayah utara

Provinsi Banten memberikan dampak secara langsung terhadap pencemaran lingkungan diantaranya seperti tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Pencemaran air juga berdampak pada jumlah air baku yang tersedia, ketersediaan air baku di Provinsi Banten saat ini selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya. Disisi lain, kebutuhan akan air baku terus meningkat akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas industri di Provinsi Banten.

Persoalan sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di Provinsi Banten, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dimana jumlah timbulan sampah pada Tahun 2024 mencapai 2.894.628,03 ton/tahun. Jumlah timbulan sampah tersebut akan semakin bertambah disetiap tahunnya seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk dan tanpa adanya upaya-upaya minimasi di Provinsi Banten, pada Tahun 2045 jumlah timbulan sampah diprediksi akan mencapai 3.878.440,40 ton/tahun. Potensi timbulan sampah di Provinsi Banten paling banyak berada di Wilayah Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang.

Berdasarkan data BPS RI, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman di Provinsi Banten menunjukkan tren peningkatan dari 10,43 persen pada tahun 2020 menjadi 15,41 persen pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Banten perlu mempercepat perluasan akses sanitasi aman melalui peningkatan investasi infrastruktur sanitasi, penguatan program perubahan perilaku, serta optimalisasi sinergi lintas sektor agar target peningkatan akses sanitasi aman dapat tercapai lebih merata dan berkelanjutan.

Peningkatan konsumsi listrik per kapita secara nasional dari Tahun 2021-2023 trennya meningkat terhadap kebutuhan energi. Berdasarkan data BPS konsumsi listrik nasional 1.084 kWh/kapita pada Tahun 2021 menjadi 1.285 kWh/kapita pada Tahun 2023, konsumsi listrik per kapita di Provinsi Banten lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1.200 kWh/kapita pada Tahun 2021 yang meningkat menjadi 1.300 kWh/kapita pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan perkembangan dalam penggunaan energi yang kemungkinan didorong oleh urbanisasi, industrialisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Di masa mendatang, peningkatan konsumsi listrik menuntut peningkatan kapasitas infrastruktur energi, diversifikasi sumber energi, dan peningkatan efisiensi energi.

Intensitas energi primer nasional dan Provinsi Banten menunjukkan dinamika yang berbeda dari Tahun 2021-2023. Menurut data BPS RI, Pada tingkat nasional intensitas energi primer mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan kenaikan pada Tahun 2022 mencapai 160,50 BOE/miliar rupiah, sebelum kembali menurun pada Tahun 2023 menjadi 132,60 BOE/miliar rupiah. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam mengelola efisiensi energi di tengah pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur industri. Sementara itu di Provinsi Banten menunjukkan stabilitas dengan intensitas energi primer yang relatif konsisten sekitar 34 TOE/miliar rupiah, meskipun ada sedikit peningkatan pada Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Banten mungkin telah mencapai tingkat efisiensi energi yang lebih stabil, namun tetap harus waspada terhadap kenaikan yang terjadi.

Pada sektor pangan, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menurut data susenas BPS sejak Tahun 2018-2024 angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Banten stabil pada kisaran di bawah 3,0. Hal ini menunjukkan angka situasi pangan dan gizi terhadap prevalensi ketidakcukupan pangan di Provinsi Banten adalah rendah/kecil. Jika dibandingkan secara nasional pada Tahun 2024 angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Banten sebesar 2,55, yang merupakan peringkat terbaik di Pulau Jawa diikuti Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,53. Sementara rata-rata nasional menunjukkan angka yang masih cukup besar yaitu 8,27, yang mengindikasikan bahwa pembangunan pangan belum berjalan dengan optimal. Kedepan diperlukan penguatan revitalisasi pembangunan pertanian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik.

Berdasarkan laporan akhir RISPAM Provinsi Banten pada Tahun 2021 sumber air baku di Provinsi Banten berasal dari air permukaan wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Ciliwung-Cisadane, Ciliman-Cibungur, dan Cibaliung-Cisawarna sebesar 541,72 m3/tahun. Selanjutnya juga berasal dari potensi air tanah di wilayah Serang-Tangerang, Rawadano, Labuan, dan Malingping sebesar 2.535 juta m3/tahun. Potensi air baku SPAM alternatif sumber air baku dari air permukaan berdasarkan RISPAM kabupaten/kota di Provinsi Banten sebesar 7.990 l/detik dan SPAM Regional sebesar 21.951 l/detik, saat ini potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan masyarakat. Sementara air baku yang berasal dari potensi air tanah tidak direkomendasikan untuk pemenuhan SPAM mengingat ketersediaannya yang semakin menurun, yang diindikasikan dengan penurunan muka tanah di beberapa wilayah Provinsi Banten.

B. KEBENCANAAN

Provinsi Banten secara geografis merupakan daerah yang terletak di ujung bagian barat pulau jawa, yang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) bahkan potensi ancaman bencana sebagai konsekuensi letak geografis yang berdekatan dengan patahan Sumatera dan Cincin Api (terdekat Gunung Anak Krakatau). Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam, secara general prioritas risiko bencana didasarkan pada tingkat risiko yang bersumber dari Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Banten dan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian yang dihasilkan dari catatan kejadian bencana di daerah.

Provinsi Banten merupakan wilayah yang rentan dan memiliki potensi bencana yang beragam dan cukup tinggi. Berdasarkan data BNPB Tahun 2024, Indeks Risiko Bencana (IRB) di Provinsi Banten mengalami penurunan dari Tahun 2019 dengan nilai 169,74 menjadi 128,64 di Tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap risiko bencana di

Provinsi Banten semakin berkurang, namun literasi sosial kebencanaan dan perilaku mitigasi bencana masyarakat sebagai upaya preventif bencana sangat perlu terus ditingkatkan dan perlu diperhatikan karena masih berada pada nilai berisiko sedang dengan nilai yang cukup tinggi. Kecenderungan nilai IRB di Provinsi Banten memiliki tren yang baik dengan selalu menurun, disebabkan tren peningkatan kapasitas bencana di kabupaten/kota melalui pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Namun demikian masih menyisakan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang memiliki kategori IRB dalam kategori tinggi dengan masing-masing nilai secara berurutan sebesar 192,52 dan 185,64.

Menurut data Bappenas RI, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara nasional mengalami penurunan sejak Tahun 2020 hingga 2024 dengan capaian potensi penurunan Emisi GRK mengalami kenaikan kumulatif dari 24,92 persen menjadi 27,07 persen. Di tingkat provinsi, pada periode tersebut mengalami penurunan emisi GRK yang fluktuatif, yakni 89 persen, 81,9 persen dan 82,33 persen. Kategori ini masih tergolong tinggi, namun demikian Pemerintah Provinsi Banten perlu memperkuat kerja sama dari seluruh stakeholder untuk mengimplementasi kebijakan transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk meningkatkan mitigasi emisi GRK.

2.6.2 ISU STRATEGIS

2.6.2.1 ISU GLOBAL

A. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (SDG'S)

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan, dan merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs). SDGs, atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu, SDGs memiliki cakupan yang lebih luas, dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup 3 (tiga) dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs, Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 (lima) poin yang menjadi fondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030, maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*). Menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*). Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif, dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*). Menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*). Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*). Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, serta modern bagi semua orang;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*). Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan bekelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*). Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*). Mengurangi kesenjangan di dalam, dan di antar negara;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*). Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*). Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*). Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya;
14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*). Melestarikan, dan menggunakan samudera, lautan, dan sumber daya laut secara berkelanjutan;
15. Kehidupan di Darat (*Life on Land*). Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan, dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Mendorong masyarakat yang damai, dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga, dan bertanggungjawab untuk seluruh

kalangan, serta membangun institusi yang efektif akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*). Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, Provinsi Banten turut mempertimbangkan pelaksanaan SDGs dalam agenda pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan, serta kondisi daerah. Kemudian, rencana aksi (renaksi) SDGs Daerah tersebut, harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus, dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diarusutamakan ke dalam seluruh kebijakan, dan program Pemerintah Daerah. Konsistensi dalam perwujudan tujuan dari SDGs adalah menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap strategi pembangunan dokumen perencanaan di Provinsi Banten.

Provinsi Banten telah berkomitmen atas pelaksanaan kesepakatan global tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Banten Tahun 2024-2026.

B. PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Untuk menanggulangi perubahan iklim global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim telah menyusun Perjanjian Paris (Paris Agreement). Perjanjian Paris bertujuan untuk menahan peningkatan temperatur rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat di masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi. Selain itu, Perjanjian Paris diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, menuju ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi, tanpa mengancam produksi pangan, dan menyiapkan skema pendanaan untuk menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris pada 22 April 2016, kemudian meratifikasi perjanjian tersebut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai

Perubahan Iklim). Persentase gas rumah kaca yang diratifikasi oleh Indonesia adalah sebesar 1,49 persen, dengan komitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen di bawah upaya apapun atau business as usual (BAU) pada tahun 2030 dan dapat dinaikkan sampai 41 persen dengan kerja sama internasional.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 8 (delapan) indikasi perubahan iklim yang harus diwaspadai, antara lain:

1. *Hotter Temperature* (Suhu Bumi yang Semakin Panas): Peningkatan suhu terus terjadi, suhu di kutub utara sudah meningkat paling tidak dua kali lebih cepat dari rata-rata global;
2. *More Severe Storms* (Risiko Badai yang Tinggi): Peningkatan Suhu bumi mempengaruhi cuaca ekstrem, yang berdampak pada jumlah badai yang merusak meningkat di seluruh belahan dunia seperti badai tropis, Topan, badai Siklon, dan badai ekstrem lainnya;
3. *Increased Drought* (Peningkatan Kekeringan): Kekeringan disebabkan oleh kekurangan pasokan air akibat perubahan iklim. Hal ini berdampak pada berbagai sektor kehidupan di seluruh belahan dunia, di antaranya kekeringan pertanian, kekeringan ekologis, dan badai pasir yang merusak ekosistem serta mengurangi lahan pertanian;
4. *A Warming and Rising Ocean* (Pemanasan dan Kenaikan permukaan Laut): Peningkatan suhu air laut dan kenaikan permukaan laut dapat memicu rusaknya ekosistem laut akibat perubahan asam pada air laut. Selain itu, warga pesisir juga terdampak ekonomi dan lingkungan tempat tinggalnya. Kenaikan dan pemanasan air laut terus meningkat dari dua dekade terakhir;
5. *Loss of Species* (Hilangnya Spesies): Perubahan iklim berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk risiko atas keberlangsungan hidup spesies di laut maupun di darat. Laju kehilangan spesies di dunia hingga saat ini sekitar 1.000 kali dan terus meningkat. Kepunahan spesies menjadi tantangan mendatang;
6. *Not Enough Food* (Ketidakcukupan Makanan): Terganggunya ekosistem yang berdampak pada penurunan produktivitas pertanian, peternakan, tanaman pangan, dan perikanan mengganggu ketersedian pangan, sehingga berdampak pada munculnya kasus kelaparan dan gizi buruk di seluruh wilayah secara global;
7. *More Health Risk* (Meningkatnya Risiko Kesehatan): Polusi udara, cuaca ekstrem, penyakit, kelaparan dan kekurangan gizi, tekanan kesehatan mental, pengungsian paksa akibat konflik geopolitik ataupun kelangkaan, menjadi dampak perubahan iklim yang menimbulkan munculnya risiko kesehatan secara global;
8. *Poverty and Displacement* (Kemiskinan dan Pengungsian): Kurang lebih sekitar 23,1 juta orang mengungsi karena dampak cuaca ekstrem di tahun 2010-2019, ketersedian bahan pangan dan air serta bencana banjir dan alam lainnya memicu hilangnya mata pencaharian dan rumah-rumah sehingga peningkatan kemiskinan diprediksi akan terus meingkat.

C. KONDISI GEOPOLITIK GLOBAL

Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah meningkatnya persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewasapadaan global terhadap potensi konflik geopolitik di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut Cina Selatan. Konflik tersebut mengakibatkan dampak pada ekonomi, energi, dan pangan, dan dapat pula berpengaruh pada stabilitas pertahanan dan keamanan secara tidak langsung.

Begitu pula konflik antara Palestina dan Israel. Konflik tersebut telah meluas menjadi konflik pendudukan wilayah dan kemanusiaan (genosida). Secara umum, Indonesia mempraktikkan prinsip politik luar negeri "Bebas Aktif" dan menekankan kemerdekaan, kedaulatan, dan non-blok. Namun, adanya konflik ini akan berpengaruh pada masalah hak asasi manusia, prioritas ekonomi dan perdagangan, dan perubahan kepemimpinan global.

Demikian juga dengan konflik antara Iran dengan Israel. Konflik ini berpotensi menjadi skenario perang langsung dengan atau tanpa keterlibatan seluruh negara Arab. Apabila konflik ini terjadi eskalasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap perekonomian global, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbuka akan ikut terdampak, terutama dalam hal kenaikan harga minyak dunia, guncangan pasar keuangan global, tekanan terhadap cadangan devisa, dan gangguan rantai pasok global.

D. KEMISKINAN GLOBAL

Menurut data terbaru dari Bank Dunia, hampir 700 juta orang, atau sekitar 8,50 persen dari populasi global, hidup dengan kurang dari $2,15 (Rp34.928) per hari, yang merupakan batas kemiskinan ekstrem untuk negara-negara berpendapatan rendah. Meskipun tingkat kemiskinan global menurun dari 38,00 persen pada tahun 1990 menjadi 8,50 persen pada tahun 2024, kemajuan ini terhenti sejak tahun 2019 akibat berbagai krisis global, termasuk pandemi COVID-19, konflik bersenjata, dan perubahan iklim. Kondisi ini membuat target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 semakin sulit dicapai.

Selain itu, sekitar 44persen populasi dunia, atau sekitar 3,5 miliar orang, hidup dengan kurang dari $6,85 (Rp111.282) per hari, yang merupakan batas kemiskinan untuk negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Jumlah total orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ini hampir tidak berubah sejak 1990, karena pertumbuhan populasi. Negara-negara berpendapatan rendah yang paling terdampak oleh peristiwa tersebut dan belum pulih. Terdapat 712 juta orang secara global yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem di tahun 2022, bertambah sebanyak 23 juta orang dibandingkan dengan tahun 2019. Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2030, sekitar 619 juta orang masih akan terjebak dalam kemiskinan ekstrem, menjadikan target pengentasan kemiskinan global semakin menantang.

Kemiskinan dan ketidaksetaraan tidak dapat dikurangi tanpa mengatasi tantangan global yang berkaitan, termasuk pelambatan pertumbuhan ekonomi, kerentanan dan konflik, serta perubahan iklim. Khususnya perubahan iklim karena kehidupan dan mata pencaharian penduduk miskin menjadi yang paling rentan terhadap risiko terkait iklim. Pemberantasan kemisikinan juga memerlukan penanganan multidimensi. Suatu negara tidak dapat mengatasi kemiskinan dengan baik tanpa meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara komprehensif, termasuk akses yang berkeadilan pada layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, termasuk yang berupa digital. Selain itu, pembuat kebijakan harus menambah upaya dalam pertumbuhan ekonomi yang mana dapat menciptakan pekerjaan dan lapangan kerja yang berkualitas, sembari melindungi masyarakat yang paling rentan.

2.6.2.2 ISU NASIONAL

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk mencapai cita-cita jangka panjang ini telah dirumuskan pada tahap pertama RPJMN Tahun 2025-2029 melalui Visi Presiden Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui 8 (delapan) agenda besar prioritas nasional (Asta Cita) yang ditekankan melalui strategi prioritas pembangunan yang dikenal dengan Trisula Pembangunan, yang mencakup: a) menurunkan tingkat kemiskinan; b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan c) mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan, lebih lengkapnya sebagaimana penjelasan di bawah.

A. MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN

Peristiwa global seperti pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan tambahan pada upaya penurunan kemiskinan. Dampak pandemi yang memperlebar kesenjangan ekonomi, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal, menambah beban pemerintah untuk segera merespon krisis melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif. Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, pemerintah menetapkan dua target utama dalam upaya penurunan kemiskinan. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5-5,0 persen, sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target kemiskinan ekstrem ini juga mengikuti standar internasional pada USD 2,15 *Purchasing Power Parity* per kapita per hari. Fokus diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan.

B. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pembangunan manusia merupakan aspek fundamental dalam proses pembangunan nasional yang menempatkan individu dan masyarakat sebagai elemen sentral, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan infrastruktur semata, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Dengan memberikan prioritas pada pengembangan sumber daya manusia, suatu negara dapat membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, serta kemajuan politik yang berkelanjutan. Pembangunan manusia yang optimal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing suatu bangsa di tingkat global.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sebagai tolok ukur capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia digunakan Indeks Modal Manusia yang merefleksikan potensi kontribusi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan yang tersedia selama periode tumbuh kembang manusia. Dalam lima tahun ke depan, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat dari 0,54 di Tahun 2020 menjadi 0,59 di Tahun 2029.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, terdapat beberapa faktor kunci yang menentukan keberhasilannya, diantaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Intervensi kunci di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik, serta penciptaan tenaga kependidikan berkualitas. Strategi peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui wajib belajar 13 tahun; pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul; revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja; perluasan layanan pendidikan anak usia dini; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi; serta peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi berdaya saing unggul.

Di samping pendidikan, sektor kesehatan juga memegang peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif. Kesehatan yang baik merupakan prasyarat utama bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Intervensi kunci terdiri dari pencegahan stunting serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pencegahan stunting difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan; penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.

C. PERTUMBUHAN TINGGI BERKELANJUTAN

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran strategis sebagai motor utama dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi produktif, serta pengembangan inovasi di berbagai sektor. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi yang dikombinasikan dengan peningkatan kualitas modal manusia akan menciptakan lingkungan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan indikator ekonomi makro seperti produk domestik bruto (PDB) atau tingkat investasi, tetapi juga harus mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga memperkuat basis fiskal untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada Tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029.

2.6.2.3 ISU REGIONAL

A. PELAKSANAAN TAHAP PERTAMA TERHADAP RPJPD TAHUN 2025-2045

Bagi Provinsi Banten, isu-isu strategis yang di identifikasi, selain sejauh mungkin diupayakan tetap sinkron dengan arah kebijakan jangka panjang nasional juga merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten tahun 2025-2045 Pelaksanaan Tahap Pertama berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun pertama diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; pengembangan pusat-pusat perekonomian baru serta penguatan riset dan inovasi; peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan; pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan; dan peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum. Pada tahap periode pertama ini, Penguatan Modal Dasar pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 ini guna menjawab arah kebijakan periode pertama RPJPN 2025-2045 berupa Perkuatan Fondasi Transformasi.

B. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU. Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan lebih dijelaskan secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta secara teknis penyusunan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana mengharuskan adanya analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2025–2029 didapati bahwa analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Banten ditentukan dengan melihat pada capaian masing-masing indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Banten sesuai dengan kelompok kewenangan provinsi. Capaian tersebut secara umum disajikan dalam bentuk data selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai 2023. Berdasarkan data capaian tersebut selanjutnya dilakukan analisis apakah capaian dari masing-masing indikator pada tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2019, dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari proses Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) yang telah dilakukan, menghasilkan Isu Strategis KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

TABEL II.65
IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PALING STRATEGIS YANG BERDAMPAK TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

NO	ISU PB	PENILAIAN 6 MUATAN KLHS		JUSTIFIKASI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		TOTAL SKOR	KETERANGAN	
1	PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN	27	PALING STRATEGIS	DALAM KAJIAN 6 MUATAN KLHS SANGAT BERDAMPAK TERHADAP DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LAHAN BAIK PENYEDIAAN PANGAN, AIR, DAN KAPASITAS TIMBULAN SAMPAH, APABILA TERJADI ALIH FUNGSI LAHAN YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN MAKA AKAN SANGAT BERDAMPAK. SELAIN ITU EFISIENSI PEMANFAATAN SDA POTENSI

NO	ISU PB	PENILAIAN 6 MUATAN KLHS		JUSTIFIKASI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		TOTAL SKOR	KETERANGAN	
				KEANEKARAGAMAN HAYATI AKAN SANGAT BERPENGARUH TERUTAMA DI KAWASAN PESISIR DAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH PERKOTAAN. HAL TERSEBUT JUGA SESUAI ARAHAN SDG YANG BELUM TERCAPAI SAAT INI YAITU LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERIKANAN HANYA TERCAPAI 0,56 PERSEN.
2	KEBUTUHAN AIR BERSIH, AIR BAKU DAN SUMBER DAYA AIR	25	PALING STRATEGIS	KEBUTUHAN AIR MERUPAKAN SALAH SATU HAL UTAMA DALAM KEBERLANGSUNGAN KEHIDUPAN PENDUDUK SEKITAR, DAMPAK YANG SANGAT BERPENGARUH TERKAIT DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG PENYEDIAAN AIR DI PROV BANTEN. SAAT INI KEBUTUHAN AIR DIDOMINASI TERLAMPAUI YAITU MENCAPAI 657.762,01 HA. SEMENTARA YANG LUAS WILAYAH YANG BELUM TERLAMPAUI HANYA 212.497,52 HA. SELAIN ITU BERDASARKAN PROGRAM PENCAPAIAN SDGS TERKAIT DENGAN KEBUTUHAN PENYEDIAAN AIR YANG BELUM TERCAPAI YAITU CAKUPAN PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN /KOTA, 1 PERSEN, INDEKS KUALITAS AIR, 41,30 PERSEN. UNTUK PROGRAM YANG PERLU DI CAPAI MELIPUTI, PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN, 17,17 PERSEN
3	ANCAMAN MENINGKATNYA KERAWANAN PANGAN	24	PALING STRATEGIS	PENYEDIAAN PANGAN DIPROVINSI BANTEN JIKA DITINJAU PADA TAHUN 2045 MENDATANG HANYA KABUPATEN PANDEGLANG YANG BELUM TERLAMPAUI PADA PENYEDIAAN PANGAN (BERAS) SEMENTARA PADA PENYEDIAAN PANGAN (NON-BERAS) SEMUA WILAYAH BERADA PADA FASE TERLAMPAUI. SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN SDGS YANG BELUM TERCAPAI SAAT INI MELIPUTI: PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA ANAK DI BAWAH DUA TAHUN/BADUTA, REALISASI PENCAPAIAN 6,3 PERSEN PERSENTASE BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF, REALISASI PENCAPIAN 70,6 PERSEN KUALITAS KONSUMSI PANGAN YANG DIINDIKASIKAN OLEH SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) DAN, TINGKAT KONSUMSI IKAN, REALISASI PENCAPAIAN 83,39 PERSEN, DAN JUMLAH VARIETAS UNGGUL TANAMAN, REALISASI PENCAPAIAN 14 VUB. UNTUK PROGRAM YANG PERLU DICAPAI, MELIPUTI: PREVALENSI STUNTING, 24,5 PERSEN
4	KEMISKINAN EKSTRIM	24	PALING STRATEGIS	KEMISKINAN DI KAWASAN DAERAH TERTINGGAL SAAT INI SANGAT BERDAMPAK PADA DAYA DUKUNG DAN EFISIENSI PEMANFAATAN SDA, KARENA SALAH SATUNYA PENYEBAB KEMISKINAN DAPAT DISEBABKAN OLEH KRISIS PENYEDIAAN KEBUTUHAN PANGAN DAN AIR. SELAIN ITU RENDAHNYA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PADA SUATU WILAYAH SEHINGGA KECILNYA NILAI PEREKONOMIAN PADA SEKTOR POTENSIAL SEBAGAIMANA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PER KAPITA DENGAN ADANYA EFISIENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SEMENTARA TERKAIT DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN SDGS YANG BELUM TERCAPAI SAAT INI MELIPUTI PERSENTASE PENDUDUK YANG 60,36 PERSEN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN, REALISASI PENCAPAIAN, PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS YANG MISKIN, RENTAN YANG TERPENUHI HAK DASARNYA DAN INKLUSIVITAS REALISASI PENCAPAIAN 100 PERSEN, RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH TERTINGGAL, 5 PERSEN, DAN RATA-RATA PERSENTASE

NO	ISU PB	PENILAIAN 6 MUATAN KLHS		JUSTIFIKASI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		TOTAL SKOR	KETERANGAN	
				PENDUDUK MISKIN DI DAERAH TERTINGGAL, 6,78/4,44 PERSEN. UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN YANG PERLU DICAPAI MELIPUTI PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BERPENDAPATAN RENDAH MENGAKSES RUMAH LAYAK HUNI (KELOMPOK PENDUDUK 40 PERSEN TERBAWAH), REALISASI PENCAPAIAN 60,78 PERSEN, DAN PREVALENSI STUNTING, 24,5 PERSEN.
5	PERSAMPAHAN	20	PALING STRATEGIS	KETERSEDIAAN TERKAIT TPA REGIONAL, IPAL, TPS, DAN LIMBAH B3 AKAN BERDAMPAK TERHADAP ISU TERSEBUT SEBAGAIMANA DAYA TAMPUNG TERHADAP TIMBULAN SAMPAH DALAM 20 TAHUN MENDATANG DIPROYEKSIKAN AKAN MENCAPAI 27.277.419,74 M3/TAHUN, SEHINGGA PERLU PENYEDIAAN TPA REGIONAL DAN SARANA/PRASARANA PERSAMPAHAN YANG BAIK DAN TERINTEGRASI. SELAIN ITU DAMPAK YANG BERPENGARUH LAINNYA YAITU DAMPAK DAN RISIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KARENAKAN JIKA DALAM PENYEDIAAN SANITASI TIDAK MEMADAI SAMPAH DAN LIMBAH AKAN BERDAMPAK TERHADAP RISIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN. SEMENTARA UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN SDGS SAAT INI YANG BELUM TERCAPAI, MELIPUTI: CAKUPAN PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN /KOTA, 1 PERSEN, CAKUPAN PENYEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN REGIONAL, 5 PERSEN, DAN INDEKS KUALITAS AIR, 43,20 PERSEN. UNTUK PROGRAM LAINNYA YANG PERLU DI CAPAI DARI HASIL CAPAIAN SDGS TAHUN 2021 YAITU PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN, 17,17 PERSEN.

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029

C. ISU STRATEGIS RIPJPID DALAM KONTEKS PRODUK UNGGULAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Provinsi Banten memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui Produk Unggulan Daerah (PUD). Produk unggulan ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta pariwisata. Pengembangan PUD di Banten bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang ekspor, serta memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan analisis sektor-sektor ekonomi di Banten, beberapa komoditas unggulan telah diidentifikasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Komoditas ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik di pasar domestik maupun internasional, terutama jika didukung oleh inovasi teknologi dan penguatan infrastruktur. Sektor-sektor utama yang menjadi sumber PUD Banten meliputi:

- Pertanian: Hortikultura, padi, jagung, dan kelapa sawit.
- Perikanan: Ikan bandeng, udang, dan ikan laut lainnya.
- Industri Pengolahan: Makanan olahan dan produk tekstil.
- Pariwisata: Destinasi wisata pantai, ekowisata, dan wisata budaya.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam ekonomi Banten, terutama dalam hal produksi hortikultura dan tanaman pangan. Selain itu, perikanan di Banten juga berkembang pesat, dengan produk seperti bandeng dan udang yang berpotensi untuk pasar ekspor. Sektor industri pengolahan, terutama makanan olahan dan tekstil, menunjukkan peluang besar dalam menciptakan nilai tambah bagi produk lokal.

Produk unggulan dari Banten, terutama di sektor perikanan dan pertanian, memiliki peluang besar untuk diekspor ke pasar internasional. Dengan kualitas produk yang kompetitif, serta peningkatan akses pasar melalui pengembangan infrastruktur, Banten dapat memanfaatkan peluang ekspor yang besar, terutama di sektor makanan olahan dan produk laut. Selain itu, produk-produk seperti kelapa sawit dan hortikultura juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di pasar ekspor.

Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) di Provinsi Banten tidak dapat dilepaskan dari pentingnya inovasi teknologi. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing produk unggulan daerah di pasar nasional dan internasional. Adopsi teknologi juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan globalisasi dan memperluas jangkauan pasar, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Penggunaan teknologi dalam PUD dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, serta mempercepat proses distribusi. Teknologi memungkinkan adanya inovasi dalam berbagai aspek, mulai dari proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran produk. Misalnya, otomatisasi dalam proses produksi memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus menambah tenaga kerja yang signifikan. Teknologi juga membantu menjaga konsistensi kualitas produk, sehingga dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh konsumen di pasar internasional.

Pengembangan inovasi teknologi sangat krusial untuk memperkuat daya saing Produk Unggulan Daerah (PUD) di Provinsi Banten. Dengan penerapan teknologi dibidang produksi, pengolahan, dan pemasaran, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar, dan merespons perubahan permintaan konsumen dengan lebih cepat. Meskipun tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur masih ada, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta, inovasi teknologi dapat diadopsi secara lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Banten.

Untuk mendorong pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) di Provinsi Banten, diperlukan rencana aksi yang strategis dan kebijakan yang mendukung. Rencana aksi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan PUD berbasis inovasi teknologi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan yang diusulkan juga harus memberikan dukungan baik dari aspek regulasi, pembiayaan, maupun infrastruktur untuk memastikan keberhasilan program ini.

Salah satu elemen penting dalam rencana aksi ini adalah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan program pengembangan PUD. Indikator ini akan menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Beberapa IKU yang relevan meliputi:

- Peningkatan kontribusi PUD terhadap perkembangan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat: mengukur sejauh mana produk unggulan daerah berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- Pertumbuhan jumlah UMKM yang terlibat dalam pengembangan PUD: mengukur peningkatan jumlah pelaku usaha kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi produk unggulan.
- Ekspansi pasar produk unggulan: mengukur sejauh mana produk unggulan daerah telah memasuki pasar nasional dan internasional, baik melalui distribusi langsung maupun platform digital.
- Peningkatan kapasitas produksi berbasis teknologi: mengukur jumlah UMKM yang telah mengadopsi teknologi dalam proses produksi mereka.

Untuk mencapai keberhasilan pengembangan PUD, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan implementasi yang efektif. Berikut beberapa strategi implementasi kebijakan yang dapat diterapkan:

- Penguatan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah daerah harus memastikan akses internet yang merata di seluruh wilayah Banten, terutama di daerah pedesaan, untuk memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital. Pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet dan pusat data sangat penting dalam mendukung e-commerce dan pemasaran digital produk unggulan.
- Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM: Program pelatihan berbasis teknologi harus ditingkatkan untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan digital, termasuk penggunaan e-commerce, pemasaran digital, manajemen produksi berbasis teknologi, dan adopsi otomatisasi dalam produksi. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan vokasi dapat membantu mempercepat peningkatan kapasitas SDM lokal.
- Dukungan Pembiayaan dan Akses Modal: Pemerintah daerah perlu memberikan insentif berupa akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM yang terlibat dalam pengembangan PUD. Program pinjaman berbunga rendah atau hibah teknologi dapat diberikan kepada UMKM yang menunjukkan komitmen untuk mengadopsi teknologi dalam produksinya. Selain itu, pemerintah juga dapat mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- Kemitraan antara Pemerintah, Swasta, dan Akademisi: Kemitraan ini diperlukan untuk menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi antara sektor swasta dan perguruan tinggi dalam menciptakan teknologi baru yang dapat diterapkan di sektor PUD. Akademisi dapat memberikan dukungan riset dan pengembangan (R&D) yang membantu

menemukan solusi teknologi yang sesuai dengan karakteristik produk unggulan di Banten.

D. TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tantangan pembangunan merujuk pada berbagai hambatan, kesulitan, atau masalah yang dihadapi suatu negara atau wilayah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Tantangan pembangunan Provinsi Banten saat ini yang dirumuskan secara holistik-tematik ini dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

a) Tata Kelola Pemerintahan

Kurangnya transparansi dalam pemerintahan masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan karena dapat menghambat efektivitas kebijakan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menjadi langkah yang esensial guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan sejalan dengan prinsip keadilan dan kepentingan publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berfokus pada profesionalisme, kompetensi, dan integritas dalam proses rekrutmen serta promosi pegawai. Dengan sistem ini, diharapkan dapat mengurangi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga birokrasi menjadi lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada kinerja.

Selain itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif, berbasis prinsip meritokrasi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan pemerintah, memberikan masukan yang konstruktif, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Dengan adanya keterlibatan publik yang lebih luas, transparansi dalam pemerintahan akan semakin terjamin, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

b) Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Banten merupakan pusat industri utama di Indonesia, namun tingkat pengangguran yang tinggi masih menjadi tantangan. Akses lapangan kerja yang layak belum merata, terutama bagi kaum muda, perempuan, dan kelompok rentan. Oleh karena itu, strategi inklusif diperlukan untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

Sebagai jalur penghubung Sumatera dan Jawa serta penyangga Jakarta, Banten harus memanfaatkan bonus demografi dengan menarik investasi padat karya dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi ini harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan pekerja melalui upah layak dan perlindungan tenaga kerja.

Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi kunci dalam membuka peluang ekonomi bagi kelompok marjinal. Dukungan terhadap akses produksi, permodalan, pelatihan, dan pemasaran akan mendorong UMKM berkembang lebih kompetitif. Pemerintah harus berperan aktif dalam mempromosikan produk lokal agar bersaing di pasar nasional dan global.

Pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Tol Serang–Panimbang, harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Banten Selatan, melalui sektor produksi pangan, pariwisata berbasis budaya, dan industri kreatif. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Banten dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

c) Pariwisata dan Industri Kreatif

Pengembangan wisata alam, religi, dan budaya di Banten perlu dioptimalkan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan kekayaan alam, situs bersejarah, serta budaya lokal yang khas, Banten memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan. Selain itu, industri kreatif seperti kerajinan, seni pertunjukan, dan kuliner harus didukung melalui pelatihan, permodalan, dan pemasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Promosi digital dan event nasional maupun internasional juga penting untuk meningkatkan daya saing. Dengan strategi yang terintegrasi, Banten dapat berkembang sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

d) Pendidikan dan Keterampilan

Peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang menjadi prioritas utama untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Infrastruktur pendidikan yang memadai serta peningkatan kompetensi guru diperlukan guna mendukung sistem pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi harus diprioritaskan agar lulusan siap kerja. Pondok pesantren juga perlu didukung dengan program keterampilan dan kewirausahaan agar santri memiliki peluang lebih luas di dunia kerja. Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan berdaya saing.

e) Kesehatan dan Pelayanan Publik

Akses layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil. Upaya peningkatan akses dan kualitas layanan harus terus dilakukan melalui pengembangan puskesmas rawat inap serta pembangunan pusat kesehatan desa untuk menjangkau masyarakat terisolasi. Optimalisasi tenaga medis, fasilitas, dan program kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan Banten Sehat.

Selain itu, modernisasi sistem pelayanan publik diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan merata.

f) Sosial Budaya

Menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Banten menjadi tantangan krusial mengingat keberagaman agama, kepercayaan, dan budaya yang kaya. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk membangun sikap saling menghormati antara kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat dan komunitas budaya lokal, guna menciptakan harmoni sosial dan memperkuat identitas daerah yang inklusif.

Selain itu, pelestarian dan promosi keberagaman agama serta budaya dapat menjadi aset strategis dalam pengembangan pariwisata. Keunikan tradisi dan warisan budaya Banten berpotensi menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga tidak hanya memperkuat stabilitas sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat adat, dan pelaku pariwisata, Provinsi Banten dapat berkembang sebagai wilayah yang harmonis, inklusif, dan berdaya saing di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

g) Infrastruktur dan konektivitas

Provinsi Banten menghadapi tantangan signifikan dalam infrastruktur dan konektivitas, terutama di kawasan perdesaan yang masih mengalami keterbatasan akses transportasi. Kondisi jalan, jembatan, serta sistem sumber daya air memerlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih intensif guna meningkatkan mobilitas dan mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, transportasi umum yang belum optimal berkontribusi terhadap kemacetan di wilayah perkotaan serta membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembangunan dan modernisasi jalur transportasi yang lebih terintegrasi antar kota dan kabupaten. Pengembangan infrastruktur berbasis keberlanjutan, termasuk jalan tol, jalur kereta api, serta sistem transportasi massal yang efisien, menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Banten dapat menciptakan sistem infrastruktur yang lebih inklusif, merata, dan mendukung kesejahteraan seluruh warganya.

h) Lingkungan dan sumber daya alam

Provinsi Banten menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah dan limbah, terutama di kawasan perkotaan dan industri. Diperlukan sistem pengelolaan terpadu yang lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan limbah sebagai sumber energi terbarukan.

Selain itu, perubahan iklim dan risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, memerlukan perhatian khusus. Strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif harus dikembangkan melalui peningkatan infrastruktur hijau, pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan, serta edukasi masyarakat untuk memperkuat ketahanan lingkungan.

Dengan langkah-langkah ini, Banten dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

2.6.2.4 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi masalah atau tantangan utama terkini yang perlu dikedepankan dan ditanggulangi dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan karena dapat berdampak signifikan terhadap kondisi dimasa mendatang. Selain itu juga secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi potensi daerah maupun permasalahan pembangunan yang ada di Provinsi Banten.

Isu strategis yang diperhatikan dalam pemetaan tema pembangunan prioritas Provinsi Banten dalam RPJMD 2025-2029, sebagai berikut:

- Pemantapan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani

  Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, membangun pemerintahan yang bersih dan efisien saja tidaklah cukup, birokrasi pun harus dapat melayani dan yang paling penting tidak adanya korupsi menjadikan tantangan tersendiri dalam memajukan Provinsi Banten ke arah yang lebih baik.

  Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi, dirumuskanlah isu strategis yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berintegritas dan adaptif. Isu ini menggambarkan tekad untuk membangun masyarakat yang bermoral Pancasila dan demokratis dengan fondasi iman dan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani menjadi titik tolak utama dalam mewujudkan perubahan yang menyeluruh.

  Reformasi birokrasi yang bersih dan melayani merupakan suatu fondasi utama untuk dapat terciptanya pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan tentunya transparan. Peran birokrasi khususnya kepada aparatur sebagai pelayan publik inilah yang menjadi motor atau penggerak reformasi birokrasi yang menjadi krusial, untuk dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dalam pemberantasan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan integritas menjadi nilai yang perlu tertanam dalam setiap aparatur. Hal lainnya yang tidak kalah penting, reformasi birokrasi juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

  Untuk mewujudkan pemantapan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani melalui peningkatan pelayanan publik yang prima, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi, meningkatkan integritas birokrasi serta meningkatkan kualitas layanan statistik yang akurat dan andal.

- Peningkatan produktivitas ekonomi wilayah

  Provinsi Banten dengan posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera-Pulau Jawa yang memiliki potensi yang sangat berdaya saing dalam meningkatkan produktivitas ekonomi disektor unggulan seperti manufaktur, pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif (sektor kuliner, fashion, dan kriya). Berbagai potensi ini perlu menjadikan Provinsi Banten sebagai episentrum bagi pertumbuhan ekonomi Nasional.

  Dalam menghadapi berbagai tantangan dan sentimen negatif sektor ekonomi yang bergejolak saat ini, maka peningkatan produktivitas ekonomi wilayah tidak cukup hanya berfokus kepada pertumbuhan angka, namun terpenting pada penyebaran kebermanfaatan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat. Penguatan sektor ekonomi menjadi isu penting yang diarahkan untuk mendorong kemajuan yang inklusif, sebagai solusi terhadap permasalahan kemiskinan di Provinsi Banten.

  Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dicapai dengan cara meningkatkan produktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas investasi yang merata antara wilayah Banten Utara dan Banten Selatan guna mengurangi ketimpangan yang hilirnya diharapkan munculnya daya saing wilayah Banten Selatan, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta meningkatkan lingkungan di Provinsi Banten yang kondusif dan demokratis.

- Penanggulangan kemiskinan

  Isu lainnya yang sangat perlu menjadi perhatian yaitu penanggulangan kemiskinan untuk mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk menjadikan Banten yang Adil dan Merata akan hal pembangunannya untuk dapat dirasakan oleh berbagai golongan masyarakat. Lebih jauh daripada itu penanggulangan kemiskinan menjadi penting karena dampak turunannya yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, pendidikan, kesehatan serta terhadap aspek ekonomi masyarakat.

  Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan signifikan pada Tahun 2024, dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 6,17 persen pada Maret 2023 menjadi 5,84 persen pada Maret 2024, dan lebih lanjut menjadi 5,7 persen pada September 2024. Hal ini menggambarkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, maupun mengurangi kantong kemiskinan. Namun demikian hal lainnya masih menyisakan tantangan terhadap kesenjangan wilayah yang dapat mengakibatkan meningkatnya ketimpangan sosial serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, di Kota Tangerang Selatan memiliki angka terendah sebesar 2,36 persen terhadap persentase kemiskinan sementara di Kabupaten Pandeglang mencatatkan persentase kemiskinan yang tinggi mencapai 9,18 persen, serta tantangan lainnya dalam pengentasan kemiskinan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah (ketergantungan pada sektor informal, pendidikan dan keterampilan rendah, minimnya akses terhadap modal dan pasar, dan hal lainnya).

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menangani penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten diarahkan pada meningkatkan keberfungsian sosial, individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, menurunkan kemiskinan wilayah pedesaan, dan meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi kerakyatan.

Strategi lainnya selain upaya langsung seperti bantuan sosial dan fasilitas *microfinancing* yaitu melalui pemberdayaan ekonomi, khususnya penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dijalankan sehingga masyarakat yang terdampak bisa memanfaatkan potensi ekonomi lokal dan inovasi dalam penerapan teknologi digital.

- Peningkatan pemerataan kualitas layanan Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan kualitas SDM juga menjadi fokus utama untuk diselesaikan dalam dokumen perencanaan jangka menengah ini, di Provinsi Banten masih menyisakan tantangan kompleks terhadap peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM yang terletak pada masih tingginya kesenjangan akses dan mutu layanan antarwilayah, terutama antara kawasan maju Banten Utara dengan Banten Selatan. Keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, rendahnya distribusi tenaga pengajar dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta minimnya akses terhadap pelatihan kerja yang relevan menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, belum optimalnya integrasi program lintas sektor dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan SDM turut memperkuat ketimpangan yang ada, sehingga upaya pemerataan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, berbasis data, dan berkelanjutan

Peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM di Provinsi Banten menjadi prioritas strategis dalam upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat menciptakan SDM yang tidak hanya berdaya saing dan inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, gender dengan didukung oleh akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil dan berkualitas tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu melalui meningkatkan intelektual dan karakter masyarakat, meningkatkan kualitas taraf kesehatan masyarakat, dan perlunya untuk meningkatkan pembangunan kualitas keluarga.

Strategi dalam peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM di Provinsi Banten difokuskan pada akses dan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan yang setara, pelatihan berbasis kompetensi yang adil, merata, dan terstandarisasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan kapasitas guru, pengembangan vokasi dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri (*link and match*)serta adanya inovasi dan digitalisasi dalam penerapan pembelajaran untuk memperluas jangkauan pendidikan, termasuk bagi kelompok rentan.

Sementara itu strategi lainnya dalam peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM disektor kesehatan berfokus kepada penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat membantu terpetakannya kebutuhan serta pendistribusian sumber daya secara tepat sasaran. Dengan berbagai strategi ini, SDM Banten diharapkan lebih kompetitif, inklusif, dan siap menghadapi dinamika ekonomi serta tantangan global.

- Penanggulangan pengangguran terintegrasi

  Tantangan yang terjadi dalam penyelesaian permasalahan penanggulangan pengangguran secara terintegrasi di Provinsi Banten mencakup belum optimalnya sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan riil pasar kerja, terutama di daerah dengan angka pengangguran tinggi. Kesenjangan antara wilayah memperlihatkan ketimpangan akses terhadap informasi lowongan kerja, pelatihan keterampilan, serta peluang berwirausaha.

  Lebih jauh, penanggulangan pengangguran sejatinya saling berkaitan erat dengan isu peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM, ketimpangan layanan pendidikan dan pelatihan kerja antarwilayah menjadi salah satu faktor utama tingginya angka pengangguran, terutama di daerah-daerah tertinggal seperti Banten Selatan. Lebih lanjut, distribusi dan peningkatan kompetensi SDM melalui penyediaan akses pendidikan yang merata, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan kerja merupakan fondasi utama untuk menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi tuntutan pasar. Ketika kualitas layanan SDM terdistribusi secara adil antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil, maka potensi tenaga kerja dapat dikembangkan secara maksimal sehingga membuka lebih banyak peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, pemerataan akses pelatihan dan pembekalan keahlian memungkinkan setiap warga di Banten untuk mendapatkan manfaat dari inovasi serta teknologi modern yang mendukung proses *re-skilling* dan *up-skilling*.

  Untuk menangani pengangguran di Provinsi Banten diarahkan kepada perlunya untuk meningkatkan peran serta penduduk usia kerja dalam perekonomian. Selain itu, perluasan akses informasi pasar kerja dan pengembangan program padat karya menjadi strategi efektif untuk menekan angka pengangguran. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, Banten diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif, berdaya saing, dan terserap dalam berbagai sektor ekonomi

- Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan

  Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan di Provinsi Banten memiliki berbagai permasalahan yang cukup menantang, terletak pada ketimpangan infrastruktur dan aksesibilitas antarwilayah. Keterbatasan jaringan transportasi, konektivitas digital, serta pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih maupun sanitasi menjadi penghambat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan SDM yang adil dan merata.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, maka peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan di Provinsi Banten perlu dilakukan secara strategis dengan memperhatikan karakteristik wilayah yang masih timpang serta potensi konektivitas dengan provinsi sekitar seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Perlunya pembangunan yang tidak hanya terfokus di wilayah Tangerang Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pengembangan potensi lokal di daerah selatan seperti daerah lainnya.

Dengan memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, transportasi massal, dan infrastruktur penunjang lainnya secara merata, dapat memposisikan Provinsi Banten sebagai simpul antara Pulau Jawa dan Sumatera, salah satunya melalui pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung *logistic flux* di Sumatera dan Jawa, sehingga tema pembangunan Provinsi Banten dalam dokumen perencanaan menengah sebagai Gerbang Integrasi Ekonomi Jawa-Sumatera dan Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional dapat terwujud dengan didukung kolaborasi lintas daerah. Integrasi perencanaan dengan provinsi sekitar juga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, seimbang, dan saling menguntungkan dalam kerangka pembangunan kawasan metropolitan dan nasional.

Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan di Provinsi Banten diarahkan pada meningkatkan layanan infrasturktur, meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatkan konektivitas transportasi, dan meningkatkan ketahanan energi yang berkelanjutan.

- Penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi potensi bencana

Tantangan dalam penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi potensi bencana di Provinsi Banten terletak pada beberapa aspek krusial, yaitu pesatnya pertumbuhan urbanisasi yang menyebabkan hilangnya lahan hijau serta kerusakan ekosistem lokal. Kondisi ini diperparah oleh tingginya alih fungsi lahan dan penambangan ilegal, yang keduanya meningkatkan risiko terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, sehingga memerlukan upaya strategis dan sistematis dalam memperkuat sistem mitigasi bencana yang terintegrasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain terbatasnya infrastruktur sistem peringatan dini akibat tingginya kebutuhan investasi untuk pengadaan teknologi yang efisien, modern, dan adaptif terhadap berbagai potensi bencana.

Selain itu, masih rendahnya tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas melalui edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana di tingkat lokal.

Permasalahan pencemaran lingkungan, khususnya di wilayah pesisir dan kawasan strategis lainnya, serta dampak dari perubahan iklim, turut menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Hal ini berdampak langsung terhadap keberlanjutan pembangunan daerah, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, terpadu, dan berbasis bukti.

Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan dalam pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana di Provinsi Banten diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan ketahanan dan resiliensi daerah terhadap bencana, serta percepatan penerapan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab sebelumnya telah menjabarkan secara jelas akan permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang di Provinsi Banten, berdasarkan permasalahan dan isu strategis tersebut kemudian dirumuskan untuk dapat dituntaskan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Tahun 2025-2029 dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten.

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 VISI

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran cita-cita sekaligus cerminan terhadap komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mencapai pembangunan Provinsi Banten ke arah yang lebih baik.

GAMBAR III.1
VISI RPJMD TAHUN 2025-2029
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 ini tidak terlepas dari visi RPJPD Tahun 2025-2045 berupa **"Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa"** yang diwujudkan melalui visi RPJMD Tahun 2025-2029.

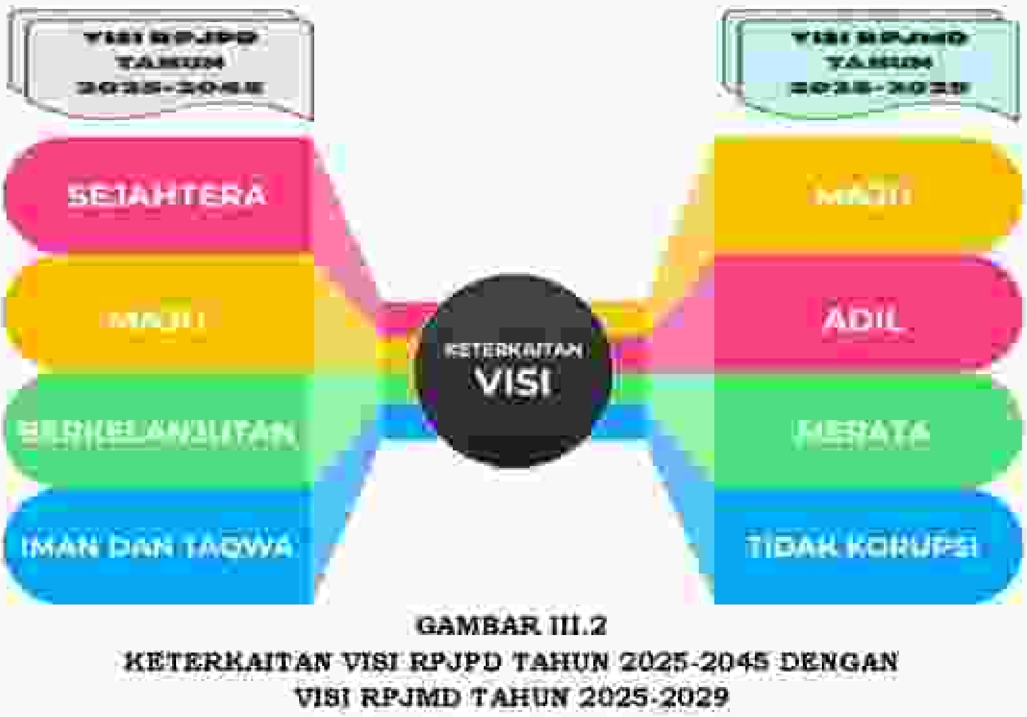

GAMBAR III.2
KETERKAITAN VISI RPJPD TAHUN 2025-2045 DENGAN
VISI RPJMD TAHUN 2025-2029
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

Penjabaran atas makna terhadap visi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana di atas yaitu:

- Maju

  Maju dalam arti luas diinterpretasikan sebagai kondisi suatu daerah yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang tinggi, serta memiliki standar hidup yang baik bagi penduduknya. Kata "maju" dalam visi menggambarkan kondisi perekonomian Provinsi Banten yang semakin kompetitif melalui basis sektor kreatif dan sektor unggulan, disertai pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan peningkatan nilai tambah tinggi yang didorong dengan daya saing berbasis riset, inovasi, dan hilirisasi di berbagai sektor unggulan dan potensial. Kemajuan ini dicapai dengan inovasi, kerja keras, kolaborasi, serta kepemimpinan yang visioner untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Adil

  Adil adalah kondisi pemerintahan yang memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga tanpa memandang kedudukan, jabatan, atau kelompok tertentu. Konsep keadilan juga memastikan bahwa setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Kata "adil" diinterpretasikan sebagai bentuk untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul didukung oleh aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan hal lainnya untuk menciptakan masyarakat di Provinsi Banten yang unggul, berdaya saing, dan berkeahlian tinggi sebagai modal dasar bersaing secara global dengan berprinsip mengedepankan keadilan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat (*no one left behind*), di mana masyarakat akan menjadi aktor utama keberlanjutan arah gerak pembangunan di Provinsi Banten.

- Merata

  Merata merujuk pada keadaan di mana pendapatan dan sumber daya didistribusikan secara merata di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat dalam suatu daerah dengan tetap mengacu pada karakteristik unik setiap wilayah, seperti budaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang memengaruhi kebijakan pembangunan.

  Merata merupakan upaya mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif di seluruh daerah disertai makna penciptaan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup ditopang oleh sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan. Diharapkan tidak ada lagi timbul kesenjangan khususnya antara Banten Utara dan Banten Selatan.

- Tidak Korupsi

  Tidak Korupsi merupakan kondisi tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang tidak sah, atau lebih luas lagi, setiap tidak adanya tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan. Kata "tidak korupsi" merupakan nilai utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi landasan sekaligus terwujudnya Provinsi Banten yang maju, adil, dan merata. Nilai ini mendorong terbentuknya masyarakat bermoral pancasila yang dilandasi oleh Iman dan Taqwa.

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024, memuat target sasaran utama visi yang terukur sebagai wujud cerminan akan kondisi pembangunan yang diharapkan guna mencapai Banten di Tahun 2045 menjadi Banten Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa. Representasi keberhasilan pembangunan Tahun 2025-2029 terhadap pencapaian sasaran utama visi berupa: 1) peningkatan pendapatan per kapita; 2) pengentasan kemiskinan dan ketimpangan; 3) kepemimpinan daerah sebagai hub integrasi ekonomi pulau Sumatera–Jawa serta penyangga industri nasional; 4) peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission* dengan indikator kinerja sebagaimana berikut ini.

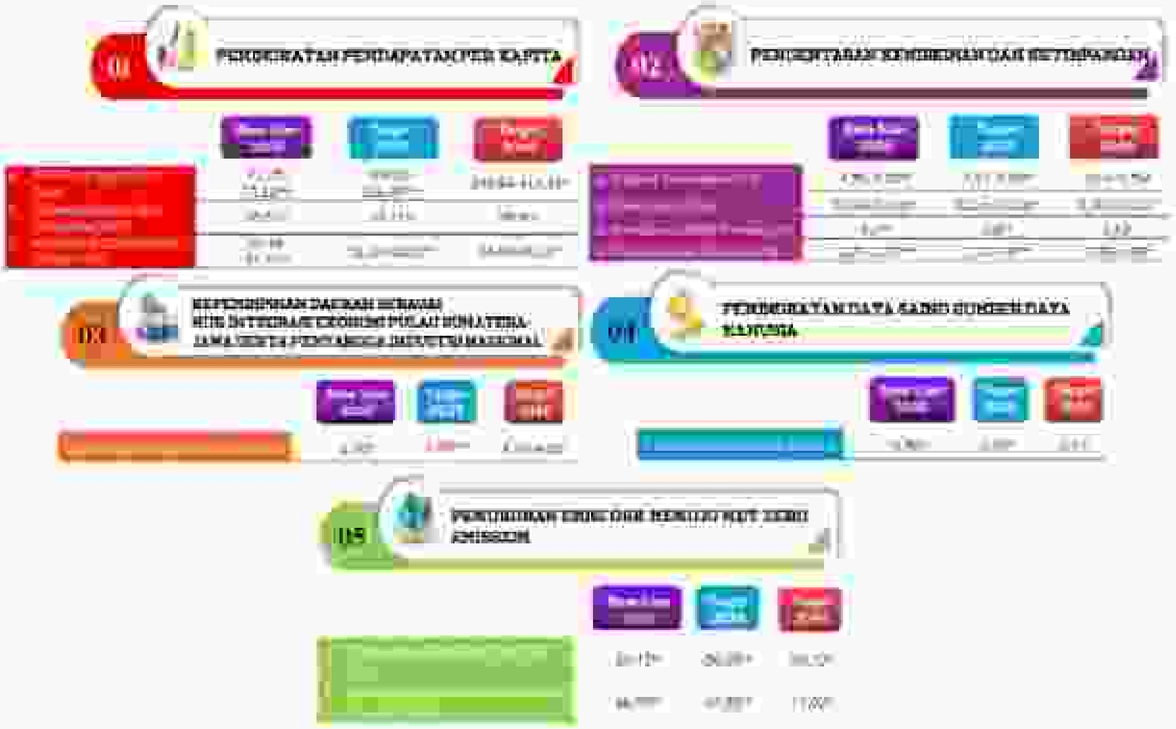
01
PENINGKATAN PENDAPATAN PER KAPITA
02
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN
03
KEPEMIMPINAN DAERAH SEBAGAI HUB INTEGRASI EKONOMI PULAU SUMATERA-JAWA SERTA PENYANGGA INDUSTRI NASIONAL
04
PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA
05
PENURUNAN EMISI GRK MENUJU NET ZERO EMISSION

GAMBAR III.3
SASARAN UTAMA VISI TAHUN 2025-2029
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025; Ket: (*) Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045, (**) Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, (***) hasil analisis Bappeda)

3.1.2 MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Banten tersebut telah dirumuskan upaya-upaya yang akan dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur melalui 5 (lima) misi. Misi tersebut menjadi Prioritas Daerah (PD) di Provinsi Banten dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Lebih lanjut, Prioritas Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana kerja di setiap perangkat daerah Provinsi Banten, dan intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan. Adapun misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. **Misi Pertama atau PD-1: Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh.**

   Misi ke-1 bertujuan tujuan untuk mewujudkan masyarakat di Provinsi Banten yang memiliki moral Pancasila sebagai fondasi bangsa serta memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam berdemokrasi yang dijiwai dengan iman dan taqwa sebagai syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini serta menjadikan masyarakat yang pribadi yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama yang kokoh.

   Misi ini juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan serta pembangunan yang inovatif dan berdaya saing global dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, agar seluruh tahapan pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa dapat terlaksana dengan baik melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang disertai dengan manajemen pembangunan berbasis risiko.

   Peran serta masyarakat dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang memiliki integritas, produktif, dan profesional dalam menghadirkan layanan pemerintah yang berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga bertujuan menciptakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berdampak untuk menghasilkan birokrasi yang lincah, efektif, efisien, adaptif, dan transparan serta bebas dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. **Misi Kedua atau PD-2: Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial.**

   Misi ke-2 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan produktivitas melalui peningkatan sektor ekonomi unggulan dan potensial (pertanian, pariwisata, dan industri) untuk dapat menghasilkan penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak terhadap masyarakat serta mewujudkan perekonomian daerah yang stabil.

3. **Misi Ketiga atau PD-3: Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.**

   Misi ke-3 diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia di Provinsi Banten yang produktif, unggul, dan berdaya saing yang mencakup segala upaya peningkatan derajat kesehatan, berpendidikan tinggi dengan berbagai inovasi untuk siap bersaing menghadapi tantangan perkembangan global, memiliki nilai sosial dan budaya yang beradab dengan mengedepankan prinsip keadilan, bebas dari korupsi, serta terwujudnya perlindungan sosial masyarakat (kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak) yang inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan.

4. **Misi Keempat atau PD-4: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.**

   Misi ke-4 berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Dengan adanya pemerataan pembangunan daerah ini diharapkan dapat menciptakan manfaat diberbagai lini sektor pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai kaidah tata ruang.

   Lebih jauh daripada itu dengan adanya akselerasi pemerataan infrastruktur ini diharapkan dapat terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan interkoneksi pembangunan yang berdampak terhadap tidak ada lagi kesenjangan antara wilayah Banten Utara dan Banten Selatan.

5. **Misi Kelima atau PD-5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.**

   Misi ke-5 dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang seimbang dengan kondisi lingkungan yang ada serta berketahanan terhadap bencana alam dan non alam. Prinsip berkelanjutan ini menjadi hal mutlak dalam perbaikan kualitas lingkungan, dimana pembangunan tidak sekadar berorientasi dan berfokus pada ekonomi saja namun perlu adanya keseimbangan dengan faktor lingkungan, sehingga terciptanya kemampuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui penggunaan sumber daya alam yang minimal namun memberikan manfaat yang berdaya guna dalam jangka waktu yang lama.

GAMBAR III.4

KESELARASAN ANTARA ISU STRATEGIS DAN MISI RPJMD TAHUN 2025-2029

(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan perencanaan pembangunan Tahun 2025-2029, maka diperlukan suatu rumusan misi yang memperhatikan terhadap permasalahan dan isu strategis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dimana misi akan menjadi jembatan atau penghubung antara isu strategis dengan kebijakan pembangunan daerah, keselarasan antara misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan isu strategis dapat dilihat pada gambar di atas.

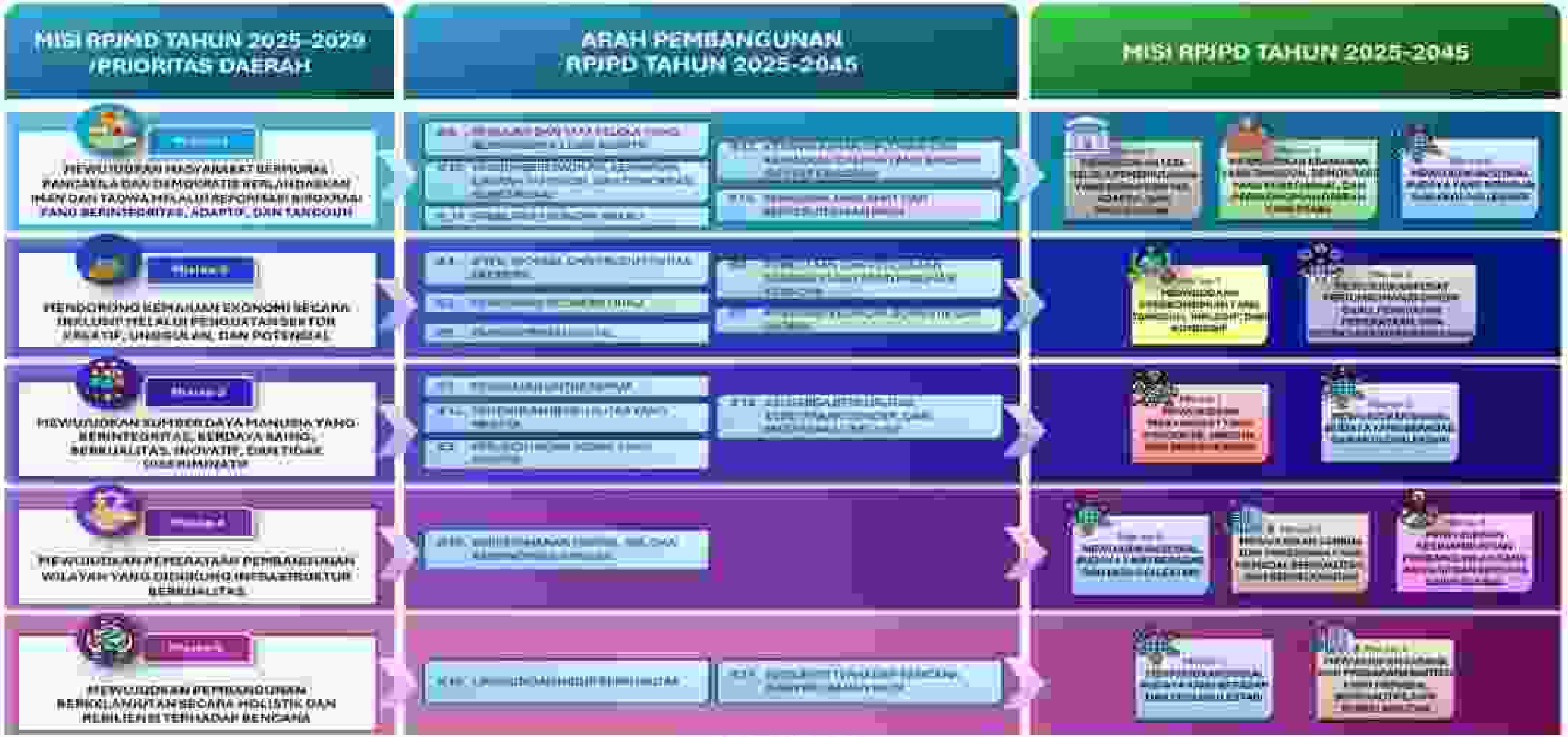
MISI RPJMD TAHUN 2025-2029 /PRIORITAS DAERAH
ARAH PEMBANGUNAN RPJPD TAHUN 2025-2045
MISI RPJPD TAHUN 2025-2045
MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH
MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF
MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA

GAMBAR III.5

KETERKAITAN RPJMD TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPD TAHUN 2025-2045

(Sumber: Diolah (Tim Penyusun, 2025)

Sementara itu keselarasan antara misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 serta Asta Cita sebagai prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

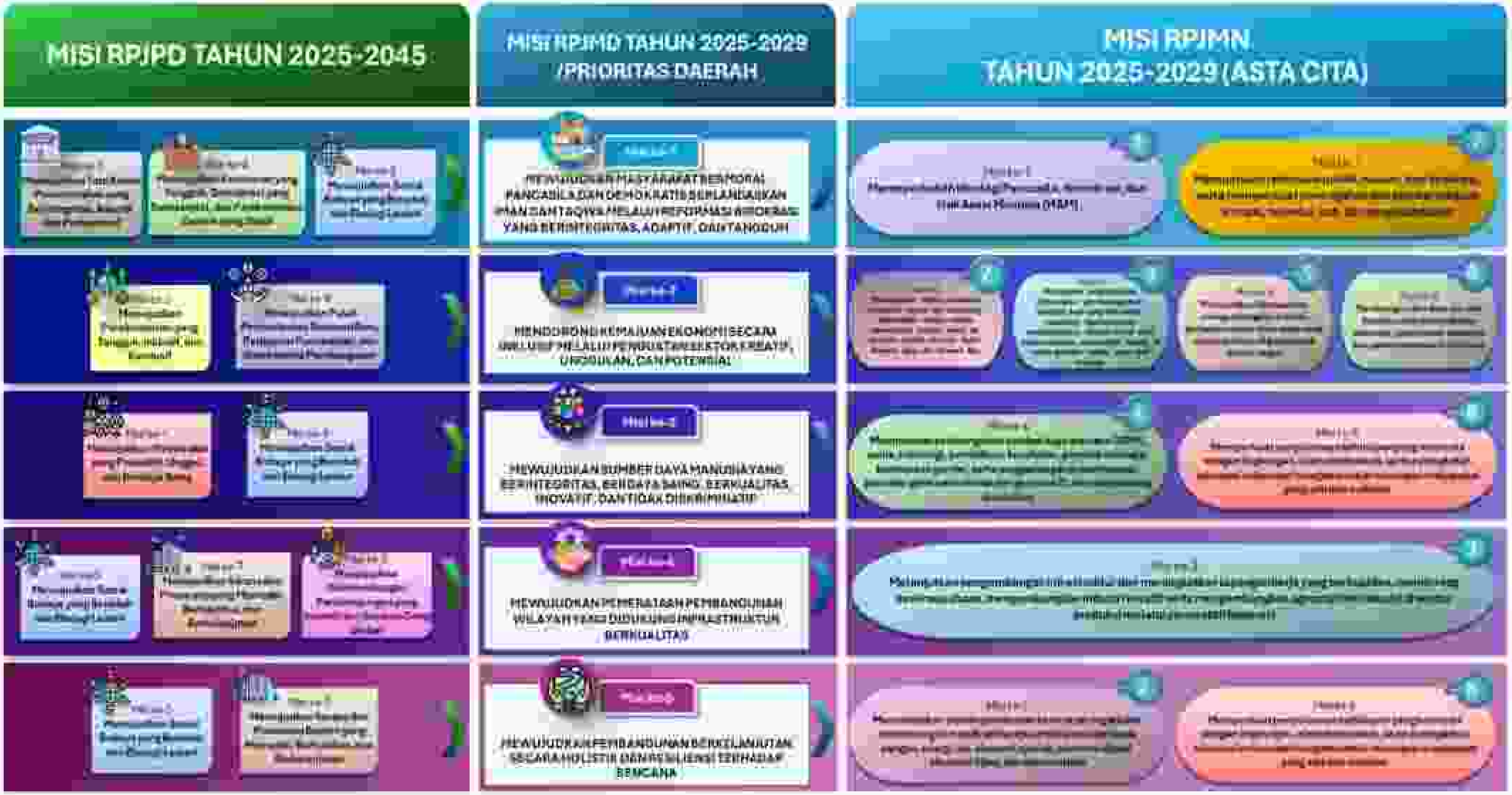
MISI RPJPD TAHUN 2025-2045
MISI RPJMD TAHUN 2025-2029 /PRIORITAS DAERAH
MISI RPJMN TAHUN 2025-2029 (ASTA CITA)
Misi ke-1
MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH
Misi 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Misi ke-2
MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL
Misi ke-3
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF
Misi ke-4
MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS
Misi ke-5
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA

GAMBAR III.6

KESELARASAN ANTARA MISI RPJPD TAHUN 2025-2045, RPJMD TAHUN 2025-2029, DAN RPJMN TAHUN 2025-2029

(Sumber: Diolah (Tim Bappeda, 2025))

Untuk mewujudkan Provinsi Banten sebagai Gerbang Integrasi Ekonomi Jawa-Sumatera dan Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional, nasional telah menetapkan sasaran pembangunan bagi Provinsi Banten melalui beberapa target seperti: i) laju pertumbuhan ekonomi; ii) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); iii) tingkat kemiskinan; iv) rasio gini; v) Indeks Modal Manusia (IMM); vi) penurunan intensitas emisi gas rumah kaca; vii) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan viii) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.

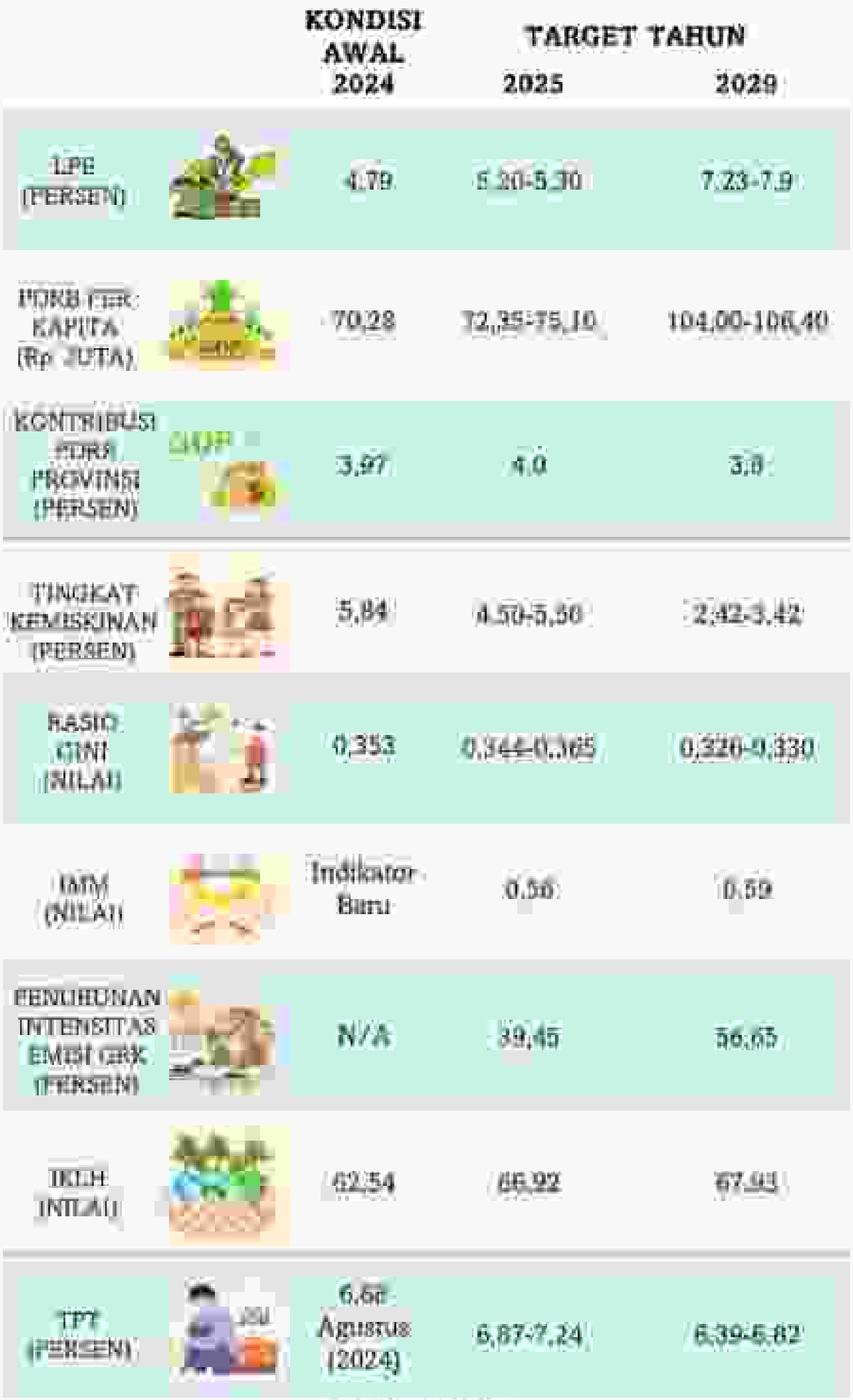

	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN 2025	2029
LPE (PERSEN)	4,79	5,20-5,30	7,23-7,9
PDRB PER KAPITA (Rp JUTA)	70,28	72,35-75,10	104,00-106,40
KONTRIBUSI PDRB PROVINSI (PERSEN)	3,97	4,0	3,8
TINGKAT KEMISKINAN (PERSEN)	5,84	4,50-5,30	2,42-3,42
RASIO GINI (NILAI)	0,353	0,344-0,365	0,320-0,330
IMM (NILAI)	Indikator Baru	0,56	0,59
PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (PERSEN)	N/A	39,45	56,65
IKLH (NILAI)	62,54	66,92	67,93
TPT (PERSEN)	6,68 Agustus (2024)	6,87-7,24	6,39-6,82

GAMBAR III.7
SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
(Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2025)

Sasaran pembangunan seperti pada gambar di atas dalam rangka mewujudkan penurunan kemiskinan menuju 4,50–5,20 di Tahun 2029, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang ditandai dengan IMM sebesar 0,59 di Tahun 2029, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memposisikan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,00 persen di Tahun 2029. Lebih jauh dari itu, target-target yang telah diformulasikan tersebut guna mendukung tema Pulau Jawa sebagai Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan.

3.1.3 TUJUAN

Visi dan misi yang telah dijabarkan di atas merupakan suatu cita-cita besar yang selaras dengan cita-cita pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan pembangunan Provinsi Banten dirumuskan sebagai rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapaianya visi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten selama 5 (lima) tahun mendatang yang didasarkan pada analisis isu strategis, adapun tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup:

1. Pada misi ke-1 ini memiliki tujuan berupa:
   - Terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat.
2. Pada misi ke-2 ini memiliki tujuan berupa:
   - Terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
   - Terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Pada misi ke-3 ini memiliki tujuan berupa:
   - Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pada misi ke-4 ini memiliki tujuan berupa:
   - Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.
5. Pada misi ke-5 ini memiliki tujuan berupa:
   - Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan.

3.1.4 SASARAN

Tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan di atas kemudian diturunkan untuk menjadi sasaran pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD, sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tujuan ke-1 berupa terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat, memiliki sasaran berupa:
   - Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif;

- Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit;
- Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring dan lincah organisasi;
- Terwujudnya transformasi digital; dan
- Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif.

2. Tujuan ke-2 berupa terwujudnya pertumbuhan ekonomi, memiliki sasaran berupa:
   - Meningkatnya produktivitas ekonomi;
   - Meningkatnya kualitas investasi;
   - Meningkatnya kemandirian keuangan daerah; dan
   - Meningkatnya lingkungan kondusif dan demokratis.
3. Tujuan ke-3 berupa terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memiliki sasaran berupa:
   - Meningkatnya keberfungsian sosial, individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
   - Menurunnya kemiskinan wilayah perdesaan; dan
   - Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi kerakyatan.
4. Tujuan ke-4 berupa terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki sasaran berupa:
   - Meningkatnya intelektual dan karakter masyarakat;
   - Meningkatnya kualitas taraf kesehatan masyarakat;
   - Meningkatnya pembangunan kualitas keluarga; dan
   - Meningkatnya peran serta penduduk usia angkatan kerja dalam pembangunan.
5. Tujuan ke-5 berupa terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas, memiliki sasaran berupa:
   - Meningkatnya layanan sarana dan prasarana infrastruktur;
   - Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
   - Meningkatnya konektivitas transportasi.
6. Tujuan ke-6 berupa terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan, memiliki sasaran berupa:
   - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
   - Meningkatnya ketahanan pangan dan resiliensi terhadap bencana; dan
   - Meningkatnya pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.

TABEL III.1

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI, BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI										
MISI 1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH										
T 1.1 TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG KOLABORATIF, KAPABEL, DAN BERINTEGRITAS UNTUK MELAYANI MASYARAKAT		T 1.1.1 INDEKS REFORMASI BIROKRASI (INDEKS)	87,40	89,50	90,99	92,32	93,49	94,22	95,41	95,41
	S 1.1 TERWUJUDNYA KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	S 1.1.1 INDEKS PELAYANAN PUBLIK (INDEKS)	3,73	3,84	3,93	4,03	4,14	4,22	4,25	4,35
		S 1.1.2 INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (INDEKS)	66,00	66,72	66,77	66,80	66,80	66,90	67,00	67,00
	S 2.1 TERCIPTANYA APARATUR NEGARA YANG KOMPETEN DAN BERKINERJA TINGGI BERDASARKAN SISTEM MERIT	S 2.1.1 INDEKS SISTEM MERIT (INDEKS)	320,30	337,00	351,00	363,00	383,00	400,00	400,00	400,00
	S 3.1 TERBANGUNNYA KAPABILITAS KELEMBAGAAN BERKINERJA TINGGI YANG BERBASIS JEJARING DAN LINCAH ORGANISASI	S 3.1.1 NILAI SAKIP/SAKP (NILAI)	69,24	70,19	72,41	74,58	76,85	80,05	80,00	80,00
		S 3.1.2 INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) (INDEKS)	77,38 (2023)	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00
	S 4.1 TERWUJUDNYA TRANSFORMASI DIGITAL	S 4.1.1 NILAI INDEKS TRANSFORMASI DIGITAL PILAR PEMERINTAH (NILAI)	64,72	65,00	66,30	67,60	68,90	70,20	71,50	71,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KONDISI AWAL 2024	TARGET CAPAIAN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KONDISI AKHIR
	S.5 TERBANGUNNYA PERILAKU BIROKRASI YANG BERETIKA DAN INOVATIF	S.5.1	INDEKS INTEGRITAS DAERAH (INDEKS)	71,21	72,74	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00
		S.5.2	INDEKS INOVASI DAERAH (INDEKS)	46,07	55,25-58,00	58,15-60,20	61,19-62,25	63,15-64,15	64,25-65,00	65,25-67,57	65,25-67,57
MISI 2. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL											
T.2.1 TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI		T.2.1.1	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (PERSEN)	4,74	5,20-5,30	5,60-6,20	6,43-7,10	6,82-7,44	7,23-7,9	7,71-7,95	7,71-7,95
	S.1 MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS EKONOMI	S.1.1	NILAI PDRB ADHK (TRILIUN RUPIAH)	521,74	559,82	593,11	631,24	674,28	723,02	778,74	778,74
	S.2 MENINGKATNYA KUALITAS INVESTASI	S.2.1	NILAI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (TRILIUN RUPIAH)	165,00	176,20	187,43	197,83	208,11	218,17	227,94	227,94
	S.3 MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	S.3.1	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH (PERSEN)	73,22	67,26	67,49	67,67	67,84	68,00	68,16	68,16
	S.4 MENINGKATNYA LINGKUNGAN KONDUSIF DAN DEMOKRATIS	S.4.1	INDEKS DEMOKRASI PROVINSI (INDEKS)	77,83	80,56-82,92	81,14-83,53	82,50-84,25	83,70-85,65	83,87-87,12	84,12-87,50	84,12-87,50
T.2.2 TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		T.2.2.1	TINGKAT KEMISKINAN (PERSEN)	5,88	4,35-5,20	4,45-5,13	4,24-4,63	3,30-4,02	2,82-3,42	2,38-3,40	2,38-3,40
		T.2.2.2	RASIO GINI (NILAI)	0,353	0,344-0,365	0,340-0,360	0,333-0,353	0,330-0,341	0,326-0,336	0,316-0,330	0,316-0,330
	S.5 MENINGKATNYA KEBERFUNGSIAN SOSIAL, INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT	S.5.1	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (INDEKS)	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		KONDISI AWAL 2024	TARGET CAPAIAN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KONDISI AKHIR
	S.2 MENURUNNYA KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN	S.2.1	PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN (PERSEN)	6,20	5,99	5,78	5,58	5,38	5,17	4,96	4,96
	S.3 MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN EKONOMI KERAKYATAN	S.3.1	PERSENTASE PERTUMBUHAN SKALA USAHA KECIL KE MENENGAH (PERSEN)	16,88	17,08	17,28	17,48	17,68	17,88	18,08	18,08
MISI 3. MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF											
T.3 TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING		T.3.1	INDEKS MODAL MANUSIA (INDEKS)*	INDIKATOR BARU	0,560	0,570	0,575	0,581	0,590	0,593	0,593
		T.3.2	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) (PERSEN)*	6,68 (AGUSTUS 2024)	6,87-7,24	6,65-6,95	6,60-6,90	6,40-6,58	6,35-6,82	6,37-6,56	6,37-6,56
	S.1 MENINGKATNYA INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	S.1.1	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA DI ATAS 15 TAHUN (TAHUN)**	9,35	9,66-9,69	9,79-9,81	9,91-9,93	10,04-10,05	10,16-10,17	11,13-11,29	11,13-11,29
		S.1.2	HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS) (TAHUN)*	13,16	13,21-13,24	13,27-13,30	13,34-13,36	13,40-13,41	13,46-13,47	14,20-15,00	14,20-15,00
		S.1.3	INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK) (INDEKS)*	53,37	53,63-53,87	53,85-54,21	53,60-54,17	53,98-55,28	55,86-55,82	56,34-57,29	56,34-57,29
		S.1.4	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) (INDEKS)	64,88	62,10	72,56	73,09	74,43	75,17	75,93	75,93
	S.2 MENINGKATNYA KUALITAS DASAR KESEHATAN MASYARAKAT	S.2.1	USIA HARAPAN HIDUP (TAHUN)**	74,97	75,21	75,47	75,73	76,24	76,57	77,07	77,07

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		S.2.2 PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA (PERSEN)*	21,11	20,30	19,50	18,40	17,50	16,70	16,10	16,10
	S.3 MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA	S.3.1 INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (iBANGGA) (INDEKS)*	62,60	64,30	66,20	67,70	69,40	71,10	72,50	72,50
	S.4 MENINGKATNYA PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	S.4.1 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA/TPAK (PERSEN)	65,83	66,41	66,66	66,91	67,17	67,42	67,67	67,67
MISI 4. MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS										
T.4 TERWUJUDNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS		T.4.1 INDEKS WILLIAMSON (INDEKS)	0,770 (2023)	0,760	0,747	0,732	0,714	0,693	0,670	0,670
	S.1 MENINGKATNYA LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	S.1.1 INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI) (INDEKS)	2,96	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
	S.2 MENINGKATNYA AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU, DAN BERKELANJUTAN	S.2.1 RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN (PERSEN)*	65,25	67,08	68,58	70,85	72,76	74,53	75,31	75,31
	S.3 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	S.3.1 RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI (PERSEN)	0,68	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MISI 5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA										
T.5 TERWUJUDNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN		T.5.1 PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (PERSEN)	N/A	39,45	43,05	47,58	52,12	56,65	58,11	58,11
	S.5.1 MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP*	S.5.1.1 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) DAERAH (INDEKS)	62,58	66,92	67,17	67,42	67,68	67,93	70,00	70,00
	S.5.2 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA	S.5.2.1 INDEKS KETAHANAN PANGAN (IKP) (INDEKS)	75,25	79,50	79,75	80,25	80,75	81,35	81,75	81,75
		S.5.2.2 INDEKS RISIKO BENCANA (INDEKS)*	138,64	105,17	105,10-104,50	104,45-103,65	103,20-101,00	101,85-98,60	100,50-98,00	100,50-98,25
	S.5.3 MENINGKATNYA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON YANG BERKELANJUTAN	S.5.3.1 PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK*								
		A) KUMULATIF (PERSEN)**	N/A	2,26	2,72	3,10	3,59	4,34	5,11	5,11
		B) TAHUNAN (PERSEN)**	N/A	8,93	10,52	12,46	15,64	18,19	20,19	20,19

Sumber: Diolah Tim Bappeda, 2025

Keterangan:

- * *Target 2025 dan 2029 berdasarkan hasil asersi Bappenas pada lampiran buku saku penyelarasan RPJMN-RPJMD mengacu terhadap capaian kinerja RPJMN Tahun 2025-2029.*
- * *Target 2025 pada proksi indikator Usia Harapan Hidup (UHH) sebagaimana hasil asersi Bappenas pada lampiran buku saku penyelarasan RPJMN-RPJMD dan Tahun 2029 telah optimal.*
- * *Target 2028 dan 2029 pada proksi indikator prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita telah optimal.*
- ** *Target Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2025-2029 berdasarkan Surat Deputi Bangda Nomor 400.5.4/2745/Bangda tanggal 4 Juli 2025 perihal Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah*
- *Indeks Demokrasi Provinsi serupa dengan Indeks Demokrasi Indonesia*
- *Indeks Integritas Daerah serupa dengan Indeks Integritas Nasional*

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan selama kurun lima tahun mendatang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada bab sebelumnya, diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah tersebut berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Strategi merupakan pengerahan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumber daya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan. Dalam implementasinya, strategi diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya nyata dalam pencapaian tujuan.

3.2.1 DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Untuk mencapai *Trisula Pembangunan* (penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan) sebagaimana kerangka pikir RPJMN Tahun 2025-2029 dilakukan melalui langkah konkret berupa pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagai fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai langkah konkret teknis yang utamanya untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan KPU, dimana KPU yang berada di wilayah Pemerintah Provinsi Banten perlu mendapatkan dukungan penuh sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

TABEL III.2
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) DI PROVINSI BANTEN

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	DESKRIPSI SINGKAT
1	02 - MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU	17 - PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	01 - PENINGKATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU	TERDAPAT 15 DAS PRIORITAS YANG WILAYAHNYA MERUPAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA MAUPUN LINTAS PROVINSI SEBANYAK 12 DARI 15 DAS PRIORITAS PERLU DILAKUKAN PENURUNAN BEBAN PENCEMAR YANG BERSUMBER DARI PENCEMAR DOMESTIK, INDUSTRI, PETERNAKAN, DAN PERTANIAN UNTUK MENGEMBALIKAN MUTU AIR
2	02 - MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU	10 - SWASEMBADA PANGAN	09 - PENGEMBANGAN PANGAN AKUATIK (BLUE FOOD)	CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN BELUM MENCAPAI TARGET KARENA MASIH RENDAHNYA PRODUKTIVITAS PERIKANAN. HAL TERSEBUT TERJADI KARENA MASIH TERBATASNYA AKSESIBILITAS DAN JAMINAN MUTU PRODUK PERIKANAN (LOGISTIK, DISTRIBUSI, DAN RANTAI DINGIN) SERTA RENDAHNYA

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	DESKRIPSI SINGKAT
				PENDAPATAN PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA KECIL.
3	04 - MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS	11 - PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT	01 - PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK	SASARAN KEGIATAN INI ADALAH MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK SESUAI STANDAR DENGAN PERSALINAN DI FASYANKES, MEMPERKUAT DETEKSI DINI, ANC, LAYANAN PERSALINAN, KF, KN, LAYANAN EMERGENSI, PELAYANAN DASAR, TATALAKSANA BALITA SAKIT, SERTA IMUNISASI
4	04 - MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS	11 - PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT	02 - PERCEPATAN DAN PENURUNAN STUNTING	SASARAN KEGIATAN INI ADALAH MENINGKATNYA KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT BERBASIS SIKLUS HIDUP MELALUI PENGUATAN EDUKASI, PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN, DAN INTERVENSI PERBAIKAN GIZI SESUAI STANDAR SERTA MENCEGAH KEMATIAN IBU DAN MENINGKATKAN HARAPAN HIDUP SEHAT.
5	02 - MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU	12 - SWASEMBADA AIR	09 - PENGEMBANGAN TERPADU PESISIR UTARA JAWA	
6	02 - MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU	12 - SWASEMBADA AIR	05 - PENGEMBANGAN SPAM TERINTEGRASI HULU KE HILIR	INDONESIA MENEMPATI PERINGKAT TERENDAH DALAM HAL CAPAIAN AKSES AIR MINUM DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA ASEAN LAINNYA. CAPAIAN AKSES AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN BARU SEBESAR 19,74 PERSEN TAHUN 2023 PERLU ADANYA PENINGKATAN JUMLAH DAN KAPASITAS SPAM YANG DIKEMBANGKAN SERTA DIKELOLA SECARA TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR SERTA PENINGKATAN JUMLAH LEMBAGA PENGELOLA SPAM UNTUK MENINGKATKAN CAPAIAN AKSES AIR MINUM
7	02 - MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU	12 - SWASEMBADA AIR	06 - PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN SANITASI AMAN, BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN IKLIM BERBASIS CWIS	HANYA SEKITAR 10,21 PERSEN RUMAH TANGGA DI INDONESIA YANG MEMILIKI AKSES SANITASI AMAN. HAL INI DAPAT MENINGKATKAN RISIKO POTENSI KONTAMINASI LINGKUNGAN. MAKA PERLU ADANYA PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN KESINAMBUNGAN SERTA KUALITAS INFRASTRUKTUR SPALD UNTUK MENINGKATKAN AKSES SANITASI AMAN.

NO	PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	DESKRIPSI SINGKAT
8	06 - MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN	06 - PERCEPATAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	01 - FASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN TERINTEGRASI DENGAN PSU	

Sumber: Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Selain itu untuk PSN yang berada di wilayah Pemerintah Provinsi Banten dan perlu mendapatkan dukungan penuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL III.3
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DI PROVINSI BANTEN

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	LOKASI	PELAKSANA	SKEMA PENDANAAN	CLUSTER
1	PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS	NASIONAL	BADAN GIZI NASIONAL (KOORDINATOR)	APBN, SWASTA	MAKAN BERGIZI GRATIS
2	PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNGGUL	NASIONAL	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI (KOORDINATOR)	APBN, APBD	PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
3	PEMBANGUNAN 3 JUTA RUMAH	NASIONAL	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (KOORDINATOR)	APBN, BUMN, SWASTA	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4	*GIANT SEA WALL* PANTAI UTARA JAWA	DKI, JAWA BARAT, JAWA TIMUR, BANTEN DAN JAWA TENGAH	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PEMPROV DKI JAKARTA	APBN, APBD, MASYARAKAT, SWASTA	SWASEMBADA AIR
5	PROGRAM HILIRISASI KELAPA SAWIT, KELAPA, RUMPUT LAUT	SUMATERA UTARA, RIAU, SUMATERA BARAT, JAMBI, SUMATERA SELATAN, KEPULAUAN RIAU, BANTEN, JAWA BARAT, BALI, NUSA TENGGARA TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, KALIMANTAN UTARA, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR; SULAWESI SELATAN, SULAWESI UTARA, MALUKU UTARA, PAPUA, PAPUA BARAT	SWASTA	BUMN, SWASTA	HILIRISASI, INDUSTRIALISASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL
6	PROGRAM HILIRISASI NIKEL, TIMAH, BAUKSIT, TEMBAGA	BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, SULAWESI TENGAH, MALUKU UTARA, KALIMANTAN,	PT MIND ID, SWASTA	BUMN, SWASTA	HILIRISASI, INDUSTRIALISASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)	LOKASI	PELAKSANA	SKEMA PENDANAAN	CLUSTER
		SELATAN, KALIMANTAN TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, PAPUA TENGAH, KEPULAUAN RIAU, SUMATERA UTARA, BANGKA BELITUNG, KALIMANTAN BARAT			
7	PEMBANGUNAN JAKARTA METROPOLITAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR TIMUR – BARAT	DKI, JAWA BARAT, BANTEN	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, PEMPROV DK JAKARTA, PEMPROV JAWA BARAT, PEMPROV BANTEN, PT MRT JAKARTA	APBN, SWASTA	KONEKTIVITAS DAN KAWASAN
8	PROGRAM PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN	DKI, TANGERANG, TANGERANG SELATAN, BEKASI, BANDUNG, SEMARANG, MAKASSAR, DENPASAR, PALEMBANG DAN MANADO	PEMERINTAH KOTA LOKASI PROYEK DAN SWASTA	APBN, APBD	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
9	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA, PROYEK 1: PEMBANGUNAN PABRIK CHLOR ALKALI DAN ETHYLENE DICHLORIDE PROYEK 2 PEMBANGUNAN LOTTE CHEMICAL INDONESIA NEW ETHYLENE PROJECT	BANTEN	BUMN DAN SWASTA	BUMN DAN SWASTA	HILIRISASI, INDUSTRIALISASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL
10	JALAN TOL SERANG - PANIMBANG	BANTEN	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	KPBU DAN PHLN (APBN)	KONEKTIVITAS DAN KAWASAN

Sumber: Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

3.2.2 STRATEGI RPJMD TAHUN 2025-2029

Strategi adalah suatu rencana tindakan yang komprehensif dan sistematis berisi upaya yang akan dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Salah satu isu yang dipertimbangkan Adalah isu wilayah Jawa, termasuk Provinsi Banten, yang diarahkan untuk mendukung wilayah Jawa sebagai **"Megalopolis yang Unggul, Inovatif dan Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan"**, beberapa isu sebagai berikut:

- Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, yang dibuktikan dengan rata-rata nilai *Metropolitan Performance Index* di Pulau Jawa berada di bawah 50 persen;
- Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang menyebabkan nilai tambah industri masih rendah (Industri di Jawa masih memiliki rasio robot *density* 5:10.000, Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan 1.000:10.000);

- Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa bagian selatan;
- Kerentanan dan potensi bencana masih tinggi, seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor, letusan gunung api, banjir rob, dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa;
- Kesenjangan keterampilan dan ketidaksesuaian (*mismatch*) pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat penangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen;
- Prevalensi *stunting*, *wasting*, dan *underweight* masih relatif tinggi, rata-rata Wilayah Jawa mencapai 20 persen (2023);
- Beban khusus TBC tinggi ada pada wilayah padat penduduk;
- Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11 persen (2023), dengan tertinggi Provinsi DI Yogyakarta mencapai sekitar 11 persen. Program pengurangan kemiskinan belum terpadu dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi pada daerah kantong-kantor kemiskinan tinggi.

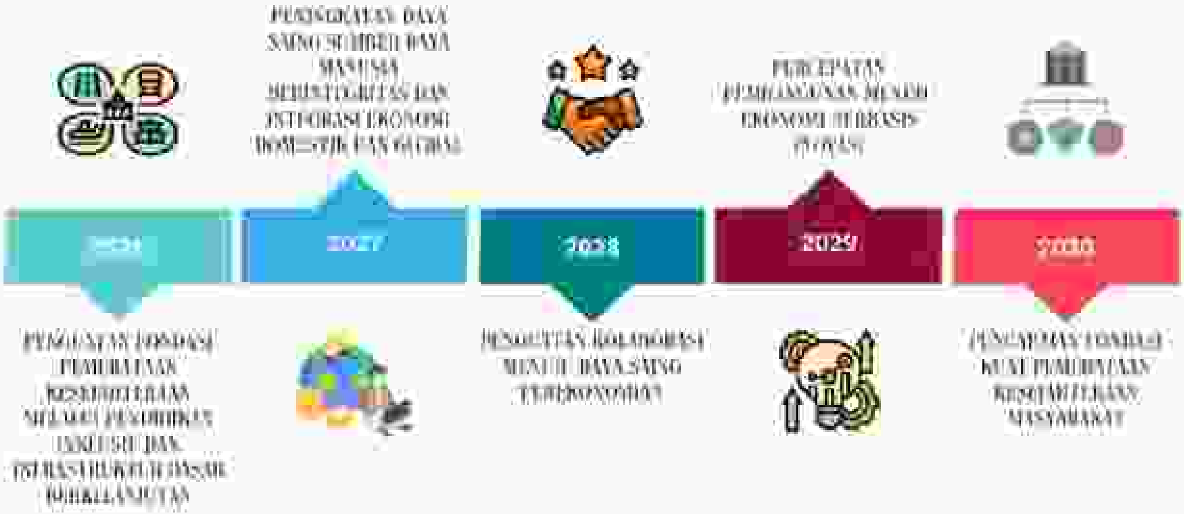
PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI
2026
2027
2028
2029
2030
PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN
PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING TERKONEKSI
PEMANTAPAN FONDASI KUAT PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

GAMBAR III.8
PENAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

Untuk memastikan bahwa pembangunan di Provinsi Banten dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan isu wilayah Jawa dan isu Provinsi Banten yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka ditetapkan penahapan pembangunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari tema pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu Penguatan Modal Dasar, diselaraskan dengan arah kebijakan periode pertama RPJPN Tahun 2025-2045 berupa Perkuatan Fondasi Transformasi maupun terhadap muatan dalam RPJMN Tahun 2025–2029, sebagaimana yang disajikan pada gambar di atas.

Lebih jauh dari itu, langkah konkret Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung pelaksanaan terhadap program prioritas nasional atau program strategis nasional disajikan sebagaimana pada strategi di tabel di bawah ini. Hilir dari pelaksanaan strategi ini untuk dapat berperan aktif terhadap ketercapaian *trisula pembangunan*.

TABEL III.4
PENAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029

MISI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL**	**PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN**	**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI**	**PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
MISI 1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH	PENATAAN ORGANISASI LINTAS FUNGSI UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT DAN EFISIEN DIDUKUNG DENGAN SDM PELAYANAN YANG BERAKHLAK DAN BUDAYA KERJA YANG ADAPTIF, PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT AKSES LAYANAN PEMERINTAHAN, DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN EFISIEN	PENGUATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP), DAN PENYEDERHANAAN PROSEDUR BIROKRASI YANG EFISIEN MELALUI PENDEKATAN DIGITALISASI DAN INOVASI PELAYANAN TERPADU	PENGUATAN KERJA SAMA PEMERINTAHAN, PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT AKSES LAYANAN PEMERINTAHAN, DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT DAN LINCAH	PENGUATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN SECARA BERKALA DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN EFISIEN	PEMANTAPAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS
	PEMETAAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, PENEMPATAN APARATUR SESUAI DENGAN KOMPETENSI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA YANG TAAT ASAS DAN PROFESIONAL MELALUI INDIKATOR PENILAIAN KINERJA YANG TERUKUR	PENGUATAN INSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN YANG SELARAS DENGAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH YANG DIDUKUNG DENGAN PENGUATAN APARATUR BERINTEGRITAS, ADAPTIF DAN INOVATIF, DAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR	PENGUATAN KOLABORASI DAN MONITORING DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM PELATIHAN DAN PEMBELAJARAN YANG MENCAKUP BERBAGAI KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN DAN KEBUTUHAN INSTITUSI	PENGUATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI APARATUR SECARA BERKALA BERDASARKAN HASIL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN DAN DISETUJUI MELALUI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN	PEMANTAPAN APARATUR YANG MELAYANI SESUAI VISI DAN MISI KEPALA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS

MISI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL**	**PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN**	**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI**	**PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
	PENINGKATAN FONDASI KELEMBAGAAN DAERAH, HARMONISASI REGULASI KELEMBAGAAN, PEMETAAN KAPASITAS SDM KELEMBAGAAN, DAN PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN DAERAH BERBASIS FUNGSI PELAYANAN PUBLIK	PENINGKATAN INTEGRASI TATA KELOLA DAN KOLABORASI LINTAS SEKTOR, PENGEMBANGAN SISTEM KOLABORASI ANTAR-OPD DAN ANTAR-DAERAH, INTEGRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MELALUI MONITORING BERBASIS DIGITAL DAN BERBASIS INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENINGKATAN JEJARING ORGANISASI DAN SINERGI PEMANGKU KEPENTINGAN, KEMITRAAN AKTIF KELEMBAGAAN DAERAH DENGAN DUNIA USAHA, AKADEMISI, DAN KOMUNITAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN	PENGUATAN KELEMBAGAAN YANG LINCAH BERBASIS INOVASI, RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH AGAR ADAPTIF TERHADAP ISU STRATEGIS DAN TUNTUTAN PELAYANAN, DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MANAJEMEN PERUBAHAN	PEMANTAPAN KELEMBAGAAN ADAPTIF DAN KOLABORATIF UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, KELEMBAGAAN PEMERINTAH MENJADI FASILITATOR PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF, ADAPTIF, DAN MENJADI PENGGERAK UTAMA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS DATA DAN INOVASI
	PENERAPAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL UTAMANYA PADA WILAYAH AFIRMASI DALAM MENCAPAI KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK YANG DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN SERTA KETERPADUAN TATA KELOLA DATA UNTUK MEWUJUDKAN SATU DATA YANG INKLUSIF	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN REGULASI, PENINGKATAN KELENGKAPAN INFRASTRUKTUR DIGITAL DAN TEKNOLOGI TERMASUK KEDALAM PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN MEMPERKUAT KONEKTIVITAS DIGITAL, PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS SERTA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BERBASIS DIGITAL YANG TERINTEGRASI KEDALAM SATU PORTAL PEMERINTAHAN	PENGUATAN KOLABORASI UNTUK MENCIPTAKAN LAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI DAN EFISIEN BERDASARKAN PENDEKATAN *USER CENTRIC* SERTA ADANYA KONSOLIDASI LAYANAN DIGITAL KEDALAM SATU PORTAL LAYANAN PEMERINTAHAN DIGITAL DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM TIK	PENGUATAN PETA JALAN DAN ARSITEKTUR TRANSFORMASI DIGITAL BERDASARKAN HASIL EVALUASI DAN MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN PROSES BISNIS LAYANAN DIGITAL	PEMANTAPAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN DIGITALISASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SESUAI DENGAN KETENTUAN UNTUK MEMPERMUDAH DALAM MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS
	PENINGKATAN BUDAYA KERJA BERINTEGRITAS, PENGUATAN NILAI DASAR ASN (BERAKHLAK), PEMBINAAN ETIKA BIROKRASI, DAN PENEGAKAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL BERBASIS MERIT	PENGEMBANGAN KAPASITAS ASN BERBASIS KOMPETENSI DAN DIGITAL, PELATIHAN MANAJERIAL DAN TEKNIS BERBASIS KEBUTUHAN ORGANISASI, PENINGKATAN LITERASI DIGITAL, DAN PEMBENTUKAN KADER REFORMASI BIROKRASI	PENINGKATAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL DAN RESPONSIF, PERLUASAN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH (*E-GOVERNMENT*), PENGEMBANGAN DASHBOARD PELAYANAN PUBLIK, DAN SISTEM PENILAIAN KINERJA	PENGUATAN INOVASI TATA KELOLA BIROKRASI ADAPTIF, INKLUSI INOVASI PELAYANAN PUBLIK, KOMPETISI INOVASI ASN, DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN LAYANAN	PEMANTAPAN BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL, DIDUKUNG DENGAN APARATUR SEBAGAI AGEN PERUBAHAN YANG PROFESIONAL, ADAPTIF, DAN FOKUS PADA

MISI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL**	**PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN**	**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI**	**PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
			BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT		EKONOMI PEMBANGUNAN SERTA KEPUASAN PUBLIK
MISI 2: MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL	PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA UNGGULAN YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN (DESTINASI WISATA BERBASIS BUDAYA, RELIGI, SEJARAH, ALAM, DAN BUATAN), PENGUATAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF (FILM, FESYEN, KULINER, DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK LOKAL BANTEN LAINNYA), PENGUATAN EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH, BIRU, DAN HIJAU, PENGUATAN KOPERASI DAN UKM, DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN (PENGUATAN KOPERASI, DIGITALISASI UKM, PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, SEKTOR KREATIF DAN PARIWISATA BERBASIS LOKAL SECARA INKLUSIF), PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA; DAN HILIRISASI BERBASIS RANTAI PASOK (PENGUATAN INDUSTRI HALAL, PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN, DAN PENGUATAN INOVASI BERBASIS DIGITAL DAN TEKNOLOGI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	PENINGKATAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PASAR; PENGUATAN SISTEM LOGISTIK TERPADU DALAM MENEKAN BIAYA DISTRIBUSI, PENGUATAN TATA KELOLA KAWASAN WISATA DIDUKUNG SDM PARIWISATA YANG BERKOMPETEN; DAN PERLUASAN AKSES TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DAN PRODUK HALAL	PENGUATAN KOLABORASI PENTAHELIX DALAM MEMPERLUAS AKSES PEMBIAYAAN DAN INKUBASI BISNIS, MEMPERKUAT INTEGRASI RANTAI PASOK SEBAGAI WUJUD MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI PADA KAWASAN INDUSTRI DAN UKM, MENDORONG PEMBERDAYAAN PELAKU UKM, KOPERASI, DAN PARIWISATA, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR INDUSTRI, PERTANIAN, PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA), KOPERASI, UKM, DAN PARIWISATA MELALUI HILIRISASI, PERLUASAN PASAR, DAN MODERNISASI SARANA DAN PRASARANA	PEMANTAPAN INDUSTRIALISASI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, HILIRISASI SEKTOR PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA), DAN PERTANIAN YANG TERINTEGRASI DENGAN KEMUDAHAN AKSES TERHADAP DISTRIBUSI DAN PASAR; SERTA MENJADIKAN PROVINSI BANTEN SEBAGAI SEKTOR WISATA HALAL, PRODUK HALAL DAN PUSAT EKONOMI SYARIAH
	TRANSFORMASI TATA KELOLA PERIZINAN (PENYIAPAN KELEMBAGAAN YANG LINCAH, CEPAT, DAN TRANSPARAN SEBAGAI PUSAT PROMOSI INVESTASI DAERAH DAN SEBAGAI PELAYANAN INVESTASI DAERAH DALAM PENDAMPINGAN INVESTOR), PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS INVESTASI (KAWASAN PERUNTUKAN	PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI MELALUI DAYA SAING PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL, PENYIAPAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKUALITAS DALAM MENUNJANG KAWASAN INDUSTRI YANG TERINTEGRASI DENGAN RANTAI PASOK, DAN ADANYA INSENTIF/POTONGAN PAJAK BAGI PERUSAHAAN YANG MEMPRIORITASKAN TENAGA	PENGUATAN KOLABORASI DAN PERAN SEKTOR SWASTA DAN KEMITRAAN STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN HILIRISASI INDUSTRI MANUFAKTUR, PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DAN KERJA SAMA GUNA MENJANGKAU INVESTOR; DAN PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI DI SEKTOR EKONOMI HIJAU, EKONOMI BIRU, EKONOMI	PENGUATAN EKOSISTEM INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF DALAM MENGHASILKAN PRODUK UNGGULAN EKSPOR DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI SISTEM LOGISTIK YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN LOGISTIK DOMESTIK DAN GLOBAL,	PEMANTAPAN PERAN BANTEN SEBAGAI PUSAT BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP KEBERLANJUTAN INVESTASI (GREEN INVESTMENT SOURCING) DENGAN KUALITAS INVESTASI PADA SEKTOR UNGGULAN YANG MEMBERIKAN DAMPAK LANJUTAN TERHADAP

MISI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL**	**PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN**	**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI**	**PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
	INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN LOKAL SEBAGAI PEMICU PERLUASAN BASIS INVESTASI, PENGUATAN KAPASITAS TENAGA KERJA LOKAL, SERTA PENGUATAN KEBIJAKAN/REGULASI DAN DIGITALISASI PERIZINAN YANG TRANSPARAN	KERJA LOKAL ATAU BERBASIS PADAT KARYA	SYARIAH, KREATIF, DIGITAL, PARIWISATA DAN SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSIAL LAINNYA DIDUKUNG DENGAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS UNTUK MEMPERCEPAT DISTRIBUSI BARANG DAN JASA	SERTA PENGUTAMAAN PRINSIP *EASE OF DOING BUSINESS* PADA SETIAP PROSES PELAYANAN INVESTASI	EKONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL
	TRANSFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH BERPRINSIP *GOOD GOVERNANCE*, PENGGUNAAN BASIS DATA POTENSI PAJAK DAN EKONOMI YANG AKURAT, PENGGALIAN SUMBER PENDAPATAN BARU (MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI, PEMANFAATAN ASET, INTENSIFIKASI, DAN EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN, DSB), PENINGKATAN KUALITAS BELANJA PRODUKTIF, SERTA PENGUATAN INOVASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN SKEMA PENDANAAN, PEMBIAYAAN INOVATIF, DAN OPTIMALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENGUATAN PEMANFAATAN INOVASI DIGITALISASI, PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PENINGKATAN PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM BERKONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH, PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT DALAM MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL, SERTA PENGUATAN TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN DAN PARTISIPASI WAJIB PAJAK	PENGUATAN KOLABORASI MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN PEMANFAATAN ASET DAERAH, MENGOPTIMALKAN POTENSI INVESTASI MELALUI SKEMA PENGGUNAAN SUMBER PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH (KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA/KPBU, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*/CSR, DANA BAGI HASIL, DANA INSENTIF, DANA HIBAH, DSB) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	PENGUATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD MELALUI PEMANFAATAN ASET, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK DAERAH, DAN HASIL PENERIMAAN DAERAH LAINNYA SERTA PENGUATAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH	PEMANTAPAN FONDASI OTONOMI FISKAL BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN
	MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SOSIAL YANG HARMONIS, DAMAI, DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI DEMOKRASI,	PENGUATAN STABILITAS SOSIAL MELALUI PENGUATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS	PENGUATAN KOLABORASI PARTISIPASI PUBLIK, KOMUNITAS LOKAL, FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI	PENINGKATAN NILAI BUDAYA DAN ETIKA PUBLIK, PENINGKATAN INTEGRITAS DAN ETIKA	PEMANTAPAN DAERAH YANG KONDUSIF DAN MENJUNJUNG TINGGI DEMOKRASI DENGAN

MISI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL**	**PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN**	**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI**	**PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
	MENDORONG PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM, MENCIPTAKAN RUANG INTERAKSI SOSIAL SECARA INKLUSIF DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME YANG MENGARAH TERORISME, PENGUATAN DERADIKALISASI DAN KONTRA RADIKALISASI, SERTA MEMPERKUAT SISTEM DETEKSI DINI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	SPIRITUAL MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN KEAGAMAAN, PEMBINAAN AKHLAK, PENGUATAN KARAKTER PANCASILA DAN KEBHINEKAAN, SERTA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN POLITIK YANG DIDUKUNG DENGAN PERLUASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS RUANG PUBLIK YANG RAMAH DAN INKLUSIF BAGI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT	ANTAR ELEMEN KHUSUSNYA PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN LEMBAGA MASYARAKAT LAINNYA DALAM MENJAGA KEUTUHAN SOSIAL MASYARAKAT, SERTA PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DAN TRANSPARAN DALAM MENCIPTAKAN RASA AMAN BAGI MASYARAKAT	POLITIK, PENGUTAMAAN TERHADAP UPAYA PREVENTIF DALAM MENCIPTAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PENGARUSUTAMAAN HAM	MEMPERKUAT NILAI TOLERANSI, KEBHINEKAAN, DAN KEBANGSAAN YANG DIDUKUNG DENGAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, BERTAQWA, BERAKHLAK MULIA, SERTA MEMILIKI NILAI-NILAI LUHUR
	PENINGKATAN PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN KAPASITAS INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN MELALUI PENDIDIKAN, PELATIHAN, PARTISIPASI PRODUKTIF, DAN PERLUASAN BANTUAN SOSIAL SERTA LAYANAN SOSIAL BERBASIS DATA TERPADU	PENGUATAN LAYANAN DASAR SOSIAL DENGAN MERUJUK TERHADAP BASIS DATA TERPADU UNTUK MEMPERLUAS BANTUAN SOSIAL SECARA TEPAT DAN AKURAT, PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS POTENSI DITUNJANG DENGAN AKSES KEMUDAHAN PEMBIAYAAN/MODAL	SINERGI MULTI PIHAK DALAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL SECARA INKLUSIF, PENGUATAN KETERAMPILAN KELOMPOK DAN KOMUNITAS DALAM BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN, SERTA PENINGKATAN KAPASITAS USAHA DAN PEMASARAN PRODUK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT	PENGUATAN SISTEM BANTUAN SOSIAL SECARA ADIL DAN MERATA MELALUI PENGUATAN KOLABORASI ANTAR PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN SWASTA, SERTA INOVASI DIGITALISASI PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN SECARA REAL TIME DENGAN BASIS DATA TERPADU DAN AKURAT	PEMANTAPAN KEMANDIRIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK, DAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
	MENUMBUHKEMBANGKAN PUSAT-PUSAT EKONOMI BARU DI DESA UNTUK KESEJAHTERAAN; PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK LOKAL, SERTA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI USAHA PERTANIAN DAN	PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN DI SETIAP DESA, PENINGKATAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PETANI DALAM PENERAPAN TEKNIK PERTANIAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF, PEMBERIAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BERUPA	PENGUATAN KOLABORASI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN YANG TERINTEGRASI DENGAN UPAYA PENGUATAN KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN, DUKUNGAN PENGELOLAAN WATER SECURITY MELALUI	PENINGKATAN INOVASI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DAN PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) YANG BERKELANJUTAN MELALUI MODERNISASI SARANA DAN PRASARANA	PEMANTAPAN KEMUDAHAN SARANA DAN PRASARANA, AKSES, DAN MODAL USAHA SERTA PEMBERDAYAAN TERHADAP NELAYAN, PETANI, DAN PETAMBAK

MISI	TAHAP I (2026) PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	TAHAP II (2027) PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	TAHAP III (2028) PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	TAHAP IV (2029) PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	TAHAP V (2030) PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) DITUNJANG DENGAN KEMUDAHAN AKSES DAN MODAL USAHA PETANI DAN NELAYAN	ASURANSI PERTANIAN DAN PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA), SERTA MODERNISASI PERALATAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PERTANIAN DI WILAYAH BANTEN UTARA (CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN) DAN BANTEN SELATAN (CILIMAN-CISAWARNA-CILEMER-PASIR EURIH), DUKUNGAN PROGRAM AGRARIA/PERTANAHAN SEPERTI PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT	SERTA IMPLEMENTASI TEKNOLOGI	
	DUKUNGAN PEMBIAYAAN BAGI UKM DAN WIRAUSAHAWAN, PENINGKATAN PEMANFAATAN IPTEK DALAM MENGHASILKAN PRODUK UNGGULAN BANTEN, PEMBERDAYAAN EKONOMI KECIL DAN MENENGAH YANG INKLUSIF DAN BERBASIS KERAKYATAN, TERUTAMA BAGI MASYARAKAT DI DAERAH AFIRMASI 3T (KHUSUSNYA DI BANTEN SELATAN), SERTA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU UKM MELALUI JALUR REGULER DAN SELF DECLARE	PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN, PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA), DAN KAWASAN LAINNYA SEBAGAI PUSAT PRODUKSI, PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UKM/BUMDES/LEMBAGA EKONOMI MIKRO LAINNYA DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN, SERTA FASILITASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL	PENGUATAN KOLABORASI PUSAT INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR TERPADU RAMAH LINGKUNGAN BERBASIS KEUNGGULAN WILAYAH YANG DIKEMBANGKAN PADA KAWASAN STRATEGIS	PENINGKATAN KETERKAITAN UKM PADA RANTAI NILAI INDUSTRI DOMESTIK DAN GLOBAL, MELALUI PEMBINAAN BAGI KOPERASI, PENINGKATAN DAN PENGUATAN AKSES KE SUMBER DAYA PRODUKTIF (TERMASUK PEMBIAYAAN/PERMODALAN DAN PEMASARAN), PENERAPAN TEKNOLOGI DIGITALISASI DAN KEMITRAAN USAHA	PEMANTAPAN PUSAT INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UKM, KOPERASI, DAN BUMD MELALUI PENGUATAN PENERAPAN ASAS-ASAS GOOD GOVERNANCE, PENGUATAN KARAKTER BUDAYA WIRAUSAHA, DAN PENGUATAN IKLIM BISNIS
MISI 3, MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF	PENINGKATAN DERAJAT DAN AKSES PENDIDIKAN MELALUI PERCEPATAN WAJIB BELAJAR; TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN, PERLUASAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN GRATIS, PENGUATAN PENDIDIKAN VOKASI YANG BERORIENTASI PADA DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI, DAN	PENINGKATAN KUALITAS KARAKTER PEMBELAJARAN MASYARAKAT (KOGNITIF, AFEKTIF, DAN PSIKOMOTOR), PENGUATAN EKOSISTEM LITERASI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL INTERAKTIF, PENINGKATAN PEMERATAAN MINAT BELAJAR JANGKA PANJANG, SERTA	PENGUATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN SECARA INKLUSIF, PENGUATAN NILAI DAN KARAKTER BUDAYA UNTUK MENJAGA JATI DIRI MASYARAKAT BANTEN YANG RELIGIUS MELALUI OPTIMALISASI PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT KEBUDAYAAN, PERLINDUNGAN,	SINERGI KOLABORASI BERBASIS KOMUNITAS (KOLABORASI MULTI SEKTOR) DALAM MENINGKATKAN INTELEKTUAL, AKSES PENDIDIKAN DAN KARAKTER MASYARAKAT MELALUI PEMBERIAN BEASISWA, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK	PEMANTAPAN KAPASITAS INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MISI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL**	**PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN**	**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI**	**PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
	KEWIRAUSAHAAN (*LINK AND MATCH*), PERLUASAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI, DAN PENGUATAN TERHADAP ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN TETAP MENJAGA DAN MELESTARIKAN BUDAYA KELOKALAN	PERLUASAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN PENDIDIKAN KESETARAAN	PENGEMBANGAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN, PENGUATAN LITERASI MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN RELEVANSI LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN NON-FORMAL, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERDAYA SAING UNGGUL	TIDAK SEKOLAH, DAN KOMITMEN KEBERPIHAKAN SELURUH TINGKATAN PEMERINTAHAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MENJAMIN KEBERLANJUTAN AKSES PENDIDIKAN DINI HINGGA PERGURUAN TINGGI	
	PENINGKATAN DERAJAT DAN AKSES KESEHATAN MELALUI PENYEDIAAN SARANA-PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN, PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN, DAN OPTIMALISASI PROGRAM KESEHATAN SECARA KOMPREHENSIF (CEK KESEHATAN GRATIS DAN PROGRAM LAINNYA), PELAYANAN BAGI IBU DAN ANAK DI PROVINSI BANTEN KHUSUSNYA PADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR), DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR (*STUNTING, TBC, MALARIA, DBD*)	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN (PROMOTIF, PREVENTIF, REHABILITATIF DAN KURATIF), OPTIMALISASI LAYANAN RUMAH SAKIT, PENINGKATAN FASILITAS KESEHATAN DIMULAI DARI TINGKAT PERTAMA DALAM DETEKSI DINI PENYAKIT, SERTA PENUNTASAN ELIMINASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR DAN TROPIS TERABAIKAN	PENGUATAN INOVASI, PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM MENANGANI KASUS KOMPLEKS DAN SPESIALISASI (GIGI DAN MULUT, KESEHATAN MENTAL, MULTI-PENYAKIT PADA LANJUT USIA, KETERGANTUNGAN OBAT, DSB), DAN PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN, PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PADA WILAYAH TERLUAR DAN TERPENCIL	PENGUATAN KERJA SAMA MULTI SEKTOR DALAM PENGEMBANGAN *CENTER OF EXCELLENCE* SEKTOR KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN KONSEP *HOSPITAL TOURISM/ MEDICAL TOURISM*	PEMANTAPAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN MASYARAKAT SECARA INKLUSIF DITUNJANG DENGAN PELAYANAN DAN PROGRAM KESEHATAN YANG KOMPREHENSIF SECARA ADIL, MERATA, DAN BERKELAS DUNIA
	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA, PENINGKATAN KAPASITAS SERTA KETERAMPILAN	PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN, PEMUDA, PENYANDANG DISABILITAS, DAN LANSIA MELALUI PENGASUHAN DAN PERAWATAN, PEMBENTUKAN RESILIENSI, DAN	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, PENYANDANG DISABILITAS, DAN LANSIA, MELALUI PENGUATAN KAPASITAS, KEMANDIRIAN, KEMAMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN,	PENGUATAN KOLABORASI MULTI PIHAK DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, PENYANDANG DISABILITAS, DAN LANSIA	PEMANTAPAN PENGARUSUTAMAAN DAN KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM PARTISIPASI PEMBANGUNAN

MISI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL**	**PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN**	**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI**	**PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
	KELUARGA DAN LINGKUNGAN PENDUKUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL	PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, TERMASUK PERKAWINAN ANAK DAN PERDAGANGAN ORANG	SERTA PENINGKATAN PARTISIPASI DI BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN		
	PENINGKATAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN VOKASIONAL SERTA PENINGKATAN FUNGSI BALAI LATIHAN KERJA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN PENDUDUK USIA KERJA; PENINGKATAN KOMPETENSI SANTRI SESUAI MINAT, BAKAT DAN POTENSINYA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH GUNA MENDAPATKAN KESEMPATAN BERDAYA SAING, SERTA PEMBERIAN AKSES PEMBIAYAAN DAN MODAL USAHA	PENGUATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS, MANAJERIAL, KOMUNIKASI, DAN ETIKA KERJA BAGI PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA BERBASIS GEDSI (*GENDER EQUALITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION*)	PENGUATAN KOLABORASI DAN RISET TERKAIT SEKTOR-SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF, ANTARA LAIN MELALUI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS RESEARCHER, PENINGKATAN PEMBIAYAAN RISET SEKTOR-SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF, SERTA PENGUATAN KOLABORASI RISET SEKTOR-SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF ANTARA PEMERINTAH, DUNIA AKADEMIK, DUDI, MASYARAKAT, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	PENGUATAN INOVASI, OPTIMALISASI DAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN (EDUSAINTECH) SERTA BALAI-BALAI PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN DAN WIRAUSAHA PENDUDUK USIA KERJA	PEMANTAPAN KETERAMPILAN DAN WIRAUSAHA PENDUDUK USIA KERJA SERTA PEMANTAPAN KOMPETENSI SANTRI SESUAI MINAT, BAKAT DAN POTENSI BAGI KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
MISI 4, MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS	PENGEMBANGAN KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN (KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEK, *CENTRAL BUSINESS DISTRICT* (CBD), KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS, DAN KAWASAN INDUSTRI) SESUAI TATA RUANG BERBASIS WILAYAH KESATUAN LANSKAP EKOLOGIS, PEMBANGUNAN JALAN DAN JALAN TOL SEBAGAI KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DAN PENGHUBUNG JALUR LOGISTIK DAN BAHAN BAKU INDUSTRI, DUKUNGAN PROGRAM	PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA; PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN RAMAH BAGI SEMUA KALANGAN (TERMASUK PENYANDANG DISABILITAS), MENDORONG PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN YANG RAMAH LINGKUNGAN, EFISIEN DALAM PENGGUNAAN LAHAN, DAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG MEMADAI DITUNJANG DENGAN TATA RUANG BERBASIS WILAYAH KESATUAN LANSKAP EKOLOGIS SERTA PENINGKATAN SARANA	PENGUATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN GUNA MENCIPTAKAN SISTEM LOGISTIK YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS, SENTRA INDUSTRI KECIL BERBASIS KOMODITAS SEHINGGA MEMPERMUDAH PEMASARAN DAN DISTRIBUSI BAGI PETANI DAN NELAYAN UNTUK MENDAPATKAN AKSES PASAR MAUPUN MEMBANTU PENINGKATAN EFISIENSI INDUSTRI	PENGUATAN KETERLIBATAN DAN KOLABORASI DENGAN MITRA, MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA (MULTIPIHAK) DALAM PEMBANGUNAN, DAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) YANG DAPAT MENJADI MAGNET PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU SESUAI DENGAN TATA RUANG	PEMANTAPAN LAYANAN SMART INFRASTRUKTUR MENDUKUNG KONEKTIVITAS KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI (KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEK, *CENTRAL BUSINESS DISTRICT* (CBD), KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS, DAN KAWASAN INDUSTRI), KAWASAN PERKANTORAN, KAWASAN PENDIDIKAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI

MISI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL**	**PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN**	**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI**	**PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
	AGRARIA/PERTANAHAN SEPERTI PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT, PERCEPATAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DALAM MENANGANI PELAYANAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN SANITASI, DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENGENDALI BANJIR DAN ABRASI	DAN PRASARANA ENERGI TERBARUKAN PADA KAWASAN STRATEGIS DAN PRIORITAS		BERBASIS WILAYAH KESATUAN LANSKAP EKOLOGIS	
	PENGUATAN KONSEP HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU, BERKELANJUTAN, DAN TAHAN BENCANA, PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUNIAN VERTIKAL DAN RUMAH TAPAK, SERTA PENINGKATAN PENATAAN KAWASAN KUMUH YANG DIDUKUNG DENGAN PENGURANGAN BACKLOG KEPEMILIKAN RUMAH	MENGEMBANGKAN SISTEM FASILITAS PEMBIAYAAN HUNIAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR), PERCEPATAN PENATAAN KAWASAN KUMUH, DAN PERLUASAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUNIAN YANG TERINTEGRASI DENGAN FASILITAS PUBLIK, PUSAT AKTIVITAS EKONOMI, TRANSPORTASI (HUNIAN BERBASIS TRANSIT/TOD), DAN INFRASTRUKTUR DASAR LAINNYA	PENGUATAN KOLABORASI PENTAHELIX (PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, SWASTA, DAN STAKEHOLDER), DAN INOVASI PEMBIAYAAN KREATIF DALAM MENDUKUNG PERLUASAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN	PENGUATAN INOVASI PENDANAAN/PEMBIAYAAN DALAM FASILITASI MASYARAKAT TERHADAP AKSES HUNIAN TAHAN BENCANA, LAYAK, TERJANGKAU, TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN (*SELF SUFFICIENT NEIGHBORHOOD*)	PEMANTAPAN LAYANAN PENYEDIAAN HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN
	PENINGKATAN PEMBANGUNAN JARINGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL UNTUK MENDUKUNG KONEKTIVITAS PADA KAWASAN PENDIDIKAN, PERMUKIMAN, PEREKONOMIAN (KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEK, KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS, DAN KAWASAN INDUSTRI), DAN KAWASAN PERKANTORAN	PENGUATAN PEMBANGUNAN JARINGAN SISTEM ANGKUTAN MASSAL, DAN PENINGKATAN EFISIENSI KONEKTIVITAS JALAN, BANDARA, STASIUN, DAN PELABUHAN DARI DAN MENUJU KAWASAN PENDIDIKAN, KAWASAN PERKANTORAN, KAWASAN PERMUKIMAN, SERTA TERUTAMA MENGHUBUNGKAN KAWASAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI (KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEK, KAWASAN	PENINGKATAN EFISIENSI WAKTU TEMPUH ANTAR PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN, MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PUBLIK TERHADAP LAYANAN TRANSPORTASI YANG AMAN DAN TERJANGKAU GUNA MENDUKUNG MOBILITAS SOSIAL, MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT, DAN MENINGKATKAN PERGERAKAN ORANG, BARANG, DAN JASA	PENINGKATAN SKEMA PENDANAAN MULTI MODA ANGKUTAN UMUM MASSAL STRATEGIS MRT TANGERANG-JAKARTA, REAKTIVASI REL KERETA API LABUAN, PELABUHAN BOJONEGARA/CIWANDAN DAN BANDARA TANGERANG MENDUKUNG KONEKTIVITAS MEGAPOLITAN JAWA-	PEMANTAPAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, EFISIEN, DAN MURAH (SERTA FASILITAS PENUNJANG YANG TERINTEGRASI DENGAN KAWASAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA

MISI	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	**PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL**	**PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN**	**PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI**	**PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
		PARIWISATA PRIORITAS, DAN KAWASAN INDUSTRI		SUMATRA DAN RANTAI PASOK LOGISTIK INDUSTRI STRATEGIS PADA KAWASAN INDUSTRI SERANG-CILEGON-TANGERANG DAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SERANG-CILEGON	
MISI 5: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELESTARIAN PADA KAWASAN RESAPAN AIR, SUNGAI, KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI, REHABILITASI MANGROVE PADA WILAYAH PESISIR, DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENCEMARAN AIR LIMBAH SERTA PENINDAKAN TERHADAP PELAKU YANG MENCEMARI LINGKUNGAN	PENGUATAN EKOSISTEM DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN, PENGUATAN PELESTARIAN PADA KAWASAN RESAPAN AIR DAN SUNGAI PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG, DAERAH ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH LEBAK DAN PANDEGLANG DAN INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG	PENGUATAN KOLABORASI TERHADAP PENERAPAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN SERTA PENINGKATAN EKONOMI SIRKULAR MASYARAKAT; OPTIMALISASI SUMBER DAYA AIR BESERTA PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAN EKOLOGINYA GUNA MENDUKUNG KETAHANAN AIR MELALUI BENDUNG, WADUK, SITU DAN SUNGAI	PENINGKATAN PENGGUNAAN INOVASI TEKNOLOGI DIGITAL MONITORING DALAM MELESTARIKAN KAWASAN RESAPAN AIR, SUNGAI DAN PENCEMARAN AIR LIMBAH, SERTA OPTIMALISASI DAN PENGENDALIAN KELANGKAAN AIR DAN POTENSI BANJIR MELALUI PENYEDIAAN WADUK, BENDUNGAN, IRIGASI, DLL	PEMANTAPAN PELESTARIAN KAWASAN RESAPAN AIR, SUNGAI DAN PENCEMARAN AIR LIMBAH PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG, DAERAH ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH LEBAK DAN PANDEGLANG DAN INDUSTRI STRATEGIS CILEGON-SERANG-TANGERANG
	PENGUATAN REGULASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TAHAN GEMPA, PENGUATAN MITIGASI BENCANA DAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DI WILAYAH DENGAN POTENSI BENCANA TINGGI, DAN PENYIAPAN KETERSEDIAAN PANGAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA, PERDESAAN DAN PERKOTAAN	PENGUATAN TATA RUANG DAN ZONASI BAGI DAERAH RAWAN BENCANA BERKATEGORI TINGGI, PENINGKATAN KAWASAN AGRIKULTUR PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN TERPADU *FEW NEXUS* (*FOOD, ENERGY, WATER*), DAN PENINGKATAN KETANGGUHAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAERAH MELALUI PROSES PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI, DAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN	PENGUATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI MITIGASI BENCANA DAN KETAHANAN PANGAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA, PERDESAAN DAN PERKOTAAN; PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOLABORASI MULTI SEKTOR DALAM PENANGGULANGAN BENCANA; SERTA PENINGKATAN INVESTASI DALAM PENGENDALIAN	PEMANTAPAN SARANA DAN PRASARANA MITIGASI BENCANA DAN KETAHANAN PANGAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA, PERDESAAN DAN PERKOTAAN

MISI	TAHAP I (2026) PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN	TAHAP II (2027) PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	TAHAP III (2028) PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PEREKONOMIAN	TAHAP IV (2029) PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI	TAHAP V (2030) PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
				KERAWANAN PANGAN DAN BENCANA	
	PENERAPAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU DAN BERKELANJUTAN GUNA MENDORONG EFISIENSI ENERGI DAN PEMBANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN, PENINGKATAN IMPLEMENTASI TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN	PENGUATAN PENGGUNAAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN, PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN (RENEWABLE ENERGY) GUNA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI BERBASIS POTENSI ALAM YANG DIMILIKI OLEH BANTEN	PENGUATAN KOLABORASI PENGGUNAAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN HUTAN DAN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGHASILKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN SKEMA CARBON TRADE	PENGUATAN PEMANFAATAN INOVASI PENGGUNAAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN, DAN PENGEMBANGAN ENERGI BERSIH (CLEAN ENERGY) BERBASIS ENERGI BARU DAN TERBARUKAN	PEMANTAPAN TRANSISI ENERGI RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON MENUJU *NET ZERO EMISSION*

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

3.2.3 ARAH KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan kerangka pikir rangkaian kerja sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui pencapaian target tujuan dan sasaran.

TABEL III.5
ARAH KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2025-2029

MISI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG MENCAKUP TERHADAP BERBAGAI ASPEK, DEREGULASI, AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH, PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT AKSES LAYANAN PEMERINTAHAN, DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS
	MENCIPTAKAN ASN YANG INOVATIF, ADAPTIF, DAN BERINTEGRITAS MELALUI KESEMPATAN PENGEMBANGAN KARIR, ADANYA SELEKSI BERBASIS MERITOKRASI DALAM PENEMPATAN TALENTA SESUAI TINGKAT POTENSI DAN KINERJA UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS SERTA TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN BAGI BIROKRAT PROVINSI BANTEN
	MENINGKATKAN KUALITAS DAN PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI KERJA SAMA DAERAH DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
	DIGITALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG LAYANAN BIROKRASI YANG AGILE, TRANSFORMASI LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) YANG MEMENUHI PRINSIP SMART GOVERNANCE SEBAGAI FONDASI PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS, SERTA ADANYA KOLABORASI, INTEGRASI, DAN STANDARISASI PENYELENGGARAAN DIGITAL PEMERINTAHAN
	PENINGKATAN BIROKRAT YANG BERINTEGRITAS DAN INOVATIF DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, EFEKTIF, TRANSPARAN, EFISIEN DAN TAAT ASAS
MISI 2. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL	PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF MELALUI: 1) PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS SEKTOR UNGGULAN DAERAH (SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, JASA, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA PRIORITAS (RELIGI, SEJARAH/BUDAYA, ALAM, DAN BUATAN), PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA), PERTANIAN, DAN SEKTOR UNGGULAN LAINNYA) SECARA INKLUSIF YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT LOKAL; 2) PENGEMBANGAN EKONOMI YANG BERBASIS INOVASI, DAYA SAING DAN HILIRISASI; 3) OPTIMALISASI EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU, EKONOMI HIJAU SERTA PENGUATAN EKOSISTEM HALAL DAN PERLUASAN PASAR SEBAGAI BENTUK TEROBOSAN BARU TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAERAH; 4) SERTA DITUNJANG DENGAN PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAERAH.
	MENDORONG PERTUMBUHAN PENANAMAN MODAL MELALUI: 1) PENGEMBANGAN SEKTOR STRATEGIS DAN PROSPEKTIF YANG MEMBERIKAN DAMPAK LANJUTAN (*MULTIPLIER EFFECT*) DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI (EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU, EKONOMI HIJAU, DSB); 2) KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA KHUSUSNYA PADA WILAYAH BANTEN SELATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERIZINAN; 3) MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI DAN EFISIENSI PADA SETIAP PROSES PERIZINAN DENGAN MEMANFAATKAN DIGITALISASI (OSS, SIMBG, DSB); DAN 4) OPTIMALISASI PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH YANG DIDUKUNG DENGAN KONDUSIVITAS DAERAH DAN KEPASTIAN KEBIJAKAN/REGULASI YANG BERLAKU
	PENGUATAN DAN PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI: 1) OPTIMALISASI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN PENGKAJIAN SUMBER PENDAPATAN BARU (EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU, EKONOMI HIJAU, DLL); 2) INOVASI

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	PEMBIAYAAN INOVATIF; OPTIMALISASI POTENSI KEUANGAN SYARIAH, SERTA PENGUATAN SINERGI PUSAT, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, DAN SWASTA DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL; 3) ADANYA *SPECIAL PURPOSE VEHICLE* (SPV) SEBAGAI AKSELERATOR PEMBANGUNAN DI PROVINSI BANTEN DALAM MENGELOLA SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INOVATIF YANG SAH SECARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; 4) PENGUATAN PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN SALAH SATUNYA MELALUI TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL; 5) PEMBENTUKAN BUMD BERDASARKAN POTENSI, KAPASITAS KEUANGAN, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PENYIAPAN REGULASI TATA KELOLA SISTEM SOSIAL DAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN [illegible] DI DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN BERAKHLAK MULIA; SINERGI KOLABORATIF MELALUI PENDEKATAN BUDAYA, KEARIFAN LOKAL, SEJARAH, SOSIAL-EKONOMI DAN PAHAM KEBHINEKAAN UNTUK MENJADIKAN DAERAH KONDUSIF DENGAN MASYARAKAT YANG MEMILIKI NILAI-NILAI LUHUR SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN
	PENYIAPAN REGULASI DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, DAN MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN HAK DASAR SERTA MENDORONG DAN MEMPERKUAT KEMANDIRIAN SOSIAL SECARA INKLUSIF, ADAPTIF, DAN RESPONSIF
	PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN REGULASI, SARANA DAN PRASARANA HINGGA KEMUDAHAN AKSES DAN MODAL USAHA; BANTUAN INSENTIF DANA BAGI DESA UNTUK PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DASAR (AIR BERSIH, SANITASI, RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, DSB); PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DESA, MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KELOKALAN DENGAN TUMBUHNYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES); DUKUNGAN PROGRAM AGRARIA/PERTANAHAN SEPERTI PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT
	PENYIAPAN REGULASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA KOPERASI; PEMBENTUKAN PUSAT INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN; PEMBERIAN AKSES PEMBIAYAAN ATAU MODAL USAHA; MENDORONG PEMANFAATAN IPTEK UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT; SERTA PENGUATAN EKOSISTEM HALAL MELALUI AKSELERASI FASILITASI SERTIFIKASI HALAL, PENGUATAN LEMBAGA DAN SDM PENDUKUNG EKOSISTEM HALAL, PENGEMBANGAN KEBIJAKAN EKOSISTEM HALAL, PENGUATAN KEMITRAAN EKOSISTEM HALAL, DAN PENGEMBANGAN RISET PENDUKUNG EKOSISTEM HALAL
MISI 3 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF	PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI WAJIB BELAJAR 13 TAHUN; PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DAN PENDIDIK; PENGUATAN PENGELOLAAN PENDIDIK; PENGUASAAN TERHADAP ILMU PENGETAHUAN (AGAMA, BUDAYA, PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEWARGANEGARAAN, KELUARGA DAN PENGASUHAN, SERTA STEM); PENINGKATAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN DITUNJANG SARANA-PRASARANA YANG MEMADAI DAN PENGEMBANGAN *CENTER OF EXCELLENCE* SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN; BANTUAN PENDIDIKAN ATAU INSENTIF PENDIDIKAN BAGI KELOMPOK RENTAN DAN BERPENGHASILAN RENDAH SECARA ADIL; SERTA PENINGKATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN SESUAI KEWENANGAN
	OPTIMALISASI PEMBIAYAAN DAN MUTU LAYANAN KESEHATAN, PENINGKATAN AKSES DAN MANAJEMEN TERPADU TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN, PEMENUHAN STANDAR AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DITUNJANG DENGAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN YANG MEMADAI SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA KESEHATAN, DAN PENGEMBANGAN *CENTER OF EXCELLENCE* SEKTOR KESEHATAN DAN KEOLAHRAGAAN
	MENCIPTAKAN KELUARGA YANG BERKUALITAS, GENDER YANG SETARA DAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN PRANIKAH DAN KELUARGA, PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SECARA HOLISTIK DITUNJANG

MISI	ARAH KEBIJAKAN
	DENGAN PUSAT LAYANAN TERPADU UNTUK KONSELING PSIKOSOSIAL, ADVOKASI HUKUM, DAN PELATIHAN VOKASI SERTA PENGUATAN TATA KELOLA DAN PELEMBAGAAN PUG (PENGARUSUTAMAAN GENDER) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
	PENGEMBANGAN AKSES KERJA, KEWIRAUSAHAAN, DAN PERAN PEMUDA, MEMBANGUN PLATFORM DIGITAL JOB MATCHING UNTUK MEMPERTEMUKAN PENCARI KERJA DAN INDUSTRI; MENYELENGGARAKAN INKUBASI STARTUP DAN PELATIHAN SKILL 4.0 BESERTA AKSES PENDANAAN MIKRO DAN VENTURA
MISI 4, MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS	PENGUATAN REGULASI, PEMBIAYAAN, KUALITAS SDM DAN TEKNOLOGI DALAM MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DUKUNGAN PENYELESAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PENGINTEGRASIAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG SINERGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) SERTA PENGUATAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, DUKUNGAN PROGRAM AGRARIA/PERTANAHAN SEPERTI PEMBERIAN BANTUAN PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT; PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KAWASAN STRATEGIS UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING INVESTASI SESUAI ZONASI DAN TATA RUANG WILAYAH, PENGELOLAAN SAMPAH TERINTEGRASI HULU-HILIR DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, SEHAT DAN NYAMAN, PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH DAN FASILITAS SANITASI YANG LAYAK DAN ENERGI YANG RAMAH LINGKUNGAN, SERTA DUKUNGAN TERHADAP PEDOMAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN (DIATUR KEMUDIAN DALAM PERATURAN GUBERNUR)
	PENGUATAN KEBIJAKAN DAN SKEMA PEMBIAYAAN, PENINGKATAN PENYEDIAAN HUNIAN VERTIKAL MAUPUN PERUMAHAN LAYAK DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT GUNA MENGURANGI *BACKLOG* KEPEMILIKAN RUMAH; PENINGKATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU); PENATAAN KAWASAN KUMUH, DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI DENGAN INFRASTRUKTUR DASAR DALAM MEWUJUDKAN EKOSISTEM PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN
	PENGUATAN KEBIJAKAN, PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA TRANSPORTASI, DAN PEMBIAYAAN DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN TRANSPORTASI UMUM MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN BAGI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT YANG MENGHUBUNGKAN ANTAR KOTA DAN DESA SERTA PUSAT EKONOMI
MISI 5, MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA	PENGUATAN TATA KELOLA, PEMBIAYAAN, DAN KUALITAS SDM DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG MENGEDEPANKAN KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP; PENGUATAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENJAGA KELESTARIAN DAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM
	PENGUATAN REGULASI , SARANA DAN PRASARANA SERTA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA; SERTA MENINGKATKAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN KERAGAMAN PANGAN (DIVERSIFIKASI PANGAN) YANG LEBIH LUAS DAN VARIATIF BAGI MASYARAKAT
	PENGUATAN KEBIJAKAN, TEKNOLOGI, DAN PENGEMBANGAN TRANSISI ENERGI TERBARUKAN, PENGUATAN TRANSISI ENERGI YANG MENDUKUNG PENGGUNAAN ENERGI BERSIH DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN SERTA SEKTOR LAINNYA DALAM MEWUJUDKAN *NET ZERO EMISSION*, DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN ENERGI BERSIH SECARA HOLISTIK

Sumber, Diolah Oleh Bappeda, 2025

3.2.3.1 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN PANDEGLANG

Untuk mendukung pencapaian nasional sebagaimana yang diturunkan kepada Provinsi Banten, maka untuk itu sasaran pembangunan Kabupaten Pandeglang dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana berikut ini.

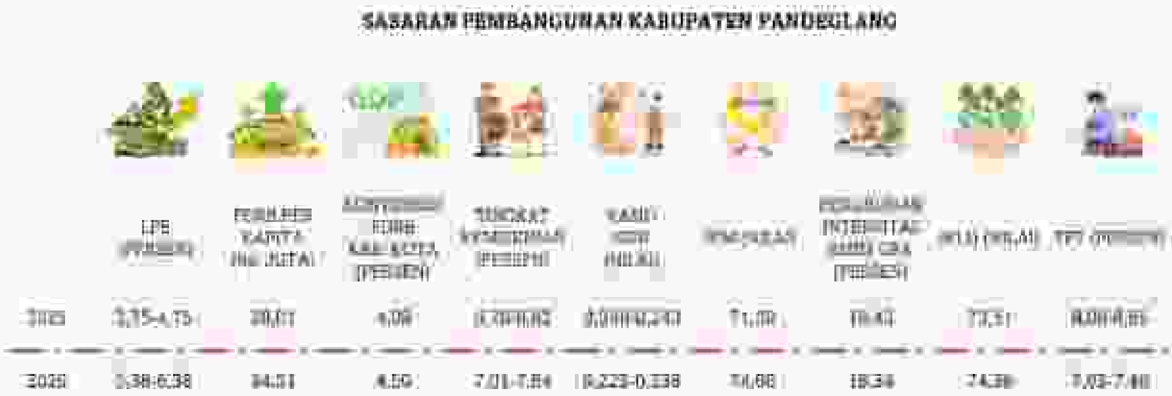

GAMBAR III.9
SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PANDEGLANG

(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

TABEL III.6
ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN PANDEGLANG

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN PANDEGLANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
• KAWASAN PERTUMBUHAN PERDESAAN MANDIRI • KAWASAN PERTUMBUHAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF UNGGULAN LABUAN-TANJUNG LESUNG • KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR, DAN ENERGI BANTEN • KAWASAN AFIRMASI BANTEN SELATAN (PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN) • KAWASAN KONSERVASI /RAWAN BENCANA TAMAN NASIONAL (TN) UJUNG KULON • KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI DAN MEGATHRUST SELAT SUNDA	TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIDAK KORUPSI DAN SISTEM MERIT DALAM BIROKRASI	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
		SINERGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
		DUKUNGAN TRANSFORMASI, EFISIENSI REFORMASI BIROKRASI DAN PERKUATAN REFORMASI HUKUM, MELALUI: I) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU); II) PENANGGULANGAN JUDI DAN PENYELUNDUPAN, DAN III) PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL, MELALUI: I) PENGUATAN TATA KELOLA DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN DIGITAL, II) PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN BUDAYA DIGITAL ASN, III) DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK PRIORITAS, DAN IV) PENGEMBANGAN EKOSISTEM LAYANAN PUBLIK DIGITAL
		PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT AKSES LAYANAN PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU
	INVESTASI, KEMUDAHAN INDUSTRI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	DUKUNGAN KEMUDAHAN IZIN USAHA DALAM MENDORONG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DENGAN PADAT KARYA, AKSES DUKUNGAN PERMODALAN BAGI TUNA KARYA SERTA PENGUTAMAAN TENAGA KERJA LOKAL
		DUKUNGAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS PADAT KARYA BERPRINSIP ESG (*ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE*) DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN, MENCAKUP: TRANSPORTASI HIJAU, ENERGI TERBARUKAN, PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH, SERTA ADOPSI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DAN EKONOMI SIRKULAR
		DUKUNGAN HILIRISASI LANJUTAN SAWIT BIOPLASTIK, BIOAVTUR, GRAPHENE, SURFAKTAN; KELAPA, PERIKANAN TANGKAP DAN PRODUK UNGGULAN SESUAI KARAKTERISTIK WILAYAH LAINNYA

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN PANDEGLANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL/INDUSTRI HIJAU/INDUSTRI BIRU KHUSUSNYA PADA INDUSTRI UNGGULAN, POTENSIAL, DAN BERORIENTASI EKSPOR SESUAI POTENSI DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH RTRW DAERAH
		PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU DENGAN SENTRA UTAMA PEMBANGUNAN PELABUHAN PENDARATAN IKAN CIKEUSIK-BINUANGEUN MENUJU PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
	ZONA EKONOMI BARU, PENGUATAN UMKM, DAN PEMERATAAN EKONOMI	DUKUNGAN PENGEMBANGAN UMKM TERHADAP AKSES PASAR, PERBANKAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS PRODUK USAHA SESUAI UNGGULAN WILAYAH, PENDAMPINGAN TERHADAP INOVASI PRODUK DAN LAYANAN, MENCIPTAKAN REGULASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN WIRAUSAHA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SEBAGAI RANTAI PASOK INDUSTRI SEDANG-BESAR YANG ADA DI KAWASAN INDUSTRI (KI)/KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PRIORITAS
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KOPERASI MERAH PUTIH
		PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN HILIRISASI PRODUK PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		REVITALISASI SENTRA IKM MENES-CIKEUDAL
	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DUKUNGAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BANTEN, MELALUI: I) DESA BUDAYA, II) PELINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN REVITALISASI WARISAN BUDAYA; III) PEMANFAATAN KHAZANAH BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN (CAGAR BUDAYA, PERMUSEUMAN, DAN PUSAT KEBUDAYAAN LAINNYA); DAN IV) JAMINAN HAK KEBUDAYAAN, EKSPRESI BUDAYA; SERTIFIKASI KOMPETENSI PELAKU BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI, BERKUALITAS, BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DAN BERKELANJUTAN
		PENGEMBANGAN PARIWISATA BERUPA *EVENT TOURISM INTERNASIONAL*, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH/BUDAYA, WISATA RELIGI, WISATA BUATAN DAN *EVENT* LAINNYA YANG AKAN DIINTERVENSI LINTAS SEKTORAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU, EKONOMI HIJAU, MAUPUN EKOSISTEM EKONOMI LAINNYA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI WISATA MEMANFAATKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI: I) PERLUASAN INFRASTRUKTUR DIGITAL; II) PENINGKATAN KAPASITAS SDM DIGITAL DAN LITERASI DIGITAL, DAN III) PEMBANGUNAN JARINGAN *BROADBAND* HINGGA KE PELOSOK
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA DAN PENINGKATAN 3A PARIWISATA DI KEK TANJUNG LESUNG, [illegible] [illegible], LABUAN, [illegible], UJUNG KULON, TAMAN HUTAN RAKYAT

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN PANDEGLANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		CAPITA PANDEGLANG, PENDUKUNG CIKUNCANG HUB KABUPATEN PANDEGLANG), DAN WISATA LAINNYA
	SEKOLAH GRATIS UNTUK SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI BANTEN	DUKUNGAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN 12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH) MELALUI: I) PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD); II) REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH YANG BERKUALITAS; III) PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN YANG TEPAT SASARAN; IV) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH; V) REVITALISASI PENDIDIKAN NONFORMAL; VI) PENGUATAN PENGELOLAAN DAN AKSELERASI PEMERATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS; VII) MODERNISASI DAN AKSELERASI STEM (*SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS*)
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN DAYAH/PESANTREN, SERTA PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA KAWASAN AFIRMASI, MELALUI: I) PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS, II) PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT, III) PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT, IV) PERLUASAN LAYANAN PENYIARAN DIGITAL, DAN V) LAYANAN DIGITAL TERPADU, TERPERSONALISASI DAN BERFOKUS PADA *USER CENTRIC*
		DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN VOKASI, PENYEDIAAN, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MAUPUN LAYANAN PENDIDIKAN/PELATIHAN TENAGA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN, MELALUI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BALAI LATIHAN KERJA SESUAI KEBUTUHAN WILAYAH
		PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DITUNJANG DENGAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN SESUAI KEAHLIAN
		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI WILAYAH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) SESUAI KEUNGGULAN DAN KEBUTUHAN WILAYAH
		PENGEMBANGAN SMA UNGGUL MENJADI SEKOLAH GARUDA TRANSFORMASI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SDM PERDESAAN KABUPATEN PANDEGLANG
	AKSES KESEHATAN BAGI WARGA DAN PELAYANAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI	DUKUNGAN OPTIMALISASI FASILITAS KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI) DAN PROGRAM KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENANGANI KASUS GIGI DAN MULUT/KASUS KESEHATAN MENTAL/KASUS MULTIPENYAKIT PADA LANJUT USIA/KASUS KETERGANTUNGAN OBAT
		DUKUNGAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT, MELALUI: I)

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN PANDEGLANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, REHABILITATIF, DAN KURATIF: I) PENYEDIAAN SARANA-PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN, II) PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENUNTASAN ELIMINASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR, DAN TROPIS TERABAIKAN, IV) PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK, V) PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DAN PENUNTASAN TBC, VI) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI BAGI USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF, DAN LANSIA SERTA KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI; DAN VII) PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
		DUKUNGAN PENGUATAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, MELALUI: I) PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN, DAN II) PENGUATAN TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PUG (PENGARUSUTAMAAN GENDER) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SECARA INKLUSIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL ADAPTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MENGUPAYAKAN PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN SATU SISTEM REGSOSEK MAUPUN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN KESEHATAN IBU-ANAK, KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI DI RSUD PROVINSI DAN KAB/KOTA
		DUKUNGAN PENCAPAIAN UHC
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		OPTIMALISASI LAYANAN RSUD LABUAN
		PEMBANGUNAN FASILITAS INFRASTRUKTUR KESEHATAN WILAYAH AFIRMASI BANTEN SELATAN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN SEKOLAH RAKYAT
	KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	DUKUNGAN INTERVENSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, BANTUAN PANGAN, DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN (PHTC)
		DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN AIR, ENERGI, DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN (BERBASIS PANGAN AKUATIK / *BLUE FOOD*, DSB)
		PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES PASAR DAN PEMBIAYAAN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES ASURANSI PERTANIAN DAN PERIKANAN, SERTA PENGENDALIAN KEPASTIAN PASAR, MELALUI: I)

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN PANDEGLANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN PETANI DAN PENGUATAN MANAJEMEN POKTAN/GAPOKTAN, II) PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN KORPORASI PETANI, III) PEMBIAYAAN DANA TERSEDIA DAN KREDIT MURAH PETANI, IV) PERLUASAN AKSES ASURANSI USAHA TANI; V) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK DAN PERLUASAN AKSES LAYANAN SISTEM RESI GUDANG; VI) PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PENYERAPAN HASIL PANEN KOMODITAS PANGAN UTAMA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN/PANGAN HEWANI (TERMASUK PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN; PENGEMBANGAN SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
		DUKUNGAN PENINGKATAN DAYA GUNA LAHAN PERTANIAN DAN PRODUKTIVITAS MELALUI INTENSIFIKASI DAN PENINGKATAN PRASARANA PRODUKSI, MELALUI: I) PENYEDIAAN DAN PERLUASAN AKSES ALSINTAN MODERN/BENIH DAN BIBIT BERKUALITAS/PUPUK DAN PESTISIDA BERKUALITAS, II) MITIGASI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) DAN KESEHATAN HEWAN, III) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DAN DIGITAL BAGI PETANI, DAN IV) PENINGKATAN KUALITAS PASCAPANEN MELALUI PENINGKATAN PRASARANA PASCAPANEN
		DUKUNGAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN, MELALUI: I) KEBIJAKAN TATA RUANG UNTUK PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN, II) REFORMA AGRARIA, REDISTRIBUSI, DAN KONSOLIDASI LAHAN PERTANIAN, III) OPTIMALISASI DAN REVITALISASI LAHAN PERTANIAN, DAN IV) PENINGKATAN PENGGUNAAN PUPUK/PESTISIDA/PAKAN ORGANIK
		PENGUATAN KAWASAN AGRIKULTUR PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN TERPADU FEW NEXUS (*FOOD, ENERGY WATER*)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PUSAT/LABORATORIUM RISET PERTANIAN SKALA LOKAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN VARIETAS UNGGUL DAN BUDIDAYA LOKAL, PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI, SERTA PENGUATAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PERTANIAN
		DUKUNGAN PEMBERDAYAAN AKTIVITAS EKONOMI *HIGH VALUE* UNGGULAN PERIKANAN, PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DAN PERTANIAN HORTIKULTURA
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KAWASAN AGRIKULTUR KABUPATEN PANDEGLANG
		PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN
		OPTIMALISASI BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR DAN AIR PAYAU CIPEUCANG DAN [illegible]
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN PPI LABUAN
		DUKUNGAN OPTIMALISASI FUNGSI KONSERVASI, EKOLOGI DAN WISATA

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN PANDEGLANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		GUNUNG ASEUPAN, GUNUNG KARANG, DAN GUNUNG PULOSARI
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, TRANSPORTASI, SUMBER DAYA AIR DAN HUNIAN LAYAK	DUKUNGAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN DAN RENCANA TATA RUANG YANG MENGINTEGRASIKAN POTENSI DAN MASALAH SECARA TERPADU
		PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS KAWASAN PRODUKTIF EKONOMI (INFRASTRUKTUR DAN SISTEM LOGISTIK)
		PEMBANGUNAN PJU, SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN SERTA TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN EFISIEN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SPAM
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN IPLT/IPAL DAN SPAL
		PEMBANGUNAN KEBINAMARGAAN
		PEMBANGUNAN PSU PERMUKIMAN, POS LAYANAN DESA SEJAHTERA, DAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU KEWENANGAN PROVINSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH/HUNIAN MURAH BERSANITASI BAIK BAGI PEKERJA, MBR, GEN Z, DAN MILENIAL
		DUKUNGAN PENYELESAIAN MASALAH PERSAMPAHAN TERINTEGRASI HULU-HILIR
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
		DUKUNGAN REAKTIVASI KERETA API RANGKASBITUNG-PANDEGLANG-SAKETI-LABUAN DAN SAKETI-MALINGPING-BAYAH
		DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR (AIR BAKU, AIR MINUM, PENANGANAN LIMBAH/SANITASI, INFRASTRUKTUR JARINGAN TRANSMISI, INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI DAN LISTRIK PERDESAAN, RUMAH/HUNIAN LAYAK HUNI DAN RUANG TERBUKA HIJAU)
		DUKUNGAN REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR YANG BERKELANJUTAN, MELALUI: I) PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN, II) PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH SERTA PEMROSESAN DI TPA/TPST, DAN III) ADOPSI TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH
		DUKUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR MELALUI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA CATCHMENT AREA, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI, DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIKADUEUN-CIPUNTENAGUNG-CINAMA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMANTAUAN KUALITAS AIR DI SUNGAI DAN DANAU, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI, DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIKADUEUN-CIPUNTENAGUNG-CINAMA
		DUKUNGAN PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN RUAS PANIMBANG-MUARA BINUANGEUN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN PANDEGLANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		MENUJU BINUANGEUN-MALINGPING-BAYAH-SAWARNA-PELABUHANRATU, CISOLOK-CIBOLEGER
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KEBERMANFAATAN JALAN TOL SERANG-PANIMBANG (KHUSUSNYA EXIT TOL TANJUNG TEJA, CIKULUR, CILELES, BOJONG, PAHUARAN, DAN PANIMBANG)
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA KAWASAN AFIRMASI: PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT, PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT, DAN PERLUASAN LAYANAN PENYIARAN DIGITAL
		DUKUNGAN OPTIMALISASI WILAYAH SUNGAI CILIMAN, CIBUNGUR, CISATA, CIRAMA, CIMANDIL, CISEUKEUT DAN CIBALIUNG DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSERVASI, AIR MINUM DAN AIR PERTANIAN
		PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN SUMUR
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN BENDUNG CILIMAN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG-PANIMBANG (RANGKASBITUNG-PANIMBANG) DAN PRESERVASI JALAN RUAS PANIMBANG-LABUAN, PANIMBANG-TANJUNG LESUNG, DAN PANIMBANG-SUMUR-UJUNG KULON (VIA PESISIR)
	LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA RESILIENSI TERHADAP BENCANA	DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU MELALUI PENGURANGAN BEBAN PENCEMAR DARI SUMBER DOMESTIK, INDUSTRI, PETERNAKAN, PERTANIAN DAN HAL LAINNYA SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN MUTU AIR
		RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAERAH MELALUI PROSES PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI
		DUKUNGAN *NATURE-BASED SOLUTION* DAN *GRAY INFRASTRUCTURE* UNTUK MITIGASI ANCAMAN *MEGATHRUST* DAN TSUNAMI DI PESISIR BARAT BANTEN (MEGATHRUST SELAT SUNDA)
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSISI ENERGI MENUJU EMISI KARBON YANG LEBIH RENDAH, MELALUI: I) PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN, II) PENERAPAN JARINGAN CERDAS (*SMART GRID*) UNTUK MEMAKSIMALKAN EFISIENSI DAN PEMANTAUAN KONSUMSI ENERGI, III) ADOPSI TEKNOLOGI PENYIMPANAN ENERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS PASOKAN LISTRIK, IV) PENERAPAN *INTERNET OF THINGS* (IOT) DI SEKTOR ENERGI GUNA MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN DAN ANALITIK DATA SECARA *REAL-TIME*, DAN V) PERLUASAN PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN, PEMULIHAN, PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN AREA BERNILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI
		PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DAN JASA EKOSISTEM BERKELANJUTAN MENDUKUNG BIOEKONOMI
		DUKUNGAN PENINGKATAN BIOPROSPEKSI, BIOTEKNOLOGI, KEAMANAN HAYATI, SERTA AKSES DAN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN PANDEGLANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SUMBER DATA GENETIK
		DUKUNGAN PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENINGKATAN FUNGSI SOSIAL KAWASAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PRODUK BIOEKONOMI HUTAN MELALUI AGROFORESTRI
		DUKUNGAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TN (TAMAN NASIONAL) UJUNG KULON UNTUK FUNGSI HUTAN LESTARI, BIOEKONOMI, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

3.2.3.2 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN LEBAK

Untuk mendukung pencapaian nasional sebagaimana yang diturunkan kepada Provinsi Banten, maka untuk itu sasaran pembangunan Kabupaten Lebak dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana berikut ini.

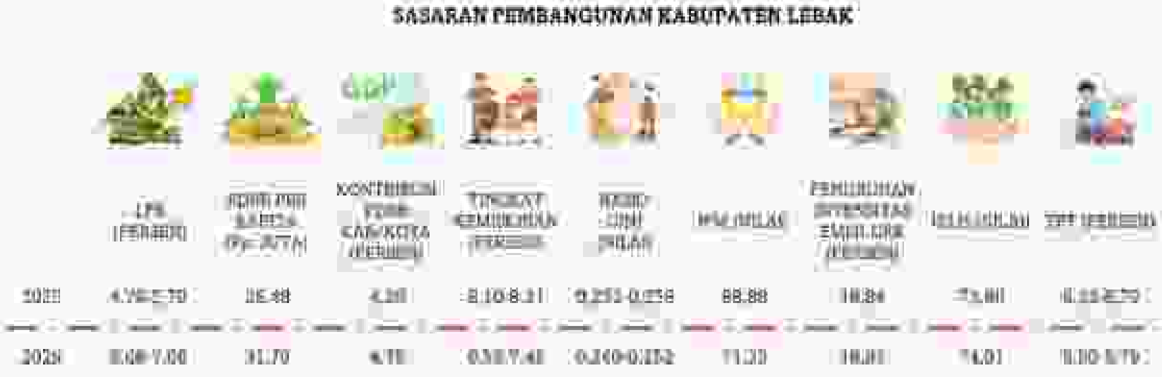

GAMBAR III.10
SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LEBAK
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

TABEL III.7
ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN LEBAK

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN LEBAK	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
• KAWASAN PERTUMBUHAN PERDESAAN MANDIRI • KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR, DAN ENERGI BANTEN • KAWASAN AFIRMASI BANTEN SELATAN (PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIDAK KORUPSI DAN SISTEM MERIT DALAM BIROKRASI	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN BERSERTIFIKAT ZONA INTEGRITAS
		SINERGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
		DUKUNGAN TRANSFORMASI, EFISIENSI REFORMASI BIROKRASI DAN PERKUATAN REFORMASI HUKUM, MELALUI: I) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU); II) PENANGGULANGAN JUDI DAN PENYELUNDUPAN; DAN III) PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN,

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN LEBAK	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
- KAWASAN KONSERVASI/RAWAN BENCANA TAMAN NASIONAL (TN) HALIMUN-SALAK - KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI DAN *MEGATHRUST* SELAT SUNDA		DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL MELALUI: I) PENGUATAN TATA KELOLA DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN DIGITAL; II) PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN BUDAYA DIGITAL ASN; III) DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK PRIORITAS; DAN IV) PENGEMBANGAN EKOSISTEM LAYANAN PUBLIK DIGITAL
		PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT AKSES LAYANAN PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU
	INVESTASI, KEMUDAHAN INDUSTRI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	DUKUNGAN KEMUDAHAN IZIN USAHA DALAM MENDORONG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DENGAN PADAT KARYA, AKSES DUKUNGAN PERMODALAN BAGI TUNA KARYA SERTA PENGUTAMAAN TENAGA KERJA LOKAL
		DUKUNGAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS PADAT KARYA BERPRINSIP ESG (*ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE*) DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN, MENCAKUP TRANSPORTASI HIJAU, ENERGI TERBARUKAN, PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH, SERTA ADOPSI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DAN EKONOMI SIRKULAR
		DUKUNGAN HILIRISASI LANJUTAN SAWIT BIOPLASTIK, BIOAVTUR, GRAPHENE, SURFAKTAN, KELAPA, PERIKANAN TANGKAP DAN PRODUK UNGGULAN SESUAI KARAKTERISTIK WILAYAH LAINNYA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL/INDUSTRI HIJAU/INDUSTRI BIRU KHUSUSNYA PADA INDUSTRI UNGGULAN, POTENSIAL, DAN BERORIENTASI EKSPOR SESUAI POTENSI DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH RPIP DAERAH
		PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU DENGAN SENTRA UTAMA PEMBANGUNAN PELABUHAN PENDARATAN IKAN CIKEUSIK-BINUANGEUN MENUJU PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
	ZONA EKONOMI BARU, PENGUATAN UMKM, DAN PEMERATAAN EKONOMI	DUKUNGAN PENGEMBANGAN UMKM TERHADAP AKSES PASAR, PERBANKAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS PRODUK USAHA SESUAI UNGGULAN WILAYAH, PENDAMPINGAN TERHADAP INOVASI PRODUK DAN LAYANAN, MENCIPTAKAN REGULASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN WIRAUSAHA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SEBAGAI RANTAI PASOK INDUSTRI SEDANG-BESAR YANG ADA DI KAWASAN INDUSTRI (KI)/KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PRIORITAS
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KOPERASI MERAH PUTIH
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI HIJAU CILELES
	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DUKUNGAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BANTEN MELALUI: I) DESA BUDAYA; II) PELINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN REVITALISASI WARISAN BUDAYA; III) PEMANFAATAN KHAZANAH BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMAJUAN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN LEBAK	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		KEBUDAYAAN (CAGAR BUDAYA, PERMUSEUMAN, DAN PUSAT KEBUDAYAAN LAINNYA), DAN (V) JAMINAN HAK KEBUDAYAAN, EKSPRESI BUDAYA, SERTIFIKASI KOMPETENSI PELAKU BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI, BERKUALITAS, BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DAN BERKELANJUTAN
		PENGEMBANGAN PARIWISATA BERUPA *EVENT TOURISM* INTERNASIONAL, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH/BUDAYA, WISATA RELIGI, WISATA BUATAN DAN *EVENT* LAINNYA YANG AKAN DIINTERVENSI LINTAS SEKTORAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU, EKONOMI HIJAU, MAUPUN EKOSISTEM EKONOMI LAINNYA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI WISATA MEMANFAATKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI: I) PERLUASAN INFRASTRUKTUR DIGITAL; II) PENINGKATAN KAPASITAS SDM DIGITAL DAN LITERASI DIGITAL, DAN III) PEMBANGUNAN JARINGAN *BROADBAND* HINGGA KE PELOSOK
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA DAN PENINGKATAN 3A PARIWISATA DI SAWARNA, KAWASAN ADAT BADUY (BADUY LUAR), GEOPARK BAYAH DOME, DAN BENDUNGAN CILANCAR (SE) KABUPATEN LEBAK
	SEKOLAH GRATIS UNTUK SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI BANTEN	DUKUNGAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN 12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH) MELALUI: I) PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), II) REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH YANG BERKUALITAS, III) PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN YANG TEPAT SASARAN, IV) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH, V) REVITALISASI PENDIDIKAN NONFORMAL, VI) PENGUATAN PENGELOLAAN DAN AKSELERASI PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS, VII) *MODERNISASI* DAN AKSELERASI STEM (*SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS*)
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN DAYAH/PESANTREN, SERTA PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA KAWASAN AFIRMASI, MELALUI: I) PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS; II) PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT, III) PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT, IV) PERLUASAN LAYANAN PENYIARAN DIGITAL, DAN V) LAYANAN DIGITAL TERPADU, TERPERSONALISASI DAN BERFOKUS PADA *USER CENTRIC*
		DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN VOKASI, PENYULUHAN, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MAUPUN LAYANAN PENDIDIKAN/PELATIHAN TENAGA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN SEKTOR

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN LEBAK	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		KETENAGAKERJAAN, MELALUI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BALAI LATIHAN KERJA SESUAI KEBUTUHAN WILAYAH
		PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DITUNJANG DENGAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN SESUAI KEAHLIAN
		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS (UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI WILAYAH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) SESUAI KEUNGGULAN DAN KEBUTUHAN WILAYAH
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN RINTISAN SEKOLAH GARUDA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SDM PERDESAAN KABUPATEN LEBAK
	AKSES KESEHATAN BAGI WARGA DAN PELAYANAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI	DUKUNGAN OPTIMALISASI FASILITAS KESEHATAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI DAN PROGRAM KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENANGANI KASUS GIZI DAN MULTI/KASUS KESEHATAN MENTAL/KASUS MULTI-PENYAKIT PADA LANJUT USIA/KASUS KETERGANTUNGAN OBAT SERTA PEMBUDAYAAN HIDUP SEHAT
		DUKUNGAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT, MELALUI: I) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, REHABILITATIF, DAN KURATIF, II) PENYEDIAAN SARANA-PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN, III) PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENUNTASAN ELIMINASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR, DAN TROPIS TERABAIKAN, IV) PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK, V) PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DAN PENUNTASAN TBC, VI) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI BAGI USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF, DAN LANSIA SERTA KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, DAN VII) PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
		DUKUNGAN PENGUATAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, MELALUI: I) PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN; DAN II) PENGUATAN TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PUG (PENGARUSUTAMAAN *GENDER*) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SECARA INKLUSIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL ADAPTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MENGUPAYAKAN PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN SATU SISTEM REGSOSEK MAUPUN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN KESEHATAN IBU-ANAK.

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN LEBAK	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI DI RSUD PROVINSI DAN KAB/KOTA, TERUTAMA DI RSUD MALINGPING (PHTC)
		DUKUNGAN PENCAPAIAN UHC
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		PEMBANGUNAN MULTI PANTI PASIF ODA
		OPTIMALISASI LAYANAN RSUD CILOGRANG
		PEMBANGUNAN FASILITAS INFRASTRUKTUR KESEHATAN WILAYAH AFIRMASI BANTEN SELATAN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN SEKOLAH RAKYAT
	KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	DUKUNGAN INTERVENSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, BANTUAN PANGAN, DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN (PHTC)
		DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN AIR, ENERGI, DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN (SEPERTI PANGAN AKUATIK/BLUE FOOD, DSB)
		PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES PASAR DAN PEMBIAYAAN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES ASURANSI PERTANIAN DAN PERIKANAN, SERTA PENGENDALIAN KEPASTIAN PASAR, MELALUI: I) PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN PETANI DAN PENGUATAN MANAJEMEN POKTAN/GAPOKTAN, II) PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN KORPORASI PETANI, III) PEMBIAYAAN DANA BERGULIR DAN KREDIT LUNAK PETANI, IV) PERLUASAN AKSES ASURANSI USAHA TANI, V) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK DAN PERLUASAN AKSES LAYANAN SISTEM RESI GUDANG, VI) PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PENYERAPAN HASIL PANEN KOMODITAS PANGAN UTAMA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN/PANGAN HEWANI (TERMASUK PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN, PENGEMBANGAN SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
		DUKUNGAN PENINGKATAN DAYA GUNA LAHAN PERTANIAN DAN PRODUKTIVITAS MELALUI INTENSIFIKASI DAN PENINGKATAN PRASARANA PRODUKSI, MELALUI I) PENYEDIAAN DAN PERLUASAN AKSES ALSINTAN, BENIH/BENIH DAN BIBIT BERKUALITAS/PUPUK DAN PESTISIDA BERKUALITAS; II) MITIGASI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) DAN KESEHATAN HEWAN; III) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DAN DIGITAL BAGI PETANI , DAN IV) PENINGKATAN KUALITAS PASCAPANEN MELALUI PENINGKATAN PRASARANA PASCAPANEN
		DUKUNGAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN, MELALUI: I)

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN LEBAK	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		KEBIJAKAN TATA RUANG UNTUK PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN, II) REFORMA AGRARIA, REDISTRIBUSI, DAN KONSOLIDASI LAHAN PERTANIAN, III) OPTIMALISASI DAN REVITALISASI LAHAN PERTANIAN, DAN IV) PENINGKATAN PENGGUNAAN PUPUK/PESTISIDA/PAKAN ORGANIK
		PENGUATAN KAWASAN AGRIKULTUR PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN TERPADU FEW NEXUS *(FOOD, ENERGY, WATER)*
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PUSAT/LABORATORIUM RISET PERTANIAN SKALA LOKAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN VARIETAS UNGGUL DAN BUDIDAYA LOKAL, PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI, SERTA PENGUATAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PERTANIAN
		DUKUNGAN PEMBERDAYAAN AKTIVITAS EKONOMI *HIGH VALUE* UNGGULAN PERIKANAN, PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DAN PERTANIAN HORTIKULTURA
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KAWASAN AGRIKULTUR KABUPATEN LEBAK
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, TRANSPORTASI, SUMBER DAYA AIR DAN HUNIAN LAYAK	DUKUNGAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN DAN RENCANA TATA RUANG YANG MENGINTEGRASIKAN POTENSI DAN MASALAH SECARA TERPADU
		PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS KAWASAN PRODUKTIF EKONOMI INFRASTRUKTUR DAN SISTEM LOGISTIK
		PEMBANGUNAN JALAN, SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN SERTA TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN EFISIEN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN KARIAN DAN SPAM REGIONAL KARIAN TIMUR
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN IPLT/IPAL DAN SPAL
		PEMBANGUNAN KEBINAMARGAAN
		PEMBANGUNAN PSU PERMUKIMAN, POS LAYANAN DESA SEJAHTERA, DAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU KEWENANGAN PROVINSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH/HUNIAN MURAH BERSANITASI BAIK BAGI PEKERJA, MBR, GEN Z, DAN MILENIAL DI KAWASAN PERKOTAAN MALINGPING (PHTC)
		PEMBANGUNAN TPST/TPA REGIONAL DI KABUPATEN LEBAK
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
		DUKUNGAN PENINGKATAN JALUR KERETA API RANGKASBITUNG-MERAK DAN DUKUNGAN REAKTIVASI JALUR KERETA API SAKETI-BAYAH
		DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR (AIR BAKU, AIR MINUM, PENANGANAN LIMBAH/SANITASI, INFRASTRUKTUR JARINGAN TRANSMISI, INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI DAN LISTRIK PERDESAAN, RUMAH/HUNIAN LAYAK HUNI DAN RUANG TERBUKA HIJAU)
		DUKUNGAN REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR YANG BERKELANJUTAN, MELALUI: I) PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN LEBAK	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		TATA KELOLA PERSAMPAHAN, II) PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH SERTA PEMROSESAN DI TPA/LHP, DAN III) ADOPSI TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH
		DUKUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR MELALUI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA *CATCHMENT AREA*, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI, DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIKADUEULIH-CIPUNTENAGEUNG-CIHAMA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMANTAUAN KUALITAS AIR DI SUNGAI DAN DANAU, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI, DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIKADUEULIH-CIPUNTENAGEUNG-CIHAMA
		DUKUNGAN PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN RUAS PANIMBANG-MUARA BINUANGEUN, MUARA BINUANGEUN-MALINGPING-BAYAH-SAWARNA-PELABUHANRATU, CIKULUR-CIBOLUTEH
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN *FLY OVER* PERLINTASAN JALUR KERETA API
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KEBERMANFAATAN JALAN TOL SERANG-PANIMBANG (DENGAN ADANYA *EXIT* TOL TUNJUNG TEJA, RANGKASBITUNG, CIKULUR, CILELES, DAN BOJONG)
		DUKUNGAN OPTIMALISASI WADUK KARIAN UNTUK PENYEDIA AIR BAKU, IRIGASI, DAN WISATA
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PADA KAWASAN AFIRMASI: PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT, PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT, DAN PERLUASAN LAYANAN PENYIARAN DIGITAL
		PEMBANGUNAN TERMINAL MAJA
		DUKUNGAN OPTIMALISASI WILAYAH SUNGAI CIUJUNG DAN CIDURIAN DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSERVASI, AIR MINUM, DAN IRIGASI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG-RANGKASBITUNG-PANIMBANG
	LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA RESILIENSI TERHADAP BENCANA	DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU MELALUI PENGURANGAN BEBAN PENCEMAR DARI SUMBER DOMESTIK, INDUSTRI, PETERNAKAN, PERTANIAN DAN HAL LAINNYA SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN MUTU AIR
		RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAERAH MELALUI PROSES PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI
		DUKUNGAN *NATURE-BASED SOLUTION* DAN *GRAY INFRASTRUCTURE* UNTUK MITIGASI ANCAMAN *MEGATHRUST* DAN TSUNAMI DI PESISIR BARAT BANTEN (*MEGATHRUST* SELAT SUNDA)
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSISI ENERGI MENUJU EMISI KARBON YANG

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN LEBAK	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		LEBIH RENDAH, MELALUI: I) PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN, II) PENERAPAN JARINGAN CERDAS (*SMART GRID*) UNTUK MEMAKSIMALKAN EFISIENSI DAN PEMANTAUAN KONSUMSI ENERGI; III) ADOPSI TEKNOLOGI PENYIMPANAN ENERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS PASOKAN LISTRIK, IV) PENERAPAN *INTERNET OF THINGS* (IOT) DI SEKTOR ENERGI GUNA MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN DAN ANALITIK DATA SECARA *REAL-TIME*; DAN V) PERLUASAN PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN, PEMULIHAN, PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN AREA BERNILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI
		PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DAN JASA EKOSISTEM BERKELANJUTAN MENDUKUNG BIOEKONOMI
		DUKUNGAN PENINGKATAN BIOPROSPEKSI, BIOTEKNOLOGI, KEAMANAN HAYATI, SERTA AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SUMBER DAYA GENETIK
		DUKUNGAN PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENINGKATAN FUNGSI SOSIAL KAWASAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PRODUK BIOEKONOMI HUTAN MELALUI AGROFORESTRI
		DUKUNGAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TN (TAMAN NASIONAL) GUNUNG HALIMUN UNTUK FUNGSI HUTAN LESTARI, BIOEKONOMI, KEANEKARAGAMAN HAYATI, DAN PERHUTANAN SOSIAL
		DUKUNGAN OPTIMALISASI FUNGSI KONSERVASI GUNUNG HALIMUN UNTUK MENGURANGI DAMPAK BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2023

3.2.3.3 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN SERANG

Untuk mendukung pencapaian nasional sebagaimana yang diturunkan kepada Provinsi Banten, maka untuk itu sasaran pembangunan Kabupaten Serang dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana berikut ini.

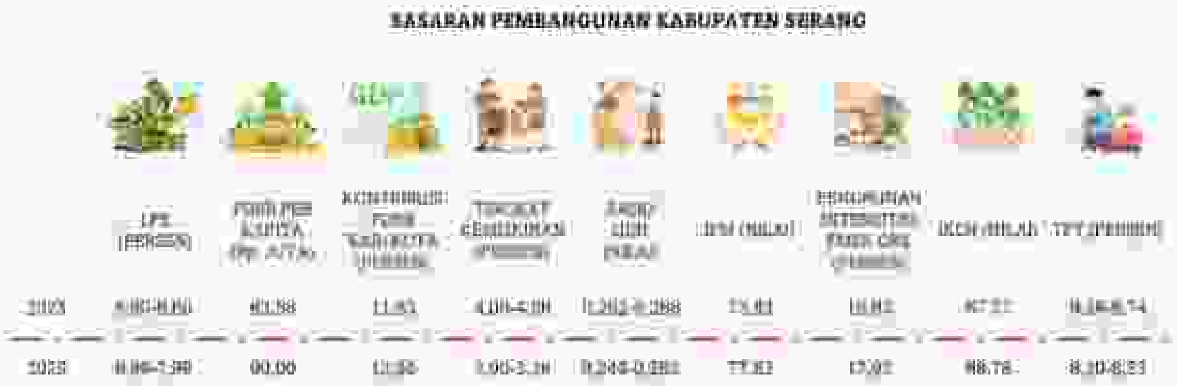

	LPE (PERSEN)	PDRB PER KAPITA (Rp JUTA)	KONTRIBUSI PDRB KABUPATEN (PERSEN)	TINGKAT KEMISKINAN (PERSEN)	RASIO GINI (NILAI)	IPM (NILAI)	PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (PERSEN)	IKLH (NILAI)	TPT (PERSEN)
2025	4.80-6.80	60.58	11.65	4.00-4.90	0.262-0.288	75.83	16.82	87.22	8.14-8.74
2029	6.90-7.90	90.00	11.95	3.00-3.18	0.246-0.282	77.83	17.02	88.78	8.10-8.53

GAMBAR III.11
SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SERANG

(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

TABEL III.8
ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN SERANG

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
• KAWASAN PERTUMBUHAN PERDESAAN MANDIRI • KAWASAN PERTUMBUHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI CILEGON–SERANG–TANGERANG • KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR, DAN ENERGI BANTEN • KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI	TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIDAK KORUPSI DAN SISTEM MERIT DALAM BIROKRASI	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
		SINERGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
		DUKUNGAN TRANSFORMASI, REFORMASI BIROKRASI DAN PENGUATAN REFORMASI HUKUM, MELALUI: I) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU), II) PENANGGULANGAN JUDI DAN PENYELUNDUPAN, DAN III) PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL MELALUI: I) PENGUATAN TATA KELOLA DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN DIGITAL, II) PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN BUDAYA DIGITAL ASN, III) DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK PRIORITAS; DAN IV) PENGEMBANGAN EKOSISTEM LAYANAN PUBLIK DIGITAL
	INVESTASI, KEMUDAHAN INDUSTRI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	DUKUNGAN KEMUDAHAN IZIN USAHA DALAM MENDORONG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DENGAN PADAT KARYA, AKSES DUKUNGAN PERMODALAN BAGI TUNA KARYA SERTA PENGUTAMAAN TENAGA KERJA LOKAL
		DUKUNGAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS PADAT KARYA BERPRINSIP ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN, MENCAKUP TRANSPORTASI HIJAU, ENERGI TERBARUKAN, PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH, SERTA ADOPSI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DAN EKONOMI SIRKULAR
		DUKUNGAN HILIRISASI LANJUTAN SAWIT (BIOPLASTIK, BIOAVTUR, GRAPHENE, SURFAKTAN), KELAPA, PERIKANAN TANGKAP DAN PRODUK UNGGULAN SESUAI KARAKTERISTIK WILAYAH LAINNYA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL/INDUSTRI HIJAU/INDUSTRI BIRU KHUSUSNYA PADA INDUSTRI UNGGULAN, POTENSIAL, DAN BERORIENTASI EKSPOR SESUAI POTENSI DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH RTRW DAERAH

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU WILMAR (KELAPA SAWIT), KAWASAN INDUSTRI BOJONEGARA, KAWASAN EKOSISTEM INDUSTRI HALAL, DAN KAWASAN INDUSTRI MODERN YANG DISERTAI PEMBANGUNAN PELABUHAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KORIDOR INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG (SEKTOR INDUSTRI PRIORITAS: INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, INDUSTRI LOGAM, BESI, DAN BAJA)
	ZONA EKONOMI BARU, PENGUATAN UMKM, DAN PEMERATAAN EKONOMI	DUKUNGAN PENGEMBANGAN UMKM TERHADAP AKSES PASAR, PERBANKAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS PRODUK USAHA SESUAI UNGGULAN WILAYAH, PENDAMPINGAN TERHADAP INOVASI PRODUK DAN LAYANAN, MENCIPTAKAN REGULASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN WIRAUSAHA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SEBAGAI RANTAI PASOK INDUSTRI SEDANG/BESAR YANG ADA DI KAWASAN INDUSTRI (KI)/KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PRIORITAS
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KOPERASI MERAH PUTIH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH BERBASISKAN POTENSI INDUSTRI KORIDOR SERANG
	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DUKUNGAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BANTEN, MELALUI I) DESA BUDAYA, II) PELINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN REVITALISASI WARISAN BUDAYA, III) PEMANFAATAN KHAZANAH BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN (CAGAR BUDAYA, PERMUSEUMAN, DAN PUSAT KEBUDAYAAN LAINNYA), DAN IV) JAMINAN HAK KEBUDAYAAN, EKSPRESI BUDAYA, SERTIFIKASI KOMPETENSI PELAKU BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI, BERKUALITAS, BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DAN BERKELANJUTAN
		PENGEMBANGAN PARIWISATA BERUPA *EVENT TOURISM INTERNASIONAL*, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH/BUDAYA, WISATA RELIGI, WISATA BUATAN DAN *EVENT* LAINNYA YANG AKAN DIINTERVENSI LINTAS SEKTORAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU, EKONOMI HIJAU, MAUPUN EKOSISTEM EKONOMI LAINNYA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI WISATA MEMANFAATKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI: I) PERLUASAN INFRASTRUKTUR DIGITAL, II) PENINGKATAN KAPASITAS SDM DIGITAL DAN LITERASI DIGITAL, DAN III) PEMBANGUNAN JARINGAN BROADBAND HINGGA KE PELOSOK
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA DAN PENINGKATAN DA KTW BANTEN LAMA SEBAGAI KAWASAN WISATA RELIGI DANAU TASIKARDI

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PEMBANGUNAN DAN OPTIMALISASI FUNGSI KAWASAN *SPORT CENTER*
	SEKOLAH GRATIS UNTUK SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI BANTEN	DUKUNGAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN 12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH) MELALUI: I) PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD); II) REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH YANG BERKUALITAS; III) PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN YANG TEPAT SASARAN; IV) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH; V) REVITALISASI PENDIDIKAN NONFORMAL; VI) PERCEPATAN PEMERATAAN DAN AKSELERASI PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS; VII) MODERNISASI DAN AKSELERASI STEM (*SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS*)
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN DAYAH/PESANTREN, SERTA PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI: I) PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS; II) PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT; III) PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT; IV) PERLUASAN LAYANAN PENDANAAN DIGITAL; DAN V) LAYANAN DIGITAL TERPADU, TERPERSONALISASI DAN BERFOKUS PADA *USER CENTRIC*
		DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN VOKASI, PENYELIAAN, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MAUPUN LAYANAN PENDIDIKAN/PELATIHAN TENAGA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN, MELALUI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BALAI LATIHAN KERJA SESUAI KEBUTUHAN WILAYAH
		PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DITUNJANG DENGAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN SESUAI KEAHLIAN
		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS (UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI WILAYAH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) SESUAI KEUNGGULAN DAN KEBUTUHAN WILAYAH
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SDM PERDESAAN KABUPATEN SERANG
	AKSES KESEHATAN BAGI WARGA DAN PELAYANAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI	DUKUNGAN OPTIMALISASI FASILITAS KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI) DAN PROGRAM KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENANGANI KASUS GIGI DAN MULUT/KASUS KESEHATAN MENTAL/KASUS MULTI-PENYAKIT PADA LANJUT USIA/KASUS KETERGANTUNGAN OBAT SERTA PEMBUDAYAAN HIDUP SEHAT
		DUKUNGAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT, MELALUI: I) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, REHABILITATIF, DAN KURATIF; II)

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PENYEDIAAN SARANA-PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN; III) PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENUNTASAN ELIMINASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR, DAN TROPIS TERABAIKAN; IV) PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK; V) PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DAN PENUNTASAN TBC; VI) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI BAGI USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF, DAN LANSIA SERTA KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI; DAN VII) PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
		DUKUNGAN PENGUATAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, MELALUI I) PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN; DAN II) PENGUATAN TATA KELOLA DAN PELEMBAGAAN PUG (PENGARUSUTAMAAN GENDER) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SECARA INKLUSIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL ADAPTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MENGUPAYAKAN PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN SATU SISTEM REGSOSEK MAUPUN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN KESEHATAN (KIA-ANAK, KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI DI RSUD PROVINSI DAN KAB/KOTA
		DUKUNGAN PENCAPAIAN UHC
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN SEKOLAH RAKYAT
	KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	DUKUNGAN INTERVENSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, BANTUAN PANGAN, DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN ([illegible])
		DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN AIR, ENERGI, DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN (SEPERTI PANGAN AKUATIK/BLUE FOOD FISH)
		PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES PASAR DAN PEMBIAYAAN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES ASURANSI PERTANIAN DAN PERIKANAN, SERTA PENGENDALIAN KEPASTIAN PASAR, MELALUI I) PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN PETANI DAN PENGUATAN MANAJEMEN POKTAN/GAPOKTAN; II) PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN KORPORASI PETANI; III) PEMBIAYAAN DANA BERGULIR DAN KREDIT LUNAK PETANI; IV) PERLUASAN AKSES ASURANSI

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN SERANG	**ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN**	**HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI**
		USAHA TANI; V) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK DAN PERLUASAN AKSES LAYANAN SISTEM RESI GUDANG; VI) PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PENYERAPAN HASIL PANEN KOMODITAS PANGAN UTAMA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN/PANGAN HEWANI (TERMASUK PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN, PENGEMBANGAN SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
		DUKUNGAN PENINGKATAN DAYA GUNA LAHAN PERTANIAN DAN PRODUKTIVITAS MELALUI INTENSIFIKASI DAN PENINGKATAN PRASARANA PRODUKSI, MELALUI: I) PENYEDIAAN DAN PERLUASAN AKSES ALSINTAN MODERN/BENIH DAN BIBIT BERKUALITAS/PUPUK DAN PESTISIDA BERKUALITAS; II) MITIGASI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) DAN KESEHATAN HEWAN; III) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DAN DIGITAL BAGI PETANI; DAN IV) PENINGKATAN KUALITAS PASCAPANEN MELALUI PENINGKATAN PRASARANA PASCAPANEN
		DUKUNGAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN, MELALUI: I) KEBIJAKAN TATA RUANG UNTUK PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN; II) REFORMA AGRARIA, REDISTRIBUSI, DAN KONSOLIDASI LAHAN PERTANIAN; III) OPTIMALISASI DAN REVITALISASI LAHAN PERTANIAN; DAN IV) PENINGKATAN PENGGUNAAN PUPUK/PESTISIDA/PAKAN ORGANIK
		PENGUATAN KAWASAN AGRIKULTUR PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN TERPADU FEW NEXUS *(FOOD, ENERGY, WATER)*
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PUSAT/LABORATORIUM RISET PERTANIAN SKALA LOKAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN VARIETAS UNGGUL DAN BUDIDAYA LOKAL, PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI, SERTA PENGUATAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PERTANIAN
		DUKUNGAN PEMBERDAYAAN AKTIVITAS EKONOMI *HIGH VALUE* UNGGULAN PERIKANAN, PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DAN PERTANIAN HORTIKULTURA
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KAWASAN AGRIKULTUR KABUPATEN SERANG
		PEMBANGUNAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI DAN EKSPOR-IMPOR PRODUK UNGGULAN
		PEMBANGUNAN PELABUHAN PENDARATAN IKAN PULOCIAU
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, TRANSPORTASI, SUMBER DAYA AIR DAN HUNIAN LAYAK	DUKUNGAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN DAN RENCANA TATA RUANG YANG MENGINTEGRASIKAN POTENSI DAN MASALAH SECARA TERPADU
		PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS KAWASAN PRODUKTIF EKONOMI (INFRASTRUKTUR DAN SISTEM LOGISTIK)
		PEMBANGUNAN PJU, SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN SERTA TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN EFISIEN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIDANAU, PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KARIAN BARAT DAN PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL SINDANGHEULA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN IPLT/IPAL DAN SPAL REGIONAL
		PEMBANGUNAN [illegible]
		PEMBANGUNAN PSU PERMUKIMAN, PUS LAYANAN DESA SEJAHTERA, DAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU KEWENANGAN PROVINSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH/HUNIAN MURAH BERSANITASI BAIK BAGI PEKERJA, MBR, GEN Z, DAN MILENIAL DI KAWASAN PERKOTAAN CILEGON-SERANG (PITC)
		DUKUNGAN PENYELESAIAN MASALAH PERSAMPAHAN TERINTEGRASI HULU-HILIR
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS KABUPATEN SERANG
		DUKUNGAN ELEKTRIFIKASI JALUR KERETA API RANGKASBITUNG-SERANG-MERAK
		DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR (AIR BAKU, AIR MINUM, PENANGANAN LIMBAH/SANITASI, INFRASTRUKTUR JARINGAN TRANSMISI, INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI DAN LISTRIK PERDESAAN, RUMAH/HUNIAN LAYAK HUNI DAN RUANG TERBUKA HIJAU)
		DUKUNGAN REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR YANG BERKELANJUTAN, MELALUI I) PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN, II) PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH SERTA PEMROSESAN DI TPA/LUR, DAN III) ADOPSI TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH
		DUKUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR MELALUI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA *CATCHMENT AREA*, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI, DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIKALUMPUH-CIPUNTENAGEUNG-CIBAMA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMANTAUAN KUALITAS AIR DI SUNGAI DAN DANAU, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI, DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIKALUMPUH-CIPUNTENAGEUNG-CIBAMA
		DUKUNGAN PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PEMBANGUNAN INTERKONEKSI SUMATERA-JAWA (SEPERTI JEMBATAN SELAT SUNDA)
		DUKUNGAN PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PEMBANGUNAN JALAN TOL/JALAN ALTERNATIF PENOPANG OPTIMALISASI/EKSPANSI KAWASAN INDUSTRI CILEGON-SERANG
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KEBERMANFAATAN JALAN TOL SERANG-

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PANIMBANG; HUBUNGNYA EXIT TOL CIKEUSAL, PETIR DAN TUNJUNG TEJA)
		DUKUNGAN PELEBARAN JALAN RUAS PALIMA-BAROS
		DUKUNGAN OPTIMALISASI FUNGSI DAN KONSERVASI WILAYAH SUNGAI CIDANAU, CIUJUNG, CIDURIAN
		DUKUNGAN OPTIMALISASI FUNGSI KONSERVASI, EKOLOGI, EDUKASI, DAN WISATA CAGAR ALAM RAWADANU
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIDANAU
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PLTP RAWADANU
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN TERPADU PESISIR UTARA JAWA
		DUKUNGAN RINTISAN KERETA API TANGERANG-SERANG
		PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUAS JALAN KEWENANGAN PROVINSI (ANYER-PASAR TENENG) DAN PELEBARAN RUAS PALIMA-CINTIRTA
	LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA RESILIENSI TERHADAP BENCANA	DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU MELALUI PENGURANGAN BEBAN PENCEMAR DARI SUMBER DOMESTIK, INDUSTRI, PETERNAKAN, PERTANIAN DAN HAL LAINNYA SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN MUTU AIR
		RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAERAH MELALUI PROSES PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI
		DUKUNGAN *NATURE-BASED SOLUTION* DAN *GRAY INFRASTRUCTURE* UNTUK MITIGASI ANCAMAN TSUNAMI
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSISI ENERGI MENUJU EMISI KARBON YANG LEBIH RENDAH, MELALUI: I) PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN, II) PENERAPAN JARINGAN CERDAS (*SMART GRID*) UNTUK MEMAKSIMALKAN EFISIENSI DAN PEMANTAUAN KONSUMSI ENERGI, III) ADOPSI TEKNOLOGI PENYIMPANAN ENERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS PASOKAN LISTRIK, IV) PENERAPAN *INTERNET OF THINGS* (IOT) DI SEKTOR ENERGI GUNA MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN DAN ANALITIK DATA SECARA *REAL-TIME*, DAN V) PERLUASAN PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN, PEMULIHAN, PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN AREA BERNILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI
		PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DAN JASA EKOSISTEM BERKELANJUTAN MENDUKUNG BIOEKONOMI
		DUKUNGAN PENINGKATAN BIOPROSPEKSI, BIOTEKNOLOGI, KEAMANAN HAYATI, SERTA AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SUMBER DAYA GENETIK
		DUKUNGAN PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENINGKATAN FUNGSI SOSIAL KAWASAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PRODUK BIOEKONOMI HUTAN MELALUI AGROFORESTRI

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

3.2.3.4 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN TANGERANG

Untuk mendukung pencapaian nasional sebagaimana yang diturunkan kepada Provinsi Banten, maka untuk itu sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana berikut ini.

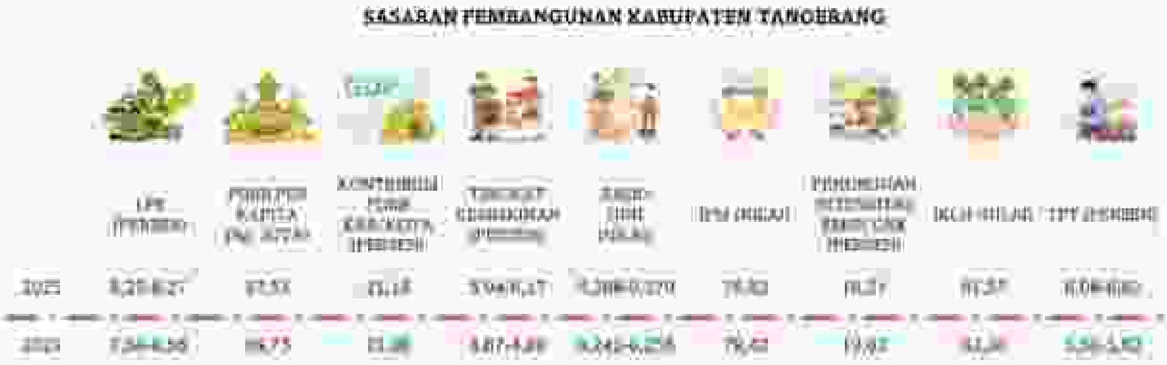

GAMBAR III.12
SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGERANG
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

TABEL III.9
ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KABUPATEN TANGERANG

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
• KAWASAN PERTUMBUHAN PERDESAAN MANDIRI DAN BAGIAN PERTUMBUHAN KAWASAN AGLOMERASI WILAYAH METROPOLITAN JAKARTA • KAWASAN PERTUMBUHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG • JAKARTA TANGERANG *INTERNATIONAL BUSSINESS CORRIDOR* • KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR, DAN ENERGI BANTEN	TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIDAK KORUPSI DAN SISTEM MERIT DALAM BIROKRASI	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
		SINERGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
		DUKUNGAN TRANSFORMASI, EFISIENSI REFORMASI BIROKRASI DAN PENGUATAN REFORMASI HUKUM, MELALUI I) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU), II) PENANGGULANGAN JUDI DAN PENYELUNDUPAN, DAN III) PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL MELALUI I) PENGUATAN TATA KELOLA DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN DIGITAL, II) PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN BUDAYA DIGITAL ASN III) DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK PRIORITAS, DAN IV) PENGEMBANGAN EKOSISTEM LAYANAN PUBLIK DIGITAL
		PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT AKSES LAYANAN PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		WILAYAH SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU
	INVESTASI, KEMUDAHAN INDUSTRI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	DUKUNGAN KEMUDAHAN IZIN USAHA DALAM MENDORONG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DENGAN PADAT KARYA, AKSES DUKUNGAN PERMODALAN BAGI TUNA KARYA SERTA PENGUTAMAAN TENAGA KERJA LOKAL
		DUKUNGAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS PADAT KARYA BERPRINSIP ESG (*ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE*) DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN, MENCAKUP TRANSPORTASI HIJAU, ENERGI TERBARUKAN, PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH, SERTA ADOPSI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DAN EKONOMI SIRKULAR
		DUKUNGAN HILIRISASI LANJUTAN SAWIT (BIOPLASTIK, BIOAVTUR, GRAPHENE, SURFAKTAN), KELAPA, PERIKANAN TANGKAP DAN PRODUK UNGGULAN SESUAI KARAKTERISTIK WILAYAH LAINNYA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL/INDUSTRI HIJAU/INDUSTRI BIRU KHUSUSNYA PADA INDUSTRI UNGGULAN, POTENSIAL, DAN MENYESUAIKAN SPESIFIK SESUAI POTENSI DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH RTRW DAERAH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KORIDOR INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG (SEKTOR INDUSTRI PRIORITAS: INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, INDUSTRI LOGAM, BESI, DAN BAJA)
	ZONA EKONOMI BARU, PENGUATAN UMKM, DAN PEMERATAAN EKONOMI	DUKUNGAN PENGEMBANGAN UMKM TERHADAP AKSES PASAR, PERBANKAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS PRODUK USAHA SESUAI UNGGULAN WILAYAH, PENDAMPINGAN TERHADAP INOVASI PRODUK DAN LAYANAN, MENCIPTAKAN REGULASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN WIRAUSAHA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SEBAGAI RANTAI PASOK INDUSTRI SEDANG-BESAR YANG ADA DI KAWASAN INDUSTRI (KI)/KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PRIORITAS
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KOPERASI MERAH PUTIH
	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DUKUNGAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BANTEN, MELALUI I) DESA BUDAYA, II) PELINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN REVITALISASI WARISAN BUDAYA, III) PEMANFAATAN KHAZANAH BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN (CAGAR BUDAYA, PERMUSEUMAN, DAN PUSAT KEBUDAYAAN LAINNYA), DAN IV) JAMINAN HAK KEBUDAYAAN, EKSPRESI BUDAYA, SERTIFIKASI KOMPETENSI PELAKU BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI, BERKUALITAS, BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DAN BERKELANJUTAN
		PENGEMBANGAN PARIWISATA BERUPA *EVENT TOURISM INTERNASIONAL*, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH/BUDAYA, WISATA RELIGI, WISATA BUATAN DAN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		EVENT LAINNYA YANG AKAN DIINTERVENSI LINTAS SEKTORAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU, EKONOMI HIJAU, MAUPUN EKOSISTEM EKONOMI LAINNYA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI WISATA MEMANFAATKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL, MELALUI: I) PERLUASAN INFRASTRUKTUR DIGITAL DAN II) PENINGKATAN KAPASITAS SDM DIGITAL DAN LITERASI DIGITAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN *EVENT*, INFRASTRUKTUR, DAN SISTEM INFORMASI DESTINASI WISATA BERBASIS MICE (*MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS, AND EXHIBITIONS*)
	SEKOLAH GRATIS UNTUK SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI BANTEN	DUKUNGAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN 12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH) MELALUI: I) PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), II) REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH YANG BERKUALITAS, III) PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN YANG TEPAT SASARAN, IV) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH, V) REVITALISASI PENDIDIKAN NONFORMAL, VI) PENGUATAN PEMBELAJARAN DAN AKSELERASI PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS, VII) MODERNISASI DAN AKSELERASI STEM (*SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS*)
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN DAYAH/PESANTREN, SERTA PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL, MELALUI: I) PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS, II) PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT, III) PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT, IV) PERLUASAN LAYANAN PENYIARAN DIGITAL, DAN V) LAYANAN DIGITAL TERPADU, TERPERSONALISASI DAN BERFOKUS PADA USER CENTRIC
		DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN VOKASI, PENYEDIAAN, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MAUPUN LAYANAN PENDIDIKAN/PELATIHAN TENAGA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN, MELALUI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BALAI LATIHAN KERJA SESUAI KEBUTUHAN WILAYAH
		PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DITUNJANG DENGAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN SESUAI KEAHLIAN
		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS (UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI WILAYAH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KEK EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN (KEK ETKI)

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN [illegible] PERDESAAN KABUPATEN TANGERANG)
	AKSES KESEHATAN BAGI WARGA DAN PELAYANAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI	DUKUNGAN OPTIMALISASI FASILITAS KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI) DAN PROGRAM KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENANGANI KASUS GIGI DAN MULUT/KASUS KESEHATAN MENTAL/KASUS MULTI-PENYAKIT PADA LANJUT USIA/KASUS KETERGANTUNGAN OBAT SERTA PEMBUDAYAAN HIDUP SEHAT
		DUKUNGAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT, MELALUI: I) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, REHABILITATIF, DAN KURATIF; II) PENYEDIAAN SARANA-PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN; III) PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENUNTASAN ELIMINASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR, DAN TROPIS TERABAIKAN; IV) PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK; V) PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DAN PENUNTASAN TBC; VI) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI BAGI USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF, DAN LANSIA SERTA KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI; DAN VII) PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
		DUKUNGAN PENGUATAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, MELALUI: I) PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN; DAN II) PENGUATAN TATA KELOLA DAN PELEMBAGAAN PUG (PENGARUSUTAMAAN *GENDER*) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SECARA INKLUSIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL ADAPTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MENGUPAYAKAN PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN SATU SISTEM REGSOSEK MAUPUN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN KESEHATAN IBU-ANAK, KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI DI RSUD PROVINSI DAN KAB/KOTA
		DUKUNGAN PENCAPAIAN UHC
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KEK EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN (KEK [illegible])
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN SEKOLAH RAKYAT
	KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	DUKUNGAN INTERVENSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, BANTUAN PANGAN, DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN ([illegible])
		DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN AIR, ENERGI, DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG, DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN (SEPERTI PANGAN AKUATIK/*BLUE FOOD*, DSB)
		PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES PASAR DAN PEMBIAYAAN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES ASURANSI PERTANIAN DAN PERIKANAN, SERTA PENGENDALIAN KEPASTIAN PASAR, MELALUI: I) PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN PETANI DAN PENGUATAN MANAJEMEN POKTAN/GAPOKTAN, II) PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN KORPORASI PETANI, III) PEMBIAYAAN DANA BERGULIR DAN KREDIT LUNAK PETANI, IV) PERLUASAN AKSES ASURANSI USAHA TANI, V) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK DAN PERLUASAN AKSES LAYANAN SISTEM RESI GUDANG, VI) PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PENYIMPANAN HASIL PANEN KOMODITAS PANGAN UTAMA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN/PANGAN HEWANI (TERMASUK PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN), PENGEMBANGAN SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
		DUKUNGAN PENINGKATAN DAYA GUNA LAHAN PERTANIAN DAN PRODUKTIVITAS MELALUI INTENSIFIKASI DAN PENINGKATAN PRASARANA IRIGASI, MELALUI: I) PENYEDIAAN DAN PERLUASAN AKSES ALSINTAN MODERN/BENIH DAN BIBIT BERKUALITAS/PUPUK DAN PESTISIDA BERKUALITAS, II) MITIGASI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) DAN KESEHATAN HEWAN, III) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DAN DIGITAL BAGI PETANI, DAN IV) PENINGKATAN KUALITAS PASCAPANEN MELALUI PENINGKATAN PRASARANA PASCAPANEN
		DUKUNGAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN, MELALUI: I) KEBIJAKAN TATA RUANG UNTUK PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN, II) REFORMA AGRARIA, REDISTRIBUSI, DAN KONSOLIDASI LAHAN PERTANIAN, III) OPTIMALISASI DAN REVITALISASI LAHAN PERTANIAN, DAN IV) PENINGKATAN PENGGUNAAN PUPUK/PESTISIDA/PAKAN ORGANIK
		PENGUATAN KAWASAN AGRIKULTUR PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN TERPADU FEW NEXUS (*FOOD, ENERGY, WATER*)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PUSAT/LABORATORIUM RISET PERTANIAN SKALA LOKAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN VARIETAS UNGGUL DAN BUDIDAYA LOKAL, PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI, SERTA PENGUATAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PERTANIAN
		DUKUNGAN PEMBERDAYAAN AKTIVITAS EKONOMI *HIGH VALUE* UNGGULAN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PERIKANAN, PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DAN PERTANIAN HORTIKULTURA
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KAWASAN AGRIKULTUR KABUPATEN TANGERANG
		PENINGKATAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN CITUIS MENJADI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, TRANSPORTASI, SUMBER DAYA AIR DAN HUNIAN LAYAK	DUKUNGAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN DAN RENCANA TATA RUANG YANG MENGINTEGRASIKAN POTENSI DAN MASALAH SECARA TERPADU
		PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS KAWASAN PRODUKTIF EKONOMI (INFRASTRUKTUR DAN SISTEM LOGISTIK)
		PEMBANGUNAN PJU, SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN SERTA TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN EFISIEN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KARIAN TIMUR
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN IPLT/IPAL DAN SPAL
		PEMBANGUNAN KEBINAMARGAAN
		PEMBANGUNAN PSU PERMUKIMAN, POS LAYANAN DESA SEJAHTERA, DAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU KEWENANGAN PROVINSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH/HUNIAN MURAH BERBANTUASI BAGI BAGI PEKERJA, MBR, GEN Z, DAN MILENIAL
		DUKUNGAN PENYELESAIAN MASALAH PERSAMPAHAN TERINTEGRASI HULU-HILIR
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN TANGERANG RAYA (BAGIAN DARI KAWASAN AGLOMERASI JAKARTA)
		DUKUNGAN RINTISAN KERETA API TANGERANG RAYA-SERANG
		DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR (AIR BAKU, AIR MINUM, PENANGANAN LIMBAH/SANITASI, INFRASTRUKTUR JARINGAN TRANSMISI, INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI DAN LISTRIK PERDESAAN, RUMAH/HUNIAN LAYAK HUNI DAN RUANG TERBUKA HIJAU)
		DUKUNGAN REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR YANG BERKELANJUTAN, MELALUI: I) PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN, II) PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH SERTA PEMROSESAN DI TPA/TPST, DAN III) ADOPSI TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH
		DUKUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR MELALUI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA *CATCHMENT AREA*, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI, DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIKAPUDEUH-CIPUNTENAGEUNG-CIBAMA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMANTAUAN KUALITAS AIR DI SUNGAI DAN DANAU, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI,

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIHADUHULUH-CIPUNTEN AGUNG-CIBAMA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI MASSAL AGLOMERASI DKJ (MRT EAST-WEST DAN TRANSJAKARTA), TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN, DAN TOD (*TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*)
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SERPONG-BALARAJA DAN TOL KAMAL-TELUK NAGA-RAJEG-BALARAJA
		DUKUNGAN OPTIMALISASI WILAYAH SUNGAI CISADANE DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSERVASI, AIR MINUM DAN AIR PERTANIAN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN PERLINDUNGAN ABRASI PANTURA TANGERANG
		PEMBANGUNAN DERMAGA PENYEBERANGAN PELABUHAN CITUIS
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN WADUK LEPAS PANTAI MUARA CISADANE, TANGGUL PANTAI DAN TANGGUL LAUT PESISIR UTARA JAKARTA/GIANT SEA WALL PANTAI UTARA JAWA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN TERPADU PESISIR UTARA JAWA
	LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA RESILIENSI TERHADAP BENCANA	DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KHUSUSNYA KETANGGUHAN TERHADAP BANJIR PERIODE KALA-ULANG 25-50 TAHUNAN DI KAWASAN AGLOMERASI JAKARTA (TANGERANG RAYA) TERMASUK PENERAPAN NBS DAN EWS)
		DUKUNGAN PENINGKATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU MELALUI PENGURANGAN BEBAN PENCEMAR DARI SUMBER DOMESTIK, INDUSTRI, PETERNAKAN, PERTANIAN DAN HAL LAINNYA SEBAGAI UPAYA MENGENDALIKAN MUTU AIR
		RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAERAH MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI
		DUKUNGAN *NATURE-BASED SOLUTION* DAN *GRAY INFRASTRUCTURE* UNTUK MITIGASI ANCAMAN TSUNAMI
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSISI ENERGI MENUJU EMISI KARBON YANG LEBIH RENDAH, MELALUI: I) PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN, II) PENERAPAN JARINGAN CERDAS (*SMART GRID*) UNTUK MEMAKSIMALKAN EFISIENSI DAN PEMANTAUAN KONSUMSI ENERGI, III) ADOPSI TEKNOLOGI PENYIMPANAN ENERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS PASOKAN LISTRIK, IV) PENERAPAN *INTERNET OF THINGS* (IOT) DI SEKTOR ENERGI GUNA MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN DAN ANALITIK DATA SECARA *REAL-TIME*, DAN V) PERLUASAN PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN, PEMULIHAN, PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN AREA BERNILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI
		PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DAN JASA EKOSISTEM BERKELANJUTAN MENDUKUNG BIOEKONOMI
		DUKUNGAN PENINGKATAN BIOPROSPEKSI, BIOTEKNOLOGI, KEAMANAN HAYATI, SERTA AKSES DAN

LOKASI PRIORITAS KABUPATEN TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SUMBER DAYA GENETIK
		DUKUNGAN PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENINGKATAN FUNGSI SOSIAL KAWASAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PRODUK BIOEKONOMI HUTAN MELALUI AGROFORESTRI

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

3.2.3.5 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KOTA SERANG

Untuk mendukung pencapaian nasional sebagaimana yang diturunkan kepada Provinsi Banten, maka untuk itu sasaran pembangunan Kota Serang dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana berikut ini:

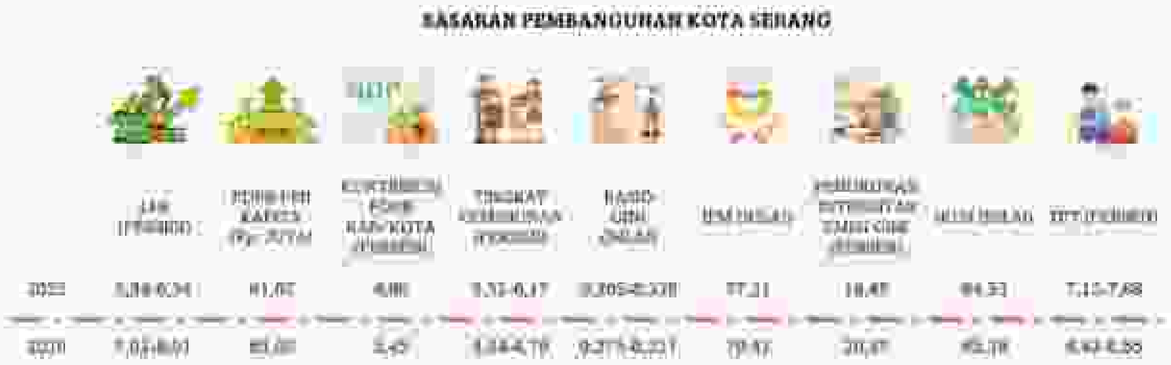

GAMBAR III.13
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SERANG
(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

TABEL III.10
ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KOTA SERANG

LOKASI PRIORITAS KOTA SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
• KAWASAN PERTUMBUHAN PERKOTAAN CILEGON-SERANG • KAWASAN PERTUMBUHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG	TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIDAK KORUPSI DAN SISTEM MERIT DALAM BIROKRASI	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
		SINERGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
		DUKUNGAN TRANSFORMASI, EFISIENSI REFORMASI BIROKRASI DAN PENGUATAN REFORMASI HUKUM, MELALUI: I) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU), II) PENANGGULANGAN JUDI DAN PENYELUNDUPAN, DAN III) PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL MELALUI: I) PENGUATAN TATA KELOLA DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN DIGITAL, II) PENGEMBANGAN

LOKASI PRIORITAS KOTA SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		KOMPETENSI DAN BUDAYA DIGITAL ASN, III) DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK PRIORITAS; DAN IV) PENGEMBANGAN EKOSISTEM LAYANAN PUBLIK DIGITAL
		OPTIMALISASI FUNGSI PEMERINTAHAN, EKONOMI, EDUKASI, DAN EKOLOGI KP3B
	INVESTASI, KEMUDAHAN INDUSTRI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	DUKUNGAN KEMUDAHAN IZIN USAHA DALAM MENDORONG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DENGAN PADAT KARYA, AKSES DUKUNGAN PERMODALAN BAGI TUNA KARYA SERTA PENGUTAMAAN TENAGA KERJA LOKAL
		DUKUNGAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS PADAT KARYA BERPRINSIP ESG (ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE) DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN, MENCAKUP TRANSPORTASI HIJAU, ENERGI TERBARUKAN, PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH, SERTA ADOPSI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DAN EKONOMI SIRKULAR
		DUKUNGAN HILIRISASI LANJUTAN SAWIT BIOPLASTIK, BIOAVTUR, GRAPHENE, SURFAKTAN, KELAPA, PERIKANAN TANGKAP DAN PRODUK UNGGULAN SESUAI KARAKTERISTIK WILAYAH LAINNYA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL/INDUSTRI HIJAU/INDUSTRI HULU KHUSUSNYA PADA INDUSTRI UNGGULAN, POTENSIAL, DAN BERORIENTASI EKSPOR SESUAI POTENSI DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH RTRW DAERAH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KORIDOR INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG DENGAN INDUSTRI PRIORITAS: INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, INDUSTRI LOGAM, BESI, DAN BAJA
		OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARISASI INDUSTRI, DAN BADAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BAHAN
	ZONA EKONOMI BARU, PENGUATAN UMKM, DAN PEMERATAAN EKONOMI	DUKUNGAN PENGEMBANGAN UMKM TERHADAP AKSES PASAR, PERBANKAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS PRODUK USAHA SESUAI UNGGULAN WILAYAH, PENDAMPINGAN TERHADAP INOVASI PRODUK DAN LAYANAN, MENCIPTAKAN REGULASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN WIRAUSAHA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SEBAGAI RANTAI PASOK INDUSTRI SEDANG-BESAR YANG ADA DI KAWASAN INDUSTRI (KI)/KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PRIORITAS
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KOPERASI MERAH PUTIH
		PENGEMBANGAN EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN, EKONOMI KREATIF, DAN UKM DENGAN OPTIMALISASI FUNGSI PRASARANA DAN SARANA PLUT
	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DUKUNGAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BANTEN, MELALUI: I) DESA BUDAYA, II) PELINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN REVITALISASI WARISAN BUDAYA; III) PEMANFAATAN KHAZANAH BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN (CAGAR BUDAYA, PERMUSEUMAN, DAN PUSAT KEBUDAYAAN LAINNYA); DAN IV)

LOKASI PRIORITAS KOTA SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		JAMINAN HAK KEBUDAYAAN, EKSPRESI BUDAYA, SERTIFIKASI KOMPETENSI PELAKU BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI, BERKUALITAS, BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DAN BERKELANJUTAN
		PENGEMBANGAN PARIWISATA BERUPA *EVENT TOURISM INTERNASIONAL*, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH/BUDAYA, WISATA RELIGI, WISATA BUATAN DAN *EVENT* LAINNYA YANG AKAN DIINTERVENSI LINTAS SEKTORAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU, EKONOMI HIJAU, MAUPUN EKOSISTEM EKONOMI LAINNYA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI WISATA MEMANFAATKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI: I) PERLUASAN INFRASTRUKTUR DIGITAL, DAN II) PENINGKATAN KAPASITAS SDM DIGITAL DAN LITERASI DIGITAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN *EVENT*, INFRASTRUKTUR, DAN SISTEM INFORMASI DESTINASI WISATA BERBASIS MICE (*MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS, AND EXHIBITIONS*)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA DAN PENINGKATAN KA KSN BANTEN LAMA SEBAGAI KAWASAN WISATA RELIGI, OPTIMALISASI BAITUL QURAN, DAN MUSEUM BANTEN
	SEKOLAH GRATIS UNTUK SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI BANTEN	DUKUNGAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN 12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH) MELALUI: I) PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), II) REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH YANG BERKUALITAS, III) PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN YANG TEPAT SASARAN, IV) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH, V) REVITALISASI PENDIDIKAN NONFORMAL, VI) PERCEPATAN PEMENUHAN DAN AKSELERASI PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS, VII) MODERNISASI DAN AKSELERASI STEM (*SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS*)
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN DAYAH/PESANTREN, SERTA PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI: I) PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS, II) PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT, III) PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT, IV) PERLUASAN LAYANAN PENYIARAN DIGITAL, DAN V) LAYANAN DIGITAL TERPADU, TERPERSONALISASI DAN BERFOKUS PADA *USER CENTRIC*
		DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN VOKASI, PENYEDIAAN, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MAUPUN LAYANAN PENDIDIKAN/PELATIHAN TENAGA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN SEKTOR

LOKASI PRIORITAS KOTA SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		KETENAGAKERJAAN, MELALUI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BALAI LATIHAN KERJA SESUAI KEBUTUHAN WILAYAH
		PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DITUNJANG DENGAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN SESUAI KEAHLIAN
		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI WILAYAH
	AKSES KESEHATAN BAGI WARGA DAN PELAYANAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI	DUKUNGAN OPTIMALISASI FASILITAS KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI) DAN PROGRAM KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENANGANI KASUS GIZI DAN MIGRAN/KASUS KESEHATAN MENTAL/KASUS MULTI-PENYAKIT PADA LANJUT USIA/KASUS KETERGANTUNGAN OBAT SERTA PEMBUDAYAAN HIDUP SEHAT
		DUKUNGAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT, MELALUI: I) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, REHABILITATIF, DAN KURATIF; II) PENYEDIAAN SARANA-PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN; III) PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENUNTASAN ELIMINASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR, DAN TROPIS TERABAIKAN; IV) PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK; V) PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DAN PENUNTASAN TBC; VI) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI BAGI USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF, DAN LANSIA SERTA KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI; DAN VII) PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
		DUKUNGAN PENGUATAN KESETARAAN *GENDER*, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PELINDUNGAN DARI KEKERASAN, MELALUI: I) PEMENUHAN DAN PELINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN; DAN II) PENGUATAN TATA KELOLA DAN PELEMBAGAAN PUG (PENGARUSUTAMAAN *GENDER*) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SECARA INKLUSIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL ADAPTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MENGUPAYAKAN PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN SATU SISTEM REGSOSEK MAUPUN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)
		PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN KESEHATAN IBU-ANAK, KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI DI RSUD BANTEN (PHTC)
		DUKUNGAN PENCAPAIAN UHC
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA

LOKASI PRIORITAS KOTA SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
		OPTIMALISASI FUNGSI BALAI PELAYANAN SOSIAL ([illegible])
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN SEKOLAH RAKYAT
	KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	DUKUNGAN INTERVENSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, BANTUAN PANGAN, DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN ([illegible])
		DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN AIR, ENERGI, DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN (SEPERTI PANGAN AKUATIK/*BLUE FOOD*, DSB)
		PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES PASAR DAN PEMBIAYAAN USAHA TANI, PERLUASAN AKSES ASURANSI PERTANIAN DAN PERIKANAN, SERTA PENGENDALIAN KEPASTIAN PASAR, MELALUI: I) PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN PETANI DAN PENGUATAN MANAJEMEN POKTAN/GAPOKTAN, II) PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN KORPORASI PETANI, III) PEMBIAYAAN DANA BERGULIR DAN KREDIT LUNAK PETANI, IV) PERLUASAN AKSES ASURANSI USAHA TANI, V) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK DAN PERLUASAN AKSES LAYANAN SISTEM RESI GUDANG, VI) PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PENYIMPANAN HASIL PANEN KOMODITAS PANGAN UTAMA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN/PANGAN HEWANI (TERMASUK PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN, PENGEMBANGAN SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
		DUKUNGAN PENINGKATAN DAYA GUNA LAHAN PERTANIAN DAN PRODUKTIVITAS MELALUI INTENSIFIKASI DAN PENINGKATAN PRASARANA PRODUKSI, MELALUI: I) PENYEDIAAN DAN PERLUASAN AKSES ALSINTAN *MODERN*/BENIH DAN BIBIT BERKUALITAS/PUPUK DAN PESTISIDA BERKUALITAS, II) MITIGASI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) DAN KESEHATAN HEWAN, III) PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DAN DIGITAL BAGI PETANI, DAN IV) PENINGKATAN KUALITAS PASCAPANEN MELALUI PENINGKATAN PRASARANA PASCAPANEN
		DUKUNGAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN, MELALUI: I) KEBIJAKAN TATA RUANG UNTUK PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN, II) REFORMA AGRARIA, REDISTRIBUSI, DAN KONSOLIDASI LAHAN PERTANIAN, III) OPTIMALISASI DAN REVITALISASI LAHAN PERTANIAN, DAN IV) PENINGKATAN PENGGUNAAN PUPUK/PESTISIDA/PAKAN ORGANIK
		PENGUATAN KAWASAN AGRIBISNIS PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

LOKASI PRIORITAS KOTA SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DAERAH DENGAN PENDEKATAN TERPADU FEW NEXUS (*FOOD, ENERGY, WATER*)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PUSAT/LABORATORIUM RISET PERTANIAN SKALA LOKAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN VARIETAS UNGGUL DAN BUDIDAYA LOKAL, PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI, SERTA PENGUATAN IMPLEMENTASI HASIL RISET PERTANIAN
		DUKUNGAN PEMBERDAYAAN AKTIVITAS EKONOMI *HIGH VALUE* UNGGULAN PERIKANAN, PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DAN PERTANIAN HORTIKULTURA
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KAWASAN AGRIKULTUR SERANG UTARA (KASEMEN-SAWAH LUHUR)
		PENINGKATAN FUNGSI KAWASAN SITANDU SEBAGAI SHOW ROOM PERCONTOHAN PENGELOLAAN PERTANIAN
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, TRANSPORTASI, SUMBER DAYA AIR DAN HUNIAN LAYAK	DUKUNGAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN DAN RENCANA TATA RUANG YANG MENGINTEGRASIKAN POTENSI DAN MASALAH SECARA TERPADU
		PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS KAWASAN PRODUKTIF EKONOMI INFRASTRUKTUR DAN SISTEM LOGISTIK
		PEMBANGUNAN PJU, SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN SERTA TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN EFISIEN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KARIAN BARAT DAN PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL SINDANGHEULA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN IPLT DAN SPAL REGIONAL
		PEMBANGUNAN KEBINAMARGAAN
		PEMBANGUNAN PSU PERMUKIMAN, POS LAYANAN DESA SEJAHTERA, DAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU KEWENANGAN PROVINSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH/HUNIAN MURAH BERSANITASI BAIK BAGI PEKERJA, MBR, GEN Z, DAN MILENIAL DI KAWASAN PERKOTAAN CILEGON-SERANG [illegible]
		DUKUNGAN OPTIMALISASI TPA CILOWONG DAN PEMBANGUNAN TPST CILOWONG – TAKTAKAN DAN PEMBANGUNAN IPLT CILOWONG – TAKTAKAN SEBAGAI POTENSI PENGEMBANGAN MENJADI TPST REGIONAL SERANG-CILEGON
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN CILEGON-SERANG
		DUKUNGAN [illegible] KERETA API TANGERANG RAYA-SERANG DAN DUKUNGAN ELEKTRIFIKASI JALUR KERETA API RANGKASBITUNG-SERANG-MERAK
		DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR (AIR BAKU, AIR MINUM, PENANGANAN LIMBAH/SANITASI, INFRASTRUKTUR JARINGAN TRANSMISI, INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI DAN LISTRIK PERKOTAAN, RUMAH/HUNIAN LAYAK HUNI DAN RUANG TERBUKA HIJAU)
		DUKUNGAN REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR YANG BERKELANJUTAN, MELALUI:

LOKASI PRIORITAS KOTA SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN, II) PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH SERTA PEMROSESAN DI TPA/TPST; DAN III) ADOPSI TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH
		DUKUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR MELALUI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA *CATCHMENT AREA*, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI, DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIKAL-[illegible]-CIPUNTENAGEUNG-CIBAMA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMANTAUAN KUALITAS AIR DI SUNGAI DAN DANAU, TERUTAMA PADA DAS CIUJUNG, DAS CIBANTEN, DAS CIDURIAN-CIMANCEURI, DAS CIBUNGUR-CILIMAN, DAS CIBALIUNG, DAS CIKAL-[illegible]-CIPUNTENAGEUNG-CIBAMA
		PENGEMBANGAN KOTA SERANG MENJADI IBU KOTA PROVINSI YANG LAYAK MENUJU SERANG METROPOLITAN AREA
		PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUAS JALAN KEWENANGAN PROVINSI (JL. SYEKH NAWAWI AL-BANTANI, SEMPU-BORUH KAWUNG, DAN CIKEUSAL-[illegible])
		DUKUNGAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN JALAN TOL SERANG-PANIMBANG KHUSUSNYA EXIT TOL [illegible]
		PEMBANGUNAN *FLY OVER* KERETA API [illegible] SYEKH NAWAWI AL-BANTANI
		PEMBANGUNAN SISTEM ANGKUTAN MASSAL SERANG METROPOLITAN AREA (BRT TRANS BANTEN CILEGON-CIKANDE, TERONDOL-KOTA SERANG, BANTEN LAMA-[illegible])
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN *FLYOVER* SUDIRMAN, KEBON JAHE, DAN PALIMA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN STASIUN [illegible] MENUJU TERMINAL INTERMODA DAN TOD (*TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*)
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN *FLY OVER* FRONTAGE [illegible] UNTIRTA DAN SUDIRMAN KOTA SERANG
		DUKUNGAN OPTIMALISASI FUNGSI DAN KONSERVASI WILAYAH SUNGAI CIDANAU, CIUJUNG, CIDURIAN
		PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KP3B DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG LAINNYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI YANG INKLUSIF MENGUSUNG KONSEP "SMART GREEN OFFICE"
	LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA RESILIENSI TERHADAP BENCANA	DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU MELALUI PENGURANGAN BEBAN PENCEMAR DARI SUMBER DOMESTIK, INDUSTRI, PETERNAKAN, PERTANIAN DAN HAL LAINNYA SEBAGAI UPAYA MENGENDALIKAN MUTU AIR
		RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAERAH MELALUI PROSES

LOKASI PRIORITAS KOTA SERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI
		DUKUNGAN *NATURE-BASED SOLUTION* DAN *GRAY INFRASTRUCTURE* UNTUK MITIGASI
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSISI ENERGI MENUJU EMISI KARBON YANG LEBIH RENDAH, MELALUI: I) PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN, II) PENERAPAN JARINGAN CERDAS (*SMART GRID*) UNTUK MEMAKSIMALKAN EFISIENSI DAN PEMANTAUAN KONSUMSI ENERGI, III) ADOPSI TEKNOLOGI PENYIMPANAN ENERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS PASOKAN LISTRIK, IV) PENERAPAN *INTERNET OF THINGS* (IOT) DI SEKTOR ENERGI GUNA MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN DAN ANALITIK DATA SECARA *REAL-TIME*, DAN V) PERLUASAN PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN, PEMULIHAN, PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN AREA BERNILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI
		PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DAN JASA EKOSISTEM BERKELANJUTAN MENDUKUNG BIOEKONOMI
		DUKUNGAN PENINGKATAN BIOPROSPEKSI, BIOTEKNOLOGI, KEAMANAN HAYATI, SERTA AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SUMBER DAYA GENETIK
		DUKUNGAN PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENINGKATAN FUNGSI SOSIAL KAWASAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

3.2.3.6 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KOTA CILEGON

Untuk mendukung pencapaian nasional sebagaimana yang diturunkan kepada Provinsi Banten, maka untuk itu sasaran pembangunan Kota Cilegon dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana berikut ini.

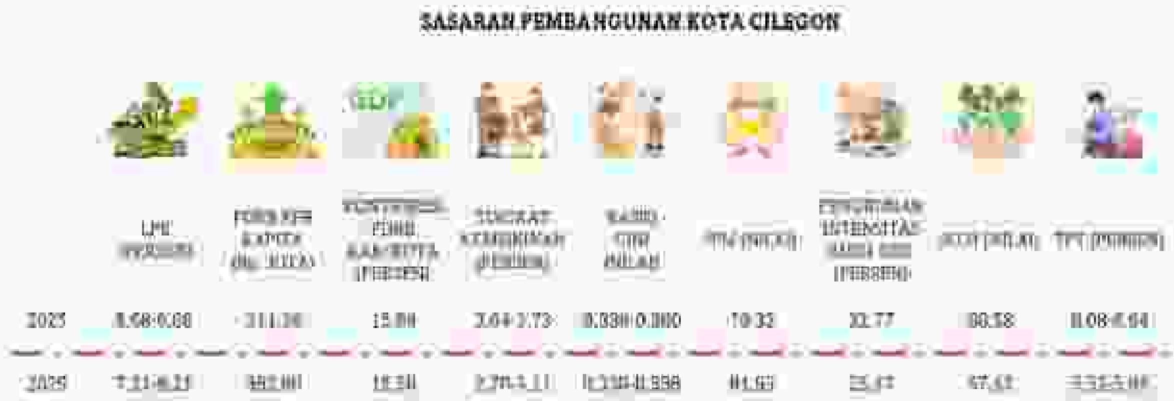

GAMBAR III.14
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA CILEGON

(Sumber: Diolah Oleh Penyusun, 2025)

TABEL III.11
ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KOTA CILEGON

LOKASI PRIORITAS KOTA CILEGON	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
• KAWASAN PERTUMBUHAN PERKOTAAN CILEGON-SERANG • KAWASAN PERTUMBUHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG • KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI	TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIDAK KORUPSI DAN SISTEM MERIT DALAM BIROKRASI	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
		SINERGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
		DUKUNGAN TRANSFORMASI, EFISIENSI REFORMASI BIROKRASI DAN PENGUATAN REFORMASI HUKUM, MELALUI: I) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU), II) PENANGGULANGAN JUDI DAN PENYELUNDUPAN, DAN III) PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL, MELALUI: I) PENGUATAN TATA KELOLA DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN DIGITAL, II) PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN BUDAYA DIGITAL ASN, III) DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK PRIORITAS, DAN IV) PENGEMBANGAN EKOSISTEM LAYANAN PUBLIK DIGITAL
	INVESTASI, KEMUDAHAN INDUSTRI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	DUKUNGAN KEMUDAHAN IZIN USAHA DALAM MENDORONG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DENGAN PADAT KARYA, AKSES DUKUNGAN PERMODALAN BAGI TUNA KARYA SERTA PENGUTAMAAN TENAGA KERJA LOKAL
		DUKUNGAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS PADAT KARYA BERPRINSIP ESG (*ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE*) DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN, MENCAKUP: TRANSPORTASI HIJAU, ENERGI TERBARUKAN, PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH; SERTA ADOPSI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DAN EKONOMI SIRKULAR
		DUKUNGAN HILIRISASI LANJUTAN SAWIT (BIOPLASTIK, BIOAVTUR, GRAPHENE, SURFACTAN), KELAPA, PERIKANAN TANGKAP DAN PRODUK UNGGULAN SESUAI KARAKTERISTIK WILAYAH LAINNYA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL/INDUSTRI HIJAU/INDUSTRI BIRU KHUSUSNYA PADA INDUSTRI UNGGULAN, POTENSIAL DAN BERORIENTASI EKSPOR

LOKASI PRIORITAS KOTA CILEGON	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		SESUAI POTENSI DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH RTRW DAERAH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON (INDUSTRI KIMIA DAN LOGAM DASAR)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KORIDOR INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG (SEKTOR INDUSTRI PRIORITAS: INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, INDUSTRI LOGAM: BESI, DAN BAJA)
	ZONA EKONOMI BARU, PENGUATAN UMKM, DAN PEMERATAAN EKONOMI	DUKUNGAN PENGEMBANGAN UMKM TERHADAP AKSES PASAR, PERBANKAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS PRODUK USAHA SESUAI UNGGULAN WILAYAH, PENDAMPINGAN TERHADAP INOVASI PRODUK DAN LAYANAN, MENCIPTAKAN REGULASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN WIRAUSAHA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SEBAGAI RANTAI PASOK INDUSTRI SEDANG-BESAR YANG ADA DI KAWASAN INDUSTRI (KI)/KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PRIORITAS
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KOPERASI MERAH PUTIH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI KECIL MENENGAH BERBASISKAN HILIRISASI MOTHER INDUSTRI
	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DUKUNGAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BANTEN, MELALUI: I) DESA BUDAYA; II) PELINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN REVITALISASI WARISAN BUDAYA; III) PEMANFAATAN KHAZANAH BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN (CAGAR BUDAYA, PERMUSEUMAN, DAN PUSAT KEBUDAYAAN LAINNYA); DAN IV) JAMINAN HAK KEBUDAYAAN, EKSPRESI BUDAYA, SERTIFIKASI KOMPETENSI PELAKU BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI, BERKUALITAS, BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DAN BERKELANJUTAN
		PENGEMBANGAN PARIWISATA BERUPA *EVENT TOURISM* INTERNASIONAL, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH/BUDAYA, WISATA RELIGI, WISATA BUATAN DAN *EVENT* LAINNYA YANG AKAN DIINTERVENSI LINTAS SEKTORAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU, EKONOMI HIJAU, MAUPUN EKOSISTEM EKONOMI LAINNYA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI WISATA MEMANFAATKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL, MELALUI: I) PERLUASAN INFRASTRUKTUR DIGITAL, DAN II) PENINGKATAN KAPASITAS SDM DIGITAL DAN LITERASI DIGITAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN *EVENT*, INFRASTRUKTUR, DAN SISTEM INFORMASI DESTINASI WISATA BERBASIS MICE (*MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS, AND EXHIBITIONS*)
	SEKOLAH GRATIS UNTUK SMA/SMK/MA NEGERI DAN	DUKUNGAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN

LOKASI PRIORITAS KOTA CILEGON	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
	SWASTA DI PROVINSI BANTEN	12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MELALUI: I) PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD); II) REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH YANG BERKUALITAS; III) PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN YANG TEPAT SASARAN; IV) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH; V) REVITALISASI PENDIDIKAN NONFORMAL; VI) PENGUATAN PEMBELAJARAN DAN AKSELERASI PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS; VII) MODERNISASI DAN AKSELERASI STEM (*SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS*)
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN DAYAH/PESANTREN, SERTA PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI I) PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS, II) PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT, III) PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT, IV) PERLUASAN LAYANAN PENYIARAN DIGITAL, DAN V) LAYANAN DIGITAL TERPADU, TERPERSONALISASI DAN BERFOKUS PADA USER CENTRIC
		DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN VOKASI, PENYEDIAAN, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MAUPUN LAYANAN PENDIDIKAN/PELATIHAN TENAGA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN, MELALUI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BALAI LATIHAN KERJA SESUAI KEBUTUHAN WILAYAH
		PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DITUNJANG DENGAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN SESUAI KEAHLIAN
		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI WILAYAH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) SESUAI KEUNGGULAN DAN KEBUTUHAN WILAYAH
	AKSES KESEHATAN BAGI WARGA DAN PELAYANAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI	DUKUNGAN OPTIMALISASI FASILITAS KESEHATAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI DAN PROGRAM KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENANGANI KASUS GIGI DAN MULUT/KASUS KESEHATAN MENTAL/KASUS MULTI-PENYAKIT PADA LANJUT USIA/KASUS KETERGANTUNGAN OBAT SERTA PEMBUDAYAAN HIDUP SEHAT
		DUKUNGAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT, MELALUI: I) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, REHABILITATIF, DAN KURATIF, II) PENYEDIAAN SARANA-PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN, III) PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENUNTASAN ELIMINASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR, DAN TROPIS TERABAIKAN, IV) PENURUNAN

LOKASI PRIORITAS KOTA CILEGON	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		KEMATIAN IBU DAN ANAK, VI) PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DAN PENUNTASAN TBC, VII) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI BAGI USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF, DAN LANSIA SERTA KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, DAN VIII) PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
		DUKUNGAN PENGUATAN KESETARAAN *GENDER*, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, MELALUI: I) PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN, DAN II) PENGUATAN TATA KELOLA DAN PELEMBAGAAN PUG (PENGARUSUTAMAAN GENDER) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SECARA INKLUSIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL ADAPTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MENGUPAYAKAN PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN SATU SISTEM REGSOSEK MAUPUN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN KESEHATAN IBU-ANAK, KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI DI RSUD PROVINSI DAN KAB/KOTA
		DUKUNGAN PENCAPAIAN UHC
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN SEKOLAH RAKYAT
	KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	DUKUNGAN INTERVENSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, BANTUAN PANGAN, DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN (PHTC)
		DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN AIR, ENERGI, DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SEPERTI PANGAN AKUATIK/*BLUE FOOD*, DSB)
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, TRANSPORTASI, SUMBER DAYA AIR DAN HUNIAN LAYAK	DUKUNGAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN DAN RENCANA TATA RUANG YANG MENGINTEGRASIKAN POTENSI DAN MASALAH SECARA TERPADU
		PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS KAWASAN PRODUKTIF EKONOMI (INFRASTRUKTUR DAN SISTEM LOGISTIK)
		PEMBANGUNAN PJU, SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN SERTA TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN EFISIEN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KARIAN BARAT DAN PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL SINDANGHEULA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN IPLT/IPAL DAN SPAL PERKOTAAN

LOKASI PRIORITAS KOTA CILEGON	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN
		PEMBANGUNAN PSU PERMUKIMAN, PSU LAYANAN DESA SEJAHTERA, DAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU KEWENANGAN PROVINSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH/HUNIAN MURAH BERSANITASI BAIK BAGI PEKERJA, MBR, GEN Z, DAN MILENIAL DI KAWASAN PERKOTAAN CILEGON-SERANG (PKW)
		DUKUNGAN PENYELESAIAN MASALAH PERSAMPAHAN TERINTEGRASI HULU-HILIR
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN CILEGON-SERANG
		DUKUNGAN REAKTIVASI LINTAS KERETA API CILEGON/KRENCENG-ANYER KIDUL, DAN ELEKTRIFIKASI KA MERAK-RANGKASBITUNG
		DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR (AIR BAKU, AIR MINUM, PENANGANAN LIMBAH/SANITASI, INFRASTRUKTUR JARINGAN TRANSMISI, INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI DAN LISTRIK PERKOTAAN, RUMAH/HUNIAN LAYAK HUNI DAN RUANG TERBUKA HIJAU)
		DUKUNGAN REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR YANG BERKELANJUTAN, MELALUI: I) PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN, II) PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH SERTA PEMROSESAN DI TPA/TPST; DAN III) ADOPSI TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PELABUHAN CIWANDAN-CIGADING MENJADI PELABUHAN INTERNASIONAL
		DUKUNGAN PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PEMBANGUNAN INTERKONEKSI SUMATERA–JAWA (SEPERTI JEMBATAN SELAT SUNDA)
		DUKUNGAN PELEBARAN JALAN MERAK-BATAS KOTA CILEGON
		DUKUNGAN PERENCANAAN DAN PENYIAPAN PEMBANGUNAN JALAN TOL/JALAN ALTERNATIF PENOPANG OPTIMALISASI/EKSPANSI KAWASAN INDUSTRI CILEGON-SERANG
		DUKUNGAN OPTIMALISASI TOD (*TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*) MERAK (PELABUHAN, TERMINAL DAN STATSIUN)
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN *FLY OVER* PENUNJANG AKSES TOL CILEGON BARAT DAN CILEGON TIMUR, DAN STASIUN KRENCENG CILEGON
		DUKUNGAN REAKTIVASI LINTAS KA CILEGON/KRENCENG-ANYER KIDUL DAN ELEKTRIFIKASI KA MERAK-RANGKASBITUNG)
		DUKUNGAN PENYEDIAAN AIR BERSIH (PEMANFAATAN BENDUNG SINDANGHEULA DAN BENDUNGAN KARIAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR WILAYAH CILEGON)
	LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA RESILIENSI TERHADAP BENCANA	DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU MELALUI PENGURANGAN BEBAN PENCEMAR DARI SUMBER DOMESTIK, INDUSTRI, PETERNAKAN,

LOKASI PRIORITAS KOTA CILEGON	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PERTANIAN DAN HAL LAINNYA SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN MUTU AIR
		RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAERAH MELALUI PROSES PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI
		DUKUNGAN *NATURE-BASED SOLUTION* DAN *GRAY INFRASTRUCTURE* UNTUK MITIGASI ANCAMAN TSUNAMI PERKOTAAN CILEGON
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSISI ENERGI MENUJU EMISI KARBON YANG LEBIH RENDAH, MELALUI I) PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN, II) PENERAPAN JARINGAN CERDAS (*SMART GRID*) UNTUK MEMAKSIMALKAN EFISIENSI DAN PEMANTAUAN KONSUMSI ENERGI, III) ADOPSI TEKNOLOGI PENYIMPANAN ENERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS PASOKAN LISTRIK, IV) PENERAPAN *INTERNET OF THINGS* (IOT) DI SEKTOR ENERGI GUNA MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN DAN ANALITIK DATA SECARA *REAL-TIME*, DAN V) PERLUASAN PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN, PEMULIHAN, PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN AREA BERNILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI
		PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DAN JASA EKOSISTEM BERKELANJUTAN MENDUKUNG BIOEKONOMI
		DUKUNGAN PENINGKATAN BIOPROSPEKSI, BIOTEKNOLOGI, KEAMANAN HAYATI, SERTA AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SUMBER DAYA GENETIK
		DUKUNGAN PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENINGKATAN FUNGSI SOSIAL KAWASAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2023

3.2.3.7 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KOTA TANGERANG

Untuk mendukung pencapaian nasional sebagaimana yang diturunkan kepada Provinsi Banten, maka untuk itu sasaran pembangunan Kota Tangerang dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana berikut ini.

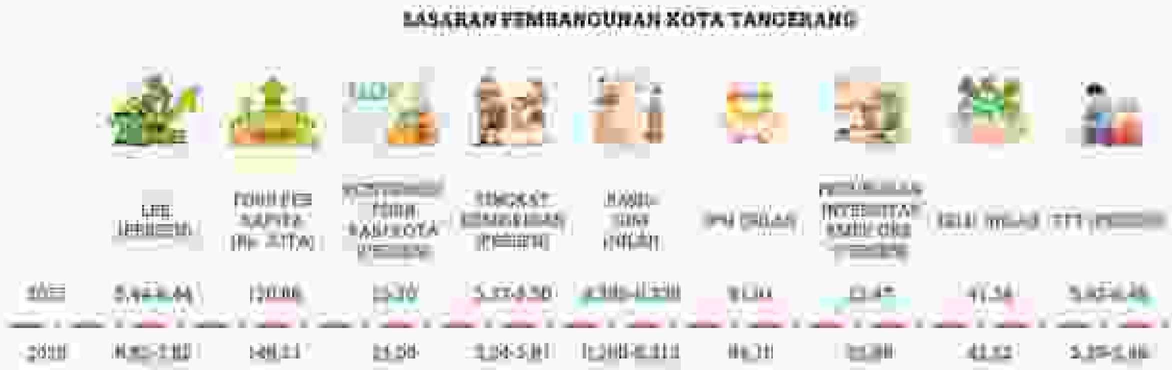

GAMBAR III.15
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG
(Sumber: Olahan Tim Bappeda, 2025)

TABEL III.12
ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KOTA TANGERANG

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
• KAWASAN PERTUMBUHAN PERKOTAAN TANGERANG RAYA (BAGIAN DARI KAWASAN AGLOMERASI WILAYAH METROPOLITAN JAKARTA, JAKARTA-TANGERANG *INTERNATIONAL BUSSINESS CORRIDOR*)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIDAK KORUPSI DAN SISTEM MERIT DALAM BIROKRASI	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
		SINERGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
		DUKUNGAN TRANSFORMASI, EFISIENSI REFORMASI BIROKRASI DAN PENGUATAN REFORMASI HUKUM, MELALUI: I) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU); II) PENANGGULANGAN JUDI DAN PENYELUNDUPAN; DAN III) PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL, MELALUI: I) PENGUATAN TATA KELOLA DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN DIGITAL; II) PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN BUDAYA DIGITAL ASN; III) DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK PRIORITAS; DAN IV) PENGEMBANGAN EKOSISTEM LAYANAN PUBLIK DIGITAL
	INVESTASI, KEMUDAHAN INDUSTRI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	DUKUNGAN KEMUDAHAN IZIN USAHA DALAM MENDORONG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DENGAN PADAT KARYA, AKSES DUKUNGAN PERMODALAN BAGI TUNA KARYA SERTA PENGUTAMAAN TENAGA KERJA LOKAL
		DUKUNGAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI BERBASIS PADAT KARYA BERPRINSIP ESG (*ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE*) DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN, MENCAKUP TRANSPORTASI HIJAU, ENERGI TERBARUKAN, PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH, SERTA ADOPSI TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DAN EKONOMI SIRKULAR
		DUKUNGAN HILIRISASI LANJUTAN SAWIT (BIOPLASTIK, BIOAVTUR, GRAPHENE, SURFAKTAN), KELAPA, PERIKANAN TANGKAP DAN PRODUK UNGGULAN SESUAI KARAKTERISTIK WILAYAH LAINNYA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL/INDUSTRI HIJAU/INDUSTRI BARU KHUSUSNYA PADA INDUSTRI UNGGULAN, POTENSIAL DAN BERORIENTASI EKSPOR SESUAI POTENSI DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH RTRW DAERAH

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PENGEMBANGAN BALAI PENGUJIAN HASIL MUTU PERIKANAN
	ZONA EKONOMI BARU, PENGUATAN UMKM, DAN PEMERATAAN EKONOMI	DUKUNGAN PENGEMBANGAN UMKM TERHADAP AKSES PASAR, PEMBIAYAAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS PRODUK USAHA BERBASIS UNGGULAN WILAYAH, PENDAMPINGAN TERHADAP INOVASI PRODUK DAN LAYANAN, MENCIPTAKAN REGULASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN WIRAUSAHA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) SEBAGAI RANTAI PASOK INDUSTRI SEDANG-BESAR YANG ADA DI KAWASAN INDUSTRI (KI)/KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PRIORITAS
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KOPERASI MERAH PUTIH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM BISNIS MENUJU AEROPOLIS SOEKARNO-HATTA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN ASRAMA HAJI CIPONDOH
	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DUKUNGAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BANTEN, MELALUI: I) DESA BUDAYA; II) PELINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN REVITALISASI WARISAN BUDAYA; III) PEMANFAATAN KHAZANAH BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN (CAGAR BUDAYA, PERMUSEUMAN, DAN SITUS KEBUDAYAAN LAINNYA); DAN IV) JAMINAN HAK KEBUDAYAAN, EKSPRESI BUDAYA, SERTIFIKASI KOMPETENSI PELAKU BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI, BERKUALITAS, BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DAN BERKELANJUTAN
		PENGEMBANGAN PARIWISATA BERUPA *EVENT TOURISM INTERNASIONAL*, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH/BUDAYA, WISATA RELIGI, WISATA BUATAN DAN *EVENT* LAINNYA YANG AKAN DIINTERVENSI LINTAS SEKTORAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI HIJAU, MAUPUN EKOSISTEM EKONOMI LAINNYA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI WISATA MEMANFAATKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL, MELALUI: I) PERLUASAN INFRASTRUKTUR DIGITAL; DAN II) PENINGKATAN KAPASITAS SDM DIGITAL DAN LITERASI DIGITAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN *EVENT*, INFRASTRUKTUR, DAN SISTEM INFORMASI DESTINASI WISATA BERBASIS MICE (*MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS AND EXHIBITIONS*)
	SEKOLAH GRATIS UNTUK SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI BANTEN	DUKUNGAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN 12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH) MELALUI: I) PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), II) REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH YANG BERKUALITAS, III) PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN YANG TEPAT SASARAN, IV) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH, V)

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		REVITALISASI PENDIDIKAN NONFORMAL; VII) PENGUATAN PENGELOLAAN DAN AKSELERASI PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS; VIII) MODERNISASI DAN AKSELERASI STEM (*SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS*)
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN DAYAH/PESANTREN, SERTA PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI I) PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS, II) PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT, III) PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT, IV) PERLUASAN LAYANAN PENYIARAN DIGITAL, DAN V) LAYANAN DIGITAL TERPADU, TERPERSONALISASI DAN BERFOKUS PADA *USER CENTRIC*
		DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN VOKASI, PENYEDIAAN, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MAUPUN LAYANAN PENDIDIKAN/PELATIHAN TENAGA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN, MELALUI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BALAI LATIHAN KERJA SESUAI KEBUTUHAN WILAYAH
		PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DITUNJANG DENGAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN SESUAI KEAHLIAN
		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI WILAYAH
	AKSES KESEHATAN BAGI WARGA DAN PELAYANAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI	DUKUNGAN OPTIMALISASI FASILITAS KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI) DAN PROGRAM KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENANGANI KASUS GIGI DAN MULUT/KASUS KESEHATAN MENTAL/KASUS MULTI-PENYAKIT PADA LANJUT USIA/KASUS KETERGANTUNGAN OBAT SERTA PEMBUDAYAAN HIDUP SEHAT
		DUKUNGAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT, MELALUI: I) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, REHABILITATIF, DAN KURATIF; II) PENYEDIAAN SARANA-PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN; III) PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENUNTASAN ELIMINASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR, DAN TROPIS TERABAIKAN; IV) PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK; V) PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* DAN PENUNTASAN TBC; VI) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI BAGI USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF, DAN LANSIA SERTA KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI; DAN VII) PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
		DUKUNGAN PENGUATAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, MELALUI: I) PEMENUHAN DAN

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TERBEBAS DARI KEKERASAN, DAN III) PENGUATAN TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PUG (PENGARUSUTAMAAN GENDER) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SECARA INKLUSIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL ADAPTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MENGUPAYAKAN PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN SATU SISTEM REGSOSEK MAUPUN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN KESEHATAN IBU-ANAK, KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI DI RSUD PROVINSI DAN KAB/KOTA
		DUKUNGAN PENCAPAIAN UHC
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN SEKOLAH RAKYAT
	KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	DUKUNGAN INTERVENSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, BANTUAN PANGAN, DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN [illegible]
		DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN AIR, ENERGI, DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN (SEPERTI PANGAN AKUATIK/BLUE FOOD, DSB)
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, TRANSPORTASI, SUMBER DAYA AIR DAN HUNIAN LAYAK	DUKUNGAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN DAN RENCANA TATA RUANG YANG MENGINTEGRASIKAN POTENSI DAN MASALAH SECARA TERPADU
		PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS KAWASAN PRODUKTIF EKONOMI (INFRASTRUKTUR DAN SISTEM LOGISTIK)
		PEMBANGUNAN PJU, SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN SERTA TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN EFISIEN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KARIAN SERPONG
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN IPLT/IPAL DAN TPAL PERKOTAAN
		PEMBANGUNAN [illegible]
		PEMBANGUNAN PSU PERMUKIMAN, POS LAYANAN DESA SEJAHTERA, DAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU KEWENANGAN PROVINSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH/HUNIAN MURAH BERSANITASI BAIK BAGI PEKERJA, MBR, GEN Z, DAN MILENIAL
		DUKUNGAN PENYELESAIAN MASALAH PERSAMPAHAN TERINTEGRASI HULU-HILIR
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN TANGERANG RAYA (BAGIAN DARI KAWASAN AGLOMERASI JAKARTA)

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DUKUNGAN LINTASAN KERETA API TANGERANG RAYA-SERANG
		DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR (AIR BAKU, AIR MINUM, PENANGANAN LIMBAH/SANITASI, INFRASTRUKTUR JARINGAN TRANSMISI, INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI DAN LISTRIK PERKOTAAN, RUMAH/HUNIAN LAYAK HUNI DAN RUANG TERBUKA HIJAU)
		DUKUNGAN REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR YANG BERKELANJUTAN, MELALUI: I) PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN; II) PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH SERTA PEMROSESAN DI TPA/LIIR; III) ADOPSI TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN; DAN IV) DUKUNGAN PEMBANGUNAN TPST DI TANGERANG RAYA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI MASSAL AGLOMERASI (LRT, MRT EAST-WEST, TRANSJAKARTA, DAN TAYO), TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN, DAN TOD (*TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*)
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI BERBASIS JALAN DAN KERETA API YANG BERORIENTASI PADA TRANSPORTASI PUBLIK
		DUKUNGAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN TEKNOLOGI TERBAIK TERSEDIA BAIK DI KAWASAN KOMERSIAL, INDUSTRI, FASILITAS UMUM MAUPUN DI PERMUKIMAN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SERPONG-BALARAJA
		DUKUNGAN OPTIMALISASI WILAYAH SUNGAI CISADANE DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSERVASI, AIR MINUM, DAN WISATA
		DUKUNGAN PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH NON DOMESTIK SERTA PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN LIMBAH
		DUKUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN JARINGAN SARANA PRASARANA ENERGI YANG OPTIMAL DAN EFISIEN.
		DUKUNGAN ELEVATED BUSWAY KORIDOR BATAS DKI JAKARTA-CBD CILEDUG DAN PENYIAPAN PEMBANGUNAN ELEVATED BUSWAY CBD CILEDUG-PORIS PLAWAD
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN *FLY OVER* JALUR KERETA API
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA BESERTA FASILITAS PENUNJANG LAINNYA MENUJU PENGEMBANGAN EKOSISTEM *AEROCITY*
	LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA RESILIENSI TERHADAP BENCANA	DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (KHUSUSNYA KETANGGUHAN TERHADAP BANJIR PERIODIK KALA-ULANG 25-50 TAHUNAN DI KAWASAN AGLOMERASI JAKARTA (TANGERANG RAYA), TERMASUK PENERAPAN SIIP DAN FEWS)
		DUKUNGAN PENINGKATAN PENGENDALIAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU MELALUI PENGURANGAN BEBAN PENCEMAR DARI SUMBER DOMESTIK, INDUSTRI, PETERNAKAN,

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		PERTANIAN DAN HAL LAINNYA SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN MUTU AIR
		RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAERAH MELALUI PROSES PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI
		DUKUNGAN *NATURE-BASED SOLUTION* DAN *GRAY INFRASTRUCTURE* UNTUK MITIGASI
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSISI ENERGI MENUJU EMISI KARBON YANG LEBIH RENDAH, MELALUI: I) PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN; II) PENERAPAN JARINGAN CERDAS (*SMART GRID*) UNTUK MEMAKSIMALKAN EFISIENSI DAN PEMANTAUAN KONSUMSI ENERGI; III) ADOPSI TEKNOLOGI PENYIMPANAN ENERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS PASOKAN LISTRIK; IV) PENERAPAN *INTERNET OF THINGS* (IOT) DI SEKTOR ENERGI GUNA MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN DAN ANALITIK DATA SECARA *REAL-TIME*; DAN V) PERLUASAN PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN, PEMULIHAN, PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN AREA BERNILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI
		PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DAN JASA EKOSISTEM BERKELANJUTAN MENDUKUNG BIOEKONOMI
		DUKUNGAN PENINGKATAN BIOPROSPEKSI, BIOTEKNOLOGI, KEAMANAN HAYATI, SERTA AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SUMBER DAYA GENETIK
		DUKUNGAN PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PENINGKATAN FUNGSI SOSIAL KAWASAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

3.2.3.8 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KOTA TANGERANG SELATAN

Untuk mendukung pencapaian nasional sebagaimana yang diturunkan kepada Provinsi Banten, maka untuk itu sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana berikut ini.

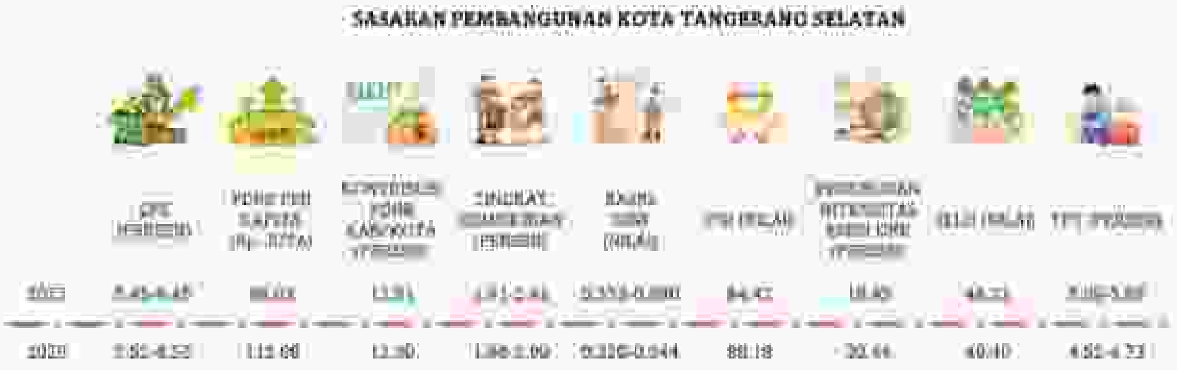

GAMBAR III.16
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN

(Sumber: Olah Oleh Bappeda, 2025)

TABEL III.13
ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN KOTA TANGERANG SELATAN

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG SELATAN	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
• KAWASAN PERTUMBUHAN PERKOTAAN TANGERANG RAYA (BAGIAN DARI KAWASAN AGLOMERASI WILAYAH METROPOLITAN JAKARTA, JAKARTA-TANGERANG *INTERNATIONAL BUSSINESS CORRIDOR*)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN TIDAK KORUPSI DAN SISTEM MERIT DALAM BIROKRASI	PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
		SINERGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
		DUKUNGAN TRANSFORMASI, EFISIENSI REFORMASI BIROKRASI DAN PENGUATAN REFORMASI HUKUM, MELALUI: I) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI SERTA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU), II) PENANGGULANGAN JUDI DAN PENYELUNDUPAN, DAN III) PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL, MELALUI: I) PENGUATAN TATA KELOLA DAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN DIGITAL, II) PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN BUDAYA DIGITAL ASN, III) DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK PRIORITAS, DAN IV) PENGEMBANGAN EKOSISTEM LAYANAN PUBLIK DIGITAL
	INVESTASI, KEMUDAHAN INDUSTRI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	DUKUNGAN KEMUDAHAN IZIN USAHA DALAM MENDORONG PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DENGAN PADAT KARYA, AKSES DUKUNGAN PERMODALAN BAGI TUNA KARYA SERTA PENGUTAMAAN TENAGA KERJA LOKAL
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL/INDUSTRI HIJAU/INDUSTRI BIRU KHUSUSNYA PADA INDUSTRI UNGGULAN POTENSIAL, DAN BERORIENTASI EKSPOR SESUAI POTENSI DAERAH YANG DITETAPKAN DALAM RTRW DAERAH
	ZONA EKONOMI BARU, PENGUATAN UMKM, DAN PEMERATAAN EKONOMI	DUKUNGAN PENGEMBANGAN UMKM TERHADAP AKSES PASAR, PERBANKAN, PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS PRODUK USAHA SESUAI UNGGULAN WILAYAH, PENDAMPINGAN TERHADAP INOVASI PRODUK DAN LAYANAN, MENCIPTAKAN REGULASI YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN WIRAUSAHA
		DUKUNGAN OPTIMALISASI KOPERASI MERAH PUTIH
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF DAN EKONOMI DIGITAL
		DUKUNGAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI BANTEN.

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG SELATAN	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	MELALUI: I) DESA BUDAYA, II) PELINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN REVITALISASI WARISAN BUDAYA, III) PEMANFAATAN KHAZANAH BUDAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN (CAGAR BUDAYA, PERMUSEUMAN, DAN PUSAT KEBUDAYAAN LAINNYA), DAN IV) JAMINAN HAK KEBUDAYAAN, EKSPRESI BUDAYA, SERTIFIKASI KOMPETENSI PELAKU BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI, BERKUALITAS, BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DAN BERKELANJUTAN
		PENGEMBANGAN PARIWISATA BERUPA *EVENT TOURISM INTERNASIONAL*, WISATA ALAM, WISATA SEJARAH/BUDAYA, WISATA RELIGI, WISATA BUATAN DAN *EVENT* LAINNYA YANG AKAN DIINTERVENSI LINTAS SEKTORAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI HIJAU, MAUPUN EKOSISTEM EKONOMI LAINNYA
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI WISATA MEMANFAATKAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL, MELALUI: I) PERLUASAN INFRASTRUKTUR DIGITAL, DAN II) PENINGKATAN KAPASITAS SDM DIGITAL DAN LITERASI DIGITAL
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN *EVENT*, INFRASTRUKTUR, DAN SISTEM INFORMASI DESTINASI WISATA BERBASIS MICE (*MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS, AND EXHIBITIONS*)
	SEKOLAH GRATIS UNTUK SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI PROVINSI BANTEN	DUKUNGAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN 12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH) MELALUI: I) PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), II) REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DAN MADRASAH YANG BERKUALITAS, III) PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN YANG TEPAT SASARAN, IV) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH, V) REVITALISASI PENDIDIKAN NONFORMAL, VI) PENGUATAN PENGELOLAAN DAN AKSELERASI PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERKUALITAS, VII) MODERNISASI DAN AKSELERASI STEM (*SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS*)
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI DI SEKOLAH, MADRASAH, DAN DAYAH/PESANTREN, SERTA PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL, MELALUI: I) PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS, II) PERLUASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN AKSES INTERNET CEPAT, III) PENGEMBANGAN SDM TIK DAN DIGITALISASI MASYARAKAT, IV) PERLUASAN LAYANAN PEMBAYARAN DIGITAL, DAN V) LAYANAN DIGITAL TERPADU, TERPERSONALISASI DAN BERFOKUS PADA *USER CENTRIC*
		DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN VOKASI, PENYELARASAN, DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG SELATAN	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		KERJA MAUPUN LAYANAN PENDIDIKAN/PELATIHAN TENAGA KERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN, MELALUI PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BALAI LATIHAN KERJA SESUAI KEBUTUHAN WILAYAH
		PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS TINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS DITUNJANG DENGAN TENAGA PENDIDIK YANG BERKOMPETEN SESUAI KEAHLIAN
		PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMA, SMK DAN PENDIDIKAN KHUSUS (UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI WILAYAH
	AKSES KESEHATAN BAGI WARGA DAN PELAYANAN SOSIAL TANPA DISKRIMINASI	DUKUNGAN OPTIMALISASI FASILITAS KESEHATAN (SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI) DAN PROGRAM KESEHATAN YANG ADIL DAN MERATA
		DUKUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENANGANI KASUS GIGI DAN MULUT/KASUS KESEHATAN MENTAL/KASUS MULTI-PENYAKIT PADA LANJUT USIA/KASUS KETERGANTUNGAN OBAT SERTA PEMBUDAYAAN HIDUP SEHAT
		DUKUNGAN PENINGKATAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT, MELALUI: I) PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, REHABILITATIF, DAN KURATIF; II) PENYEDIAAN SARANA-PRASARANA KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN; III) PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENUNTASAN ELIMINASI PENYAKIT PRIORITAS, MENULAR, DAN TROPIS TERABAIKAN; IV) PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK; V) PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DAN PENUNTASAN TBC; VI) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI BAGI USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF, DAN LANSIA SERTA KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI; DAN VII) PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
		DUKUNGAN PENGUATAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN, MELALUI: I) PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BEBAS DARI KEKERASAN, DAN II) PENGUATAN TATA KELOLA DAN PELEMBAGAAN PUG (PENGARUSUTAMAAN GENDER) DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA SECARA INKLUSIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN
		DUKUNGAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL ADAPTIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MENGUPAYAKAN PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN SATU SISTEM REGSOSEK MAUPUN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN LAYANAN UNGGULAN KESEHATAN IBU-ANAK, KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN SISTEM RUJUKAN BERBASIS KOMPETENSI DI RSUD PROVINSI DAN KAB/KOTA

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG SELATAN	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DUKUNGAN PENCAPAIAN UHC
		DUKUNGAN PEMBERIAN MAKAN BERGIZI UNTUK IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN SEKOLAH RAKYAT
	KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN	DUKUNGAN INTERVENSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS, BANTUAN PANGAN, DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN (PHTS)
		DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN AIR, ENERGI, DAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN YANG BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG, DAN AMAN SESUAI KARAKTERISTIK DAN POTENSI DAERAH GUNA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN (SEPERTI PANGAN AKUATIK/BLUE FOOD, DSB)
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, TRANSPORTASI, SUMBER DAYA AIR DAN HUNIAN LAYAK	DUKUNGAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN KAWASAN DAN RENCANA TATA RUANG YANG MENGINTEGRASIKAN POTENSI DAN MASALAH SECARA TERPADU
		PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS KAWASAN PRODUKTIF EKONOMI (INFRASTRUKTUR DAN SISTEM LOGISTIK)
		PEMBANGUNAN TOL, SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN SERTA TRANSPORTASI PUBLIK MASSAL YANG RAMAH LINGKUNGAN, NYAMAN, MUDAH DIAKSES, AMAN, DAN EFISIEN
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KARIAN SERPONG
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN IPLT/IPAL DAN SPAL PERKOTAAN
		PEMBANGUNAN KEBINAMARGAAN
		PEMBANGUNAN PSU PERMUKIMAN, PSU LAYANAN DESA SEJAHTERA, DAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU KEWENANGAN PROVINSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN RUMAH/HUNIAN MURAH BERSANITASI BAIK BAGI PEKERJA, MBR, GEN Z, DAN MILENIAL
		DUKUNGAN PENYELESAIAN MASALAH PERSAMPAHAN TERINTEGRASI HULU-HILIR
		DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN TANGERANG RAYA (BAGIAN DARI KAWASAN AGLOMERASI JAKARTA)
		DUKUNGAN RENCANA KERETA API TANGERANG RAYA-SERANG
		DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LAYANAN DASAR (AIR BAKU, AIR MINUM, PENANGANAN LIMBAH/SANITASI, INFRASTRUKTUR JARINGAN TRANSMISI INFRASTRUKTUR DISTRIBUSI DAN LISTRIK PERKOTAAN, RUMAH/HUNIAN LAYAK HUNI DAN RUANG TERBUKA HIJAU)
		DUKUNGAN REFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN SANITASI YANG TERINTEGRASI DARI HULU KE HILIR YANG BERKELANJUTAN, MELALUI: I) PERUBAHAN PERILAKU DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERSAMPAHAN, II) PENINGKATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH SERTA PEMROSESAN DI TPA/TPST, III) ADOPSI TEKNOLOGI PEMROSESAN SAMPAH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN, DAN IV) DUKUNGAN PEMBANGUNAN TPST DI TANGERANG RAYA

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG SELATAN	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI MASSAL AGLOMERASI DKJ (MRT EAST-WEST DAN TRANSJAKARTA), TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN, DAN TOD (*TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*)
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI MASSAL AGLOMERASI DKJ: MRT LEBAK BULUS-SERPONG DAN TRANSJAKARTA DAN MRT LEBAK BULUS-PONDOK CABE-RAWA BUNTU (JAKARTA-TANGSEL) BESERTA TOD (*TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*)
		DUKUNGAN PEMBANGUNAN JALAN TOL SERPONG-BALARAJA DAN TOL BOGOR-SERPONG (VIA PARUNG)
		DUKUNGAN OPTIMALISASI WILAYAH SUNGAI CISADANE DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSERVASI DAN AIR MINUM
	LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA RESILIENSI TERHADAP BENCANA	DUKUNGAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (KHUSUSNYA KETANGGUHAN TERHADAP BANJIR PERIODE KALA-ULANG 25-50 TAHUNAN DI KAWASAN AGLOMERASI JAKARTA (TANGERANG RAYA) TERMASUK PENERAPAN SIH3 DAN EWS)
		DUKUNGAN PENINGKATAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU MELALUI PENGURANGAN BEBAN PENCEMAR DARI SUMBER DOMESTIK, INDUSTRI, PETERNAKAN, PERTANIAN DAN HAL LAINNYA SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN MUTU AIR
		RESILIENSI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GUNA MENDUKUNG KETAHANAN DAERAH MELALUI PROSES PENDIDIKAN DAN PENYADARAN SEJAK DINI
		DUKUNGAN *NATURE-BASED SOLUTION* DAN *GRAY INFRASTRUCTURE* UNTUK MITIGASI
		DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSISI ENERGI MENUJU EMISI KARBON YANG LEBIH RENDAH, MELALUI: I) PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN, II) PENERAPAN JARINGAN CERDAS (*SMART GRID*) UNTUK MEMAKSIMALKAN EFISIENSI DAN PEMANTAUAN KONSUMSI ENERGI, III) ADOPSI TEKNOLOGI PENYIMPANAN ENERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS PASOKAN LISTRIK, IV) PENERAPAN *INTERNET OF THINGS* (IOT) DI SEKTOR ENERGI GUNA MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN DAN ANALITIK DATA SECARA *REAL-TIME*, DAN V) PERLUASAN PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN, PEMULIHAN, PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN AREA BERNILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI
		PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DAN JASA EKOSISTEM BERKELANJUTAN MENDUKUNG BIOEKONOMI
		DUKUNGAN PENINGKATAN BIOPROSPEKSI, BIOTEKNOLOGI, KEAMANAN HAYATI, SERTA AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN SUMBER DAYA GENETIK
		DUKUNGAN PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)

LOKASI PRIORITAS KOTA TANGERANG SELATAN	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		DUKUNGAN PENINGKATAN FUNGSI SOSIAL KAWASAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)
		DUKUNGAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN (HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, HUTAN PRODUKSI TERBATAS, HUTAN KOTA, DAN HUTAN MANGROVE SESUAI KONDISI DAERAH)

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2023

3.2.4 PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab II, serta dikaitkan dengan kerangka solusi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam subbab di atas, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas selama 5 (lima) Tahun 2025-2029, dapat ditarik kesimpulan bahwa program prioritas yang dirumuskan hilirnya harus dapat mencapai cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan. Perumusan program prioritas dapat memperhatikan dan mempertimbangkan terhadap dokumen perencanaan sektoral, perencanaan pemerintah pusat kepada daerah, mapun kebijakan lainnya.

TABEL III.14
PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
BANTEN MAJU, ADIL, MERATA TIDAK KORUPSI						
MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH	TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG KOLABORATIF, KAPABEL, DAN BERINTEGRITAS UNTUK MELAYANI MASYARAKAT			INDEKS REFORMASI BIROKRASI (INDEKS)		
		TERWUJUDNYA KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF		INDEKS PELAYANAN PUBLIK (INDEKS)		
				INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (NILAI)		
			MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERSENTASE KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN YANG DI TINDAKLANJUTI (%)	4.01.04 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			MENINGKATNYA DUKUNGAN DAN FASILITASI PERAN KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD	PERSENTASE CAPAIAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			MENINGKATNYA DUKUNGAN DAN FASILITASI PERAN PERUNDANG-UNDANGAN, ANGGARAN DAN PENGAWASAN	PERSENTASE CAPAIAN LAYANAN KINERJA PERAN DAN FUNGSI DPRD (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			MENINGKATNYA FASILITASI ADMINISTRASI DAN RUMAH TANGGA PIMPINAN	PERSENTASE FASILITASI RUMAH TANGGA PIMPINAN YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			MENINGKATNYA KUALITAS FASILITASI KEPROTOKOLAN PIMPINAN	PERSENTASE KEBUTUHAN FASILITASI KEPROTOKOLAN PIMPINAN YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENINGKATNYA KUALITAS FASILITASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAYANAN PENGHUBUNG	PERSENTASE FASILITASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHUBUNG YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR (%)	3.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	
			MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM	PERSENTASE BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DAN HAM YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR (%)	4.01.03 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
			MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR	PERSENTASE KEBIJAKAN PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR YANG DIMANFAATKAN SESUAI REGULASI (%)	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI (%)	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN MATERI DAN INFORMASI PIMPINAN	PERSENTASE LAYANAN MATERI DAN INFORMASI PIMPINAN YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE CAKUPAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (AKTA KELAHIRAN USIA 0-4 TAHUN, AKTA KEMATIAN, AKTA PERKAWINAN DAN AKTA PERCERAIAN) YANG DITERBITKAN KABUPATEN/KOTA (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE CAKUPAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK (IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DAN KARTU INDENTITAS ANAK (KIA) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PRODUK HUKUM	PERSENTASE FASILITASI PRODUK HUKUM YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR (%)	4.01.03 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
			MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			MENINGKATNYA LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SETDA	PERSENTASE LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SETDA YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN (PERSENTASE)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
		TERCIPTANYA APARATUR NEGARA YANG KOMPETEN DAN BERKINERJA TINGGI BERDASARKAN SISTEM MERIT		INDEKS SISTEM MERIT (NILAI)		
			MENINGKATNYA ASN YANG MEMILIKI NILAI KINERJA MINIMAL DENGAN PREDIKAT BAIK	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (INDEKS)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI (INDEKS)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				INDEKS SISTEM MERIT ASPEK MANAJEMEN KINERJA (INDEKS)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGHARGAAN, PENGAKUAN, DISIPLIN DAN MANAJEMEN KINERJA (INDEKS)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			MENINGKATNYA KUALITAS ANALISIS KEBUTUHAN, PERANCANGAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SESUAI DENGAN ANALISIS KEBUTUHAN (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, KADER, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL BERKATEGORI BAIK (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS BERKATEGORI BAIK (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			MENINGKATNYA LAYANAN PENJAMINAN MUTU DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA PENUNJANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				PERSENTASE ASN YANG MEMILIKI SERTIFIKASI KOMPETENSI (PERSENTASE)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KARIR ASN	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGEMBANGAN KARIR (INDEKS)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		TERBANGUNNYA KAPABILITAS KELEMBAGAAN		NILAI SAKIP/SAKT (NILAI)		
				INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) (INDEKS)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		BERKINERJA TINGGI YANG BERBASIS JEJARING DAN LINCAH ORGANISASI	BUDAYA KERJA DITERAPKAN SECARA EFEKTIF OLEH PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI BUDAYA KERJA MINIMAL "TERDIKAT BAIK" (%)	4.03.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)	RATA-RATA NILAI SAKIP OPD MITRA IRBAN (NILAI)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			MENINGKATNYA HASIL PENATAAN KELEMBAGAAN	NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN (NILAI)	4.03.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA KERJA SAMA DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN	PERSENTASE KERJA SAMA DAERAH YANG DILAKSANAKAN SESUAI REGULASI (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
			MENINGKATNYA KUALITAS DATA YANG AKURAT DAN ANDAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG AKURAT DAN ANDAL (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	PERSENTASE KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG SESUAI REGULASI (%)	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
			MENINGKATNYA KUALITAS PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PEMDA (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (PERSENTASE)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (PERSENTASE)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (PERSENTASE)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD (PERSENTASE)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RKPD (PERSENTASE)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			MENINGKATNYA PENERAPAN HASIL PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH PROVINSI DENGAN NILAI IKM MINIMAL SANGAT BAIK (%)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PELAPORAN BERKUALITAS	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PELAPORAN BERKUALITAS (%)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMILIKI INDEKS PERFORMASI BIROKRASI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMILIKI INDEKS PERFORMASI BIROKRASI "PREDIKAT BAIK" (%)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA TATA KELOLA AKUNTANSI DAN PELAPORAN	PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN RAPERDA/RAPERGUB APBD DAN RAPERDA/RAPERGUB PERUBAHAN APBD SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				PERSENTASE RAPERDA/ RAPERKADA KAB./KOTA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD YANG DIEVALUASI (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) (INDEKS)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARAAN	PERSENTASE PENGELOLAAN BELANJA DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		TERWUJUDNYA TRANSFORMASI DIGITAL		NILAI INDEKS TRANSFORMASI DIGITAL PILAR PEMERINTAH (POIN)		
			MENGUATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI	PERSENTASE TINGKAT KEMATANGAN KEAMANAN SIBER DAN SANDI PEMERINTAH DAERAH (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH		PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PENINGKATAN IMPLEMENTASI INOVASI PROVINSI CERDAS (PERSENTASE)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				NILAI TINGKAT KEMATANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE DI PEMERINTAH PROVINSI (LEVEL)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				NILAI TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH PROVINSI (LEVEL)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				NILAI TINGKAT KEMATANGAN PENGGUNAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (LEVEL)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP SESUAI NSPK	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN (%)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			TERCAPAINYA KOLABORASI, INTEGRASI, DAN STANDARDISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS) (POIN)	2.25.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		TERBANGUNNYA PERILAKU BIROKRASI YANG BERBUDAYA DAN INOVATIF		INDEKS INOVASI DAERAH (ANGKA)		
				INDEKS INTEGRITAS NASIONAL (PERSENTASE)		
			BUDAYA KERJA DITERAPKAN SECARA EFEKTIF OLEH PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI BUDAYA KERJA MINIMAL "PREDIKAT BAIK" (%)	4.01.12 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA HASIL PENATAAN KELEMBAGAAN	NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN (NILAI)	4.01.12 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA IMPLEMENTASI PENGENDALIAN SPIP	NILAI PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS SPIP (NILAI)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN (NILAI)	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
				TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ (ANGKA)	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
				KUALIFIKASI & KOMPETENSI SDM PBJ (NILAI)	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN ZI	JUMLAH UNIT KERJA YANG MEMENUHI KRITERIA ZI (UNIT KERJA)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				NILAI PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH OLEH KPK (NILAI)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			MENINGKATNYA PENERAPAN HASIL PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH PROVINSI DENGAN NILAI IKM MINIMAL SANGAT BAIK (%)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PELAPORAN BERKUALITAS	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PELAPORAN BERKUALITAS (%)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMILIKI INDEKS REFORMASI BIROKRASI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMILIKI INDEKS REFORMASI BIROKRASI "PREDIKAT BAIK" (%)	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
			MENINGKATNYA RISET DAN INOVASI DAERAH YANG TERIMPLEMENTASIKAN	PERSENTASE RISET DAN INOVASI YANG DI IMPLEMENTASIKAN (%)	5.05.02 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL	TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI			LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)		
		MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS EKONOMI		NILAI PDRB ADHK (TRILIUN RUPIAH)		
			MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WILAYAH TINGKAT KAB/KOTA (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENINGKATNYA KEPATUHAN INDUSTRI DALAM PELAPORANA SIINAS	TINGKAT KEPATUHAN DALAM PELAPORAN (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	PERSENTASE PELAKU EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI	INDEKS JARINGAN DISTRIBUSI (INDEKS)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			MENINGKATNYA NILAI EKSPOR BARANG NON MIGAS	NILAI EKSPOR BARANG NON MIGAS (USD)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU USAHA INDUSTRI PROVINSI BANTEN (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			MENINGKATNYA PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG TERBINA (%)	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
			MENINGKATNYA PENGAWASAN BARANG BEREDAR	PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN PERATURAN (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			MENINGKATNYA PENGAWASAN INDUSTRI DI DAERAH	PERSENTASE INDUSTRI YANG DIAWASI (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	LAJU PERTUMBUHAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			MENINGKATNYA PERENCANAAN INDUSTRI	PERSENTASE RENCANA INDUSTRI YANG DI IMPLEMENTASIKAN (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			MENINGKATNYA PRODUKSI KOMODITAS HORTIKULTURA	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS HORTIKULTURA (TON)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			MENINGKATNYA PRODUKSI KOMODITAS PANGAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PANGAN (TON)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			MENINGKATNYA PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN (TON)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			MENINGKATNYA PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN (TON)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN (TON)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			MENINGKATNYA STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI	NILAI SKM (SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT) PADA UPTD (NILAI)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			MENINGKATNYA STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DAN RUMAH KEMASAN	NILAI SKM (SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT) PADA UPTD (NILAI)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			MENINGKATNYA WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH SELATAN	PERSENTASE WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH SELATAN (%)	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
			MENINGKATNYA WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH UTARA	PERSENTASE WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH UTARA (%)	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
			TERCAPAINYA PELAYANAN UJI MUTU HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			TERCAPAINYA TINGKAT ANGKA KONSUMSI IKAN	KONSUMSI IKAN MASYARAKAT (KG/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		MENINGKATNYA KUALITAS INVESTASI		NILAI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (TRILIUN RUPIAH)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN MINAT INVESTOR YANG BERINVESTASI (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	PERSENTASE REALISASI INVESTASI DAERAH (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			MERATANYA SEBARAN POTENSI INVESTASI DI PROVINSI BANTEN	PERSENTASE POTENSI/PELUANG PENANAMAN MODAL SEKTOR UNGGULAN YANG DITINDAKLANJUTI (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
		MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH		DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH (%)		
			MENINGKATNYA KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG DIMANFAATKAN (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			MENINGKATNYA PENERIMAAN PAJAK DAERAH (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CIRUAS (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD KELAPA DUA (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CIKOKOL (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD MALINGPING (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CILEDUG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)		
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD PANDEGLANG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD BALARAJA (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CIPUTAT (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD RANGKASBITUNG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CILEGON (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD SERANG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD SERPONG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENINGKATNYA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN BERBASIS DIGITAL PENGENDALIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERSENTASE HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DISELESAIKAN (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				PERSENTASE SISTEM INFORMASI PENDAPATAN BERBASIS DIGITAL YANG DIKEMBANGKAN (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			MENINGKATNYA POTENSI PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN DAERAH TERHADAP TARGET (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		MENINGKATNYA LINGKUNGAN KONDUSIF DAN DEMOKRATIS		INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (INDEKS)		
			MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM PEMILU UNTUK SELURUH KELOMPOK MASYARAKAT (NILAI)	8.01.01 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT ANTAR MASYARAKAT (NILAI)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT	NILAI DIMENSI EKONOMI PADA INDEKS HARMONI INDONESIA (IHAI) BANTEN (NILAI)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERSERIKAT, BERPENDAPAT DAN BERKEYAKINAN DALAM SETIAP KEBIJAKAN (NILAI)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN TRIBUMTRANMAS (PERSENTASE)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			MENINGKATNYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT OLEH APARAT NEGARA (NILAI)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
	TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			TINGKAT KEMISKINAN (%)		
				RASIO GINI (INDEKS)		
		MENINGKATNYA KEBERFUNGSIAN SOSIAL, INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT		INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (INDEKS)		
			MENINGKATNYA PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN	PERSENTASE FAKIR MISKIN YANG TERLINDUNGI (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			MENINGKATNYA KEFUNGSIONALISASI ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			MENINGKATNYA KEFUNGSIONALISASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	PERSENTASE GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			MENINGKATNYA KEFUNGSIONALISASI LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			MENINGKATNYA KEFUNGSIONALISASI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			MENINGKATNYA KEFUNGSIONALISASI PPKS TERLANTAR	PERSENTASE PPKS YANG TERTANGANI DAN KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		MENURUNNYA KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN		PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN (%)		
			MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN PERTANIAN YANG DITETAPKAN MENJADI LP2B (HA)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN	PERSENTASE SDM PENYULUH PERTANIAN YANG DITINGKATKAN (PERSENTASE)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			MENINGKATNYA KERJASAMA DESA YANG BERKELANJUTAN	PERSENTASE DESA YANG MELAKUKAN KERJA SAMA SECARA BERKELANJUTAN (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE FASILITASI TATA KELOLA DESA (PERSENTASE)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				PERSENTASE APARATUR DESA DAN ANGGOTA BPD YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA (PERSENTASE)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN (PERSENTASE)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) (DOKUMEN)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRA NKV ATAU NKV (NOMOR KONTROL VETERINER) (PERSENTASE)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRA NKV ATAU NKV (NOMOR KONTROL VETERINER) (PERSENTASE)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			TERCAPAINYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	VOLUME PRODUKSI IKAN BUDIDAYA (TON)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			TERCAPAINYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN LAMUAN	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			TERCAPAINYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP NON PELABUHAN PERIKANAN	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP NON PELABUHAN PERIKANAN (TON)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			TERCAPAINYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN DI WILAYAH SELATAN	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			TERCAPAINYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN DI WILAYAH UTARA	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH UTARA (TON)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN EKONOMI KERAKYATAN		PERSENTASE PERTUMBUHAN SKALA USAHA KECIL KE MENENGAH (PERSENTASE)		
			MENINGKATNYA JALINAN KEMITRAAN UMKM	PERSENTASE UKM MENJALIN KEMITRAAN USAHA (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			MENINGKATNYA KEPATUHAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG PATUH (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN PELATIHAN (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			MENINGKATNYA KOPERASI BERKUALITAS	PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			MENINGKATNYA KOPERASI SEHAT KSP/USP	PERSENTASE KOPERASI YANG SEHAT (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSENTASE KOPERASI USAHA SIMPAN PINJAM YANG MEMATUHI KETENTUAN IZIN (%)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			MENINGKATNYA PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG TERBINA (%)	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
			MENINGKATNYA TRANSFORMASI USAHA KECIL MENJADI USAHA FORMAL	PERSENTASE USAHA KECIL BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL MENJADI FORMAL (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			MENINGKATNYA WILAYAH PESISIR YANG	PERSENTASE WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH SELATAN (%)	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN,	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			TEREHABILITASI DI WILAYAH SELATAN		PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
			MENINGKATNYA WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH UTARA	PERSENTASE WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH UTARA (%)	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
			TERCAPAINYA TINGKAT ANGKA KONSUMSI IKAN	KONSUMSI IKAN MASYARAKAT (KG/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERINTEGRITAS, BERDAYA SAING, BERKUALITAS, INOVATIF, DAN TIDAK DISKRIMINATIF	TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING			INDEKS MODAL MANUSIA (INDEKS)		
				TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)		
		MENINGKATNYA INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT		INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK) (%)		
				INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (INDEKS)		
				RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA DI ATAS 15 TAHUN (TAHUN)		
				HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)		
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI INSTITUSI PENDIDIKAN	PERSENTASE USULAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN YANG DITERBITKAN/DIPERBAHARUI (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENERAPKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDART NASIONAL PERPUSTAKAAN	PERSENTASE KUNJUNGAN MASYARAKAT KE PERPUSTAKAAN (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			MENINGKATNYA PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI (%)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENYELENGGARAKAN ATAU MENGHADIRI UPACARA ADAT DALAM SETAHUN TERAKHIR (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				PERSENTASE WARISAN BUDAYA TAK BENDA YANG TELAH DITETAPKAN TERHADAP TOTAL PENCATATAN (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKKAN SENI DALAM 3 BULAN TERAKHIR (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				PERSENTASE PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGGUNAKAN BAHASA DAERAH DI RUMAH ATAU DALAM PERGAULAN SEHARI-HARI (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MEMBERIKAN SARAN ATAU PENDAPAT DALAM KEGIATAN RAPAT SELAMA SETAHUN TERAKHIR (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG AKTIF MENGIKUTI KEGIATAN ORGANISASI DALAM SETAHUN TERAKHIR (%)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			MENINGKATNYA TATA KELOLA MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	IPK DIMENSI EKSPRESI BUDAYA (%)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
			MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	PERSENTASE BENDA, BANGUNAN, STRUKTUR, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG TELAH DITETAPKAN TERHADAP TOTAL PENDAFTARAN (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENONTON SECARA LANGSUNG PERTUNJUKKAN SENI DALAM 3 BULAN TERAKHIR (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH/WARISAN DUNIA DALAM SETAHUN TERAKHIR (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN PRODUK TRADISIONAL DALAM 3 BULAN TERAKHIR (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDIDIK UNTUK SEMUA MATA PELAJARAN	RATA-RATA INDEKS DISTRIBUSI GURU (NILAI)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			TERWUJUDNYA PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN KHUSUS	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 4-18 DISABILITAS (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			TERWUJUDNYA PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG DAN KAB SERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KAB TANGERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KAB LEBAK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KAB PANDEGLANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			TERWUJUDNYA PEMERATAAN MUTU PEMBELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBINEKAAN SKH (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SKH (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SKH (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			TERWUJUDNYA PEMERATAAN MUTU PEMBELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KOTA SERANG, KAB SERANG, KOTA CILEGON (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KABUPATEN LEBAK (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KAB PANDEGLANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE PENYERAPAN LULUSAN SMK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KABUPATEN TANGERANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KAB SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTATANGERANG SELATAN (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMA (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KABUPATEN LEBAK (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)		
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KABUPATEN TANGERANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE LULUSAN SMK YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KEAHLIAN (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. PANDEGLANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. LEBAK (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KABUPATEN LEBAK (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KAB. SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KABUPATEN TANGERANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KAB LEBAK (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KABUPATEN TANGERANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA SMK DENGAN KEMAMPUAN LITERASI MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI SMK KAB PANDEGLANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KABUPATEN LEBAK (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KABUPATEN TANGERANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAHKABUPATEN PANDEGLANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAHKOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAHKABUPATEN PANDEGLANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAHKOTA SERANG, KAB SERANG, KOTA CILEGON (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KOTA SERANG, KAB SERANG, KOTA CILEGON (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				NILAI IKLIM KEBINEKAAN SMK KAB TANGERANG (NILAI)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			TERWUJUDNYA PEMERATAAN MUTU PEMBELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS	PENERAPAN PRAKTIK INOVATIF (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		MENINGKATNYA KUALITAS TARAF KESEHATAN MASYARAKAT		PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA (%)		
				USIA HARAPAN HIDUP (UHH) (TAHUN)		
			MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU IMUNISASI DASAR LENGKAP BAGI BAYI	CAKUPAN IMUNISASI BAYI LENGKAP (PERSENTASE)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN JIWA TANPA DISKRIMINASI	PERSENTASE PENDERITA GANGGUAN JIWA DAN PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN TIDAK DITELANTARKAN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA AKSES JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN/TIDAK MAMPU	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA DAYA SAING PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA	PERSENTASE ATLET PELAJAR BERPRESTASI (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			MENINGKATNYA DAYA SAING PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN OLAHRAGA MASYARAKAT (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			MENINGKATNYA DAYA SAING PRAMUKA	PERSENTASE PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEPRAMUKAAN (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			MENINGKATNYA DAYA SAING PRESTASI OLAHRAGA	PERSENTASE ATLET YANG MENGIKUTI KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT REGIONAL DAN NASIONAL (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			MENINGKATNYA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	PERSENTASE PENGEMBANGAN FASILITAS LAYANAN KESEHATAN UPTD RSUD MALINGPING (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM KESEHATAN	PERSENTASE SDM KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI STANDAR (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			MENINGKATNYA KETERSEDIAAN OBAT DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSENTASE KABUPATEN / KOTA YANG MEMILIKI KETERSEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG RSUD BANTEN	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA RSUD BANTEN SESUAI STANDAR YANG TERPENUHI (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	PERSENTASE KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER SESUAI STANDAR (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PERSENTASE RS RUJUKAN PROVINSI YANG TERAKREDITASI (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN RSUD CILOGRANG	JUMLAH SPM SUB VARIABEL KEGAWAT DARURATAN UPTD RSUD CILOGRANG (NILAI)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN RSUD LABUAN	JUMLAH SPM SUB VARIABEL KEGAWAT DARURATAN UPTD RSUD LABUAN (ANGKA)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN UPTD RSUD MALINGPING	JUMLAH SPM SUB VARIABEL KEGAWAT DARURATAN UPTD RSUD MALINGPING (ANGKA)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN YANG	NILAI AKREDITASI RSUD BANTEN (NILAI AKREDITASI)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			TERAKREDITASI DI RSUD BANTEN		DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS SPM BIDANG KESEHATAN PROVINSI	PERSENTASE KETERCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN PROVINSI (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA INFORMASI KESEHATAN DI RSUD BANTEN	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN DI RSUD BANTEN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA INFORMASI RSUD CILOGRANG	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN RSUD CILOGRANG (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA INFORMASI RSUD LABUAN	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN DI RSUD LABUAN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA INFORMASI RSUD MALINGPING	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN DI RSUD MALINGPING (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA LAYANAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING SESUAI STANDAR	PERSENTASE TERCAPAINYA CAKUPAN LAYANAN INTERVENSI DALAM PENURUNAN STUNTING (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN SESUAI STANDAR	PERSENTASE IBU BERSALIN MELAKUKAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			OPTIMALNYA PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RS PROVINSI BANTEN	RASIO DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT RUJUKAN (RASIO)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			TERKENDALINYA PENYAKIT TUBERKULOSIS, HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS	PERSENTASE KETERCAPAIAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERCULOSIS, PERSENTASE HIPERTENSI DALAM PENGENDALIAN DAN DIABETES MELITUS DALAM PENGENDALIAN (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA		INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA) (INDEKS)		
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TAPK) PEREMPUAN (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK ANAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG BERPERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK SESUAI STANDAR (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			MENINGKATNYA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK	TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN EVALUASI DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN (%)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	INDEKS LANSIA BERDAYA (NILAI)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				INDEKS PENGASUHAN KELUARGA MEMILIKI REMAJA (NILAI)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

VISI / MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS**	**KETERANGAN**
				PERSENTASE KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MANDIRI (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE KEHAMILAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN (KTD) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				PROPORSI KEBUTUHAN KB YANG TERPENUHI MENURUT ALAT/CARA KB MODERN (*DEMAND SATISFIED*) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) (INDEKS)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN) (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			TERJAMINNYA PEMENUHAN HAK SEMUA ANAK SECARA KOMPREHENSIF	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA) (INDEKS)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK	ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (*AGE SPECIFIC FERTILITY RATE*/ASFR 15-19) (NILAI)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN (IPBK) (INDEKS)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		MENINGKATNYA PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN		TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%)		
			MENINGKATNYA DAYA SAING PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA AKTIF MENGIKUTI ORGANISASI (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			MENINGKATNYA DAYA SAING PEMUDA DALAM PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	PERSENTASE PEMUDA MENGIKUTI KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			MENINGKATNYA DAYA SAING WIRAUSAHA MUDA	RASIO KEWIRAUSAHAAN PEMUDA (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

VISI / MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME**	**INDIKATOR**	**PROGRAM PRIORITAS**	**KETERANGAN**
			MENINGKATNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			MENINGKATNYA PELATIHAN DAN KOMPETENSI KERJA	PERSENTASE PELATIHAN DAN KOMPETENSI KERJA (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				PERSENTASE PELATIHAN DAN KOMPETENSI KERJA (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			MENINGKATNYA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN (%)	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
			MENINGKATNYA PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KAB/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS	TERWUJUDNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS			INDEKS WILLIAMSON (INDEKS)		
		MENINGKATNYA LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR		INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI) (INDEKS)		
			BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN-CISADANE	PERSENTASE OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN-CISADANE (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA	PERSENTASE OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD	PERSENTASE OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU			
			MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN	PERSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				TINGKAT KEMANTAPAN JALAN (PERSENTASE)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				TINGKAT KEMANTAPAN JEMBATAN (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PERSENTASE PENINGKATAN RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI HUNIAN DENGAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK LAYAK) (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SPAM REGIONAL (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PERSENTASE)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PERSENTASE TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (PERSENTASE)	2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
			MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KONSTRUKSI	PERSENTASE TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI (PERSENTASE)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE PEMBANGUNAN GEDUNG STRATEGIS PROVINSI (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN	PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (%)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
			MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				PERSENTASE KETERSEDIAAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAERAH (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE	PERSENTASE PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TPST REGIONAL (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	PENINGKATAN KAPASITAS TAMPUNG SUMBER DAYA AIR (M3)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI (IKSI) (NILAI)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR DAN ABRASI YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN INFRASTRUKTUR PENGAMAN PANTAI (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN – CISADANE	PERSENTASE PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN – CISADANE (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN - CISAWARNA	PERSENTASE PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU	PERSENTASE PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			TERCUKUPINYA DAYA LISTRIK DAERAH	RASIO KETERCUKUPAN DAYA LISTRIK (%)	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
			TERPELIHARANYA JALAN KEWENANGAN PROVINSI DI WILAYAH LEBAK	PERSENTASE PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH LEBAK (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			TERPELIHARANYA JALAN KEWENANGAN PROVINSI DI WILAYAH PANDEGLANG	PERSENTASE PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PANDEGLANG (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			TERPELIHARANYA JALAN KEWENANGAN PROVINSI DI WILAYAH SERANG DAN CILEGON	PERSENTASE PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH SERANG CILEGON (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			TERPELIHARANYA JALAN KEWENANGAN PROVINSI DI WILAYAH TANGERANG	PERSENTASE PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH TANGERANG (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		MENINGKATNYA AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU, DAN BERKELANJUTAN		RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN (%)		
			MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10-15 HA YANG DITANGANI (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			MENINGKATNYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN	PERSENTASE PERMUKIMAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM) (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			TERPENUHINYA RUMAH LAYAK HUNI BAGI WARGA NEGARA KORBAN BENCANA DAN YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI (PERSENTASE)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI		RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI (NILAI)		
			MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT	KONEKTIVITAS ANGKUTAN DARAT (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			MENINGKATNYA PEMBANGUNAN PRASARANA DAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	PERSENTASE KELENGKAPAN JALAN YANG TELAH TERPASANG TERHADAP KONDISI IDEAL (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API	PERSENTASE KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API YANG DITANGANI (%)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN PELAYARAN	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN PELAYARAN (%)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			MENURUNNYA DAERAH RAWAN KECELAKAAN	PERSENTASE DAERAH RAWAN KECELAKAAN YANG DITANGANI (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			TERFASILITASINYA PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	PERSENTASE PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA HOLISTIK DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA	TERWUJUDNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN			PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK (%)		
		MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (INDEKS)		
			MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA DI PROVINSI BANTEN YANG SESUAI BAKU MUTU (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE MASYARAKAT YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA KELESTARIAN DAN FUNGSI DAS	PERSENTASE TUTUPAN LAHAN PADA SEMPADAN DAS (PERSENTASE)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
			MENINGKATNYA KETAATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			MENINGKATNYA PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	PERSENTASE PENINGKATAN FUNGSI LABORATORIUM LINGKUNGAN (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			MENINGKATNYA REHABILITASI LAHAN OLEH MASYARAKAT	PERSENTASE JUMLAH BIBIT BERSERTIFIKAT UNTUK REHABILITASI LAHAN (%)	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			MENINGKATNYA TATA KELOLA SAMPAH	INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS) (POIN)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			MENINGKATNYA TUTUPAN LAHAN DI WILAYAH LEBAK TANGERANG	LUAS LAHAN KRITIS YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG (HA)	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
			MENINGKATNYA TUTUPAN LAHAN DI WILAYAH PANDEGLANG SERANG CILEGON	LUAS LAHAN KRITIS YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON (HEKTAR)	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
			TERJAGANYA PRODUKTIVITAS HASIL HUTAN	KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDRB (%)	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
		MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA		INDEKS KETAHANAN PANGAN (IKP) (INDEKS)		
				INDEKS RISIKO BENCANA (INDEKS)		
			MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	TINGKAT KETERSEDIAAN ENERGI BERDASARKAN ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) 2.400 KKAL/KAP/HARI (KKAL/KAPITA/HARI)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT PASCA BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN PASCA BENCANA (PERSENTASE)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT PRA BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN PRA BENCANA (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA	PERSENTASE PENDAMPINGAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG TERPENUHI LOGISTIK PADA SAAT KEADAAN DARURAT BENCANA (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN POST MARKET	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN MUTU KEAMANAN PANGAN (PERSENTASE)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER	PERSENTASE JUMLAH CADANGAN PANGAN (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			DATA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEAMNDIRIAN PANGAN		DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
			MENINGKATNYA PERIZINAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN MUTU KEAMANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PERIZINAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) SEBESAR 20% (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			MENINGKATNYA PROMOSI DAN KONSUMSI PANGAN LOKAL	TINGKAT KONSUMSI ENERGI, BERDASARKAN ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG) 2.100 KKAL/KAP/HARI (KKAL/KAPITA/HARI)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
		MENINGKATNYA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON YANG BERKELANJUTAN		PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK KUMULATIF (%)		
				PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK TAHUNAN (%)		
			MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN TAHURA BANTEN	TINGKAT EFEKTIFITAS PENGELOLAAN TAHURA BANTEN (NILAI)	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
			MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA (PERSENTASE)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			MENINGKATNYA UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM	PERSENTASE JUMLAH KELOMPOK/LEMBAGA MASYARAKAT YANG TERLIBAT UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			TERKENDALINYA TINGKAT EMISI KARBON (CO2)	PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT EMISI KARBON (CO2) (%)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
			TERSEDIANYA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG BERBASIS ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN	KAPASITAS PEMANFAATAN ANEKA EBT (MEGAWATT)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

3.2.5 RUMUSAN PROGRAM PROVINSI BANTEN

3.2.5.1 RUMUSAN PROGRAM PROVINSI BANTEN BERDASARKAN RTRW TAHUN 2023-2043

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten 2023-2043, dalam peraturan tersebut telah diterangkan terhadap tujuan dan arahan pengembangan terhadap pusat-pusat kegiatan maupun sektor-sektor pengembangan pertumbuhan sebagai rumusan dalam menyusun program prioritas di wilayah Provinsi Banten dalam RPJMD Tahun 2025-2029, mencakup beberapa hal diantaranya:

a. Sistem pusat permukiman yang termasuk kedalam rencana struktur ruang, yang terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki tujuan dan arah pengembangan meliputi:
   1. Pengembangan PKN berupa program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
   2. Pengembangan PKW berupa: a). program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); b). program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata berupa pengembangan fasilitas bisnis pariwisata; dan c). program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berupa pengembangan fasilitas bisnis perikanan; dan
   3. Pengembangan PKL berupa program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

b. Pengembangan kawasan strategis provinsi, yang terdiri dari:
   1. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi berupa: a). pengembangan kawasan strategis ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional berupa program penataan bangunan dan lingkungan yaitu pengembangan/peningkatan kualitas kawasan; b). pengembangan kawasan strategis ekonomi di kawasan strategis provinsi berupa program penataan bangunan dan lingkungan, program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan program perencanaan dan pembangunan industri;
   2. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya berupa: a). program pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; dan b). program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, lingkungan hidup untuk masyarakat;
   3. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa rehabilitasi/revitalisasi kawasan;
   4. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa: a). program pengelolaan keanekaragaman hayati; dan b). program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan

5. Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertahanan dan keamanan (KSNT) berupa program pengelolaan pelayaran.

TABEL III.15
INDIKASI PROGRAM DAERAH SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN PERKOTAAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045

PUSAT PERKOTAAN	KEGIATAN PERKOTAAN	WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM DAERAH
SERANG DAN CILEGON	PKN	WKP II	- PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TIPE A
KOTA TANGERANG, KAB. TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN	PKN	WKP I	- PEMBANGUNAN PELAYANAN AIR BERSIH - PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE A - ANGKUTAN BARANG REGIONAL (JEMBATAN SELAT SUNDA) - PEMBANGUNAN PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, TRANSPORTASI JJBT TRANS BANTEN CILEGON-CIBANDE, TERONDOL-KOTA SERANG, BANTEN LAMA-[illegible] TOL SERPONG-BALARAJA, KAMAL-TELUKNAGA-BALARAJA, SEMANAN-BALARAJA, PASURUAN-BANDARA SOETTA, BALARAJA-JAKARTA EAST-WEST (BEKASI) DAN ANGKUTAN UMUM (MRT BUSLINE TANGERANG–JAKARTA DAN - PEMBANGUNAN PERGURUAN TINGGI DAN UNIVERSITAS
KABUPATEN PANDEGLANG	PKW	WKP III	- PEMBANGUAN RUMAH SAKIT TIPE B
KABUPATEN LEBAK (RANGKASBITUNG)	PKW	WKP III	- PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE B - PEMBANGUNAN PUSAT DISTRIBUSI - PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN - PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN - PENGEMBANGAN WILAYAH AFIRMASI CIBALIUNG-M BINUANGEUN-CIKEUSIK - PENGEMBANGAN KAW AKARSARI - PENGEMBANGAN KAWASAN BAYAH DOME
KABUPATEN LEBAK (BAYAH, CIPANAS, MAJA DAN MALINGPING)	PKL	WKP III	PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN, KESEHATAN, PELAYANAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI DASAR
KABUPATEN PANDEGLANG (PANIMBANG, LABUAN, CIBALIUNG, DAN CIKEUSIK WETAN)	PKL	WKP III	
KABUPATEN SERANG (ANYAR, BAROS, CIRUAS, CARENANG)	PKL	WKP II	
KABUPATEN TANGERANG (KRONJO, TIGARAKSA, PAGEDANGAN)	PKL	WKP I	

Sumber: RTRW Provinsi Banten 2023-2043, diolah

TABEL III.16
INDIKASI PROGRAM DAERAH SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045

KAWASAN STRATEGIS	PRIORITAS PERTUMBUHAN	WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM DAERAH
KSP PERKOTAAN SERANG-CILEGON (SERAGON)	KEPENTINGAN EKONOMI	WKP II	- PENGEMBANGAN PERKOTAAN, - PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, - PENGEMBANGAN INDUSTRI, - PUSAT PEMERINTAHAN DAN PERMUKIMAN DAN
KSP SERANG UTARA TERPADU		WKP II	
KSP SEKITAR KAWASAN KP3B		WKP II	

KAWASAN STRATEGIS	PRIORITAS PERTUMBUHAN	WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM DAERAH
KSP KORIDOR PANTAI BARAT BANTEN		WKP II, III	- PARIWISATA - PEMBANGUNAN JEMBATAN SELAT SUNDA
KSP PANTAI SELATAN TERPADU		WKP III	- TOL MERAK-INDUSTRI CILEGON
KSP PERBATASAN ANTAR PROVINSI DAN KAB/KOTA DI DAERAH		WKP I, III	- PERLUASAN PELABUHAN CIWANDAN - SPAM AIR MINUM - INDUSTRI PELAYARAN ALKI
KSN SELAT SUNDA		WKP II, III	- INDUSTRI PARIWISATA
KSN JABODETABEK		WKP I	- PENGENDALI BANJIR - PENATAAN SITU, EMBUNG DAN SUNGAI
KSP KAWASAN BANTEN LAMA	SOSIAL BUDAYA	WKP II	- PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA, HUKUM ADAT, DAN KEARIFAN LOKAL;
KSP KAWASAN PENYANGGA ADAT BADUY		WKP III	- PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN; - PENINGKATAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT.
KSP BENDUNGAN KARIAN	TEKNOLOGI DAN RISET	WKP III	- PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL - PENGEMBANGAN IRIGASI - PENGEMBANGAN ENERGI ALTERNATIF
KSP KAWASAN RAWA DANAU DAN SEKITARNYA	DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP	WKP II	- PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN TUTUPAN LAHAN
KSN TAMAN NASIONAL UJUNG KULON		WKP III	- PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI - INDUSTRI PARIWISATA
KSNT TELUK BANTEN		WKP II	- INDUSTRI PERIKANAN
KSNT TANJUNG LESUNG			
KSN PULAU TERKECIL DAN TERLUAR	HANKAM	WKP III	- PENGEMBANGAN PELAYARAN - INDUSTRI PERIKANAN - INDUSTRI PARIWISATA

Sumber: RTRW Provinsi Banten 2023-2043, diolah

3.2.5.2 RUMUSAN PROGRAM PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN KEPALA DAERAH

Program prioritas sebagaimana Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dirumuskan dengan memperhatikan terhadap *cascading* kinerja untuk mengejawantahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan *outcome* yang dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya serta program prioritas dimaksud untuk juga dapat mencapai program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang mencakup:

1. Program Unggulan 1

   Banten Bagus merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, sumber daya air, dan hunian layak. Program unggulan ini memiliki program turunan mencakup:

   - Bang Andra yaitu Bangun Jalan Desa Sejahtera;
   - BARATA yaitu Banten Rapid Transit;
   - Desa Tangguh yaitu Bantuan Insentif Dana bagi Desa;
   - Bangun Asa yaitu Membangun Akomodasi Aman Sementara;

- Bersama As-Dim yaitu Berantas Sampah Agar Sehat, Indah, dan Nyaman; dan
- Asa Bisa yaitu Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak bagi Warga Pesisir dan Pedalaman.

2. Program Unggulan 2

   Banten Sehat merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan akses kesehatan bagi warga tanpa diskriminasi. Program unggulan ini memiliki program turunan berupa:

   - Faskin Kita yaitu Optimalisasi Fasilitas Kesehatan, Sumber Daya Manusia, dan Program Kesehatan Kita.

3. Program Unggulan 3

   Banten Cerdas merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan sekolah grastis untuk SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten. Program unggulan ini memiliki program turunan mencakup:

   - Banten Semarak yaitu Semai Karakter Iman dan Taqwa;
   - Gen Alpha yaitu Sekolah Gratis SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Provinsi Banten;
   - Masa Banten yaitu Modernisasi dan Akselerasi Sains dan Akreditasi untuk Banten Emas 2045;
   - Plat-A yaitu Pelatihan dan Pendidikan Vokasional;
   - Bem Banten yaitu Beasiswa Masyarakat Banten; dan
   - Sabda yaitu Santri bagi Pembangunan Daerah.

4. Program Unggulan 4

   Banten Kuat merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan zona ekonomi baru, penguatan UMKM, dan pemerataan ekonomi. Program unggulan ini memiliki program turunan mencakup:

   - Eko Era yaitu Ekosistem dan Energi Ramah Lingkungan; dan
   - Eko Banten yaitu Ekonomi Kreatif dan Diversifikasi Banten.

5. Program Unggulan 5

   Banten Indah merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Program unggulan ini memiliki program turunan mencakup:

   - Bang Soni yaitu Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Informasi Wisata; dan
   - Asyik yaitu Pengembangan Atraksi Wisata.

6. Program Unggulan 6

   Banten Makmur merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Program unggulan ini memiliki program turunan mencakup:

   - Banten Makmur yaitu Akses Pembiayaan Modal Usaha bagi petani dan Nelayan Banten; dan
   - Tamu yaitu Petani Maju.

7. Program Unggulan 7

   Banten Ramah merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan investasi, kemudahan industri dan penyerapan tenaga kerja. Program unggulan ini memiliki program turunan mencakup:

- Kami Usaha yaitu Kemudahan Izin Usaha;
- Bantu Tukar yaitu Bantu Finansial untuk Tuna Karya;
- Tunas Lokal yaitu Tenaga Kerja Unggulan untuk Akses dan Sinergi; dan
- Zona Serlok yaitu Zonasi Serapan Tenaga Kerja Lokal.

8. Program Unggulan 8

   Banten Melayani merupakan prioritas pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tidak korupsi dan sistem merit dalam birokrasi. Program unggulan ini memiliki program turunan berupa:

   - Terobos yaitu Transformasi dan Efisiensi Reformasi Birokrasi Optimal.

GAMBAR III.17
PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM TURUNAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN

(Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025)

Lebih dari itu, tabel di bawah ini merupakan indikasi kegiatan prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang disandingkan dengan 8 (delapan) program unggulan dan 24 (dua puluh empat) program turunan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam pembangunan Banten selama perencanaan jangka menengah kedepan. Pendanaan indikasi kegiatan prioritas tidak hanya bersumber dari APBD namun juga dapat bersumber dari pendanaan lainnya, seperti: APBN, KPBU, CSR, dan pendanaan lainnya yang sah secara peraturan perundang-undangan. Kerangka indikasi kegiatan prioritas lebih jelasnya sebagaimana pada tabel di bawah ini.

TABEL III.17
INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS RPJMD TAHUN 2025-2029

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	OPTIMALISASI KURIKULUM PADA KEJURUAN BIDANG KEAHLIAN PERTANIAN	PENINGKATAN KURIKULUM PERTANIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	5 SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	BANTEN SEMARAK	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN	PENINGKATAN KESADARAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN	270 TENAGA PENDIDIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PEMBELAJARAN MENDALAM (*DEEP LEARNING*), KECERDASAN ARTIFISIAL, DAN KODING	PEMBELAJARAN AI UNTUK PESERTA DIDIK	4425 PESERTA DIDIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	DIGITALISASI SEKOLAH	PELATIHAN MEDIA PEMBELAJARAN	1.200 TENAGA PENDIDIK DAN 45 MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	KETERCUKUPAN DAN KELAYAKAN PENDIDIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PEMENUHAN STANDARISASI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN	[illegible] PENDIDIK 10.804 TENDIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	AKREDITASI SMA/SMK/SKH	PENINGKATAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SKH	228 SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SKH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN PEMAGANGAN BAGI SISWA SMK	SERTIFIKASI KOMPETENSI PESERTA DIDIK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN	300 PESERTA DIDIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	REVITALISASI KEJURUAN SMK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI	PENYELARASAN BIDANG KEAHLIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN TERHADAP KEBUTUHAN INDUSTRI	40 SMK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	DUKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKOLAH GARUDA (REVITALISASI DAN REKOGNISI SMAN CMBBS MENUJU SEKOLAH GARUDA, USB), PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU RKB, DAN PEMBANGUNAN USB DAN RKB PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SATUAN PENDIDIKAN	- USB: 2 SMA, 8 SMK, DAN 1 SKH - RKB: 161 SMA, 18 SMK, DAN 21 SKH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	PLAT-A	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PENGUATAN KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN PRAKTIS YANG RELEVAN DENGAN DUNIA KERJA DAN DUNIA INDUSTRI (PENDIDIKAN VOKASIONAL)	PEMBINAAN MINAT BAKAT SISWA	2.000 PESERTA DIDIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	OPTIMALISASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMA/SMK/SKH SEDERAJAT	PENINGKATAN JUMLAH PERPUSTAKAAN SEKOLAH	30 UNIT PERPUSTAKAAN SATUAN PENDIDIKAN SMA/SMK/SKH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN INDAH	ASYIK	MENJAGA BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL BANTEN	PENINGKATAN EVENT/ATRAKSI SENI DAN MENJAGA WARISAN BUDAYA DAN TRADISI DAERAH	TERJAGANYA WARISAN BUDAYA DAN TRADISI KEBUDAYAAN DAERAH	50 EVENT KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
BANTEN INDAH	ASYIK	MENJAGA BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL BANTEN	PEMETAAN DIGITAL, PENDOKUMENTASIAN SITUS BUDAYA MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 3D SCANNING DAN BASIS DATA TERINTEGRASI UNTUK MEMUDAHKAN PEMANTAUAN KEBIJAKAN	TERPUBLIKASINYA SITUS BUDAYA DALAM BENTUK DIGITAL	12 SITUS/CAGAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	425 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN BARANG MILIK DAERAH	245 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN JUMLAH SMK BLUD	15 SMK NEGERI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN CERDAS	GEN ALPHA	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PROGRAM SEKOLAH GRATIS SMA/SMK/SKH NEGERI DAN SWASTA	PESERTA DIDIK YANG MENGIKUTI PROGRAM SEKOLAH GRATIS	1.685.350 SISWA SEKOLAH GRATIS 1.685.350 SISWA DIDIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN CERDAS	BSM BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	BANTEN EMAS CAMP PUTRA BANTEN REBUT BEASISWA DALAM DAN LUAR NEGERI DAN BEASISWA PERGURUAN TINGGI	PEMBEKALAN UNTUK MENDAPATKAN BEASISWA	8.375 PESERTA DIDIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
BANTEN SEHAT	FASKES KITA	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	PENANGANAN STUNTING, TBC, DAN MALARIA	8 KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
BANTEN SEHAT	FASKES KITA	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	PENANGANAN LIMBAH MEDIS TERINTEGRASI	PENANGANAN LIMBAH MEDIS	4 RUMAH SAKIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
BANTEN SEHAT	FASKES KITA	PENINGKATAN KUALITAS AKSES DAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	MOBIL KLINIK KELILING	PENYEDIAAN MOBILE KLINIK BESERTA OPERASIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT	12 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
BANTEN SEHAT	FASKES KITA	PENINGKATAN KUALITAS AKSES DAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN	CEK KESEHATAN GRATIS	1.919.107 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
BANTEN SEHAT	FASKES KITA	PENINGKATAN KUALITAS AKSES DAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN	PENYEDIAAN ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT (PBI, PBPU DAN BP)	5 TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
BANTEN SEHAT	FASKES KITA	PENINGKATAN KUALITAS AKSES DAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KESEHATAN	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BARU	2 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
BANTEN SEHAT	FASKES KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	PENYEDIAAN ALAT PERAGA PENUNJANG EDUKASI DAN KONSELING KB	PROMOSI, PUBLIKASI DAN EDUKASI	1 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI, EFEKTIFITAS DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PELAKSANAAN OPERASIONAL LAYANAN KESEHATAN	5 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN ASET	1 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF				
BANTEN MELAYANI	TERCOBOH	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	4 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
BANTEN BAGUS	BANG ANDRA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN	PENINGKATAN KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR JALAN	100 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BANG ANDRA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN JALAN BARU	PEMBANGUNAN JALAN CIPARAY CIRUMPAY	12,5 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PEMBANGUNAN AKSES JALAN PENDIDIKAN	PEMBANGUNAN JALAN AKSES PENDIDIKAN	0,25 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BANG ANDRA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN JALAN BARU	PEMBANGUNAN JALAN BARU	11,9 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN KUAT	EKO RIA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENANGANAN BANJIR	PEMBANGUNAN EMBUNG WILAYAH KOTA SERANG	1 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BARATA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PELEBARAN JALAN	PELEBARAN BADAN JALAN	3,9 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BARATA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PELEBARAN JALAN	PEMBANGUNAN FLYOVER (FO) BOGEG, FO TERONDOL, DAN FO SERDANG	3 FLYOVER	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BARATA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PELEBARAN JALAN	PEMBANGUNAN SIMPANG SEBIDANG	5 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BARATA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PELEBARAN JALAN	PEMBANGUNAN UNDERPASS KIMBANG	1 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
						UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BABATA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PELIHARAAN JALAN	PENATAAN KORIDOR JALAN PROTOKOL SERANG	1 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN KAMAR	ZONA BERLOK	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN JALAN INDUSTRI	PEMBANGUNAN JALAN INDUSTRI	6 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PENINGKATAN KONDISI JALAN	PENINGKATAN KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	57 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PENINGKATAN KONDISI JALAN	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH TANGERANG	183 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PENINGKATAN KONDISI JALAN	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH SERANG CILEGON	288 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PENINGKATAN KONDISI JALAN	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PANDEGLANG	165 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PENINGKATAN KONDISI JALAN	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH LEBAK	190 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	REVITALISASI IRIGASI TEKNIS DAN JALAN USAHA TANI	PEMBANGUNAN BENDUNG IRIGASI	200 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	REVITALISASI IRIGASI TEKNIS DAN JALAN USAHA TANI	REHABILITASI IRIGASI	10 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	REVITALISASI IRIGASI TEKNIS DAN JALAN USAHA TANI	PEMELIHARAAN RUTIN SDA-UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU	17 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	REVITALISASI IRIGASI TEKNIS DAN JALAN USAHA TANI	PEMELIHARAAN RUTIN SDA-UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN-CISADANE	7,5 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	REVITALISASI IRIGASI TEKNIS DAN JALAN USAHA TANI	PEMELIHARAAN RUTIN SDA-UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN-CISAWARNA	39 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENANGANAN BANJIR	PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI CILAMA	200 METER	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENANGANAN BANJIR	BELANJA PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	1.200,00 METER	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN HEBAT	ASA BISA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	NORMALISASI SUNGAI DAN PENINGKATAN KUALITAS AIR SUNGAI DAN DANAU	NORMALISASI KALI/SUNGAI	955.132,60 M3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENANGANAN BANJIR	DRAINASE PENGENDALI BANJIR	15,77 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENANGANAN BANJIR	PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI	540 METER	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENANGANAN BANJIR	PEMBANGUNAN TANDON/EMBUNG	2 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEPUROS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	REVITALISASI SITU	2 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENANGANAN BANJIR	PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI	5,2 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN KUAT	EKO BISA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN PENGENDALIAN TATA RUANG	PROGRAM PENATAAN RUANG	21 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	ASA BISA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL	SPAM KARIAN TIMUR	2,2 HEKTAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	ASA BISA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL	SPAM SINDANGHEULA DAN KARIAN BARAT	1 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN INDAH	BANG SONI	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PEMBANGUNAN *LANDMARK* PROVINSI BANTEN	PEMBANGUNAN *LANDMARK*	1 LOKASI	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	ASA BISA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL	PENYEDIAAN AIR BERSIH KAWASAN PERMUKIMAN	15 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	ASA BISA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN IPLT REGIONAL DAN SANITASI LINGKUNGAN	PEMBANGUNAN IPLT REGIONAL	1 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	ASA BISA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	MITIGASI ABRASI PANTAI UTARA JAWA	MITIGASI ABRASI PANTAI UTARA BANTEN	1 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI (LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PENGAMANAN SITU	PENGAMANAN ASET SITU	30 SITU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN SEHAT	BASKOM KITA	PENINGKATAN PRESTASI ATLIT DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KEOLAHRAGAAN	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA *SPORT CENTER*	PEMBANGUNAN VENUE	5 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PEMBANGUNAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI (PDP) DAN AKSESIBILITAS LAINNYA	DUKUNGAN PEMBANGUNAN PDP	0,25 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN KUAT	[illegible] BANTEN	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN EKONOMI KERAKYATAN	PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)	DUKUNGAN PEMBANGUNAN PLUT	0,25 KM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN INDAH	BANG SONI	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PELEBARAN JALAN PENGHUBUNG AKSES PARIWISATA	PELEBARAN JALAN PENGHUBUNG AKSES PARIWISATA	0,25 KM	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BERAT	[illegible] UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	ASA BISA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG BANGUNAN RUMAH SINGGAH	1 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BERSAMA [illegible]	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	OPTIMALISASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR	[illegible]	1 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BERSAMA [illegible]	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBANGUNAN TPST REGIONAL	TPST MAJA	[illegible] HEKTAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	BELANJA PEMELIHARAAN CIPTA KARYA [illegible]	8 BANGUNAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	BELANJA PEMELIHARAAN CIPTA KARYA [illegible]	1 KAWASAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	BELANJA PEMELIHARAAN CIPTA KARYA (SPAM)	1 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	DUKUNGAN PEMBANTUAN UPTD/BLUD AIR MINUM	17 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INFRASTRUKTUR DASAR KAWASAN *SPORT CENTER*	1 KAWASAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PEMBANGUNAN BANGUNAN STRATEGIS	1 BANGUNAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PROGRAM JASA KONSTRUKSI	1.250 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BANTEN BAGUS	BANG ANDRA	PENINGKATAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU, DAN BERKELANJUTAN	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA	5.445 UNIT RUMAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BANTEN BAGUS	BANG ANDRA	PENINGKATAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU, DAN BERKELANJUTAN	PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN	PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN	3.175 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BANTEN BAGUS	BANG ANDRA	PENINGKATAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU, DAN BERKELANJUTAN	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH	301,52 HA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BANTEN BAGUS	BANG ANDRA	KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI	FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN	BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KE PONDOK PESANTREN	25 PESANTREN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	15 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	206 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN BARANG MILIK DAERAH	206 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BANTEN CERDAS	BANTEN SEMANAH	PENGUATAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DAERAH	PENEGAKAN KEBIJAKAN DAERAH DAN PENGUATAN STABILITAS KEAMANAN DAERAH	PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA	PENGUATAN RESILIENSI BENCANA	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM DI 8 KAB/KOTA	1.735 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET	215 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENGADMINISTRASIAN BARANG MILIK DAERAH	15 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BANTEN INDAH	ASIIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGUATAN MANAJEMEN BENCANA PADA KAWASAN PARIWISATA	PELATIHAN EVAKUASI MANDIRI BENCANA GEMPA (SIM) DI 8 KAB/KOTA	3.385 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BANTEN BAGUS	BANGUN ASA	PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT	BANTUAN SOSIAL	BANTUAN SOSIAL ANAK TERLANTAR BINAAN PANTI	1.000 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
BANTEN BAGUS	BANGUN ASA	PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT	BANTUAN SOSIAL	BANTUAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BINAAN PANTI	3.400 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
BANTEN BAGUS	BANGUN ASA	PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT	BANTUAN SOSIAL	BANTUAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR BINAAN PANTI	1.000 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
BANTEN BAGUS	BANGUN ASA	PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT	BANTUAN SOSIAL	BANTUAN SOSIAL KELUARGA MISKIN	171.241 KELUARGA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
BANTEN BAGUS	BANGUN ASA	PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT	BANTUAN EKONOMI	USAHA EKONOMI PRODUKTIF	4.100 KELUARGA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
BANTEN BAGUS	BANGUN ASA	PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT	PANTI TERPADU	PANTI REHABILITASI SOSIAL TERPADU	1 PANTI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN ASET PADA DINAS SOSIAL	55 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF				
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS SOSIAL	75 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
BANTEN BAGUS	BANGUN ASA	PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT	BANTUAN SOSIAL	ALAT BANTU DISABILITAS	[illegible] ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
BANTEN BAGUS	BANGUN ASA	PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN MASYARAKAT	BANTUAN SOSIAL	ALAT BANTU LANJUT USIA	[illegible] ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PRESTASI ATLET DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN KERJA SAMA KEOLAHRAGAAN DENGAN DUNIA USAHA	KEIKUTSERTAAN ATLET PADA PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	[illegible] ATLET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PRESTASI ATLET DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN KERJA SAMA KEOLAHRAGAAN DENGAN DUNIA USAHA	PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	[illegible] ATLET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PRESTASI ATLET DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN KERJA SAMA KEOLAHRAGAAN DENGAN DUNIA USAHA	PEMBINAAN ATLET PELAJAR PPLP	300 ATLET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA	PELATIHAN WIRAUSAHA MUDA	[illegible] ATLET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/ KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	170 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/ KELEMBAGAAN YANG	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN BARANG MILIK DAERAH	170 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF				
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	300 TENAGA KERJA ASING	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	6.150 UNIT ASET BMD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN ASET BARANG MILIK DAERAH	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN CERDAS	SAHDA	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	PENINGKATAN PELATIHAN KETERAMPILAN MELALUI PONDOK PESANTREN (TRADISIONAL) UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN	PELATIHAN KETERAMPILAN SANTRI BAGI PEMBANGUNAN	500 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN CERDAS	PLAT-A	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIKAN VOKASIONAL	REKOMENDASI JENIS PELATIHAN INDUSTRI UNTUK UPTD LATIHAN KERJA	5 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN RAMAH	TUNAS LOKAL	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI UPTD	SERTIFIKAT KOMPETENSI	5.000 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN RAMAH	TUNAS LOKAL	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	KEMITRAAN DENGAN INDUSTRI GUNA PENEMPATAN HASIL PELATIHAN	MOU PENEMPATAN HASIL PELATIHAN	250 PERUSAHAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN RAMAH	TUNAS LOKAL	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	PENINGKATAN TENAGA INSTRUKTUR PENGAJAR YANG BERKOMPETEN	INSTRUKTUR DI UPTD LATIHAN KERJA	25 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN RAMAH	TUNAS LOKAL	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	KONSEP PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGUTAMAKAN TENAGA KERJA LOKAL BANTEN	PEMAGANGAN BERBASIS PENERIMA	1.500 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN RAMAH	TUNAS LOKAL	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN)	PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN)	2.030 PERUSAHAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN RAMAH	TUNAS LOKAL	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	PEMERIKSAAN PERUSAHAAN BERDASARKAN NORMA KETENAGAKERJAAN	PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	17.390 PERUSAHAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN RAMAH	ZONA BERLOK	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	OPTIMALISASI DAN REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI (BLKI)	SARANA DAN PRASARANA DI UPTD LATIHAN KERJA	5 PAKET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN RAMAH	ZONA BERLOK	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN (SILOKER), JOB FAIR, DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	PENCARI KERJA YANG DIBERDAYAKAN DAN DITEMPATKAN	176.310 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN CERDAS	PLATA	MENINGKATNYA PERAN SERTA PENDUDUK USIA KERJA DALAM PEREKONOMIAN	IDENTIFIKASI PELATIHAN YANG DIBUTUHKAN OLEH INDUSTRI	PEMBANGUNAN BLKI PADA WKP II DAN III	2 GEDUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	RUANG BERSAMA INDONESIA (RBI)	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN	1.500 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	RUANG BERSAMA INDONESIA (RBI)	LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DAN DAYCARE	250 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	RUANG BERSAMA INDONESIA (RBI)	PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI DESA DAN KELURAHAN	40 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	RUANG BERSAMA INDONESIA (RBI)	PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI DESA DAN KELURAHAN	40 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	RUANG BERSAMA INDONESIA (RBI)	PENGUATAN PROVINSI LAYAK ANAK	40 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	PENYEDIAAN SHELTER DENGAN LAYANAN PSIKOLOGIS, MEDIS, DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN	LAYANAN KOMPREHENSIF BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN	250 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	PENYEDIAAN SHELTER DENGAN LAYANAN PSIKOLOGIS, MEDIS, DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN	LAYANAN KOMPREHENSIF BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN	150 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	PEMANFAATAN RUANG PUBLIK UNTUK EDUKASI DAN KONSELING KB DI TINGKAT DESA	APLIKASI RUMAH DATA KEPENDUDUKAN	40 LAPORAN	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	PEMANFAATAN RUANG PUBLIK UNTUK EDUKASI DAN KONSELING KB DI TINGKAT DESA	PENGUATAN TRIBINA KELUARGA BKB, BKR, BKL DAN UPPKA DI DESA/KELURAHAN	40 LAPORAN	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
BANTEN SEHAT	PASKIN KITA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA YANG INKLUSIF	PENYEDIAAN ALAT PERAGA PENUNJANG EDUKASI DAN KONSELING KB	KIE DALAM KESERTAAN BER-KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI	10 LAPORAN	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	OPTIMALISASI PENDUKUNG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PENYUSUNAN PROFIL DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	450 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/ KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN ASET MILIK DAERAH	10 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KETAHANAN PANGAN	PENYEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN	11 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN RESILIENSI TERHADAP BENCANA	PENGUATAN KETERSEDIAAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN	PENGADAAN CADANGAN PANGAN DAN DIVERSIFIKASI PANGAN	1.000 TON	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN	GERAKAN PANGAN MURAH, DAN FASILITASI KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN	[illegible] LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	118 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	118 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON YANG BERKELANJUTAN	PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENURUNAN EMISI GRK	PEMBINAAN TERHADAP DESA PROKLIM SERTA PENANGANAN SAMPAH SPESIFIK ATAU PADA KONDISI KHUSUS	200 DESA PROKLIM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI YANG BERKELANJUTAN SERTA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN	PEMBINAAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKU USAHA, PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI PRIORITAS, SERTA PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT	958 ENTITAS	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	REHABILITASI LAHAN DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERHUTANAN SOSIAL	25.225 HA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON YANG BERKELANJUTAN	PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN YANG MENDUKUNG PENURUNAN EMISI GRK	PENGELOLAAN KAWASAN TAHURA BANTEN SERTA PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM	2.985,51 HA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
BANTEN RAMAH	ZONA SEHIJE	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN EKONOMI SIRKULAR PADA KAWASAN INDUSTRI	REKOMENDASI DAN/ATAU PERSETUJUAN TEKNIS, PERSETUJUAN LINGKUNGAN,	140 PERUSAHAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
				DAN SURAT KELAYAKAN OPERASI YANG DIBERIKAN		
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PEMBANGUNAN TAMAN HUTAN RAYA	REVITALISASI TEMPAT EKOWISATA	100 UNIT SARANA DAN PRASARANA DI TAHURA BANTEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGELOLAAN SAMPAH DI PUSAT-PUSAT DESTINASI WISATA DAN PEMBUATAN BANK SAMPAH OLEH MASYARAKAT SEKITAR	PEMBUATAN BANK SAMPAH OLEH MASYARAKAT SEKITAR	100 LEMBAGA BANK SAMPAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BANTEN BAGUS	BERSAMA AS-DIM	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PEMBENTUKAN UPT PENGELOLA SAMPAH	PEMBENTUKAN UPT PENGELOLA SAMPAH	1 UPT PENGELOLA SAMPAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BANTEN BAGUS	BERSAMA AS-DIM	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PENGELOLAAN TPST REGIONAL	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PADA TPST REGIONAL	2 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PENGELOLAAN TAHURA BANTEN BERBASIS PELAYANAN KONSERVASI	1 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/ KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN ASET DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	DIGITALISASI PELAYANAN UJI LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN YANG TERINTEGRASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JASA PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	2 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN BAGUS	DESA TANGGUH	PENINGKATAN DESA MANDIRI	BANTUAN DANA DESA	PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA	5 KEGIATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BANTEN BAGUS	DESA TANGGUH	PENINGKATAN DESA MANDIRI	KERJA SAMA DESA	OPTIMALISASI KERJA SAMA ANTAR DESA YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI	15 DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BANTEN BAGUS	DESA TANGGUH	PENINGKATAN DESA MANDIRI	KERJA SAMA DESA	PEMBANGUNAN PUSAT PELAYANAN DESA SEJAHTERA (POSYANDU, PKK, KARANG TARUNA, LPM, BUMDES, TEKNOLOGI TEPAT GUNA)	22.115 LKD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BANTEN INDAH	ASTIS	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PEMBINAAN BUMDES YANG BERGERAK DALAM DESA WISATA	PEMBINAAN BUMDES DESA WISATA DI PROVINSI BANTEN	82 DESA WISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN ASET	1 TAHUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	4 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BANTEN BAGUS	BASATA	PENINGKATAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL (SAUM) DI SERANG METROPOLITAN AREA	SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL (SAUM) DI SERANG METROPOLITAN AREA	5 KORIDOR 1. TERM. PAKUPATAN – (INTRA SINDANGSARI) 2. TERM. CIPOCOK-TERM. KALIJAGA [illegible] 3. BANTEN LAMA - BAROS 4. TERM. PAKUPATAN-PCI 5. TERM. PAKUPATAN - CIKANDE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BANTEN BAGUS	BASATA	PENINGKATAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	8.483 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN BAGUS	HABATA	PENINGKATAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	RANCANA PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	1 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BANTEN BAGUS	HABATA	PENINGKATAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI	PEMBANGUNAN TERMINAL	PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE B MAJA, KAB. LEBAK	1 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BANTEN NYAMAN	ZONA SERLOK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PEMBANGUNAN PELABUHAN PETI KEMAS	PEMBANGUNAN PELABUHAN PETI KEMAS	5 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BANTEN INDAH	BANG SONI	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PEMBANGUNAN PELABUHAN WISATA	PEMBANGUNAN PELABUHAN WISATA SUMUR	1 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BANTEN INDAH	BANG SONI	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	MODA TRANSPORTASI MENUJU DESTINASI WISATA	PENYEDIAAN MODA ANGKUTAN WISATA	2 RUTE 1. TERM. PAKUPATAN – KP3B-PALIMA – KEBON JAHE – CIRACAS – KEPANDEAN – KRAMATWATU – TASIKARDI – BANTEN LAMA — PP 2. TERM. PAKUPATAN – JL. SUDIRMAN – JL. A. YANI – VETERAN – ALUN-ALUN KOTA SERANG – KELAPA DUA – KASEMEN – BANTEN LAMA — PP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PENYEDIAAN MODA TRANSPORTASI SISWA	PENYEDIAAN MODA TRANSPORTASI SISWA	2 RUTE 1. CIOMAS-SERANG (KOTA) 2. KASEMEN - SERANG (KOTA)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	5 PAKET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
BANTEN MELAYANI	TERCHOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	5 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	PENGUATAN SUPER APPS LAYANAN PEMERINTAHAN BAGI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN JAWARA BANTEN COMMAND CENTRE	APLIKASI KHUSUS YANG DIBANGUN DAN/ATAU DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ATAU REGULASI TENTANG STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE	5 APLIKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	PENGUATAN SUPER APPS LAYANAN PEMERINTAHAN BAGI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN JAWARA BANTEN COMMAND CENTRE	1. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DIGITAL 2. PENGEMBANGAN PUSAT DATA	35 PERANGKAT DAERAH DAN 1 PUSAT DATA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	PENGUATAN SUPER APPS LAYANAN PEMERINTAHAN BAGI MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN JAWARA BANTEN COMMAND CENTRE	AKSES INTERNET PERANGKAT DAERAH	33 PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	PUBLIKASI PENYEBARAN INFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI BERBAGAI MEDIA (MEDIA CETAK, TV, RADIO, MEDIA ONLINE, MEDIA LUAR RUANG)	5 MEDIA PROMOSI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	KONTEN INFORMASI PEMBANGUNAN	2000 KONTEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	PENGELOLAAN PPID UTAMA	250 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DISELESAIKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	FASILITASI TATA KELOLA KOMISI INFORMASI	5 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	FASILITASI HIBAH	5 LEMBAGA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN SATU DATA INDONESIA (SDI)	PEMENUHAN DATA BERDASARKAN DAFTAR DATA FORUM SDI	PEMENUHAN DATA BERDASARKAN DAFTAR DATA FORUM SDI (70%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	OPTIMALISASI KEAMANAN SISTEM DAN DATA DIGITAL	LAPORAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN INFORMASI	1 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	157 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	OPTIMALISASI KEAMANAN SISTEM DAN DATA DIGITAL	PENYELENGGARAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI	32 PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	OPTIMALISASI KEAMANAN SISTEM DAN DATA DIGITAL	DOKUMEN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI	2 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DIGITAL	250 TITIK INTERNET	250 TITIK INTERNET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	LITERASI DIGITAL BAGI MASYARAKAT	PENYULUHAN LITERASI DIGITAL UNTUK WARGA/PELAJAR/ MAHASISWA 8 KAB/KOTA	8 KAB/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BANTEN CERDAS	SABDA	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	PENINGKATAN PELATIHAN KETERAMPILAN LULUSAN PONDOK PESANTREN (TRADISIONAL) UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN	KOPERASI YANG MENDAPATKAN DIKLAT SDM PERKOPERASIAN	500 KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENGEMBANGAN PANGAN AKUATIK (BLUE FOOD)	PEMBERDAYAAN UMKM PENGOLAHAN PANGAN LOKAL	KOPERASI YANG MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	500 KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENGEMBANGAN PANGAN AKUATIK (BLUE FOOD)	PEMBERDAYAAN UMKM PENGOLAHAN PANGAN LOKAL	PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	400 USAHA KECIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENGEMBANGAN PANGAN AKUATIK (BLUE FOOD)	PEMBERDAYAAN UMKM PENGOLAHAN PANGAN LOKAL	PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN USAHA	400 USAHA KECIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN INDAH	ASIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PEMBINAAN UKM PENDUKUNG PARIWISATA	PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN USAHA	600 USAHA KECIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN RAMAH	BANTU TUKAR	PENINGKATAN STABILITAS EKONOMI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	BANTUAN DAN DUKUNGAN KEMUDAHAN AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN/PERMODALAN	KOPERASI YANG MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN	500 KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN RAMAH	BANTU TUKAR	PENINGKATAN STABILITAS EKONOMI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	BANTUAN DAN DUKUNGAN KEMUDAHAN AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN/PERMODALAN	PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	600 USAHA KECIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN RAMAH	BANTU TUKAR	PENINGKATAN STABILITAS EKONOMI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	BANTUAN DAN DUKUNGAN KEMUDAHAN AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN/PERMODALAN	PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN USAHA	500 USAHA KECIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN EKONOMI KERAKYATAN	DUKUNGAN OPERASIONALISASI KOPERASI MERAH PUTIH SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN	KOPERASI YANG MEMILIKI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100 KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN EKONOMI KERAKYATAN	DUKUNGAN OPERASIONALISASI KOPERASI MERAH PUTIH SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN	KOPERASI YANG MENINGKAT AKUNTABILITAS, KEPERCAYAAN, KEPATUHAN, KESINAMBUNGAN, DAN TERBENTUKNYA KOPERASI YANG KUAT, SEHAT, MANDIRI, TANGGUH, SERTA AKUNTABEL.	500 KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN EKONOMI KERAKYATAN	DUKUNGAN OPERASIONALISASI KOPERASI MERAH PUTIH SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	500 KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN EKONOMI KERAKYATAN	DUKUNGAN OPERASIONALISASI KOPERASI MERAH PUTIH SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	100 KOPERASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN PERAN SERTA PENDUDUK USIA ANGKATAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN	PENYEDIAAN TEMPAT PELATIHAN (PLUT/INKUBASI)	PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI PLUT/INKUBASI	600 USAHA KECIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN ASET DINAS KOPERASI DAN UKM	175 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF				
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENDATAAN ASET DINAS KOPERASI DAN UKM	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BANTEN RAMAH	KAMI USAHA	PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS INVESTASI	OPTIMALISASI LAYANAN PERIZINAN MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN SIBIKA	PELAYANAN PERIZINAN ON THE SPOT	3.250 PELAKU USAHA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
BANTEN RAMAH	KAMI USAHA	PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS INVESTASI	PROMOSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI KERJA SAMA INVESTOR DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI, DAN PENGENDALIAN REALISASI INVESTASI	KEGIATAN PROMOSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH	50 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
BANTEN RAMAH	KAMI USAHA	PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS INVESTASI	PROMOSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI KERJA SAMA INVESTOR DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI, DAN PENGENDALIAN REALISASI INVESTASI	DOKUMEN *INVESTMENT PROJECT READY TO OFFER* (IPRO)	5 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
BANTEN RAMAH	KAMI USAHA	PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS INVESTASI	PROMOSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI KERJA SAMA INVESTOR DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI, DAN PENGENDALIAN REALISASI INVESTASI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPADA PELAKU USAHA	227 PELAKU USAHA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
BANTEN RAMAH	KAMI USAHA	PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS INVESTASI	PROMOSI INVESTASI PRODUK UNGGULAN DAERAH MELALUI KERJA SAMA INVESTOR DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI, DAN PENGENDALIAN REALISASI INVESTASI	KEBIJAKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG INVESTASI	5 DOKUMEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG	157 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PENGUATAN LITERASI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN DAYA TARIK KUNJUNGAN MASYARAKAT KE PERPUSTAKAAN	MENINGKATNYA PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PROVINSI	271.556 PEMUSTAKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
BANTEN CERDAS	MASA BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PENGUATAN LITERASI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN DAYA TARIK KUNJUNGAN MASYARAKAT KE PERPUSTAKAAN	MENINGKATNYA LITERASI MASYARAKAT	16.000 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	PEMBANGUNAN DEPOT ARSIP SERTA PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP DIGITAL BERBASIS AWAN	TERSEDIANYA GEDUNG DEPOT ARSIP	1 GEDUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	PEMBANGUNAN DEPOT ARSIP SERTA PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP DIGITAL BERBASIS AWAN	TERSEDIANYA CLOUD ARSIP DIGITAL	10 TERABYTE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	57 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN ASET BARANG MILIK DAERAH	50 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN MODERNISASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN	BANTUAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	[illegible] KUB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN MODERNISASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN	BANTUAN [illegible] DAN BUDIDAYA KEKERANGAN/RUMPUT LAUT	[illegible] UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN HIJAU	EKO ERA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON YANG BERKELANJUTAN	KONSERVASI LAUT	PEMELIHARAAN/KONSERVASI TERUMBU KARANG	10 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM UNGGULAN	**PROGRAM TURUNAN**	**PRIORITAS PEMBANGUNAN**	**INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS**	**URAIAN**	**TARGET 5 TAHUN**	**URUSAN**
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN YANG SEMAKIN MENURUN	DUKUNGAN OPTIMALISASI KARTU NELAYAN (ASURANSI DAN BANTUAN)	ASURANSI NELAYAN	25.000 ASURANSI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	OPTIMALISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BENIH IKAN (BBI), PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN BINUANGEUN, LABUAN, CITUIS, DAN PELABUHAN POTENSIAL LAINNYA; SERTA DUKUNGAN MODERNISASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN	OPTIMALISASI BALAI BENIH IKAN	2 UNIT BALAI BENIH IKAN (CURUGHARANG DAN CIGONDONG)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PASAR IKAN RAKYAT DI CITUIS, BINUANGEUN, PANIMBANG, DAN KRONJO	PEMELIHARAAN SARPRAS PELABUHAN PERIKANAN DAN PASAR IKAN	3 PELABUHAN PERIKANAN DAN PASAR IKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN MAKMUR	TAMU	KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN YANG SEMAKIN MENURUN	PENGUATAN MANAJEMEN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) DAN HIMPUNAN NELAYAN YANG TERINTEGRASI DENGAN KOPERASI MERAH PUTIH	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI FASILITASI AKSES PERMODALAN USAHA MELALUI KERJA SAMA DENGAN PIHAK PERBANKAN SERTA OPTIMALISASI PETUGAS PENDAMPING USAHA PELAKU PERIKANAN DAN PENYULUH PERIKANAN	540 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (OPERASIONAL PABRIK ES) DAN SUMBER RETRIBUSI LAINNYA	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	DIGITALSASI PELAYANAN UJI MUTU HASIL PERIKANAN	DIGITALISASI PELAYANAN UJI MUTU HASIL PERIKANAN	1 APLIKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASSET DAERAH	3 PELABUHAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI,	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASSET DAERAH	7 BIDANG ASET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF				
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN	PENATAAN PARIWISATA ALAM	10 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN	PENATAAN DESTINASI WISATA UNGGULAN	10 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN	PENGEMBANGAN WISATA RELIGI	15 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	BANG SONI	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN LAYANAN TAMBAHAN (*ANCILLARY SERVICES*) DAN PAKET WISATA YANG TERSEDIA (*AVAILABLE PACKAGE*)	PROMOSI PAKET WISATA (KOLABORASI DENGAN *TRAVEL AGENT*)	10 PROMOSI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	BANG SONI	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN LAYANAN TAMBAHAN (*ANCILLARY SERVICES*) DAN PAKET WISATA YANG TERSEDIA (*AVAILABLE PACKAGE*)	GEBYAR WISATA BANTEN	5 EVENT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN	PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA	500 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN GEOPARK, TAMAN HUTAN RAYA, DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TAHURA/GEOPARK/KEK	5 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN ATRAKSI (*ATTRACTION*), AMENITAS (*AMENITIES*), DAN AKTIVITAS (*ACTIVITY*) PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	PERTUNJUKAN KESENIAN LOKAL DI KSPP	10 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN ATRAKSI (*ATTRACTION*), AMENITAS (*AMENITIES*), DAN AKTIVITAS (*ACTIVITY*) PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	GERAKAN PESONA WISATA BANTEN	10 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN ATRAKSI (*ATTRACTION*), AMENITAS (*AMENITIES*), DAN AKTIVITAS (*ACTIVITY*) PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PARIWISATA	50 LOKASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN INDAH	ASIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN PERTUNJUKAN BUDAYA LOKAL (RELIGI, ALAM, DAN BUATAN)	PROMOSI WISATA UNGGULAN (ALAM, BUDAYA, RELIGI, DAN BUATAN)	25 OBJEK WISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN INDAH	ASIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN PERTUNJUKAN BUDAYA LOKAL (RELIGI, ALAM, DAN BUATAN)	FASILITASI EVENT BUDAYA LOKAL	35 EVENT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN PUSAT-PUSAT DESTINASI WISATA	FESTIVAL EKRAF BANTEN	5 EVENT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN PUSAT-PUSAT DESTINASI WISATA	PENGEMBANGAN SDM EKONOMI KREATIF	500 ORANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PARIWISATA	106 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PARIWISATA	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DIVERSIFIKASI PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN	PENGEMBANGAN PADI BIOSALIN, PADI BIOFORTIFIKASI, JAGUNG, DAN TALAS BENENG	10.450 HA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN MODERNISASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1.124 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN MAKMUR	BANTEN MAKMUR	KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN YANG SEMAKIN MENURUN	DUKUNGAN OPTIMALISASI KARTU TANI	ASURANSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN	5.000 HA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PETANI MELALUI TEKNIK PERTANIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA PENGGUNAAN BENIH UNGGUL DAN PUPUK RAMAH LINGKUNGAN	INTENSIFIKASI PADI DAN PENGEMBANGAN PADI ORGANIK	30.898 HA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PENYULUH PERTANIAN NON PEMERINTAH YANG	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PENYULUH PERTANIAN	500 PENYULUH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
			ADAPTIF DENGAN TEKNIK PERTANIAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN			
BANTEN MAKMUR	TAMU	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	REVITALISASI IRIGASI TEKNIS DAN IRIGASI PERPOMPAAN, PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN	PENYEDIAAN SUMUR DAN POMPA PERTANIAN	175 KELOMPOK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN MAKMUR	TAMU	KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN YANG SEMAKIN MENURUN	PENGUATAN MANAJEMEN (GAPOKTAN) DAN HIMPUNAN NELAYAN YANG TERINTEGRASI DENGAN KOPERASI MERAH PUTIH	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI	150 POKTAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN RAMAH	ZONA SERUK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN SAWIT DAN KELAPA DI DAERAH PENGHASIL	PENGEMBANGAN KELAPA	111 HA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN MELAYANI	TERODOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT HEWAN, KLINIK HEWAN, LAB UJI KESMAVET, LAB UJI PAKAN DAN INSTALASI TERNAK	1 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN MELAYANI	TERODOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	PENGEMBANGAN/PEMELIHARAAN APLIKASI PELAYANAN PUBLIK	1 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN MELAYANI	TERODOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI KEUANGAN DAERAH (RUMAH SAKIT HEWAN DAN LAB KESWAN/KESMAVET) DAN SUMBER RETRIBUSI LAINNYA	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN MELAYANI	TERODOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PADA DINAS PERTANIAN PROV. BANTEN	10 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
BANTEN KUAT	EKO EBA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR LISTRIK BAGI MASYARAKAT	PELAKSANAAN BANTUAN INSTALASI RUMAH (IR) DAN SAMBUNGAN RUMAH (SR) UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU	42.500 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON YANG BERKELANJUTAN	PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN (SEPERTI PLTMH, PLTS, PLTBM, DLL)	PEMBANGUNAN PLTS ATAP DI GEDUNG KANTOR OPD DAN BUMD PROVINSI BANTEN DAN FASILITASI PEMBANGUNAN SPKLU	40 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BANTEN KUAT	EKO ERA	PENINGKATAN LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR	PENGENDALIAN DAN MONITORING TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN YANG LEBIH INTENSIF	PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN MONITORING TERHADAP SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP)	86 UNIT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BANTEN INDAH	ASOK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGEMBANGAN GEOPARK (UJUNG KULON, BAYAH DOME, DAN RAWADANU)	PELAKSANAAN INVENTARISASI KERAGAMAN GEOLOGI (GEODIVERSITY) DI PROVINSI BANTEN	19 KECAMATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK	PENGEMBANGAN APLIKASI PELAYANAN DAN INFORMASI KETENAGALISTRIKAN, KEGEOLOGIAN, AIR TANAH, DAN MINERBA	PELAKSANAAN PENGEMBANGAN APLIKASI PELAYANAN DAN INFORMASI KETENAGALISTRIKAN, KEGEOLOGIAN, AIR TANAH DAN MINERBA	1 SISTEM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN GENERATOR SET DAN GARDU LISTRIK KP3B	2 UNIT GENSET 8 UNIT GARDU LISTRIK KP3B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN MONITORING ASET	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BANTEN RAMAH	ZONA SEBLOK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PADAT KARYA DAN INTEGRASI IKM DALAM RANTAI PASOK INDUSTRI BESAR	KEMITRAAN INDUSTRI	100 IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
BANTEN RAMAH	ZONA SEBLOK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	HILIRISASI INDUSTRI SAWIT DAN KELAPA	KEMITRAAN INDUSTRI INTEGRASI RANTAI PASOK	100 IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN RAMAH	ZONA BERLOK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN PENGEMBANGAN KORIDOR INDUSTRI CILEGON-SERANG-TANGERANG (SEKTOR INDUSTRI PRIORITAS: INDUSTRI KIMIA, INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, DAN INDUSTRI LOGAM, BESI, DAN BAJA)	FASILITASI PENGEMBANGAN MASTERPLAN KAWASAN PENUNJANG KAWASAN INDUSTRI (INDUSTRI WILMAR, PANCAPURI, MODERN CIKANDE, CIPTA MAS, KIEC, MILENIUM)	7 KAWASAN INDUSTRI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
BANTEN RAMAH	ZONA BERLOK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN *LINK AND MATCH* DUNIA INDUSTRI DENGAN PENDIDIKAN TINGGI (UPSKILLING DAN RESKILLING)	PEMENUHAN SDM PENDIDIKAN TINGGI SESUAI KOMPETENSI INDUSTRI	125 MOU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
BANTEN RAMAH	ZONA BERLOK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	KERJA SAMA DUNIA INDUSTRI DALAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	PEMENUHAN SDM SESUAI KOMPETENSI INDUSTRI	125 MOU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
BANTEN CERDAS	GIAT-A	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PENJALINAN KERJA SAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI UNTUK MENDUKUNG PENDIDIKAN VOKASIONAL	FASILITASI KERJA SAMA DUDI DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KETENAGAKERJAAN	250 MOU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
BANTEN INDAH	ASYIK	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PEMBINAAN IKM PENDUKUNG PARIWISATA	PENINGKATAN KAPASITAS IKM	150 IKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK	5 BIDANG ASET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/ KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	1 BIDANG ASET	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	MENDUKUNG PEMBENTUKAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI (PDP)	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PDP	1 LEMBAGA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
BANTEN KUAT	EKO BANTEN	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	PELATIHAN EKSPOR BAGI UMKM	PENINGKATAN PELAKU USAHA LOKAL GO EKSPOR	210 PELAKU USAHA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI	5 LAPORAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KERJA SAMA DAERAH	KERJA SAMA DAERAH	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	5 KERJA SAMA DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERKUALITAS	EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	5 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI	KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI	PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN	5 LEMBAGA	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERINTEGRASI	FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN	HIBAH BANTUAN PONDOK PESANTREN	2 MILYAR	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN CERDAS	BBM BANTEN	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	BEASISWA PUTRA/PUTRI BANTEN	PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN SANTRI	2 MILYAR	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN HARMONISASI PRODUK HUKUM PUSAT DAN DAERAH (REPOSISI / REVIU, EVALUASI DAN FASILITASI PRODUK HUKUM YANG TIDAK RELEVAN, DSB)	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN PUSAT DAN LAYANAN BANTUAN HUKUM	5 LAPORAN, 5 DOKUMEN, 30 KASUS	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN REFORMASI BIROKRASI	21 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	DIALOG KINERJA DAN PENGUATAN INTERNALISASI BUDAYA KERJA ASN	MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN REFORMASI BIROKRASI	41 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH YANG INFORMATIF	MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN REFORMASI BIROKRASI	10 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	[illegible] TPP AKUNTABEL, UPAH PUNGUT, JASA PELAYANAN, TUNJANGAN TAMBAHAN, DAN HONOR (HONOR) BERBASIS SISTEM MERIT	TERSUSUNNYA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	25 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN KELEMBAGAAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	TERSUSUNNYA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	30 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BMD	322 UNIT	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	5 LAPORAN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	OPTIMALISASI PELAYANAN PIMPINAN	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	5 LAPORAN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	BIROKRAT YANG BERETIKA, BERINTEGRITAS DAN INOVATIF	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG TAAT ASAS SERTA PENERAPAN KONSEP INSENTIF DAN DISINSENTIF PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENGUATAN INTEGRITAS	DUKUNGAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	73 SATKER	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERUMUSAN PENINGKATAN EKONOMI SYARIAH, EKONOMI BIRU DAN EKONOMI HIJAU	3 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENINGKATAN PENDAPATAN BERSUMBER DARI KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	PENYUSUNAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BUMD JASA KEUANGAN DAN ANEKA USAHA	5 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN YANG SEMAKIN MENURUN	PERUMUSAN KEBIJAKAN KEMUDAHAN AKSES MODAL DAN KREDIT BAGI PETANI DAN NELAYAN	PENYUSUNAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	5 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BIDANG EKONOMI	MENINGKATNYA KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFLASI	5 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERUMUSAN KEBIJAKAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	OPTIMALISASI PELAYANAN PIMPINAN	FASILITASI MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	OPTIMALISASI PELAYANAN PIMPINAN	FASILITASI KEPROTOKOLAN	1 DOKUMEN	SEKRETARIAT DAERAH
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD ATAS LEMBAGA DEMOKRASI SERTA AKUNTABILITAS POKIR	JUMLAH PERDA DAN PERATURAN DPRD YANG DIFASILITASI	27 RAPERDA	SEKRETARIAT DPRD
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD ATAS LEMBAGA DEMOKRASI SERTA AKUNTABILITAS POKIR	JUMLAH KEBIJAKAN ANGGARAN YANG DIFASILITASI	15 RAPERDA APBD	SEKRETARIAT DPRD
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD ATAS LEMBAGA DEMOKRASI SERTA AKUNTABILITAS POKIR	PENGAWASAN PERATURAN DAN TLHP	10 LAPORAN	SEKRETARIAT DPRD
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD ATAS LEMBAGA DEMOKRASI SERTA AKUNTABILITAS POKIR	PEMBANGUNAN GEDUNG FRAKSI-FRAKSI	1 GEDUNG	SEKRETARIAT DPRD
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI DPRD ATAS LEMBAGA DEMOKRASI SERTA AKUNTABILITAS POKIR	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	5 POKOK PIKIRAN DPRD	SEKRETARIAT DPRD
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET	1 GEDUNG	SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF				
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	5 LAPORAN	SEKRETARIAT DPRD
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	PENYUSUNAN RKPD (MURNI DAN PERUBAHAN)	10 DOKUMEN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	FASILITASI USULAN APBN PROVINSI	5 REKOMENDASI	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	FASILITASI USULAN APBN KAB/KOTA	40 REKOMENDASI	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	PENGELOLAAN SATU DATA	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	PENYUSUNAN LKPJ	5 DOKUMEN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI,	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS	LAPORAN EVALUASI TRIWULANAN APBD PROVINSI	20 DOKUMEN	PERENCANAAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	*OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN			
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS *OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	LAPORAN EVALUASI TRIWULANAN APBN PROVINSI	20 DOKUMEN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS *OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	FASILITASI DOKUMEN PERENCANAAN KAB/KOTA	80 DOKUMEN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS *OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	FASILITASI CSR	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS *OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	FASILITASI KPBU	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS *OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	RAD DISABILITAS	4 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS *OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	PENURUNAN STUNTING	5 DOKUMEN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS *OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	PELAKSANAAN GERMAS	5 DOKUMEN	PERENCANAAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	RAD SDGS	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	RAT KEMISKINAN & LP2KD	10 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	DOKUMEN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)	1 DOKUMEN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	LAPORAN PENURUNAN TBC	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	EVALUASI (RAPOR) PENDIDIKAN	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS OUTCOME SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	RAD PANGAN DAN GIZI	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAG	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA	RAD GAS RUMAH KACA	5 LAPORAN	PERENCANAAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		AAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS *OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN			
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAG AAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BERKUALITAS SERTA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BERBASIS *OUTCOME* SECARA PERIODIK YANG TERMONITOR PIMPINAN	LAPORAN PSN	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAG AAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET	1 GEDUNG	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAG AAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	5 LAPORAN	PERENCANAAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAG AAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMBENTUKAN FORUM RISET DAN INOVASI DALAM MENGHASILKAN PENELITIAN YANG IMPLEMENTATIF	PENGHITUNGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN	5 DOKUMEN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAG AAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMBENTUKAN FORUM RISET DAN INOVASI DALAM MENGHASILKAN PENELITIAN YANG IMPLEMENTATIF	1 LAPORAN SURVEI DAN PENELITIAN IKM 1 LAPORAN INDEKS INOVASI DAERAH	5 DOKUMEN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAG AAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	REVIU DAN PENETAPAN PERGUB SBU, SHS, DAN ASB BERBASIS DIGITAL	SBU, SHS, DAN ASB	15 DOKUMEN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAG AAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI,	REVIU KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	STANDAR HARGA	5 DOKUMEN	KEUANGAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF				
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	REVIU KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	10 DOKUMEN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	REVIU KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) MURNI DAN PERUBAHAN	10 DOKUMEN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMANFAATAN ASET DAN PEMBENTUKAN UPT BERBASIS BLUD	PENGAMANAN BMD	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMANFAATAN ASET DAN PEMBENTUKAN UPT BERBASIS BLUD	PENILAIAN BMD	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMANFAATAN ASET DAN PEMBENTUKAN UPT BERBASIS BLUD	PEMANFAATAN BMD	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMANFAATAN ASET DAN PEMBENTUKAN UPT BERBASIS BLUD	PENGGUNAAN BMD	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMANFAATAN ASET DAN PEMBENTUKAN UPT BERBASIS BLUD	PENJUALAN BMD	5 LAPORAN	KEUANGAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMANFAATAN ASET DAN PEMBENTUKAN UPT BERBASIS BLUD	PEMINDAHTANGANAN BMD	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PEMANFAATAN ASET DAN PEMBENTUKAN UPT BERBASIS BLUD	PENGHAPUSAN BMD	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PENGUATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TAAT ASAS	1. LAPORAN SEMESTERAN 2. LAPORAN TRIWULANAN	30 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PENGUATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TAAT ASAS	LKPD PROVINSI BANTEN	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PENGUATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TAAT ASAS	PERDA DAN RAPERKADA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI BANTEN	10 DOKUMEN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PENGUATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TAAT ASAS	LAPORAN TPTGR	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PENGUATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TAAT ASAS	LAPORAN STATISTIK KEUANGAN	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEKOBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN	PENGUATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERATURAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	5 LAPORAN	KEUANGAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		AAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TAAT ASAS			
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PENGUATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TAAT ASAS	SOSIALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEPADA PERANGKAT DAERAH	410 ORANG	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENINGKATAN PENDAPATAN BERSUMBER DARI KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	5 LAPORAN	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENGELOLAAN DATA WAJIB PAJAK BERBASIS DIGITAL	DATABASE WAJIB PAJAK DIGITAL TERINTEGRASI	1 DATABASE	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENGELOLAAN DATA WAJIB PAJAK BERBASIS DIGITAL	SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH BERBASIS DIGITAL	5 SISTEM INFORMASI	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	SARANA DAN PRASARANA SAMSAT MOBILE	TITIK LAYANAN SAMSAT MOBILE YANG BEROPERASI	100 TITIK LOKASI	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	SARANA DAN PRASARANA SAMSAT MOBILE	LOKET SAMSAT NON TUNAI	10 UPTD	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK	SISTEM PEMBAYARAN PAJAK YANG TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIFIKASI (SEMI DIGITAL, QRIS, E-COMMERCE, MOBILE BANKING, EDC)	5 KANAL	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK	PERCEPATAN LAYANAN PKB MELALUI QR-CODE	12 UPTD	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENGUATAN INTEGRASI LAYANAN PEMBAYARAN PAJAK	PERLUASAN LAYANAN PKB 5 TAHUNAN	2 LOKASI GERAI	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENINGKATAN PENDAPATAN BERSUMBER DARI RETRIBUSI DAERAH	DATA POTENSI RETRIBUSI TERVERIFIKASI	6 JENIS RETRIBUSI	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENINGKATAN PENDAPATAN BERSUMBER DARI RETRIBUSI DAERAH	SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI BERBASIS DIGITAL (QRIS DINAMIS KE STATIS)	1 SISTEM INFORMASI	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENINGKATAN PENDAPATAN BERSUMBER DARI RETRIBUSI DAERAH	REGULASI/PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG TARIF DAN MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DIPERBARUI	1 PERKADA	KEUANGAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	PENINGKATAN PENDAPATAN BERSUMBER DARI KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	PENERIMAAN DIVIDEN DARI BUMD	4 BUMD	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN	4 OPD	KEUANGAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	*TALENT POOL* YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN SEBAGAI DASAR MUTASI, PROMOSI, DEMOSI DAN DIKLAT PEGAWAI (SISTEM MERIT)	PENILAIAN ASN MELALUI *TALENT POOL*	2000 ASN	KEPEGAWAIAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	PERUMUSAN PENATAAN KINERJA ASN YANG EFEKTIF	PENCAPAIAN NILAI KINERJA DIATAS EKSPETASI	100 PERSEN	KEPEGAWAIAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	PENGUATAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI YANG ADIL	PENINGKATAN JENJANG JABATAN UTAMA ASN BERBASIS KINERJA DAN POTENSI	475 ASN	KEPEGAWAIAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	220 UNIT	KEPEGAWAIAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	1.065 UNIT	KEPEGAWAIAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PROFESIONALITAS ASN PROVINSI BANTEN	TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN BERORIENTASI GLOBAL	ASN YANG MEMILIKI KEAHLIAN BERORIENTASI GLOBAL	12.250 ASN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	15 UNIT	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN BARANG MILIK DAERAH	15 UNIT	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF				
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	1 BANGUNAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN DIPLOMASI KELEMBAGAAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT, ASOSIASI DPRD, BADAN, DUNGK, KEDUTAAN BESAR, DAN LAINNYA	TERSELENGGARANYA HUBUNGAN DIPLOMASI	25 HUBUNGAN DIPLOMASI	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF	PENGUATAN FUNGSI SOSIAL KANTOR BADAN PENGHUBUNG	TERSELENGGARANYA FUNGSI SOSIAL	5 LAPORAN	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA	8 UNIT	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PENATAAN BARANG MILIK DAERAH	5 LAPORAN	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	OPTIMALISASI RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN ASET SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN RETRIBUSI	5 LAPORAN	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH BERKUALITAS	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SAKIP BAGI MITRA OPD	39 PERANGKAT DAERAH	PENGAWASAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI,	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG	1 GEDUNG	PENGAWASAN

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
		LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF				
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN REKON KAS, STOCK OPNAME DAN REKON ASET	5 LAPORAN	PENGAWASAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	BIROKRAT YANG BERETIKA, BERINTEGRITAS DAN INOVATIF	UNIT LAYANAN SIAP ZONA INTEGRITAS (WBK/WBBM) DAN JUMLAH UNIT LAYANAN BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS (WBK / WBBM)	PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZI KEPADA UNIT KERJA	18 UNIT KERJA	PENGAWASAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	BIROKRAT YANG BERETIKA, BERINTEGRITAS DAN INOVATIF	PENGUATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, KOORDINASI PELAKSANAAN MCSP, SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS, MONITORING LHKAN, EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN	5 KEGIATAN	PENGAWASAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	BIROKRAT YANG BERETIKA, BERINTEGRITAS DAN INOVATIF	PENGUATAN FUNGSI APIP DAN PENGUATAN PREVENTIF PADA OPD YANG TERGOLONG BERPOTENSI TINGGI PENYIMPANGAN	PENDAMPINGAN PENILAIAN MANRISK DAN PENJAMINAN KUALITAS SPIP OPD DAN PEMDA; PENGAWASAN (AUDIT, REVIU, EVALUASI, PENGAWASAN LAINNYA)	39 PERANGKAT DAERAH	PENGAWASAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	BIROKRAT YANG BERETIKA, BERINTEGRITAS DAN INOVATIF	PENGUATAN FUNGSI APIP DAN PENGUATAN PREVENTIF PADA OPD YANG TERGOLONG BERPOTENSI TINGGI PENYIMPANGAN	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK, ITJEN KEMENDAGRI DAN APIP SERTA PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU	39 PERANGKAT DAERAH	PENGAWASAN
BANTEN CERDAS	BANTEN SEMARAK	PENINGKATAN INTELEKTUAL DAN KARAKTER MASYARAKAT	PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK ANTI KORUPSI	PENDIDIKAN PENYULUH ANTI KORUPSI	5 LAPORAN	PENGAWASAN
BANTEN CERDAS	BANTEN SEMARAK	PENGUATAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DAERAH	PENGUATAN HARMONISASI STABILITAS KEAMANAN, SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, KEBERAGAMAAN, DAN LEMBAGA DEMOKRASI	PEMBINAAN KARAKTER PANCASILA	[illegible] ORANG	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BANTEN CERDAS	BANTEN SEMARAK	PENGUATAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DAERAH	PENGUATAN HARMONISASI STABILITAS KEAMANAN, SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA	PENINGKATAN ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	[illegible] ORANG	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 TAHUN	URUSAN
			KEBERAGAMAAN, DAN LEMBAGA DEMOKRASI			
BANTEN CERDAS	BANTEN SEMARAK	PENGUATAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DAERAH	PENGUATAN HARMONISASI STABILITAS KEAMANAN, SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, KEBERAGAMAAN, DAN LEMBAGA DEMOKRASI	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.550 ORANG	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BANTEN CERDAS	BANTEN SEMARAK	PENGUATAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DAERAH	PENGUATAN HARMONISASI STABILITAS KEAMANAN, SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, KEBERAGAMAAN, DAN LEMBAGA DEMOKRASI	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.570 ORANG	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BANTEN CERDAS	BANTEN SEMARAK	PENGUATAN PANCASILA DAN DEMOKRASI DAERAH	PENGUATAN HARMONISASI STABILITAS KEAMANAN, SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, KEBERAGAMAAN, DAN LEMBAGA DEMOKRASI	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.000 ORANG	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BANTEN MELAYANI	TERUROS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET	1 KEGIATAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BANTEN MELAYANI	TERUROS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEMBAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	5 LAPORAN	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: Diolah Oleh Bappeda, 2025

Keterangan:

Daftar Indikasi Kegiatan prioritas beserta urusannya merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ditambah berdasarkan evaluasi pelaksanaan terhadap kegiatan maupun urusan yang ada khususnya untuk memenuhi peraturan yang berlaku dan berdasarkan kemajuan kegiatan termasuk terhadap kemajuan penanganan dan berdasarkan persetujuan Gubernur Banten.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Provinsi Banten sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan Tahun 2025-2030 maka, perlu dirumuskan program perangkat daerah sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program pembangunan daerah disusun untuk menunjukkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a. Penjabaran Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045;
b. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
c. Pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
d. Penerapan sub bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
e. Program mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan peraturan turunannya.

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Rencana program perangkat daerah Provinsi Banten untuk periode Tahun 2025-2029 merujuk kepada aturan yang berlaku, dimana program dimaksud merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Provinsi Banten, serta unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan dan unsur pemerintahan umum.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025-2029, dalam proses perumusan terhadap penyusunan program pembangunan yang akan disertai pagu indikatif yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Banten. Pendanaan program pembangunan berdasarkan urusan, bidang urusan, dan perangkat daerah untuk dapat menjawab visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelesaian permasalahan dan isu strategis lima tahun mendatang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	34,45	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	34,45	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	34,45	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
TERWUJUDNYA PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 (%)	71,44	72,30	73,30	[illegible]	74,30	[illegible]	75,30	[illegible]	76,30	[illegible]	77,30	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KAB LEBAK (%)	62,26	63	64		65		66		67		68		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KAB PANDEGLANG (%)	56,76	58	60		62		63		64		66		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG	73,6	74	75		76		77		78		80		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	DAN KAB SERANG (%)													
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KAB TANGERANG (%)	65,15	73	74		75		76		77		78		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN (%)	82,35	87,00	88,00		89		90		91		92		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
TERWUJUDNYA PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH	NILAI INDEKS INKLUSIVITAS SMA (NILAI)	59,72	62,22	63,72	[illegible]	65,22	[illegible]	66,72	[illegible]	68,22	[illegible]	69,72	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS INKLUSIVITAS SMK (NILAI)	55,91	58,21	60,51		62,81		65,11		67,41		69,71		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS KEAMANAN SMA (NILAI)	77,87	80,57	82,17		83,52		84,87		85,77		86,58		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS KEAMANAN SMK (%)	67,6	68,8	70,00		71,20		72,40		73,60		74,80		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS KEBHINEKAAN SMA (NILAI)	71,04	72,04	73,04		74,04		75,04		76,04		77,04		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														PENDIDIKAN
	NILAI RAPOR PENDIDIKAN SMK (NILAI)	67,32	68,82	69,92		71,22		72,52		73,82		75,12		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE LULUSAN SMK YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KEAHLIAN (%)	72,14	73,00	75,04		76,41		78,2		79,40		81,40		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE PENYERAPAN LULUSAN SMK (%)	82,22	83,41	84,60		85,78		86,97		87,92		89,04		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	75,77	79,11	81,96		83,97		85,98		87,99		90		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	76,76	79,98	82,05		85,15		87,86		89,35		91,70		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	69,35	75,01	77,35		81,26		83,92		86,57		91,70		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI	57,26	64,15	66,15		70,86		73,82		78,33		81,83		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	KOMPETENSI MINIMUM DI													PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KABUPATEN LEBAK (NILAI)	58.29	59.45	60.65		61.85		63.05		64.27		65.49		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KABUPATEN LEBAK (NILAI)	33.6	34.40	36		37.20		38.4		39.6		40.8		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KABUPATEN LEBAK (NILAI)	72.77	72.18	73.26		73.82		74.26		74.82		75.40		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KABUPATEN LEBAK (NILAI)	56.26	56.56	57.12		57.67		58.26		59.35		59.96		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KAB. LEBAK (NILAI)	71.26	71.85	72.01		72.24		72.77		73.11		73.46		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. LEBAK (NILAI)	66.67	66.9	67.22		67.49		67.77		68.00		68.24		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK (%)	68.54	69.74	71.09		71.89		72.91		74.21		75.31		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM [illegible] (%)	55.6	56.55	57.57		58.30		59.27		59.29		61.11		DINAS/[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM [illegible] (%)	65.26	66.05	67.20		68.14		68.46		69.12		69.27		DINAS/[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM [illegible] (%)	37.05	38.05	38.66		39.14		39.22		39.9		31.42		DINAS/[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG (NILAI)	58.24	59.84	61.04		62.24		63.44		64.64		65.84		DINAS/[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG (NILAI)	53.17	52.80	53.16		53.79		55.48		55.78		56.11		DINAS/[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS KEAMANAN SMA WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG (NILAI)	70.72	70.82	71.04		71.44		71.86		72.28		72.32		DINAS/[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS KEAMANAN SMK WILAYAH KABUPATEN	66.01	66.79	67.18		67.78		68.34		69.03		70.08		DINAS/[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	EN PANDEGLANG (NILAI)													PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KAB. PANDEGLANG (NILAI)	70.94	71.15	71.49		71.72		71.93		72.18		72.39		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. PANDEGLANG (NILAI)	65.75	66.05	66.30		66.64		67.27		67.51		68.04		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	67.78	69.52	71.27		72.27		72.7		73.49		74.22		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	43.82	44.39	45.12		45.54		46.05		46.60		47.14		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	18.91	19.27	20.11		20.87		21.73		22.54		23.30		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA SMK DENGAN KEMAMPUAN LITERASI MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI SMK	35.28	36.34	37.35		38.35		39.41		39.81		41.73		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	DAN PANDEGLANG (NI													
	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KAB SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON (NILAI	55.50	57.15	62.35		63.55		64.75		65.95		67.15		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KOTA SERANG, KAB SERANG, KOTA CILEGON (NILAI	55.80	57	58.20		59.40		60.60		61.80		63		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KOTA SERANG, KAB SERANG, KOTA CILEGON (NILAI	71.45	71.74	72.29		72.84		73.22		73.94		74.34		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KOTA SERANG, KAB SERANG, KOTA CILEGON (NILAI	67.82	68.11	68.76		69.32		70.06		70.65		71.20		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KAB SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON (NILAI)	71.77	72.06	72.35		72.12		73.45		74		74.55		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON (NILAI	57.50	57.92	58.20		58.39		58.52		58.70		58.87		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA	75.90	76.23	76.85		78.22		79.11		80.31		81.51		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)													PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	58.41	60.75	62.04		63.60		65.85		66.45		68.65		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	70.37	71.02	71.61		72.04		72.72		73.18		73.68		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	59.77	60.12	60.36		61.34		62.41		63.28		64.12		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KABUPATEN TANGERANG (NILAI)	59.06	60.26	61.46		62.66		63.86		65.06		66.26		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KABUPATEN	56.17	56.37	57.57		58.77		59.97		61.17		62.37		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	TANGERANG (NILAI)													PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KABUPATEN TANGERANG (NILAI)	65.61	70.26	70.52		71.05		71.78		72.53		73.51		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KABUPATEN TANGERANG (NILAI)	66.27	67.02	67.72		68.26		68.72		69.18		69.64		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KABUPATEN TANGERANG (NILAI)	70.20	70.46	71.00		71.47		72.06		72.44		73.07		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. TANGERANG (NILAI)	56.15	56.56	57.26		57.72		58.17		58.48		58.87		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)	71.56	72.10	74.21		75.70		77.06		78.30		79.61		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)	57.09	70.38	81.56		83.10		84.77		86.53		88.32		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA	70.00	70.56	71.20		72.08		72.82		73.40		73.94		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB TANGERANG (%)													PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB TANGERANG (%)	37.90	38.55	39.11		39.66		50.53		51.50		52.58		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN (NILAI)	65.20	66.40	67.00		68.60		70.02		71.31		72.41		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN (NILAI)	59.50	60.07	60.71		61.30		61.90		62.34		63.13		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS KEAMANAN SMA WILAYAH KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN (NILAI)	74.76	75.18	75.67		76.22		76.76		77.26		78.02		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS KEAMANAN SMK WILAYAH KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN (NILAI)	70.46	70.97	71.43		71.95		72.44		72.90		73.35		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS KEBHINEKAAN SMA KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN (NILAI)	75.11	75.37	75.87		76.45		76.76		76.96		77.06		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI INDEKS KEBHINEKAAN SMK	69.50	70.22	70.46		70.82		71.34		71.62		72.34		DINAS/BADAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN (NILAI)													MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	91.25	91.56	92.04		92.11		92.98		93.12		93.82		DINAS PENDIDIKAN DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	76.86	77.89	78.92		79.96		81.00		82.23		83.50		DINAS PENDIDIKAN DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	87.51	88.15	88.81		89.47		90.10		90.39		91.20		DINAS PENDIDIKAN DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	72.44	73.46	74.16		75.05		76.30		77.35		77.91		DINAS PENDIDIKAN DAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
TERWUJUDNYA	ANGKA PARTISIPASI	91,32	92	92,5	[illegible],00	93	[illegible],00	93,5	[illegible],00	94	[illegible],00	94,5	[illegible],00	DINAS PENDIDIKAN DAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN KHUSUS	[illegible] (APS) [illegible] DISABILITAS (%)													MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
TERSELENGGARANYA PEMERATAAN MUTU PEMBELAJARAN LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SKH (NILAI)	52,97	54,22	55,82	[illegible]	57,42	[illegible]	59,02	[illegible]	70,55	[illegible]	72,22	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEAMANAN SKH (NILAI)	65,11	66,41	67,71		69,01		70,31		71,61		72,91		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SKH (NILAI)	69,26	70,26	71,26		72,26		73,26		74,26		75,26		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	30,14	31,26	33,01		36,75		40,33		43,35		46,40		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM (%)	58,61	60,55	63,55		68,72		71,95		73,45		75,45		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DENGAN GERAK CEPAT (%)	44,37	47,34	47,64		48,08		48,44		48,76		49,11		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK (%)	56.57	56.90	57.28		57.59		58.03		58.31		59.26		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI ANK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	58.22	58.15	58.48		59.21		59.94		61.30		63.89		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG (%)	66.97	67.05	67.71		68.25		69.22		69.8		70.45		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI ANK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	72.00	72.26	72.81		73.12		73.82		74.19		74.39		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB SERANG (%)	56.67	57.02	57.58		57.82		58.28		58.17		58.37		DINAS/DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN	10.32	11.10	12.13		12.37		12.72		12.82		13.11		DINAS/DINAS YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	KEMAMPUAN LITERASI SMP MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)													MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMP MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMP MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMP MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN (%)	50.00	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		52.68		53.22		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
TERWUJUDNYA PEMERATAAN MUTU PEMBELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS	PENERAPAN PRAKTIK INOVATIF (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
AN KURIKULUM														
MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENERAPKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL (%)	[illegible]	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
1.01.03 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENDIDIK UNTUK SEMUA MATA PELAJARAN	RATA-RATA INDEKS DISTRIBUSI GURU [illegible]	0.31	0.32	0.33	[illegible]	0.34	[illegible]	0.35	[illegible]	0.36	[illegible]	0.37	[illegible]	DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS DAN [illegible] PENDIDIKAN	PERSENTASE USULAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN YANG DITERBITKAN/DIPERPANJANG (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	58,88	74	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	58,88	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	58,88	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	58,88	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	58,88	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	58,88	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	58,88	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
OPTIMALNYA PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN	RASIO DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT RUJUKAN (RASIO)	0,80	0,82	0,83	9.000.000.000,00	0,90	40.000.000.000,00	0,94	100.000.000.000,00	0,95	119.738.295.252,00	0,95	38.433.023.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN OBAT DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSENTASE KABUPATEN / KOTA YANG MEMILIKI KETERSEDIAAN OBAT PRIMA DAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDAR (%)	76	87	87	40.230.000.000,00	87	33.775.406.611,00	87	48.849.481.049,00	87	43.762.321.472,00	87	52.963.070.500,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG GERMAS	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMAHAMI GERMAS (%)	60	65	70	631.017.000,00	75	720.000.000,00	80	680.000.000,00	85	680.000.000,00	90	680.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN JIWA TANPA DISKRIMINASI	PERSENTASE PENDERITA GANGGUAN JIWA DAN PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN TIDAK DITERLANTARKAN (%)	100	100	100	893.214.000,00	100	900.000.000,00	100	900.000.000,00	100	850.000.000,00	100	891.500.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
TERKENDALINYA PENYAKIT TUBERKULOSIS, HIPERTENSI DAN	PERSENTASE KETERCAPAIAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS,	100	100	100	1.552.002.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DIABETES MELITUS	PERSENTASE HIPERTENSI DALAM PENGENDALIAN, DAN DIABETES MELITUS DALAM PENGENDALIAN (%)													
MENINGKATNYA AKSES JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN/TIDAK MAMPU	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS SPM BIDANG KESEHATAN PROVINSI	PERSENTASE KETERCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN PROVINSI (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA LANSIA MANDIRI	PERSENTASE LANSIA YANG MANDIRI (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	PERSENTASE KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER SESUAI STANDAR (%)	[illegible]	[illegible]	82	[illegible]	88	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA LAYANAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING SESUAI STANDAR	PERSENTASE TERCAPAINYA CAKUPAN LAYANAN INTERVENSI DALAM PENURUNAN STUNTING (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	77	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KABUPATEN/KOTA YANG	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG	[illegible]	27.5	30	[illegible]	[illegible]	700.000.000,00	[illegible]	700.000.000,00	75	1.000.000.000,00	75	1.000.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MELAKSANAKAN SDM	MELAKSANAKAN SDM (%)													KESEHATAN
MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU IMUNISASI DASAR LENGKAP (BADUTA)	CAKUPAN IMUNISASI BAYI LENGKAP (PERSENTASE)	75	75	80	413.[illegible],00	82,5	[illegible],00	85	[illegible],00	87,5	[illegible],00	90	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN SESUAI STANDAR	PERSENTASE IBU BERSALIN MELAKSANAKAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN (%)	80	80	82	[illegible]0,00	84	[illegible],00	86	[illegible],00	88	2.000.000.000,00	88	[illegible]0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF SESUAI STANDAR	PERSENTASE KETERCAPAIAN TARGET PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF SESUAI STANDAR (%)	30	30	30	22.125.000,00	40	35.000.000,00	55	50.000.000,00	70	50.000.000,00	70	25.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	PERSENTASE RS RUJUKAN PROVINSI YANG TERAKREDITASI (%)	90,00	91,00	92,00	[illegible],00	93,00	[illegible],00	94,00	[illegible],00	95,00	[illegible],00	95,00	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA PEMANFAATAN FUNGSI LABKESMAS TINGKAT III	PERSENTASE PEMANFAATAN FUNGSI LABKESMAS TINGKAT III (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	75,00	[illegible],00	75,00	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG RSUD BANTEN	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA RSUD BANTEN SESUAI STANDAR YANG TERPENUHI (%)	60	68	70	1.000.000,00	70	2.000.000,00	70	1.000.000,00	40	2.000.000,00	100	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN	NILAI AKREDITASI RSUD BANTEN	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	-	PARIPURNA	[illegible],00	PARIPURNA	-	PARIPURNA	[illegible],00	PARIPURNA	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
YANG TERAKREDITASI RSUD BANTEN	(NILAI AKREDITASI)													NI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA INFORMASI KESEHATAN DI RSUD BANTEN	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN DI RSUD BANTEN (%)	75	75	75	-	80	250.000,00	85	-	90	250.000,00	100	1.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	PERSENTASE PENGEMBANGAN FASILITAS LAYANAN KESEHATAN UPTD RSUD MALINGPING (%)	65	65	65	-	82	1.500.000,00	85	-	88	1.500.000,00	100	25.000.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN UPTD RSUD MALINGPING	JUMLAH SPM SUB VARIABEL KEPERAWATAN DAN RAWATAN UPTD RSUD MALINGPING (ANGKA)	1	1	2	-	3	300.000,00	5	-	7	300.000,00	8	2.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA INFORMASI RSUD MALINGPING	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN DI RSUD MALINGPING (%)	50	50	65	-	75	250.000,00	85	-	90	250.000,00	100	1.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN YANG TERAKREDITASI RSUD LABUAN	NILAI AKREDITASI RSUD LABUAN (NILAI AKREDITASI)	MADYA	MADYA	MADYA	7.500.000.000,00	MADYA	6.000.000.000,00	UTAMA	6.000.000.000,00	UTAMA	15.000.000.000,00	UTAMA	32.000.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA INFORMASI RSUD LABUAN	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN DI RSUD LABUAN (%)	50	50	60	25.000.000,00	70	250.000,00	80		90	500.000,00	100	100.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS	JUMLAH SPM SUB VARIABEL	1	1	2	10.000.000,00	4	300.000,00	6	-	7	1.000.000,00	8	2.000.000,00	DINAS/BADAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELAYANAN RSUD LABUAN	KEGAWAT DARURATAN UPTD RSUD LABUAN (ANGKA)													MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN YANG DIAKREDITASI DI RSUD CILOGRANG	NILAI AKREDITASI RSUD CILOGRANG (NILAI AKREDITASI)	MADYA	MADYA	MADYA	7.120.000.000,00	MADYA	[illegible],00	UTAMA	[illegible],00	UTAMA	[illegible],00	UTAMA	[illegible],00	DINAS/RSUD DAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA INFORMASI RSUD CILOGRANG	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN RSUD CILOGRANG (%)	50	50	60	25.000.000,00	75	250.000,00	80	-	90	300.000,00	100	1.000.000,00	DINAS/RSUD DAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN RSUD CILOGRANG	JUMLAH PEMOHON PASIEN KEGAWAT DARURATAN UPTD RSUD CILOGRANG (NILAI)	1	1	2	10.000.000,00	4	100.000,00	6	-	7	1.000.000,00	8	2.000.000,00	DINAS/RSUD DAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					19.796.100.056,00		19.686.100.056,00		19.686.100.056,00		21.330.000.056,00		21.785.000.056,00	
MENINGKATNYA PEMENUHAN DAN PEMERATAAN SDM KESEHATAN	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS DI KABUPATEN/KOTA SESUAI STANDAR (%)	12,5	12,5	12,5	[illegible],00	12,5	[illegible],00	25	[illegible],00	25	[illegible],00	37,5	[illegible],00	DINAS/RSUD DAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM KESEHATAN	PERSENTASE SDM KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI STANDAR (%)	20	25	30	250.240.000,00	35	115.240.000,00	40	115.240.000,00	45	1.100.000.000,00	50	115.240.000,00	DINAS/RSUD DAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN					550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA KEFARMASIAN DI TINGKAT PROVINSI	PERSENTASE SARANA KEFARMASIAN TINGKAT PROVINSI YANG MEMENUHI STANDAR (%)	70	72	75	625.000.000,00	77	600.000.000,00	80	650.000.000,00	84	650.000.000,00	88	650.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.710.220.000,00		1.740.000.000,00		1.782.008.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00	
MENINGKATNYA MASYARAKAT YANG BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIMPLEMENTASIKAN PHBS (%)	60,34	61,22	69,37	1.710.220.000,00	72,01	1.740.000.000,00	78,26	1.782.008.000,00	82,61	2.200.000.000,00	86,36	2.200.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		107.380.771.000,00		140.812.202.000,00		141.833.673.000,00		147.546.067.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80	[illegible]	82	107.380.771.000,00	85	140.812.202.000,00	87	141.833.673.000,00	90	147.546.067.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERANGKAT DAERAH														DAN PENATAAN RUANG
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDRIKA)	58.7	74	80		83		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDRIKA)	58.7	74	80		83		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDRIKA)	58.7	74	80		83		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDRIKA)	58.7	74	80		83		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDRIKA)	58.7	74	80		83		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														PENATAAN RUANG
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	56.7	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	56.7	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	56.7	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI (IKSI) (NILAI)	52.29	[illegible]	53.21	[illegible]	55.55	[illegible]	56.71	[illegible]	57.35	[illegible]	59.24	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	[illegible] PENINGKATAN KAPASITAS TAMPUNG SUMBER DAYA AIR (M3)	0	0	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR DAN ABRASI YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN INFRASTRUKTUR PENGAMAN PANTAI (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN CIBUNGUR	PERSENTASE OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN CIBUNGUR (%)	100	100	100	22.500.000.000,00	100	22.500.000.000,00	100	12.120.762.000,00	100	12.120.762.000,00	100	12.120.762.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BEROPERASI DAN TERPELIHARANYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG CIDANAU	PERSENTASE OPERASI DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG CIDANAU (%)	100	100	100	15.000.000.000,00	100	15.000.000.000,00	100	8.274.553.000,00	100	8.274.553.000,00	100	8.274.553.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BEROPERASI DAN TERPELIHARA	PERSENTASE OPERASI DAN PEMELIHARAAN	100	100	100	25.000.000.000,00	100	25.000.000.000,00	100	17.188.110.000,00	100	17.188.110.000,00	100	17.188.110.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BCA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIWUNG CISADANE	INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIWUNG-CISADANE (%)													BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					29.107.304.000,00		6.397.304.000,00		12.410.066.000,00		2.050.632.000,00		2.400.068.000,00	
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SPAM REGIONAL (%)	0.14	0.15	0.30	29.107.304.000,00	0.58	6.397.304.000,00	0.87	12.410.066.000,00	14.45	2.050.632.000,00	30.45	2.400.068.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3.000.000.000,00		21.000.000.000,00		5.100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TPST REGIONAL (%)	[illegible]	[illegible]	2.14	3.000.000.000,00	11.12	21.000.000.000,00	33.33	5.100.000.000,00	74.75	100.000.000,00	100	100.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		25.000.000.000,00		25.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PERSENTASE PENINGKATAN RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI HUNIAN DENGAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK) LAYAK (%)	[illegible]	[illegible]	90,72	[illegible],00	92,13	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	DINAS/BIDANG YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	
MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE	PERSENTASE PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE (%)	0	1,15	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	DINAS/BIDANG YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU	PERSENTASE PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG CIDANAU (%)	100	100	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	DINAS/BIDANG YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN - CISADANE	PERSENTASE PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIDURIAN / CISADANE (%)	100	100	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	DINAS/BIDANG YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														PENATAAN RUANG
OPTIMALNYA PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN - [illegible]	PERSENTASE PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIMAN - [illegible] (%)	100	100	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	100	125.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					1.000.000.000,00		2.500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (%)	0	1,25	2,65	1.000.000.000,00	4,57	2.500.000.000,00	6,10	1.000.000.000,00	7,32	1.500.000.000,00	8,31	1.500.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					6.000.000.000,00		25.000.000.000,00		6.000.000.000,00		20.000.000.000,00		46.000.000.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE PEMBANGUNAN GEDUNG STRATEGIS PROVINSI (%)	7,17	7,17	7,87	6.000.000.000,00	8,21	25.000.000.000,00	9,17	6.000.000.000,00	11,59	20.000.000.000,00	27,24	46.000.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA	PEMBINAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (PERSENTASE)	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
[illegible] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN	PERSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN (%)	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN (PERSENTASE)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		98		[illegible]		100		100		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	TINGKAT KEMANTAPAN JEMBATAN (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		98		100		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMELIHARAANNYA JALAN KEWENANGAN PROVINSI DI WILAYAH TANGERANG	PERSENTASE PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH TANGERANG (%)	100	100	100	21.625.000.000,00	100	20.325.000.000,00	100	15.712.500.000,00	100	15.712.500.000,00	100	15.712.500.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														DAN PENATAAN RUANG
TERPELIHARANYA JALAN KEWENANGAN PROVINSI DI WILAYAH SERANG DAN CILEGON	PERSENTASE PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH SERANG CILEGON (%)	100	100	100	22.100.000.000,00	100	22.100.000.000,00	100	17.400.000.000,00	100	17.400.000.000,00	100	17.400.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TERPELIHARANYA JALAN KEWENANGAN PROVINSI DI WILAYAH PANDEGLANG	PERSENTASE PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PANDEGLANG (%)	100	100	100	22.100.000.000,00	100	22.100.000.000,00	100	14.500.000.000,00	100	14.500.000.000,00	100	14.500.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TERPELIHARANYA JALAN KEWENANGAN PROVINSI DI WILAYAH LEBAK	PERSENTASE PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH LEBAK (%)	100	100	100	22.100.000.000,00	100	22.100.000.000,00	100	15.000.000.000,00	100	15.000.000.000,00	100	15.000.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KONSTRUKSI	PERSENTASE TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI (BERSERTIFIKAT)	26,97	28,33	29,69	3.000.000.000,00	31,06	3.000.000.000,00	32,42	3.000.000.000,00	33,78	3.000.000.000,00	35,14	3.000.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
OPTIMALNYA PELAYANAN	PERSENTASE LAYANAN	100	100	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	DINAS/BADAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGUJIAN BAHAN DAN KONSTRUKSI BANGUNAN	PENGUJIAN BAHAN DAN KONSTRUKSI BANGUNAN (%)													MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE KETERSEDIAAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAERAH (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PERSENTASE PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA	INDEKS REFORMASI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	[illegible] PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)													MENANGANI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					39.408.000.000,00		40.673.000.000,00		47.963.000.000,00		48.880.000.000,00		50.785.000.000,00	
TERPENUHINYA RUMAH LAYAK HUNI BAGI WARGA NEGARA KORBAN BENCANA DAN YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH	PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI (%)	100	100	100	39.408.000.000,00	100	40.673.000.000,00	100	47.963.000.000,00	100	48.880.000.000,00	100	50.785.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI (PERSENTASE)	0	100	100		100		100		100		100		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					118.516.820.795,00		162.246.230.888,00		150.317.229.475,00		153.797.879.774,00		320.613.386.701,00	
MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH [illegible] 10 HA YANG DITANGANI (%)	5,45	15,24	45,96	118.516.820.795,00	58,59	162.246.230.888,00	65,53	150.317.229.475,00	77,51	153.797.879.774,00	100	320.613.386.701,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERUMAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
														AN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					153.727.238.875,00		67.699.842.111,00		99.851.771.245,00		86.731.175.230,00		113.763.844.292,00	
MENINGKATNYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN	PERSENTASE PERMUKIMAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM) (%)	100	100	100	153.727.238.875,00	100	67.699.842.111,00	100	99.851.771.245,00	100	86.731.175.230,00	100	113.763.844.292,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
MENINGKATNYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA	PERSENTASE SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MEMENUHI	UTILITAS UMUM PSU (PERSENTASE)													
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	57.27	78	80	[illegible]	83	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	56.46	78	80	[illegible]	83	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIB

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAR GET	2026 PAGU	2027 TAR GET	2027 PAGU	2028 TAR GET	2028 PAGU	2029 TAR GET	2029 PAGU	2030 TAR GET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
														AN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
[illegible] - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN TRANTIBUMMAS (PERSENTASE)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT	PERSENTASE CAKUPAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (PERSENTASE)	10	17	30	[illegible]	45	[illegible]	75	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN (%	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PPNS	PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA (PERSENTASE)	61	61	71	105.792.000,00	80	250.000.000,00	90	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.101.418.000,00		3.748.733.000,00		3.944.163.000,00		4.415.287.000,00		4.237.312.000,00	
MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT PRA BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN PRA BENCANA (%)	100	100	100	716.774.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	2.440.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT TANGGAP	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG TERPENUHI LOGISTIK PADA SAAT KEADAAN		100	100	384.644.000,00	100	1.523.733.000,00	100	1.669.163.000,00	100	2.288.287.000,00	100	1.247.312.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DARURAT BENCANA	DARURAT BENCANA (%)													DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	PERSENTASE PENDAMPINGAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS/BADAN YANG MENANGANI URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
MENINGKATNYA PENANGANAN BENCANA PADA SAAT PASCA BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN PASCA BENCANA (PERSENTASE)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
[illegible] PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	CAKUPAN PENYULUHAN INFORMASI DAN EDUKASI BAHAYA KEBAKARAN (PERSENTASE)	15	20	60	[illegible],00	70	610.[illegible],00	80	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	77,97	78	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
	INDEKS REFORMASI [illegible] PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	77,97	78	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	78	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.808.110.000,00		1.869.288.000,00		2.008.481.000,00		2.235.579.000,00		2.289.011.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA PARTISIPASI SOSIAL PSKS	PERSENTASE PSKS YANG BERPARTISIPASI SOSIAL (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/DAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PELAYANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERLAYANI (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/DAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KEBERFUNGSIAN PPKS TERLANTAR	PERSENTASE PPKS YANG TERTANGANI DAN KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/DAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
MENINGKATNYA KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/DAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
MENINGKATNYA KEBERFUNGSIAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	PERSENTASE GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/DAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KETERPENUHAN HAK LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI YANG MEMPEROLEH [illegible] SOSIAL (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
MENINGKATNYA KETERPENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI YANG MEMPEROLEH [illegible] SOSIAL (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN	PERSENTASE FAKIR MISKIN YANG TERLINDUNGI (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR	PERSENTASE ANAK TERLANTAR YANG TERLINDUNGI (%)	100	100	100	107.160.000,00	100	108.880.000,00	100	112.880.000,00	100	118.080.000,00	100	120.280.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGANI (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SOSIAL
SUB - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TENAGA KERJA														
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					72.400.386.201,00		73.700.380.000,00		75.046.225.000,00		77.438.800.000,00		79.372.800.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	62,92	74	80	72.400.386.201,00	82	73.700.380.000,00	85	75.046.225.000,00	87	77.438.800.000,00	90	79.372.800.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TENAGA KERJA
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	62,92	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					247.445.900,00		247.445.900,00		247.445.900,00		247.445.900,00		247.445.900,00	
MENINGKATNYA PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA (%)	0	37,50	50,00	247.445.900,00	62,50	247.445.900,00	75,00	247.445.900,00	100	247.445.900,00	100	247.445.900,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					6.408.327.082,00		10.443.340.100,00		11.569.168.100,00		13.468.636.100,00		14.529.012.100,00	
MENINGKATNYA PELATIHAN DAN KOMPETENSI KERJA	PERSENTASE PELATIHAN DAN KOMPETENSI KERJA (%)	100	100	100	6.408.327.082,00	100	10.443.340.100,00	100	11.569.168.100,00	100	13.468.636.100,00	100	14.529.012.100,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PERSENTASE PELATIHAN DAN KOMPETENSI KERJA (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI (%)	47,36	26,16	25	[illegible]	45	[illegible]	55	[illegible]	75	[illegible]	85	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.125.000.000,00		2.160.000.000,00		2.150.000.000,00		2.200.000.000,00		2.265.000.000,00	
MENINGKATNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN (%))	82,91	86,25	89,73	1.125.000.000,00	95,18	1.160.000.000,00	98,20	2.150.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	2.265.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TENAGA KERJA
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					1.020.000.000,00		1.050.000.000,00		2.050.000.000,00		2.100.000.000,00		2.150.000.000,00	
MENINGKATNYA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN	24,56	32,13	41,20	1.020.000.000,00	49,45	1.050.000.000,00	57,62	2.050.000.000,00	65,80	2.100.000.000,00	73,97	2.150.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	BIDANG KETENAGAKERJAAN (%)													
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					28.462.711.000,00		29.097.460.000,00		30.090.416.000,00		31.633.745.000,00		33.400.000.000,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					25.776.440.000,00		26.200.227.000,00		26.855.233.000,00		27.528.113.000,00		28.214.790.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDIKO)	55	74	80	25.776.440.000,00	83	26.200.227.000,00	85	26.855.233.000,00	87	27.528.113.000,00	90	28.214.790.000,00	DINAS YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDIKO)	55	74	80		83		85		87		90		DINAS YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN					114.841.000,00		[illegible],00		119.712.000,00		121.236.000,00		125.200.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) (%)	10	11.2	12.4	444.441.000,00	13.6	640.388.000,00	14.8	775.718.000,00	16	801.236.000,00	17.2	818.306.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN (%)	38,91	40	40,15		40,29		30,44		30,58		32,31		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					523.388.500,00		667.824.000,00		710.121.000,00		806.575.000,00		806.202.000,00	
MENINGKATNYA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF (%)	80	82	85	285.277.500,00	87.5	300.800.000,00	90	300.000.000,00	92.5	350.000.000,00	95	350.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO (PER 100.000)	0.36	0.26	0.22	238.111.000,00	0.18	367.024.000,00	0.12	410.121.000,00	0.08	456.575.000,00	0.03	456.202.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PENDUDUK PEREMPUAN) (%)													PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.111.292.000,00		1.069.400.000,00		1.106.292.000,00		1.266.983.000,00		1.281.307.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER, PEMENUHAN HAK ANAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG BERPERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK SESUAI STANDAR (%)	25	37,50	50	1.111.292.000,00	62,50	1.069.400.000,00	75	1.106.292.000,00	87,50	1.266.983.000,00	100	1.281.307.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					77.500.000,00		113.417.000,00		119.653.000,00		125.540.000,00		136.285.000,00	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK	TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN (%)	100	100	100	77.500.000,00	100	113.417.000,00	100	119.653.000,00	100	125.540.000,00	100	136.285.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					147.500.000,00		230.940.000,00		244.186.000,00		271.885.000,00		277.630.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
TERJAMINNYA PEMENUHAN HAK DASAR ANAK SECARA KOMPREHENSIF	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA) PROVINSI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS DAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JUMLAH PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN ANAK DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) PROVINSI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS DAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF (%)	60	[illegible]	85	[illegible]	87,50	300.000.000,00	90	350.000.000,00	92,50	400.000.000,00	95	400.000.000,00	DINAS DAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
[illegible] PEMERINTAHA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
N BIDANG PANGAN														
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.066.049.523,00		21.456.475.000,00		23.061.742.000,00		23.688.286.000,00		26.230.601.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	50,34	74	80	21.066.049.523,00	82	21.456.475.000,00	85	23.061.742.000,00	87	23.688.286.000,00	90	26.230.601.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	50,34	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					948.404.250,00		650.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE JUMLAH CADANGAN PANGAN (%)	100	100	100	948.404.250,00	100	650.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI					3.065.304.000,00		3.380.000.000,00		3.960.000.000,00		4.138.000.000,00		4.260.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	TINGKAT KETERSEDIAAN ENERGI BERDASARKAN ANGKA KECUKUPAN ENERGI [illegible] KKAL/KAP/HARI (KKAL/KAPITA/HARI)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PANGAN
MENINGKATNYA PROMOSI DAN KONSUMSI PANGAN LOKAL	TINGKAT KONSUMSI ENERGI BERDASARKAN ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) [illegible] KKAL/KAP/HARI (KKAL/KAPITA/HARI)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PANGAN
2.03.03 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	
MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PANGAN
2.03.04 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	
MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN MUTU KEAMANAN	90	90	92	[illegible],00	[illegible]	120.000.000,00	94	120.000.000,00	[illegible]	120.000.000,00	[illegible]	120.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PANGAN POST MARKET	PANGAN (PERSENTASE)													
MENINGKATNYA PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN MUTU KEAMANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) [illegible] (%)	25	25	25	177.348.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	DINAS [illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					798.488.000,00		567.155.000,00		599.703.000,00		657.840.000,00		691.522.000,00	
2.10.02 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					109.779.000,00		113.421.000,00		119.058.000,00		125.540.000,00		136.362.000,00	
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PERSENTASE TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (PERSENTASE)	100	100	100	109.779.000,00	100	113.421.000,00	100	119.058.000,00	100	125.540.000,00	100	136.362.000,00	DINAS [illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANAHAN
2.10.03 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					598.181.000,00		453.734.000,00		480.645.000,00		531.154.000,00		555.238.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP TANAH (OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)	PERSENTASE TANAH UNTUK LANDREFORM (TOL) YANG MAMPU DIREDISTRIBUSIKAN YANG BERASAL DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE (PERSENTASE)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS YANG MENANGANI BIDANG PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	48	74	80	[illegible]	83	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	48	74	80		83		85		87		90		DINAS YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	48	74	80		83		85		87		90		DINAS YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH [illegible]	[illegible]	[illegible]	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH [illegible]	[illegible]	[illegible]	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH [illegible]	[illegible]	[illegible]	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK [illegible]	PERSENTASE REKOMENDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI [illegible]	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA UPAYA [illegible]	PERSENTASE JUMLAH [illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM	ASA MASYARAKAT YANG TERLIBAT UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM (%)													NI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA DI PROVINSI BANTEN YANG SESUAI BAKU MUTU (%)	83	83,34	83,34	176.777.000,00	[illegible]	475.526.000,00	[illegible]	494.326.000,00	[illegible]	350.000.000,00	[illegible]	380.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
MENINGKATNYA PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	PERSENTASE PENINGKATAN FUNGSI LABORATORIUM LINGKUNGAN (%)	2,11	2,14	2,14	150.000.000,00	2,45	100.000.000,00	5,84	450.000.000,00	8,34	450.000.000,00	11,27	450.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					36.244.000,00		130.446.000,00		133.946.000,00		153.771.000,00		155.842.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	PERSENTASE KTH [illegible]	2.055	2.060	2.065	25.244.000,00	2.070	130.446.000,00	2.075	137.946.000,00	2.080	153.771.000,00	2.085	155.842.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA					97.622.000,00		90.745.000,00		95.963.000,00		106.693.000,00		100.108.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA (PERSENTASE)	5.85	10.85	12.28	17.842.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					[illegible]		238.462.000,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KETAATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (%)	40	40	40	[illegible]	40	238.462.000,00	51	[illegible]	51	[illegible]	52	[illegible]	PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
MENINGKATNYA KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT PPLH	PERSENTASE MHA YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA (PERSENTASE)	11,11	20,41	31,18	42.111.000,00	52,94	48.508.000,00	70,59	59.017.000,00	88,24	83.694.000,00	100	89.673.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					210.278.000,00		212.387.000,00		215.074.000,00		223.447.000,00		225.012.000,00	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE MASYARAKAT YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (%)	0,40	0,45	0,52	210.278.000,00	0,6	212.387.000,00	0,71	215.074.000,00	0,84	223.447.000,00	1,01	225.012.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					23.448.000,00		35.716.000,00		37.977.000,00		36.770.000,00		66.150.000,00	
MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM	10,40	11,07	12,05	23.448.000,00	12,11%	35.716.000,00	12,39	37.977.000,00	14,57	36.770.000,00	15,38	66.150.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DALAM PENANGGULANGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PENANGGULANGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PERSENTASE)													LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					179.355.000,00		226.462.000,00		239.905.000,00		257.670.000,00		272.700.000,00	
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA /KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA/KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (PERSENTASE)	76	75	75	179.355.000,00	76	226.462.000,00	76	239.905.000,00	76	257.670.000,00	76	272.700.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					187.774.000,00		1.134.008.000,00		1.159.525.000,00		1.235.292.000,00		1.263.843.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA SAMPAH	INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS) (Poin)	50.20	51.8	55.8	187.774.000,00	57.8	1.134.008.000,00	59.8	1.159.525.000,00	60.8	1.235.292.000,00	62.80	1.263.843.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					738.444.000,00		808.117.000,00		833.671.000,00		854.775.000,00		854.022.000,00	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE CAKUPAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK (IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE CAKUPAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (AKTA KELAHIRAN USIA 0-18 TAHUN, AKTA KEMATIAN, AKTA PERKAWINAN DAN AKTA PERCERAIAN YANG DITERBITKAN KABUPATEN/KOTA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN (PERSENTASE)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN (%)	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.031.490.058,00		22.110.651.080,00		22.868.417.0[illegible]		23.400.127.0[illegible]		24.025.131.0[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS [illegible] BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	41,04	74	80	21.031.490.058,00	82	22.110.651.080,00	85	22.868.417.0[illegible]	87	23.400.127.0[illegible]	90	24.025.131.0[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					500.000.000,00		400.000.000,00		[illegible]		700.000.000,00		700.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENATAAN DESA (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	250.000.000,00	[illegible]	450.000.000,00	[illegible]	250.000.000,00	[illegible]	750.000.000,00	[illegible]	750.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.19.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					300.000.000,00		1.200.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00	
MENINGKATNYA KERJASAMA DESA YANG BERKELANJUTAN	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN KERJA SAMA SECARA BERKELANJUTAN (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300.000.000,00	[illegible]	1.200.000.000,00	[illegible]	1.750.000.000,00	[illegible]	1.750.000.000,00	[illegible]	1.750.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.19.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.250.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.500.000.000,00		2.500.000.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE APARATUR DESA DAN ANGGOTA BPD YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA (PERSENTASE)	15.21	22.14	47.28	1.250.000.000,00	61.42	2.000.000.000,00	75.36	2.000.000.000,00	89.70	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	PERSENTASE FASILITASI TATA KELOLA DESA (PERSENTASE)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE PENILAIAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.888.208.00 0,00	[illegible]	8.004.400.00 0,00	11.24	[illegible]	13.25	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK	ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY/ASFR 15-19) (INLAH)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	INDEKS PEMBANGUNAN KETAHANAN KEPENDUDUKAN (IPKK) (INDEKS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE KEHAMILAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN (KTD) (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PERSENTASE KEBUTUHAN KB YANG TERPENUHI MENURUT ALAT/CARA KB MODERN (DEMAND SATISFIED) (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KELUARGA SEJAHTERA														
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA	INDEKS LANSIA BERDAYA (ILAB)	86.64	86.69	86.74	656.460.000,00	86.79	741.500.000,00	86.80	826.578.000,00	86.90	920.200.000,00	86.93	929.908.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	INDEKS PENGASUHAN KELUARGA MEMILIKI REMAJA INTAN	82.32	84.75	82.89		86.92		87.84		88.70		89.51		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	PERSENTASE KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MANDIRI (%)	69.72	74.72	79.72		84.72		89.72		94.72		98.72		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG [illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
TOTAL PROGRAM					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERHUBUNGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT	KONEKTIVITAS ANGKUTAN DARAT (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERHUBUNGAN
MENINGKATNYA PEMBANGUNAN PRASARANA DAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI	PERSENTASE KELENGKAPAN JALAN YANG TELAH TERPASANG TERHADAP KONDISI IDEAL (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERHUBUNGAN
MENURUNNYA DAERAH RAWAN KECELAKAAN	PERSENTASE DAERAH RAWAN KECELAKAAN YANG DITANGANI (%)	12,50	20	40	[illegible]	60	[illegible]	80	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
TERSTABILITANNYA PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	PERSENTASE PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN (%)	[illegible]	[illegible]	27.28	1.000.000.000,00	33.12	1.000.000.000,00	39.96	1.000.000.000,00	[illegible]	1.000.000.000,00	[illegible]	1.000.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERHUBUNGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					623.760.000,00		1.064.804.010,00		1.209.412.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	
MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN PELAYARAN	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN PELAYARAN (%)	0	10	8	623.760.000,00	7	1.064.804.010,00	6	1.209.412.000,00	5	800.000.000,00	4	800.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					1.071.570.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API	PERSENTASE KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API YANG DITANGANI (%)	100	100	100	1.071.570.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					24.748.092.298,00		25.163.285.009,00		25.792.350.000,00		26.437.158.000,00		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	[illegible]	80	24.748.092.298,00	82	25.163.285.009,00	85	25.792.350.000,00	87	26.437.158.000,00	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOMUNIKASI DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERANGKAT DAERAH														INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (%)	70	70	70,5	[illegible]	71	[illegible]	72	[illegible]	73	[illegible]	74	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					17.700.000.000,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	NILAI TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH PROVINSI (LEVEL)	3	3	3	17.700.000.000,00	3	[illegible]	3	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	NILAI TINGKAT KEMATANGAN PENYEDIAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH (LEVEL)	2	2	2		2		3		3		3		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	NILAI TINGKAT KEMATANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE DI PEMERINTAH PROVINSI (LEVEL)	4	4	4		4		4		4		5		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOMUNIKASI DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														INFORMATIKA
	PENINGKATAN IMPLEMENTASI [illegible] (PERSENTASE)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					25.102.870.425,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25.102.870.425,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSENTASE KOPERASI USAHA SIMPAN PINJAM YANG MEMATUHI KETENTUAN IZIN (%)	5	5	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOPERASI USAHA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														KECIL, DAN MENENGAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.420.250.000,00		1.625.461.200,00		1.864.272.000,00	
MENINGKATNYA KEPATUHAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG PATUH (%)	20	20	20	100.000.000,00	40	1.100.000.000,00	60	1.420.250.000,00	80	1.625.461.200,00	100	1.864.272.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
MENINGKATNYA KOPERASI SEHAT KSP/USP	PERSENTASE KOPERASI YANG SEHAT (%)	5	5	5	100.000.000,00	10	100.000.000,00	15	100.000.000,00	20	100.000.000,00	25	100.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					100.000.000,00		280.377.000,00		299.888.000,00		333.888.000,00		380.001.000,00	
MENINGKATNYA KOMPETENSI	PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN PELATIHAN (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	280.377.000,00	100	299.888.000,00	100	333.888.000,00	100	380.001.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UKM KOPERASI														KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					113.860.000,00		437.181.000,00		462.317.000,00		514.682.000,00		525.647.000,00	
MENINGKATNYA KOPERASI BERKUALITAS	PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS (%)	20	20	20	113.860.000,00	40	437.181.000,00	60	462.317.000,00	80	514.682.000,00	100	525.647.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					113.860.000,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TRANSFORMASI USAHA KECIL MENJADI USAHA FORMAL	PERSENTASE USAHA KECIL BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL MENJADI FORMAL (%)	5	5	20	113.860.000,00	40	[illegible]	70	[illegible]	80	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA JALINAN KEMITRAAN UMKM	PERSENTASE UKM MENJALIN KEMITRAAN USAHA (%)	5	20	20	[illegible]	40	[illegible]	60	[illegible]	80	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	[illegible]	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	PERSENTASE KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENANAMAN MODAL
MENINGKATNYA PERAN POTENSI INVESTASI DI	PERSENTASE POTENSI/PELUANG PENANAMAN MODAL SEKTOR	10	12	15	600.000.000,00	22	[illegible]	27	[illegible]	33	[illegible]	37	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROVINSI BANTEN	[illegible] YANG DITINDAKLANJUTI (%)													PENANAMAN MODAL
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					866.725.000,00		907.497.000,00		999.620.000,00		1.068.214.000,00		1.101.079.000,00	
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN MINAT INVESTOR YANG BERINVESTASI (%)	5	10	15	866.725.000,00	20	907.497.000,00	25	999.620.000,00	30	1.068.214.000,00	35	1.101.079.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENANAMAN MODAL
2. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SESUAI STANDAR	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI STANDAR (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENANAMAN MODAL
2. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA NON UMK YANG MELAPORKAN KEGIATAN USAHA (LKPM) (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENANAMAN MODAL
2. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
INFORMASI PENANAMAN MODAL.														
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL.	PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DAPAT DIAKSES (%)	10	15	20	200.000.000,00	40	[illegible]	60	[illegible]	80	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENANAMAN MODAL.
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	[illegible]	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	[illegible]	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA DAYA SAING PEMUDA DALAM PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	PERSENTASE PEMUDA MENGIKUTI KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
MENINGKATNYA WIRAUSAHA MUDA	RASIO KEWIRAUSAHAAN PEMUDA (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
MENINGKATNYA DAYA SAING PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA AKTIF MENGIKUTI ORGANISASI (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA DAYA SAING PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN OLAHRAGA MASYARAKAT (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
MENINGKATNYA DAYA SAING PRESTASI OLAHRAGA	PERSENTASE ATLET YANG MENGIKUTI KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT	[illegible]	[illegible]	12,50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,50	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	REGIONAL DAN NASIONAL (%)													OLAHRAGA
MENINGKATNYA DAYA SAING PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA	PERSENTASE ATLET PELAJAR BERPRESTASI (%)	31	32	33	8.237.320.00 0,00	34	8.463.160.00 0,00	35	8.663.678.00 0,00	36	8.863.678.00 0,00	37	9.063.678.00 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.220.000.00 0,00		1.005.222.00 0,00		1.005.222.00 0,00		1.005.222.00 0,00		1.005.222.00 0,00	
MENINGKATNYA DAYA SAING PRAMUKA	PERSENTASE PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEPRAMUKAAN (%)	0.70	0.82	0.94	1.220.000.00 0,00	0.96	1.005.222.00 0,00	1.07	1.005.222.00 0,00	1.12	1.005.222.00 0,00	1.24	1.005.222.00 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					900.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.00 0,00		1.100.000.00 0,00		1.100.000.00 0,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					900.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.00 0,00		1.100.000.00 0,00		1.100.000.00 0,00	
TERWUJUDNYA KOLABORASI, INTEGRASI, DAN STANDARDISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS) (POIN)	2.11	2.32	2.43	900.000.000,00	2.47	900.000.000,00	2.49	1.000.000.00 0,00	[illegible]	1.100.000.00 0,00	[illegible]	1.100.000.00 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG STATISTIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.600.000.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.600.000.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00	
MENGUATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KEMATANGAN KEAMANAN SIBER DAN SANDI PEMERINTAH DAERAH (%)	47.90	65.67	70.05	1.600.000.000,00	72.88	1.700.000.000,00	75.01	1.800.000.000,00	77.18	1.900.000.000,00	79.31	1.900.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.840.001.185,00		2.009.041.000,00		2.142.213.000,00		2.366.423.000,00		2.655.188.000,00	
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MEMBERIKAN SARAN ATAU PENDAPAT DALAM KEGIATAN RAPAT SELAMA SETAHUN TERAKHIR (%)	12.61	13	13.5	1.840.001.185,00	14	2.009.041.000,00	14.5	2.142.213.000,00	15	2.366.423.000,00	15.5	2.655.188.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG	1	1.05	1.1		1.15		1.2		1.25		1.3		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PERTUNJUKKAN SENI DALAM 3 BULAN TERAKHIR (%)													
	PERSENTASE PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGGUNAKAN BAHASA DAERAH DI RUMAH ATAU DALAM PERGAULAN SEHARI-HARI (%)	37.36	37.55	37.75		37.85		37.95		38		38		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENYELENGGARAKAN ATAU MENGHADIRI UPACARA ADAT DALAM SETAHUN TERAKHIR (%)	26.16	26.18	26.85		26.95		27		27.25		27.4		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
	PERSENTASE WARISAN BUDAYA TAK BENDA YANG TELAH DITETAPKAN TERHADAP TOTAL PENCATATAN (%)	23.77	23.77	23.77		23.82		23.87		23.92		24		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					250.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG AKTIF MENGIKUTI KEGIATAN ORGANISASI DALAM SETAHUN TERAKHIR (%)	5.51	5.7	6	250.000.000,00	6.3	600.000.000,00	6.9	600.000.000,00	7.2	600.000.000,00	7.5	600.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM					1.081.150.120,00		1.471.500.000,00		1.379.215.000,00		2.201.297.200,00		2.201.348.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	PERSENTASE BENDA, BANGUNAN, STRUKTUR, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG TELAH DITETAPKAN TERHADAP TOTAL PENDAFTARAN (%)	0	0	0,25	1.044.100.12 0,00	0,97	1.071.900.00 0,00	0,97	1.377.373.00 0,00	1	2.200.397.20 0,00	1	2.200.290.20 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH/WARISAN DUNIA DALAM SETAHUN TERAKHIR (%)	0	0	28,44		28,54		28,64		28,74		28,74		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENONTON SECARA LANGSUNG PERTUNJUKKAN SENI DALAM 3 BULAN TERAKHIR (%)	1	1	85,55		85,53		85,63		85,73		85,73		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN PRODUK TRADISIONAL DALAM 1 BULAN TERAKHIR (%)	0	0	53,22		53,32		53,42		53,52		53,52		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
														DINAS/BADAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					5.452.271.00 0,00		5.789.734.00 0,00		3.995.000.00 0,00		4.296.778.00 0,00		4.480.451.00 0,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	IPK DIMENSI EKSPRESI BUDAYA (%)	27,85	28,54	31,2	5.452.271.00 0,00	33,35	5.789.734.00 0,00	37,23	3.995.000.00 0,00	37,37	4.296.778.00 0,00	39,21	4.480.451.00 0,00	[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					28.669.072.6 85,00		29.488.416.6 00,00		30.118.349.0 00,00		31.106.027.0 00,00		31.830.327.0 00,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.394.972.6 85,00		27.762.207.6 00,00		28.231.324.0 00,00		28.907.428.0 00,00		29.541.270.0 00,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (IRBPD)	55,77	78,00	80,00	27.394.972.6 85,00	85,00	27.762.207.6 00,00	85,00	28.231.324.0 00,00	87,50	28.907.428.0 00,00	90,00	29.541.270.0 00,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.274.100.00 0,00		1.726.209.00 0,00		1.827.099.00 0,00		2.044.428.00 0,00		2.088.108.00 0,00	
MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDART NASIONAL	PERSENTASE KUNJUNGAN MASYARAKAT KE PERPUSTAKAAN (%)	1,21	1,27	1,30	1.274.100.00 0,00	1,37	1.726.209.00 0,00	1,47	1.827.099.00 0,00	1,54	2.044.428.00 0,00	1,62	2.088.108.00 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERPUSTAKAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERPUSTAKAAN														
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					80.800.000,00		113.840.000,00		120.000.000,00		124.200.000,00		128.581.000,00	
MENINGKATNYA PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI (%)	50,00	55,00	60,00	80.800.000,00	65,00	113.840.000,00	70,00	120.000.000,00	75,00	124.200.000,00	80,00	128.581.000,00	DINAS YANG MENANGANI BIDANG PERPUSTAKAAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.128.500.000,00		1.688.257.000,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					700.000.000,00		1.063.000.000,00		1.098.900.000,00		1.224.079.000,00		1.249.000.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP (%)	75,06	76,00	77,00	700.000.000,00	78,00	1.063.000.000,00	79,00	1.098.900.000,00	80,00	1.224.079.000,00	84,00	1.249.000.000,00	DINAS YANG MENANGANI BIDANG KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					428.500.000,00		625.257.000,00		687.400.000,00		753.741.000,00		782.000.000,00	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP SESUAI [illegible]	TINGKAT KESESUAIAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN (%)	82,22	84,00	86,00	428.500.000,00	86,00	625.257.000,00	88,42	687.400.000,00	89,10	753.741.000,00	90,00	782.000.000,00	DINAS YANG MENANGANI BIDANG KEARSIPAN
2.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN					58.183.313.200,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAN PERIKANAN														
[illegible] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	57.04	74	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	57.04	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	57.04	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	57.04	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	57.04	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														N DAN PERIKANAN
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	87.04	74	80		83		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA NILAI PRODUKSI PERIKANAN	NILAI PRODUKSI PERIKANAN (JUTA RUPIAH)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA PENGUATAN KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG TERBINA (%)	54.2	58	61	125.000.000,00	64	400.000.000,00	67	515.528.000,00	70	700.000.000,00	73	722.457.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA WILAYAH PESISIR YANG TERREHABILITASI DI WILAYAH UTARA	PERSENTASE WILAYAH PESISIR YANG TERREHABILITASI DI WILAYAH UTARA (%)	23	26	29	65.000.000,00	32	100.000.000,00	35	150.000.000,00	38	150.000.000,00	41	150.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR	PERSENTASE PENINGKATAN MASYARAKAT	54.20	58	61	50.000.000,00	64	50.000.000,00	67	50.000.000,00	70	50.000.000,00	73	50.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
WILAYAH UTARA	PESISIR YANG TERBINA (%)													KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH SELATAN	PERSENTASE WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH SELATAN (%)	22	22	25	[illegible]	28	[illegible]	31	[illegible]	34	[illegible]	37	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR WILAYAH SELATAN	PERSENTASE PENINGKATAN MASYARAKAT PESISIR YANG TERBINA (%)	54,21	58	61	[illegible]	64	60.000.000,00	67	60.000.000,00	70	60.000.000,00	73	60.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
TERSEDIANYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP NON PELABUHAN PERIKANAN	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP NON PELABUHAN PERIKANAN (TON)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN KEPADA PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL UKURAN DIATAS 10 GT SAMPAI	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG TERLAYANI UNTUK UKURAN KAPAL 10 - 30 GT (%)	18	24	27	[illegible]	30	[illegible]	33	[illegible]	36	450.000.000,00	39	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DIBAWAH 10 GT.														
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN DI WILAYAH UTARA	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH UTARA (TON)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN KEPADA PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL UKURAN DIBAWAH 10 GT DI WILAYAH UTARA	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG TERLAYANI (%)	15	15	18	[illegible]	21	[illegible]	24	[illegible]	27	[illegible]	30	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN DI WILAYAH SELATAN	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN KEPADA PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL UKURAN DIBAWAH 10 GT DI WILAYAH SELATAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG TERLAYANI (%)	15	18	21	[illegible]	24	[illegible]	27	[illegible]	30	[illegible]	33	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
TERCAPAINYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN LABUAN	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN KEPADA PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL UKURAN DIBAWAH 10 GT DI PPI LABUAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG TERLAYANI (%)	16	19	22	120.000.000,00	25	130.000.000,00	28	140.000.000,00	31	150.000.000,00	34	160.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN KEPADA PELAKU USAHA PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN BUDIDAYA YANG TERLAYANI (%)	70	72	75	60.000.000,00	78	100.000.000,00	82	110.000.000,00	85	[illegible]	88	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERCAPAINYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	VOLUME PRODUKSI IKAN BUDIDAYA (TON)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KELAUTAN DAN PERIKANAN														
MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN	INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (%)	75	78	81	84.000.000,00	84	100.000.000,00	87	150.000.000,00	90	180.000.000,00	93	150.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENINGKATNYA PENGAWASAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI	LUASAN KAWASAN KONSERVASI (HA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],00	17772,10	[illegible],00	17772,11	[illegible],00	18632,1	[illegible],00	18632,1	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.257.973.167,00		1.710.000.000,00		1.840.000.000,00		2.000.000.000,00		2.030.000.000,00	
TERCAPAINYA TINGKAT ANGKA KONSUMSI IKAN	KONSUMSI IKAN MASYARAKAT (KG/KAP/TH)	26,30	27,36	27,90	962.973.167,00	28,46	1.300.000.000,00	29,03	1.320.000.000,00	29,61	1.350.000.000,00	30,20	1.360.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERLAKSANANYA SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN PERIKANAN	PERSENTASE SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN PERIKANAN (%)	100	100	100	130.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	310.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERCAPAINYA PELAYANAN UJI MUTU	PERSENTASE PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN (%)	100	100	100	165.000.000,00	100	210.000.000,00	100	270.000.000,00	100	330.000.000,00	100	300.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
HASIL PERIKANAN														KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					[illegible] 88,00		[illegible] 00,00		[illegible] 00,00		[illegible] 00,00		[illegible] 00,00	
2.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible] 88,00		[illegible] 00,00		[illegible] 00,00		[illegible] 00,00		[illegible] 00,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	76,24	74	80	[illegible] 88,00	83	[illegible] 00,00	85	[illegible] 00,00	87	[illegible] 00,00	90	[illegible] 00,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PARIWISATA
2.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.125.382,00 0,00		4.250.225,00 0,00		4.498.215,00 0,00		5.007.718,00 0,00		5.114.409,00 0,00	
MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN (%)	5	5,1	5,2	4.125.382,00 0,00	5,4	4.250.225,00 0,00	5,6	4.498.215,00 0,00	5,8	5.007.718,00 0,00	6	5.114.409,00 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PARIWISATA
2.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.890.000,00 0,00		1.985.500,00 0,00		2.099.168,00 0,00		2.236.588,00 0,00		2.366.729,00 0,00	
MENINGKATNYA PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATA PROVINSI (%)	4,11	4,80	[illegible]	1.890.000,00 0,00	7,21	1.985.500,00 0,00	7,25	2.099.168,00 0,00	8,28	2.236.588,00 0,00	9,12	2.366.729,00 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PARIWISATA
2.26.04 - PROGRAM					1.174.318,00 0,00		1.219.710,00 0,00		1.283.400,00 0,00		1.408.870,00 0,00		1.459.013,00 0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	PERSENTASE PELAKU EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL (%)	[illegible]	[illegible]	6.01	1.174.018.000,00	8.06	1.210.710.000,00	9.22	1.263.401.000,00	10.37	1.328.870.000,00	11.52	1.430.012.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PARIWISATA
2.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					838.219.000,00		907.407.000,00		929.020.000,00		1.068.314.000,00		1.101.079.000,00	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG AKTIF DAN TERVALIDASI (%)	1.61	2.11	2.41	838.219.000,00	2.71	907.407.000,00	3.01	929.020.000,00	3.31	1.068.314.000,00	3.61	1.101.079.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					81.879.422.150,00		83.222.436.000,00		85.202.096.000,00		87.430.374.000,00		90.031.403.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN	INDEKS KEPUASAN PROGRAM PAGU	[illegible]	74	80	81.879.422.150,00	[illegible]	83.222.436.000,00	[illegible]	85.202.096.000,00	[illegible]	87.430.374.000,00	90	90.031.403.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
N PADA PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH (INDEKS)													PERTANIAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	40.82	74	80		83		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	43.32	37.12	38.12		67.12		77.12		78.12		87.12		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	43.32	37.12	38.12		67.12		77.12		78.12		87.12		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	43.32	37.12	38.12		67.12		77.12		78.12		87.12		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
[illegible] - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PRODUKSI KOMODITAS PANGAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PANGAN (TON)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
MENINGKATNYA PRODUKSI KOMODITAS HORTIKULTURA	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS HORTIKULTURA (TON)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN (TON)	136	223	815	[illegible] 0,00	828	[illegible] 0,00	847	[illegible] 0,00	853	[illegible] 0,00	860	[illegible] 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
MENINGKATNYA PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN (TON)	11860	24138	24404	4.223.[illegible] 0,00	24672	5.116.373.44 0,00	24941	5.116.373.44 0,00	25218	5.116.373.44 0,00	25445	5.116.373.44 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN (TON)	11860	24138	24404		24672		24941		25218		25445		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
MENINGKATNYA SERTIFIKASI BENIH YANG SESUAI STANDAR	PERSENTASE PENINGKATAN SERTIFIKASI BENIH (PERSEN)	5	5	458	400.000.000, 00	5	400.000.000, 00	5	400.000.000, 00	5	400.000.000, 00	5	400.000.000, 00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
MENINGKATNYA KUALITAS BENIH BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	PERSENTASE PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN YANG DIHASILKAN (%)	3	3,37	3,55	700.000.000, 00	3,73	700.000.000, 00	3,82	700.000.000, 00	3,91	700.000.000, 00	4,01	1.200.710.00 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.101.418.10 0,00		2.101.418.10 0,00		2.101.418.10 0,00		2.547.156.10 0,00		2.447.156.10 0,00	
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN PERTANIAN YANG DIPERTAHANKAN	50625,7 8	50625,7 8	50625,7 8	2.101.418.10 0,00	50625,7 8	2.101.418.10 0,00	50625,7 8	2.101.418.10 0,00	50625,7 8	2.547.156.10 0,00	50625,7 8	2.447.156.10 0,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	[illegible]													PERTANIAN
[illegible] PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00	
MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) ([illegible])	2	4	5	950.000.000,00	6	950.000.000,00	7	950.000.000,00	8	950.000.000,00	9	950.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
														DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT NKV ATAU SKV (NOMOR KONTROL VETERINER) (PERSENTASE)	11,5	22	26	600.000.000,00	50	600.000.000,00	70	600.000.000,00	80	600.000.000,00	90	600.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
	PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT NKV ATAU SKV (NOMOR KONTROL VETERINER) (PERSENTASE)	11,5	22	26		50		70		80		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
[illegible] PROGRAM PENGENDALIAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
N DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN (PERSENTASE)	92	92	92	[illegible]	92	[illegible]	92	[illegible]	95	[illegible]	98	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
MENINGKATNYA PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) DAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	PERSENTASE PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN (PERSENTASE)	85	85	85	400.000.000,00	85	400.000.000,00	85	400.000.000,00	85	400.000.000,00	85	400.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE IZIN USAHA PERTANIAN YANG DITERBITKAN (PERSENTASE)	0	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE SDM PENYULUH PERTANIAN YANG DITINGKATKAN (PERSENTASE)	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERTANIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[illegible] - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible] - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA REHABILITASI LAHAN OLEH MASYARAKAT	PERSENTASE JUMLAH [illegible] BERSERTIFIKAT [illegible] REHABILITASI LAHAN (%)	10	10	10	[illegible]	12	455.000.000,00	12	455.000.000,00	15	455.000.000,00	15	455.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN
MENINGKATNYA TUTUPAN LAHAN DI WILAYAH LEBAK TANGERANG	LUAS LAHAN KRITIS YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG (HA)	[illegible]	2500	2500	[illegible]	2500	[illegible]	2500	[illegible]	2500	[illegible]	2500	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN
MENINGKATNYA TUTUPAN LAHAN DI WILAYAH PANDEGLANG SERANG CILEGON	LUAS LAHAN KRITIS YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON (HA)	[illegible]	2500	2500	[illegible]	2500	[illegible]	2500	[illegible]	2500	[illegible]	2500	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN
TERJAGANYA PRODUKTIVITAS HASIL HUTAN	KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDRB (%)	0.02	0.04	0.06	[illegible]	0.10	1.100.000.000,00	0.12	1.100.000.000,00	0.14	1.100.000.000,00	0.16	1.100.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN
[illegible] - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PERAN SERTA KELOMPOK	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120.000.000,00	[illegible]	120.000.000,00	[illegible]	120.000.000,00	[illegible]	120.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MASYARAKAT DALAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA WILAYAH LEBAK TANGERANG	DALAM KONSERVASI SUMBERDATA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA WILAYAH LEBAK TANGERANG (%)													KEHUTANAN
MENINGKATNYA PERAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA PANDEGLANG, SERANG, CILEGON	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KONSERVASI SUMBERDATA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA WILAYAH PANDEGLANG SERANG, CILEGON (%)	52	41	60	[illegible]	67	120.000.000,00	80	120.000.000,00	88	120.000.000,00	91	120.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN
MENINGKATNYA KELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	JUMLAH KEANEKARAGAMAN HAYATI (SPESIES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAHURA BANTEN	TINGKAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAHURA BANTEN (NILAI)	60	60	66	[illegible]	67	840.000.000,00	68	1.000.000.000,00	69	[illegible]	70	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN
TOTAL PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

<table>
<tr><th rowspan="3">BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</th><th rowspan="3">INDIKATOR OUTCOME</th><th rowspan="3">BASE LINE 2024</th><th rowspan="3">2025</th><th colspan="10">TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</th><th rowspan="3">PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</th></tr>
<tr><th colspan="2">2026</th><th colspan="2">2027</th><th colspan="2">2028</th><th colspan="2">2029</th><th colspan="2">2030</th></tr>
<tr><th>TARGET</th><th>PAGU</th><th>TARGET</th><th>PAGU</th><th>TARGET</th><th>PAGU</th><th>TARGET</th><th>PAGU</th><th>TARGET</th><th>PAGU</th></tr>
<tr><td>AN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MENINGKATNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DI BIDANG KEHUTANAN</td><td>PERSENTASE PENINGKATAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) (PERSENTASE)</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>DINAS/BA DAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN</td></tr>
<tr><td>MENINGKATNYA KUALITAS KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, CILEGON</td><td>PERSENTASE PENINGKATAN KELAS KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) (PERSENTASE)</td><td>10</td><td>10</td><td>20</td><td>[illegible]</td><td>20</td><td>[illegible]</td><td>20</td><td>[illegible]</td><td>20</td><td>[illegible]</td><td>20</td><td>[illegible]</td><td>DINAS/BA DAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN</td></tr>
<tr><td>MENINGKATNYA KUALITAS KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL WILAYAH LEBAK, TANGERANG</td><td>PERSENTASE PENINGKATAN KELAS KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) (PERSENTASE)</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>20</td><td>[illegible]</td><td>20</td><td>[illegible]</td><td>20</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>DINAS/BA DAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN</td></tr>
<tr><td>2.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td>[illegible]</td><td></td></tr>
<tr><td>MENINGKATNYA KELESTARIAN DAN FUNGSI DAS</td><td>PERSENTASE TUTUPAN LAHAN DI DAS/SEMPADAN DAS (PERSENTASE)</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>DINAS/BA DAN YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN</td></tr>
<tr><td>2.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td>[illegible]</td><td></td><td>[illegible]</td><td></td></tr>
</table>

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SUMBER DAYA MINERAL														
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.312.111.504,00		25.997.420.000,00		26.297.000.000,00		31.170.000.000,00		32.800.000.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (NILAI)	67.65	74	80	27.312.111.504,00	82	25.997.420.000,00	85	26.297.000.000,00	87	31.170.000.000,00	90	32.800.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEBUMIAN					522.868.000,00		114.523.000,00		663.712.000,00		2.997.318.000,00		3.055.620.000,00	
PENGELOLAAN GEODIVERSITY DAN KEBENCANAAN GEOLOGI	PERSENTASE GEODIVERSITY DAN KEBENCANAAN GEOLOGI YANG DIKELOLA (%)	28.85	35.17	41.17	456.520.000,00	42.52	38.523.000,00	50.02	612.712.000,00	75.21	2.904.798.000,00	100	3.021.620.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PENGELOLAAN AIR TANAH	PERSENTASE AIR TANAH YANG DIKELOLA (%)	33.33	38.20	45.34	66.280.000,00	58.47	76.000.000,00	67.47	51.000.000,00	82.71	92.520.000,00	100	35.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					511.896.000,00		273.997.000,00		563.663.000,00		1.272.135.000,00		1.526.700.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
TERKELOLANYA USAHA PERTAMBANGAN DALAM MENINGKATKAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG SESUAI DENGAN REGULASI	JUMLAH USAHA PERTAMBANGAN YANG MENERAPKAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG SESUAI DENGAN REGULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)	10	20	30	[illegible]	40	[illegible]	50	[illegible]	60	[illegible]	70	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
TERSEDIANYA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG BERASAL ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN	KAPASITAS PEMANFAATAN ANEKA EBT (MEGAWATT)	78.48	86.40	98.13	1.240.750.000,00	100.86	1.016.761.000,00	120.77	4.156.627.000,00	133.09	4.626.423.000,00	143.42	8.734.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TERKENDALINYA TINGKAT EMISI KARBON (CO2)	PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT EMISI KARBON (CO2 %)	0.83	0.91	1.18	161.500.000,00	1.44	250.000.000,00	1.68	250.000.000,00	1.92	275.000.000,00	2.10	275.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					8.293.821.000,00		21.490.101.000,00		21.800.000.000,00		21.850.000.000,00		22.050.000.000,00	
TERCUKUPINYA DAYA LISTRIK DAERAH	RASIO KETERSEDIAAN DAYA LISTRIK (%)	94	94.11	94.20	8.293.821.000,00	94.20	21.490.101.000,00	94.36	21.800.000.000,00	94.44	21.850.000.000,00	94.50	22.050.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG ENERGI DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														SUMBER DAYA MINERAL
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					[illegible]		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00	
MENINGKATNYA KEMUDAHAN PROSES PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BERUSAHA	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN LAYANAN (%)	83.71	90	90	60.000.000,00	90	60.000.000,00	90	60.000.000,00	90	60.000.000,00	90	60.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERDAGANGAN
MENINGKATNYA PELAYANAN PELAKU USAHA BERORIENTASI EKSPOR	PERSENTASE PELAKU USAHA BERORIENTASI EKSPOR YANG MENDAPATKAN LAYANAN (%)	100	100	100	115.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					300.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN YANG BERSIH, MERATA DAN TERINTEGRASI	INDEKS JARINGAN DISTRIBUSI (INDEKS)	27.8	40	45	300.000.000,00	50	375.000.000,00	55	375.000.000,00	60	375.000.000,00	65	375.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM [illegible]					825.000.000,00		1.124.598.200,00		1.124.598.200,00		1.124.598.200,00		1.124.598.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WILAYAH TINGKAT KAB/KOTA (%)	5,55	5	5	685.000.000,00	5	1.124.968.000,00	5	1.124.968.000,00	5	1.124.968.000,00	5	1.124.968.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					716.362.000,00		1.266.645.600,00		1.469.713.600,00		1.469.713.600,00		1.469.713.600,00	
MENINGKATNYA NILAI EKSPOR BARANG NON MIGAS	NILAI EKSPOR BARANG NON MIGAS (US$)	125465 17326	146965 78072	146925 00000	716.362.000,00	154481 00000	1.266.645.600,00	161795 04704	1.469.713.600,00	174431 40730	1.469.713.600,00	187056 00068	1.469.713.600,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					3.240.728.600,00		4.129.430.400,00		4.130.430.400,00		3.032.116.400,00		3.250.580.400,00	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN (%)	85	90	90	2.080.620.600,00	90	2.288.102.400,00	90	2.288.102.400,00	90	2.330.878.400,00	90	2.410.047.400,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERDAGANGAN
MENINGKATNYA PENGAWASAN BARANG BEREDAR	PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN PERATURAN (%)	70,08	71,45	72,12	210.108.000,00	74,36	341.328.000,00	75,87	341.328.000,00	77,39	341.328.000,00	78,93	341.238.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERDAGANGAN
MENINGKATNYA STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN	NILAI IKM [illegible] KEPUASAN	79,26	80	80,25	950.000.000,00	80,50	1.500.000.000,00	80,75	1.500.000.000,00	81	1.500.000.000,00	81,25	1.500.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAN KALIBRASI	MASYARAKAT PADA UPTD [illegible]													PERDAGANGAN
3.30.11 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					300.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	LAJU PERTUMBUHAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (%)	25	30	35	300.000.000,00	40	400.000.000,00	45	450.000.000,00	50	450.000.000,00	55	450.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					38.772.129.802,00		39.409.842.000,00		40.420.932.000,00		41.430.272.000,00		42.472.182.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (NILAI)	69,2	74	80	38.772.129.802,00	82	39.409.842.000,00	85	40.420.932.000,00	87	41.430.272.000,00	90	42.472.182.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (NILAI)	69,2	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA	27,2	73	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PERANGKAT DAERAH INDUSTRI													DI BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.[illegible].000.00 [illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA PERENCANAAN INDUSTRI	PERSENTASE RENCANA INDUSTRI YANG DI IMPLEMENTASIKAN (%)	8,82	22,75	[illegible]	380.[illegible],00	[illegible]	[illegible],000	[illegible]	[illegible],000	[illegible]	[illegible],000	100	[illegible],000	DINAS [illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU USAHA INDUSTRI PROVINSI BANTEN (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],000	[illegible]	[illegible],000	[illegible]	[illegible],000	[illegible]	[illegible],000	[illegible]	[illegible],000	DINAS [illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
MENINGKATNYA STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DAN RUMAH KEMASAN	NILAI IKM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA UPTD [illegible]	77,36	80	80,25	[illegible],00	80,50	[illegible],00	80,75	1.180.000.000,00	81	1.400.000.000,00	[illegible]	[illegible],00	DINAS [illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	
MENINGKATNYA PENGAWASAN INDUSTRI DI DAERAH	PERSENTASE INDUSTRI YANG DIAWASI (%)	17,23	50	50	180.000.000,00	50	221.[illegible],00	50	221.[illegible],00	50	221.[illegible],00	50	221.[illegible],00	DINAS [illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN INDUSTRI DI DAERAH	PERSENTASE PELAKU USAHA INDUSTRI YANG MENDAPATKAN LAYANAN (%)	100	100	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	DINAS [illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.04 - PROGRAM					[illegible]00.000.000,00		[illegible].000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
MENINGKATNYA KEPATUHAN INDUSTRI DALAM PELAPORAN SIINAS	TINGKAT KEPATUHAN DALAM PELAPORAN SIINAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	90.000.000,00	[illegible]	90.000.000,00	[illegible]	110.000.000,00	[illegible]	110.000.000,00	[illegible]	110.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PERANGKAT DAERAH (INDEKS)													SEKRETARIAT DAERAH
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	59.86	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	59.86	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	59.86	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN MATERI DAN INFORMASI PIMPINAN	PERSENTASE LAYANAN MATERI DAN INFORMASI PIMPINAN YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA KUALITAS FASILITASI KEPROTOKOLAN PIMPINAN	PERSENTASE KEBUTUHAN FASILITASI KEPROTOKOLAN PIMPINAN YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TATA USAHA SETDA	PERSENTASE LAYANAN TATA USAHA SETDA YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA FASILITASI ADMINISTRASI DAN RUMAH TANGGA PIMPINAN	PERSENTASE FASILITASI RUMAH TANGGA PIMPINAN YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR (%)	100	100	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	BIRO/BAGIAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SETDA	PERSENTASE LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SETDA YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR (%)	100	100	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	BIRO/BAGIAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
X.XX.XX - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	
MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMILIKI INDEKS REFORMASI BIROKRASI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMILIKI INDEKS REFORMASI BIROKRASI "BAIK" (%)	78	80	81	270.000.000,00	83	370.000.000,00	85	400.000.000,00	87	400.000.000,00	88	400.000.000,00	BIRO/BAGIAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA HASIL PENATAAN KELEMBAGAAN	NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN (NILAI)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	BIRO/BAGIAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA PENERAPAN HASIL PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH PENYEDIA LAYANAN DENGAN NILAI IKM MINIMAL SANGAT BAIK (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	BIRO/BAGIAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI	78	78	80	[illegible],00	81	[illegible],00	82	[illegible],00	82	[illegible],00	85	[illegible],00	BIRO/BAGIAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELAYANAN BERKUALITAS	PELAYANAN BERKUALITAS (%)													RIAT DAERAH
BUDAYA KERJA DITERAPKAN SECARA EFEKTIF OLEH PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI BUDAYA KERJA MINIMAL [illegible] (%)	[illegible]	76	[illegible]	[illegible],00	77	[illegible],00	77,50	[illegible],00	78	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	
MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	PERSENTASE ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN YANG TERPENUHI SESUAI REGULASI (%)	100	100	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA KERJA SAMA DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN	PERSENTASE KERJA SAMA DAERAH YANG DILAKSANAKAN SESUAI REGULASI (%)	100	100	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	PERSENTASE KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG SESUAI REGULASI (%)	100	100	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0[illegible] - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	
MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN BINA SPIRITUAL	PERSENTASE KEBUTUHAN BINA SPIRITUAL YANG DIMANFAATKAN SESUAI KEBUTUHAN (%)	100	100	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	100	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														RIAT DAERAH
MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR	PERSENTASE KEBIJAKAN PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR YANG DIMANFAATKAN SESUAI REGULASI (%)	100	100	100	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					2.414.951.000,00		2.924.130.000,00		2.967.116.000,00		3.303.598.000,00		3.372.167.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PRODUK HUKUM	PERSENTASE FASILITASI PRODUK HUKUM YANG TERLAKSANA SESUAI STANDAR (%)	100	100	100	1.207.475.500,00	100	1.462.065.000,00	100	1.483.558.000,00	100	1.651.799.000,00	100	1.686.083.500,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM	PERSENTASE BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DAN HAM YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR (%)	100	100	100	1.207.475.500,00	100	1.462.065.000,00	100	1.483.558.000,00	100	1.651.799.000,00	100	1.686.083.500,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
4.01.05 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					810.000.000,00		1.394.637.000,00		1.390.145.000,00		1.771.331.500,00		1.809.110.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG	100	100	100	810.000.000,00	100	1.394.637.000,00	100	1.390.145.000,00	100	1.771.331.500,00	100	1.809.110.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	DITINDAKLANJUTI (%)													
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					400.000.000,00		1.159.162.000,00		1.223.807.000,00		1.264.653.000,00		1.303.750.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KUALIFIKASI & KOMPETENSI SDM PBJ (NILAI)	26.00	26.12	26.15	400.000.000,00	26.58	1.159.162.000,00	26.70	1.223.807.000,00	26.84	1.264.653.000,00	26.96	1.303.750.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
	PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN (NILAI)	28.14	28.17	28.25		28.85		28.91		28.96		29.06		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
	TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ (NILAI)	90	90	90		90		90		90		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					750.000.000,00		1.020.676.000,00		1.077.752.000,00		1.201.850.000,00		1.227.458.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERSENTASE KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN YANG DI TINDAKLANJUTI	100	100	100	750.000.000,00	100	1.020.676.000,00	100	1.077.752.000,00	100	1.201.850.000,00	100	1.227.458.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					231.163.241.[illegible]		238.302.[illegible]		240.803.[illegible]		246.826.118.000,00		252.596.[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	59,33	74	80	231.163.241.[illegible]	82	238.302.[illegible]	85	240.803.[illegible]	87	246.826.118.000,00	90	252.596.[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					138.227.[illegible]		133.[illegible]		135.[illegible]		134.[illegible]		134.[illegible]	
MENINGKATNYA DUKUNGAN DAN FASILITASI PERAN PERUNDANG-UNDANGAN, ANGGARAN DAN PENGAWASAN	PERSENTASE CAPAIAN LAYANAN KINERJA PERAN DAN FUNGSI DPRD (%)	100	100	100	70.050.[illegible]	100	[illegible]	100	71.[illegible]	100	73.[illegible]	100	73.[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DPRD
MENINGKATNYA DUKUNGAN DAN FASILITASI PERAN KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD	PERSENTASE CAPAIAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD (%)	100	100	100	68.177.216.000,00	100	68.177.216.000,00	100	64.177.216.000,00	100	61.027.216.000,00	100	61.[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5.01 PERENCANAAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					56.111.161.1[illegible]		57.062.060.0[illegible]		58.488.021.0[illegible]		59.000.827.0[illegible]		61.440.067.0[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	72,20	74	80	56.111.161.1[illegible]	82	57.062.060.0[illegible]	85	58.488.021.0[illegible]	87	59.000.827.0[illegible]	90	61.440.067.0[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERENCANAAN
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN	PERSENTASE DATA-DATA CAPAIAN KINERJA PEMDA (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERENCANAAN
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD (PERSENTASE)	100	100	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERENCANAAN
	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD (PERSENTASE)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PERENCANAAN
MENINGKATNYA KUALITAS	PERSENTASE DATA	100	100	100	1.862.[illegible]	100	1.470.[illegible]	100	1.[illegible]	100	1.[illegible]	100	1.714.[illegible]	DINAS/BADAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DATA YANG AKURAT DAN ANDAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	[illegible] PEMBANGUNAN DATA YANG AKURAT DAN ANDAL (%)													MENANGANI BIDANG PERENCANAAN
5.01.02 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (PERSENTASE)	100	100	100	1.412.682.000,00	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	BAPPEDA DAN YANG MENANGANI BIDANG PERENCANAAN
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (PERSENTASE)	100	100	100	748.517.000,00	100	1.229.148.700,00	100	[illegible]	100	1.176.500.[illegible],00	100	1.215.010.[illegible],00	BAPPEDA DAN YANG MENANGANI BIDANG PERENCANAAN
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (PERSENTASE)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	BAPPEDA DAN YANG MENANGANI BIDANG PERENCANAAN
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	61.78	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	61.78	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	61.78	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	61.78	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	61.78	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	61.78	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	61.78	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA	61.78	74	80		82		85		87		90		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PERANGKAT DAERAH [illegible]													KEUANGAN
[illegible] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA AKUNTANSI DAN PELAPORAN	PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARAAN	PERSENTASE PENGELOLAAN BELANJA DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN RAPERDA/RAPERKADA APBD DAN RAPERDA/RAPERKADA PERUBAHAN APBD SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	PERSENTASE RAPERDA/RAPERKADA KAB/KOTA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD YANG DIEVALUASI (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[illegible] PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) (INDEKS)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
[illegible] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG DIMANFAATKAN (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN BERBASIS DIGITAL PENGENDALIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	PERSENTASE HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DISELESAIKAN (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	PERSENTASE SISTEM INFORMASI PENDAPATAN BERBASIS DIGITAL YANG DIKEMBANGKAN (%)	70	75	80		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
MENINGKATNYA POTENSI	PERSENTASE REALISASI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN DAERAH TERHADAP TARGET (%)													MENANGANI BIDANG KEUANGAN
MENINGKATNYA PENERIMAAN PAJAK DAERAH (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD SERANG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	4,18	4,22	4,23	[illegible]	4,23	[illegible]	4,24	[illegible]	4,24	[illegible]	4,24	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD [illegible] (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD PANDEGLANG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN,	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PAJAK ALAT BERAT) (%)													
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD RANGKASBITUNG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	2.28	2.16	2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD MALINGPING (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	0.84	0.07	0.00		0.80		0.80		0.80		0.80		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CIPUTAT (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	15.95	14.81	15.05		15.06		15.07		15.08		15.08		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK	11.76	10.15	11.45		11.44		11.44		11.42		11.41		DINAS/BADAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TAR GET	2026 PAGU	2027 TAR GET	2027 PAGU	2028 TAR GET	2028 PAGU	2029 TAR GET	2029 PAGU	2030 TAR GET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	DAERAH UPTD PPD SERPONG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)													MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD BALARAJA (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	12.87	12.07	11.87		11.87		11.87		11.77		11.77		BAPENDA DAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CIKOKOL (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT) (%)	14.16	12.81	17.01		17.82		17.86		17.96		17.96		BAPENDA DAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CILEDUG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA	12.09	12.41	11.09		11.30		11.29		11.30		11.30		BAPENDA DAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT (%)													
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CILEGON (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT (%)	4,15	4,07	4,08		4,08		4,08		4,08		4,08		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD KELAPA DUA (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT (%)	13,20	13,56	13,30		13,17		13,17		13,18		13,18		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEUANGAN
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA	INDEKS REFORMASI	70,16	77	80	[illegible]	82	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[illegible] PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	[illegible] PADA PERANGKAT DAERAH [illegible]													MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN
[illegible] PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK MUTASI DAN PROMOSI (INDEKS)	37,5	38	38	[illegible]	40	[illegible]	40	[illegible]	40	[illegible]	40	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN
	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGADAAN PEGAWAI ASN (INDEKS)	40	40	40		40		40		40		40		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN
	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN PEGAWAI ASN (INDEKS)	117,5	117,5	118		118		118,5		118,5		120		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KARIR ASN	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGEMBANGAN KARIR (INDEKS)	45	45	46	[illegible]	48	[illegible]	50	[illegible]	55	[illegible]	60	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN
MENINGKATNYA ASN YANG MEMILIKI NILAI KINERJA MINIMAL DENGAN PREDIKAT BAIK	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK MANAJEMEN KINERJA (INDEKS)	73,5	73,5	75,8	[illegible]	78	[illegible]	78	2.400.000.000,00	80	[illegible]	80	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN
	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGELOLAAN	22	22	23		23		24		24		24		DINAS/BADAN YANG MENANGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	SISTEM INFORMASI [illegible]													NI BIDANG KEPEGAWAIAN
	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGHARGAAN, PENGGAJIAN, DISIPLIN DAN MANAJEMEN KINERJA (INDEKS)	72,5	72,5	73		73		74		74		75		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN
	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (INDEKS)	16	16	16		16		16		18		18		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KEPEGAWAIAN
5.07 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (INDEKS)	[illegible]	78	80	[illegible]	83	[illegible]	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.07.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DASAR, KADER MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	DASAR, MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL BERKATEGORI BAIK (%)													AN DAN PELATIHAN
MENINGKATNYA KUALITAS ANALISIS KEBUTUHAN, PERANCANGAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SESUAI DENGAN ANALISIS KEBUTUHAN (%)	100	100	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MENINGKATNYA LAYANAN PENJAMINAN MUTU DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	PERSENTASE ASN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI (PERSENTASE)	[illegible]	60	65	[illegible]	70	[illegible]	85	[illegible]	90	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	PERSENTASE KETERSEDIAAN BAHAN PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA (%)	100	100	100		100		100		100		100		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS BERKATEGORI BAIK (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
[illegible] PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible] PROGRAM					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 TARGET	2026 PAGU	2027 TARGET	2027 PAGU	2028 TARGET	2028 PAGU	2029 TARGET	2029 PAGU	2030 TARGET	2030 PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
RISET DAN INOVASI DAERAH														
MENINGKATNYA RISET DAN INOVASI DAERAH YANG TERIMPLEMENTASIKAN	PERSENTASE RISET DAN INOVASI YANG DI IMPLEMENTASIKAN (%)	0	100	100	2.411.432.000,00	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	100	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.07 PENUNJANG PENGHUBUNG					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.909.282.444,00		10.674.597.095,00		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH (NILAI)	72.97	74	80	9.909.282.444,00	82	10.674.597.095,00	85	[illegible]	87	[illegible]	90	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGELOLAAN PENGHUBUNG
5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					384.844.807,00		1.971.977.000,00		1.971.977.000,00		1.971.977.000,00		1.971.977.000,00	
MENINGKATNYA KUALITAS FASILITASI KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAYANAN PENGHUBUNG	PERSENTASE FASILITASI KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHUBUNG YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR (%)	100	100	100	384.844.807,00	100	1.971.977.000,00	100	1.971.977.000,00	100	1.971.977.000,00	100	1.971.977.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG PENGELOLAAN PENGHUBUNG
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
6.01.01 PROGRAM					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PADA PERANGKAT DAERAH [illegible]	[illegible]	[illegible]	80	[illegible],00	82	[illegible],00	85	[illegible],00	87	[illegible],00	90	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG INSPEKTORAT DAERAH
[illegible] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	
MENINGKATNYA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DAERAH	RATA-RATA NILAI SAKIP OPD [illegible]	78,21	78,51	78,87	1.100.000.000,00	[illegible]	1.400.000.000,00	[illegible]	1.600.000.000,00	[illegible]	1.800.000.000,00	[illegible]	1.600.000.000,00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG INSPEKTORAT DAERAH
MENINGKATNYA IMPLEMENTASI PENGENDALIAN [illegible]	NILAI PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG INSPEKTORAT DAERAH
MENINGKATNYA TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN	PERSENTASE PENYELESAIAN TLHP [illegible]	80	[illegible]	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	[illegible]	[illegible],00	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG INSPEKTORAT DAERAH
[illegible] PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00		[illegible],00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN ZI	JUMLAH UNIT KERJA YANG MEMENUHI KRITERIA ZI (UNIT KERJA)	2	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG INSPEKTORAT DAERAH
	NILAI PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH OLEH KPK [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG INSPEKTORAT DAERAH
[illegible] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible] - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH	[illegible] PADA PERANGKAT DAERAH [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
[illegible] - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KETAHANAN MASYARAKAT AKAN IDEOLOGI	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA [illegible] BANTEN DALAM ASPEK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DINAS/BADAN YANG MENANGANI BIDANG KESATUAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BERSERIKAT, BERPENDAPAT DAN [illegible] ANTAR MASYARAKAT (NILAI)													N BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM PEMILU UNTUK SELURUH KELOMPOK MASYARAKAT (NILAI)	97,80	97,81	97,82	[illegible]	97,84	[illegible]	97,86	[illegible]	97,90	[illegible]	97,92	[illegible]	[illegible] KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KAMASYARAKATAN														
MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BERSERIKAT, BERPENDAPAT DAN [illegible] DALAM SETIAP KEBIJAKAN [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT	NILAI DIMENSI EKONOMI PADA INDEKS HARMONI INDONESIA (IHI) BANTEN (NILAI)	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DAN YANG MENANGANI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KONFLIK SOSIAL														
MENINGKATNYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL YANG DISELESAIKAN	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DAN TERDALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BERSERIKAT, BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT OLEH APARAT NEGARA (BEBAS	87.74	87.74	87.75	[illegible] 0.00	87.76	[illegible] 0.00	87.77	[illegible] 0.00	87.78	[illegible] 0.00	87.79	[illegible] 0.00	PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan tersebut mengacu pada kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025-2029 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, serta mandat yang diemban. IKU Pemerintah Daerah Provinsi Banten merupakan Indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, dimana IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi tertinggi dan merupakan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome*, yang pada umumnya merupakan hasil dari *crosscutting* beberapa urusan dalam bentuk program sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

TABEL IV.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RPJMD TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I	**TUJUAN DAERAH**										
1	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS	87,40	89,00	90,59	92,32	93,49	94,32	95,41	95,41	
2	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	4,78	5,10-5,30	5,60-6,20	6,45-7,10	6,82-7,39	7,10-7,9	7,71-7,92	7,71-7,93	*)
3	TINGKAT KEMISKINAN	PERSEN	5,84	4,50-5,30	4,45-5,15	4,24-4,68	3,65-4,00	2,52-3,42	2,08-3,40	2,08-3,40	*)
4	RASIO GINI	NILAI	0,353	0,344-0,365	0,340-0,360	0,335-0,355	0,330-0,341	0,325-0,330	0,310-0,320	0,310-0,320	*)
5	INDEKS MODAL MANUSIA	INDEKS	INDIKATOR BARU	0,56	0,570	0,575	0,580	0,59	0,595	0,60	*)
6	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA/TPT	PERSEN	6,64 (AGUSTUS 2024)	6,87-7,24	6,45-6,85	6,43-6,60	6,40-6,58	6,38-6,50	6,37-6,39	6,37-6,39	*)
7	INDEKS WILLIAMSON	INDEKS	0,770 (2023)	0,760	0,747	0,732	0,714	0,695	0,670	0,670	
8	PENURUNAN INTENSITAS EMISI GRK	PERSEN	N/A	39,45	44,03	47,28	52,12	56,55	58,13	58,13	*)
II	**SASARAN DAERAH**										
1	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS	3,73	3,84	3,95	4,05	4,14	4,32	4,35	4,35	*)
2	INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	INDEKS	57,51	66,77	66,77	66,80	66,82	66,90	67,00	67,00	
3	INDEKS SISTEM MERIT	INDEKS	331,50	331,00	331,00	365,00	380,00	400,00	400,00	400,00	
4	NILAI SAKIP/SAKP	NILAI	69,24	70,10	73,41	74,95	76,63	80,07	80,80	80,80	
5	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)	INDEKS	77,49 (2023)	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00	
6	NILAI INDEKS TRANSFORMASI DIGITAL PILAR PEMERINTAH	INDEKS	64,72	65,00	66,30	67,60	68,90	70,20	71,50	71,50	
7	INDEKS INTEGRITAS NASIONAL	INDEKS	71,21	72,74	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00	*)
8	INDEKS INOVASI DAERAH	INDEKS	45,07	35,20-38,00	38,15-40,20	61,11-62,32	63,15-64,19	64,33-65,00	65,25-67,87	65,25-67,87	
9	NILAI PDRB ADHK	TRILIUN RUPIAH	511,74	539,89	593,11	631,24	674,38	723,02	778,74	778,74	
10	NILAI PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	TRILIUN RUPIAH	165,00	176,20	187,43	197,85	208,11	218,17	227,34	227,34	
11	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH	PERSEN	73,22	67,20	67,49	67,67	67,84	68,00	68,20	68,20	
12	INDEKS DEMOKRASI PROVINSI	INDEKS	75,83	80,58-83,92	81,14-83,95	82,50-84,55	83,00-86,45	83,87-87,12	84,12-87,50	84,12-87,50	*)
13	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN	INDEKS	0,81	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,50	
14	PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN	PERSEN	6,27	5,99	5,78	5,58	5,38	5,17	4,96	4,96	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
16	PERSENTASE PERTUMBUHAN SKALA USAHA KECIL KE MENENGAH	PERSEN	16,88	17,08	17,28	17,48	17,68	17,88	18,08	18,08	*1
17	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA DI ATAS 15 TAHUN (RLS)	TAHUN	9,55	9,60-9,69	9,75-9,81	9,91-9,93	10,04-10,05	10,16-10,17	11,12-11,30	11,12-11,30	*1
18	HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)	TAHUN	13,11	13,21-13,24	13,27-13,29	13,24-13,36	13,46-13,41	13,46-13,47	14,20-15,00	14,20-15,00	*1
19	INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN (IPK)	INDEKS	53,87	53,59-53,67	53,65-54,21	58,06-54,78	53,68-58,28	55,09-58,82	56,38-57,20	56,38-57,20	*1
20	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM)	INDEKS	61,88	62,16	72,06	73,20	74,43	75,17	75,91	75,91	
21	USIA HARAPAN HIDUP (UHH)	TAHUN	74,97	75,21	75,47	75,75	76,32	76,77	77,07	77,07	*1
22	PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA	PERSEN	21,10	20,30	19,50	18,40	17,30	16,70	16,10	16,10	
23	INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (IBANGGA)	INDEKS	62,60	64,30	66,00	67,70	69,40	71,10	72,93	72,93	*2
24	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	PERSEN	65,82	66,41	66,66	66,91	67,17	67,42	67,67	67,67	
25	INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR	INDEKS	2.96	3.00	3.20	3.40	3.60	3.80	4.00	4.00	
26	RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN	PERSEN	65,25	67,08	68,98	70,89	72,79	74,69	75,31	75,31	*1
27	RASIO KONEKTIVITAS	PERSEN	0,68	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	
28	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKLH)	INDEKS	62,58	66,92	67,37	67,42	67,58	67,50	70,00	70,00	*1
29	INDEKS KETAHANAN PANGAN (IKP)	INDEKS	79,25	79,50	79,75	80,25	80,75	81,25	81,75	81,75	
30	INDEKS RISIKO BENCANA (IRB)	INDEKS	128,04	105,17	105,16-104,89	104,45-103,62	103,30-102,00	101,85-98,60	100,70-98,35	100,70-98,35	*1
31	PERSENTASE PENURUNAN EMISI GRK	PERSEN									*1
	A) KUMULATIF	PERSEN	N/A	2,26	2,75	3,10	4,38	4,56	5,11	5,11	*1
	B) TAHUNAN	PERSEN	N/A	8,80	10,51	12,89	15,04	18,19	20,19	20,19	*1

Sumber: Diolah oleh Bappeda 2025

Keterangan:

- **1 Target 2025 & 2029 Sesuai Exercise Bappenas Dalam Lampiran Buku Saku*

- **2 Target 2025–2029 Sebagaimana Surat Dirjen Bangda Nomor 400.9.3/3745/Bangda Tanggal 4 Juli 2025 Perihal Indikator Kinerja Dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah*
- *Indeks Demokrasi Provinsi selaras dengan Indeks Demokrasi Indonesia.*
- *Indeks Integritas Daerah selaras dengan Indeks Integritas Nasional*

4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang akan dicapai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. IKD disajikan berdasarkan masing-masing aspek pembangunan, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Indikator-indikator tersebut merupakan gambaran ukuran kinerja urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.3
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) PADA RPJMD TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**										
1	INDEKS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	NILAI	-	0,224	0,228	0,232	0,236	0,234	0,330	0,330	*1
2	RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN	PERSEN	-	16,00	23,25	30,50	37,75	45,00	45,8	45,80	*1
3	TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH	PERSEN	-	14,00	17,25	20,50	23,75	27,00	27,30	27,35	*1
4	PROPORSI RUMAH TANGGA (RT) DENGAN LAYANAN PENUH PENGUMPULAN SAMPAH	PERSEN	-	71,00	78,25	85,50	92,75	100,00	100,00	100,00	*1
5	KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA	KWH / KAPITA	2.204,46	2.286,00	2.355,00	2.412,10	2.520,46	2.579,00	2.749,09	2.749,09	*1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
6	INTENSITAS ENERGI PRIMER	SBM/ RP MILYAR	-	472.016,00	469.168,75	466.321,50	463.474,25	460.627,00	475.000,00	475.000,00	*1
7	PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN (*PREVALENCE OF UNDERNOURISHMENT*)	PERSEN	-	2,648	2,525	2,401	2,278	2,154	2,030	2,030	*1
8	KAPASITAS AIR BAKU	M3/ KAPITA	-	0,98	2,11	3,22	4,34	5,45	5,71	5,71	*2
9	AKSES RUMAH TANGGA PERKOTAAN TERHADAP AIR SIAP MINUM PERPIPAAN	PERSEN	-	30,46	33,85	37,23	40,62	44,00	46,25	46,25	*1
10	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	PERSEN	1,16	1,14	1,11	1,05	0,95	0,94	0,88	0,88	
11	RASIO PENDUDUK	PERSEN	103,44	103,29	103,14	102,99	102,84	102,69	102,54	102,54	
12	KEPADATAN PENDUDUK	ORANG/ KM2	1.329,00	1.330,06	1.355,09	1.380,12	1.405,15	1.430,18	1.455,21	1.455,21	
13	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (*TOTAL FERTILITY RATE*/TFR) PER WANITA USIA SUBUR (15-49 TAHUN)	ANGKA/ RATE	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	*3
14	ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN/*AGE SPECIFIC FERTILITY RATE* (ASFR 15-19 TAHUN)	ANGKA/ RATE	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	*3
15	INDEKS PEMBANGUNAN	INDEKS	61,20	62,40	63,47	64,50	65,54	66,51	67,45	67,45	*3

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	BERWAWASAN KEPENDUDUKAN (IBTK)										
16.	PROPORSI KEBUTUHAN KB YANG TERPENUHI MENURUT ALAT/CARA KB MODERN	PERSEN	85,46	86,13	86,70	87,28	87,86	88,45	89,04	89,04	*5
17	PERSENTASE KEHAMILAN TIDAK DIRENCANAKAN (KTD)	PERSEN	13,40	13,07	12,72	12,39	12,06	11,76	11,46	11,46	*5
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
1	ANGKA KEMATIAN IBU (PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)	PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP	-	101,00	94,00	84,00	74,00	64,00	63,00	63,00	*1
2	ANGKA KEMATIAN BALITA	PERSEN	13,28	12,09	11,39	11,13	10,47	9,67	9,59	9,59	*4
3	CAKUPAN PENERIMA PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS	PERSEN	-	30,00	40,00	55,00	61,00	70,00	75,00	75,00	*5
4	CAKUPAN IMUNISASI BAYI LENGKAP	PERSEN	-	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	97,00	97,00	*2
5	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS (*TREATMENT COVERAGE*)	PERSEN	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	*1
6	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS	PERSEN	-	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	*1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	(TREATMENT SUCCESS RATE)										
7	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	PERSEN	-	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	99,20	99,30	*1
8	PERSENTASE HIPERTENSI DALAM PENGENDALIAN	PERSEN	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	*5
9	PROPORSI PENDUDUK DENGAN AKTIVITAS FISIK CUKUP	PERSEN	60,00	62,40	63,90	65,40	66,40	67,40	70,00	70,00	*5
10	A) PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK:										
10.A	- LITERASI MEMBACA	PERSEN	-	12,50-25,00	18,75-28,13	25-31,25	31,25-34,38	37,50-37,50	37,80-38,10	37,80-38,10	*1
10.B	- NUMERASI	PERSEN	-	0-12,50	3,125-15,63	6,25-18,75	9,375-21,88	12,50-25,00	15,00-25,00	15,00-25,00	*1
11	B) PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENCAPAI STANDAR KOMPETENSI MINIMUM PADA ASESMEN TINGKAT NASIONAL UNTUK:										
11.A	- LITERASI MEMBACA	PERSEN	-	38,29-40,70	39,44-41,94	40,60-43,10	41,75-44,20	42,90-45,40	46,20-49,20	46,20-49,20	*1
11.B	- NUMERASI	PERSEN	-	33,71-36,21	34,66-37,16	35,61-38,11	36,56-39,06	37,51-40,01	40,16-42,30	40,16-42,30	*1
12	PROPORSI PENDUDUK BERUSIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BERKUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGGI	PERSEN	-	0,84	0,84-0,88	0,88-0,91	0,84-0,93	0,84-0,96	0,86-0,98	0,86-0,98	*1
13	PERSENTASE PEKERJA LULUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI YANG BEKERJA DI BIDANG KEAHLIAN MENENGAH TINGGI	PERSEN	-	64,42	65,47	66,53	67,58	68,63	69,69	69,69	*1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
14	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	PERSEN	-	51,08	56,57	58,76	60,95	63,14	65,00	65,00	*1
15	JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG MENDAPATKAN FASILITASI DARI UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN/ATAU DARI DINAS YANG MENANGANI BIDANG KETENAGAKERJAAN	JUMLAH	-	1.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	11.700,00	12.900,00	12.900,00	*1
16	JUMLAH UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN DI TINGKAT KAB/KOTA/PROVINSI	UNIT	-	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00	*1
17	PROPORSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA FORMAL	PERSEN	-	56,00	57,45	58,90	60,35	61,80	62,33	62,33	*1
18	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	PERSEN	-	50,00-50,36	50,15-50,81	50,25-51,26	50,40-51,71	50,56-52,16	52,20-54,00	52,20-54,00	*1
19	INDEKS KERUKUNAN UMAT	INDEKS	70,03	70,49-70,58	70,80-70,89	71,12-71,20	71,43-71,60	71,74-71,90	72,45-73,00	72,45-73,00	*1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	BERAGAMA (IKUB)										
20	INDEKS PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA (IPKK)	INDEKS	-	71,37	72,19	72,86	73,39	73,85	74,21	74,21	*1
21	INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)	INDEKS	0,453	0,439	0,426	0,413	0,400	0,387	0,375	0,375	*1
22	PDRB PER KAPITA	JUTA RUPIAH	70,28	73,33-76,1	80,20-82,40	85,00-87,38	93,70-96,17	104,06-106,80	115,80-118,22	115,80-118,22	*1
23	KONTRIBUSI PDRB SEKTOR INDUSTRI	PERSEN	-	30,48-31,20	30,53-31,48	30,92-31,54	31,00-31,94	31,20-32,10	32,05-33,08	32,05-33,08	*2
24	KONTRIBUSI PDRB PROVINSI	PERSEN	-	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	*1
25	INDEKS PERLINDUNGAN ANAK	INDEKS	71,77	72,56	73,22	73,77	74,81	75,36	75,91	75,91	
26	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	INDEKS	92,61	92,82	93,05	93,62	94,19	94,76	95,33	95,33	
27	INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA	INDEKS	61,90 (2023)	62,15	62,40	62,65	62,90	63,15	63,40	63,40	
28	INDEKS PENGASUHAN KELUARGA REMAJA	INDEKS	83,55	84,76	85,89	86,93	87,89	88,79	89,61	89,61	*1
29	INDEKS LANSIA BERDAYA	INDEKS	56,64	56,69	56,74	56,79	56,85	56,90	56,95	56,95	*3
30	PERSENTASE KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS YANG MANDIRI	PERSEN	69,72	74,72	79,72	84,72	89,72	94,72	95,72	95,72	*1
31	INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL	PERSEN	-	57,42	58,32	59,32	60,42	61,00	61,20	61,20	
32	JUMLAH PRODUK	PRODUK	119.883,00	186.468,00	186.095,00	185.728,00	185.407,00	185.290,00	185.274,00	185.274,00	*5

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	TERSERTIFIKASI HALAL										
23	ASET PERBANKAN SYARIAH/TOTAL	PERSEN	4,83	5,11	5,67	6,07	6,58	7,06	7,10	7,10	*6
24	INDEKS ZAKAT NASIONAL	POIN	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,78	*6
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
1	RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN (PERSEN)	PERSEN	-	20,48	20,49	22,45	22,53	24,89	23,75	23,75	*1
2	PERTUMBUHAN PDRB PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	PERSEN	-	3,80	4,25	4.85	5,38	5,90	6,20	6,20	*1
3	RASIO PDRB PENYEDIAAN AKOMODASI MAKAN DAN MINUM	PERSEN	-	2,45	2,48	2,51	2,53	2,56	2,60	2,60	*1
4	JUMLAH TAMU WISATAWAN MANCANEGARA	RIBU ORANG	-	496,89	522,34	547,00	572,05	597,10	600,00	600,00	*1
5	PROPORSI PDRB EKONOMI KREATIF TERHADAP PDB EKONOMI KREATIF NASIONAL	PERSEN	-	5,38	5,50	5,62	5,73	5,85	6,00	6,00	*1
6	PROPORSI JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)	PERSEN	-	2.80	2.97	3.08	3.19	3.30	3.58	3.58	*1
7	PROPORSI JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA LEVEL PROVINSI	PERSEN	-	5,28	5,59	5,90	6,21	6,30	6,74	6,74	*2

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
8	RASIO KEWIRAUSAHAAN DAERAH	PERSEN	2,04	2,14	2,18	2,20	2,23	2,25	2,26	2,26	*1
9	RASIO VOLUME USAHA KOPERASI TERHADAP PDRB	PERSEN	-	0,87	0,90	0,92	0,95	0,98	1,00	1,00	*1
10	RETURN ON ASSET (ROA) BUMD	PERSEN	-	1,89	2,03	2,16	2,30	2,43	2,55	2,55	*1
11	INDEKS EKONOMI HIJAU DAERAH	INDEKS	-	41,98	43,87	46,22	48,57	50,77	53,15	53,15	*1
12	PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI PRIMER	PERSEN	21,24	24,04	26,74	29,43	32,15	34,83	35,88	35,88	*1
13	INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	INDEKS	-	6,20	6,47	6,60	6,75	6,90	7,20	7,20	*1
14	KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTARWILAYAH TINGKAT PROVINSI	NILAI	-	9,60	9,48	9,35	9,20	9,10	9,07	9,07	*1
15	PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	PERSEN PDRB	-	34,60	34,63-34,69	34,72-34,76	34,80-34,90	34,92-35,19	35,20-35,28	35,20-35,28	*1
16	EKSPOR BARANG DAN JASA	PERSEN PDRB	-	22,74-22,80	23,02-23,18	23,29-23,56	23,57-23,93	23,84-24,31	24,75-24,99	24,75-24,90	*1
17	PROPORSI KONTRIBUSI PDRB WILAYAH METROPOLITAN TERHADAP NASIONAL	PERSEN	-	24,53 **WM JAKARTA (TERDIRI DARI DKI JAKARTA, KOTA BOGOR, KABUPATEN BOGOR, KOTA DEPOK, KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG,**	24,73 **WM JAKARTA (TERDIRI DARI DKI JAKARTA, KOTA BOGOR, KABUPATEN BOGOR, KOTA DEPOK, KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG,**	24,91 **WM JAKARTA (TERDIRI DARI DKI JAKARTA, KOTA BOGOR, KABUPATEN BOGOR, KOTA DEPOK, KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG,**	25,10 **WM JAKARTA (TERDIRI DARI DKI JAKARTA, KOTA BOGOR, KABUPATEN BOGOR, KOTA DEPOK, KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG,**	25,31 **WM JAKARTA (TERDIRI DARI DKI JAKARTA, KOTA BOGOR, KABUPATEN BOGOR, KOTA DEPOK, KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG,**	25,50 **WM JAKARTA (TERDIRI DARI DKI JAKARTA, KOTA BOGOR, KABUPATEN BOGOR, KOTA DEPOK, KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG,**	25,50 **WM JAKARTA (TERDIRI DARI DKI JAKARTA, KOTA BOGOR, KABUPATEN BOGOR, KOTA DEPOK, KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG,**	*1

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				KOTA TANGERANG SELATAN, KOTA BEKASI, KABUPATEN BEKASI DAN KABUPATEN CIANJUR)	KOTA TANGERANG SELATAN, KOTA BEKASI, KABUPATEN BEKASI DAN KABUPATEN CIANJUR)	KOTA TANGERANG SELATAN, KOTA BEKASI, KABUPATEN BEKASI DAN KABUPATEN CIANJUR)	KOTA TANGERANG SELATAN, KOTA BEKASI, KABUPATEN BEKASI DAN KABUPATEN CIANJUR)	KOTA TANGERANG SELATAN, KOTA BEKASI, KABUPATEN BEKASI DAN KABUPATEN CIANJUR)	KOTA TANGERANG SELATAN, KOTA BEKASI, KABUPATEN BEKASI DAN KABUPATEN CIANJUR)	KOTA TANGERANG SELATAN, KOTA BEKASI, KABUPATEN BEKASI DAN KABUPATEN CIANJUR)	
18	PERSENTASE DESA MANDIRI	PERSEN	8,00	15,67	16,20	16,72	17,25	17,77	17,98	17,98	*1
19	RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB	PERSEN	0,98	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	*1
20	TINGKAT INFLASI	PERSEN	1,86	1,5-3,5	1,52-3,5	1,55-3,5	1,56-3,5	1,6-3,5	1,61-3,5	1,61-3,5	*1
21	TOTAL DANA PIHAK KETIGA/PDRB	PERSEN	-	34,29	35,45	36,60	37,76	38,91	40,2	40,20	*1
22	ASET DANA PENSIUN/PDRB	PERSEN	-	0,77	0,78	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	*1
23	NILAI TRANSAKSI SAHAM PER KAPITA PER PROVINSI	RUPIAH	-	17.909.655,76	20.670.151,00	23.436.546,37	26.188.091,57	28.951.436,84	29.000.000,00	29.000.000,00	*1
24	TOTAL KREDIT/PDRB	PERSEN	-	25,00	26,02	27,04	28,05	29,07	29,26	29,26	*1
25	INKLUSI KEUANGAN	PERSEN	-	91,85	92,41	92,98	93,56	94,13	94,22	94,22	*1
26	HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI/*SISTER PROVINCE*	JUMLAH	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
27	ANGKA KETERGANTUNGAN	PERSEN	42,58	42,58	42,41	42,30	42,20	42,18	42,11	42,11	
28	INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA	IEBI	-	25,62	30,60	31,59	32,29	33,11	33,15	33,15	*2

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
1	INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH)	INDEKS	99,40	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70	99,80	99,80	
2	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	INDEKS	3,47	3,50	3,49	3,32	3,29	3,18	3,17	3,17	*1
3	PERSENTASE PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH	PERSEN	-	70,00	71,43	72,85	74,28	75,70	77,23	77,23	*4
4	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN AKSI HAM	PERSEN	-	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,00	72,00	*4
5	PROPORSI PENDUDUK YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI AREA TEMPAT TINGGALNYA	PERSEN	-	60,00	60,75	61,50	62,25	63,00	65,00	65,00	*1
6	INDEKS RASA AMAN	INDEKS	55,37	55,39	55,41	55,43	55,45	55,47	55,49	55,49	
7	INDEKS DAYA SAING DAERAH	INDEKS	-	3,70	3,77	3,82	3,88	3,90	3,93	3,93	

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2025

Keterangan:

- **1 Target 2025 s/d 2029 Sesuai Exercise Bappenas Dalam Lampiran Buku Satu*
- **2 Target Tahun 2025 Berdasarkan Pengendalian RPJPN-RPJPD Sebagaimana SE Tentang Penyelarasan Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam RPJPD Tahun 2025-2045 Tanggal 6 Agustus 2024*
- **3 Target 2025-2029 Sebagaimana Surat Dirjen Bangda Nomor 400.9.1/2345/Bangda Tanggal 4 Juli 2025 Perihal Indikator Kinerja Utama Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Daerah*
- **4 Indikator Dan Target Tahun 2025-2030 Merujuk Kepada Surat Kemenkum Nomor PH.01.01/A/2902/2025 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan UHK 2025-2029 Dalam Rpjmd Renstra-PD 2025-2029.*
- **5 Indikator Dan Target Tahun 2025-2029 Merujuk Kepada Surat Kemenkum Nomor PH.01.01/A/2902/2025 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan UHK 2025-2029 Dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.*
- **6 Surat Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor 13830/D.3/PR.01.03/08/2025 Tanggal 6 Agustus 2025 Perihal Permohonan Penyelarasan Indikator Outcome Ekonomi Syariah Dalam Dokumen RPJMD Provinsi Hingga Kabupaten/Kota 2025-2029*

4.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator ukuran yang digunakan untuk dapat mengukur suatu keberhasilan terhadap pelaksanaan dimasing-masing urusan yang akan dicapai pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030. IKK disajikan berdasarkan urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah, pengawasan, dan pemerintahan umum sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

TABEL IV.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PADA RPJMD TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1.01 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18	POSITIF	PERSENTASE	71,91	72,50	73,50	74,50	75,50	76,50	77,50	
2	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KAB TANGERANG	POSITIF	PERSENTASE	69,12	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	
3	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG DAN KAB SERANG	POSITIF	PERSENTASE	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	
4	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN	POSITIF	PERSENTASE	82,23	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	
5	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 7-18 KABUPATEN	POSITIF	PERSENTASE	61,22	62,00	62,50	63,00	63,50	64,00	64,50	
6	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SKH	POSITIF	NILAI	62,67	64,25	65,83	67,40	69,03	70,63	72,25	
7	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA	POSITIF	NILAI	60,72	62,22	63,72	65,22	66,72	68,22	69,72	
8	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KAB SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON	POSITIF	NILAI	59,95	61,15	62,35	63,55	64,75	65,95	67,15	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KABUPATEN LEBAK	POSITIF	NILAI	58,26	59,46	60,66	61,86	63,06	64,26	65,46	
10	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG	POSITIF	NILAI	58,64	59,84	61,04	62,24	63,44	64,64	65,84	
11	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KABUPATEN TANGERANG	POSITIF	NILAI	59,06	60,26	61,46	62,66	63,86	65,06	66,26	
12	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMA WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN	POSITIF	NILAI	65,23	66,43	67,63	68,83	70,03	71,23	72,43	
13	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK	POSITIF	NILAI	55,91	58,21	60,51	62,81	65,11	67,41	69,71	
14	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KABUPATEN LEBAK	POSITIF	NILAI	53,60	54,80	56,00	57,20	58,40	59,60	60,80	
15	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG	POSITIF	NILAI	53,17	53,80	54,16	54,79	55,15	55,78	56,14	
16	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KABUPATEN TANGERANG	POSITIF	NILAI	55.17	56.37	57.57	58.77	59.97	61.17	62.37	
17	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KOTA SERANG, KAB SERANG, KOTA CILEGON	POSITIF	NILAI	55.80	57.00	58.20	59.40	60.60	61.80	63.00	
18	NILAI IKLIM INKLUSIVITAS SMK WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN	POSITIF	NILAI	59,53	60,37	60,73	61,35	61,58	62,34	62,69	
19	NILAI IKLIM KEAMANAN [illegible]	POSITIF	NILAI	65,11	66,41	67,71	69,01	70,31	71,61	72,91	
20	NILAI IKLIM KEAMANAN SMA	POSITIF	NILAI	71,87	80,93	82,13	83,33	84,53	85,73	86,93	
21	NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KABUPATEN LEBAK	POSITIF	NILAI	72,79	73,18	73,56	74,02	74,50	74,95	75,09	
22	NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG	POSITIF	NILAI	70,73	70,85	71,04	71,44	71,87	72,30	73,12	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23	NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAHKABUPATEN TANGERANG	POSITIF	NILAI	69,81	70,26	70,52	71,30	71,78	72,65	73,63	
24	NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAHKOTA SERANG, KAB SERANG, KOTA CILEGON	POSITIF	NILAI	71,05	71,74	72,06	72,54	73,22	73,94	74,74	
25	NILAI IKLIM KEAMANAN SMA WILAYAH KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN	POSITIF	NILAI	74,78	75,12	75,97	76,22	76,76	77,38	78,03	
26	NILAI IKLIM KEAMANAN SMK	POSITIF	PERSENTASE	67,60	68,80	70,00	71,20	72,40	73,60	74,80	
27	NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KABUPATEN LEBAK	POSITIF	NILAI	65,20	65,56	67,13	67,67	68,30	69,03	69,08	
28	NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAHKABUPATEN PANDEGLANG	POSITIF	NILAI	66,01	65,79	67,18	67,70	68,24	69,03	69,68	
29	NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAHKABUPATEN TANGERANG	POSITIF	NILAI	66,07	67,02	67,72	68,30	68,72	69,18	69,80	
30	NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KOTA SERANG, KAB SERANG, KOTA CILEGON	POSITIF	NILAI	67,82	68,31	68,76	69,32	70,05	70,67	71,30	
31	NILAI IKLIM KEAMANAN SMK WILAYAH KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN	POSITIF	NILAI	70,08	70,87	71,43	71,90	72,44	72,90	73,35	
32	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA	POSITIF	NILAI	71,94	72,94	73,94	74,94	75,94	76,94	77,94	
33	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KAB. LEBAK	POSITIF	NILAI	71,03	71,37	72,00	72,34	72,77	73,11	73,40	
34	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KAB. PANDEGLANG	POSITIF	NILAI	70,84	71,16	71,48	71,72	71,84	72,08	72,30	
35	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KAB. SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON	POSITIF	NILAI	71,71	72,06	72,59	73,12	73,67	74,00	74,35	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
36	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KABUPATEN TANGERANG	POSITIF	NILAI	70,30	70,46	71,08	71,45	72,08	72,44	73,07	
37	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMA KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN	POSITIF	NILAI	75,11	75,37	75,87	76,18	76,56	76,86	77,16	
38	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK	POSITIF	NILAI	67,82	68,62	69,92	71,22	72,52	73,82	75,12	
39	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. LEBAK	POSITIF	NILAI	66,67	66,98	67,22	67,45	67,77	68,00	68,32	
40	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. PANDEGLANG	POSITIF	NILAI	63,73	65,07	66,20	66,84	67,27	67,61	68,04	
41	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SKH	POSITIF	NILAI	69,56	70,56	71,56	72,56	73,56	74,56	75,56	
42	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. SERANG, KOTA SERANG DAN KOTA CILEGON	POSITIF	NILAI	67,62	67,92	68,00	68,30	68,60	68,70	68,97	
43	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KAB. TANGERANG	POSITIF	NILAI	66,15	66,50	67,26	67,72	68,11	68,48	68,87	
44	NILAI IKLIM KEBHINEKAAN SMK KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN	POSITIF	NILAI	69,86	70,22	70,46	70,82	71,24	71,62	72,04	
45	PENERAPAN PRAKTIK INOVATIF	POSITIF	PERSENTASE	57,75	58,70	59,65	60,60	61,55	62,50	63,45	
46	PERSENTASE LULUSAN SMK YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KEAHLIAN	POSITIF	PERSENTASE	72,15	73,20	75,04	76,81	78,30	79,80	81,40	
47	PERSENTASE PENYERAPAN LULUSAN SMK	POSITIF	PERSENTASE	82,52	83,61	84,69	85,78	86,87	87,95	89,04	
48	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG MENERAPKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL	POSITIF	PERSENTASE	85,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
49	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SKH MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM	POSITIF	PERSENTASE	49,14	50,20	53,91	56,79	60,15	63,38	66,95	
50	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN	POSITIF	PERSENTASE	66,67	67,21	67,64	68,08	68,44	68,76	69,16	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	LITERASI SMP MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK										
51	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMP MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG	POSITIF	PERSENTASE	58,02	58,65	58,88	59,21	59,54	60,29	60,89	
52	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMP MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG	POSITIF	PERSENTASE	33,22	11,10	12,13	13,37	14,73	16,42	18,11	
53	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMP MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB. SERANG	POSITIF	PERSENTASE	75,00	75,26	75,07	75,72	75,85	76,19	76,55	
54	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMP MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN	POSITIF	PERSENTASE	33,22	34,53	35,55	36,67	38,12	39,81	41,04	
55	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM	POSITIF	PERSENTASE	76,70	79,71	81,56	83,97	85,58	87,93	90,50	
56	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK	POSITIF	PERSENTASE	68.54	69.74	71.00	71.68	72.91	74.01	75.11	
57	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG	POSITIF	PERSENTASE	67,76	69,52	71,27	72,25	73,50	74,86	76,22	
58	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI	POSITIF	PERSENTASE	71,26	73,10	74,40	75,70	77,00	78,30	79,60	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
	KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG										
59	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB. SERANG	POSITIF	PERSENTASE	73,93	75,23	76,53	78,32	79,11	80,31	81,31	
60	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN	POSITIF	PERSENTASE	91,27	91,98	92,04	92,11	93,08	93,12	94,02	
61	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM	POSITIF	PERSENTASE	76,75	79,80	82,65	85,15	87,40	89,33	91,70	
62	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK	POSITIF	PERSENTASE	45,60	46,49	47,47	48,39	49,27	50,26	51,13	
63	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG	POSITIF	PERSENTASE	57,00	59,08	61,76	63,10	64,75	66,43	68,52	
64	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB. SERANG	POSITIF	PERSENTASE	58,41	60,15	62,04	64,03	65,85	66,95	68,65	
65	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN LITERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTATANGERANG SELATAN	POSITIF	PERSENTASE	76,86	77,89	78,92	79,96	81,00	82,23	83,46	
66	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN	POSITIF	PERSENTASE	59,81	63,39	64,25	68,13	71,78	75,80	79,98	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NUMERASI SD MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM										
67	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SD MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK	POSITIF	PERSENTASE	66,67	66,90	67,26	67,59	68,05	68,31	69,06	
68	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SD MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG	POSITIF	PERSENTASE	66,67	67,06	67,71	68,35	69,22	69,50	70,38	
69	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SD MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG	POSITIF	PERSENTASE	44,43	45,11	45,75	46,44	47,31	48,21	49,10	
70	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SD MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB. SERANG	POSITIF	PERSENTASE	66,67	67,00	67,48	67,82	68,28	68,57	69,37	
71	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SD MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN	POSITIF	PERSENTASE	50,00	50,76	51,65	52,40	52,76	52,88	53,22	
72	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM	POSITIF	PERSENTASE	69,45	74,01	77,51	81,20	84,85	88,65	91,70	
73	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK	POSITIF	PERSENTASE	66,26	66,95	67,58	68,14	68,48	69,13	69,80	
74	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG	POSITIF	PERSENTASE	63,82	64,38	65,13	65,86	66,05	66,59	67,44	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
75	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG	POSITIF	PERSENTASE	70,00	70,56	71,26	72,08	72,33	73,49	73,99	
76	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB. SERANG	POSITIF	PERSENTASE	70,27	71,02	71,61	72,04	72,73	73,18	73,68	
77	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN	POSITIF	PERSENTASE	87,51	88,13	88,61	89,47	89,70	90,29	90,79	
78	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM	POSITIF	PERSENTASE	59,28	63,13	66,93	70,85	74,83	78,33	81,83	
79	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. LEBAK	POSITIF	PERSENTASE	47,07	48,06	48,86	49,44	50,22	50,96	51,42	
80	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. PANDEGLANG	POSITIF	PERSENTASE	48,01	49,57	50,44	50,80	51,74	52,62	53,50	
81	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KAB. TANGERANG	POSITIF	PERSENTASE	57,86	58,55	59,18	59,65	60,63	61,20	62,19	
82	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMK MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA CILEGON, KOTA SERANG, KAB. SERANG	POSITIF	PERSENTASE	59,27	60,12	60,26	61,34	62,41	63,28	64,12	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
83	PERSENTASE SISWA DENGAN KEMAMPUAN NUMERASI SMA MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN	POSITIF	PERSENTASE	73,81	74,46	75,18	76,05	76,30	77,46	77,91	
84	PERSENTASE SISWA SMK DENGAN KEMAMPUAN LITERASI MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM DI SMK KAB. PANDEGLANG	POSITIF	PERSENTASE	45,28	46,21	47,24	48,33	49,41	50,61	51,75	
85	PERSENTASE USULAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN YANG DITERBITKAN/DIPERBAHARUI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
86	RATA-RATA INDEKS DISTRIBUSI [illegible]	POSITIF	NILAI	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	
87	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KAB LEBAK	POSITIF	PERSENTASE	62,36	63,00	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	
88	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) 16-18 WILAYAH KAB PANDEGLANG	POSITIF	PERSENTASE	56,58	58,00	60,00	62,00	63,00	64,00	66,00	
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
89	PERSENTASE PENGEMBANGAN FASILITAS LAYANAN KESEHATAN UPTD RSUD MALINGPING	POSITIF	PERSENTASE	80,00	80,00	82,00	82,00	85,00	88,00	100,00	
90	CAKUPAN IMUNISASI BAYI LENGKAP	POSITIF	PERSENTASE	75,00	75,00	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	
91	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	POSITIF	PERSENTASE	98,63	98,77	98,77	98,77	98,77	99,00	99,00	
92	JUMLAH SPM SUB VARIABEL KEGAWAT DARURATAN UPTD RSUD CILOGRANG	POSITIF	NILAI	1,00	1,00	2,00	4,00	6,00	7,00	8,00	
93	JUMLAH SPM SUB VARIABEL KEGAWAT	POSITIF	ANGKA	1,00	1,00	2,00	4,00	6,00	7,00	8,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
	DARURATAN UPTD RSUD LABUAN										
94	JUMLAH SDM RSUD MAHAHEL KEGAWAT-DARURATAN UPTD RSUD MALINGPING	POSITIF	ANGKA	1,00	1,00	2,00	4,00	6,00	7,00	8,00	
95	NILAI AKREDITASI RSUD BANTEN	POSITIF	NILAI AKREDITASI	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	
96	NILAI AKREDITASI RSUD CILOGRANG	POSITIF	NILAI AKREDITASI	MADYA	MADYA	MADYA	MADYA	UTAMA	UTAMA	UTAMA	
97	NILAI AKREDITASI RSUD LABUAN	POSITIF	NILAI AKREDITASI	MADYA	MADYA	MADYA	MADYA	UTAMA	UTAMA	UTAMA	
98	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN DI RSUD BANTEN	POSITIF	PERSENTASE	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	
99	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN DI RSUD LABUAN	POSITIF	PERSENTASE	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	
100	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN DI RSUD MALINGPING	POSITIF	PERSENTASE	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	
101	PERSENTASE DIGITALISASI LAYANAN KESEHATAN RSUD CILOGRANG	POSITIF	PERSENTASE	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	
102	PERSENTASE IBU BERSALIN MELAKUKAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN	POSITIF	PERSENTASE	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00	
103	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN STBM	POSITIF	PERSENTASE	25,00	37,50	50,00	62,50	62,50	75,00	75,00	
104	PERSENTASE KABUPATEN / KOTA YANG MEMILIKI KETERSEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	95,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
105	PERSENTASE KETERCAPAIAN ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERCULOSIS.	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PERSENTASE HIPERTENSI DALAM PENGENDALIAN, DAN DIABETES MELITUS DALAM PENGENDALIAN										
106	PERSENTASE KETERCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN PROVINSI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
107	PERSENTASE KETERCAPAIAN TARGET PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	50,00	50,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00	
108	PERSENTASE KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	33,33	71,20	82,00	98,00	100,00	100,00	100,00	
109	PERSENTASE LANJUT USIA YANG MANDIRI	POSITIF	PERSENTASE	46,00	76,00	76,00	77,00	78,00	78,50	79,00	
110	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMAHAMI GERMAS	POSITIF	PERSENTASE	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
111	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENGIMPLEMENTASIKAN PHBS	POSITIF	PERSENTASE	60,87	65,22	69,57	73,91	78,26	82,61	86,96	
112	PERSENTASE PEMANFAATAN FUNGSI LABKESMAS TINGKAT II	POSITIF	PERSENTASE	58,33	66,67	66,67	66,67	66,67	75,00	75,00	
113	PERSENTASE PENDERITA GANGGUAN JIWA DAN PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN TIDAK DITERLANTARKAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
114	PERSENTASE RS RUJUKAN PROVINSI YANG TERAKREDITASI	POSITIF	PERSENTASE	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	
115	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA RSUD BANTEN SESUAI STANDAR YANG TERPENUHI	POSITIF	PERSENTASE	60,00	65,00	70,00	70,00	75,00	80,00	100,00	
116	PERSENTASE SARANA KEFARMASIAN TINGKAT	POSITIF	PERSENTASE	70,00	75,00	76,00	79,00	80,00	82,00	84,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PROVINSI YANG MEMENUHI SYARAT										
117	PERSENTASE SDM KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	25,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	
118	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS DI KABUPATEN/KOTA SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	12,50	12,50	12,50	12,50	25,00	25,00	37,50	
119	PERSENTASE TERCAPAINYA CAKUPAN LAYANAN INTERVENSI DALAM PENURUNAN STUNTING	POSITIF	PERSENTASE	58,00	64,00	66,50	72,00	76,00	77,50	77,70	
120	RASIO DAYA TAMPUNG RUMAH SAKIT RUJUKAN	POSITIF	RASIO	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	
121	CAKUPAN PENEMUAN DAN PENGOBATAN KASUS TUBERKULOSIS (TREATMENT COVERAGE)	POSITIF	PERSENTASE	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
122	PERSENTASE PEMBANGUNAN GEDUNG STRATEGIS PROVINSI	POSITIF	PERSENTASE	7,19	7,19	7,50	8,24	9,17	11,09	27,34	
123	PERSENTASE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN	POSITIF	PERSENTASE	-	2,60	5,00	7,60	8,60	9,60	10,60	
124	PERSENTASE PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE	POSITIF	PERSENTASE	-	1,14	10,66	20,17	29,69	39,20	48,72	
125	PERSENTASE PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CILIWUNG - CISADANE	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
126	PERSENTASE PEMELIHARAAN SISTEM	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	DRAINASE PERKOTAAN PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CISAWARNA										
127	PERSENTASE PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN PADA UPTD PENGELOLAAN DAS CIUJUNG-CIDANAU	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
128	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	POSITIF	PERSENTASE	-	6,28	27,66	36,17	48,94	76,78	100,00	
129	PERSENTASE PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH	POSITIF	PERSENTASE	22,45	23,25	25,10	27,65	39,20	41,35	45,20	
130	PERSENTASE PENINGKATAN RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI HUNIAN DENGAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK) LAYAK	POSITIF	PERSENTASE	87,93	89,33	90,73	92,13	93,53	94,93	96,33	
131	PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	POSITIF	PERSENTASE	-	1,03	2,83	4,07	6,10	7,22	8,34	
132	PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SPAM REGIONAL	POSITIF	PERSENTASE	0,14	0,15	0,29	0,58	0,97	14,55	30,45	
133	PERSENTASE PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TPST REGIONAL	POSITIF	PERSENTASE	0,75	0,82	2,14	11,13	21,58	24,35	100,00	
134	PERSENTASE TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI AHLI	POSITIF	PERSENTASE	26,97	28,43	29,82	31,26	32,62	33,78	35,14	
135	INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI (IKSI)	POSITIF	NILAI	52,30	53,00	54,21	55,65	56,71	57,89	59,24	
136	PERSENTASE KETERSEDIAAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAERAH	POSITIF	PERSENTASE	27,27	39,39	57,58	75,76	87,88	96,97	100,00	
137	TINGKAT KEMANTAPAN JEMBATAN	POSITIF	PERSENTASE	86,05	89,00	91,00	94,00	96,00	98,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
138	PENINGKATAN KAPASITAS TAMPUNG SUMBER DAYA AIR	POSITIF	M3	-	0,00	52.000,00	77.000,00	102.000,00	127.000,00	152.000,00	
139	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN	POSITIF	PERSENTASE	95,25	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	
140	RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR DAN ABRASI YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN INFRASTRUKTUR PENGAMAN PANTAI	POSITIF	PERSENTASE	16,18	40,44	41,14	42,32	43,09	43,52	44,05	
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
141	PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
142	PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10 - 15 HA YANG DITANGANI	POSITIF	PERSENTASE	0,65	19,04	43,46	54,99	65,42	77,81	100,00	
143	PERSENTASE PERMUKIMAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM)	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
144	PERSENTASE SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
145	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI	POSITIF	PERSENTASE	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI										
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
146	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG TERPENUHI LOGISTIK PADA SAAT KEADAAN DARURAT BENCANA	POSITIF	PERSENTASE	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
147	PERSENTASE PENANGANAN PASCA BENCANA	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
148	PERSENTASE PENANGANAN PRA BENCANA	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
149	PERSENTASE PENDAMPINGAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
150	PERSENTASE PENYELENGGARAAN TIBUMTRANMAS	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
151	PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
152	PERSENTASE PPNS YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA	POSITIF	PERSENTASE	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
153	PERSENTASE CAKUPAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	POSITIF	PERSENTASE	10,00	15,00	30,00	45,00	75,00	100,00	100,00	
154	CAKUPAN PENYEBARAN INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN KEBAKARAN	POSITIF	PERSENTASE	15,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	
155	PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN KEBENCANAAN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN SAH/LEGAL	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
156	PERSENTASE ANAK TERLANTAR YANG TERLINDUNGI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
157	PERSENTASE FAKIR MISKIN YANG TERLINDUNGI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
158	PERSENTASE GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
159	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGANI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
160	PERSENTASE LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
161	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
162	PERSENTASE PPKS YANG TERTANGANI DAN KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
163	PERSENTASE PPKS YANG PARTISIPATIF SOSIAL	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
164	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERLAYANI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
165	PERSENTASE ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI YANG KEMBALI BERFUNGSI SOSIAL	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
166	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG	POSITIF	PERSENTASE	82,90	86,33	89,75	93,18	96,59	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
	MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN)										
167	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI	POSITIF	PERSENTASE	17,16	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	
168	PERSENTASE KAB/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA	POSITIF	PERSENTASE	-	37,50	50,00	62,50	75,00	100,00	100,00	
169	PERSENTASE PELATIHAN DAN KOMPETENSI KERJA	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
170	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	POSITIF	PERSENTASE	24,96	33,13	41,29	49,46	57,63	65,80	73,97	
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
171	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	POSITIF	PERSENTASE	80,00	82,00	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	
172	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	NEGATIF	PERSENTASE	5.30	5.28	5.23	5.18	5.13	5.08	5.03	
173	PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG BERPERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	25,00	37,50	50,00	62,50	75,00	87,50	100,00	
174	PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)	POSITIF	PERSENTASE	10,00	11,20	12,40	13,60	14,80	16,00	17,20	
175	INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)	POSITIF	INDEKS	85,63	87,34	89,07	90,87	92,09	92,94	93,19	
176	PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN	POSITIF	PERSENTASE	80,00	82,00	85,00	87,50	90,00	92,50	95,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
	YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF										
177	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN	POSITIF	PERSENTASE	46,00	50,00	50,15	50,29	50,44	50,58	52,20	
178	TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
179	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)	POSITIF	INDEKS	68,87	69,48	70,04	70,90	71,38	71,94	72,20	
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
180	PERSENTASE JUMLAH CADANGAN PANGAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
181	PERSENTASE PANGAN SEGAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN DAN MUTU KEAMANAN PANGAN	POSITIF	PERSENTASE	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	
182	PERSENTASE PENINGKATAN PEREDARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) SEBESAR 20 %	POSITIF	PERSENTASE	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
183	TINGKAT KETERSEDIAAN ENERGI BERDASARKAN ANGKA KECUKUPAN ENERGI (AKE) 2.400 KKAL/KAP/HARI	POSITIF	KKAL/KAPITA/HARI	2.655,00	2.660,00	2.665,00	2.670,00	2.675,00	2.680,00	2.685,00	
184	TINGKAT KONSUMSI ENERGI, BERDASARKAN ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG) 2.100 KKAL/KAP/HARI	POSITIF	KKAL/KAPITA/HARI	2.180,00	2.185,00	2.190,00	2.195,00	2.200,00	2.205,00	2.210,00	
185	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	NEGATIF	PERSENTASE	12,50	12,50	12,26	11,61	10,96	10,32	9,67	
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
186	PERSENTASE TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
	KEPENTINGAN UMUM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU										
187	PERSEDIAANYA TANAH OBYEK LANDREFORM (TOL) YANG SIAP DIREDISTRIBUSIKAN YANG BERASAL DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
188	PERSENTASE PTU	POSITIF	PERSENTASE	2,055	2,060	2,065	2,070	2,075	2,080	2,085	
189	INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS)	POSITIF	POIN	50,20	53,80	55,80	57,80	59,80	60,80	62,80	
190	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	POSITIF	PERSENTASE	90,00	90,00	90,00	90,00	91,00	91,00	92,00	
191	PERSENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA	POSITIF	PERSENTASE	9,007	10,89	12,26	14,29	16,35	18,29	20,03	
192	PERSENTASE MASYARAKAT YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	POSITIF	PERSENTASE	0,00	0,47	0,52	0,60	0,71	0,84	1,00	
193	PERSENTASE MHA YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA	POSITIF	PERSENTASE	11,76	29,41	41,18	52,94	70,59	88,24	100,00	
194	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	KUMULATIF	PERSENTASE	10,69	11,07	12,05	13,09	13,29	14,37	15,34	
195	PERSENTASE PENINGKATAN FUNGSI LABORATORIUM LINGKUNGAN	POSITIF	PERSENTASE	2,70	2,94	2,94	3,43	5,89	8,83	12,27	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
196	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA/KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	POSITIF	PERSENTASE	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
197	PERSENTASE REKOMENDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
198	PERSENTASE JUMLAH KELOMPOK/LEMBAGA MASYARAKAT YANG TERLIBAT UPAYA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM	POSITIF	PERSENTASE	11,00	11,43	14,29	17,14	20,00	22,86	25,71	
199	PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA DI PROVINSI BANTEN YANG SESUAI BAKU MUTU	POSITIF	PERSENTASE	80,00	83,33	83,33	91,66	91,66	91,66	91,66	
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
200	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	POSITIF	PERSENTASE	37,85	45,48	48,66	51,84	55,02	58,19	61,37	
201	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	POSITIF	PERSENTASE	80,00	85,39	86,52	87,64	88,76	89,89	89,89	
202	PERSENTASE CAKUPAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (AKTA KELAHIRAN USIA 0-4 TAHUN, AKTA KEMATIAN, AKTA PERKAWINAN DAN AKTA PERCERAIAN) YANG DITERBITKAN KABUPATEN/KOTA	POSITIF	PERSENTASE	70,22	71,25	72,13	73,00	73,88	74,70	75,58	
203	PERSENTASE CAKUPAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK (IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)	POSITIF	PERSENTASE	22,64	25,00	37,50	40,00	42,50	45,00	47,50	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
204	PERSENTASE FASILITASI TATA KELOLA DESA	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
205	PERSENTASE APARATUR DESA DAN ANGGOTA BPD YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA	POSITIF	PERSENTASE	19,21	33,14	47,28	61,42	75,56	89,70	100,00	
206	PERSENTASE DESA YANG MELAKUKAN KERJA SAMA SECARA BERKELANJUTAN	POSITIF	PERSENTASE	1,79	2,98	4,17	5,36	6,55	7,74	8,93	
207	PERSENTASE DESA YANG MENDAPATKAN FASILITASI PENATAAN DESA	POSITIF	PERSENTASE	22,21	30,29	38,37	46,45	54,53	62,61	70,69	
208	PERSENTASE FASILITASI PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)	POSITIF	PERSENTASE	3,27	4,94	6,61	8,28	9,95	11,62	13,29	
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
209	INDEKS LANSIA BERDAYA	POSITIF	NILAI	56,64	56,69	56,74	56,79	56,85	56,90	56,95	
210	INDEKS PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN (IPBK)	POSITIF	INDEKS	61,30	62,40	63,49	64,54	65,54	66,51	67,43	
211	INDEKS PENGASUHAN KELUARGA MEMILIKI REMAJA	POSITIF	NILAI	83,55	84,70	85,80	86,93	87,88	88,79	89,61	
212	PERSENTASE KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MANDIRI	POSITIF	PERSENTASE	69,72	74,72	79,72	84,72	89,72	94,72	95,72	
213	PERSENTASE KEHAMILAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN (KTD)	POSITIF	PERSENTASE	13,40	13,07	12,72	12,39	12,06	11,76	11,46	
214	PROPORSI KEBUTUHAN KB YANG TERPENUHI MENURUT ALAT/CARA KB MODERN (DEMAND SATISFIED)	POSITIF	PERSENTASE	85,58	86,15	86,70	87,28	87,86	88,45	89,04	
215	ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY/ASFR 15-19)	POSITIF	NILAI	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
216	RASIO KONEKTIVITAS DARAT	POSITIF	RASIO	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	0,74	0,76	
217	PERSENTASE KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API YANG DITANGANI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
218	PERSENTASE PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN	POSITIF	PERSENTASE	10,91	10,91	27,26	43,62	59,98	76,34	98,15	
219	PERSENTASE KELENGKAPAN JALAN YANG TELAH TERPASANG TERHADAP KONDISI IDEAL	POSITIF	PERSENTASE	52,75	81,72	86,02	91,40	94,62	100,00	100,00	
220	PERSENTASE DAERAH RAWAN KECELAKAAN YANG DITANGANI	POSITIF	PERSENTASE	12,50	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	
221	KONEKTIVITAS ANGKUTAN DARAT	POSITIF	PERSENTASE	68,00	61,59	61,59	61,59	61,59	61,59	61,59	
222	PERSENTASE PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN PELAYARAN	NEGATIF	PERSENTASE	-	10,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
223	NILAI TINGKAT KEMATANGAN LAYANAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH PROVINSI	POSITIF	LEVEL	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	
224	NILAI TINGKAT KEMATANGAN PENGGUNAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH	POSITIF	LEVEL	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	
225	NILAI TINGKAT KEMATANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE DI PEMERINTAH PROVINSI	POSITIF	LEVEL	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	
226	PENINGKATAN IMPLEMENTASI INOVASI PROVINSI CERDAS	POSITIF	PERSENTASE	20,00	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00	60,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
227	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	POSITIF	PERSENTASE	70,00	70,00	70,50	71,00	72,00	73,00	74,00	
	2.17 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
228	PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS	POSITIF	PERSENTASE	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
229	PERSENTASE KOPERASI USAHA SIMPAN PINJAM YANG MEMATUHI KETENTUAN USP	POSITIF	PERSENTASE	5.00	5.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	
230	PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN PELATIHAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
231	PERSENTASE KOPERASI YANG PATUH	POSITIF	PERSENTASE	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
232	PERSENTASE KOPERASI YANG SEHAT	POSITIF	PERSENTASE	5,00	5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	
233	PERSENTASE UKM MENJALIN KEMITRAAN USAHA	POSITIF	PERSENTASE	5,00	10,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
234	PERSENTASI USAHA KECIL BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL MENJADI FORMAL	POSITIF	PERSENTASE	5,00	5,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
	2.18 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
235	PERSENTASE DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG DAPAT DIAKSES	POSITIF	PERSENTASE	10,00	15,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	
236	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA NON UMK YANG MELAPORKAN KEGIATAN USAHA (LKPM)	POSITIF	PERSENTASE	36.00	40.00	40.00	45.00	45.00	50.00	50.00	
237	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
238	PERSENTASE PENINGKATAN MINAT INVESTOR YANG BERINVESTASI	POSITIF	PERSENTASE	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	
239	PERSENTASE POTENSI/PELUANG PENANAMAN MODAL SEKTOR UNGGULAN YANG DITINDAKLANJUTI	POSITIF	PERSENTASE	10,00	12,00	15,00	22,00	27,00	32,00	37,00	
240	PERSENTASE REALISASI INVESTASI DAERAH	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
241	PERSENTASE PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEPRAMUKAAN	POSITIF	PERSENTASE	0,70	0,82	0,91	0,99	1,07	1,15	1,24	
242	PERSENTASE PEMUDA AKTIF MENGIKUTI ORGANISASI	POSITIF	PERSENTASE	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	
243	PERSENTASE PEMUDA MENGIKUTI KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	POSITIF	PERSENTASE	65,55	65,65	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	
244	PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN OLAHRAGA MASYARAKAT	POSITIF	PERSENTASE	14,700	14,721	14,727	14,731	14,733	14,735	14,741	
245	RASIO KEWIRAUSAHAAN PEMUDA	POSITIF	PERSENTASE	1,06	1,07	1,08	1,09	1,10	1,11	1,12	
246	PERSENTASE ATLET YANG MENGIKUTI KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT REGIONAL DAN NASIONAL	POSITIF	PERSENTASE	9,12	10,72	12,50	13,35	9,12	9,63	12,50	
247	PERSENTASE ATLET PELAJAR BERPRESTASI	POSITIF	PERSENTASE	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
248	INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)	POSITIF	POIN	2,61	2,62	2,63	2,64	2,65	2,66	2,67	
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
249	PERSENTASE TINGKAT KEMATANGAN KEAMANAN	POSITIF	PERSENTASE	17,93	49,67	50,65	52,85	55,01	57,19	59,91	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
	SIBER DAN SANDI PEMERINTAH DAERAH										
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
250	PERSENTASE BENDA, BANGUNAN, STRUKTUR, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG TELAH DITETAPKAN TERHADAP TOTAL PENDAFTARAN	POSITIF	PERSENTASE	-	0,00	3,70	3,80	3,90	4,00	4,00	
251	IPK DIMENSI EKSPRESI BUDAYA	POSITIF	PERSENTASE	27,84	29,31	31,27	33,35	35,35	37,47	39,21	
252	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MEMBERIKAN SARAN ATAU PENDAPAT DALAM KEGIATAN RAPAT SELAMA SETAHUN TERAKHIR	POSITIF	PERSENTASE	12,01	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	
253	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH/WARISAN DUNIA DALAM SETAHUN TERAKHIR	POSITIF	PERSENTASE	-	0,00	28,44	28,54	28,64	28,74	28,79	
254	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENONTON SECARA LANGSUNG PERTUNJUKKAN SENI DALAM 3 BULAN TERAKHIR	POSITIF	PERSENTASE	-	0,00	45,40	45,53	45,63	45,73	45,73	
255	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKKAN SENI DALAM 3 BULAN TERAKHIR	POSITIF	PERSENTASE	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	
256	PERSENTASE PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGGUNAKAN BAHASA DAERAH DI	POSITIF	PERSENTASE	57,56	57,65	57,75	57,85	57,95	58,20	58,50	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	RUMAH ATAU DALAM PERGAULAN SEHARI-HARI										
257	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN PRODUK TRADISIONAL DALAM 3 BULAN TERAKHIR	POSITIF	PERSENTASE	-	0,00	64,21	64,32	64,42	64,52	64,53	
258	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENYELENGGARAKAN ATAU MENGHADIRI UPACARA ADAT DALAM SETAHUN TERAKHIR	POSITIF	PERSENTASE	25,16	26,62	26,83	26,93	27,00	27,03	27,20	
259	PERSENTASE WARISAN BUDAYA TAK BENDA YANG TELAH DITETAPKAN TERHADAP TOTAL PENCATATAN	POSITIF	PERSENTASE	23,77	23,77	23,77	23,82	23,87	23,92	24,00	
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
260	PERSENTASE KUNJUNGAN MASYARAKAT KE PERPUSTAKAAN	POSITIF	PERSENTASE	1,21	1,27	1,33	1,40	1,47	1,54	1,62	
261	PERSENTASE PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO YANG DIMILIKI	POSITIF	PERSENTASE	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
262	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP	POSITIF	PERSENTASE	75,06	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	
263	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN	POSITIF	PERSENTASE	83,23	84,00	84,99	86,69	88,42	89,19	90,97	
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
264	NILAI PRODUKSI PERIKANAN	POSITIF	JUTA RUPIAH	4.907,10	5.054,21	5.205,84	5.362,01	5.522,87	5.688,56	5.972,90	
265	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR YANG TERBINA	POSITIF	PERSENTASE	54,20	58,00	61,00	64,00	67,00	70,00	73,00	
266	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN	POSITIF	PERSENTASE	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	88,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	BUDIDAYA YANG TERLAYANI										
267	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG TERLAYANI	POSITIF	PERSENTASE	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	
268	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG TERLAYANI	POSITIF	PERSENTASE	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	
269	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG TERLAYANI	POSITIF	PERSENTASE	16,00	19,00	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00	
270	PERSENTASE PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG TERLAYANI UNTUK UKURAN KAPAL 10 - 30 GT	POSITIF	PERSENTASE	18,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	
271	PERSENTASE PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
272	PERSENTASE PENINGKATAN MASYARAKAT PESISIR YANG TERBINA	POSITIF	PERSENTASE	54,20	58,00	61,00	64,00	67,00	70,00	73,00	
273	INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	POSITIF	PERSENTASE	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	93,00	
274	PERSENTASE WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH SELATAN	POSITIF	PERSENTASE	22,00	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00	37,00	
275	PERSENTASE WILAYAH PESISIR YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH UTARA	POSITIF	PERSENTASE	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	
276	VOLUME PRODUKSI IKAN BUDIDAYA	POSITIF	TON	116.424,82	127.409,89	130.814,08	134.708,91	138.781,08	142.944,21	147.232,83	
277	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	POSITIF	TON	1.777,07	1.920,21	2.035,02	2.096,08	2.159,28	2.224,16	2.290,88	
278	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	POSITIF	TON	6.525,49	9.216,57	9.727,69	10.150,42	10.351,59	10.682,49	10.982,37	
279	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN	POSITIF	TON	56.991,12	61.520,48	65.245,08	67.200,74	69.216,75	71.293,26	73.432,06	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
280	VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH UTARA	POSITIF	TON	10.102,92	10.910,62	11.565,25	11.912,21	12.269,58	12.637,67	13.016,80	
281	PERSENTASE SERTIFIKASI KELAIKAN PENGOLAH PERIKANAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
282	KONSUMSI IKAN MASYARAKAT	POSITIF	KG/KAPITA	25,26	27,06	27,59	28,46	29,03	29,61	30,20	
283	LUASAN KAWASAN KONSERVASI	POSITIF	HA	99,94	10.300,18	10.300,18	12.772,18	12.772,18	15.653,31	15.653,31	
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
284	PERSENTASE PELAKU EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL	POSITIF	PERSENTASE	4,61	5,76	6,91	8,06	9,22	10,37	11,52	
285	PERSENTASE PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG AKTIF DAN TERVALIDASI	POSITIF	PERSENTASE	1,81	2,11	2,41	2,71	3,01	3,31	3,61	
286	PERSENTASE PENINGKATAN PROMOSI OBJEK WISATA PROVINSI	POSITIF	PERSENTASE	4,41	4,80	5,18	6,21	7,25	8,29	9,33	
287	PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN	POSITIF	PERSENTASE	5,00	5,10	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
288	PERSENTASE PENANGANAN BENCANA PERTANIAN	POSITIF	PERSENTASE	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
289	CAKUPAN LUAS LAHAN PERTANIAN YANG DITETAPKAN MENJADI LP2B	POSITIF	HA	95.829,75	95.829,75	95.829,75	95.829,75	95.829,75	95.829,75	95.829,75	
290	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS HORTIKULTURA	POSITIF	TON	4.996,00	5.176,00	5.305,00	5.438,00	5.574,00	5.710,00	5.850,00	
291	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PANGAN	POSITIF	TON	83.117,00	87.117,00	91.429,00	96.052,00	100.856,00	105.899,00	111.194,00	
292	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN	POSITIF	TON	196,00	225,00	816,00	828,00	841,00	853,00	866,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
293	PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PETERNAKAN	POSITIF	TON	11.860,00	24.138,00	24.404,00	24.672,00	24.940,00	25.218,00	25.495,00	
294	PERSENTASE PENINGKATAN SERTIFIKASI BENIH	POSITIF	PERSENTASE	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
295	PERSENTASE IZIN USAHA PERTANIAN YANG DITERBITKAN	POSITIF	PERSENTASE	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
296	PERSENTASE PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERTANIAN	POSITIF	PERSENTASE	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
297	PERSENTASE PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN YANG DIHASILKAN	POSITIF	PERSENTASE	3,00	3,24	3,45	3,72	3,82	3,92	4,02	
298	PERSENTASE SDM PENYULUH PERTANIAN YANG DITINGKATKAN	POSITIF	PERSENTASE	-	14,49	14,49	14,49	17,39	17,39	21,74	
299	PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRA NKV ATAU NKV (NOMOR KONTROL VETERINER)	POSITIF	PERSENTASE	14,50	22,00	36,00	50,00	70,00	80,00	90,00	
300	PERSENTASE UNIT USAHA PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRA NKV ATAU NKV (NOMOR KONTROL VETERINER)	POSITIF	PERSENTASE	14,50	22,00	36,00	50,00	70,00	80,00	90,00	
301	TINGKAT PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS)	POSITIF	DOKUMEN	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	
	2.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
302	KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDRB	POSITIF	PERSENTASE	0,02	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	
303	LUAS LAHAN KRITIS YANG TEREHABILITASI DI	POSITIF	Ha	2.830,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG										
304	LUAS LAHAN KRITIS YANG TEREHABILITASI DI WILAYAH PANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON	POSITIF	HEKTAR	2.353,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
305	PERSENTASE JUMLAH BIBIT BERSERTIFIKAT UNTUK REHABILITASI LAHAN	POSITIF	PERSENTASE	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	15,00	15,00	
306	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA WILAYAH LEBAK TANGERANG	POSITIF	PERSENTASE	32,00	41,00	50,00	67,00	80,00	89,00	94,00	
307	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, CILEGON	POSITIF	PERSENTASE	32,00	41,00	50,00	67,00	80,00	89,00	94,00	
308	PERSENTASE TUTUPAN LAHAN PADA SEMPADAN DAS	POSITIF	PERSENTASE	61,49	61,63	61,77	61,91	62,05	62,19	62,34	
309	PERSENTASE PENINGKATAN KELAS KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)	POSITIF	PERSENTASE	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
310	PERSENTASE PENINGKATAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)	POSITIF	PERSENTASE	3,07	3,07	5,87	8,66	11,45	14,24	17,04	
311	TINGKAT EFEKTIFITAS PENGELOLAAN TAHURA BANTEN	POSITIF	NILAI	65,00	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
312	INDEKS KEANEKARAGAMAN HAYATI	POSITIF	INDEKS	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	
313	PERSENTASE PENINGKATAN KELAS KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)	POSITIF	PERSENTASE	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
314	PERSENTASE AIR TANAH YANG DIKELOLA	POSITIF	PERSENTASE	33,33	38,21	46,34	54,47	69,11	83,74	100,00	
315	JUMLAH USAHA PERTAMBANGAN YANG MENERAPKAN KAIDAH PERTAMBANGAN YANG SESUAI DENGAN REKLAMASI (UNIT USAHA PERTAMBANGAN)	KOMULATIF	UNIT	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
316	KAPASITAS PEMANFAATAN ANEKA EBT	POSITIF	MEGAWATT	75,48	86,82	98,14	109,46	120,77	132,09	143,42	
317	PERSENTASE GEODIVERSITY DAN KEBENCANAAN GEOLOGI YANG DIKELOLA	POSITIF	PERSENTASE	28,87	35,17	41,47	42,82	50,00	71,23	1,00	
318	PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT EMISI KARBON (CO2)	POSITIF	PERSENTASE	0,82	0,91	1,18	1,44	1,06	1,32	2,10	
319	RASIO KETERSEDIAAN DAYA LISTRIK	POSITIF	PERSENTASE	94,00	94,11	94,20	94,29	94,36	94,44	94,50	
320	PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA	POSITIF	PERSENTASE	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00	
321	PERSENTASE DESA YANG TERALIRI LISTRIK	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
322	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	KOMULATIF	PERSENTASE	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
323	NILAI SKM (SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT) PADA UPTD	POSITIF	NILAI	74,36	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	
324	LAJU PERTUMBUHAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	POSITIF	PERSENTASE	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	
325	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN LAYANAN	POSITIF	PERSENTASE	85,71	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
326	INDEKS JARINGAN DISTRIBUSI	POSITIF	INDEKS	37,50	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	
327	NILAI EKSPOR BARANG NON MIGAS	POSITIF	USD	12.243.547.225,00	13.082.976.972,00	14.013.944.508,00	15.040.102.002,00	16.178.934.702,00	17.443.447.730,00	18.705.426.468,00	
328	PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN PERATURAN	POSITIF	PERSENTASE	70,09	71,49	72,92	74,38	75,87	77,39	78,93	
329	PERSENTASE PELAKU USAHA BERORIENTASI EKSPOR YANG MENDAPATKAN LAYANAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
330	KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WILAYAH TINGKAT KAB/KOTA	POSITIF	PERSENTASE	5.03	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
331	PERSENTASE RENCANA INDUSTRI YANG DI IMPLEMENTASIKAN	POSITIF	PERSENTASE	5,82	17,76	30,14	49,26	67,54	83,82	100,00	
332	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH PELAKU USAHA INDUSTRI PROVINSI BANTEN	POSITIF	PERSENTASE	14,09	14,14	14,16	14,21	14,24	14,27	14,29	
333	PERSENTASE PELAKU USAHA/INDUSTRI YANG MENDAPATKAN LAYANAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
334	TINGKAT KEPATUHAN DALAM PELAPORAN	POSITIF	PERSENTASE	59,01	61,62	63,27	64,80	66,21	67,69	68,96	
335	NILAI SKM (SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT) PADA UPTD	POSITIF	NILAI	77,26	80,00	80,25	80,50	80,75	81,00	81,25	
336	PERSENTASE INDUSTRI YANG DIAWASI	POSITIF	PERSENTASE	19,22	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
337	KUALIFIKASI & KOMPETENSI SDM PBJ	POSITIF	NILAI	25,09	25,12	25,15	25,68	25,79	25,84	25,94	
338	PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN	POSITIF	NILAI	23,14	23,17	23,25	23,82	23,91	23,96	24,06	
339	PERSENTASE ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN YANG TERPENUHI SESUAI REGULASI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
340	PERSENTASE BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DAN HAM YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
341	PERSENTASE FASILITASI PRODUK HUKUM YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
342	PERSENTASE KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN YANG DI TINDAKLANJUTI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
343	PERSENTASE KEBIJAKAN BINA SPIRITUAL YANG DIMANFAATKAN SESUAI REGULASI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
344	PERSENTASE KEBIJAKAN PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR YANG DIMANFAATKAN SESUAI REGULASI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
345	PERSENTASE KEBUTUHAN FASILITASI KEPROTOKOLAN PIMPINAN YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
346	PERSENTASE LAYANAN MATERI DAN INFORMASI PIMPINAN YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
347	PERSENTASE LAYANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SETDA YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
348	PERSENTASE LAYANAN TATA USAHA SETDA YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
349	PERSENTASE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
350	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI BUDAYA KERJA MINIMAL "PREDIKAT BAIK"	POSITIF	PERSENTASE	75,80	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	81,00	
351	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH PROVINSI DENGAN NILAI IKM MINIMAL SANGAT BAIK	POSITIF	PERSENTASE	94,01	94,02	94,04	94,06	94,08	94,10	94,12	
352	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI PELAYANAN BERKUALITAS	POSITIF	PERSENTASE	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00	83,00	
353	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMILIKI INDEKS REFORMASI BIROKRASI "PREDIKAT BAIK"	POSITIF	PERSENTASE	79,00	80,00	81,00	83,00	85,00	87,00	88,00	
354	PERSENTASE KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG SESUAI REGULASI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
355	PERSENTASE KERJA SAMA DAERAH YANG DILAKSANAKAN SESUAI REGULASI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
356	PERSENTASE FASILITASI RUMAH TANGGA PIMPINAN YANG TERPENUHI SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
357	TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ	POSITIF	ANGKA	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
358	NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN	POSITIF	NILAI	84,02	84,02	84,10	84,10	84,20	84,20	84,30	
	4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
359	PERSENTASE CAPAIAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DPRD	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
360	PERSENTASE CAPAIAN LAYANAN KINERJA PERAN DAN FUNGSI DPRD	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5.01 - PERENCANAAN										
361	PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
362	PERSENTASE KESELARASAN RPJMD DENGAN RKPD	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
363	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PEMDA	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
364	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
365	PERSENTASE DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG AKURAT DAN ANDAL	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
366	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
367	PERSENTASE KESELARASAN RKPD DENGAN RENJA PD PADA BIDANG PEMERINTAHAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	DAN PEMBANGUNAN MANUSIA										
	5.02 - KEUANGAN										
368	PERSENTASE KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG DIMANFAATKAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
369	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)	POSITIF	INDEKS	2,75	2,95	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25	
370	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD BALARAJA (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	11,87	12,19	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	
371	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CIKOKOL (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	14,16	13,84	13,94	13,95	13,95	13,95	13,96	
372	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CILEDUG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	11,64	11,41	11,49	11,56	11,56	11,59	11,59	
373	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CILEGON (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	4,15	4,01	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
374	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CIPUTAT (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	15,92	14,81	15,06	15,06	15,07	15,08	15,08	
375	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD CIRUAS (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	5,90	6,85	6,32	6,32	6,32	6,32	6,31	
376	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD KELAPA DUA (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	15,20	15,26	15,50	15,49	15,49	15,48	15,48	
377	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD MALINGPING (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	0,84	0,97	0,90	0,90	0,29	0,29	0,28	
378	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD PANDEGLANG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	2,25	2,81	2,66	2,69	2,69	2,69	2,69	
379	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD RANGKASBITUNG (PAJAK	POSITIF	PERSENTASE	2,21	2,48	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	2026	2027	2028	2029	2030	KETERANGAN
	KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)										
380	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD SERANG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	4,26	4,22	4,23	4,25	4,22	4,24	4,24	
381	KONTRIBUSI REALISASI PAJAK DAERAH UPTD PPD SERPONG (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK ALAT BERAT)	POSITIF	PERSENTASE	11,76	10,55	11,45	11,44	11,44	11,43	11,42	
382	PERSENTASE HASIL PENGAWASAN, PENGENDALIAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DISELESAIKAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
383	PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
384	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN RAPERDA/RAPERGUB APBD DAN RAPERDA/RAPERGUB PERUBAHAN APBD SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
385	PERSENTASE PENGELOLAAN BELANJA DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
386	PERSENTASE RAPERDA/RAPERKADA KAB/KOTA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD YANG DIEVALUASI	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
387	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN DAERAH TERHADAP TARGET	POSITIF	PERSENTASE	99,37	95,85	96,25	97,55	98,95	99,99	99,98	
388	PERSENTASE SISTEM INFORMASI PENDAPATAN BERBASIS DIGITAL YANG DIKEMBANGKAN	POSITIF	PERSENTASE	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	
	5.03 - KEPEGAWAIAN										
389	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK MUTASI DAN PROMOSI	POSITIF	INDEKS	37,50	38,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
390	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGADAAN PEGAWAI ASN	POSITIF	INDEKS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
391	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	POSITIF	INDEKS	22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	
392	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGEMBANGAN KARIR	POSITIF	INDEKS	65,00	65,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00	
393	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENGHARGAAN, PENGGAJIAN, DISIPLIN DAN MANAJEMEN KINERJA	POSITIF	INDEKS	72,50	72,50	73,00	73,00	74,00	74,00	75,00	
394	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN PEGAWAI ASN	POSITIF	INDEKS	117,50	117,50	118,00	118,00	118,50	118,50	120,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
395	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN	POSITIF	INDEKS	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
396	INDEKS SISTEM MERIT ASPEK MANAJEMEN KINERJA	POSITIF	INDEKS	72,50	72,50	72,50	75,00	75,00	80,00	80,00	
	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
397	PERSENTASE ASN YANG MEMILIKI SERTIFIKASI KOMPETENSI	POSITIF	PERSENTASE	54,40	60,00	65,00	70,00	85,00	90,00	100,00	
398	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL BERKATEGORI BAIK	POSITIF	PERSENTASE	99,48	99,54	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	
399	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS BERKATEGORI BAIK	POSITIF	PERSENTASE	99,48	99,54	99,65	99,70	99,75	99,80	99,85	
400	PERSENTASE KETERSEDIAAN BAHAN PENUNJANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
401	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SESUAI DENGAN ANALISIS KEBUTUHAN	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
402	PERSENTASE RISET DAN INOVASI YANG DI IMPLEMENTASIKAN	POSITIF	PERSENTASE	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	X.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG										
403	PERSENTASE FASILITASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHUBUNG YANG TERLAYANI SESUAI STANDAR	POSITIF	PERSENTASE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
404	NILAI PENCEGAHAN KORUPSI DAERAH OLEH KPK	POSITIF	NILAI	93,00	93,00	93,10	93,20	93,30	93,40	94,00	
405	PERSENTASE PENYELESAIAN TLHP	POSITIF	PERSENTASE	80,00	80,10	80,20	80,30	80,40	80,50	80,52	
406	RATA-RATA NILAI SAKIP OPD MITRA IRBAN	POSITIF	NILAI	78,21	78,21	78,67	79,37	79,87	80,37	80,87	
407	JUMLAH UNIT KERJA YANG MEMENUHI KRITERIA ZI	POSITIF	UNIT KERJA	3,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	
408	NILAI PENJAMINAN KUALITAS MATURITAS SPIP	POSITIF	NILAI	4,328	4,350	4,370	4,380	4,390	4,400	4,410	
	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
409	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT OLEH APARAT NEGARA	POSITIF	NILAI	97,74	97,74	97,75	97,76	97,77	97,78	97,79	
410	NILAI DIMENSI EKONOMI PADA INDEKS HARMONI INDONESIA (IHAI) BANTEN	POSITIF	NILAI	-	5,85	5,87	5,90	5,92	5,93	5,95	
411	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM PEMILU UNTUK	POSITIF	NILAI	97,80	97,80	97,83	97,85	97,88	97,90	97,92	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SELURUH KELOMPOK MASYARAKAT										
412	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERSERIKAT, BERPENDAPAT DAN BERKEYAKINAN DALAM SETIAP KEBIJAKAN	POSITIF	NILAI	55,23	70,00	75,00	75,50	75,60	75,70	75,75	
413	NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) BANTEN DALAM ASPEK KEBEBASAN PADA INDIKATOR TERJAMINNYA KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT ANTAR MASYARAKAT	POSITIF	NILAI	96,24	98,24	98,26	98,28	98,29	98,40	98,50	
414	PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG AKTIF MENGIKUTI KEGIATAN ORGANISASI DALAM SETAHUN TERAKHIR	POSITIF	PERSENTASE	5,51	5,70	6,00	6,30	6,90	7,20	7,50	

Sumber: Diolah oleh Bappeda, 2025

BAB V
PENUTUP

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan Tahun 2025-2030 yang memberikan arah pembangunan daerah melalui kerangka kerja arah kebijakan yang dianalisis secara terukur dalam berbagai aspek pengembangan wilayah dan pengembangan sektoral lainnya telah disusun secara teknokratik, menjaring aspirasi dari berbagai pihak berkepentingan, memperhatikan aspirasi politis, dan aspirasi *top-down* dan *bottom-up* melalui pendekatan secara tematik-holistik, integratif dan spasial menjadi instrumen penting dalam implementasi rencana pembangunan dan pengembangan wilayah Provinsi Banten 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen ini disusun mengacu pada RPJPD Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025–2029, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Visi, misi, dan kerangka kerja daerah dalam RPJMD telah diselaraskan dengan visi, misi, arah kebijakan dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD akan menjadi pedoman dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Provinsi Banten, dan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

5.1 PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN RPJMD

Pengarusutamaan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 menjadi strategi utama untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pengarusutamaan pembangunan diarahkan untuk mengatasi tantangan struktural, seperti ketimpangan antarwilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Dalam pelaksanaannya, pengarusutamaan pembangunan diterapkan secara lintas sektor dan lintas pelaku, dengan mengintegrasikan kebijakan dan program prioritas nasional ke dalam kebijakan sektoral dan kewilayahan. Hal ini mencakup penguatan koordinasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dan dunia usaha.

Pembangunan daerah ke depan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan dan kesetaraan bagi semua. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 mengedepankan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan dan penguatan nilai-budaya sebagai fondasi utama—seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya—mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan pembangunan yang berpihak dan tidak meninggalkan siapa pun (*no one left behind*) sebagai prinsip utama. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjamin distribusi manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana cita-cita besar Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam menjadikan Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi.

Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 mengarusutamakan pencapaian target-target pembangunan global secara terpadu, terukur, dan adaptif terhadap dinamika daerah, melalui pendekatan yang berbasis bukti. Penguatan tata kelola pembangunan berbasis data dan transformasi digital menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, serta inovasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital juga didorong untuk mempercepat reformasi birokrasi dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berbasis pengetahuan.

Di sisi lain, aspek keberlanjutan menjadi elemen strategis dengan diarusutamakannya pendekatan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim serta resiliensi terhadap bencana. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 menekankan pentingnya sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui efisiensi energi, transisi energi bersih, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dan institusi terhadap risiko iklim serta resiliensi terhadap bencana. Integrasi kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan secara holistik.

5.2 KAIDAH PEMBIAYAAN

Upaya mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dalam menjadikan Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi yang hilirnya untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dalam menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju, menurunnya tingkat kemiskinan, semakin berkurangnya ketimpangan, menjadikan negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, menjadikan negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, dan menjadikan negara yang berkomitmen dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai hal tersebut maka memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai bagi pencapaian target pembangunan, pembiayaan pembangunan disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan kapasitas pembiayaan dalam mencapai cita-cita besar tersebut, melalui pengembangan inovasi pembiayaan selain APBD dan APBN (sinergi pendanaan pusat-daerah) baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan pembiayaan yang baru, pembiayaan kreatif (*creative financing*), optimalisasi peran sektor keuangan, dan sumber pendanaan inovatif lainnya yang sah secara peraturan perundang-undangan.

5.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Dalam rangka mengawal implementasi RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi *ex-ante* dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan kecukupan desain kebijakan, pengendalian dan evaluasi perencanaan mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko. Pengendalian dan evaluasi dalam tahap perencanaan memperhatikan kedudukan RPJMD sebagai: (i) instrumen operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (ii) pedoman bagi tersusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sementara pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode pelaksanaan rencana dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD menjadi penekanan dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 secara intensif. Dari hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD serta memperhatikan dinamika baik yang dipengaruhi oleh kebijakan nasional maupun daerah maka dimungkinkan adanya penyesuaian terhadap dokumen ini.

Pada tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD dilakukan evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Evaluasi akhir RPJMD dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun. Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang mencakup evaluasi kinerja pembangunan serta evaluasi kebijakan/program strategis. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan untuk perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya dalam kerangka RPJPD 2025-2045.

Pemerintah Provinsi Banten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Provinsi Banten.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodesasi RPJMN dan RPJMD selama 20 tahun ke depan yaitu, 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045. Pada tahap pertama RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, bahwa periodesasi RPJMD adalah tahun 2025-2029. Pada dokumen ini telah memuat rencana kinerja pemerintah daerah sampai dengan tahun 2030 sebagai penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan Tahun 2025-2030 sehingga memudahkan proses transisi pemerintahan daerah selanjutnya.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002